



**PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024





SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penusunan Rencana Kerja	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	30
2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD	36
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	50
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
4.1 Rencana Kerja.....	73
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Kelender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024....	4
Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2023	16
Tabel 2.2	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi dan Capaian Indikator	30
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	33
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	51
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024....	55
Tabel 3.1	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	63
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota	69
Tabel 4.1	Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).....	69
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat program kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, perencanaan merupakan tahapan awal yang akan menentukan hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan. Program/Kegiatan yang direncanakan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal dan tidak jauh meleset dari yang diharapkan oleh pelaksana.

Terkait dengan perencanaan program/kegiatan pembangunan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 7 ayat 2 (dua) di katakan bahwa “Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian dan Kasubag yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan Rencana Kerja.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja;

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/Bapelitbang-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. Pada awal bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan berbagai sosialisasi mengenai persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah oleh tim penyusun pada Sub Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pada tanggal 21 Desember 2022 diadakan Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja mencakup analisis gambaran

pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan;
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan Ranwal berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																														
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																			
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																			
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																			
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																			
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																			
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																			
1	Pelaksanaan Forum PD Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah																																			
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																			
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada																																			

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	RKPD																												
F	Penetapan Renja PD 2024																												
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																												
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																												
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																												
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																												
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																												

III. Penyusunan Rancangan Renja;

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Penyajian Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang diatur oleh Bapelitbang, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Adapun forum OPD Sekretariat Daerah dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir Renja;

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. Penetapan.

Dalam hal penetapan Rencana Kerja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Rencana Kerja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati. Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yakni sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS).

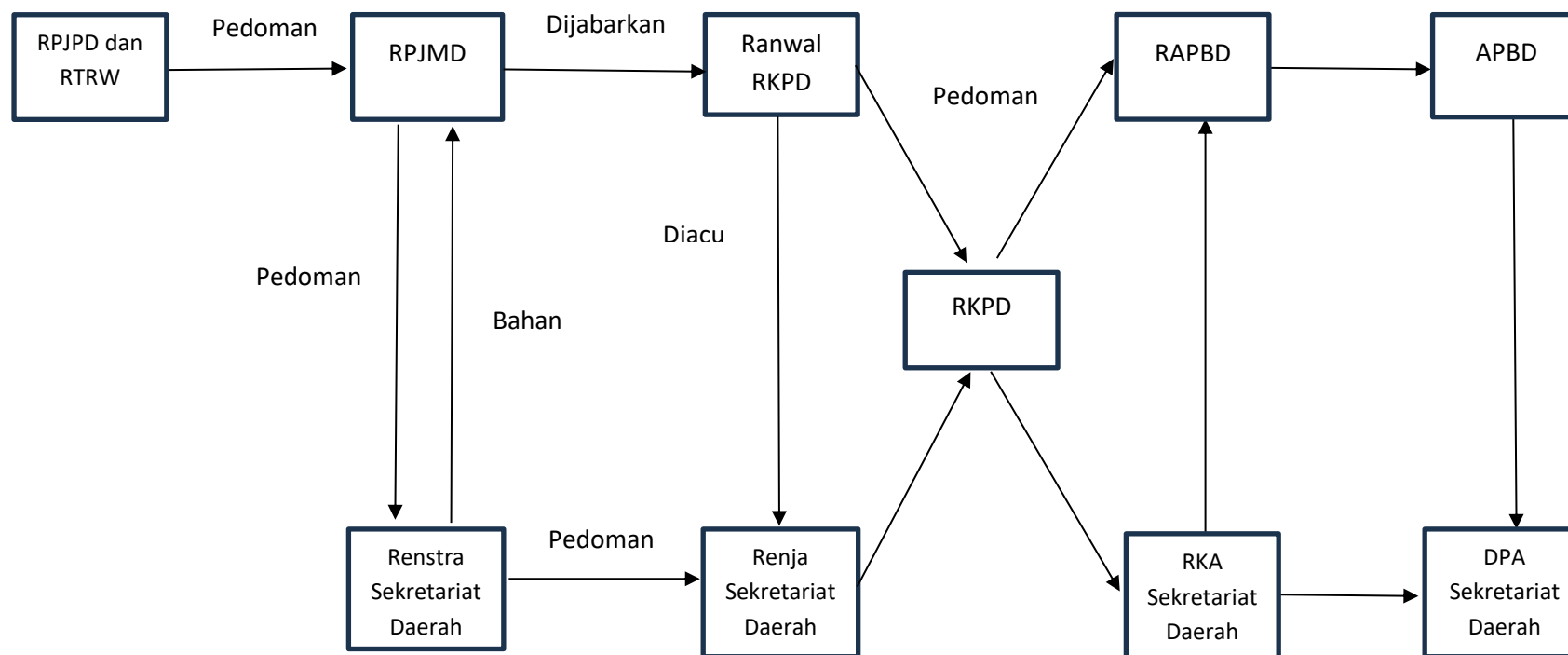
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Dilanjutkan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan

masuk untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah Pusat/Provinsi.

Adapun keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada Bagan berikut :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Rencana kerja 2024 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja ini adalah :

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .

- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen RKPD serta sistematika laporan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang Tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 serta pendanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 15) pada Tahun Anggaran 2023, memiliki 3 (Tiga) Program yang diwujudkan dengan 20 (Delapan Belas) Kegiatan dan 75 (Enam Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dimana pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sampai pada tahun 2022 sudah berjalan dengan baik.

Untuk lebih rinci yang menampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Rencana Kerja SKPD tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	24%	23%	96%	18%	61%	61%
4	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	20%	19%	20%	104%	20%	60%	60%
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625 orang	126 orang	125 orang	126 orang	100%	125 orang	377 orang	60 %
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	625 dokumen	120 dokumen	105 dokumen	125 dokumen	119 %	125 dokumen	370 dokumen	59 %
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan AKhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	51 dokumen	60%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%

4	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40%	40%	40%	100%	7%	100%	87%
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	60%
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 aparatur	200 aparatur	200 aparatur	200 aparatur	100%	0	400 aparatur	100 %
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	100%	0	80 aparatur	100%
4	01	01	2.06		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	60%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.07		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	7%	42%	40%	95%	7%	54%	54%
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	2 unit	50%

4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 unit	-	4 unit	4 unit	100%	-	8 unit	100%
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	15 unit	3 unit	4 unit	3 unit	75%	3 unit	9 unit	60%
4	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	19%	20%	20%	100%	20%	59%	59%
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	35 unit	4 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	18 unit	51%
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	360 unit	72 unit	72 unit	72 unit	100%	72 unit	216 unit	60%
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 unit	18 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	54 unit	60%

4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	12 unit	60%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	150 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	90 unit	60%
4	01	01	2.11		Kegiatan : Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase terlaksana adminitrasi keuangan dan operasional KDH	100%	15%	15%	10%	67%	23%	48%	48%
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH/ wakil KDH	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	60 paket	0	0	0	0	20 paket	20 paket	33 %
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang	2 orang	2 orang	0	0%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.12		Kegiatan : Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumah tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	60%

4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
4	01	01	2.13		Kegiatan : Penataan Organisasi	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dokumen	60%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	60%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	60%
4	01	01	2.14		Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan potokol dan komunikasi pimpinan	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1800 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	1080 Laporan	60%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1800 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	1080 Laporan	60%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1800 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	1080	60%

													Laporan	
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	19%	21%	20%	95%	16%	55%	55%
4	01	02	2.01		Kegiatan : Administrasi Tata pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	20%	20%	19%	92%	20%	59%	59%
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	4 Dokumen	11 Dokumen	55%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	60%
4	01	02	2.02		Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	15%	20%	17%	85%	20%	52%	52%
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83%	12 Dokumen	31 Dokumen	52%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83%	12 Dokumen	31 Dokumen	52%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	92%	12 Dokumen	35 Dokumen	58%
4	01	02	2.03		Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	24%	24%	24%	100%	13%	61%	61%

4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Perda 40 Perbu 240 SK 470	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 100% Perbu 100% SK 100%	Perda 6 Perbu 10 SK 50	Perda 22 Perbu 80 SK 320	Perda 55% Perbu 33% SK 68%
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	3 kasus	2 kasus	2 kasus	100%	1 kasus	6 kasus	75%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	3 buku	60%
4	02	02	04		Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	18%	18%	20%	132%	11%	49%	49%
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	136 Dokumen	42 Dokumen	20 Dokumen	49 Dokumen	245%	16 Dokumen	107 Dokumen	79%
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	0 Dokumen	2 Dokumen	29%
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah kerjasama yang dievaluasi (laporan)	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	40%
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi an fasilitasi bidang perekonomian	100%	19%	19%	19%	100%	19%	57%	57%
4	01	03	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	17%	17%	17%	100%	17%	51%	51%
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	50%

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	50%
4	01	03	2.02		Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	60%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	01	03	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%	20%	20%	21%	105%	20%	61%	61%
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	260 orang	52 orang	52 orang	60 orang	115%	52 orang	164 orang	63%

4	01	03	2.04		Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Laporan penunjang kegiatan	100%	17%	17%	17%	100%	17%	51%	51%
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bapelitbang selama tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 96%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 96%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 95%.
- b. Kegiatan Administrasi keuangan dan opsional kepala daerah dan wakil kepala daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 67%.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 92%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 85%.

II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang realisasinya mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.

- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 6. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 7. Kegiatan Penataan Organisasi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
- III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bapelitbang selama tahun anggaran 2022, antara lain:
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 104%.
 2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 132%.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 105%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang disesuaikan dengan kriteria yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai dengan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta umum.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
4. Pelayanan Teknis Administratif Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dilihat dari kinerja pelayanan kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta pengembangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dilakukan, yang mencakup hal-hal positif yang berhasil ditingkatkan, masalah dan

tantangan yang dihadapi terkait pelayanan dan kondisi/prediksi pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan kedepan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 terdapat IKU Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu “ Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya saing yang berlandaskan keimanan. “

Penilaian indeks ABS-SBK dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, yang dimulai pada tahun 2022. Capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKU KD	IKU kepala PD	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun202 2 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)		Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun20 23 (thn n)	Tahun202 4 (thn n+1)
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks ABS-SBK		IKD	IKU Kepala PD	NA	1,5	1,7	1,8	1,76	1,7	1,8	Baru terlaksana di tahun 2022
2	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan				100%	100%	100%	100%	83,29%	100%	100%	
	2. indeks ABS-SBK				-	1,5	1,7	1,8	1,76	1,7	1,8	Baru terlaksana di tahun 2022
	3. Persentase jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH				100%	100%	100%	100%	99,62%	100%	100%	
3	4. Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)				80%	81%	82%	83%	81%	82%	83%	

	5. Persentase OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%				100%	100%	100%	100%	98,63%	100%	100%	
	6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku				85%	88%	90%	91%	97,11%	90%	91%	
4	7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik				100%	100%	100%	100%	95,52%	100%	100%	
	8. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja				67,2	68	70	71	95,31	70	71	
	9. Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku				100%	100%	100%	100%	99,22%	100%	100%	
	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia				9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	

Pada tahun 2022 penilaian indeks ABS-SBK belum dapat dilaksanakan karena regulasi sebagai pedoman penilaian belum ditetapkan, namun pada triwulan I tahun 2023 ini nilai Indeks ABS SBK sudah bisa di peroleh. Variabel indeks yang dinilai adalah :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
 - Indeks Pendidikan Al Qur'an
 - Indeks Peran PKBM
 - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
 - Indeks Kapasitas Guru Agama
 - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
 - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
 - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
 - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
 - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
3. Indeks Keuangan Sosial
 - Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
 - Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
 - Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
 - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
 - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
 - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
 - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
 - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
 - Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung)
 - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
 - Indeks fungsi organisasi pemuda
 - Indeks penguatan regulasi

Untuk mendukung IKU daerah tersebut beberapa kegiatan yang mendukung antara lain yaitu Kegiatan Baliak Basurau, dimana melalui kegiatan ini difasilitasi guru mengaji pada TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin Masjid sebanyak 3.403 orang. Fasilitas yang diberikan berupa honor yang nilainya mencapai Rp. 4,1 Milyar.

Disamping itu juga didukung oleh program unggulan daerah Satu Nagari Satu Rumah Tahfizh, dimana pada tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 20 unit rumah tahfizh sebagai rumah tahfizh binaan di Nagari dengan 40 orang guru yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/Mushalla tersebut.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan misi yang diemban Kepala Daerah terdapat beberapa misi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah yaitu : pada Misi ke-4 yaitu : 4 meningkatkan kualitas layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya. Adapun Pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2021-2024 sebagaimana pada tabel diatas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing bagian dilingkup Sekretariat Daerah memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain :

a. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Protokol

dan Komunikasi Pimpinan telah menjalankan fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan lebih dominan pada kegiatan Pimpinan yang pelaksanaannya dalam daerah, sementara untuk kegiatan luar daerah masih minim difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sementara untuk merealisasikan visi dan misi serta program unggulan Kepala Daerah sudah seyogyanya selaras dengan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi Pimpinan yang optimal. Dimana bagian Protokol dan komunikasi pimpinan ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan Kepala Daerah dan terwujudnya citra positif dari masyarakat terhadap pemerintah melalui fasilitasi layanan kedinasan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi rangkaian kegiatan KDH/WKDH. Dapat dikatakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah jembatan penghubung antara Kepala Daerah dengan Leading Sektor penyelenggara kegiatan. Dalam kata lain fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan ini melekat dan sejalan dengan Kegiatan pimpinan. Hal inilah yang harus dipahami bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Jika kegiatan Kepala Daerah dapat terfasilitasi, terdokumentasi dan terpublikasi dengan optimal, maka visi dan misi serta program unggulan dari Kepala Daerah dapat terpublikasi dan tersebar luas kepada masyarakat.

Pada Bagian Umum kinerja pelayanan telah mengalami peningkatan dilihat dari realisasi pencapaian, sasaran dan indikator kinerja. Namun dalam upaya menjalankan tugas pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu adanya peningkatan realisasi pencapaian kinerja. Dalam upaya pencapaian tujuan Bagian Umum yaitu terlaksananya pelayanan prima bagi pimpinan daerah dan tamu daerah. Koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah propinsi atau perangkat daerah lainnya serta Kementerian/Lembaga untuk pencapaian kinerja masih terbatas dilakukan hanya Lingkup Sekretariat Daerah, Bapelitbang dan Badan Keuangan terkait perencanaan dan penganggaran.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Hukum telah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan peraturan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan batuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Oleh karena itu Bagian Perencanaan dan Keuangan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan seperti terselenggaranya administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal sinergi dan koordinasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan dilingkup Sekretariat Daerah dengan berkonsultasi ke Badan Keuangan serta Inspektorat Kabupaten dalam rangka evaluasi dan pengawasan.

Pada umumnya kinerja pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengalami peningkatan dilihat dari realisasi pencapaian sasaran dan indikator kerja namun dalam upaya menjalankan tugas pelayanan kepada SKPD (Pelaku Pengadaan) perlu adanya peningkatan realisasi pencapaian kinerja. Hal ini sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan bagian pengadaan barang dan jasa yaitu terlaksananya pelayanan prima bagi SKPD (Pelaku Pengadaan).

Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah daerah provinsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk pencapaian kinerja masih terbatas. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yaitu : Pengelolaan LPSE, Pembinaan SDM, pendampingan advokasi tidak sepenuhnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Dapat juga dilihat Bagian Pemerintahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
4. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
5. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
7. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau
8. Peningkatan partisipasi daerah dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
9. Pelaksanaan fasilitasi peninjauan kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam bentuk KSDPL maupun KSDLL
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah difasilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam bentuk kegiatan :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam.

Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi lembaga berupaya mewujudkan dan menjalankan visi dan misi daerah sebagai komitmen bersama. Upaya yang dilakukan merupakan tindakan preventif dan antisipatif sebagai langkah pengendalian terhadap berbagai permasalahan dibidang Pemerintahan secara Umum yang perlu dilakukan pembenahan dan pengaturan melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit. Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dari tahun sebelumnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah–langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dibagian organisasi dapat dilihat dari koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah lainnya serta kementerian/lembaga dilakukan untuk pencapaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas dan efektif agar penganggaran. Saat ini lemahnya koordinasi dan komitmen Perangkat Daerah dalam menggunakan sistem penyelenggaran Perangkat Daerah.

Pada Bagian Kesra sebagaimana tugas pokok dan fungsi, maka tugas Bagian Kesra adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tugas pokok tersebut maka salah satu Bagian Kesra adalah pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu peningkatan penerapan agama, adat dan

budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat tersebut diperlukan instrumen dalam bentuk Indeks ABS-SBK. Agar instrumen dimaksud bisa dilaksanakan maka harus ditetapkan dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK.

Disamping itu untuk mendukung Visi dan Misi daerah, Bagian Kesra juga melaksanakan program unggulan "*satu nagari satu rumah tahfizh*". Oleh karena itu target rumah tahfizh yang dibina adalah 79 unit yang tersebar dimasing-masing Nagari. Untuk mendukung Program ini telah dilahirkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman OPD dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap tugas dan fungsi.
2. Kurangnya koordinasi leading sektor pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai pelaksanaan acara yang dihadiri oleh pimpinan.
3. Belum optimalnya koordinasi leading sektor dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai penyiapan bahan komunikasi pimpinan.
4. Belum memadainya peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah.
5. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran di beberapa bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kurangnya inovasi dan disiplin ASN di lingkup Pemda Lima Puluh Kota.
7. Kurangnya tenaga fungsional dibidang perancang peraturan perundang-undangan dan minimnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perancang peraturan perundang-undangan.
8. Belum memadainya Sarana dan Prasarana yang ada pada beberapa

bagian yang ada di Sekretariat Daerah.

9. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, seperti pelaksanaan advokasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kontrak, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh personil di UKPBJ.
10. Belum optimalnya SKPD dalam melakukan penetapan perencanaan pengadaan seperti penetapan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Aplikasi Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
11. Belum optimalnya Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pengendalian kontrak.
12. Belum maksimalnya pemahaman SKPD dalam melaksanakan prioritas belanja menggunakan Katalog Elektronik Lokal.
13. Belum optimalnya koordinasi terkait penyediaan data dari perangkat daerah dalam rangka penyusunan kebijakan Perekonomian dan SDA.
20. Belum optimalnya perangkat daerah dalam rangka menyikapi program kerja pemerintah untuk kegiatan percepatan penurunan inflasi.
21. Belum optimalnya pengawasan terhadap pupuk/pestisida bersubsidi.
22. Belum optimalnya dilakukan pembinaan terhadap BLUD karena kegiatannya baru dilaksanakan mulai tahun 2022.
23. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
24. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
25. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
26. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
27. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
28. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
29. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan

perantau

30. Peningkatan partisipasi daerah dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
31. Pelaksanaan fasilitasi penjajakan kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam bentuk KSDPL maupun KSDLL
32. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah difasilitasi
33. Program yang digunakan pada Restra periode sebelumnya belum mampu mempresentasikan tugas secara optimal.
34. Belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan/ kebijakan daerah.
35. Belum optimalnya input informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
36. Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
37. Masih kurangnya Kapasitas SDM Sehingga belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara optimal.
38. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
39. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilaksanakan dengan stakeholders terutama lembaga-lembaga keagamaan, yang mengakibatkan sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan optimal seperti pelaksanaan MTQ yang menyebabkan prestasi kafilah Kab. Lima Puluh Kota cukup rendah.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

1. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah jika permasalahan dan hambatan tidak segera diminimalkan.
2. Kurang optimalnya layanan ke pimpinan berdampak terhadap pelaksanaan acara Bupati serta berpotensi terhambatnya informasi sampai ke masyarakat tentang pelaksanaan visi misi kepala Daerah.

3. Tidak terpenuhinya semua kebutuhan sarana dan prasarana di beberapa bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
4. Dampak bagi visi dan misi Kepala Daerah diantaranya adalah, karena terkendala dalam Sumber Daya Manusia para pengelola keuangan yang belum memahami penatausahaan, belum menguasai aplikasi dan memahami aturan yang berlaku, sehingga berdampak pada visi dan misi Kepala Daerah yang tidak optimal.
5. Dampak bagi visi dan misi kepala daerah Kurang maksimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi tujuan dan prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Dampak yang dihadapi oleh beberapa bagian bila kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama semua stakeholders adalah akan terhambatnya pelaksanaan kebijakan dan upaya peningkatan perekonomian daerah dan kebijakan di bidang SDA.
7. Dampak yang dihadapi oleh Bagian pemerintahan adanya perbedaan aturan yang mengatur tentang kerjasama dari beberapa kementerian dengan kerjasama yang bersifat teknis yang mengakibatkan lambatnya/belum dapat mewujudkan kerjasama yang akan dibangun, Kurangnya Komitmen Perangkat Daerah merencanakan dan melaksanakan Kerja Sama yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
8. Dampak yang dihadapi oleh Bagian Kesra adalah akibat dari permasalahan yang ada maka kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesra dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah akan terkendala terutama yang terkait dengan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan yang dihadapi dalam fasilitasi kegiatan pimpinan yaitu semakin berkembangnya teknologi dan informasi terkait penyebaran informasi publik ditengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Peluang yang dimiliki adalah dengan semakin berkembangnya sosial media menjadi media alternatif yang dimanfaatkan dalam menyajikan informasi terkait kegiatan Kepala Daerah.

2. Tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, Perkembangan IPTEK yang tidak disertai dengan kesiapan SDM sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal (karena tidak profesional) serta Peningkatan kompetensi SDM.

Peluang yang dimiliki yaitu Perlunya koordinasi/kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta pemenuhan anggaran dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

3. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga/ aparaturnya yang memiliki kualifikasi terhadap Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui pengusulan ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Peluang yang dimiliki adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum melalui Bimtek dan Sosialisasi.

4. Tantangan yang dihadapi dalam Penyusunan Produk Hukum dan Informasi Hukum yaitu semakin berkembangnya teknologi dan informasi terkait penyebarluasan informasi publik tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Peluang yang dimiliki adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana dalam bentuk optimalisasi penyediaan perangkat elektronik seperti infocus, laptop, komputer serta persiapan dokumen yang representatif serta tenaga ITE dalam pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

5. Tantangan yang dihadapi adalah tuntutan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, Kemajuan Teknologi, serta SDM yang masih terbatas.

Peluang yang dimiliki adalah Birokrasi yang masih sangat dibutuhkan masyarakat, Reformasi pelayanan publik, pemenuhan sarana.

6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya regulasi baru dan perkembangan kondisi terkini diharapkan seluruh aparat yang terkait pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi :
 - a. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di UKPBJ.
 - b. Perkembangan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang sangat dinamis.
 - c. Peningkatan kompetensi SDM Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
Peluang yang dimiliki adalah jumlah Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di UKPBJ.
8. Tantangan yang dihadapi adalah terbitnya berbagai aturan baru dalam pemenuhan kebijakan terkait Perekonomian dan SDA yang harus segera disikapi oleh pemerintah Daerah dengan cepat.
Peluang yang dimiliki adalah Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
Belum terbangunnya komunikasi yang baik pada tiap bagian-bagian dalam urusan menjalankan mekanisme perencanaan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi daerah terutama terkait koordinasi dengan lembaga eksternal baik itu dengan instansi vertikal ataupun dengan

lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terkendala.

Peluang yang dimiliki adalah dalam pelaksanaan tugas makin antusias masyarakat dalam menyambut program unggulan daerah terutama program satu nagari satu rumah tahfizh. Disamping itu juga antusiasnya masyarakat untuk meminta dana hibah untuk pengembangan masjid dan mushala serta lembaga-lembaga keagamaan.

e. Formulasi isu-isu penting dalam pelayanan Perangkat Daerah

1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan merupakan unit kerja yang memfasilitasi layanan keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan. tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melekat pada kegiatan Kepala Daerah. Perlu kiranya Pemerintah Daerah memperhatikan tugas dan fungsi protokol agar kedepannya setiap kegiatan Kepala Daerah terfasilitasi dengan baik sesuai dengan aturan keprotokolan. Selain itu, sudah seyogyanya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terkait anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, agar dapat bekerja optimal dalam memfasilitasi Kegiatan Kepala Daerah. Dikarenakan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melekat pada Kegiatan Kepala Daerah.
2. Formulasi isu-isu penting Bagian Umum berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Penambahan anggaran untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor, kendaraan dinas operasional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui diklat.
3. Bagian Hukum merupakan unit kerja yang memfasilitasi layanan penyusun produk hukum, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Informasi Produk Hukum. tugas dan fungsi Bagian Hukum melekat pada kegiatan Kepala Daerah. Perlu kiranya Pemerintah Daerah memperhatikan tugas dan fungsi Hukum agar kedepannya setiap kegiatan Kepala Daerah terfasilitasi dengan baik sesuai dengan aturan. Selain itu,

sudah seyogyanya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terkait anggaran pada Bagian Hukum, agar dapat bekerja optimal dalam memfasilitasi Pelaksanaan Harmonisasi Produk-Produk Hukum Daerah.

4. Bagian Hukum merupakan unit kerja yang membutuhkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia terhadap tenaga perancang perturan perundang-undangan.
5. Formulasi isu-isu penting Bagian Hukum adalah pemenuhan sumber daya manusia terutama terhadap tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan untuk pemenuhan sarana prasarana optimalisasi kegiatan.
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mengelola keuangan di Sekretariat Daerah, dalam hal ini tugas dan fungsinya adalah kegiatan rutin yang ada disetiap OPD, Formulasi dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam Melaksanakan tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan yang bersih dan akuntabel adalah Mengoptimalkan penatausahaan keuangan dengan berbasis teknologi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Transaksi Non Tunai.
7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumasan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dibagian pengadaan barang dan jasa adalah :
 - a. Perlunya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pengadaan.
 - b. Prioritas belanja di SKPD yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Lokal.
 - c. Rasionalisasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di UKPBJ.
8. Bagian organisasi merupakan unit kerja yang memfasilitasi Penyusunan tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara utuh dan

komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi, Refitalisasi peran Perangkat Daerah dalam manajemen pembangunan daerah, Perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Peningkatan sinergi penyelenggaraan pemerintah dari level terendah hingga pusat, Peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana.

9. Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagian yang melakukan koordinasi dengan instansi/dinas teknis yang berhubungan kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan SDA.

Isu-isu strategis dihadapi oleh Bagian Perekonomian dan SDA saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur terkait kebijakan perekonomian dan kebijakan SDA yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan aturan-aturan yang sebelumnya telah disusun.
 - b. Kuantitas dan Kapasitas SDM Bagian Perekonomian dan SDA yang masih kurang dan perlu ditingkatkan.
 - c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - d. Belum optimalnya koordinasi seluruh stakeholders terkait untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA.
10. Selanjutnya selain dari isu-isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (Renja), Bagian Pemerintahan juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait padang bagian pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
 - c. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

11. Dibagian Kesejahteraan Rakyat Untuk meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat maka perlu peningkatan beberapa komponen antara lain :
- a. Peningkatan sumber daya manusia keagamaan
 - b. Peningkatan Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan
 - c. Meningkatkan pengelolaan keuangan sosial yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.
 - d. Peningkatan SDM adat dan budaya
 - e. Peningkatan kelembagaan adat dan budaya.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antar rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, rumusan-rumusan serta besaran-besaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD tidak terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	setda	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	43.448.244.079	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	setda	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.865.032.466	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	-	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	47.625.400	Ada kegiatan baru
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	14.957.068.345	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	12.257.184.522	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi barang milik daerah	100%	-	3 Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi barang milik daerah	100%	-	Ada kegiatan baru
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	610.449.838	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.264.607.198	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.557.344.200	Ada sub kegiatan baru
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	7.787.534.764	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	2.601.804.800	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.550.991.491	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.746.260.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	5.521.857.527	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	1.718.662.500	Ada sub kegiatan baru
	9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	779.242.549	9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	846.509.194	
	10 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan KDH, wakil KDH dan Sekda	100%	4.156.546.579	10 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan KDH, wakil KDH dan Sekda	100%	1.284.586.000	
	11 Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen Analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	439.896.690	11 Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen Analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	164.999.600	
	12 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Persentase Pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	380.049.098	12 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Persentase terfasilitasinya dan terlayannya kegiatan KDH dan WKDH	100%	1.640.056.000	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase terlaksananya koordinasinya Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	9.051.983.909	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	9.683.069.400	
	13 Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	1.144.631.470	13 Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	141.902.600	
	14 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	6.824.503.300	14 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	8.990.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
	15 Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	656.674.936	15 Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	277.870.300	
	16 Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	426.174.203	16 Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	272.896.500	
3	Program Perekonomian dan pembangunan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasui perekonomian	100%	1.471.836.145	Program Perekonomian dan pembangunan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasui perekonomian	100%	557.019.700	
	17 Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	223.160.233	17 Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	148.479.000	
	18 Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Setda	Laporan Penunjang Kegiatan	1 Lap	170.656.846	18 Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Setda	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kgiatan	1 Laporan	76.142.000	
	19 Pelaksanaan Administrsi pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	100%	527.729.751	19 Pelaksanaan Administrsi pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	100%	169.898.700	
	20 Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	94%	550.289.315	20 Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	94%	162.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Propinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretariat Daerah khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat Nagari, Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

Lebih dari itu, usulan program dan kegiatan juga dapat berasal dari aspirasi masyarakat yang tersalur melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (Pokok Pikiran). Adapun aspirasi masyarakat yang dirangkum oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dari Musrenbang dan pikir dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		CATATAN
1	2	3	4	5		6
1	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jorong Kampuang Baru, Nagari Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	unit	Musrenbang
2		Nagari Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota		1	tahun	Musrenbang
3	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nagari Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
4		Nagari Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Nagari Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
6		Nagari Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
7		Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
8		Nagari Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
9		Jorong Boncah, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
10		Nagari Limbanang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
11		Jorong kot Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, Jorong Sungai Nyanyiang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
12		Jorong Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
13		Jorong Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
14		Jorong Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
15		Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
16		Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
17		Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
18		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
19		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
20		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang
21		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota		1	Tahun	Musrenbang

	Kota
54	Mushalla Sarul Iman Jorong Balai Gadang Ateh Mungo, Kab. Lima Puluh Kota
55	Masjid Darul Falah Jorong Padang Mangunai Nagari Ampalu, Kab. Lima Puluh Kota
56	Kecamatan Luak, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota
57	Nag. Koto Lamo, Kab. Lima Puluh Kota
58	Nag. Sialang, Kab. Lima Puluh Kota
59	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota
60	Jrg. Simpang Empat Nag. Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota
61	Jrg. Lareh Nan Panjang Nag. Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota
62	Jrg. Padang Belimbing Nag. Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota
63	Jrg. Rogeh Nag. Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota
64	Nag. Batu Payuang, Kab. Lima Puluh Kota
65	Nag. Balai Panjang, Kab. Lima Puluh Kota
66	Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota
67	Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota
68	JORONG CINTA MAJU NAGARI DURIAN TINGGI, Kab. Lima Puluh Kota
69	JORONG CINTA MAJU NAGARI DURIAN TINGGI, Kab. Lima Puluh Kota
70	JORONG KAMPUNG DALAM, NAGARI MUARO PAITI KEC. KAPUR IX, Kab. Lima Puluh Kota
71	JORONG SIMPANG EMPAT TANJUNG PATI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU, Kab. Lima Puluh Kota
72	JORONG SIMPANG EMPAT TANJUNG PATI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU, Kab. Lima Puluh Kota
73	sijangkang nagari tarantang kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota
74	jorong lubuak batingkok kec harau, Kab. Lima Puluh Kota
75	Mushalla Mubarogh Jorong Toreh Nagari Balai Panjang, Kab. Lima Puluh Kota
76	Masjid Wustha jorong Pincuran Tinggi nagari Mungo, Kab. Lima Puluh Kota
77	Mushalla Al Hidayah Jorong Padang Mangunai Nagari Ampalu, Kab. Lima Puluh Kota
78	Mushalla Nurul Ikhlas Gantiang jorong padang balimbiang nagari bukik

1	unit	Pokir
1	unit	Pokir
50	orang	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
20	orang	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
1	Unit	Pokir
1	unit	Pokir
1	paket	Pokir
1	paket	Pokir
1	paket	Pokir
1	set	Pokir
1	unit	Pokir
1	unit	Pokir
1	unit	Pokir
1	paket	Pokir
1	paket	Pokir
1	paket	Pokir
1	unit	Pokir
1	unit	Pokir

		Lima Puluh Kota			
101		Jorong Batu Balabuah I Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota		1	unit Pokir
102		dusun bukik limau jorong sarilamak nagari sarilamak kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota		1	paket Pokir
103		kampung jolu jorong cinta maju nagari durian tinggi kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		1	unit Pokir
104		Kampung Panjang Jorong Bintungan Sakti nagari durian tinggi kec.kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		1	unit Pokir
105		Jorong guguk nunang nagari sungai talang kec.guguk, Kab. Lima Puluh Kota		1	unit Pokir
106		Tanjung pati nagari koto tuo kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota		1	unit Pokir

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan yang terbanyak terdapat pada pokir dan musrenbang berupa bantuan hibah untuk Mesjid, Mushola, Lembaga Keagamaan (Rumah Tahfizh/TPQ/MDTA) dan Hibah untuk kelompok masyarakat yang beraktifitas di bidang keagamaan (Kelompok Yasin/BKMT), yang tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah. Maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang mendukung misi tersebut diantaranya :

1. Program Reformasi Birokrasi, dengan Kegiatan-kegiatan : Penyusunan Road Map Reformasi birokrasi. Program ini memfasilitasi program nasional dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan keselarasan dokumen road map reformasi birokrasi dengan RPJMD. Kegiatan Restrukturisasi/penataan Tugas dan Fungsi OPD serta Penyusunan Aplikasi *e-kelembagaan* Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya peningkatan kualitas IKM dan Indeks Reformasi Birokrasi, serta Pelaksanaan PATEN untuk pelayanan Publik di tingkat.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan Program Penataan Otonomi Daerah, dengan Kegiatan-kegiatan diantaranya : Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu : Peningkatan nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota di tingkat Nasional, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga

3. Beberapa Program dibidang peningkatan kerjasama daerah, Peningkatan Promosi Daerah di event-event tingkat Propinsi dan Nasional, Program Pengembangan kemitraan di bidang Pariwisata, dan lain-lain.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan *stakeholder* maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam rencana strategis Sekretariat Daerah, sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN dan disesuaikan dengan visi dan misi dari KDH terpilih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Secara Umum tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah nagari yang bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah secara internal dan eksternal.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian program dengan memanfaatkan sistem informasi.
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Secara khusus tujuan dan sasaran Rencana Kerja ini mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu :

A. Tujuan

Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas.

B. Sasaran

1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian.
3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien.

3.3. Program dan Kegiatan (di tahun 2024 dalam Renstra)

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati terpilih, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019.

Tabel. 3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
I.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERA	1.	Administrasi Tata Pemerintahan	1	Penataan Administrasi Pemerintahan
				2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
AN RAKYAT		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		8	Fasilitasi Bantuan Hukum
		9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		11	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		12	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
II. PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN	5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		14	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		15	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikrokecil
		16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
		17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
	6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	18	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		19	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		20	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	21	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		22	Pengelolaan layanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		pengandaan secara elektronik
		23 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	8. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	24 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
		25 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		26 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		28 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		30 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		32 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		33 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	11. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	34 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Daerah
		35 Pengamanan Barang Milik Daerah
		36 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		38 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		39 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		40 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	13. Administrasi Umum Perangkat Daerah	41 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		42 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		43 Fasilitasi Kunjungan Tamu
		44 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		45 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		47 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Lapangan
		48 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		51 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		52 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		54 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		55 Pemeliharaan Mebel
		56 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		57 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		58 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		59 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		60 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
	17. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	61 Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/wakil KDH
		62 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		63 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		64 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	18. Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	65 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		66 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		67 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	19. Penataan Organisasi	68 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		69 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		70 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		71 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		72 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	20. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	73 Fasilitasi Keprotokolan
		74 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		75 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Adapun identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah berdasarkan Analisa data capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian kinerja tahun 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	IKU KDH indeks ABS-SBK	Tercapai	Baru terlaksana ditahun 2022	Nilai indeks ABS-SBK
	IKU kepala OPD Tahun 2021			
	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan	Tercapai	-	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan
	2. indeks ABS-SBK	Tercapai	Baru terlaksana ditahun 2022	Nilai indeks ABS-SBK
	3. Persentase jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	Tercapai	-	produk Hukum Daerah yang dipublikasikan

	melalui JDIH			melalui JDIH
	4. Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)	Tercapai	-	Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian
	5. Persentase OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	Tercapai	-	OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%
	6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku	Tercapai	-	Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
	7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik	Tercapai	-	Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik
	8. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Tercapai	-	Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
	9. Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapai	-	Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Tercapai	-	Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia

Pada tahun 2022 rasio tempat ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai 1:251, hal ini berarti bahwa untuk 1 Masjid/Mushalla untuk 251 orang penduduk. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 388.375 Jiwa, sedangkan jumlah rumah ibadah

sebanyak 1.550 unit yang terdiri dari 430 unit Masjid dan 1.120 Mushalla. Sedangkan tempat ibadah selain umat Islam tidak ada karena persentase penduduk muslim di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 98%.

Dari data di atas disimpulkan bahwa ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan kebutuhan dibanding dengan jumlah penduduk. Sedangkan kondisi rumah ibadah rata-rata sudah cukup bagus dan memenuhi standar. Hal ini karena kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap kondisi rumah ibadah tersebut. Disamping itu perhatian pemerintah daerah juga cukup bagus, dimana setiap tahun melalui anggaran hibah, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan untuk rumah ibadah di setiap Nagari. Pada tahun 2022 Anggaran hibah yang dialokasikan mencapai 1,14 M.

Secara umum tidak ada permasalahan pada rumah ibadah, khususnya yang terkait dengan bangunan fisik, namun perlu perhatian pemerintah bersama masyarakat terutama pada WC dan sanitasi. Dimana pada sebagian nagari, WC di tempat ibadah dijadikan WC komunal yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu perhatian dan pembinaan dari pemerintah nagari, kecamatan dan kabupaten agar WC dan sanitasi di tempat ibadah tersebut sesuai dengan standar kesehatan.

Pada Tahun 2024 Bagian Umum ada penambahan 1 Kegiatan Baru yaitu Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dimana terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. 1 (satu) Sub Kegiatan baru pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD dan 1 (satu) Sub Kegiatan Baru pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah. Penambahan Sub. Kegiatan ini bertujuan supaya lebih tertibnya Penatausahaan Barang Milik

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan agar tertibnya Penatausahaan Arsip dilingkup Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2024 Bagian Perencanaan dan Keuangan ada penambahan 1 Kegiatan Baru yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan baru yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Penambahan kegiatan baru dan Sub. Kegiatan baru ini bertujuan supaya lebih terjaminnya kelancaran tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024 Bagian Perekonomian ada pengurangan 2 Sub. Kegiatan yaitu Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD dan juga Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD. Pengurangan 2 Sub. Kegiatan tersebut karna alokasi dana dibagian perekonomian yang minim dan dapat di handle dalam satu kegiatan.

Seluruh pendanaan kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 pada dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Sekretariat Daerah ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran yang berbasis kinerja. Sekretariat Daerah yang merupakan OPD dengan tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif terhadap OPD dan seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian Sekretariat Daerah mempunyai rencana kerja dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024, dan Prakiraan Maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Daerah telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seluruh pendanaan kegiatan masing- masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Sekretariat Daerah dalam hal melaksanakan Misi yang diemban Kepala Daerah terdapat beberapa Misi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah, yaitu : pada Misi ke- 4 yaitu : 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya. Adapun Rencana Kinerja OPD tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Untuk pedoman pada tahun 2024 di Sekretariat Daerah terdapat dalam Urusan Pemerintah yang mempunyai 3 Program dan 20 Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **35.105.121.566,-** dan ditahun 2025 pagunya sebesar Rp. **50.168.285.689,-**. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Perdanaan Berdasarkan Urusan,
Jumlah Program dan KegiatanTahun 2024

	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket .
		Program			Kegiatan			
		Jml	Total pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Jml	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	3	35.105.121.566	50.168.285.689	19	35.105.121.566	50.168.285.689	
Total		3	35.105.121.566	50.168.285.689	19	35.105.121.566	50.168.285.689	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						35.105.121.566,00							50.168.285.689,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.105.121.566,00							50.168.285.689,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						35.105.121.566,00							50.168.285.689,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	24.865.032.466,00						-	44.981.160.675,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			100 %	47.625.400,00			-	-	-	-	158.948.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	21.252.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		131.256.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	26.373.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.692.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	-			100 %	12.257.184.522,00			-	-	-	-	15.159.150.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	11.977.396.922,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.240.320.117,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				120 Dokumen	137.935.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		579.545.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18.317.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.353.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				17 Laporan	103.443.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		208.601.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	20.091.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.330.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib Administrasi barang milik daerah</i>	-			100 %	0,00			-	-	-	-	331.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	0,00			-	-	-	-	205.952.892,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				200 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.407.942,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				80 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.544.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	1.557.344.200,00			-	-	-	-	3.437.566.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	77.683.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		179.324.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.640.200,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.720.892,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	885.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.592.832.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	554.021.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.440.689.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	2.601.804.800,00			-	-	-	-	7.772.993.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1.909.844.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.686.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	230.279.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.400.127.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	461.680.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		686.696.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	2.746.260.250,00			-	-	-	-	3.571.003.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.438.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	666.891.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.295.481.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	69.626.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		776.315.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.007.743.250,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.472.767.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	1.718.662.500,00			-	-	-	-	5.708.594.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	295.550.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		959.793.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				72 Unit	863.280.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.544.881.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				18 Unit	8.108.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		898.501.170,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	32.230.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.747.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	197.857.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		744.540.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	148.550.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		894.835.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	173.087.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		442.794.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				10 Ha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	-			100 %	846.509.194,00			-	-	-	-	1.179.021.244,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	181.389.194,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		171.699.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	165.120.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		416.690.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		472.311.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, wakil KDH dan Setda	-			100 %	1.284.586.000,00			-	-	-	-	4.437.969.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				3 Paket	428.228.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.911.979.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	267.780.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.622.269.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	588.578.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		903.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	-			100 %	164.999.600,00			-	-	-	-	448.694.328,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				5 Dokumen	46.733.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		159.263.208,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				2 Laporan	47.226.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.168.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	17.077.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.563.794,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	17.592.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.577.028,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				2 Dokumen	36.371.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.122.072,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Terfasilitasi dan terlayannya kegiatan KDH/WKDH</i>	-			100 %	1.640.056.000,00			-	-	-	-	2.569.764.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				360 Laporan	1.401.156.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.081.606.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				360 Laporan	121.405.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		243.701.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				360 Laporan	117.495.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		244.456.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat</i>	-			100 %	9.683.069.400,00						-	3.684.873.926,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintah</i>	-			100 %	141.902.600,00			-	-	-	-	929.979.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrtasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				4 Dokumen	39.194.200,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.606.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				4 Dokumen	29.194.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		316.835.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				6 Dokumen	73.514.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		342.538.644,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase Kegiatan terkait dengan Kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi</i>	-			100 %	8.990.400.000,00			-	-	-	-	1.338.676.662,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				12 Dokumen	8.990.400.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.338.676.662,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	-			100 %	277.870.300,00			-	-	-	-	669.804.624,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				66 Dokumen	108.287.300,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		334.791.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	144.302.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		284.572.758,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	25.281.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.440.836,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	-			100 %	272.896.500,00			-	-	-	-	746.412.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				16 Dokumen	237.966.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.988.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.423.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	34.930.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	-			100 %	557.019.700,00						-	1.502.251.088,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	-			100 %	148.479.000,00			-	-	-	-	227.623.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	39.730.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.716.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	63.955.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.797.758,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	44.794.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.108.812,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	-			100 %	169.898.700,00			-	-	-	-	531.083.172,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	48.100.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		171.083.172,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	68.798.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	52.999.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	-			100 %	162.500.000,00			-	-	-	-	570.474.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	57.130.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		214.782.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	43.988.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.831.798,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				52 Orang	61.381.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.860.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	-			100 %	76.142.000,00			-	-	-	-	173.069.732,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	63.259.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.898.138,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	8.360.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.525.118,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	4.522.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.646.476,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	J U M L A H							35.105.121.566,00							50.168.285.689,00		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

2. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	II-16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kalender penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Tahun 2024..... I-3

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun

2022 Kabupaten Lima Puluh Kota II-2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lima Puluh Kota II-11

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lima Puluh Kota II-23

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2024..... II-50

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

Tahun 2024..... III-5

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program

Prioritas Kabupaten.....III-14

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 IV-2

Tabel 4.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan ,

Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024.....IV-22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja Perangkat Daerah.



I. Persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.



Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																												
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																												
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																												
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																												
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																												
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																												



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																														
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																			
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																			
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																			
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																			
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																			
1	Pelaksanaan Forum PD Bapelitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Bapelitbang																																			
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																			
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																			
F	Penetapan Renja PD 2024																																			
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																			



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																												
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																												
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																												
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																												



II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD 2024 oleh tim Renja Sekretariat DPRD, penyusunan berpedoman kepada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026. Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah . Penyajian Rancangan Renja Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Selanjutnya , Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah Sekretariat DPRD dilaksanakan tgl 3 maret 2023 di Sekretariat DPRD. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat



Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD.

VI. Penetapan

Renja Sekretariat DPRD mempedomani Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Sekretariat DPRD juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.



Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Dalam hal penetapan Renja, Sekretariat DPRD menyerahkan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelola Keuangan Daerah
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025;
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.



III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan
Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68.41%	100%	65.62%	65.62%	100%	89.14%	89.14%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase teterselenggarany a kegiatan	100%	57.99%	100%	65.49%	65.49%	100%	74.49%	74.49%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		administrasi keuangan perangkat daerah								
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	109.02	100%	88.74%	88.74%	100%	99,25%	99.25%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	73.76%	100 %	84.93 %	84.93 %	100%	86.23%	86.23%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersedian barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	23.39%	100 %	66.21 %	66.21 %	100%	63.20%	63.20%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	38.31%	100%	57.17%	57.17%	100%	65.33%	65.33%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	80.04%	100%	58.67%	58.67%	100%	79.57%	79.57%
4.02.01.2.15	Kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	75.54%	100%	82.14%	82.14%	100%	85.89%	85.89%
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan layanan administrasi DPRD	100%	26.34%	100%	51.09%	51.09%	100%	59.14%	59.14%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	122.47%	100%	94.94%	94.94%	100%	84.85%	84.85%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	80%	100%	83.33%	83.33%	100%	87.78%	87.78%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terselenggaranya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Peningkatan	100%	117.42%	100%	30.97%	30.97%	100%	82.80%	82.80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.05	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terselenggaranya kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	6.44%	100%	5.22%	5.22%	100%	37.22%	37.22%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	83.33%	83.33%
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	15.38%	100%	100%	100%	100%	71.79%	71.79%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	152.31%	100%	95.28%	95.28%	100%	115.86%	115.86%



Berdasarkan tabel 2.1 di atas evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, beberapa Sub kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program **Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- Pembahasan Kerjasama daerah
- Fasilitasi Tugas DPRD

II. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, ada kegiatan yang pencapaian targetnya kurang dari 100% diantaranya :



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD

Pada Sub kegiatan tersebut di atas, belum tercapainya target realisasi yang direncanakan disebabkan karena intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga kegiatan tidak terlaksana.

2. Program **Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** pada umumnya semua kegiatan telah mencapai target, hanya beberapa kegiatan yang belum mencapai target di antaranya ;

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK



sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel 2.2.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	tercapai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	tercapai



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)														
3	Terintegrasi		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD														
4	Indeks Kepuasan Pimpinan dan			√			80%	80%	80%	80%	91.42%		91.42%	91.42%	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan(%)														
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD			√			51	55	60	65	70		70	70	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat berdasarkan table 2.2 sesuai dengan IKD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota.



- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 91.42% atau sebanyak 32 orang menyatakan puas atas pelayanan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dan untuk nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD juga telah mencapai target 70.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholdersnya*.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah persidangan.

2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.



3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group*.

Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisioner dengan seluruh anggota DPRD, dimana untuk tahun 2022 ini, dari 35 orang anggota DPRD, 32 orang (91,42%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.



Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, adapun kelemahan itu antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.
5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :



1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maupun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

2.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat / Komisi / Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD.



Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.

Merujuk pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;



- Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
- Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN maupun THL dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi anggota DPR
- Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Sedangkan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD. Peningkatan Kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi



operasional Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan DPRD.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan Kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan system dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan saran dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung financial dan non financial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil Penjadwalan Badan Musyawarah di sosialisasikan ke semua pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel T-C.3 di bawah ini.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	32.719.848.215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	16.851.699.955	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	310.177.800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	1.419.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	58.278.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				an nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	47.305.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	56.912.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	57.681.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	300.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	300.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase tertib administrasi		100	4.711.943.696	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi		100	3.237.786.164	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Daerah	Keuangan				Perangkat Daerah	Keuangan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang/bulan	4.245.429.321	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang/bulan	2.313.686.164	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 Dokumen	342.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 Dokumen	874.210.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 Dokumen	39.503.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 Dokumen	46.800.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	26.838.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				SKPD	laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				an nomenklat ur pada SIPD RI
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	24.799.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	13 Laporan	22.342.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	13 Laporan	1.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	10.330.375	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	960.000	– Adanya perubahan indikator



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Prognosis Realisasi Anggaran	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	640.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	95.477.300	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Paket	160.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Paket	70.680.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	12.774.800	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	320.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	12.022.500	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	2.122.600.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	840.466.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	381.535.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	175.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	72.321.600	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	300 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	300 Dokumen	5.700.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	386.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	241.675.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	139.234.500	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	500.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	48.352.900	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	48.352.900	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100	513.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100	416.959.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	13.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	5.100.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Jasa	Jumlah	Kab. Lima	24 Laporan	200.000.000	Penyediaan	Jumlah	Kab. Lima	24 Laporan	196.729.600	– Adanya



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	215.130.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berkategori baik		100	3.850.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berkategori baik		100	709.338.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	16 Unit	750.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	16 Unit	383.700.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	14 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	14 Unit	109.395.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	191.763.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	24.480.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	19.426.801.719	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	11.277.548.341	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang/bulan	19.020.636.719	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang/bulan	11.225.048.341	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Paket	343.165.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Paket	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	63.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	52.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		100	1.109.825.000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		100	224.352.550	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	41.500.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	40.825.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	10.810.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	627.500.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	189.908.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Paket	400.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Paket	23.634.550	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		100	31.485.451.493	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		100	8.962.260.900	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	6.935.500.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	1.598.177.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 SK	10.500.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Peraturan Daerah					Peraturan Daerah				SIPD RI
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	9 ranperda	6.750.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	13 Dokumen	1.527.933.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Per uu	35.000.000	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	5 Dokumen	7.103.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	63.141.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		100	1.582.774.453	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		100	130.647.900	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	39.893.700	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	11.250.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	39.796.900	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	27.000.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	1.383.539.362	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	22.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	40.005.504	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	27.147.900	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	40.005.383	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	19.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	39.533.604	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	23.250.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											ur pada SIPD RI
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	1.273.642.040	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	41.725.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 orang	543.411.880	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Laporan	41.725.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	474.921.700	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	3 laporan	110.392.920	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sarilamak			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sarilamak			pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	10.685.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	10.685.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	56.446.940	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	56.412.400	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	10.685.400	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggara any Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		100	5.941.666.500	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggara any Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		100	938.785.000	
						Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	3.501.755.500	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Dokumen	488.122.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	24 Orang	137.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 Orang	319.791.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 Orang	174.550.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	468.120.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	43.240.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											ur pada SIPD RI
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	1.500.000.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan dokumentasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 dokumen	258.413.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100	1.783.223.700	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100	391.355.000	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	483.223.700	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	24.010.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											an nomenklat ur pada SIPD RI
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	21.625.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	1.000.000.000	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	345.720.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100	25.000.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100	0	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	Kab. Lima Puluh Kota,	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	Kab. Lima Puluh Kota,	1 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		DPRD	Harau, Sarilamak				DPRD	Harau, Sarilamak			akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	20.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah		100	295.000.000	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah		100	0	
	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	265.000.000	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		dan publikasi yang disusun					dan publikasi yang disusun				pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		100	13.648.644.800	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		100	5.861.571.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	12.500.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	5.022.936.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	108.644.800	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Tugas Badan Musyawarah					Tugas Badan Musyawarah				an nomenklat ur pada SIPD RI
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	838.635.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhir an nomenklat ur pada SIPD RI
	Jumlah				64.205.299.708	Jumlah				25.813.960.855	



Berdasarkan Tabel 2.3 di atas tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, dimana pada rancangan awal RKPD tahun 2024 pagu indikatif yang tersedia adalah sebesar Rp 64.205.299.708,- sedangkan kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 25.813.960.855,-. adanya perbedaan antara kebutuhan anggaran dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD, dikarenakan adanya belanja yang belum diakomodasi dalam pagu indikatif. Sedangkan untuk indikator kinerja antara renstra dan sistim SIPD juga mengalami perbedaan yang diakibatkan oleh Kepmendagri –50-5889-tahun 2021.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mengakomodir usulan dari alat kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas,



maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan







BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ada 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Adapun ke empat pilar tersebut adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 adalah sbb:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan
2. Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 termasuk 7 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dalam memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun



yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat/ Komisi/ Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah .
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024.



Sasaran :

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas kinerja DPRD Lima Puluh Kota.
2. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
5. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, untuk tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan 2 program, 17 kegiatan dan 75 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan uraian program dan kegiatan seperti tersebut diatas, dapat di urai menjadi sub-sub kegiatan. Ringkasan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan



			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



			<p>SKPD</p> <p>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
		3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<p>1. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan</p>



			<p>Bacaan dan peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
		<p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p>	<p>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</p>
		<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya</p>



			<p>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<p>1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</p> <p>2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</p> <p>3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</p>
		9. Layanan Administrasi DPRD	<p>1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</p> <p>2. Fasilitas Fraksi DPRD</p> <p>3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</p> <p>4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</p>



2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan 4. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Laporan Semester 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		3. Pengawasan Penyelenggaraan	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang



		Pemerintahan	<p>Pemerintahan dan Hukum</p> <p>2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p> <p>3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p> <p>5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>7. Pengawasan Penggunaan Anggaran</p> <p>8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</p>
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD	<p>1. Orientasi DPRD</p> <p>2. Pendalaman Tugas DPRD</p> <p>3. Penyediaan Kelompok</p>



			Pakar dan Tim Ahli 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6. Penyusunan Program Kerja DPRD 7. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3. Pelaksanaan Reses
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1. Penyusunan Kode Etik DPRD 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Pembahasan Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		8. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2. Penyusunan laporan



			Kinerja DPRD 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	2	17	75

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 menjadi 2 program 17 kegiatan dan 75 Sub kegiatan

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan untuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.



Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Belum tercapai	Belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	
2	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Belum tercapai	-	
	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi	



			kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	
3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tercapai	-	
	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan 2 Program, 17 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.1 pada Bab III sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapelitbang berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut:



TABEL 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024																
1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	16.851.699.955,00						-	37.645.015.433,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	1.419.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	325.177.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		58.278.600,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.305.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		56.912.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		57.681.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	300.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	3.237.786.164,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	4.712.976.734,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.313.686.164,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.245.429.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	874.210.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		342.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4800 Dokumen	46.800.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		39.503.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		26.838.300,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		24.799.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.342.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	960.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.363.413,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	95.477.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	685.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	70.680.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	12.774.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	12.022.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	840.466.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.262.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	381.535.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	72.321.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	5.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	241.675.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		406.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.234.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	48.352.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	48.352.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	416.959.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	538.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	196.729.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	215.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	-			100 %	709.338.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemban gan Masyarakat Madani	-	-	3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	383.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemban gan Masyarakat Madani	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	109.395.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemban gan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	191.763.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemban gan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.480.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemban gan Masyarakat Madani	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	11.277.548.341,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	24.072.035.899,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	11.225.048.341,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		23.775.795.899,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		226.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	52.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	-			100 %	224.352.550,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.199.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	10.810.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	189.908.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		657.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				2 Paket	23.634.550,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	-			100 %	8.962.260.900,00						-	34.489.954.639,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRDPersentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			100 %	1.598.177.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	7.665.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	1.527.933.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		6.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	7.103.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	63.141.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 %	130.647.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.741.048.897,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	11.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.883.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	27.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.776.590,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.521.890.298,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	27.147.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		44.006.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	19.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		44.005.921,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	23.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.486.964,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan	-			100 %	41.725.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.959.006.262,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	41.725.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		597.753.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		522.413.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		121.432.212,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		620.091.634,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		62.053.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			100 %	938.785.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	6.241.666.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	488.122.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.501.755.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	174.550.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		319.791.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	17.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		468.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	258.413.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			100 %	391.355.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.783.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	24.010.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		483.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				12 Dokumen	21.625.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	345.720.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	305.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	-			100 %	5.861.571.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	14.024.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	5.022.936.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		119.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	838.635.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani			1.010.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			J U M L A H					25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	



Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan
Kegiatan Tahun 2024

N o	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	K
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	25.813.960.855	74.091.973.072	17	25.813.960.855	74.091.973.072	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.813.960.855,- untuk 2 program dan 17 kegiatan, sedangkan untuk pagu tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp.74.091.973.072,-.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

3. RENCANA INSPEKTORAT TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang I-1
	1.2 Landasan Hukum I-9
	1.3 Maksud dan Tujuan I-10
	1.4 Sistematika Penulisan I-11
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota II-26
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat II-29
	2.4 Review terhadap Rancangan RKPD II-30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-49
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota III-5
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diharapkan seluruh kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

- I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat**, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bapelitbang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD Bapelitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Inspektorat																																
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																																

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 di Aula Inspektorat yang dihadiri oleh 42 Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

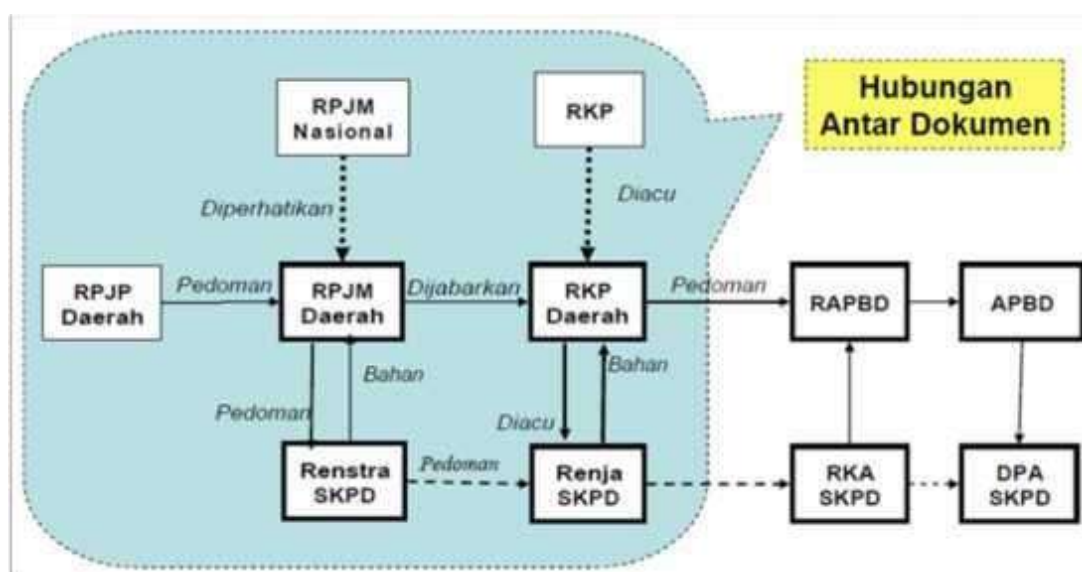
Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Penetapan Renja PD

Renja Inspektorat mempedomani Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Inspektorat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Inspektorat juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Bagan hubungan antar dokumen perencanaan Daerah:



1.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas PERDA No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektorat.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Inspektorat ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas sekretariat dan bidang-bidang di Inspektorat.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan Tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6 1	INSPEKTORAT DAERAH									
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Inspektorat	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP dan SAKIP	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PMPRB Inspektorat	24 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	50,00%
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang	100%	48 Orang	144 Orang	50,00%
6 1 1 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPj yang Diverifikasi	6000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	1000 Dokumen	3000 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Penatausahaan Keuangan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	52 Laporan	50,00%
6 1 1 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	636 Stel	106 Stel	106 Stel	106 Stel	100%	106 Stel	318 Stel	50,00%
6 1 1 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 1 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	1.200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	600 Orang	50,00%
6 1 1 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pemantapan	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Listrik yang Diadakan	60 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	30 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan	18 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	150 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	50,00%
6 1 1 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	15 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	48 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	24 Jenis	50,00%
		Jumlah Lembar Penggandaan	504.060 Lembar	84.010 Lembar	84.010 Lembar	84.010 Lembar	100%	84.010 Lembar	25.2030 Lembar	50,00%
6 1 1 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan	120 eksemplar	20 eksemplar	20 eksemplar	20 eksemplar	100%	20 eksemplar	60 eksemplar	50,00%
6 1 1 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan	1.200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	600 orang	50,00%
		Jumlah porsi Penyediaan Minuman					-	-		50,00%
6 1 1 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	600 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	100 laporan	300 laporan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah Porsi Makan Minum Rapat					100%	-		50,00%
6 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diadakan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	16,67%
		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan					-	-		
6 1 1 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
6 1 1 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Aula Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	
6 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat dan Dokumen	5.400 Lembar	900 Lembar	900 Lembar	900 Lembar	100%	900 Lembar	2700 Lembar	50,00%
		Jumlah pengiriman surat/dokumen					100%	-		50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	9.000 meter kubik	1.500 meter kubik	1.500 meter kubik	1.500 meter kubik	100%	1.500 meter kubik	4.500 meter kubik	50,00%
			21.600 KWH	3.600 KWH	3.600 KWH	3.600 KWH	100%	3.600 KWH	10.800 KWH	50,00%
			72 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	50,00%
			72 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100%	12 rekening	36 rekening	50,00%
6 1 1 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	36 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	18 orang	50,00%
6 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	270 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	135 Unit	50,00%
			30 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 unit	50,00%
			300 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	150 unit	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	50,00%
6 1 1 2.09 0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	18 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	50,00%
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil audit kinerja	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP yang diterbitkan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	34 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	150 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	75 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	150 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	75 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa yang Diterbitkan	270 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100%	45 Laporan	135 Laporan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 2 2.01 0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 2 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Dilaksanakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50,00%
6 1 2 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 Laporan	50,00%
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas SPIP	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 3 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50% I
6 1 3 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 3 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 3 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Inspektorat yaitu Dokumen Renstra, Renja Inspektorat dan Perubahan Renja Inspektorat.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun 2022.
- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 5 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 4 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah dibayarkannya Gaji ASN Inspektorat Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1000 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1000 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Inspektorat Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Pemeriksaan dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2022.

- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dengan target 18 Laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 18 Laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 106 stel. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 120 stel dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan untuk pegawai Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksana bagi pegawai Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 200 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 200 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.
- d) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.
- e) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 10 Paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 10 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 3 paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 3 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target 25 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 25 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Inspektorat Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 5 paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 5 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan

target 8 jenis dan 84010 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 8 jenis dan 84010 lembar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan di Inspektorat Tahun 2022.

- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan target 20 eksemplar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 20 eksemplar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan di Inspektorat Tahun 2022.
 - g) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 200 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 200 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tamu Inspektorat Tahun 2022.
 - h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 100 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 100 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat Tahun 2022.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target 6 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Inspektorat Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 6 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Mebel di Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Gedung Aula Inspektorat dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Aula di Inspektorat Tahun 2022.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 900 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 900 lembar, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH, dengan tingkat capaian realisasi sebesar

100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 6 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 6 orang, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Tahun 2022.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 50 unit, 45 unit, dan 5 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 50 unit, 45 unit, dan 5 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 152 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 152 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 12 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 12 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja dengan target 25 laporan. Realisasi sampai dengan bulan

Desember 2022 adalah 25 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja OPD di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan dengan target 25 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 25 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Pengawasan Desa. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa dengan target 45 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 45 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dengan target 80% dan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan target 80%. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 80% dan 80%, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah

terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2022.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah dengan target 1 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit dengan target 15 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 15 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan sosialisasi SPIP dengan target 1 Kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 Kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

- a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan target 2 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 2 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Indikator

Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD INSPEKT RAT)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)				√	81	82	83	84	85	18,60	39,53	83	84	85	-
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)															
	a. Eksternal		√			81,50	82,00	82,50	83,00	83,5	80,43	82,09	82,50	83,00	83,5	
	b. Internal		√			83,00	83,50	84,00	84,50	85	82,66	76,43	84,00	84,50	85	
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)				√	80	83	85	87	90	100	100	85	87	90	
4	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)			√	√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)				√	50	55	60	65	70	42	44	60	65	70	
6	Level Kapabilitas APIP(level)				√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD INSPEKT RAT)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)				√	75	77	79	80	81	61,14	61,04	79	80	81	
8	Nilai IRB Inspektorat (nilai)				√	30	31	32	33	34			32	33	34	
9	Nilai IKM Inspektorat (nilai)			√		85,98	87,98	89,97	91,97	93,96			89,97	91,97	93,96	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
8. Peningkatan Kapabilitas APIP

9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai OPD Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami

penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat disajikan dalam Tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH				17.613.354.150	INSPEKTORAT DAERAH				9.831.563.649	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.793.290.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.736.574.249	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	241.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	62.297.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	57.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	21.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	6.700.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	28.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.600.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	23.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah dokumen yang disusun (LkjIP,SPIP,LKPJ, SPBE)	5 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah dokumen yang disusun (LkjIP,SPIP,LKP J,SPBE)	4 laporan	6.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	28.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	7.497.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	95%	7.308.940.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	95%	5.953.900.549	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	7.038.690.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	5.931.400.549	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	63.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	6.000.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	1 dokumen	51.750.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	46.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	6.000.000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	34.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan	18 laporan	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan	18 laporan	5.000.000	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan	40.250.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	-	-	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	2.585.350.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	900.378.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	25.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 stel	102.637.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 paket	34.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	5.000.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 kali	1.310.697.205	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	615.000.000	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	422.625.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	160.478.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	704.390.295	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	85.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat	95%	1.253.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi	95%	279.944.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah					Umum Perangkat daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48 buah	86.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 unit	143.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 paket	24.950.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 buah	74.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 paket	14.997.800	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	92.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 paket	28.001.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.000 lembar	74.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	25.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	40.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 dokumen	1.996.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200 porsi	143.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	598.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.999.500	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	602.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								daerah			
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	345.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
2	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	207.000.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Gedung Aula Inspektorat	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Gedung Aula Inspektorat	-	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	310.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	272.460.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1.800 lembar	11.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan	900 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Surat Menyurat					Jasa Surat Menyurat			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 paket 12 rekening 1500 meter kubik 3600 KWH	92.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	77.200.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	207.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	190.260.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	491.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	267.594.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	50 unit 45 unit 5 unit	316.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	26 unit	203.530.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Jabatan		Pajaknya			Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya			
2	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	14.000.000	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 paket	92.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	24.934.000	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 kegiatan	63.250.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	25.130.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	84%	3.762.064.150	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	84%	1.794.169.000	
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	80%	2.955.064.150	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	80%	1.469.169.000	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	575.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 laporan	250.000.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 laporan	575.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	28 laporan	275.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Daerah			
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	115 laporan	614.814.150	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	93 laporan	350.000.000	
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	40.250.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	45.000.000	
5	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	20 laporan	460.000.000	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	32 laporan	250.000.000	
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 kegiatan	172.500.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	85.000.000	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	4 kegiatan	517.500.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	2 dokumen	214.169.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			internal			APIP		Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal			
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	807.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	325.000.000	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	4 kegiatan	207.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	1 Laporan	75.000.000	
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	40 laporan	600.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	18 laporan	250.000.000	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	1.058.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	300.820.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	95%	287.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	95%	100.827.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah peserta sosialisasi SPIP	43 OPD	149.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	55.827.000	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP	1 dokumen	138.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	45.000.000	
II	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	770.500.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	199.993.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 kegiatan	143.750.000	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat Daerah	50.000.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 kegiatan	264.500.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19 perangkat Daerah	50.000.000	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	155.250.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	49.992.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	207.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat Daerah	50.001.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat ,dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, isu – isu penting pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai antara lain pencapaian target ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola dan politik hukum dan kemanan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2021 – 2026 tersebut meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan perkapita
3. Pemerataan pembangunan
4. Pengentasan kemiskinan
5. Kelanjutan pembangunan
6. Peningkatan daya saing
7. Inovasi teknologi
8. SDM berkualitas
9. Resiliensi berbasis sawkarsa

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rancangan awal Renja ini, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu Rancangan awal Rencana Kerja yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu **”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai

pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadi lahan produktif.

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Bagi Inspektorat kiranya **“Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, Beretika dan Bertanggungjawab serta Pembangunan Daerah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”** merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar Inspektorat akan

menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korupsi, kolusif dan nepotis. Pemerintahan yang baik dan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, yaitu mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota), maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Inspektorat untuk bisa mewujudkan visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu: **"Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung misi ke-4 Kepala Daerah terpilih yaitu:

" Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya"

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten yaitu :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	81	82	83	84	85	86
			2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)						
			a.Ekstern	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00
			b.Intern	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00
			3. <i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)</i>	80	83	85	87	90	95
			4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			5. <i>Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)</i>	40	45	50	55	60	65
			6. Level Kapabilitas APIP(level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	7. Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	75	75	79	80	81	82
			8. Nilai IRB Inspektorat (Nilai)	30	31	32	33	34	35
			9. IKM Inspektorat (indeks)	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi dan kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kebijakan : Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan

- Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat
- Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
- Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

Berdasarkan uraian tersebut Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2021-2026

Visi : “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	1. Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja;
			2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%) a.Ekstern b.Intern	1. Menerapkan sangsi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 2. Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
			3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	1. Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat	1. Membentuk Tim Khusus Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	1. Mondorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada OPD.	1. Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
				2. Mendorong Perangkat daerah dan OPD untuk membuat Risk Register dan Rencana Tindak pengendalian di OPD	implementasi SPIP di OPD
			5. Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD B (%)	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Nilai Evaluasi Reformasi ditingkat OPD. 2. Melakukan pendampingan dalam rangka Pencanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	1. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri PMPRB
			6. Level Kapabilitas APIP(level)	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	1. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 2. Pelaksanaan evaluasi 3. Mengikuti Ujian Sertifikasi APIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	7. Nilai AKIP Inspektorat (level)	1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Mendorong	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
				pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	
			8. IRB Inspektorat	1. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat	1. Inovasi dalam Penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan
			9. IKM Inspektorat (indeks)	1. Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 2. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat	1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Inspektorat

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dituangkan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Visi: **Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	<u>Program Prioritas SKPD:</u> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten - Belum tersusunnya secara optimal dokumen SPIP Perangkat daerah dan OPD	- Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya - Belum semua pihak paham terhadap pentingnya dokumen SPIP	- PP No. 79 Th. 2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintah Daerah. - PP No. 60 Th. 2008 tentang SPIP
		- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Kabupaten Lima Puluh

		- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
		- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan

		- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
--	--	---	--	--

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 77 tahun 2020.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan lingkup urusan pengawasan, pendampingan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Urusan Pemerintahan Umum.

Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Kantor
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
JML	1 Program	6 Kegiatan	32 Sub Kegiatan

Tabel 3.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
JML	2 Program	4 Kegiatan	15 Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program dengan 10 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

Adapun mengenai uraian sub kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 pada Bab IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target														
					INSPEKTORAT							9.831.563.649,00				20.251.257.273,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.831.563.649,00				20.251.257.273,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							9.831.563.649,00				20.251.257.273,00		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.736.574.249,00				14.708.183.500,00		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							62.297.000,00				277.725.000,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	85 %	21.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	66.125.000,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	6.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	6.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	33.062.500,00
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	26.450.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	85 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	85 %	7.497.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33.062.500,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.953.900.549,00					8.405.431.000,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang/bulan	95 %	5.931.400.549,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.094.493.500,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1000 Dokumen	95 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	72.737.500,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	59.512.500,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	95 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	52.900.000,00
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	95 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	39.750.000,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target														
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Laporan	95 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	39.750.000,00
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	46.287.500,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					900.378.000,00						2.944.402.500,00		
6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	120 Paket	95 %	34.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	118.033.125,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	95 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	23.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang	95 %	615.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	1.507.301.786,00	
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	200 Orang	95 %	160.478.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	486.018.750,00	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang	95 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	810.048.839,00	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							279.944.700,00					1.441.525.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Paket	95 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	99.187.500,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Paket	95 %	24.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	165.312.500,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Paket	95 %	14.997.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	85.962.500,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Paket	95 %	28.001.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	105.800.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	95 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	85.962.500,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Dokumen	95 %	1.996.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	46.287.500,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	95 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	165.312.500,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	95 %	149.999.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	687.700.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					709.800.000,00
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	396.750.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	238.050.000,00
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	95 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	75.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								272.460.000,00					357.075.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	900 Laporan	95 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	13.225.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	95 %	77.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.800.000,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	95 %	190.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.050.000,00
6	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267.594.000,00					572.225.000,00
6	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Unit	100 % 95 %	203.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	363.687.500,00
6	01	01	2.09	0005		Pemeliharaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 % 95 %	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00
6	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 % 95 %	24.934.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	105.800.000,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 % 95 %	25.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	72.737.500,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1.794.169.000,00					4.326.373.773,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1.469.169.000,00					3.398.323.773,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
						Persentase pelaksanaan OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	54 Laporan	80 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54 Laporan	661.250.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbn I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	12 Laporan	80 %	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	661.250.000,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbn I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	25 Laporan	80 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan	707.036.273,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbn I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	25 Laporan	80 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	46.287.500,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbn I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	45 Laporan	80 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan	529.000.000,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irban I,II,III,IV	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	1 Kesepakatan	80 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	198.375.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irban I,II,III,IV	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 %	1 Dokumen	80 %	214.169.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	595.125.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								325.000.000,00					928.050.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irban I,II,III,IV	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 %	1 Laporan	95 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	238.050.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbn I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 %	15 Laporan	95 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	690.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								300.820.400,00					1.216.700.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								100.827.000,00					330.625.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
						Level maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Rekomendasi	95 %	55.827.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	171.925.000,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
						Level maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Rekomendasi	95 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	158.700.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								199.993.400,00					886.075.000,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	43 perangkat daerah	95 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	165.312.500,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	43 perangkat daerah	95 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	304.175.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
						Level maturitas SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Kegiatan	95 %	49.992.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	178.537.500,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	43 perangkat daerah	95 %	50.001.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 perangkat daerah	238.050.000,00
TOTAL													9.831.563.649,00				20.251.257.273,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6	7.736.574.249	1	6	14.708.183.500	
2	Penyelenggaraan Pengawasan	1	2	1.794.169.000	1	2	4.326.373.773	
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1	2	300.820.400	1	2	1.216.700.000	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

4. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	14
1.3. Maksud dan Tujuan	16
1.4. Sistematika Penulisan	16
1.5. Landasan Hukum	19
BAB II.....	24
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU.....	24
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	24
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan).....	152
2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis	163
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	168
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	174
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	307
BAB III.....	310
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	310
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	310
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	313
3.3. Program dan Kegiatan.....	314
BAB IV.....	473
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN.....	473
TAHUN 2024.....	473

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan. Untuk meyenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :”Perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya”. Untuk itu diperlukan adanya suatu acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis dapat dipedomani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota secara terarah dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 bahwa mulai 1 Januari 2021 RSUD dr. Achmad Darwis merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam hal keuangan, aset dan kepegawaian, namun dalam hal perencanaan dan keuangan seluruh laporan menjadi

lampiran dokumen perencanaan dan laporan keuangan Dinas Kesehatan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Pasal 128 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.

Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja																																
2	Orientasi mengenai Renja Peran gkat Daerah																																
3	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tenta																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	ng Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Peringkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	ranwal RKPDP menjadi rancangan RKPDP																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPDP																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	hasil verifikasi																																
D Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																	
1	Pelaksanaan Forum PD Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh pema ngku kepe nting an yang memi liki keter kaita n deng an tugas dan fungs i Dinas Kese hatan bertu juan untu k mem perol eh masu kan dala m rangk a																																

No	Jenis / Taha pan Kegi atan	2022				2023																													
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	penaj aman target kinerj a sasar an, progr am dan kegia tan, lokasi dan kelo mpok sasar an dala m ranca ngan renja Dinas Kese hatan .																																		
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																		
1	Penye mpur naan Ranc anga n Renja menj adi Ranc anga n akhir renja berda sarka n Perka da tenta																																		

[illegible]

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																
3	Penyampaian kembali																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	rencana ngan akhir renja yang telah dise mpur naka n berda sarka n hasil verifi kasi ke Bapel itban g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Bapelitbang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Aula Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh 11 Perangkat Daerah dan 1 *stakeholders* terkait yaitu PKK Kab. Lima Puluh Kota

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Penetapan Renja PD

Renja Dinas Kesehatan mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Dinas Kesehatan juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta Kementerian Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Kesehatan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Kesehatan ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Kesehatan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan Tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

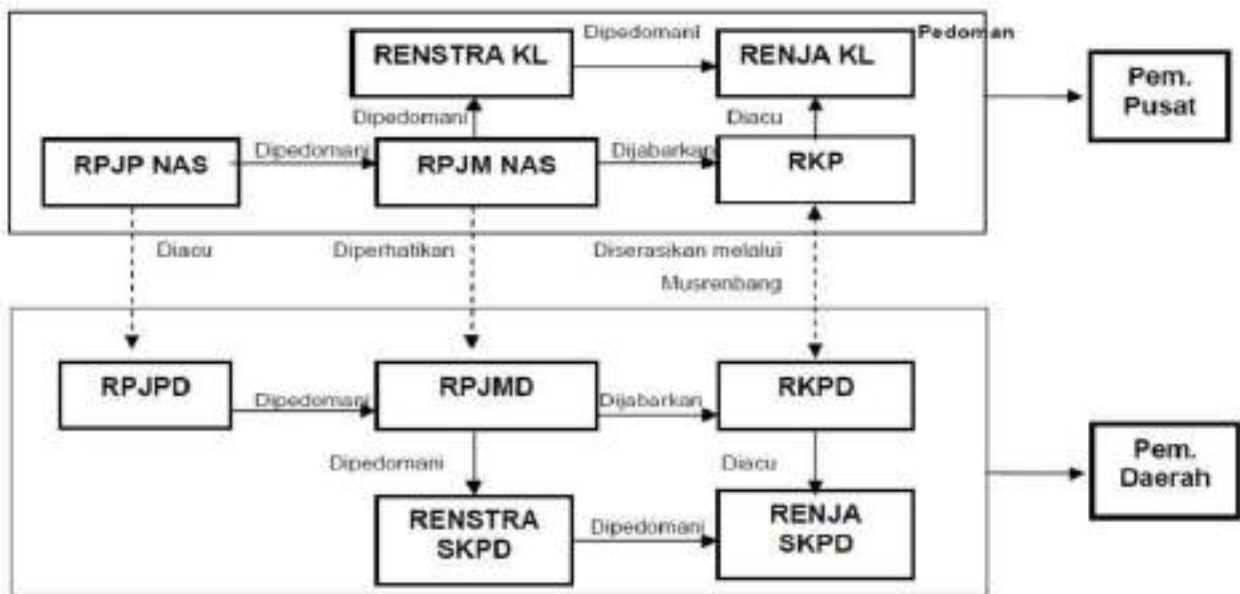
II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dinas Kesehatan Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Gambar 1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya

Mencermati hubungan Renja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana dapat diuraikan antara lain :

1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

3. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat
4. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam Renja tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah **Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**. Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang dicapai terutama melalui pelaksanaan misi pertama, yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan". Dalam RPJMD dinyatakan bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota ditandai dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 69,79 di tahun 2020 (kondisi awal) menjadi 70,20 tahun di tahun 2026, dan menurunnya prevalensi stunting dari 8,29 di tahun 2020 menjadi 2,29 di tahun 2026. Untuk itu, strategi yang disusun dalam RPJMD adalah menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi/balita, menurunkan prevalensi penyakit, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan menurunkan angka prevalensi stunting.

Seluruh indikator capaian sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan dua tujuan dan 2 sasaran Renstra, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Sasaran: meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur layanan publik

Sasaran: meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dinas kesehatan

Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 76 indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra tersebut di atas, yang secara keseluruhan akan mencapai melalui program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 didokumentasikan dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. Dokumen Renja Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan berkoordinasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Bupati menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.

1.5. Landasan Hukum

Dalam mewujudkan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
31. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
32. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 110);
33. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan dan realisasi APBD. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5 program, 23 kegiatan dan 113 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 166.983.720.947,-.

**TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02				Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah								
					Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase faskes yang melakukan pelayanan BLUD								
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Tanjung Pati	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Gunuang Malintang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Taram	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Suliki	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Situjuh	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Rimbo Data	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Baruh Gunuang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Banja Loweh	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungo	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pakan Rabaa	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Piladang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Batu Hampa	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Halaban	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Muaro Paiti	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Sialang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Koto Baru Smlg	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Dangung _ Dangung	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungka	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Kandis	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Koto Tinggi	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Maek	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian SPM Kesehatan								
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.								
		Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.								
	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	1	1	1	-	-	3		
	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana dan prasarana alkes dan SDM sesuai standar			1	1	100	4		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi	4	2	4	-	-	22		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan pemeliharaan oleh puskesmas								
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun		1				1		
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2		1	-	-	2		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	4		4	4	100	5		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana, pra sarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	2		1	1	100	4		
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	22	1	22	-	-	22		
	Pengadaan prasarana dan Pendukung	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan	22	5				4		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kesehatan yang disediakan								
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	6	1	1	1	100	22		
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional	22					22		
	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pemeliharaan	22					22		
	Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	6	1	6	-		6		
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	23	11				23		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta faskes lainnya	288	144				288	72	25
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 10000	1					1		
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar	100							
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6526	5919	6215	5,486	88	5919		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6473	5871	6165	5,347	87	5871		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan	6457	5857	6150	5,163	84	5857	1688	28.8

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sesuai standar								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	26950	24444	25666	21,395	83	24444		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	11228		11105	11,499	104	11228		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	258481	258154	258321	29,629	11	258481		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31659	31325	31455	28,560	91	31659		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	72204	71056	72102	10,688	15	72024		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2646	2592	2601	2,370	91	2646		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	527	527	527	996	189	587		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6137	6004	6025	4,261	71	6137	1335	21.8
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7785	7696	7712	5,292	69	7875		
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	1	1	1	100	1		
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1	1	1	0	-	1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	1	1	100	1		
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	5	5	5	-	-	5		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1	100	9		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	1	1	100	6		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	1	1	0	-	1		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	1	1	100	1		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6444	6001.00	6201	4,650	75	6444		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	25	25	25	100	25		
	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	5	5	5	5	100	5		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Sub Kegiatan : Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	1	1	100	1		
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	100	1		
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1					1		
					Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	4903	100	769	-	-	4903		
					Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	12		20	-	-	12		
					Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6	6	6	-	-	6		
					Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	0	-		0		
					Operasional pelayanan fasilitas kesehtan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		1	22	22	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan akreditasi faskes di kabupaten/ kota	6		16	20	125	6		
		Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			12	-	-	5		
		Sub Kegiatan : Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1					1		
		Operasional Pelayanan RS	1					0		
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1					1		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatn yang berkualitas	6					0		
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1					0		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			123355	123,355	100	98684		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Tanjung Pati	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						603		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						586		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						224		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						1361		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						3022		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA					25		
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal).						12		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas						150		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rimbo Data	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Rimbo Data	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						81		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						73		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						272		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						146		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						1151		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga						20		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Tuberkulosis.								
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA					25		
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Halaban	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Halaban	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					252		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin					232		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					232		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita					859		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					440		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					1172		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar.					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan					1		
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan					25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesehatan jiwa dan NAPZA								
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						12		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Hampar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Batu Hampar	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					202		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin					202		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					201		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita					690		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						280		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						572		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						151		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan gizi masyarakat								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Operasional Pelayanan Puskesmas Mungo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Mungo	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						439		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						423		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						416		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						182		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						593		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						325		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)						1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Surveilance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveilance kesehatan					1		
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					1		
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					9293		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Malintang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1.00	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Gn. Malintang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						80		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						94		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						255		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						368		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Baruh Gunuang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Baruh Gunuang.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						108		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						109		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						108		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						371		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						164		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						652		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.						17		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya						40		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.								
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan Kerja dan Olahraga.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						12		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pangkalan.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						275		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						312		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						313		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						902		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						575		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						444		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						82		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh						228		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tenaga kesehatan puskesmas								
	Operasional Pelayanan Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Banja Loweh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						77		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						83		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						84		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						346		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						156		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						966		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga						48		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tuberkulosis.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa					25		
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Situjuh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Situjuh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						376		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						1155		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						847		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						1859		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.						63		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di						12		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)								
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1.00	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						387		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						362		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya						1096		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pengelolaan pelayanan kesehatan balita								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						775		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						2293		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan						25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesehatan jiwa dan NAPZA								
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						12		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Piladang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Piladang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						162		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						169		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						635		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						236		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					203		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.					56		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV					78		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan gizi masyarakat								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						1		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Suliki	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Suliki	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						208		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan						209		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan bayi baru lahir								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						600		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						535		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						695		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Surveilance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveilance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas						4668		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Taram	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas taram	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						287		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						307		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						310		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						1043		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					408		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					327		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Olahraga.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA								
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tidak Menular								
		Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					12		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Muaro Paiti	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Muaro Paiti	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					227		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						260		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						207		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						367		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						1435		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					368		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.					12		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					200		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.					12		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						240		
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						12		
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						24		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan						320		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyakit Menular dan Tidak Menular								
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sialang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Sialang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						207		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						211		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						207		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						497		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						373		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						1453		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan						14		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		gangguan jiwa berat.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						70		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV						168		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		masyarakat								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Baru Smlg	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						552		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya						552		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						554		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						1404		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						861		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						3649		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						40		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan					1		
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		
		Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan					25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesehatan jiwa dan NAPZA								
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Dangung - Dangung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Dangung- dangung	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						502		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						487		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						1178		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						1151		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						247		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat						58		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						281		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					12		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Mungka	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Mungka	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					564		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						427		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						427		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						2500		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						3018		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					3688		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.					198		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Olahraga.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1		
		Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					12		
		Operasional Pelayanan Puskesmas Pd Kandis	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	100	1		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Padang Kandis	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan					116		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan ibu hamil								
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						111		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						109		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						305		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					454		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					1032		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Olahraga.								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Tinggi	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						216		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						197		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan						197		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan bayi baru lahir								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						768		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						425		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						2147		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat						29		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.						56		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.						1		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan						1		
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.						1		
	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan						25		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesehatan jiwa dan NAPZA								
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas						4800		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Maek	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1	1	1	100	1		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Maek	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						134		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						126		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						123		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita						521		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						296		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					872		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat					10		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.					47		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.					1		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan					1		
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Surveilance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveilance kesehatan						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA						25		
	Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas						3234		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	100							
	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	1	1	-	-	1		
	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin	100							
	Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah faskes yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu / INM pelayanan kesehatan	1	1	1	-	-	1		
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana								
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	Jumlah kebijakan di Bidang kesehatan yang diterbitkan								

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
	Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat			22	22	100	5		
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS di masyarakat								
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	5	22	22	100	5		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas Taram	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						1		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas Gunung	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Malintang									
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat								
	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
	Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			22	22	100	4		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat					1		
		Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungo	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat					1		
		Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dandung- dangung	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat					1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungka	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat						1		
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat						1		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman									

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indikator Kegiatan : Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin								
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal, UMOT	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal, UMOT	2	2	1	-	-	70		
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	55	10	48	48	100	55		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P- IRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Indikator Kegiatan : Jumlah Sertifikat Produksi Pangan IRT- P dan Nomor P-IRT yang diterbitkan								
	Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	60	60	45	45	100	60	25	41.7
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot	Jumlah sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan								

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Air Minum (DAM)									
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3					3		
					Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman								

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah IRT-P yang diawasi								
					Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	25	50	-	-	25		
					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah								
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah								

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	2	2	100	1		
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1		
					Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2	2	100	2		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1		
					Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	100	2		
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	12		12		-	12		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	8	2	2	100	2		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1000	1000	1000	1,000	100	1000	500	50
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12		12	-	-	12		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	25	25	25	25	100	25		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	7	7	7	5	71	7		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	12		12	-	-	12		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1		1	-	-	1		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2		2	-	-	2		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	10	10	0	-	-	0		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	22	22	22	-	-	22		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	2	2	-	-	2		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	12	12	-	-	12		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah						1		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai terlaksananya pengadaan mesin absensi	1					1		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			90	-	-			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	1	1	1	100	1		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12		30	30	100	6		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	45					45		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		undangan								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impementasi peraturan perundang- undangan	46					46		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1	1	1	100	1		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	12	100	12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12	12	12	12	100	12		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						konsultasi SKPD								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan					1			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di disediakan					1			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di disediakan					1			
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksanaananya pelayanan kepegawaian pada dinas kesehatan								
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	12	0	-	12		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	5	41.7
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlenkapan kantor yan	12	12	12	12	100	12		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		g disediakan								
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	5	41.7
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya perawatan kendaraan operasional dan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional								
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	1	100	1		
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19	17	9	9	100	9		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara						5		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1	1	1	100	12	5	41.7

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	1	1	100	1		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi								
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	1	-	-	1		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	6	2	2	-	-	6		
	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pencapaian SPM Kesehatan								
	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek								

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	/ Kota									
	Sub kegiatan : Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1	1	30	-	-	1		
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	30	-	-	1		
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019								
	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	1	1	1	-	-	1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1227	1227	1227	-	-	1227	1227	100
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Taram	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes						1		
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Suliki	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes						1		
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes						3		
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional						1		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Standar di Puskesmas Baruah Gunuang	kesehatan								
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pangkalan	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan						2		
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan						1		
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mungo	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						2		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Piladang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						2		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Halaban	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						2		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Muaro Paiti	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sialang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						2		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dangung- Dangung	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mungka	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Padang Kandis	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		

ode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Maek	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar						1		
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	48							
					Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	4	-	-	1		
					Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan : Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi di bidang kesehatan								
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten /	Jumlah SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			1	-	-	11		

ode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kota									

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Target Renstra

A. Realisasi Anggaran

1. Meningkatnya Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1.1. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2023 (Keadaan Mei 2023 berdasarkan DPA Pergeseran II), secara umum capaian program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat belum terealisasi, baru terealisasi sebesar 0.33%. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM/ UKP kewenangan daerah kabupaten/ kota dengan realisasi sebesar 0.43% dan Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/ UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan realisasi sebesar 0.29%.

1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada tahun 2023 (Keadaan Mei 2023 berdasarkan DPA Pergeseran II), secara umum Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan belum terealisasi karena baru realisasi 3.98%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan melalui kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar 19.08%, dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi nol.

1.3. Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pada tahun 2023 (Keadaan Mei 2023 berdasarkan DPA Pergeseran II), secara umum capaian program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman belum terealisasi, baru terealisasi sebesar 10.69%. Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan tingkat realisasi 7.91%, Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga dengan realisasi 34,82%, Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan realisasi 1,57%.

1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2023 (Keadaan Mei 2023 berdasarkan DPA Pergeseran II),

secara umum belum ada realisasi. Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dinas kesehatan

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pada tahun 2023 (Keadaan Mei 2023 berdasarkan DPA Pergeseran II), Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara umum belum ada realisasi. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan melalui kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan realisasi sebesar 6.44%, Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar 27.43%, Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 28.63%, Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 28.88%, Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD sebesar 4.25%.

B. Realisasi Kinerja Program

Realisasi SPM bidang kesehatan kondisi Mei 2023 (Target pencapaian kondisi mei 2023 adalah 40%)

NO	SPM	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	7,817	2,174	27.8
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	7,461	2,280	30.6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	7,106	2,139	30.1
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	34,768	9,179	26.4
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	14,009	-	0.0

NO	SPM	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	240,564	5,176	2.2
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	53,413	12,390	23.2
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	72,024	2,075	2.9
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Dm	Jumlah penderita dm yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2,646	111	4.2
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Odgj Berat (Psikotik)	Jumlah odgj berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	837	315	37.6
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (Tb)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan tb sesuai standar dalam kurun satu tahun (suspek tbc)	14,390	1,898	13.2
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv	Jumlah orang beresiko terinfeksi hiv yang mendapat pemeriksaan hiv sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun (positif tbc + ibu hamil + penghuni lapas + lgbt)	9,418	2,018	21.4

Berikut ringkasan program/kegiatan terkait anggaran yang belum mencapai target (40% pada Mei 2023) :

NO	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB	
			INTERNAL	EXTERNAL
1	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0.33	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puskesmas lamban merealisasikan BOK salur. ✓ Bidang yang memiliki kegiatan terkait lamban merealisasikan kegiatannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ juknis DAK 2023 baru keluar bulan 2023 sehingga memperlambat proses realisasi ✓ Kepmendagri yang mengharuskan pemetaan kegiatan BOK ke dalam sub kegiatan yang sesuai di dalam pergeseran anggaran ✓ DPA Pergeseran yang mengakomodir kegiatan baru bisa direalisasikan pada bulan April 2023 ✓ Dana BOK dengan metode salur langsung ke rekening puskesmas baru dimulai pada bulan April 2023 ✓ Adanya penyesuaian-penyesuaian terkait PMK 212 Tahun 2022 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.98	Bidang yang memiliki kegiatan terkait lamban merealisasikan kegiatannya	Adanya penyesuaian-penyesuaian terkait PMK 212 Tahun 2022 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	10.69	Bidang yang memiliki kegiatan terkait lamban merealisasikan kegiatannya	Adanya penyesuaian-penyesuaian terkait PMK 212 Tahun 2022 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya
4	Program Pemberdayaan Masyarakat	0	Bidang yang memiliki kegiatan terkait lamban merealisasikan kegiatannya	Adanya penyesuaian-penyesuaian terkait PMK 212 Tahun 2022 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.03	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puskesmas lamban merealisasikan dana BLUD ✓ Bidang yang memiliki kegiatan terkait lamban 	Adanya penyesuaian-penyesuaian terkait PMK 212 Tahun 2022 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya sehingga kegiatan di Program Penunjang terganggu

NO	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB	
			INTERNAL	EXTERNAL
			merealisasikan kegiatannya ✓ Rotasi dan mutasi pejabat eselon selaku penatalaksana kegiatan mengganggu proses pencairan anggaran	pencairannya

Berikut ringkasan program/kegiatan terkait capaian kinerja yang belum mencapai target (40% pada Mei 2023) :

No	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Faktor Penyebab	
			Internal	External
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.8	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.6	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.1	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	26.4	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0.0	Kegiatan baru akan dilaksanakan bulan agustus karena sasaran usia pendidikan dasar adalah anak kelas 1 dan 7 tahun ajaran baru (juli 2023)	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2.2	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	23.2	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.9	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Dm	4.2	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	

No	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Faktor Penyebab	
			Internal	External
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Odgj Berat (Psikotik)	37.6	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (Tb)	13.2	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	21.4	Puskesmas lambat dalam melakukan case finding	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)

Berdasarkan capaian SPM, IKD, Renstra Dinas Kesehatan, analisa Indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
1	Persentase Balita Gizi Buruk		V	4.3	4	3.7	3.4	0.24	0.3	3.7	3.4
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang		V	7.56	7.44	7.32	7.2	4.29	4.7	7.32	7.2
3	Cakupan desa / nagari siaga aktif		V	70	75	80	85	70		80	85
4	Angka Kematian Bayi (AKB)		V	9.57	9.56	9.55	9.54	12/1000 KH	9.65/ 1000 KH	9.55	9.54
5	Angka Kematian Balita		V	10.54	10.53	10.52	10.51	13,6/1000 KH	10,52 /1.000 KH	10.52	10.51
6	Angka Kematian Neonatal		V	8.76	8.75	8.74	8.73	6,9/1.000 KH	6,14/1.000 KH	8.74	8.73
7	Angka Kematian Ibu		V	97,4	97,3	97,2	97,1	205,6/ 100.000 KH	131,56/ 100.000 KH	97,2	97,1
8	Rasio posyandu per satuan Balita		V	16	17	18	19	15,9	15,9	18	19
9	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk		V	8.79	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.8	8.8
10	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk		V	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani		V	77.8	78	78.3	78.5			78.3	78.5

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		V	78.6	78.9	79.1	79.3	71.4	30.6	79.1	79.3
13	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		V	80	80	80	80	64.34	24.49	80	80
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat perawatan		V	100	100	100	100	98.0	94.12	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		V	95	95	95	95	64.5	24.5	95	95
16	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		V	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		V	90	90	90	90	100	100	90	90
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		V	290	280	284	284	161	87.8	284	284
19	Tingkat kematian Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		V	< 10	< 10	< 10	< 10	7/100.000 penduduk	3/100.000 penduduk	< 10	< 10
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang ter deteksi		V	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
	dalam program DOTS										
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		V	90	90	90	90	67.8	16.5	90	90
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		V	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Penderita Diare yang ditangani		V	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Angka Kejadian Malaria		V	< 1	< 1	< 1	< 1	0	0	< 1	< 1
25	Tingkat kematian akibat Malaria		V	< 1	< 1	< 1	< 1	0	0	< 1	< 1
26	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi		V	< 0,1	<0,1	< 0,1	< 0,1	0.002	0.001	< 0,1	< 0,1
27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat mis kin		V	100	100	100	100			100	100
28	Cakupan kunjungan bayi		V	76.9	77	77.1	77.2	66.6	25.11	77.1	77.2
29	Cakupan Puskesmas		V	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
30	Cakupan Puskesmas Pembantu		V	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
31	Cakupan kunjungan ibu hamil K4		V	76.9	77	77.1	77.2	69.9	27.81	77.1	77.2
32	Cakupan pelayanan nifas		V	76	76.2	76.4	76.5	71.4	26.73	76.4	76.5
33	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani		V	5732	57	56.8	56.6	44.2	20	56.8	56.6
34	Cakupan pelayanan anak balita		V	62.6	62.8	63	63.3	59.7	26.4	63	63.3
35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		V	485	490	490	495			490	495
36	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD setingkat		V	100	100	100	100	95.47	Belum Dilaksanakan Untuk Th 2023	100	100
37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		V	100	100	100	100			100	100
38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		V	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		V	90	90	90	90	Tidak ada KLB	Tidak ada KLB	90	90

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
40	Rasio daya tampung RS Rujukan		V	0.038	0.037	0.036	0.035			0.036	0.035
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	V	V	100	100	100	100	69.9	27.8	100	100
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	V	V	100	100	100	100	71.4	30.6	100	100
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	V	V	100	100	100	100	72.4	30.1	100	100
44	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita	V	V	100	100	100	100	61.0	26.4	100	100
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	81.8	0.0	100	100
46	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	12.4	2.2	100	100

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
47	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	55.2	23.2	100	100
48	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	15.0	2.9	100	100
49	Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	90.7	4.2	100	100
50	Persentase ODGJ Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	V	V	100	100	100	100	120.0	37.6	100	100
51	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	V	V	100	100	100	100	33.7	13.2	100	100
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	V	V	100	100	100	100	58.1	21.4	100	100
53	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		V	87,98	89,97	91,97	93,96	76,10		91,97	93,96

No	Indikator	SPM	IKD	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Kondisi Mei)	2024	2025
	dasar										
54	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan		V	87,98	89,97	91,97	93,96	82,24		91,97	93,96
55	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		V	64.37 (B)	67.02 (B)	66.68 (B)	72.34 (BB)	73,55 (BB)	Belum bisa dilakukan penilaian, harus selesai pelaporan LKJiP 1 Tahunan	66.68 (B)	72.34 (BB)

Berdasarkan tabel 2.1 tentang capaian SPM, IKD, Renstra Dinas Kesehatan, analisa Indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat disimpulkan hasil analisis sebagai berikut :

1. Indikator yang memenuhi target adalah :

- 1) Rasio RS per satuan penduduk
- 2) Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan
- 3) Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani
- 4) Tingkat kematian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
- 5) Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
- 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
- 7) Penderita Diare yang ditangani
- 8) Angka kejadian malaria
- 9) Tingkat kematian akibat malaria
- 10) Prevalensi HIV/ AIDS (persen) dari total populasi
- 11) Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin
- 12) Cakupan puskesmas
- 13) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
- 14) Rasio daya tampung RS rujukan

2. Indikator yang melebihi target adalah :

- 1) Angka Kematian Bayi
- 2) Angka Kematian Balita
- 3) Angka kematian ibu
- 4) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA +
- 5) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

3. Indikator yang kurang dari target adalah

- 1) Persentase balita gizi buruk
- 2) Cakupan nagari siaga aktif
- 3) Rasio posyandu per satuan balita
- 4) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
- 5) Cakupan komplikasi kebidanan ditangani
- 6) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- 7) Cakupan desa kelurahan UCI

- 8) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
- 9) Tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk
- 10) Tingkat kematian Tuberkulosis per 100.000 penduduk
- 11) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
- 12) Angka Kematian Malaria
- 13) Tingkat Kematian akibat malaria
- 14) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
- 15) Cakupan Kunjungan bayi
- 16) Cakupan kunjungan ibu hamil K4
- 17) Cakupan pelayanan nifas
- 18) Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani
- 19) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada keluarga miskin.
- 20) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD setingkat
- 21) Cakupan desa kelurahan yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam.
- 22) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 23) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 24) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir
- 25) Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita
- 26) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 27) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
- 28) Persentase WN usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 29) Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 30) Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 31) Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 32) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
- 33) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar
- 34) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
- 35) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan.

Tabel 2.3 Capaian IKU Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Dinkes				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,93	70,00	70,07	70,20	70,08		70,07	70,20	Melebihi target
		Angka prevalensi stunting	6,29	5,29	4,29	2,29	8,63		4,29	2,29	Melebihi target
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan public	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	64,37 (B0)	67,02 (B)	66,68 (B)	72,34 (BB)	73,55 (BB)		66,68 (B)	72,34 (BB)	Melebihi target

Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup melebihi target, hal ini pertanda baik karena adanya penurunan angka kesakitan, angka kematian dan adanya perbaikan pelayanan kesehatan.
2. Angka Prevalensi Stunting melebihi target, hal ini pertanda buruk, karena ditemukan banyak anak penderita stunting oleh Dinas Kesehatan.
3. Nilai SAKIP melebihi target :

Hal ini merupakan hasil evaluasi Inspektorat terhadap penyusunan LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 sekaligus realisasi APBD Tahun 2022 RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis
Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	46.062.318.857	46.062.318.857	45.238.507.070	98,21
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.101.800	3.101.800	3.060.000	98,65
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.101.800	3.101.800	3.060.000	98,65
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.555.815.057	19.555.815.057	19.230.722.068	98,34
	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19.555.815.057	19.555.815.057	19.230.722.068	98,34
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.713.000	28.713.000	25.221.072	87,84
	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.850.000	2.850.000	1.695.000	87,84
	Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	4.250.000	4.250.000	3.884.000	91,39
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	21.613.000	21.613.000	19.642.072	90,88
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.782.000	555.782.000	512.551.383	92,22
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	553.612.000	553.612.000	510.461.383	92,21
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.170.000	2.170.000	2.090.000	96,31

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.100.000	34.100.000	33.998.750	99,70
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	34.100.000	34.100.000	33.998.750	99,70
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	25.884.807.000	25.884.807.000	25.432.953.797	98,25
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	25.884.807.000	25.884.807.000	25.432.953.797	98,25
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.450.000.000	1.450.000.000	1.265.708.732	87,29
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1.200.000.000	1.200.000.000	1.015.725.446	84,64
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.015.725.446	84,64
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	249.983.286	99,99
	Sub Kegiatan : Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	250.000.000	250.000.000	249.983.286	99,99
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	138.574.200	138.574.200	138.571.447	100
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	138.574.200	138.574.200	138.571.447	100
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	138.574.200	138.574.200	138.571.447	100
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.000.000	100.000.000	-	-

	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	-	-
	Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	100.000.000	100.000.000	-	-
	JUMLAH	47.750.893.057	47.750.893.057	46.642.787.249	97,68

Penjabaran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.101.800,00 dan realisasi keuangan Rp. 3.060.000,00 atau 98,65% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam kota, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja perencanaan serta terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah untuk 12 bulan.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.555.815.057,00 dan realisasi keuangan Rp. 19.230.722.068,00 atau 98,34 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1). Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, 2). Jumlah Tenaga PPPK yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, 3). jumlah pembayaran honorarium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan 4). Jumlah Tenaga Kesehatan ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya 1). Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, 2). Tenaga PPPK yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, 3). Pembayaran honorarium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan, 4). Tenaga Kesehatan ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19 dan untuk 1 tahun.

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.850.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 1.695.000,00 atau 59,47 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Langganan Koran/ Majalah, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya Koran/ Majalah untuk 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.250.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 3.884.000,00 atau 91,39 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya Makan dan Minum Tamu untuk 12 bulan.
- c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.613.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 19.642.072,00 atau 90,88 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1). Jumlah OH yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi, 2). Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya 1).Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi , 2). Makan dan Minum Rapat di RSUD untuk 12 bulan.

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.612.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 510.461.383,00 atau 92,21 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya rekening telepon, rekening air, rekening listrik untuk 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.170.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 2.090.000,00 atau 96,31 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah OH Perjalanan Dinas Dalam Kota, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk 12 bulan.

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.100.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 33.998.750,00 atau 99,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang

Terpelihara (Roda 4), dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional untuk 12 bulan.

6. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

- a. Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.884.807.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 25.432.953.797,00 atau 98,25 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di Rumah Sakit : Rawat Jalan dan Rawat Inap, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Kegiatan PPK-BLUD RS untuk 12 bulan.

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 1.015.725.446,00 atau 84,64% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C (alat kesehatan/kedokteran DAK), dengan capaian kinerja berupa Tersedianya peralatan alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C (Alat Kedokteran NICU).

2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 249.983.286,00 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu, dengan capaian kinerja berupa Terlayannya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu di rumah sakit selama 12 bulan.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.574.200,00 dan realisasi keuangan Rp. 138.571.447,00 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini

adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan Non ASN Covid 19 untuk 12 bulan.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 0 atau 0% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Penerima Hibah PMI. Kegiatan ini tidak terlaksana karena Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan untuk permintaan anggaran dana Hibah tidak diserahkan oleh PMI ke RSUD dr. Achmad Darwis.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencapaian SPM dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi

administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK. Hambatan dalam pelaksanaan SPM ini diantaranya sasaran yang berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang lebih tinggi dari sasaran yang ada di lapangan dan masih rendahnya kinerja petugas untuk menemukan sasaran (*case finding*) dari indikator SPM tersebut karena hanya menunggu datang ke puskesmas.

2.4.2. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2022 diharapkan semua masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan baik yang didanai oleh pemerintah maupun mandiri, untuk itu perlu peningkatan peran serta masyarakat untuk masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri. Karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum bisa mencapai target untuk *Universal Health Coverage*.

2.4.3. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti : Gigitan hewan penular rabies, TB Paru, Demam berdarah, dll yang harus

dilakukan pengawasan secara lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini sehingga tidak menjadi wabah.

Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular lebih gampang terjadi. Serta pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan resiko penyakit tidak menular.

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar atas jumlah orang yang berumur 15-59 Tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2021 di kabupaten lima Puluh Kota baru berada pada angka 10,94%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15-59 tahun, baru 11 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Upaya menjamin kualitas hidup lansia pemerintah dan sector swasta telah memberikan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mewajibkan memberikan skrinning kesehatan sesuai standar pada lansia yang berusia 60 tahun keatas minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Layanan skrining lansia meliputi :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
- Deteksi Diabetes Melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental dan emosional dan perilaku, termasuk kepikunan.

Layanan skrining terhadap lansia ini dapat dilakukan oleh kader, oleh dokter, bidan, perawat, nutrisisionis/ tenaga gizi dan kader posyandu lansia/ posbindu. Lansia yang berdasarkan hasil skrining dinilai memiliki faktor resiko, diwajibkan untuk melakukan intervensi secara dini, dan mereka yang

menderita penyakit, akan ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

Cakupan pelayan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 57,2 % masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Masih terbatasnya jumlah petugas yang mampu melakukan skrining pada lansia.
- Reagen untuk pemeriksaan labor pada lansia tidak mencukupi.

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah penderita DM di kabupaten Merujuk kepada pengertian indicator ini, maka untuk tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 90,7%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 95 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar terhadap jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten. Merujuk kepada pengertian indicator ini, maka untuk tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 58,1%, artinya dari 100 orang dengan resiko terinfeksi HIV, baru 58 orang yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

2.4.4. Angka Kematian Ibu

Tahun 2022 AKI Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 205, 607 dari sebanyak 5.350 kelahiran hidup.

Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Tahun	Jumlah kematian Ibu	Jumlah kematian Balita	Keterangan
1	2018	2 kasus	62 kasus	
2	2019	11 kasus	60 kasus	
3	2020	6 kasus	60 kasus	
4	2021	10 kasus	50 kasus	
5	2022	11 kasus	73 kasus	

Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022

- Perdarahan : 3 Kasus
- Gangguan Hipertensi : 4 Kasus
- Lain-lain : 4 kasus

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN). Secara umum untuk indikator program ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan masih dibawah target yaitu sebesar 71,4 %.

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- Anamnesis;
- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
- Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
- Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- Pemeriksaan kontraksi uteri;
- Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
- Pemeriksaan lochia dan perdarahan;

- Pemeriksaan jalan lahir;
- Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
- Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
- Pemeriksaan status mental ibu;
- Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
- Pemberian KIE dan konseling;
- Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap). Cakupan kunjungan nifas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar 64,1 %. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

- Blended Learning ANC dan USG bagi 10 orang dokter puskesmas terpilih
- Blended Learning Bidan bagi 4 orang bidan puskesmas terpilih.

Blended Learning USG bagi 6 orang dokter puskesmas terpilih.

2.4.5. Sumber Daya Kesehatan

Perlu adanya peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik. Selain itu ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang juga masih terbatas.

Penganggaran bidang kesehatan perlu ditingkatkan sehingga dapat disusun program dan kegiatan bidang kesehatan yang lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimum. Pembiayaan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Ketersediaan sumber daya kesehatan tingkat Puskesmas belum optimal, belum terpenuhinya kompetensi, jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan yang belum merata, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi tentang ketenagaan kesehatan. Dan seringnya terjadi mutasi petugas kesehatan / pengelola program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas kesehatan atau pengelola program yang baru.

2.4.6. Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten. Berdasarkan penjelasan indikator ini, untuk Tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,038%. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 385.634, yang mampu di tampung di RS Rujukan hanya sebanyak 100 orang.

2.4.7. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten Sampai dengan Tahun 2021, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada Musrenbang sudah tertata cukup apik dan rapi sesuai kebutuhan masyarakat bahkan tidak banyak mengalami perubahan. Hanya saja terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan, guna menyesuaikan dengan usulan Musrenbang serta program prioritas Kepala Daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat Pada Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah an daerah			Program : Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Kegiatan : Perencanaan, Panganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			Kegiatan : Perencanaan, Panganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	120,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	255,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi	1	120,000,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan	1	123,800,000	
			penyusunan dokumen RKA-SKPD					dokumen RKA- SKPD			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	50,000,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	19,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	19,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	18,000,000	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	19,027,462	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	10,000,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	10,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	75,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	75,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1000	75,999,999,934	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1000	61,531,292,372	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12	2,590,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12	2,590,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinkes	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	25	160,298,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinkes	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	25	160,298,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD laporan hasil	7	45,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	7	45,000,500	
	Akhir Tahun SKPD		koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			Akhir Tahun SKPD		laporan keuangan akhir tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	12	14,970,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	12	14,970,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinkes	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	25,020,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinkes	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	25,020,000	
	Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang milik daerah			Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang daerah			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	5,195,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	5,195,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik	Dinkes	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan	10	13,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik	Dinkes	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi	10	13,000,000	
	Daerah SKPD		hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD			Daerah SKPD		penilaian barang milik daerah SKPD			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalia n Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	22	20,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalia n Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang daerah pada SKPD	22	20,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD	2	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penatausahaan miilik daerah pada SKPD	12	120,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penatausahaan barang miilik daerah pada SKPD	12	120,000,000	
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
						Perencanaan Pengelolaan	Dinkes	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	12	30,000,000	
						Retribusi Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	60,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			
						Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinkes	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	17,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	15,949,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	15,949,500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkes	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	72,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkes	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	191,649,300	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	45	44,839,700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	45	44,839,700	
			peraturan perundang-undangan					perundang-undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	46	71,605,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	46	71,605,000	
	Administrasi Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah			Administrasi Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	12,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	12,500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	65,800,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	65,800,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	42,700,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	42,700,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	4,320,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	4,320,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	23,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	23,500,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	211,526,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	211,526,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	RSUD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	RSUD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Konsultasi SKPD		dan konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD					
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase ketersediaan barang daerah sesuai dengan perencanaan			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	750,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	550,000,000	
	Pengadanan mebel	Dinkes	Jumlah unit mebel yang disediakan	1	58,000,000	Pengadanan mebel	Dinkes	Jumlah unit mebel yang disediakan	1	57,315,000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinkes	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	96,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinkes	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	94,400,000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		terlasananan ya pelayanan kepegawaian a pada dinas kesehatan			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		terlasanananya pelayanan kepegawaiana pada kesehatan			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa menyurat	12	7,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	7,500,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	175,600,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	175,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	24,499,500	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	24,499,500	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	200,600,000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	200,600,000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			
			umum kantor yang disediakan								

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		tersedianya perawatan kendaraan operasional dan pembayaran STNK kendaraan dinas oprasiomal			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		tersedianya perawatan kendaraan operasional dan pembayaran STNK kendaraan dinas oprasiomal			
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	85,703,000	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	100,371,000	
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Dinkes	Jumlah kendaraan dinas operasional/1 apangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19	110,606,000	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Dinkes	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	146,156,250	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	RSUD	Jumlah kendaraan dinas operasional/ 1 apangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	RSUD	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
						Pemeliharaan mebel	Dinkes	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	19,390,000	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	12	24,080,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1	75,888,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1	75,888,000	
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase faskes yang melakukan pelayanan BLUD			Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase faskes yang melakukan pelayanan BLUD			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Tanjung Pati	Pusk Tanjung Pati	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	2,428,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Tanjung Pati	Pusk Tanjung Pati	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,705,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Gunuang Malintang	Pusk Rimbo Data	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	531,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Gunuang Malintang	Pusk Rimbo Data	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	380,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Taram	Pusk Halaban	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,186,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Taram	Pusk Halaban	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	945,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Suliki	Pusk Batu Hampar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	982,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Suliki	Pusk Batu Hampar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	820,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Situjuh	Pusk Mungo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,227,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Situjuh	Pusk Mungo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	940,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Rimbo Data	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	321,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Rimbo Data	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	250,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Baruah Gunuang	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	495,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Baruah Gunuang	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	350,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pangkalan	Pusk Pangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	915,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pangkalan	Pusk Pangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	970,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Banja Loweh	Pusk Banja Loweh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	533,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Banja Loweh	Pusk Banja Loweh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	420,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungo	Pusk Situjuh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	2,303,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungo	Pusk Situjuh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,350,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pakan Rabaa	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,323,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pakan Rabaa	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	985,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Piladang	Pusk Piladang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	528,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Piladang	Pusk Piladang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	480,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Batu Hampa	Pusk Suliki	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,416,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Batu Hampa	Pusk Suliki	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	910,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Halaban	Pusk Taram	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	788,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Halaban	Pusk Taram	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	640,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Muara Paiti	Pusk Muaro Paiti	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	984,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Muara Paiti	Pusk Muaro Paiti	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	975,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Sialang	Pusk Sialang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	775,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Sialang	Pusk Sialang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	620,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Koto Baru Smlg	Pusk Koto Baru Simalanggung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	2,597,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Koto Baru Smlg	Pusk Koto Baru Simalanggung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,850,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pusk Dangung-g-dangung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan	1	1,714,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pusk Dangung-g-dangung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,120,000,000	
	BLUD Pusk. Dangung Dangung		dan penunjang pelayanan			BLUD Pusk. Dangung Dangung		penunjang pelayanan			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungka	Pusk Mungka	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,532,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungka	Pusk Mungka	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1,055,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Kandis	Pusk Padang Kandis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	426,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Kandis	Pusk Padang Kandis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	350,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Koto Tinggi	Pusk Koto Tinggi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	972,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Koto Tinggi	Pusk Koto Tinggi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	725,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Maek	Pusk Maek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	812,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Maek	Pusk Maek	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	660,000,000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya					
	Kesehatan Masyarakat					Kesehatan Masyarakat					
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar Permenkes 43 tahun 2019.			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.					Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar Permenkes 43 tahun 2019.			
	Pembanguna n Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungn ya	Dinkes	Jumlah rumah sakit baru memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 10000	1	10,000,000,000	Pembanguna n Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungn ya	Dinkes	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 10000	1	5,647,827,100	
	Pembanguna n puskesmas	Dinkes	Jumlah puskesmas yang dibangun	1	7,333,858,200	Pembanguna n puskesmas	Dinkes	Jumlah puskesmas yang dibangun	3	7,901,858,200	
						Pembanguna n Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1	773,779,500	
	Pembanguna n Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2	2,000,000,000	Pembanguna n Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2	1,583,737,900	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengembangan puskesmas	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	13,920,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes	Jumlah sarana, sarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	4	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	22	795,509,500	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana, sarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	4	2,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	5	1,967,176,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana, sarana rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	2	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana, pra sarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	4	398,533,300	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2	2,500,000,000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2	1,956,677,400	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			
	Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas	Dinkes	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan	22	2,450,000,000	Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas	Dinkes	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4	2,613,425,000	
	Pelayanan Kesehatan		yang disediakan			Pelayanan Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / al at penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	6	2,955,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	22	2,973,586,696	
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah alat kesehatan / al at penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			
	Pengadaan dan Pemeliharaa n Kalibrasi	Dinkes	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaaaa n kesehatan regional	22	171,440,000	Pengadaan dan Pemeliharaa n Kalibrasi	Dinkes	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaaaan fasilitas kesehatan regional	22	171,440,000	
	Pengadaan Obat dan Vaksin	Dinkes	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	2,000,000,000	Pengadaan Obat dan Vaksin	Dinkes	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	1,965,722,700	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah bahan habis	1	1,300,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	1,256,021,407	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pakai yang disediakan								
	Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pemeliharaan	22	395,015,400	Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pemeliharaan	22	395,015,400	
	Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	6	246,550,000	Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	6	1,546,550,000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	23	414,344,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	23	414,344,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas	Dinkes	Jumlah distribusi alkes, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta faskes lainnya	288	137,375,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas	Dinkes	Jumlah distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta faskes lainnya	288	137,375,000	
	Kesehatan Lainnya					Kesehatan Lainnya					
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar			Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sesuai standar			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6526	61,238,100	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5919	208,218,900	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Dinkes	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6472. 7775	2,110,198,500	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Dinkes	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	587 1	2,110,198,500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6457	61,238,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	585 7	63,711,200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	26950	61,238,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	244 44	100,254,600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	11228	93,295,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	112 28	93,295,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinkes	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	258481	291,235,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinkes	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	258481	291,235,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Dinkes	Jumlah penduduk usia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31659	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Dinkes	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31659	75,926,500	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat	72204	60,442,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan	72204	60,445,000	
	Penderita Hipertensi		pelayanan kesehatan sesuai standar			Penderita Hipertensi		kesehatan sesuai standar			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2646	72,220,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2646	103,132,400	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	527	80,070,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	587	80,070,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6137	48,560,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6137	157,815,600	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko	Dinkes	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan	7785	73,005,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko	Dinkes	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7875	73,005,000	
	Terinfeksi HIV		sesuai standar			Terinfeksi HIV					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	19,625,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	19,625,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Dinkes	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	1	32,260,000						

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana		kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana sesuai standar								
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	RSUD	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana sesuai standar	300	148,800,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	RSUD	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	89,218,866	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	573,100,200	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	5	46,999,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	5	46,999,900	
	Kerja dan Olah Raga		Kerja dan Olah Raga			Kerja dan Olah Raga					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	244,810,225	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9	250,000,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	50,000,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	143,597,260	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	20,516,276	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	29,899,500	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	95,195,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	95,195,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6444	53,380,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6444	53,380,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Dinkes	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	36,469,037	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Dinkes	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	79,285,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	5	228,645,000	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	5	300,970,000	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Krisis Kesehatan dan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan	1	106,000,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Krisis Kesehatan dan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	121,860,000	
	Krisis Kesehatan		Krisis Kesehatan			Krisis Kesehatan					
	Sub Kegiatan : Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	198,000,000	Sub Kegiatan : Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	198,605,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	5,589,200,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	987,226,400	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
	Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinkes	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	4903	148,000,000	Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinkes	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	4903	100,480,000	
	Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	12	87,735,000	Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan / nasional yang didistribusikan	12	87,735,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6	74,098,101	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	6	250,000,000	
	Operasional pelayanan puskesmas	Dinkes	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	2,750,000,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pati	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1,111,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas		131,800,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Tanjung Pati	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	603	72,060,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Tanjung Pati	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	586	13,280,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Tanjung Pati	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	224	45,220,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Tanjung Pati	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1361	74,575,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Tanjung Pati	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3022	21,280,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	33,200,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	195,937,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	10,835,000	
						Pengelolaan Pelayanan	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	1	32,145,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kesehatan Lingkungan		Kesehatan Lingkungan			
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	83,135,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	52,800,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Tanjung Pati	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	13,915,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	124,212,500	
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal J	Pusk Tanjung Pati	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	4,640,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Tanjung Pati	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	150	33,200,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Tanjung Pati	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	129,900,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rimbo Data	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	591,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	11	174,174,200	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Rimbo Data	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	81	14,155,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Rimbo Data	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	73	2,600,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Rimbo Data	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	272	13,150,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Rimbo Data	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	146	6,000,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Rimbo Data	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1151	19,580,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Rimbo Data	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	206	6,942,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129	085,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	17	942,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	122	167,500	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120	327,500	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	144	942,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Rimbo Data	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	257	342,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130,612,500		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber					
						Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Rimbo Data	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	154,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber					
						Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat f UKBM)	Pusk Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	18,180,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Halaban	Pusk Halaban	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	740,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Halaban	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1179,287,500		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Halaban	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	252	25,245,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Halaban	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	232	2,560,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pusk Halaban	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	232	4,040,000	
						Bayi Baru Lahir					
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Halaban	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	859	57,730,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Halaban	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	440	13,365,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Halaban	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1172	4,345,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	340,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	69,655,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	18,070,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	24,110,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	6,975,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	39,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Halaban	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	8,335,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Halaban	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16	1,902,500	
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Pusk Halaban	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	1,940,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Halaban	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	254,000,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Hampar	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	740,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1114,045,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Batu Hampar	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan	20234,930,000		
								kesehatan sesuai standar			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Batu Hampar	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	202	6,520,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Batu Hampar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	201	5,260,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Batu Hampar	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	690	16,540,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Batu Hampar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	280	13,860,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Batu Hampar	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	572	4,140,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Batu Hampar	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	151	11,040,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	104,915,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	20,675,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	112,470,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	68,020,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	68,485,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Mungo	Pusk Mungo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1,029,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Mungo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	98,760,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Mungo	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	439	46,567,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Mungo	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	423	79,130,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Mungo	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	416	4,200,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Mungo	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	182	41,970,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Mungo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	593	8,270,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Mungo	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3259	20,010,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	8,940,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	1	156,698,000	
						Gizi Masyarakat		Kesehatan Gizi Masyarakat			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	9,700,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	48,954,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	58,995,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	43,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	11	1,680,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	99,490,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Mungo	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	9293	15,000,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Mungo	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	2	59,800,000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pusk Mungo	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	1	6,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Malintang	Pusk Gunuang Malintang S	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	591,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Gunuang Malintang S	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	206,140,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80	42,790,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Malintang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	941	1,760,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Malintang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	255	6,300,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Puskesmas Malintang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	368	2,735,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Puskesmas Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	5,410,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	76,665,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Puskesmas Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	2,460,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15,300,000		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16,405,000		
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143,800,000		
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Gunuang Malintang	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148,110,000		
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
						Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						daerah kabupaten / kota					
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pusk Gunung Malintang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.	1	6,460,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Baruh Gunuang	Pusk Baruh Gunuang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	726,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Baruh Gunuang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	219,702,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Baruh Gunuang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	108	17,745,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Baruh Gunuang	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	109	11,150,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Baruh Gunuang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	108	1,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	371	16,255,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	164	13,625,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	652	2,500,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	17	8,390,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Baruah Gunuang	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	40	6,350,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	4,980,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	69,790,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	990,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	18,107,500	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	22,980,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	47,810,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	173,175,000		
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	125,140,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah Keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2315		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Baruah Gunuan g	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	129,900,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	905,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1236,255,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Pangkal an	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	275	50,222,400	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Pangkal an	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	312	7,680,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Pangkal an	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	313	13,950,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Pangkal an	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	902	32,517,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Pangkal an	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	575	10,560,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Pangkal an	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	444	27,280,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Pangkal an	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	82	18,525,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172,328,200		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	113,615,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	125,560,000		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	125,854,400		
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	154,000,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Pangkal an	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	257,080,000		
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan	Pusk Pangkal an	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	155,247,500		
						tidak menular		Menular dan Tidak Menular			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Pangkal an	Jumlah Keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	228	5,750,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pusk Pangkal an	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	25	4,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sesuai Standar					
	Operasional Pelayanan Puskesmas Banja Loweh	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	685,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1294,707,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Banja Loweh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7729,200,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Banja Loweh	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	836,700,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Banja Loweh	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	845,300,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Banja Loweh	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	34620,572,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Banja Loweh	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15613,400,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Banja Loweh	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	966	5,080,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Banja Loweh	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	487	580,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	127	407,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	13	320,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	119	400,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	145	530,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150	753,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pusk Banja Loweh	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	5,140,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	49,960,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Banja Loweh	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1	29,900,000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Dae rah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya	Pusk Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	11	14,600,000	
						Masyarakat (UKBM)					
	Operasional Pelayanan Puskesmas Situjuh	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	987,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	12,306,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Situjuh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3764	1,570,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Situjuh	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1155	92,230,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Situjuh	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8473	2,710,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Situjuh	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1859	44,700,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Situjuh	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	63	17,105,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138	592,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	128	015,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	121	332,500	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	131	920,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Situjuh	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	254	302,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Situjuh	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153,897,500		
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Pusk Situjuh	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	124,800,000		
						Pemberian Obat Massal)					
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Rabaa	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1,057,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1160,230,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	38760,568,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	36210,420,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	109 6	29,130,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	775	13,425,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	229 3	5,937,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	125,397,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	34,160,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	36,741,600	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	52,552,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	168,705,900	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	19,337,500	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	79,520,000	
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	3,720,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Pusk Pakan Rabaa	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	129,900,000		
						Kesehatan Sesuai Standar					
	Operasional Pelayanan Puskesmas Piladang	Pusk Piladang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	646,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Piladang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1203,100,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Piladang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	16238,132,500		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Piladang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	169	600,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Piladang	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	635	20,309,400	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Piladang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	236	24,920,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Piladang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	203	10,437,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Piladang	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	56	11,250,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pusk Piladang	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	78	2,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131,417,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	18,800,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	111,897,600		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	118,310,000		
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	130,485,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Piladang	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	254,000,000		
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Piladang	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131,250,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Pusk Piladang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes		259,800,000	
						Kesehatan Sesuai Standar					
	Operasional Pelayanan Puskesmas Suliki	Pusk Suliki	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	905,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Suliki	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas		190,905,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Suliki	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	208	72,855,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Suliki	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	209	8,160,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Suliki	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	600	6,815,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Suliki	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	535	4,400,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Suliki	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	695	10,980,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	161,882,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	10,120,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	55,702,500	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	10,200,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	79,960,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Suliki	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	2,420,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Suliki	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	141,825,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Suliki	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	4668	12,160,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Suliki	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1	29,900,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Taram	Pusk Taram	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	740,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Taram	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	31,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Taram	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	287	74,025,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Taram	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	307	6,340,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Taram	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	310	7,920,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Taram	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1043	31,380,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Taram	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	408	10,120,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Taram	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	327	4,890,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	67,915,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	10,760,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	31,907,500	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	88,552,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Taram	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	16,425,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	33,080,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Pusk Taram	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	6,240,000	
						dan Pemberian Obat Massal)					
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Taram	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	129,900,000		
						Program Pemberdayaan					
						Masyarakat Bidang Kesehatan					
						Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota					
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pusk Taram	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.	18,700,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muaro Paiti	Pusk Muaro Paiti	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	905,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Muaro Paiti	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1248,820,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Muaro Paiti	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	227	34,380,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Muaro Paiti	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	260	14,560,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pusk Muaro Paiti	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	207	17,380,000	
						Bayi Baru Lahir					
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Muaro Paiti	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	367	33,140,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Muaro Paiti	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1435	57,715,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Muaro Paiti	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	368	25,490,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Muaro Paiti	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12	36,775,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Muaro Paiti	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200	49,097,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Muaro Paiti	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	12	63,700,000	
						Daya Manyusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Muaro Paiti	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	12	29,900,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sialang	Pusk Sialang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	747,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Sialang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1269,377,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Sialang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	207	23,557,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Sialang	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	211	2,360,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Sialang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	207	4,640,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Sialang	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	497	14,040,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Sialang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	373	15,640,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Sialang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1453	8,710,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pusk Sialang	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	14	3,540,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Sialang	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70	9,440,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pusk Sialang	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	168	2,360,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	27,880,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	11,700,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	11,680,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	14,775,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	46,320,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Sialang	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	1,180,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Sialang	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	60,695,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber					
						Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Sialang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	258,500,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Baru Smlg	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1,111,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	136,496,600		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	55249,440,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	552	6,260,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	554	4,520,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1404	70,315,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	861	48,900,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3649	33,360,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	408	8,340,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	21,880,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	73,515,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	16,420,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	15,560,000	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	22,015,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	327,726,300	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan	25	9,040,000	
								pelayanan kesehatan			
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	84,594,500	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Koto Baru Simalan ggang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	127,600,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Dangung Dangung	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	1,152,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1231,982,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	50247,840,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	48718,900,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	11796,280,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	11530,520,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	247	13,525,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	58	5,165,000	
						Gangguan Jiwa Berat					
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	281	18,240,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	100,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	126,987,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	1,210,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	43,952,500	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	31,250,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	95,100,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	820,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Dangun g-dangung	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	82,567,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	127,250,000		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1	29,900,000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
						Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembang an dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Day a Masyarakat (UKBM)	Pusk Dangun g- dangung	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	122,730,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Mungka	Pusk Mungka	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	905,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Mungka	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1214,575,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Mungka	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	56458,350,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Mungka	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	42718,904,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Mungka	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan	4273,150,000		
								kesehatan sesuai standar			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Mungka	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2500	23,470,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Mungka	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3018	7,500,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Mungka	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3688	5,600,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Mungka	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	198	14,880,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162,832,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	11,290,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	147,187,500		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	151,775,000		
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	186,821,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Mungka	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	255,065,000		
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174,574,500		
						Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Pusk Mungka	Jumlah laporan hasil Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	124,060,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Mungka	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes		127,600,000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat f (UKBM)	Pusk Mungka	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	1	2,790,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pd Kandis	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	706,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	203,890,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Padang Kandis	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	116	27,982,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan	Pusk Padang Kandis	Jumlah ibu bersalin yang mendapat	111	16,100,000	
						Kesehatan Ibu bersalin		elayanan kesehatan sesuai standar			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Padang Kandis	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	109	5,000,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Padang Kandis	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	305	14,762,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Padang Kandis	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	454	17,450,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Padang Kandis	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1032	6,687,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	69,112,500	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	16,300,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	114,797,500		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	119,277,500		
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	164,650,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Padang Kandis	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	254,862,500		
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153,437,500		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber					
						Daya Manyusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Padang Kandis	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1	29,900,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Tinggi	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	823,000,000	Operasional pelayanan puskesmas	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	189,917,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Koto Tinggi	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	216	19,590,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Koto Tinggi	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	197	44,327,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Koto Tinggi	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	197	880,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Koto Tinggi	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	768	58,910,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Koto Tinggi	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	425	17,000,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Koto Tinggi	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2147	24,397,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pusk Koto Tinggi	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	294	4,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capa ian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Koto Tinggi	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	564,520,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	18,040,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	151,170,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	113,182,500		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	131,667,500		
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	124,640,000		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	65,912,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Koto Tinggi	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	2,760,000	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	47,020,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Koto Tinggi	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	4800	7,200,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Koto Tinggi	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes		127,600,000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
						Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat f (UKBM)	Pusk Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM)	12,820,000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Maek	Pusk Maek	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	829,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas Maek	Pusk Maek	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1402,250,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pusk Maek	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	13434,897,500		

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pusk Maek	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	126	5,700,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pusk Maek	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	123	9,800,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pusk Maek	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	521	27,250,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pusk Maek	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	296	22,060,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pusk Maek	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	872	3,200,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Pusk Maek	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan	108	3,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gangguan Jiwa Berat		kesehatan sesuai standar			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pusk Maek	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	47	17,840,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12	2,200,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149	740,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	16	500,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	112	520,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144	150,000	
						Pengelolaan surveilans Kesehatan	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	124	200,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pusk Maek	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	253	382,500	
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pusk Maek	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1117	390,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pusk Maek	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	3234	1,400,000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Perencanaaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia					
						Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota					
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pusk Maek	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1	26,400,000	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	115,502,000	
	Operasional Pelayanan RS	RSUD	Jumlah dokumen operasional pelayanan RS	1	255,000,000	Operasional Pelayanan RS	RSUD	Jumlah dokumen operasional pelayanan RS			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan akreditasi faskes di kabupaten/ kota	Dinkes	Jumlah faskes yang terakreditasi di kabupaten/ kota	6	709,000,000	Pelaksanaan akreditasi faskes di kabupaten/ kota	Dinkes	Jumlah faskes yang terakreditasi di kabupaten / kota	6	556,561,000	
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5	289,250,000	
						Pemberian Obat Massal)					
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	106,867,800	Sub Kegiatan : Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	106,867,800	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	Jumlah public safety center (PSC) 119 tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam sistem penanganan gawat darurat terpadu f SPGDT)	1	1,038,300,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	Jumlah public safety center (PSC) 119 tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1	1,566,450,000	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Dinkes	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	98684	114,535,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh an tar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatn yang berkualitas	6	900,000,000						
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1	25,000,000						
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi			
	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	33,000,000	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	43,175,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	51,025,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	51,025,000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes	Jumlah alat Pengadaan Alat/Perangkat Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	6	176,625,000	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes	Jumlah alat Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	6	176,625,000	
	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dae rah Kabupaten/ Kota		Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin			Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dae rah Kabupaten/ Kota		Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Cata tan Penti ng
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes	Jumlah faskes yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu/INM pelayanan kesehatan	1	18,941,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes	Jumlah faskes yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu/INM pelayanan kesehatan	1	18,941,000	
3	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek			Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek			
	Sub kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1	24,477,200	Sub kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1	24,477,200	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	9,190,000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	9,190,000	
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019			Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	1	12,817,500	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	1	12,817,500	
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinkes	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1227	57,670,000	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinkes	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	1227	57,670,000	
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan	RSUD	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi			Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan	RSUD	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes			
	S umber Day a Manusia Kesehatan Sesuai Standar		standar di fasyankes			Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	194,990,100	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	194,990,100	
						Kegiatan : Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota					
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Dinkes	Jumlah SDM Kesehatan tingkat kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	11	112,824,300	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tingkat daerah kabupaten/ kota					
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Indikator Kegiatan : Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin			Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Indikator Kegiatan : Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Pengendalian Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optik, UMOT	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, UMOT	2	24,999,900	Sub Kegiatan : Pengendalian Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optik, UMOT	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optik, UMOT	70	24,999,900	
			Optik, UMOT								

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	Dinkes	Jumlah apotik, toko obat,toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan lanjut penerbitan izin toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	55	55,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	Dinkes	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	55	55,000,000	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT- P Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk					Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT- P Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga					produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga					
	Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	60	68,291,100	Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	Dinkes	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	60	68,291,100	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran		Jumlah sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran		Jumlah sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan			
	dan Depot Air Minum (DAM)					dan Depot Air Minum (DAM)					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Air Minum (DAM)	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengendalian Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	34,999,800	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Air Minum (DAM)	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengendalian Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	34,999,800	
	Kegiatan : Pemeriksaan Market pada Produk Makanan Minuman Industri		jumlah IRT-P yang diawasi			Kegiatan : Pemeriksaan Market pada Produk Makanan Minuman Industri		jumlah IRT-P yang diawasi			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	63,252,000	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	126,504,000	
5	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		% Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana			Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		% Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran					
						serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	198,825,000	
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase PHBS di masyarakat			Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase PHBS di masyarakat			

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	50,702,751	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	243,538,000	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500	233,320,000	
						Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD)					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	117,664,000	
						Masyarakat (UKBM)					

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun program / kegiatan, juga harus diperhatikan usulan program/kegiatan yang disulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, maupun masukan dari Dinas Kesehatan Propinsi dan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten. Namun dalam penganggaran, tetap disesuaikan dengan isu-isu penting di bidang kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Dari 5 usulan pokok-pokok pikiran DPRD, 2 diantaranya tidak dapat diakomodir karena pengadaan ambulan Nagari yng diuslkan bukan kewenangan Dinkes dan yang lainnya karena saat ini Puskesmas Piladang sedang dilakukan rehab berat.

Selain usulan dari pemangku kepentingan Dinas Kesehatan juga melakukan verifikasi terhadap 42 usulan yang berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, dan hanya 18 usulan yang dapat disetujui. Sisanya tidak dapat disetujui antara lain karena kegiatan yang diusulkan bukan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan,, dan beberapa usulan kegiatan yang diajukan belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya usulan yang disetujui dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Aspirasi dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

N o	Nama Sub Kegiatan yang Menampung Aspirasi	Uraian Aspirasi	output		Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Bayi	9	unit	30,000,000	Sariak Laweh, Kab. Lima Puluh Kota
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pocket Doppler	3	Unit / Tahun	10,500,000	Jorong Boncah, Kab. Lima Puluh Kota
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tensimeter	6	Unit / Tahun	21,000,000	Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tabung O2 beserta Regulator	3	Unit / Tahun	15,000,000	Jorong Boncah, Kab. Lima Puluh Kota
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Dewasa	6	Unit / Tahun	9,000,000	Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Examination Lamp (LED)	1	Unit / Tahun	8,000,000	Pustu Nagari Koto Tengah Simalanggang , Jorong Tambun Ijuk, Kab. Lima Puluh Kota
7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Pusling Roda 2 Puskesmas	2	Unit / Tahun	60,000,000	Jorong Sialang Atas, Kab. Lima Puluh Kota
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Timbangan Bayi	1	Unit / Tahun	3,500,000	Simalanggang , Kab. Lima Puluh Kota
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas	1	Unit / Tahun	250,000,000	Jorong Koto Ramai Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota
	JUMLAH				407,000,000	

No	Nama Sub Kegiatan yang Menampung Pokok Pikiran	Uraian Pokok Pikiran	output		Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Pustu	1	PAKET	400,000,000	Jrg. Koto tengah Nag. Nag. Galugua, Kab. Lima Puluh Kota
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Pustu	1	paket	250,000,000	kecamatan kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Pustu	2	paket	250,000,000	KEC.PANGKALAN KOTO BARU, Kab. Lima Puluh Kota
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas	1	paket	250,000,000	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Pustu	1	paket	250,000,000	Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas	1	paket	250,000,000	Luak Begak Kecamatan Gunuang Omeh, Kab. Lima Puluh Kota
	JUMLAH				1,650,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan, ditetapkan 8 Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, Masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk keputusan

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas 2018)	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas 2018)	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas 2018)	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63 (Kemkes, 2018)	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu

peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan sasaran- sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Angka Harapan Hidup	70
			Penurunan Prevalensi Stunting	5.29
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar	89.97
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan	89.97

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, musrenbang tingkat Propinsi dan musrenbang tingkat Nasional, serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumberdaya yang ada.

Untuk tahun 2023, Dinas Kesehatan merencanakan akan melaksanakan 5 program, 23 kegiatan, yang terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Perorangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan layanan Fasyankes dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- b. Penyediaan layanan kesehatan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatn secara terintegrasi; dan
- d. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D serta Fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi Kesehatn

Program ini bertujuan untuk menjamin legalitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten

- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini bertujuan untuk menjamin pangan industri rumah tangga dan farmasi yang aman dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi bidang kesehatan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Penguasaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- i. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- j. Peningkatan Pelayanan BLUD

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis prioritas masalah. Penetapan prioritas masalah dilakukan setelah mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah yang ditemukan. Penetapan prioritas masalah adalah penentuan urutan atau ranking dari beberapa permasalahan kesehatan yang kemudian akan ditanggulangi atau diatasi permasalahannya. Dalam menetapkan prioritas masalah, perlu diperhitungkan keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana, serta waktu yang tersedia. Penetapan prioritas masalah yang dilakukan disini menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth). Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan metode USG, yaitu sebagai berikut:

a. Urgensi Masalah (Urgency)

Urgency berkaitan dengan tersedianya waktu dan tingkat kegawatan untuk segera ditanggulangi. Apabila masalah tidak ditanggulangi maka masalah tersebut akan semakin gawat.

b. Keseriusan Masalah (Seriousness)

Seriousness berkaitan dengan tingkat keseriusan. Apabila masalah tidak diselesaikan dapat berakibat serius pada masalah lainnya.

c. Perkembangan Masalah (Growth)

Growth berkaitan dengan besar/luasnya masalah. Semakin cepat berkembangnya masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Tabel 3.4 Enam Teratas Kelompok Masalah Kesehatan di Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Masalah	Kode
1	Kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak	A
2	Kesehatan lansia	B
3	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	C
4	Kesehatan lingkungan	D
5	Status gizi balita dan stunting	E
6	Kepesertaan JKN	F

Setelah melakukan pengkodean terhadap kelompok permasalahan kesehatan diatas, maka dilakukanlah proses penetapan prioritas masalah dengan metode USG. Proses penetapan prioritas masalah dengan metode USG ini dilakukan dengan membandingkan antara satu masalah dengan masalah lainnya, kemudian dinilai sesuai dengan indikator urgensi, keseriusan dan besarnya masalah. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Hasil Perioritas Masalah Kesehatan di Dinas Kab. Lima Puluh Kota Dengan Metode USG

Kode Masalah	U (<i>Urgency</i>)	S (<i>Seriousness</i>)	G (<i>Growth</i>)	Skor	Ranking Prioritas
A	5	4	2	11	3
B	3	1	0	4	5
C	4	4	5	13	2
D	1	2	3	6	4
E	5	5	4	14	1
F	0	0	1	1	6
Jumlah	15	15	15		

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat 3 besar prioritas masalah kesehatan pada Program / Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota yaitu : (1) Masalah status gizi balita dan stunting, (2) Masalah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan (3) Masalah kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak. Kemudian, masalah kesehatan lainnya yang juga penting, dan tetap harus ditangani, diselesaikan serta ditingkatkan capaiannya 100% adalah 12 SPM Kesehatan. Berikut rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tertuang dalam Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara lebih terperinci, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Prog-ram	Kegi-atan		Prog-ram	Kegi-atan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	140.516.164.992,00	5	18	190.184.411.928,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						106.546.107.983,00							143.156.187.998,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						106.546.107.983,00							143.156.187.998,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						106.546.107.983,00							143.156.187.998,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	79.528.885.724,00						-	85.598.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			100 %	0,00			-	-	-	-	434.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		77.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	79.150.866.124,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	82.867.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/bulan	79.150.866.124,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		80.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	181.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		123.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	364.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	54.629.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	427.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.675.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	28.754.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	16.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		259.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-			2 unit	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		64.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan kepegawaian pada dinas kesehatan</i>	-			12 Bulan	311.450.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	161.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		181.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		216.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya perawatan kendaraan operasional dan pembayaran STNK Kendaraan dinas operasional	-			26 unit	11.940.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	684.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		91.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		116.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	11.940.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat</i>	-			40 %	26.120.138.859,00						-	55.528.187.998,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase sarana prasarana puskesmas yang memenuhi standar sesuai Pemenkes 43 tahun 2019</i>	-			100 %	16.901.820.133,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	37.524.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1.260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	3.647.803.733,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.169.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				7 Unit	650.201.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	445.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1.783.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.514.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				22 Unit	157.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.519.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				288 Paket	277.262.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	8.445.569.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	17.802.187.998,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5919 Orang	69.609.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		286.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5871 Orang	169.685.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.485.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5857 Orang	33.230.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		86.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24444 Orang	45.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		137.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11228 Orang	147.946.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258481 Orang	150.001.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		408.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31659 Orang	52.034.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		103.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				72204 Orang	85.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2646 Orang	145.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				587 Orang	75.002.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6137 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7875 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		102.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		111.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	80.436.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		827.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	28.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	112.885.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		144.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		111.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		124.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	224.990.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	5.327.516.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		7.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		141.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		119.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	649.017.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		336.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	89.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.782.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		615.287.998,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	-			100 %	697.749.226,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	697.749.226,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin	-			100 %	75.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	127.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan	-			70 %	375.087.700,00						-	608.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang di berikan rekomendasi izin praktek	-			205 orang	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM kesehatan di Fasyankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	-			100 %	200.135.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	416.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1227 Orang	200.135.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		64.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		336.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	174.952.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				11 Orang	174.952.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase IRTP yang mempunyai izin Persentase sarana kefarmasian yang mempunyai izin</i>	-			75 % 100 %	339.989.900,00						-	219.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Jumlah Apotek, Toko obat, Toko ALKES dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin</i>	-			57 unit	49.995.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				70 Dokumen	49.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT yang di terbitkan	-			60 Unit	74.995.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	74.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang di terbitkan	-			10 Unit	165.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				3 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT-P yang di awasi	-			25 unit	49.999.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	49.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	-			69 %	182.005.800,00						-	1.203.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	89.998.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	478.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5 Dokumen	89.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		478.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS di masyarakat	-			50 %	92.007.800,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	623.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	92.007.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		367.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		256.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	102.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		102.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TARAM						1.628.349.806,00							2.141.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.628.349.806,00							2.141.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.628.349.806,00							2.141.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.023.830.960,00						-	1.304.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.023.830.960,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.304.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.582.356.592,00							2.104.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	770.695.155,00						-	1.081.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	770.695.155,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.081.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	770.695.155,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.081.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	811.661.437,00						-	1.023.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	811.661.437,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.023.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	811.661.437,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.023.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
		PUSKESMAS SITUJUJUH						1.639.475.216,00							2.466.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.639.475.216,00							2.466.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.639.475.216,00							2.466.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	863.751.860,00						-	1.350.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	863.751.860,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.350.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						743.965.317,00							1.015.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	235.465.516,00						-	354.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	235.465.516,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	354.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	235.465.516,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		354.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	508.499.801,00						-	661.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	508.499.801,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	661.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	508.499.801,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		661.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
		PUSKESMAS BARUH GUNUANG						847.312.600,00							1.356.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						847.312.600,00							1.356.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						847.312.600,00							1.356.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	300.628.898,00						-	545.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	300.628.898,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	545.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	300.628.898,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		545.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	546.683.702,00						-	811.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	546.683.702,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	811.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	546.683.702,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		811.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG	
		PUSKESMAS PANGKALAN							1.774.975.374,00							2.030.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.774.975.374,00							2.030.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.774.975.374,00							2.030.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	927.285.152,00						-	1.007.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	927.285.152,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.007.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	927.285.152,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.007.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	847.690.222,00						-	1.023.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	847.690.222,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.023.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	847.690.222,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.023.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
		PUSKESMAS BANJA LOWEH						925.883.746,00							1.351.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						925.883.746,00							1.351.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						925.883.746,00							1.351.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	388.100.000,00						-	586.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	388.100.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	586.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	388.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		586.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	537.783.746,00						-	765.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	537.783.746,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	765.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	537.783.746,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		765.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH	
		PUSKESMAS TANJUNG PATI							2.823.235.120,00							3.927.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.823.235.120,00							3.927.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.823.235.120,00							3.927.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.767.474.770,00						-	2.672.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.767.474.770,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.672.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.767.474.770,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.672.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	1.055.760.350,00						-	1.255.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	1.055.760.350,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.255.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.055.760.350,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.255.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
		PUSKESMAS MUNGO						2.139.611.651,00							2.468.223.930,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						833.387.721,00							1.162.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						833.387.721,00							1.162.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	833.387.721,00						-	1.162.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	833.387.721,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.162.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	833.387.721,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.162.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	X	NON URUSAN						1.306.223.930,00							1.306.223.930,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.306.223.930,00							1.306.223.930,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	1.306.223.930,00						-	1.306.223.930,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD</i>	-			100 %	1.306.223.930,00			-	-	-	-	1.306.223.930,00	PUSKESMAS MUNGO
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				0 Unit Kerja	1.306.223.930,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		1.306.223.930,00	PUSKESMAS MUNGO
		PUSKESMAS PAKAN RABAA						1.977.966.243,00							2.649.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.977.966.243,00							2.649.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.977.966.243,00							2.649.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	1.055.235.390,00						-	1.455.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.055.235.390,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.455.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.055.235.390,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.455.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	922.730.853,00						-	1.194.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	922.730.853,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.194.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	922.730.853,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.194.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
		PUSKESMAS PILADANG						978.955.699,00							1.302.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						978.955.699,00							1.302.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						978.955.699,00							1.302.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	461.894.497,00						-	581.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD</i>	-			100 %	461.894.497,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	581.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.625.151.244,00							2.395.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	919.065.198,00						-	1.558.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	919.065.198,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.558.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	919.065.198,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.558.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	706.086.046,00						-	837.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	706.086.046,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	837.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	706.086.046,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		837.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
		PUSKESMAS HALABAN						1.194.287.510,00							1.704.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.194.287.510,00							1.704.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.194.287.510,00							1.704.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	620.454.640,00						-	867.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD</i>	-			100 %	620.454.640,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	867.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.817.868.596,00							2.106.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.036.524.740,00						-	1.083.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.036.524.740,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.083.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.036.524.740,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.083.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	781.343.856,00						-	1.023.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	781.343.856,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.023.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	781.343.856,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.023.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
		PUSKESMAS SIALANG						1.198.734.195,00							1.686.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.198.734.195,00							1.686.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.198.734.195,00							1.686.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	566.788.836,00						-	852.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	566.788.836,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	852.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	566.788.836,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		852.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	631.945.359,00						-	834.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	631.945.359,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	834.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	631.945.359,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		834.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG	
		PUSKESMAS KOTO BARU SMLG							2.739.337.713,00							4.112.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.739.337.713,00							4.112.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.739.337.713,00							4.112.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.819.279.736,00						-	2.857.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.819.279.736,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.857.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.819.279.736,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.857.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	920.057.977,00						-	1.255.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	920.057.977,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.255.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	920.057.977,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.255.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
		PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG						2.119.571.578,00							3.187.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.119.571.578,00							3.187.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.119.571.578,00							3.187.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.202.411.520,00						-	1.885.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	1.202.411.520,00			-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.885.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.202.411.520,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.885.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	917.160.058,00						-	1.302.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart</i>	-			100 %	917.160.058,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.302.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	917.160.058,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.302.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
		PUSKESMAS MUNGKA						1.911.986.644,00							2.708.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.911.986.644,00							2.708.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.911.986.644,00							2.708.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	1.133.472.261,00						-	1.685.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	778.514.383,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.023.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
		PUSKESMAS PADANG KANDIS						774.580.935,00							1.256.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						774.580.935,00							1.256.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						774.580.935,00							1.256.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	333.873.321,00						-	468.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	333.873.321,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	468.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	333.873.321,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		468.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat</i>	-			40 %	440.707.614,00						-	788.000.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart</i>	-			100 %	440.707.614,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	788.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	440.707.614,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		788.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		
		PUSKESMAS KOTO TINGGI							1.316.798.200,00							2.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.316.798.200,00							2.000.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.316.798.200,00							2.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	631.572.824,00						-	1.070.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	631.572.824,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.070.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	631.572.824,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.070.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	685.225.376,00						-	930.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	685.225.376,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	930.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	685.225.376,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		930.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
		PUSKESMAS MAEK						1.319.078.550,00							1.820.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.319.078.550,00							1.820.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.319.078.550,00							1.820.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	743.963.180,00						-	893.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	743.963.180,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	893.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						890.574.480,00							1.245.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	392.007.616,00						-	584.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	-			100 %	392.007.616,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	584.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	392.007.616,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Gunuang Malintang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		584.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	-			40 %	498.566.864,00						-	661.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart	-			100 %	498.566.864,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	661.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	498.566.864,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		661.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	J U M L A H							140.516.164.992,00							190.184.411.928,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

5. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...	16
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... ..	70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	117
 BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	134
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	134
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	136
3.3. Program dan Kegiatan	138

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	140
	DAERAH	

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	39
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	67
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	72
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	117
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	138
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimana memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 3 dimana dokumen perangkat daerah meliputi: a) rencana strategis perangkat daerah dan b) rencana kerja perangkat daerah dan ayat 4 yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;

VI. Penetapan.

I. Persiapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 905/333/BUP-LK/XII/2023 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Jabatan Ex Officio, mengadakan rapat penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan seluruh unsur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam hal tata cara dan jadwal penyusunan penyusunan renja.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Renja. Adapun jadwal disusun sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan					2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan					2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan																																
4	Penyempurnaan ranwal Renja berdasarkan hasil Forum PD dan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan					2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
E	Penetapan Renja																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	PD lainnya																												
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																												
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																												
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																												
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																												

3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi Renja Tahun 2022.

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi.

Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah. Penyajian Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

IV. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah antar pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat

atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam wujud pendekatan partisipatif perencanaan. Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Februari 2023 dengan narasumber yaitu Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

VI. Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga peridode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan **Misi Pertama** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan bersaing berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2022, mempedomani pada Rencana Strategis Tahun 2024, hasil evaluasi renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun tahun sebelumnya dan evaluasi hasil renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2024 mengikuti arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berisi kebijakan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibiayai melalui berbagai sumber dana yaitu DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan alokasi hibah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain:

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan diseluruh jenjang

Strategi yaitu:

- a. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan diseluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan Sekolah Menengah, khususnya bagi anak kurang mampu melalui pemberian dana bantuan pendidikan; anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi; dan bagi daerah 3T melalui program afirmasi;
- b. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.

2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan

Strategi yaitu:

- a. Melaksanakan program sekolah penggerak di seluruh jenjang mulai dari SD sampai Sekolah Menengah sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
- b. Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum, dan memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah dan siswa;
- c. Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi dan karakter;
- d. Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk akselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
- e. Memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membangun karier sesuai dengan bidangnya;
- f. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrument dalam mengukur kualitas hasil belajar.
- g. Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industry untuk memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industry; menyediakan pemagangan dan praktik kerja; mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standard dan kebutuhan industry;
- h. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- i. Menyediakan sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Tujuan rencana kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yaitu: mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun indikator tujuan /sasaran yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Program unggulan gubernur yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru.
2. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal)
3. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20%.
4. Seribu siswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
5. Membangun SMA/SMK/SLB baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dan kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Dinas pendidikan dan kebudayaan, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan tahapan Musrenbang nagari, musrenbang RKPD Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten guna merumuskan perencanaan Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yaitu :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.
3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2024.
3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Pearngkat Daerah serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2024 memuat target kinerja Tahun 2024 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

- 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2022 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

I. Program Pengelolaan Pendidikan

A. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1). Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.267.823.000,- dan realiasi keuangan Rp.108.855.000,- atau 40,46% serta realisasi fisik mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

II. Program Pengembangan Budaya

A. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.45.458.600,- atau 43,50 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 45 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

I. URUSAN PENDIDIKAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.369.300,- dan realisasi keuangan Rp. 154.056.097,- atau 98,52 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 2 dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.232.700,- dan realisasi keuangan Rp.1.232.700,- atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen RKA-SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.285.400,- dan realisasi keuangan Rp.14.900.000,- atau 97,48 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.285.400,- dan realisasi keuangan Rp.15.275.400,- atau 99,93% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen DPA-SKPD.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.285.400,- dan realiasi keuangan Rp.15.275.400,- atau 99,93 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.922.000,- dan realiasi keuangan Rp.21.228.000,- atau 78,85% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.175.100,- dan realiasi keuangan Rp.15.370.100,- atau 80,16% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.384.713.027.848,- dan realisasi keuangan Rp.376.161.632.220,- atau 97,78% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 62.480.000,- dan realisasi keuangan Rp. 56.616.000,- atau 90,61% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.655.000,- dan realisasi keuangan Rp.191.000.000,- atau 97,12% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.844.200,- dan realiasi keuangan Rp.18.844.200,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- b. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.208.255.000,- dan realiasi keuangan Rp.208.232.977,- atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.943.800,- dan realiasi keuangan Rp.76.943.800,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.020.000,- dan realiasi keuangan Rp.139.953.961,- atau 99,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.520.000,- dan realiasi keuangan Rp.9.520.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.364.000,- dan realisasi keuangan Rp.99.600.888,- atau 59,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian

kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.289.390.000,- dan realisasi keuangan Rp.288.690.000,- atau 99,76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.567.500,- dan realiasi keuangan Rp.147.955.850,- atau 99,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.100.000,- dan realiasi keuangan Rp.43.100.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.112.600.000,- dan realiasi keuangan Rp.700.000,- atau 0,62% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi keuangan masih 0,62% walaupun realisasi Fisik sudah mencapai 100% ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, sehingga pembayaran terhadap pekerjaan fisik yang sudah selesai 100% ini akan dilaksanakan pada tahun 2023. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor.

B. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.672.800.000,- dan realiasi keuangan Rp.670.202.000,- atau 99,61% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 3 ruang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.820.398.000,- dan realiasi keuangan Rp.815.997.000,- atau 99,46 % serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 9 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.635.858.000,- dan realiasi keuangan Rp.624.065.000,- atau 98,15% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 3 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah.

- d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.644.560.000,- dan realiasi keuangan Rp.4.782.861.350,- atau 84,73 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 48 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

Realisasi keuangan masih 84,73% walaupun realisasi fisik sudah 100%, terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum dibayarkan karena keterbatasan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.748.800.000,- dan realiasi keuangan Rp.377.600.000,- atau 50,43 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sebanyak 11 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.

Realisasi keuangan masih 50,43% walaupun realisasi fisik sudah 100%, terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum dibayarkan karena keterbatasan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

- f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.5.088.000,- atau 6,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari

sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 1 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU. Realisasi keuangan masih 6,78% walaupun realisasi fisik sudah 100%, karena paket pekerjaan yang belum dibayarkan disebabkan oleh keterbatasan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

- g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.200.000,- dan realiasi keuangan Rp.173.880.000,- atau 99,82 % serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 3 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.324.400.000,- dan realiasi keuangan Rp.322.290.000,- atau 99,35 % serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 1 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel Sekolah.
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.721.599.200,- dan realiasi keuangan Rp.716.567.000,- atau 99,30% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.

- j. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.593.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.9.064.297.000,- atau 94,49 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebanyak 11 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- k. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.212.500,- dan realiasi keuangan Rp.136.100.000,- atau 95,03% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- l. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.300.000,- dan realiasi keuangan Rp.154.300.000,- atau 100 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.230.740.000,- dan realiasi keuangan Rp.41.711.676.068,- atau 98,77 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

- n. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.602.500,- dan realiasi keuangan Rp.15.602.500,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.100.383.000,- atau 99,39 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 1 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.661.016.000,- dan realisasi keuangan Rp.659.460.000,- atau 99,76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 3 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.495.000,- dan realiasi keuangan Rp.2.389.427.100,- atau 85,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Laboratorium sebanyak 5 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Laboratorium. Realisasi keuangan masih sebesar 85,32% dengan realisasi fisik 100% disebabkan karena adanya sisa tender pekerjaan yang bersumber dari Dana DAK.

- d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.992.645.000,- dan realiasi keuangan Rp.590.442.700,- atau 59,48 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 11 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

Realisasi keuangan masih 59,48% walaupun realisasi fisik sudah 100%, karena paket pekerjaan yang belum dibayarkan disebabkan oleh keterbatasan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

- e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.600.000,- dan realiasi keuangan Rp.24.595.000,- atau 99,98 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel Sekolah.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.484.850.000,- dan realiasi keuangan Rp.483.204.000,- atau 99,66% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
- g. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.836.080.000,- dan realiasi keuangan Rp.646.284.000,- atau 77,30 % serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebanyak 5 paket, dengan capaian kinerja berupa

meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa. Beberapa paket dari sub kegiatan ini juga beum dibayarkan meski fisik telah 100% dan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

- h. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.131.000,- dan realiasi keuangan Rp.157.052.650,- atau 96,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- i. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.350.000,- dan realiasi keuangan Rp.11.550.000,- atau 93,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.192.880.000,- dan realiasi keuangan Rp.13.411.352.754,- atau 78,01% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- k. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.802.500,- dan realiasi keuangan Rp.22.802.500,- atau 100 % serta realisasi fisik mencapai

100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

3. Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.634.400.000,- dan realiasi keuangan Rp.631.779.000,- atau 99,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebanyak 7 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.065.985.000- dan realiasi keuangan Rp.2.024.201.000,- atau 97,98 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 20 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.0,- atau 0 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebanyak 1 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD. Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebanyak 1 paket ini belum

dibayarkan di tahun anggaran 2022, dan akan dibayarkan di tahun 2023.

- d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.0,- atau 0 % serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD sebanyak 3 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel PAUD. Pengadaan mebel PAUD ini juga belum dibayarkan di tahun anggaran 2022, dan akan dibayarkan di tahun 2023.
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.098.000,- dan realiasi keuangan Rp.10.098.000,- atau 100 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perlengkapan Siswa PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Perlengkapan Siswa PAUD.
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.730.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.696.660.000,- atau 95,43% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD sebanyak 30 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.178.980.000,- atau 99,43 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.140.000,- dan realiasi keuangan

Rp.69.140.000,- atau 100 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD.

- i. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.496.000,- dan realisasi keuangan Rp.373.990.500,- atau 98,55 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyelenggaraan proses belajar PAUD.
- j. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.64.860.762,- atau 99,79 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD.
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD yang bersumber dari DAK Non Fisik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.112.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.4.880.400.000,- atau 95,47 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD di 284 PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP PAUD.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.40.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.0,- atau 0 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Pekerjaan ini juga belum dibayarkan di tahun 2022 dan akan dibayarkan pada tahun 2023.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.041.500,- dan realiasi keuangan Rp.17.585.600,- atau 26,23 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.220.000,- dan realiasi keuangan Rp.38.775.762,- atau 98,87 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/ Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.6.000.000,- atau 100 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

- e. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.512.509,- dan realiasi keuangan Rp.21.280.000,- atau 98,92 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.856.800.000,- dan realiasi keuangan Rp.2.856.800.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan.

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.933.200,- dan realiasi keuangan Rp.178.389.600,- atau 98,05 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan

capaian kinerja berupa meningkatnya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

II. URUSAN KEBUDAYAAN

A. Program Pengembangan Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.99.051.000,- atau 99,05 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

2. Kegiatan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.49.255.800,- atau 98,51 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional.

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.104.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.45.458.600,- atau 43,50 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 45 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.47.718.000,- atau 99,41 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan capaian kinerja meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga adat.

B. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Keseniaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.139.288.800,- atau 58,04 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional ini adalah terlaksananya dengan capaian kinerja meningkatnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional.

C. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.23.274.400,- atau 93,10% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya dengan capaian kinerja Perlindungan Cagar Budaya.
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran pada **Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**, Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Realisasi keuangan 40,46% dan realisasi fisik mencapai 80% disebabkan karena penyaluran honor guru tahfidz tidak dapat direalisasikan karena Revisi Perbup tahfidz sampai akhir desember masih dalam tahap perampungan, dan untuk **Program Pengembangan Budaya, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan realisasi keuangan 43,50 % serta realisasi fisik 45 %disebabkan oleh Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2022 sekretariat DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sub Kegiatan Pembahasan Ranperda juga mengusulkan Ranperda Adat dan Budaya, sehingga Ranperda yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sama dengan yang diusulkan oleh DPRD.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah : dengan ketidaktercapaian target pada indikator tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target pada tahun berikutnya.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mengalokasikan

kembali anggaran pada sub kegiatan tersebut, agar target pada indikator tersebut dapat tercapai.

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		12		0			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
1	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	100.00	4	6	300.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1		1	1	100.00	-	1	100.00
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1		1	1	100.00	-	1	100.00
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2		2	1	50.00	1	2	100.00
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		1	1	100.00	2	3	300.00
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja	1		1	1	100.00	22	23	2300.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						SKPD								
1	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1		1	1	100.00	2	3	300.00
1	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah				-				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12		12	12	100.00	12	24	200.00
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12			-		1	1	8.33
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12			-		-	-	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12			-		-	-	0.00
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12			-		-	-	0.00
1	01	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	12			-		1	1	8.33
1	01	01	2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2		2	-	0.00	2	2	100.00
1	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah				-				
1	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60		60	-	0.00	-	-	0.00
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22		22	22	100.00	-	22	100.00
1	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Nibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22		22	22	100.00	80	102	463.64
1	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah				-				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12		12	12	100.00	60	72	600.00
1	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		12	12	100.00	1	13	108.33
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12	12	100.00	7	19	158.33
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		12	12	100.00	207	219	1825.00
1	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-				
1	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-		-	-	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	-		-	-		-	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-		-	-	
1	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		12	12	100.00	4	16	133.33
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	12	100.00	4	16	133.33
1	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		-	-		-	-	0.00
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12	100.00	8	20	166.67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				-				
1	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	12		-	-		48	48	400.00
1	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		12	12	100.00	-	12	100.00
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12		1	4	400.00	100	104	866.67
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12		12	12	100.00	1	13	108.33
1	01	02			Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100			-				0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.01		Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar				-				
1	01	02	2.01	02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18		18	-	0.00	7	7	38.89
1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	7		7	6	85.71	7	13	185.71
1	01	02	2.01	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31		31	18	58.06	15	33	106.45
1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9		9	5	55.56	7	12	133.33
1	01	02	2.01	06	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12		12	90	750.00	30	120	1000.00
1	01	02	2.01	07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1		1	-	0.00	3	3	300.00
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	14		14	21	150.00	15	36	257.14

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		7	2	28.57	5	7	#DIV/0!
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8		8	-	0.00	5	5	62.50
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	6		6	5	83.33	10	15	250.00
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-		-	-		5	5	#DIV/0!
1	01	02	2.01	14	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31		31	7	22.58	500	507	1635.48
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-		-	-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-		-	-	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.01	17	Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370		370	-	0.00	2,380	2,380	643.24
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5		5	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.01	21	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		360	362	100.56	370	732	#DIV/0!
1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	21		21	23	109.52	3	26	123.81
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1		1	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	1		1	-	0.00	370	370	37000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Rekomendasi								
1	01	02	2.01	25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4		4	1	25.00	10	11	275.00
1	01	02	2.01	26	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2		2	-	0.00	179	179	8950.00
1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2		2	2	100.00	560	562	28100.00
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366		366	366	100.00	370	736	201.09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.01	30	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1		1	1	100.00	-	1	100.00
1	01	02	2.02		Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama				-				
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18		6	2	33.33	3	5	27.78
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	7		3	-	0.00	5	5	71.43
1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31		1	6	600.00	3	9	29.03
1	01	02	2.02	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9		-	-		3	3	33.33
1	01	02	2.02	06	Pembangunan laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12		3	10	333.33	5	15	125.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-		-	-		3	3	#DIV/0!
1	01	02	2.02	09	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1			-		-	-	0.00
1	01	02	2.02	10	Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1		4	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.02	12	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6		4	17	425.00	21	38	633.33
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	4		4	-	0.00	10	10	250.00
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	1		1	-	0.00	5	5	500.00
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	3		3	-	0.00	4	4	133.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-			-		11	11	#DIV/0!
1	01	02	2.02	25	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21		3	1	33.33	1,000	1,001	4766.67
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-			-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.02	27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-			-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.02	28	Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-			-		1,120	1,120	#DIV/0!
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		57	57	100.00	-	57	#DIV/0!
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	57			-		-	-	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-		15	9	60.00	5	14	#DIV/0!
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1		1	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1		1	-	0.00	58	58	5800.00
1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4		4	-	0.00	10	10	250.00
1	01	02	2.02	39	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2		1	-	0.00	32	32	1600.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2		1	1	100.00	215	216	10800.00
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	366		55	-	0.00	58	58	15.85
1	01	02	2.02	43	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1		1	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.03		Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini				-				
1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	3		3	12	400.00	2	14	466.67
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	-			35		18	53	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3		2	1	50.00	3	4	133.33
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD (TK Pembina)	1		1	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.03	07	Pengadaan mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30		30	3	10.00	8	11	36.67
1	01	02	2.03	09	Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	-			-	#DIV/0!
1	01	02	2.03	10	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	223		223	7	3.14	2	9	4.04
1	01	02	2.03	12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	4		4	30	750.00	4	34	850.00
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4		4	1	25.00	5,650	5,651	141275.00
1	01	02	2.03	15	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1		1	70	7000.00	-	70	7000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.03	16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1		1	50	5000.00	90	140	14000.00
1	01	02	2.03	17	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1		1	1	100.00	150	151	15100.00
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6,341		6,341	-	0.00	279	279	4.40
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-			-		279	279	#DIV/0!
1	01	02	2.04		Pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan				-				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.04	01	Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-			-		1	1	
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3		2	-	0.00	1	1	33.33
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-		-	-		-	-	#DIV/0!
1	01	02	2.04	09	Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	21		21	4	19.05	15	19	90.48
1	01	02	2.04	10	Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2,252		2,252	2	0.09	-	2	0.09
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-			-		24	24	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21		21	1	4.76	3,405	3,406	16219.05
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	2,252		2,252	-	0.00	-	-	0.00
1	01	02	2.04	14	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1		1	1	100.00	-	1	100.00
1	01	02	2.04	15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21		21	1	4.76	108	109	519.05
1	01	02	2.04	16	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	21		21	-	0.00	27	27	128.57

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Manajemen								
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2,252		2,252	-	0.00	2	2	0.09
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	-			-		-	-	
1	01	04			Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	100			-				0.00
1	01	04	2.01		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan				-				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	1		1	-	0.00	-	-	0.00
1	01	04	2.01	02	Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	1		1	1	100.00	-	1	100.00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	02			Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	86			-				0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	02	2.01		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota				-				
2	22	02	2.01	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1		1	-	0.00	11	11	1100.00
2	22	02	2.01	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1		1	1	100.00	4	5	500.00
2	22	02	2.02		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota				-				
2	22	02	2.02	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	1		1	-	0.00	10	10	1000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemanfaatan								
2	22	02	2.02	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1		1	1	100.00	10	11	1100.00
2	22	02	2.03		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota				-				
2	22	02	2.03	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		1	1	100.00	-	1	#DIV/0!
2	22	02	2.03	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1		1	-	0.00	2	2	200.00
2	22	02	2.03	03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		6	1	16.67	1	2	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	03			Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	89			-				0.00
2	22	03	2.01		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota				-				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1			-		100	100	10000.00
2	22	04	2.02	02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1			-		-	-	0.00
2	22	03	2.01	03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		1	3	300.00	3	6	600.00
2	22	04			Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	90			-				0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	04	2.01		Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota				-				
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1		1	-	0.00	1	1	100.00
2	22	04	2.01	02	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1			-		-	-	0.00
2	22	04	2.01	03	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1			-		-	-	0.00
2	22	05			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90			-				0.00
2	22	05	2.01		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota				-				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1		1	-	0.00	2	2	200.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	05	2.01	02	Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1		1	-	0.00	1	1	100.00
2	22	05	2.02		Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota				-				
2	22	05	2.02	01	Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1		1	1	100.00	2	3	300.00
2	22	05	2.02	02	Pengembangan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1		1	-	0.00	-	-	0.00
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1		1	-	0.00	3	3	300.00
2	22	06			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90			-				0.00
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota				-				
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permesiuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-		1	-	0.00	2	2	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Analisa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Pencapaian kinerja ini berpedoman pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026. Untuk lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat lihat pada Tabel T-C.30.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKU Kepala Daearah	IKU Kepala OPD	IKD	Target Renstra OPD (Tahun)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Angka rata-rata lama sekolah		√	√		8,23	8,30	8,37	8,44	8,08		8,37	8,44	
2.	Angka harapan lama sekolah		√	√		13,76	13,35	14,13	14,32	13,4		14,13	14,32	
3	Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)				√	287	295	301	315	313		301	315	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)													
4	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	√				51,69	52,19	52,69	53,19	43,35		52,69	53,19	
5	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	√				08,92	109,80	110,68	111,56	95,81		110,68	111,56	
6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	√				87,54	89,17	90,8	92,43	92,06		90,8	92,43	
	Angka Partisipasi Murni (APM)													
6	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	√				99,46	99,63	99,80	99,97	87,36		99,80	99,97	
7	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	√				83,11	84,54	85,97	87,40	77,78		85,97	87,40	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)													
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	√				99,30	99,39	99,48	99,57	86,73		99,48	99,57	
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	√				97,25	97,46	97,67	97,88	77,96		97,67	97,88	
	Angka Putus Sekolah													
10	Angka putus sekolah SD/MI			√		0,001	0,001	0,001	0,001	0,01		0,001	0,001	
11	Angka putus sekolah SMP/MTs			√		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	
	Angka Kelulusan													
12	Angka kelulusan (AL) SD/MI			√		100	100	100	100	100		100	100	
13	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs			√		100	100	100	100	100		100	100	

	Angka Melanjutkan (AM)												
14	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs		√		100	100	100	100	95,18		100	100	
	Fasilitas Pendidikan												
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		√		1256	1506	1756	2006	371		1756	2006	
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		√		432	457	482	507	575		482	507	
17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		√		88,95	88,95	89	89,05	73,95		89	89,05	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah		√								25,90	25,91	
29	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	√			10,75	10,80	10,86	10,90	9,07		10,86	10,90	
20	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah	√									8,80	8,82	
21	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar	√			0,46	0,47	0,48	0,49	0,375		0,48	0,49	
22	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan menengah	√			1,79	1,80	1,81	1,8			1,81	1,82	
23	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	√			43,75	44,25	44,75	45,25	50,81		44,75	45,25	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	√			88,41	89,16	89,91	90,66	84,27		89,91	90,66	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	√			46,12	46,22	46,32	46,42	47,25		46,32	46,42	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	√			2,80	2,85	2,90	2,95	2,4		2,90	2,95	
	Kebudayaan												
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		√		4	4	5	5	1		5	5	
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		√		105	105	110	110	110		110	110	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		√		68	70	70	75	68		70	75	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		√		14	20	20	25	0		20	25	
5	Terlestarikan cagar budaya		√		75	80	85	90	65		85	90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah untuk Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota**

Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Adapun misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari lima (5) misi tersebut di atas yang terkait dengan pembangunan daerah terhadap pelayanan dasar Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi ke satu (1) yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dengan sasaran yaitu optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya

Maka dalam rangka mewujudkan misi ke satu (1) program-program pendidikan dan kebudayaan mengacu yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan faktor pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ujung tombak dalam penentuan keberhasilan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan harapan dan cita-cita pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dan pengembangan nilai seni dan budaya daerah.

Adapun isu strategis yaitu :

1. Implementasi kurikulum muatan lokal BAM pada satuan Pendidikan
2. Penyelenggaraan program Inklusi dalam rangka pemenuhan hak peserta didik di satuan Pendidikan formal
3. Gerakan transisi PAUD-SD yang menyenangkan
4. Gerakan sekolah sehat dalam mengurangi sampah plastik pada satuan Pendidikan
5. Asesmen nasional dalam mengukur tahapan pembelajaran peserta didik
6. Program sekolah penggerak
7. Program Guru Penggerak

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disesuaikan dengan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rencana kerja yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
9. Program Pengelolaan Permuseuman

Analisa Kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pendidikan disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari stakeholder dan lintas Perangkat Daerah dan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Hasil Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ditetapkan pada proses ini sama dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD. Hanya terdapat perbedaan pada target dan jumlah anggaran yang dibutuhkan, dimana jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari Rancangan Awal RKPD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah n daerah	12	562,138,394,145	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah n daerah			408,054,517,940	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah		561,477,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah			50,000,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	174,581,440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	27,879,170	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,502,000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	27,879,170	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,502,000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	27,879,170	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3,502,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	27,879,170	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,502,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	220,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,980,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	55,379,280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11,012,000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah		556,710,671,265	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				407,679,551,137	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	556,632,021,265	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	407,677,226,137	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	18,150,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	465,000	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	18,150,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	465,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	18,150,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	465,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	465,000	
	Penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	12	12,100,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	465,000	
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1,221,381,480	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				555,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1,221,381,480	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	555,000	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah		473,900,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,560,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	500,000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	198,900,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	600,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	175,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	460,000	
	Administrasi umum perangkat daerah		Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah		963,464,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				136,769,180	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	52,600,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,520,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	574,438,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	62,277,180	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	147,120,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26,530,000	
	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	189,306,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,442,000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan			Pengadaan mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan			
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,727,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166,385,123	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,500,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	179,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,010,123	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,000,000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,486,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,875,000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		480,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19,697,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	12	65,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	573,750	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	190,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	573,750	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7,710,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	12	150,000,000	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	12 Unit	10,840,000	
	Program pengelolaan pendidikan		Persentase pengelolaan pendidikan	90	136,118,033,197	Program pengelolaan pendidikan		Persentase pengelolaan pendidikan	90	#VALUE!	
	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar		84,599,105,561	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar		-	
	Penambahan ruang kelas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7	3,082,618,000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1.756.160.000,00	
	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	7	2,347,373,600	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	398.990.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15	3,002,096,790	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	1.051.712.000,00	
	Pembangunan perpustakaan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7	3,523,601,400	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	850.688.000,00	
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	6,707,503,770	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	7.245.507.000,00	
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3	1,885,600,860	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	500.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	15	6,947,994,000	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	15 Ruang	8.500.623.617,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	945,814,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	945.814.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	709,050,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	170.978.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	717,455,200	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	685.360.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	10	2,240,930,780	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.404.160.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5	392,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	500.000,00	
	Pengadaan mebel sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500	2,089,175,000	Pengadaan Mebel Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	500 Paket	500.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia								Kebijakan PMK 212/Pemutakhiran SIPD
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia								
	Pengadaan perlengkapan siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370	4,043,126,450	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370 Paket	2.984.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan								
	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	-						
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360	721,599,200	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360 Peserta Didik	721.599.000,00	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	2,375,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	3.295.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	360	117,565,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	360 Satuan Pendidikan	500.000,00	
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	360	30,868,750	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	360 Dokumen	1.061.936.000,00	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	100	192,710,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	500.000,00	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	90	1,051,325,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	90 Orang	1.201.231.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENTING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dasar			
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1050	895,650,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1050 Orang	1.090.553.194,00	
	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	370	40,541,758,741	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	370 Satuan Pendidikan	40.541.758.741,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	360	38,289,020	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	360 Orang	500.000,00	
	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama		35,687,750,716			Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama			
	Penambahan ruang kelas sekolah baru	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	1,207,045,400	Pembangunan Ruang Kelas Baru	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	217.500.000,00	
	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	5	3,219,488,140	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	399,944,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	399.944.000,00	
	Pembangunan perpustakaan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	500,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	500.000.000,00	
	Pembangunan laboratorium	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	3,112,100,000	Pembangunan Laboratorium	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	3.112.100.000,00	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3	1,008,000,000	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 Ruang	500.000,00	
	Pembangunan fasilitas parkir	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2	300,000,000	Pembangunan Fasilitas Parkir	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit	500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-						
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21	575,668,940	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	870.000.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2,274,067,400	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1.305.000.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	670,802,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	500.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	397,750,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	397.750.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	739,200,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit	739.200.000,00	
	Pengadaan mebel sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000	1,100,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	500.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia								
	Pengadaan perlengkapan siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3	1,500,000,000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	2.000.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	57	525,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	57 Peserta Didik	525.000.000,00	
	Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	57	-						
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	500,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	500.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	59	32,252,000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	500.000,00	
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	59	22,132,880	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	59 Dokumen	1.105.232.000,00	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	200	321,796,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	500.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60	569,200,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 Orang	566.750.000,00	
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	293,706,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220 Orang	327.426.000,00	
	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	59	16,364,597,956	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	59 Satuan Pendidikan	16.364.597.956,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59	55,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59 Orang	500.000,00	
	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini		8,669,217,320						
	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1	245,678,800	Pembangunan Ruang Kelas Baru	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	698.987.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	8	1,378,759,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	8 Unit	1.681.254.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	341,716,600	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	556.796.500,00	
	Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD (TK Pembina)	1	82,500,000						
	Pengadaan mebel PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7	210,279,300	Pengadaan Mebel PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7 Paket	375.019.000,00	
	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1500	163,915,000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	1.126.304.000,00	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	14	395,576,720	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14 Paket	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5100	393,646,900	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5100 Peserta Didik	630.000,00	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	-						
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180	197,590,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang	486.031.000,00	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 PAUD	75,255,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	630.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dana BOP PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	294	5,184,300,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	294 Satuan Pendidikan	4.824.600.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	280	85,800,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	280 Orang	625.000,00	
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	617.280.000,00	
	Pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan		7,161,959,600						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	296,199,100	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	295.609.500,00	
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia								
	Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	30	300,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30 Paket	200.000,00	
	Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1550	1,345,029,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1550 Peserta Didik	420.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	32	68,742,000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Peserta Didik	630.000,00	
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	32	28,641,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	32 Dokumen	2.384.013.900,00	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	10,021,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	60,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	60.000.000,00	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32	38,427,500	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan	810.000,00	
	Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32	5,014,900,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	4.114.900.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Pengelola BOP sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	32	29,820,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32 Orang	600.000,00	
	Program pendidikan dan tenaga kependidikan		Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	83	895,650,000	Program pendidikan dan tenaga kependidikan		Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan			
	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan		Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/		895,650,000	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan		Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesetaraan					non formal/ kesetaraan			
	Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	560	895,650,000	Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan			Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan			
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar										
	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan				1,825,780,020						
	Program pengembangan kebudayaan		Persentase pengembangan kebudayaan	67	1,104,077,820	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan			608.756.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		153,807,720	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota				
	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembang an, Pemanfaatan	8	67,529,000	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembang an, Pemanfaatan	8 Objek	330.244.100,00	
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	86,278,720	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	278.512.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENTING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		732,423,600	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota				
	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8	440,495,600	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	600.000.000,00	
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	291,928,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	560.002.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lemba ga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	
	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota		217,846,500	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	54.510.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	150	217,846,500	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	150 Orang	217.851.200,00	
	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	0,00	
	Program pengembangan kesenian tradisonal		Persentase pengembangan kesenian tradisonal	80	276,373,500	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				650.005.000,00	
	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		276,373,500	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	260	150,000,000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	260 Orang	350.000.000,00	
	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1	-						
	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	126,373,500	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	300.005.000,00	
	Program pembinaan sejarah		Persentase pembinaan sejarah	60	144,248,300	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				251.350.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota		144,248,300	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100	144,248,300	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	251.350.000,00	
	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0 Unit	0,00	
	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	-	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	60	276,055,400	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				491.998.000,00	
	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		161,475,400	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	13	65,775,300	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	13 Objek	171.000.000,00	
	Penetapan cagar budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	110	95,700,100	Penetapan Cagar Budaya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	110 Objek	320.998.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENTING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		114,580,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
	Perlindungan cagar budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	31,780,000	Pelindungan Cagar Budaya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	99.995.000,00	
	Pengembangan cagar budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	-						
	Pemanfaatan cagar budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	82,800,000	Pemanfaatan Cagar Budaya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	150.000.000,00	
	Program pengelolaan permuseuman		Persentase pengelolaan permuseuman	60	25,025,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				99.999.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get cap aian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	CATATAN PENING
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan museum kabupaten/kota		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota		25,025,000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					
	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30	25,025,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30 Orang	99.999.400,00	
					700,327,191,412					531.907.895.248,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. Untuk menghimpun hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan Forum Lintas OPD, mengikuti Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakat lah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk Tahun 2024 yang akan diakomodir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam kamus usulan pada SIPD.

Terdapat lebih kurang 111 usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD dan 151 usulan dari hasil musrenbang yang diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Namun usulan tersebut belum dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena keterbatasan pagu indikatif yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

A. POKOK-POKOK PIKIRAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
A.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR				
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SD 06 Mungo Jorong BUKIK GOMBAK SITTUAK KEC. LUHAK , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nag. Koto Lamo , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Simpang Kapuak Kec Mungka , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 03 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 08 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 09 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 01 KOTO BARU SIMALANGGANG , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 09 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 03 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	JORONG KOTO TUO NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 08 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 03 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 04 Koto Tuo Jorong Padang Rantang kecamatan haru , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 05 KOTO TUO JORONG KOTO TUO NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 06 SARILAMAK KECAMATAN HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 09 SARILAMAK KECAMATAN HARAUI, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sdn 03 tarantang kenagarian tarantang kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	200	
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Talago Nagari VII Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nag. Taram, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
23	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nag. Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SD 06 Mungo Jorong BUKIK GOMBAK SITTUAK KEC. LUHAK, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	
26	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jrg Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto Kec Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Halaban Kec Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	6	
29	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN 03 SARILAMAK KECAMATAN HARAUI, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN 08 SARILAMAK KECAMATAN HARAUI, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
32	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	sdn 03 tarantang kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	taeh baruah kec. payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari VII Koto Talago Kec Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Amp Gadang, Kenagarian 7 Koto Talago Kec Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	13	
36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Koto Baru Simalanggang	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	20	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
		, Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia		
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	15	
38	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
39	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	nagari durian tinggi kecamatan kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
40	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	
41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kecamatan Luak, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300	
42	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Lima Puluh Kota , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50	
43	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50	
44	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	kecamatan payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50	
45	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	75	
46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300	
47	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	
48	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	
49	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	
50	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kecamatan Payakumbuh Dan Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	72	
51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17	
52	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kecamatan Luak, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	488	
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	1	
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	50	
B.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kec. Kapur IX , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMPN 04 KECAMATAN HARAUI , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2	
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMPN 04 KECAMATAN HARAUI , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1	
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	278	
C	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	5	
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	1	
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	4	
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Dusun Nan Anam Labuah Gunuang , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	1	
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Nagari Batu Payuang , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ampang Gadang Nagari VII Koto Talago , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1	
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	nagari koto alam kecamatan pangkalan koto baru, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1	
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa PAUD	1	
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kec Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa PAUD	1	
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jorong Balai Panjang Nagari Balai Panjang Kec Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa PAUD	1	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jorong Kubang Rasau , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa PAUD	1	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
13	Pengadaan Mebel PAUD	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengadaan mebel PAUD	10	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Nagari Koto Baru Simalanggang Kec Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	1	
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	orong suayan randah, kenagarian suayan kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	1	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jrg Ampang Gadang Nagari VII Koto Talago Kec Guguk, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	1	
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Piladang, Koto Tengah Batu Ampa, Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	1	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Piladang, Koto Tengah Batu Ampa, Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	1	
D	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN				
1	Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	KEC.PANGKALAN KOTO BARU, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1	
2	Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	kecamatan kapur ix, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1	
3	Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Nagari Sungai Baringin Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	
4	Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	nagari koto baru simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	
5	Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
A.	KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PANGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	3	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kec Payakumbuh , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50	
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
5	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
6	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
7	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kec. Situjuh Limo Nagari , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100	
8	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kec. Pangkalan Koto Baru , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50	
9	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kec. Guguak , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
10	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kec. Kapur IX , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
11	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	200	
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	
13	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Labuh Gunung, Kec. Lareh sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	
14	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
15	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	
16	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30	
17	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100	
18	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	kecamatan kapur ix, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
19	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	kecamatan pangkalan koto baru, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60	
20	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	NAGARI MUARO PAITI KEC. KAPUR IX , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50	
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	kecamatan kapur ix, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60	
22	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	KEC. PANGKALAN KOTO BARU , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	200	
23	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	KEC. KAPUR IX , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	70	
24	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	
25	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	nagari mungo kecamatan luak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40	
26	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50	
27	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50	
28	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	jorong purwajaya nagari sarilamak kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
29	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	jorong purwajaya nagari sarilamak kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	
30	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	jorong ketinggian nagari sarilamak kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	55	

B. USULAN MASYARAKAT

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
A.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR				
1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jorong Kampuang Baru, Jorong Apar, Jorong Pematang Aur, Jorong Batu Balabuah I dan Jorong Batu Balabuah II Nagari Sungai Naniang., Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
3	Pengadaan Mebel Sekolah	Ronah Pembangunan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	
4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Bukik Limbuku, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Balai, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Balai, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Suayan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN 01 / SDN 02 di Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN 01 dan SDN 02 Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Simpang Tiga, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Koto Ranah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	nagari ampalu, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 paket	
18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	nagari ampalu, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1 paket	
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	6 paket	
20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 paket	
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 paket	
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 paket	
23	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota		3 orang	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota		34 orang	
25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 paket	
26	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Lancaran, Korek Hilia, Batang Linjuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 paket	
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Lancaran, Korek Hilia, Batang Linjuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 -	
28	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Lancaran, Korek Hilia, Batang Linjuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3 paket	
29	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jorong Panang, Jorong Kulangan, Jorong Koto Lamo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
32	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 paket	
33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pauh Sangik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SD Se kenagarian Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Lubuak Alai, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 -	
36	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SD.N .06 Pangkalan Jorong Kampung Baru dan SD.N07 Pangkalan Jorong Pauh Anok, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 paket	
37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	nagari jopang manganti, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Balai Rupih, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
39	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Nagari Lubuak Alai, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1 paket	
40	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	4 paket	
41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
42	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
43	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
44	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota		- -	
45	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	nagari taeh bukik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	- -	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
		Puluh Kota	Tersedia		
47	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong XII Kampuang Nagari Sungai Kamuyang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
49	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN 01 (Jorong Gurun), SDN 02 (Jorong Lubuak Jantan), Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	- -	
50	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SDN 01 (Jorong Gurun), SDN 02 (Jorong Lubuak Jantan), Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
52	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 orang	
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong Tareh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	- -	
54	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong Balai Panjang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	- -	
55	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong Kubang Rasau, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	- -	
56	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Nagari Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
57	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	SUNGAI TALANG, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
58	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Talang Maur, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
59	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	- -	
60	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Galugua, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
61	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Talang Anau Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	nagari suliki, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- -	
63	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Tabiang Nagari Sungai Kamuyang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
64	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
B.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Koto Alam, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 -	
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jorong Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2 orang	
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Koto Baru, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong Sialang Bawah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 paket	
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	baruah gunuang, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong enara Agung, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- -	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Sialang Bawah, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jorong Pasar Baru Pangkalan , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- -	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jorong Tabiang Nagari Sungai Kamuyang, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Nagari Galugua, Kab. Lima Puluh Kota	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- -	
C.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Simpang Abu, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	4 Paket	
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Nagari Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	
3	Pengadaan Mebel PAUD	Nagari Koto tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	12 Paket	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 -	
5	Pengadaan Mebel PAUD	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	
6	Pengadaan Mebel PAUD	Jorong kubang bungkuk, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	
7	Pengadaan Mebel PAUD	Jorong kubang bungkuk, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	3 Paket	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jorong Bawah Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Lubuk Koto, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 Paket	
11	Pengadaan Mebel PAUD	Jorong Koto Kaciak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Nagari Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	taeh bukik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	
14	Pengadaan Mebel PAUD	Paud Uswatun Hasanah Jorong Kampung Baru . TK. Qolbina Ikhlas Jorong Sopang , Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 paket	
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 Paket	
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	2 paket	
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	8 Paket	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jorong Tabing Ranah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jorong Koto, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	1 Paket	
20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong I, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 Paket	
21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Lancaran, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 paket	
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
		Puluh Kota			
23	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 paket	
24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 paket	
25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Palangkitangan, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 paket	
26	Pengadaan Mebel PAUD	Jorong Dalam Nagari dan Jorong taratak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	
27	Pengadaan Mebel PAUD	Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 paket	
28	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	1 Paket	
D.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETARAAN				
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Nagari Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 paket	
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Koto Kaciak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 Paket	
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 paket	
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 paket	
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 Paket	
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jorong Mudik Pasar, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang telah Dibangun	1 Paket	
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
A.	KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagarai Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	KAN Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 stel	
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	muaro paiti, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
5	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	80 Buah	
6	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, Jorong Sungai Nyanyiang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Stel	
7	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
8	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pauh Sangik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
9	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
10	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
11	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	27 Orang	
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Taram, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
13	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Taram, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
14	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	34 Orang	
15	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	34 Orang	
16	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	85 Orang	
17	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Paket	
18	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 stel	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
19	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
20	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tanjung Pauh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	12 Orang	
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Piobang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
22	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Piobang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
23	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	35 Orang	
24	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Koto Alam, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40 stel	
25	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Koto Alam, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Stel	
26	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30 stel	
27	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	
28	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
29	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	17 stel	
30	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	17 stel	
31	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30 Orang	
32	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Balai Adat Nagari Andaleh Jorong Kampuang Tengah Nagari Andaleh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	90 Orang	
33	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jorong Kampuang Tengah Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	90 Orang	
34	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Sungai Talang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	27 Orang	
35	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	

NO	SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERA	VOLUME	CATATAN
36	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Stel	
37	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Andiang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
38	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Nagari Andiang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	
B.	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota				
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, Jorong Sungai Nyanyiang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	- stel	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	nagari koto tinggi, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	100 Buah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional terkait bidang pendidikan dan kebudayaan dikelompokkan menjadi dalam agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut : meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan; dan
 - b. lulusan pendidikan tinggi meningkat.

2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa indonesia dan berkewargaan global
 - b. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas
 - c. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - d. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
 - e. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.
3. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan
 - b. penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional
 - c. meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

Arah pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah agar dapat memprioritaskan :

1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.
2. Peningkatan mutu lembaga Pendidikan dan Kebudayaan tenaga kePendidikan dan Kebudayaan dan lulusannya.
3. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawa sekolah.
4. Penerapan metodologi Pendidikan dan Kebudayaan akhlah mulia dan karakter bangsa.
5. Pengembangan metodologi Pendidikan dan Kebudayaan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif , sportif dan wirausaha.
6. Keterpaduan sistem evaluasi Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Penyediaan buku teks.
9. Penguatan dan perluasan Pendidikan dan Kebudayaan non formal dan informal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Lima Tahun kedepan (2021-2026) menjalankan misi 1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah disebabkan oleh :
 - Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK.
 - Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah
 - Kurangnya minat penduduk menyelesaikan pendidikan dasar pada usia diatas usia rata-rata sekolah.
 - b. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah disebabkan oleh:
 - Masih belum tertanganinya biaya penunjang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan / Nonformal
 - c. Masih rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh:
 - Belum semua guru memiliki sertifikat guru.
 - Belum terpenuhi syarat pengangkatan Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya disebabkan:

- belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz.
- Belum terkelolanya cagar budaya yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari permasalahan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan
2. Meningkatnya pengelolaan pendidikan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indek ABS SBK	Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku		2,53	46,83	77,21	89,87	
2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Persentase peningkatan kualitas dan akses pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2023 dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:

1. Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap misi 1 (satu) yaitu 'Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya' dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
2. Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yaitu:
 - Pendidikan Anak Usia Dini

- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan uraian di atas maka Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

Sehingga pada Rencana Kerja Tahun 2024 ini terdapat 7 program dengan jumlah kegiatan 19 dan jumlah sub kegiatan 116.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan untuk Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						531.907.895.248,00							771.445.940.753,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						528.123.428.348,00							769.362.950.580,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						528.123.428.348,00							769.362.950.580,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	408.054.517.940,00						-	618.352.233.560,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	617.625.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		192.039.584,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.502.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.667.087,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.502.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.667.087,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	3.502.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.667.087,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.502.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.667.087,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	10.980.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	11.012.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.917.208,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusnan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	407.679.551.137,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	612.381.738.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	407.677.226.137,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		612.295.223.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	465.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		19.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	465.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		19.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	465.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		19.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	465.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		13.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	465.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		13.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-			2 dokumen	555.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.343.519.628,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	555.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.343.519.628,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan Pendidikan dan pelatihan pegawaian berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-			22 orang 22 orang 60 stel	1.560.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	521.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	600.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		218.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				22 Orang	460.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		192.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	136.769.180,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.059.810.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.520.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		57.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	62.277.180,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		631.881.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	26.530.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		161.832.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	35.442.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		208.236.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat</i>	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	166.385.123,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.900.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		13.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	120.010.123,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		196.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	573.750,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		209.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.710.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.840.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	-			95 %	120.068.910.408,00						-	150.025.502.020,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	-			9 ruang 7 ruang 1 paket 12 paket 4 kegiatan NA 31 ruang	73.909.070.552,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta	-	-	93.059.016.117,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	398.990.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.582.110.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				15 Ruang	1.051.712.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.302.306.469,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	850.688.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.875.961.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				30 Unit	7.245.507.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		7.378.254.147,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.074.160.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	945.814.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.040.395.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Ruang	170.978.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		779.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Ruang	685.360.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		789.200.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Unit	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		431.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				500 Paket	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.298.092.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				360 Peserta Didik	721.599.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		793.759.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	3.295.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.612.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		211.981.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				90 Orang	1.201.231.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.156.457.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1050 Orang	1.090.553.194,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		985.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				370 Satuan Pendidikan	40.541.758.741,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		44.595.934.615,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				360 Orang	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		42.117.922,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				360 Dokumen	1.061.936.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		33.955.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				370 Paket	2.984.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.447.439.095,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				7 Ruang	1.756.160.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.390.879.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				10 Unit	1.404.160.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.465.023.858,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				360 Satuan Pendidikan	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		129.321.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	8.500.623.617,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.642.793.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan fasilitas parkir Pembangunan laboratorium Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penambahan ruang kelas sekolah baru Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebel sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan perlengkapan siswa Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar Perlengkapan dasar buku teks peserta didik Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	-			3 paket 12 paket 9 ruang 7 ruang NA 31 ruang 1 paket 6 paket 4 kegiatan 18 ruang 3 paket 21 paket 3 paket 3 paket 366 SMP 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 57 SMP 4 ruang 1 ruang 3 ruang	28.934.499.956,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	39.256.525.788,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	3.112.100.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.423.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.108.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	870.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		633.235.834,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	1.305.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.501.474.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		737.882.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	397.750.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		437.525.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Unit	739.200.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		813.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1000 Paket	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				57 Peserta Didik	525.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	500.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		353.975.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				60 Orang	566.750.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		626.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				220 Orang	327.426.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		323.076.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				59 Satuan Pendidikan	16.364.597.956,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		18.001.057.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				59 Orang	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				59 Dokumen	1.105.232.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		24.346.168,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				59 Satuan Pendidikan	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.477.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	217.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.327.749.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	2.000.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD Pengadaan mebel PAUD Pengadaan perlengkapan siswa PAUD Pengelolaan dana BOP PAUD Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD Penyelenggaraan proses belajar PAUD Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	-			3 ruang 1 kegiatan 1 paket 4 paket 30 paket 223 PAUD 6341 peserta didik 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 3 ruang	10.368.156.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	9.810.025.655,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8 Unit	1.681.254.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.516.634.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	556.796.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		375.888.260,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				7 Paket	375.019.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		231.307.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	617.280.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				14 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		435.134.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				5100 Peserta Didik	630.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		433.011.590,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				180 Orang	486.031.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		217.349.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	630.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		82.780.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				294 Satuan Pendidikan	4.824.600.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.702.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				280 Orang	625.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		94.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		270.256.603,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	698.987.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		270.246.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1500 Paket	1.126.304.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		180.306.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	-			21 lembaga 21 lembaga 2252 WB 21 lembaga 2252 WB 1 kegiatan 21 lembaga 2252 WB 3 ruang	6.857.183.400,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	7.899.934.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1550 Peserta Didik	420.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.479.531.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	60.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				32 Satuan Pendidikan	810.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		42.270.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				32 Satuan Pendidikan	4.114.900.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.516.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				32 Orang	600.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		32.802.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				32 Dokumen	2.384.013.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		31.505.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				30 Paket	200.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				32 Peserta Didik	630.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		75.616.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	295.609.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		325.819.010,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	-			91 %	0,00						-	985.215.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	-			1 kegiatan 1 kegiatan	0,00			-	Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	985.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				560 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		985.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.784.466.900,00							2.082.990.173,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.784.466.900,00							2.082.990.173,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	-			73 %	2.041.119.500,00						-	1.454.117.753,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	-			1 kegiatan 1 kegiatan	608.756.300,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	169.188.492,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				8 Objek	330.244.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		74.281.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				60 Orang	278.512.200,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		94.906.592,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	-			1 kegiatan 1 kegiatan	1.160.002.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	805.665.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	600.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		484.545.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	560.002.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		321.120.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	-			1 kegiatan NA paket	272.361.200,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	479.263.301,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	54.510.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				150 Orang	217.851.200,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		239.631.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		239.632.151,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	-			83 %	650.005.000,00						-	139.010.850,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	-			1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	650.005.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	139.010.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				260 Orang	350.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Lembaga	300.005.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Masyarakat Madani	-		139.010.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	-			70 %	251.350.000,00						-	158.673.130,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	-			1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	251.350.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	158.673.130,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	251.350.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		158.673.130,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-			70 %	741.993.000,00						-	303.660.940,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran objek diduga cagar budaya Penetapan cagar budaya	-			1 kegiatan 1 kegiatan	491.998.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	177.622.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				13 Objek	171.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		72.352.830,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				110 Objek	320.998.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		105.270.110,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan cagar budaya Pengembangan cagar budaya Perlindungan cagar budaya	-			1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	249.995.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	126.038.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	99.995.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		34.958.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	150.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-		91.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	-			80 %	99.999.400,00						-	27.527.500,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	-			NA kegiatan	99.999.400,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	27.527.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				30 Orang	99.999.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.527.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H							531.907.895.248,00							771.445.940.753,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

6. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI

		Hal
	Daftar Isi	i
	Daftar Tabel	ii
BAB I	: PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-14
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III-1
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-1
	3.3 Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	:	Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tabel 2.3	:	Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tabel 2.4	:	Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tabel 2.5		Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.6		Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 3.2	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 3.3	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan
Tabel 3.4	:	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dalam Renja tahun 2024
Tabel 4.1		Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 4.2		Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024
Tabel 4.3		Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 4.4		Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap keempat dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan diraih oleh OPD dengan melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.
- b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.
- c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja OPD berdasarkan pagu indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 final tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAU yang

sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. Renja Tahun 2024 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tata Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 52) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 76).

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 74).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renstra tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	9	2	1	2	200%	2	4
1	3	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	28	4	4	4	100%	4	8
1	3	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP, LKPJ yang disusun (dokumen)	14	2	2	2	100%	2	4
1	3	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)	89	79	81	102	126%	85	187
1	3	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	7	1	1	1	100%	1	2

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							(dokumen)								
1	3	1	2	2	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	7	1	1	1	100%	1	2
1	3	1	2	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2	5	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimtek dan pelatihan (orang)	92	5	5	0	0%	14	14
1	3	1	2	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	30	12	22	22	100%	26	48
1	3	1	2	6	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	313	24	35	0	0%	38	38
1	3	1	2	6	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	68	62	64	64	100%	66	66
1	3	1	2	6	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)	43500	6000	7100	7100	100%	7300	7300
1	3	1	2	6	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	4	4	4	5	125%	4	4
1	3	1	2	6	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (orsi)	35325	1880	5850	5850	100%	5900	7.780
1	3	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	278	287	42	42	100%	46	88

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	9360	438	1250	1250	100%	1270	1.708
1	3	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	288	48	48	48	100%	48	144
1	3	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	52	32	48	48	100%	50	50
1	3	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tanaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)	28	28	28	28	100%	28	28
1	3	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	75%	100%	100%	100%	100%	70%	70%
1	3	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	68	57	62	62	100%	66	66
1	3	1	2	9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	12	10	10	10	100%	11	11
1	3	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	10	8	8	8	100%	9	9
1	3	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)	3	1	2	0	0%	1	2
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	62,78%	55,73	57,05	61,26	107%	59,95%	59,95
1	3	10	2	1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	691,33	613,69	628,23	674,61	107%	660,17 km	660,17

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	10	2	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jalan/ jembatan yang tersusun (dokumen)	33	8	5	5	100%	5	18
1	3	10	2	1	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)	37	2	6	0	0%	7	9
1	3	10	2	1	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	107,57	11,6	12,4	34,84	281%	21	67,44
1	3	10	2	1	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	92,67	2,63	10	11,54	115%	14	28,17
1	3	10	2	1	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	89,8	4	14	6	43%	17	27
1	3	10	2	1	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	31	4	4	3	75%	5	12
1	3	10	2	1	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (unit)	55	4	10	0	0%	14	18
1	3	10	2	1	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terbangunnya Jembatan terdampak Bencana (unit)	57	1	25	0	0%	0	1
1	3	2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	81,52	44,17	78,32		79,92%	79,92%	
1	3	2	2	1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	84,62	44,17	80,12		82,36%	82,36%	
1	3	2	2	1	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	34	2	3	8	267%	6	16
1	3	2	2	1	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	41	1	4	2	50%	6	9

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	2	2	1	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	145	28	17	27	159%	19	74	
1	3	2	2	2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola	83,08	44,17	80,6			81,84%	81,84%	
1	3	2	2	2	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	42	8	5	12	240%	6	26	
1	3	2	2	2	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	208	36	26	20	77%	32	88	
1	3	2	2	2	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	175	25	20	10	50%	28	63	
1	3	2	2	2	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	223	23	40	20	50%	40	83	
1	3	3				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	90,12	80,7	80,05			86,42%	86,42%	
1	3	3	2	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih	61364	317	58.926			460	777	
1	3	3	2	1	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	51759	397	200	519	260%	200	1.116	
1	3	3	2	1	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan	9605	0	240	0	0%	260	260	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							layanan air bersih (rumah)								
1	3	5					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	86,85	76,65	80,05	76,65	96%	65%	76,65%
1	3	5	2	1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	59541	58.672	58.926	58.672	100%	240	58.912
1	3	5	2	1	12		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	900	150	145	450	310%	0	600
1	3	6					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	52	41,74	44			48%	48%
1	3	6	2	1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	7402	3200	4.232			5.597	5.597
1	3	6	2	1	1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)	38	8	5	6	120%	4	18
1	3	6	2	1	5		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	38,75	6	3	6	200%	6	18
1	3	6	2	1	6		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	6,51	0,7	0,6	1	167%	1	2,7

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	85	66	71		65%		
1	3	8	2	1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	46	2	18		10	10	
1	3	8	2	1	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	45	78	3	0	0%	2 dokumen	2
1	3	8	2	1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	46	4	6	2	33%	1	3
1	3	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100	75	100		100%	100%	
1	3	11	2	1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	416	42	65		65	65	
1	3	11	2	1	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)	260	30	40	19	48%	40	59
1	3	11	2	1	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	156	42	25	0	0%	25	25
1	3	11	2	1	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (Lembaga Konstruksi)	40	30	35	20	57%	35	35
1	3	11	2	4		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	100	100	60		0%	80%	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	11	2	4	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (%)	60	50	60	2	3%	60	60
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	90	70	70	70	100%	80%	80%
1	3	12	2	1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturannya RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	6	0	1	0	0%	1	1
1	3	12	2	1	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam rangka penetapan rencana tata ruang (kali)	100	6	20	0	0%	100	100
1	3	12	2	1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	6	0	1	1	100%	1	2
1	3	12	2	1	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	180	0	30	0	0%	30	30
1	3	12	2	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan tata ruang yang telah ada (Dokumen)	14	0	3			8	8
1	3	12	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)	14	1	2	1	50%	2	3
1	3	12	2	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	135	39	20	18	90%	20	77
1	3	12	2	3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)	56	1	6	5	83%	5	11

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	12	2	4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	45	39	2	2	100%	2	42	
1	3	12	2	4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	32	10	1	2	200%	1	13	
2	10	4				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100	100	100		0%	100%	100%	
2	10	4	2	1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	0	3	0	0%	3	3	
2	10	4	2	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19	0	2	0	0%	2	2	
2	10	9				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	80	0	40	0	0%	20%	20%	
2	10	9	2	1		Penerbitan Izin Membuka Tanah	44	0	20	0	0%	20%	20%	
2	10	9	2	1	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	80	0	40	0	0%	60	60	
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100	0	20	20	100%	20%	40%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) / 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2	10	10	2	1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi	8	0	2	2	100%	2	4
2	10	10	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian perencanaan penggunaan tanah (kali)	5	2	1	21	2100%	1	22

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2021), dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Penyebab tidak memenuhi target kinerja	Tindakan yang harus dilakukan
1	2	3	4
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan di masa yang akan datang
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu dianggarkan kembali di masa yang akan datang
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Pelaksanaan Sub Kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
9	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tidak adanya anggaran belanja modal untuk peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Kurangnya alokasi anggaran sementara jalan yang perlu ditingkatkan/diperbaiki masih panjang	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
12	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
13	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
14	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
15	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
16	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
17	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan

Tabel 2.3
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja	Penyebab Telah Memenuhi Target Kinerja
1	2	3
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja	Penyebab Telah Memenuhi Target Kinerja
1	2	3
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
9	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
10	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
11	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
13	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
14	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
15	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
16	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja

Tabel 2.4
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Penyebab Melebihi Target Kinerja
1	2	3
1	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Ada tambahan paket perencanaan di APBD Perubahan
3	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
4	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
5	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Ada tambahan paket perencanaan di APBD Perubahan
6	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
8	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Karena antusiasnya masyarakat untuk memiliki Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / standar nasional (%)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)			68	71	75	77	65		75	77	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
2	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)			50	55	60	65	50		60	65	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		59,95	55,81	57,05	58,65	59,95	54,42	61,26	58,65	59,95	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
4	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)			42	44	46	48			46	48	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
5	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)			95	100	100	100	50		100	100	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran

No	Indikator	SPM / standar nasional (%)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
6	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	100	86,42	81,62	83,12	84,72	86,42	80,09		84,72	86,42	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional
7	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	100	83,35	78,45	80,05	81,65	83,35	76,65		81,65	83,35	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional
8	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)			0	5	20	30	0		20	30	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
9	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)			0	10	20	30	0		20	30	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
10	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		79,92	77,52	78,32	79,12	79,92	44,17		79,12	79,92	Proyeksi Capaian disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW			65	70	75	80	70	75	75	80	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
12	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)		3	0	2	2	3	100%		2	3	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
13	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)			0	2	2	2	0		2	2	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
14	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)			100	100	100	100	0		100	100	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
15	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)			0	30	25	25	0		25	25	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
16	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)		20	0	20	20	20	0		20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
17	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)			0	20	20	20	0		20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
18	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)			0	20	20	20	0		20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
19	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)			30	40	50	60	0		50	60	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
20	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)			20	20	20	20	25		20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			78,05	78,5	78,92	79,45	77,64		78,92	79,45	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
22	Indeks Reformasi Birokrasi			24,14	26,14	28,24	30,34	32,8		28,24	30,34	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			0,742	0,762	0,782	0,802	0,8429	0,8508	0,782	0,802	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Pencapaian		Catatan Analisis
					2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur			73,9	75,88	66,21	73,172	Capaian tahun sampai tahun 2022 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun			76,09	80,43	71,74	71,74	Capaian tahun sampai tahun 2022 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
3	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	60		55,81	57,05	55,73	58,02	Capaian tahun sampai tahun 2022 sudah diatas target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mempertahankan pencapaiannya
4	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100		81,62	83,12	80,7	81,7	Capaian tahun sampai tahun 2022 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100		78,45	80,5	76,65	66,21	Capaian tahun sampai tahun 2022 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
6	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	70		77,52	78,32		88,19	Capaian tahun sampai tahun 2022 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
7	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100		65	70	70	70	Capaian tahun sampai tahun 2022 sudah menyamai target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk peningkatan pencapaiannya

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD :
 - Harga Penawaran dari Penyedia Konstruksi untuk pekerjaan yang dilelang sangat rendah, sehingga bisa berdampak pada kualitas pekerjaan konstruksi.
 - Keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan monitoring kegiatan ke lapangan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
 - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
 - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program nasional di bidang infrastruktur.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Keterbatasan jumlah personil
- Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang baik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
 - Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat

Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta program nasional

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Dari hasil Review Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 yang mengakibatkan berubahnya indikator dan sub kegiatan pada rancangan awal renja Dinas PUPR
2. Adanya rasionalisasi pagu sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK No.212/PMK.07/2022.
3. Belum terpetakannya Indikator dan Sub Kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				269.284.577.680	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				56.461.029.895	1. Adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 yang mengakibatkan berubahnya indikator dan sub kegiatan pada rancangan awal renja Dinas PUPR 2. Adanya rasionalisasi pagu sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK No.212/PMK.07/2022 3. Belum terpetakannya Indikator dan Sub Kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100%	11.406.350.180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	8.451.938.926	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100%	283.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		100%	40.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2 Dokumen	20.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	36.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Dokumen	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Dokumen	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	32.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	4	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	4 Laporan	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2 Laporan	10.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD (%)		100%	7.409.045.180	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD		100%	7.489.575.154	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	85	7.309.045.180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	102 Orang/bulan	7.484.575.154	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1 Laporan	5.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	15	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Laporan	0	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	35.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Dokumen	0	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah (%)		100%	46.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah		0%	0	
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBU yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Dokumen	0	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang akhir tahun yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	26.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Laporan	0	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100%	175.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang telah mengikuti bimtek dan pelatihan (orang)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	14	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Orang	0	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100%	942.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	225.449.622	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	26	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	26 Paket	5.000.000	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	38	155.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	38 Paket	30.250.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	66	147.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	66 Paket	50.000.000	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	7300	120.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	7300 Paket	15.000.000	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	4	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	4 Dokumen	12.000.000	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (porsi)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	5900	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	5900 Laporan	30.000.000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	46	370.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	46 Laporan	83.199.622	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		78%	244.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2	64.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Unit	0	
23	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0	0						
24	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	25	55.000.000						
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	10	125.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	0 Unit	0	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100%	879.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	122.000.000	
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1270	14.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1270 Laporan	2.000.000	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	48	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	48 Laporan	80.000.000	
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	50	65.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	50 Laporan	20.000.000	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tanaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	28	670.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	28 Laporan	20.000.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		70%	1.427.905.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70%	574.914.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	66	360.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	66 Unit	150.000.000	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	11	1.400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	11 Unit	79.914.000	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	9	640.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	9 Unit	70.000.150	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	1	280.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	2 Unit	275.000.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)		79,92%	26.650.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		79,92%	6.496.483.558	
IX	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara (%)		82,36%	9.450.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara		82,36%	391.088.000	
34	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)		6	750.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		0 Dokumen	0	
35	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)		6	2.500.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		2 Unit	391.088.000	
36	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)		19	6.200.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0 KM	0	
X	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)		81,84%	17.200.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase jaringan irigasi yang terkelola		81,84%	6.105.395.558	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
37	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)		6	750.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		5 Dokumen	484.181.100	
38	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)		32	7.706.408.800	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		0 KM	0	
39	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)		28	6.543.591.200	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		3.38 KM	4.659.301.458	
40	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)		40	2.200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0.65 KM	961.913.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)		86,42%	9.548.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum		86,42%	2.500.000.000	
XI	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)		460	9.548.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih		460 rumah	2.500.000.000	
42	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)		200	4.100.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		0 Liter/Detik	0	
43	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)		260	5.448.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		200 SR	2.500.000.000	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)		65%	3.888.870.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan		0%	0	
XII	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Jumlah sampah yang dikelola (ton)		240	3.888.870.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Jumlah sampah yang dikelola		0 Ton	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
44	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun (unit)		1		Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		0 Ton/hari	0	
45	Rehabilitasi TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi (unit)		1	200.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		0 Orang	0	
46	Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan (unit)		1	2.500.000.000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		0 Rumah Tangga	0	
47	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)		5	988.870.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi		0 Unit	0	
48	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS (orang)		60	200.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		5 Unit	0	
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		0 Unit	0	
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)		83,35%	11.404.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak		83,35%	5.262.669.570	
XIII	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)		59386	11.404.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak		59231 rumah	5.262.669.570	
49	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)		155	11.404.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		22.5 M ³ /Hari	2.900.000.000	
50						Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		20 M ³ /Hari	2.362.669.570	
51						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		0 Rumah Tangga	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		0 Orang	0	
53						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		0 Dokumen	0	
F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)		48%	3.070.817.500	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik		0%	0	
XIV	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)		5597	3.070.817.500	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun		0 m	0	
54	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)		4	1.333.807.500	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		0 Dokumen	0	
55	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)		6	22.835.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		0 Sistem Drainase Perkotaan	0	
56	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)		1	1.364.175.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		0 Sistem Drainase Perkotaan	0	
57	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang terpelihara (km)		2	350.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		0 Sistem Drainase Perkotaan	0	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)		30%	2.123.530.000						
XV	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya		20	2.123.530.000						
58	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)		6	1.453.530.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota										
59	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)		5	300.000.000						
60	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit)		4	200.000.000						
61	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)		5	170.000.000						
H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)		77%	32.696.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang layak		77%	3.600.000.000	
XVI	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)		32 unit	32.696.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan		32 Unit	3.600.000.000	
62	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)		3 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		0 Dokumen	0	
63	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)		7 unit	32.196.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	3.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		0 Orang	0	
65						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		500 Dokumen	100.000.000	
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)		65%	1.770.460.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)		0%	0	
XVII	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata		10	1.770.460.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata		0 Unit	0	
66	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)		2 dokumen	130.000.000	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		0 Dokumen	0	
67	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1	110.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		0 Kawasan	0	
68	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan		4	680.000.000	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		2	640.610.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
70	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan (orang)		30 orang	109.850.000						
71	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang termonitoring penataan/pemeliharaannya (%)		60%	100.000.000						
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		59,95%	164.069.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		59,95%	29.679.930.441	
XVIII	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)		660,17 km	164.069.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		660,17 Km	29.679.930.441	
72	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)		5	880.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		5 Dokumen	400.000.000	
73	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya leger jalan (dokumen)		3	1.500.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		0 Dokumen	0	
74	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)		7	750.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		0 KM	0	
75	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)		10	25.000.000.000	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		0 KM	0	
76	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar (km)		18	20.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		0 KM	0	
77	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)		21	45.939.000.000	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		21 KM	15.129.930.441	
78	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)		14	40.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		14 KM	7.650.000.000	
79	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)		17	6.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		17 KM	2.500.000.000	
80	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)		5	20.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		1 Jembatan	4.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi (Unit)		14	4.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		0 KM	0	
K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)		100%	1.327.550.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina		100%	149.995.100	
XIX	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)		65	460.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan		65 Sertifikat	80.565.000	
82	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang ditetapkan (SOP)		2	80.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		60 Orang	30.565.000	
83	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)		40	100.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		30 Lembaga	50.000.000	
84	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat))		25	100.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya		0 Dokumen	0	
85	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (lembaga konstruksi)		35	100.000.000	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan		0 Dokumen	0	
86	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan (%)		100	80.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		0 Orang	0	
XX	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)		100%	390.310.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota		100%	19.430.000	
87	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota		1	75.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		0 Perangkat Pendukung	0	
88	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota		1	75.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		0 Dokumen	0	
89	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPJAKI di Kabupaten Lima Puluh Kota (orang)		20	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Orang	19.430.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota		1	90.000.000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		0 Layanan Informasi	0	
91	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota		1	90.310.000						
XXI	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan		28	257.240.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan		100%	0	
92	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan		28	97.240.000	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi		0 Dokumen	0	
93	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya		42	75.000.000						
94	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonevnya IUJK yang telah diterbitkan (%)		100	85.000.000						
XXII	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)		80%	220.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)		80%	50.000.100	
95	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang ditetapkan		2	50.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		15 Paket Pekerjaan	50.000.100	
96	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		20	80.000.000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		0 Lembaga	0	
97	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		60	90.000.000	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		0 Dokumen	0	
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)		80%	1.330.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW		80%	320.012.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXIII	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)		1	540.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan		1 dokumen	250.000.000	
98	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)		100	150.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
99	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)		1	150.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	250.000.000	
100	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)		1	80.000.000	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
101	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Penataan Ruang (orang)		30	160.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		0 Orang	0	
XXIV	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)		8	490.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada		0 Dokumen	0	
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)		2	490.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
XXV	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)		20	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai		20 Lokasi	70.012.300	
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)		5	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		5 Dokumen	70.012.300	
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		0 Dokumen	0	
XXVI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)		2	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan		0 Lokasi	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)		1	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		0 Dokumen	0	
	PERTANAHAN				2.136.750.000	PERTANAHAN				29.987.700	
M	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)		100%	153.510.000						
XXVII	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan			153.510.000						
105	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Permohonan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan)		2	153.510.000						
N	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)		100%	163740000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan		0%	0	
XXVIII	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)		3	163.740.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi		0 Kasus	0	
106	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)		2	73.740.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
107	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya		2	90.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Berita Acara	0	
O	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)		25%	318.270.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		25%	29.987.700	
XXIX	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi		2	318.270.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi		2 Kasus	29.987.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah yang difasilitasi (orang)		5	158.270.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		0 Dokumen	0	
109	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (kasus)		2	160.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	29.987.700	
P	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)		20%	532.160.000	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan		0%	0	
XXX	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi		2	382.160.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi		0	0	
110	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi		2	100.000.000	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
111	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi		2	130.000.000	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
112	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang terlaksana		2	100.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		0 Dokumen	0	
113	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah		2	52.160.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXXI	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi		2	150.000.000	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi		0	0	
114	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi (pemilik)		2	100.000.000	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
115	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		2	50.000.000	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
Q	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)		20%	189.330.000	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat		0%	0	
XXXII	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi		5	189.330.000	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi		0	0	
116	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Batas Tanah Ulayat yang dipetakan		2	69.330.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Laporan		
117	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang telah diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat		2	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		
118	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Ulayat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		2	60.000.000	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota		0 Dokumen		
R	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)		20%	69.330.000	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola		0%	0	
XXXIII	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong		2	69.330.000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong		0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Tanah Kosong yang yang diselesaikan		2	69.330.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		0 Laporan	0	
XXXIV	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan		2	150.000.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan		0%	0	
120	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah didata (kapling)		2	75.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi		0 Laporan	0	
121	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang dimanfaatkan (kapling)		2	75.000.000	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong		0 Dokumen	0	
S	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)		60%	204.680.000	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi		0%	0	
XXXV	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan		20%	204.680.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan		0%	0	
122	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		10	104.680.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		0 Dokumen	0	
123	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah negara yang sesuai peruntukan (%)		60	100.000.000	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		0 Dokumen	0	
T	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)		20%	205.730.000	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota		0%	0	
XXXVI	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)		2	205.730.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi		0 Kapling	0	
124	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)		1	95.730.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Laporan	0	
125	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Zona Nilai Tanah yang dibuat (dokumen)		1	55.000.000	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Kabupaten yang telah dikonsolidasi (kapling)		1	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	
					271.421.327.680					56.491.017.595	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam setiap Musrenbang, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan memprioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain melalui Musrenbang, usulan dari masyarakat juga disampaikan secara langsung ke OPD baik melalui surat ataupun lisan, di lain waktu disela-sela pertemuan tetap juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima usulan dari masyarakat, sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya, karena luasnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak diketahui secara detail kondisi seluruh infrastruktur yang ada. Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD, aparatur Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun 2023 yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan. Begitupun usulan kegiatan tahun 2023 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD.

Usulan program dan kegiatan tahun 2024 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran / Volume		Catatan Penting
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (unit)	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	23	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang terbangun (KM)	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	124	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan pedesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	25	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	117	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pembangunan Embung dan Penampung AirLainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara	aia songsang taeh buikik	10	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran / Volume		Catatan Penting
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	43	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	6	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	233	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	6	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	37	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	69	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	57	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	7	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD

Berdasarkan penelaahan oleh Tim Verifikasi terhadap usulan yang diinput tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. Usulan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diterima dan disesuaikan dengan pagu indikatif. Diantaranya:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
 - b. Pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
 - c. Pembangunan jaringan air bersih / air minum
 - d. Pembangunan drainase
 - e. Pembangunan infrastruktur pemerintah
 - f. Pembangunan jaringan irigasi
 - g. Pemeliharaan jaringan irigasi
 - h. Pembangunan embung
 - i. Pengamanan sungai
 - j. Pembangunan sarana air limbah
2. Usulan kegiatan yang pada tahun 2023 yang bukan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau kegiatan yang dialihkan kewenangannya pada pemerintah nagari, belum dapat diakomodir dalam Renja tahun 2022. Diantaranya :
 - a. Pembangunan Tangki Septik Individual

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun Prioritas untuk Penyusunan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada Permendagri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD juga menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan Rencana Kerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan seluruh urusan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada kegiatan untuk peningkatan infrastruktur.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran target kinerja Renstra adalah :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung
		2. Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya

NO	TUJUAN	SASARAN
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Meningkatnya Pengembangan Permukiman
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi 3. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 4. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 5. Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum yang akan dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2024 tidak terlepas dari program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026.

Terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 urusan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Urusan Pertanahan

Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
			Normalisasi/Restorasi Sungai
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
7	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
8	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
			Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
9	PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan Jalan
			Rekonstruksi Jalan
			Pemeliharaan Berkala Jalan
			Pelebaran Jalan Menuju Standar
			Pembangunan Jembatan
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			Rehabilitasi Jalan
			Pemeliharaan Rutin Jalan
10	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
			Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
			Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
11	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
			Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
			Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
5	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
			Pemanfaatan Tanah Kosong
6	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 17 program, 34 kegiatan dan 115 Sub Kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar Rp. 56.491.017.595,-

Rekap jumlah program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dalam Renja tahun 2024

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	25	94
2	Pertanahan	7	9	21
	TOTAL	18	34	115

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Kerja dan Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Ket
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun (%)	89,13	
2	Meningkatnya kualitas jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	59,95	
3	Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	86,42	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	83,35	
4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92	
5	Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	80	

Dari table di atas Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 5 sasaran dengan 6 indikator, yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis diukur dengan indikator yaitu Persentase gedung strategis yang terbangun dengan target kinerja 2024 adalah 89,13%.
2. Meningkatkan kualitas jalan
Meningkatan kualitas jalan diukur dengan indikator yaitu Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten dengan target kinerja 2024 adalah 59,95%.
3. Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat dengan target kinerja tahun 2024 adalah 86,42% dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan kinerja tahun 2024 adalah 83,35%.
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada
Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada diukur dengan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang target tahun 2024 adalah 79,92.
5. Meningkatkan penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW
Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW diukur dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW yang target kinerja tahun 2024 adalah 80%.

Secara umum ada 23 indikator target rencana kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun rencana target kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2024	Ket
1	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	%	77	
2	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	%	65	
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	59,95	
4	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	%	48	
5	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	%	100	
6	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	%	86,42	
7	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%	83,35	
8	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	%	30	
9	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	%	30	
10	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%	79,92	
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	80	
12	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	%	3	
13	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)	%	2	
14	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	%	100	
15	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	%	25	
16	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	%	20	
17	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	%	20	
18	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	%	20	
19	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	%	60	
20	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	%	20	
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	79,45	
22	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30,34	
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0,802	

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju		
					Capaian Program			Lokasi Output Kegiatan							Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN								56.491.017.595,00					312.491.338.483,00
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								56.461.029.895,00					310.913.438.483,00
1	03	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								56.461.029.895,00					310.913.438.483,00
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN								8.451.938.926,00					14.991.228.483,00
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan								40.000.000,00					290.000.000,00
1	03	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	2 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00
1	03	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	38.000.000,00
1	03	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	44.000.000,00
1	03	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	48.000.000,00
1	03	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	35.000.000,00

*Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024*

1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0,00					200.000.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	0 Orang	0 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	200.000.000,00
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							225.449.622,00					968.000.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	26 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	32.000.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	38 Paket	100 %	30.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	157.000.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	66 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66 Paket	150.000.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	7300 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7300 Paket	125.000.000,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	42.000.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	5900 Laporan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5900 Laporan	82.000.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	46 Laporan	100 %	83.199.622,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	380.000.000,00
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00					530.000.000,00
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	0 Unit	0 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	400.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	0 Unit	0 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	130.000.000,00

1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.000.000,00					912.600.000,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	1270 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1270 Laporan	14.600.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	48 Laporan	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	140.000.000,00
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	50 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	68.000.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	28 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	690.000.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								574.914.150,00				3.177.000.000,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	66 Unit	70 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	367.000.000,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	11 Unit	70 %	79.914.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	11 Unit	1.600.000.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	9 Unit	70 %	70.000.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	680.000.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 % 100 %	2 Unit	70 %	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	530.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								6.496.483.558,00				57.859.000.000,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								391.088.000,00				7.909.000.000,00	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase Sumber Daya Air yang dikelola/ terpelihara	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79,92 %	0 KM	82,36 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi	0 KM	4.500.000.000,00

*Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024*

1	03	04	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								0,00					4.127.610.000,00	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								0,00						4.127.610.000,00
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Ton/hari	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 Ton/hari	2.400.000.000,00	
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Orang	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Orang	220.000.000,00	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Rumah Tangga	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Rumah Tangga	500.000.000,00	
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Unit	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	0 Unit	0,00	
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	5 Unit	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	5 Unit	1.007.610.000,00	
						Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Jumlah sampah yang terkelola	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Unit	0 Ton	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0 Unit	1.007.610.000,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								5.262.669.570,00					11.446.000.000,00	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								5.262.669.570,00					11.446.000.000,00	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,35 %	22.5 M³/Hari	59231 rumah	2.900.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	22.5 M³/Hari	0,00	
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,35 %	20 M³/Hari	59231 rumah	2.362.669.570,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M³/Hari	0,00	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,35 %	0 Rumah Tangga	59231 rumah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0 Rumah Tangga	11.446.000.000,00	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,35 %	0 Orang	59231 rumah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Orang	0,00	

1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,35 %	0 Dokumen	59231 rumah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	0,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								0,00				6.273.960.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								0,00				6.273.960.000,00
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang saluran drainase primer yg terbangun	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 m	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.300.000.000,00
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang saluran drainase primer yg terbangun	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 m	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	3.723.960.000,00
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Panjang saluran drainase primer yg terbangun	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0 m	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	700.000.000,00
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang saluran drainase primer yg terbangun	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 m	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								3.600.000.000,00				33.787.850.000,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								3.600.000.000,00				33.787.850.000,00
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	0 Dokumen	32 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	33.102.000.000,00
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	1 Dokumen	32 Unit	3.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	0 Orang	32 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	0 Orang	110.850.000,00

1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai										100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	575.000.000,00
					Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	500 Dokumen	32 Unit									
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										0,00					1.083.550.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										0,00					1.083.550.000,00
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya										0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dokumen	110.000.000,00
					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0 Unit									
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0 Kawasan	713.550.000,00
					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Kawasan	0 Unit									
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	120.000.000,00
					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0 Unit									
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	140.000.000,00
					Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0 Unit									

1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						29.679.930.441,00					169.033.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						29.679.930.441,00					169.033.000.000,00
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	0 Dokumen	660,17 Km	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0 Dokumen	1.100.000.000,00
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	5 Dokumen	660,17 Km	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	900.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	0 KM	660,17 Km	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	26.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	21 KM	660,17 Km	15.129.930.441,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21 KM	47.183.000.000,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	14 KM	660,17 Km	7.650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14 KM	42.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	0 KM	660,17 Km	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	20.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	1 Jembatan	660,17 Km	4.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	20.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	0 KM	660,17 Km	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	0 KM	850.000.000,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	0 KM	660,17 Km	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	4.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan											
					Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59,95 %	17 KM	660,17 Km	2.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	6.500.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						149.995.100,00					1.077.240.000,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						80.565.000,00					400.000.000,00
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis											
					Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang	65 Sertifikat	30.565.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	100.000.000,00
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi											
					Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Lembaga	65 Sertifikat	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	100.000.000,00

1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	65 Sertifikat	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	0 Dokumen	100.000.000,00
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	65 Sertifikat	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	0 Dokumen	0,00
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	65 Sertifikat	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0 Orang	100.000.000,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								19.430.000,00				360.000.000,00	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Perangkat Pendukung	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0 Perangkat Pendukung	95.000.000,00
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0 Dokumen	90.000.000,00
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPIAKI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Pengelola SIPIAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	19.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelola SIPIAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000,00
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Layanan Informasi	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0 Layanan Informasi	75.000.000,00
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								0,00				97.240.000,00	
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	0 Dokumen	97.240.000,00

1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							50.000.100,00					220.000.000,00
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota											
					Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Paket Pekerjaan	80 %	50.000.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	90.000.000,00
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi											
					Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Lembaga	80 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga	80.000.000,00
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi											
					Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	80 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen	50.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							320.012.300,00				1.400.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							250.000.000,00				560.000.000,00
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	0 Dokumen	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	90.000.000,00
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	1 Dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000,00
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	0 Dokumen	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	150.000.000,00
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	0 Orang	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	160.000.000,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							0,00				520.000.000,00
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	520.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							70.012.300,00				210.000.000,00
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang											
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	5 Dokumen	20 Lokasi	70.012.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	5 Dokumen	210.000.000,00

*Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024*

2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	80.000.000,00
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	0 Dokumen	80.000.000,00
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	80.000.000,00
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0,00				165.000.000,00
2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	90.000.000,00
2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	75.000.000,00
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								0,00				174.540.000,00
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0,00				174.540.000,00
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Laporan	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	64.540.000,00
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	55.000.000,00

2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	----	----	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	0 Dokumen	0 Kapling	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00
TOTAL													56.491.017.595,00			313.498.948.483,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	25	56.461.029.895	11	25	310.913.438.483	
2	PERTANAHAN	7	9	29.987.700	7	9	1.577.900.000	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SATPOL PP dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja dan Pelayanan SATPOL PP.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP.....	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP.....	48
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2023.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2024	5
Tabel TC-2.1	Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2022	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	24
Tabel T - C 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	27
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	43
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja	46
Tabel T-B36	Tabel Indikasi Permasalahan Untuk penentuan Program Prioritas	46
Tabel 3.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024	49
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi RENJA Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga menyiapkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra- Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi RENJA Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordiansi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 28 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Satpol PP sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;

- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 tentang Pembantuan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satpol PP oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satpol PP mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD Satpol PP yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Satpol PP																																
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																																

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satpol PP berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Forum Perangkat Daerah Bapelitbang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 di Aula Kantor Camat Harau yang dihadiri oleh 20 Perangkat Daerah yaitu Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota, .Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian dan SDA, dan Bapelitbang.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Renja Satpol PP mempedomani Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Satpol PP digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Satpol PP juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu kepada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta Kementerian/Lembaga.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15)

1.3 Maksud dan Tujuan (*merujuk ke renja bapelitbang*)

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Satpol PP secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Satpol PP.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Satpol PP ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang di Satpol PP.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Satpol PP Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Satpol PP, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Satpol PP, analisis kinerja pelayanan Satpol PP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan sebagainya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satpol PP dan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN SATPOL PP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SATPOL PP TAHUN LALU

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yang berada di bawah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM melalui 3 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yang berada di bawah 4 (empat) Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).

Adapun Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan :

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Masih kurangnya Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan dan Sosialisasi tingkat pusat.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut

1. Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dari SDM.
2. Untuk sarana dan prasarana penunjang yang kurang, telah diusulkan melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Sarana dan Prasarana yang dimaksud.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

Tabel TC - 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah								
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 %	100%	100%	100%	100%	100%	60 %	60%
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis Satpol PP, Jumlah dokumen Renja Satpol PP, Jumlah dokumen Sakip, Jumlah dokumen SPIP	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen 1 laporan 2 kegiatan	9 dokumen	60 %
01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1 dokumen	1dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	60%
01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun, Jumlah dokumen pergeseran RKA yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	60%
01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	60%
01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen pergeseran DPA yang tersusun	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	60%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJiP, LKPPD yang tersusun, laporan realisasi fisik dan keuangan OPD	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi kinerja OPD yang tersusun tahun 2021	55 dokumen	55 dokumen	-	-	100%	5 dokumen	60 dokumen	60%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 61 orang (14 bulan), Honor Penanggungjawab pengelola keuangan (12 bulan)	14 bulan	14 bulan, 60 dokumen	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	36 bulan	60%
01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	60%
01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah tanggapan pemeriksaan	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	60%
01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	14 laporan	-	14 dokumen	14 dokumen	100%	2 kegiatan	28 dokumen	60%
01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan analisis dan prognosis realiasi anggaran	1 laporan	-	-	-	100%	-	-	60%
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	100%	100%	100%	100%	100%	2 %	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	135 stel	-	-	-	100%	-	-	60%
01.2.05.02	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis kepegawaian						2 kegiatan	-	60
01.2.05.09.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		3 orang	-	-	-	100%	-	-	60%
01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti HUT Satpol PP Tingkat Nasional,Provinsi dan Kabupaten	130 orang	5 orang	-	-	10%	-	5 orang	60%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi umum	20%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja alat listrik, bola lampu, kabel listrik, stop kontak, terminal listrik	belanja alat listrik, bola lampu, kabel listrik, stop kontak, terminal listrik	-	-	-		6 komponen	-	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop perencanaan	1 unit	-	2 unit	2 unit		1 unit jaringan internet, 1 unit laptop, 1 unit printer	-	60%
01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja modal alat dapur	Kulkas, dispenser, piring, toples, alat dapur, cangkir	-	17 meter, 1 unit	17 meter, 1 unit		9 komponen	17 meter, 1 unit, 9 komponen	60%
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan alat kebersihan kantor, Jumlah kebutuhan ATK Kantor	Alat Kebersihan Kantor	19 Komponen 52 Komponen	9 Komponen 52 Komponen	9 Komponen 52 Komponen	100%	Alat Kebersihan 19 komponen, ATK 52 komponen	45 komponen, 156 komponen	60%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop Dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), kwitansi (65 buku), lembar disposisi (12 buku), jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), spanduk (12 meter)	Amplop Dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), kwitansi (65 buku), lembar disposisi (12 buku), jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), spanduk (12 meter)	30 buku, 15 rim, 66754 lembar, 111 buah	30 buku, 15 rim, 85.000 lembar, 150 buah	30 buku, 15 rim, 85.000 lembar, 150 buah	100%	Blanko SPPD 15 Rim, Foto copy 85.000 lembar, jilid 150 buah	60 buku, 45 rim, 321.754 lembar, 411 buah	60%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran harian lokal yang tersedia, jumlah koran harian regional	1200 eksemplar	60 eksemplar	-	-	-	-	60 eksemplar	60%
01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack/Minum (300 porsi)	Makan Siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack/Minum (300 porsi)	258 porsi, 199 porsi	128 porsi, 150 porsi	128 porsi, 150 porsi	100%	130 porsi, 150 porsi	516 porsi, 499 porsi	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi, fasilitasi konsumsi rapat	20 Orang	310 orang/hari	310 orang	310 orang	100%	350 laporan	610 orang, 350 laporan	60%
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	20 %	100 %	-	-	-	100%	40%	60%
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi eselon III dan IV	-	-	-	-	100%	8 buah	20%	60%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek, materai 10.000	Cek (1 buku), Materai 10.000(200 lembar)	300 lembar	5 buku, 400 lembar	5 buku, 400 lembar	100%	Buku cek 5 buku, materai 400 lembar	Cek (10 buku), Materai 10.000 (1.200 lembar)	60%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Paket	36 Bulan	60%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa kantor (PTT 5 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang)	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5 unit) & roda 2 (10 unit), BBM / Oli, Pajak	12 bulan	12 bulan	5.250 liter, 10 unit, 6 unit	5.250 liter, 10 unit, 6 unit	100%	5250 liter, 10 unit roda 2, 6 unit roda 4	12 Bulan, 10.500 liter, 20 unit, 12 unit	60%
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer/laptop (9 unit), AC, Printer (6 unit), running text	1 Tahun	1 tahun	10 unit, 7 unit	10 unit, 7 unit	100%	10 unit PC, 7 unit printer	1 tahun, 20 unit PC, 14 unit printer	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	-	1 Paket	60%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72 %	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	34%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi dini dan cegah dini, Jumlah personil yang mengikuti kegiatan potang balimau, Jumlah personil yang ikut dalam dalam operasi ketupat, Jumlah personil yang mengikuti kegiatan pengamanan kepala daerah/ VVIP, Jumlah wilayah dalam Pengawasan patroli	36 data	24 data, 75 orang, 13 kecamatan	24 data, 75 orang,	24 data, 75 orang,	100%	24 data, 75 kali, 13.000 orang 13 wilayah	72 data, 225 orang, 13 wilayah	60%
02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban PSK, siswa, PKL, Miras, Inhalen, Pedagang Marcon, Warkel, baliho / spanduk, jumlah pengamanan pemilu	36 data	36 data	36 kali	36 kali	100%	13.000 jiwa, 36 kali	72 data, 13.000 jiwa, 36 kali	60%
02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah koordinasi dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban umum	13 Wilayah	13 Kecamatan	13 wilayah	13 wilayah	100%	700 lembar, 50 lembar, 1.350 liter, 500 porsi, 20 unit, 2 dokumen, 47 komponen, 6 komponen, 296 orang	13 Kecamatan, 700 lembar, 50 lembar, 1.350 liter, 500 porsi, 20 unit, 2 dokumen, 47 komponen, 6 komponen, 296 orang	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota satlinmas terlatih	2160 satlinmas	26 orang	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	1 dokumen, 3 komponen, 79 jiwa, 17 laporan	26 orang, 13 kecamatan, 1 dokumen, 3 komponen, 79 jiwa, 17 laporan	60%
02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pengiriman PNS untuk mengikuti pelatihan dasar Satpol PP	15 orang	130 orang	4 orang	4 orang	100%	65 orang, 1.200 orang peserta pelatihan beladiri, 800 orang peningkatan fisik dan mental, 12 orang mengikuti Diksar Pol PP	199 orang, 1.200 pelatihan beladiri, 800 peningkatan fisik dan mental, 12 orang diksar Pol PP	60%
02.2.01.07.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi dalam daerah dengan Lembaga dan Instansi terkait, Kerjasama penegakan perda dan perbup, Jumlah MoU	150 Objek	150 objek	10 kali	10 kali	100%	24 dokumen, 24 objek, 24 kali	174 Objek, 34 kali, 24 dokumen	60 %
02.2.01.08.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pos/Jaga ronda yang dibangun, 2. Jumlah sarana dan prasarana trantibum, 3. Jumlah tenaga kontrak penegakan perda dan piket/patroli	130 unit, orang/bulan	35 pengaduan	21 unit	21 unit	100%	5 unit, 12 bulan	35 pengaduan, 26 unit, 12 bulan	60%
02.2.01.09.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	ini Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus/Pelatihan, Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan(Bimtek Penyusunan SOP Satpol PP)	20 orang	-	41 orang	41 orang	0%	1 dokumen, 35 orang	41 orang, 1 dokumen, 35 orang	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara	1. Jumlah pelayanan dampak penegakan perda dan perkara 2. Jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindak lanjuti 4. Jumlah unit pelayanan pengaduan	15 kali	-	13 kecamatan	13 kecamatan		5 laporan	13 kecamatan, 5 laporan	60
02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penurunan Jumlah Persentase penurunan pelanggaran perda		100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
02.2.02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyuluhan pencegahan aksi preman, pencegahan praktek perjudian, miras, narkoba dan prostitusi	60 kali	8 kali	10 kali	10 kali	100%	15 kali, 15 laporan, 1000 jiwa	33 kali, 15 laporan, 1.000 jiwa	60%
02.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Perda	70 kali	13 kali	12 kali	12 kali	100%	15 laporan, 1500 jiwa	25 kali, 15 laporan, 1.500 jiwa	60%
02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda, jumlah tipiring	50 kali	264 kegiatan	26 kali	26 kali	100%	5000 jiwa	264 kegiatan, 26 kali, 5.000 jiwa	60%
02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda			100%	100%	100%	100%	60%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5	11=10/4
02.2.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen(PPNS) Satpol PP DI Pusdiklat Soreang Bandung, Jumlah aparatur yang mengikuti kursus/ pelatihan, sosialisasi,bimngan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Sosialisasi Peratiran Daerah dan Kepala Daerah)	90 orang	121 orang	72 orang	72 orang	100%	27 orang 6 laporan	220 orang, 6 laporan	60%

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya koordinasi;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja diantara mobiler dan Komputer PC.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah SATPOL PP Kabupaten Lima Puluh Kota dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban umum.

Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100% menjadi kinerja kepala daerah. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP dengan jenis pelayanan dasar adalah *Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum* dengan Indikator Pencapaian yaitu *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada*.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pada tabel II.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP
Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional		Target Renstra Perangkat Daerah					RealisasiCapaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			IKU Kepala OPD	Tahun 2021 (thn n-3)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-3)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase JumlahWarga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Satpol PP		√	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pemda dan masyarakat		√	62	67	72	77	82	62	67	72	77	82	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Akhir yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tingkat heterogen masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan– gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.

4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan RPJMD periode tahun 2021- 2026 adalah masuk pada Misi Ke-satu yakni “*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.*”

Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan No. 63 Pembinaan dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perdat terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah wilayah Perlintasan antar Kota dan Antar Provinsi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama wilayah perbatasan sangat sangat terbuka lebar.

5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Untuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur masih terbatas. Kemudian belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Akhir, maka diperlukan review terhadap rancangan awal RKPD agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan

melaksanakan misi kesatu, yaitu:

Tabel T – C 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20%	9.448.220.360	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	20%	5.144.411.008	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20%	206.826.178	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	20%	9.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Renstra dan Renja, saki, SPIP	4	43.300.376	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	9.400.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	14.547.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	1 dokumen	0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran RKA yang disusun	2	20.739.445	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	19.837.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran DPA yang disusun	2	19.837.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen LKjIP, LKPPD yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD	12	40.953.858	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	0	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah data GAB dan GBS, Jumlah dokumen IKU, RKT,PK, Rencana Aksi, LAKIP, LKjIP, LKPPD	55	47.610.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	55 laporan	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertibnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20%	7.398.328.996	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20%	4.160.054.846	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 44 orang (14 bulan), Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (12 bulan)	14	7.339.881.618	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	4.153.254.846	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	12.821.128	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	0	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Tanggapan pemeriksaan	1	15.208.750	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan semesteran	14	30.417.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 laporan	6.800.000	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah laporan analisis dan prognosis realisasi anggaran	1	6.612.500	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20%	10.580.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	20% 1 laporan	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tertatanya dan terpeliharanya barang milik daerah	1	10.580.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Administrasi kepegawaian	20%	532.901.375	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	20%	5.070.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	135	396.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	135 paket	0	
						Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	5.070.000	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota		3	26.317.750	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah anggota satpol pp yang mengikuti (hut Satpol PP) tk nasional, provinsi dan kabupaten	130	83.648.125	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis PTI	1	26.185.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 orang	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan tertibnya Administrasi Umum	20%	421.975.220	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peningkatan administrasi umum	20%	567.228.436	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah belanja alat listrik bola lampu, kabel listrik, stop kontak, terminal listrik	belanja alat listrik bola lampu, kabel listrik, stop kontak, terminal listrik	5.323.063	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4.835.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Laptop perencanaan (1 unit)	Laptop perencanaan (1 unit)	30.417.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	291.200.000	
	penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Lima Puluh Kota	belanja modal alat dapur	kulkas, dispenser, piring, toples alat dapur cangkir	10.170.025	penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	4.433.336	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor, jumlah atk kantor	alat kebersihan, atk kantor	45.625.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	28.896.600	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	9.725.387	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	11.907.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Koran (1200 Eksemplar)	1200	7.117.695	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.200 dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Makan siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack / minum (300 porsi)	Makan 100, Sarapan 37, Snack 300	9.110.041	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	50 laporan	5.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi, Fasilitasi konsumsi rapat	20	304.485.259	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	220.456.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	20%	211.878.750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Jumlah paket mebel yang disediakan Persentase pelaksanaan administrasi umum	3 unit 20 unit 20 %	42.980.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Kendaraan dinas roda 4, Kendaraan dinas roda 2	3	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	pengadan kursi eselon III,IV, meja biro , meja 1/2 biro, lemari arsip, kursi tamu		91.252.500	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 unit	42.980.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Komputer, Laptop perencanaan, printer	3	45.626.250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang perangkat daerah	20%	410.100.638	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan administrasi umum	20%	146.045.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Buku cek , materai 10.000	Cek (1 buku), materai 10.000 (200 lembar)	6.612.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	12	53.686.888	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	23.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Pembayaran jasa kantor (PTT 5 orang, tenaga kebersihan 2 orang)	12	349.801.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	117.545.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	20%	295.629.203	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit 15 unit	213.632.726	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Persentase pelaksanaan administrasi umum Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20% 15 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5 unit) & roda 2 (10 unit), BBM / oli, pajak	12	233.531.877	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	207.952.726	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala komputer/ laptop (9 unit), AC, printer (6 unit), running text	1	14.950.201	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	5.880.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1	47.147.125	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	77	5.318.821.110	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	77%	1.364.838738	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah prosentase penurunan kasus pelanggaran perda	36	4.386.458.610	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek/pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) Jumlah persentase penurunan kasus pelanggaran perda Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan	12 orang 36% 30 orang 950 orang	972.013.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>pemungutan dan perhitungan suara 2024</p> <p>Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan SOP trantibumlin-mas</p>	15 kegiatan		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah deteksi dini dan cegah dini, jumlah personil yg mengikuti kegiatan potang balimau, jumlah personil yang ikut dalam operasi ketupat, jumlah personil yg ikut kegiatan pengamanan Kepala Daerah/VVIP, jumlah wilayah dalam pengawasan patrol	24, 75, 13	330.625.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	24 laporan	88.648.250	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penertiban PSK, Siswa, PKL, Miras, Inhalen, Pedagang Mercon, Warkel, baliho/spanduk, jumlah pengamanan pemilu	36	179.350.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	36 laporan	306.479.250	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah wilayah koordinasi dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban umum	13	138.862.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	13 dokumen	73.751.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah anggota Satlimas terlatih	2160	462.875.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	14 dokumen	354.297.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengiriman PNS untuk mengikuti Pelatihan Dasar Satpol PP1.	30	200.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	87.331.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi dalam daerah dengan Lembaga dan instansi terkait, Kerjasama penegakan perda dan Perbup, Jumlah MOU	150	224.825.000						Sub Kegiatan ini dipindahkan ke program peningkatan PPNS
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	1. Jumlah Pos/Jaga Ronda yang di bangun, 2. Jumlah sarana dan prasarana trantibum, 3. Jumlah tenaga kontrak penegakan perda dan piket/patrol	130	2.670.964.510	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	130 unit	10.851.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparaturnya yang mengikuti kursus/ pelatihan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (bimtek penyusunan SOP)	20	40.997.500	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 dokumen	33.652.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Lima Puluh Kota	1.jumlah pelayanan dampak penegakan perda dan perkara 2. Jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat, 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan di tindak lanjuti, 4. Jumlah Unit pelayanan pengaduan	15	87.496.600	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepeda warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	15 laporan	17.030.00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	prosentase penurunan pelanggaran perda	36	753.825.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan pelanggaran PERDA Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan perda	36% 30 laporan	308.790.333	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap perda	14 kali 36 laporan		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyuluhan pencegahan aksi preman, pencegahan praktek perjudian, miras dan narkoba, prostitusi	60	264.500.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	60 laporan	147.407.228	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah pengawasan perda, jumlah kerjasama MOU	70	211.600.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	70 laporan	113.592.105	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penegakan perda, jumlah tipiring (tindak pidana ringan)	50	277.725.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	50 laporan	47.791.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan dana					Catatan penting
	Program/ kegiatan/ subkegiatan (ambil dari renstra kolom 1-6)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan. (Kolom 7 -11 diambil dari SIPD)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	(perubahan Indikator /pagu dana)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PPNS Kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	prosentase penurunan pelanggaran perda	5	178.537.500	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan pelanggaran PERDA Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak Perda Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek peningkatan karier dan kapasitas aparatur	5% 90 laporan 2 orang	84.034.905	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS si pusdiklat Soreang Bandung, jumlah aparatur yang melaksanakan pelatihan intelijen, jumlah aparatur yang mengikuti kursus/bimtek (sosialisasi perda dan perkara)	90	178.537.500	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	90 laporan	49.035.000	
						Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	Kab. Lima Puluh Kota	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	50 dokumen	34.999.905	Sub kegiatan ini sesuai pemutakhiran sesuai SIPD RI

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dalam acara sosialisasi PERDA. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan lapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan program prioritas pembangunan daerah. Pada rencana kerja tahun 2024, ada beberapa usulan kegiatan dari pemangku kepentingan diantaranya dari perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri dan lembaga lainnya, sehingga dianalisis dan disesuaikan dengan keadaan anggaran dan tupoksi Satpol PP dan Satlinmas.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	catatan
1.	Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kec. Luak - Kec. Lareh Sago Halaban - Kec. Kapur IX - Kec. Pangkalan Koto Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan instansi pusat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan rencana strategisnya terdapat rencana pembangunan yaitu program bina administrasi kewilayahan pada kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan hal di atas dan menindaklanjutinya, Bupati Lima Puluh Kota sebagai pelaksana pemerintahan di daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : ketenteraman, ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehingga salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota merumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Tercapainya dan terarahnya suatu rancangan akhir rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 mendatang.
2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan ketertiban umum ketentraman masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terwujudnya peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dan warga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah, keputusan Kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya.
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tujuan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota dalam menegakan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum daerah lainnya dengan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari :

1. Melakukan upaya penyadaran warga masyarakat tentang produk hukum (Perda) dan/atau keputusan kepala daerah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan Perda di 13 Kecamatan
2. Penertiban Homestay, cafe music dan salon
3. Penertiban IMB/////SITU dan bangunan liar
4. Melaksanakan Peradilan Cepat
5. Penertiban Pekerja Sex Komersial
6. Penertiban Rental VCD/DVD porno
7. Penertiban Warung Kelambu
8. Penertiban Minuman keras
9. Pembinaan Pekerja Sex Komersial
10. Meningkatkan sarana dan Prasarana Kantor
11. Pembenahan sistem dan management kantor
12. Penertiban Papan Reklame
13. Peningkatan profesionalisme dan kinerja personil

Tabel. 3.1
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Penegakan Perda	%	72
		- Persentase Penyakit Masyarakat Yang Tertangani diTahun ini	%	100
2	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti ditahun ini	%	100

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan tahun 2024, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor – faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu – isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota serta pertimbangan dokumen perencanaan lainnya serta masukan dan saran dari pemangku kepentingan.

Pada tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 2 program dan 11 Kegiatan, 47 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran Rp.14.807.041.470,-

1. Tabel indikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

T-B36

No	Bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemda	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui	Permasalahan	Faktor faktor penentu keberhasilan
----	---	---	--------------	------------------------------------

		(>)		
1	2	3	4	5
1	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia	
			Belum optimalnya koordinasi	
			Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan	
		S	Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan	
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja diantara mobiler dan Komputer PC	

BAB IV

RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 2 program dan 10 Kegiatan, 30 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran Rp6.509.249.746,-.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 akan melakukan peningkatan Keamanan agar situasi tetap aman dan kondusif dengan meningkatkan patroli rutin, Razia wilayah yang akan dicurigai berpotensi meningkatkan situasi kurang kondusif, serta mengadakan peningkatan kapasitas Satlinmas yang akan terjun langsung dalam penjagaan posko - posko pemilu baik di tingkat Jorong, Nagari dan Kecamatan dan Tingkat Kabupaten dan pengadaan pakaian dinas lapangan untuk Satlinmas.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menguraikan program bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang. Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
Tabel Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2024

NO	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
						Rp.6.509.249.746		
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Rp 5.144.411.008	Rp.10.911.453.414	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp.9.400.000	Rp.10.911.453.414	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.4.160.054.846		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.0		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.5.070.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.567.228.436		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.42.980.000		
					Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp.146.045.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.213.632.726		
	2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Rp.1.364.838.738		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.972.013.500	Rp.6.116.644.277	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp.308.790.333		
					PPNS Kabupaten/Kota	Rp.84.034.905		

TABEL 3.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lima Puluh Kota

Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								6.509.249.746				16.942.670.194,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.509.249.746				16.942.670.194,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6.509.249.746				16.942.670.194,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.144.411.008				10.929.057.792,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.400.000				237.850.105,00	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	20 %	4 Dokumen	20 %	9.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	49.795.432,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.729.625,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	2 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	23.850.362,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	22.813.125,00
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	2 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	22.813.125,00

1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	12 Laporan	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	47.096.936,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	55 Laporan	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Laporan	54.751.500,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.160.054.846				8.515.682.722,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	14 Orang/bulan	20 %	4.153.254.846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	8.440.863.861,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Laporan	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.744.298,00
1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												

					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	17.490.063,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	14 Laporan	20 %	6.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	34.980.125,00
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.604.375,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0,00				12.167.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Laporan	20 % 1 laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.167.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5.070.000,00				622.836.582,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	135 Paket	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	456.262.500,00
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	12 Dokumen	20 %	5.070.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	3 Orang	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.265.413,00
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	130 Orang	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	96.195.344,00
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	1 Orang	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	30.113.325,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							567.228.436					485.271.502,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	4 Paket	20 %	4.835.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.121.522,00

1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	1 Paket	20 %	291.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.980.125,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	5 Paket	20 %	4.433.336,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	11.695.529,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	2 Paket	20 %	28.896.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.470.188,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	10 Paket	20 %	11.907.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	11.184.195,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	1200 Dokumen	20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	8.185.349,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	50 Laporan	20 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	10.476.547,00

1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peningkatan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	20 Laporan	20 %	220.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	350.158.047,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								42.980.000				243.660.563,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	3 Unit	3 unit 20 unit 20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	86.250.000,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	20 Unit	3 unit 20 unit 20 %	42.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	104.940.375,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	3 Unit	3 unit 20 unit 20 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	52.470.188,00

1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										146.045.000					471.615.734,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	12 Laporan	20 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.604.375,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	36 Laporan	20 %	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	61.739.921,00		
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	12 Laporan	20 %	117.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	402.271.438,00		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										213.632.726					339.973.584,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	15 Unit	1 unit 15 unit 20 % 15 unit	207.952.726	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	268.561.659,00		

1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 %	15 Unit	1 unit 15 unit 20 % 15 unit	5.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.192.731,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	20 %	1 Unit	1 unit 15 unit 20 % 15 unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.219.194,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1.364.838.738					6.013.612.402,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							972.013.500					4.682.846.777,00
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	13 Dokumen	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	73.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13 Dokumen	159.691.875,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	14 Dokumen	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	354.297.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	532.306.250,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	30 Orang	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	87.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	200.000.000,00
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	1 Dokumen	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	33.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	47.147.125,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	24 laporan	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	88.648.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 laporan	380.218.750,00
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	36 Laporan	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	306.479.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	191.252.500,00
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah												

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	15 Laporan	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	17.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	15 Laporan	100.621.090,00
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum												

					Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal(PTI) Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024 Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan masa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara 2024 Jumlah terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP Tibumtramas	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	130 Unit	12 Orang 36 % 30 Orang 950 orang 15 Kegiatan	10.851.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	130 Unit	3.071.609.187,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							308.790.333				866.898.750,00
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											

					Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Perda	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	60 Laporan	36 % 30 Laporan 14 kali 36 Laporan	147.407.228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	304.175.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
					Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Perda	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	50 Laporan	36 % 30 Laporan 14 kali 36 Laporan	47.791.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	319.383.750,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											

					Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Perda	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	70 Laporan	36 % 30 Laporan 14 kali 36 Laporan	113.592.105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70 Laporan	243.340.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							84.034.905				463.866.875,00
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah											
					Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek peningkatan Karier dan kapasitas aparatur	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	50 Dokumen	5 % 90 laporan 2 orang	34.999.905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	50 Dokumen	258.548.750,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											

						Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek peningkatan Karier dan kapasitas aparatur	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	77 %	90 Laporan	5 % 90 laporan 2 orang	49.035.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	90 Laporan	205.318.125,00
TOTAL													6.509.249.746				16.942.670.194,00



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

8. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah .	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal	45
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	66
3.3 Program dan Kegiatan	67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintahan pusat dan daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Pada tingkatan organisasi perangkat daerah (OPD), Implementasi kebijakan tersebut adalah rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD).

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten



Lima Puluh Kota tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran harus dapat mendukung pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026.

Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017 dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota juga merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadu serasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Pada tahun 2024 fokus dan prioritas pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran masuk dalam fokus peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah dengan prioritas pembangunan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, oleh karenanya dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2024 lebih menitik beratkan pada Kebakaran yaitu penanganan, pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran seperti pendidikan dan pelatihan anggota pemadam



kebakaran, simulasi penanganan kebakaran, gladi dan simulasi penanggulangan Kebakaran.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahap persiapan penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum OPD/Forum Gabungan OPD dan Penetapan Renja.

Penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Renja Dinas Pemadam Kebakaran akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA OPD.

Sesuai dengan Visi Dinas Pemadam Kebakaran yang disesuaikan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu: “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat, dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basyandi syarak, Sayarak Basyandi Kitabullah, Dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya”, dengan misi sebagai berikut:

Meningkatkan peran dan fungsi Dinas dalam melaksanakan tugas pada pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya.

1. Meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hunian dan hutan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana unit kerja agar tetap dalam kondisi siaga.
4. Meningkatkan kondisi keselamatan kerja di sektor publik dan industri.

Dalam upaya mencapai urusan Dinas tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran juga mengacu pada 5 Pengabdian (Panca Darma) pemadam kebakaran yaitu:

Panca Darma Pemadam Kebakaran

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
2. Pemadaman Kebakaran
3. Penyelamatan Korban
4. Pemberdayaan Masyarakat



5. Penanganan Bahan Bahaya Beracun

Untuk pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi Pemadaman yang pelaksanaannya 24 jam dan untuk melaksanakan tugas dari siang dan malam memadamkan kebakaran, dengan moto “**Pantang Pulang Sebelum Api Padam**” walaupun nyawa taruhannya.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah:

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten; komitmen kinerja dan realisasi Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2018 dan 2019, sesuai dengan Permendagri 114/2018 telah ditetapkan untuk tahun 2022 dengan target sebesar 100%. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); Sesuai dengan Permendagri 54/2010 telah ditetapkan untuk tahun 2018 dengan target 15 menit.
2. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi, Sesuai dengan Permendagri 54/2010 telah ditetapkan untuk tahun 2018 dengan target 90%.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2014 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor: Tahun 2015 tentang Perubahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/permen/1980 tentang Syarat- syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/kepmen/ 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kongkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kabupaten Lima Puluh Kota serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja



perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Perangkat Daerah.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 10.004.459.311 dengan Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.954.714.01, Belanja Modal dan Jasa sebesar Rp.6.633.145.300, dan Belanja Modal sebesar Rp. 416.600.000 dengan Realisasi keseluruhan sebesar 96.99%. Target PAD dari sektor yang terkait dengan kebakaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan realisasi adalah sebesar Rp. 25.480.000,- dengan presentase 50.96% yang baru bisa kita realisasikan. Kendala yang kita hadapi Tahun 2022 sehingga tidak tercapainya target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mendukung
- Jumlah personil yang belum memadai
- Sarana dan prasana yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan
- Sosialisasi dari aturan yang menjadi legalitas formal pelaksanaan kegiatan yang kurang
- Akibat terjadinya Covid-19

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target adalah:

- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan
- Memperbanyak melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat
- Menambah jumlah personil

2.1.1 BELANJA

Pada tahun 2022 alokasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebesar Rp. 10.004.459.311,-. Dalam Tahun 2023 realisasi keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran, Jumlah presentase keuangan adalah Belum Diketahui dari anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi fisik mencapai Belum diketahui Dari anggaran yang tersedia ada tiga komponen belanja yaitu :

- Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. **3.149.127.322**



- Belanja Barang Dan Jasa yang direncanakan yaitu sebesar Rp. **3.824.979.620**
- Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. **596.652.800**



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Form TC-29 Permendagri 86 Tahun 2017)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam kebakaran

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
							Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	05	01	2			Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	05	01	2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode administrasi keuangan dan barang serta pembayaran gaji pegawai damkar	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	14 bulan	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022			2023	(tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihtksari realisasi kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Kegiatn Adminstrasi Umum Perngkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	output:Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	output:Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	output:Terlaksananya urusan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	output:Terlaksananya Kebutuhan aLat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
						Tahun 2022			Tahun 2022		2023	(tahun 2023)	(%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	output:Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadanaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	output:Tesedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	07	Penyediaan Bahan Material	output:Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	output:Terpenuhinya makanan dan minuman	4000 Porsi	1600 Porsi	2100 Porsi	1500 porsi	71.42	2100 porsi	3600 porsi	90
1	05	01	2,1	09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	output:Tersedianya Konsultsasi dan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250 Kali	120 Kali	120 Kali	80 kali	66.66	160 kali	240 kali	96
1	05	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	10 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	3 Unit	4 Unit	40
1	05	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	output:Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung kantor	13 unit	8 unit	4 unit	2 unit	50	2 unit	4 unit	30.76



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022		2023	(tahun 2023)	(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	output:Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya kebutuhan kelengkapan penyedian jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	02	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	output:Terlaksananya pembayaran telepon, air dan rekening	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output:Terkelolanya adminstrasi keuangan dan barang dinas pemadam kebakaran, pemberian gaji pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
						Tahun 2022			Tahun 2022		2023		(tahun 2023)	(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2,1	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	outputPemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	outputTerlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	01	2,1	09	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	outputTerlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	14 bulan	100
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	98,64%	100%	98,64%	100%	100
1	05	04	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dn Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022			2023	(tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	01	pencegahan Kebakaran dalam daerah dan Kabupaten/Kota	Tersusnya norma , standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	80%	36%	36%	30%	83.33	30%	60%	75
1	05	01	2	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase periode pemenuhan capaian personil pemadam dalam tanggap response time dalam pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	100%	36%	100%	95 %	95	100 %	195%	90
1	05	01	2	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase capaian Kesiapsiagaan personil dalam penanganan pencegahan dan penyelamatan dalam kejadian	85%	55%	35%	30%	85.71	50 %	80%	94.11
1	05	01	2	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tertanggulangnya penanganan bahan berbahaya bercun kebakaran kabupaten/kota	55%	36%	42%	39%	92.85	50 %	89%	81.60
1	05	01	2	05	Standarisasi sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakatan dan alat pelindung diri	Persentase dalam pemeliharaan dan perbaiki dalam penilaian sarana dan prasarana	70%	30%	30%	25%	83.3	69 %	94 %	92



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022			2023	(tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	60%	41%	41%	35%	85.36	41 %	76 %	66.21
1	05	01	2	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur/ personil personil pemadam yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kebakran yang bersertifikasi	120 org	31org	45 org	30 org	66.66	30 org	60 org	50
1	05	01	2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	100%	100%		100%	-	
1	05	01	2	01	Pendataan sarana Parasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran	13 kecamatan	9 kecamatan	13 kecamatan	8 kecamatan	61.53	13 kecamatan	21 kecamatan	80
1	05	01	2	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah gedung atau fasilitas lainnya yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran yang aktif dan layak	50 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	9 lokasi	45 lokasi	20 lokasi	29 lokasi	58%
1	05	01	2		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	05	01	2	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Persentase periode personil dalam upaya melakukan investigasi kebakaran	85%	50%	50%	38%	76	50 %	88%	96.59



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022			2023	(tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	05	01	2	01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase simulasi dan sosialisasi penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran	75%	36%	42%	35 %	83.33	45 %	80 %	93.75
1	05	01	2	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah barisan relawan yang telah terampil dalam pemberdayaan pencegahan dan pengendalian kebakaran serta sosialisasi ditengah masyarakat	390 org	240 org	240 org	180 org	75	150 org	330 Org	76.92
1	05	01	2	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	persentase tersedianya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	50%	30%	30%	25 %	71.42	30 %	55 %	90.90
1	05	01	2,1		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pncarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mebahayakan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
									Tahun 2022	Tahun 2022				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2,1	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase tertanggulangnya penangan bahaya bercun kebakaran kabupaten dan pencarian pertolongan manusia	80%	41%	41%	35%	1 85.36	50 %	85 %	94.11
1	05	01	2,1	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase aparaturnya/personil pemadam kebakaran yang profesional dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	65%	36%	36%	30%	83.33	20 %	50 %	76.92



Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang tidak memenuhi target	Penyebab tidak memenuhi target kinerja	Tindakan yang harus dilakukan
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	perlu dianggarkan kembali sesuai kebutuhan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	perlu dianggarkan kembali sesuai kebutuhan
3	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	perlu dianggarkan kembali sesuai kebutuhan
4	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
5	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
6	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
7	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
8	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	anggaran banyak berkurang karena refocusing anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah melebihi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang tidak memenuhi target	Penyebab tidak memenuhi target kinerja	Tindakan yang harus dilakukan
	NIHIL		



Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang tidak memenuhi target	Penyebab telah memenuhi Target Kinerja
1	Administrasi Keuangan	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banungan kantor	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
9	Penyediaan bahan material	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
10	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
11	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
13	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
14	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point C Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama. Maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang tepat.

Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2023 telah dapat terlaksana dengan **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari capai-capaian yang kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran” yaitu Persentase peningkatan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai kebutuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Persentase capaian tingkatan waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah layanan WMK dapat dilihat dari jumlah korban jiwa saat terjadinya Bencana Kebakaran.

Pada tahun 2020 memang cukup banyak kejadian kebakaran yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu jumlah Kebakaran rumah, bangunan atau lainnya yang sangat berhubungan dengan korban atau jiwa manusia berjumlah 100 kali kejadian Kebakaran. Dari jumlah kejadian kebakaran tersebut tertanggulangi dengan baik dan tidak terdapat korban jiwa, kecuali kerugian material yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis antara lain :

- Lambatnya laporan yang diterima oleh petugas
- Lokasi atau jarak dari lokasi bencana kebakaran dengan pos terdekat



- Sarana dan prasarana jalannya ditempuh
- Jauhnya sumber air dari lokasi kejadian
- Terkendalanya penanggulangan bencana kebakaran karena masih aktif atau hidupnya arus listrik

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemadam” yaitu Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Berada di Level Pemadam 1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dan personil dalam hal yang terkait meningkatnya pencegahan dan pengendalian / pra kebakaran dari data jumlah kebakaran sebanyak 187 Kali pada tahun 2022, 100 kali tahun 2021, 100 kali pada tahun 2020, 188 kali pada tahun 2019 yang kita banding dengan data kebakaran pada tahun 2016 sebanyak 275 bencana kebakaran. Melihat dari perbandingan jumlah kejadian bencana kebakaran kiranya target yang dibuat dapat tercapai. Indikasi ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah kejadian pada tahun 2016 dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Pada Tahun 2019 peningkatan jumlah personil yang kita sediakan sudah dapat menjawab sebagian persoalan yang dihadapi.

Persentase sesuai dengan target sebesar 100% dapat dicapai dengan mempedomani jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2018 yang menurun.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

Indikator dari Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat dicapai sesuai dengan target yaitu jumlah nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran. Dimana dengan meningkatnya nilai akuntabilitas tersebut maka meningkatlah kualitas Dinas pemadam Kebakaran pada pelayanan perkantoran.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran
Indikator kinerja utama Kepala perangkat daerah
Dinas pemadam kebakaran
(from TC-30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn (n-2) 2022	Thn (n-1) 2023	Thn (n) 2024	Thn(n+1) 2025	Thn(n-2) 2022	Thn(n-1) 2023	Thn(n) 2024	Thn(n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	-	100	46%	50%	52%	60%	40%	50 %	52%	60%	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
2	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	-	100	46%	53%	60%	67%	40%	53%	60%	67%	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
3	Penanganan kebakaran waktu tanggap	-	100	15	15	15	15	15	15	15	15	Seluruh target indikator pencapaian



												kinerja PD dapat terealisasi tercapai
4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/kota	-	100	59	60	60	65	59	60	60	65	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
5	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana	-	100	8	8	8	8	8	8	8	8	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
6	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	132	132	132	132	132	132	132	132	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
7	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	-	100	8	8	8	8	8	8	8	8	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi



												tercapai
8	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud dalam permendagri 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
9	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
10	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	-	-	100	100	100	100	50	100	100	100	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
11	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	-	-	50	50	50	70	50	50	50	70	Seluruh target indikator pencapaian



												kinerja PD dapat terealisasi tercapai
12	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
13	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
14	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
15	Persentase pencegahan, penyelamatan, pemadaman dan evakuasi korban	-	-	46	50	52	60	58,19	50	52	60	Seluruh target indikator pencapaian



	kebakaran											kinerja PD dapat terealisasi tercapai
16	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	-	-	150	155	200	250	267	155	200	250	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran sudah berkaitan erat dengan IKU kepala perangkat daerah, karena persentase pelayanan terhadap pelayanan kebakaran dan non kebakaran sudah baik dan pelayanan yang diberikan sudah maksimal terutama kepada masyarakat sesuai dengan keluaran indikator yang telah terealisasi.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Adapun ISU yang muncul pada Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, adalah sebagai berikut :

Pada anggaran yang ada di dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas langsung membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah tidak mendukung karena keterkaitan pada anggaran operasional yang ada serta aparatur yang kurangnya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan dan kegiatan yang akan dilakukan.

Peralatan dan perlengkapan yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan yang turun langsung dengan masyarakat dan aparatur yang ada masih banyak belum memiliki sertifikat juga menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas yang ada pada program, kegiatan, serta Sub kegiatan yang ada, Adapun tugas dari pada Dinas Pemadam Kebakaran :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);



- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.1 Sumber Daya

1.3.1.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris dan 3 Kepala Bidang, 2 kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Seksi dan 1 dalam keadaan kosong, 15 orang ASN 40 orang PPK dan 94 pasukan dengan total 165 orang di Dinas Pemadam Kebakaran ini.



Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel.
2.3.1

Golongan PNS	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	Total
Gol IV	1	5				6
Gol III	2	10	1	3		14
Gol II				10		10
Gol I					1	1
PPPK				40		40
Pasukan						94
Jumlah						165

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.

1.3.1.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, belum memiliki bangunan sendiri. Pada tahun 2017 dimana Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD baru lahir telah diberikan lokasi kantor di Eks Kantor DPPKD (sekarang Badan Keuangan), yang beralamat di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Kota Payakumbuh.



1.3.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat diketahui diantaranya dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun sebelumnya (Tahun 2018); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya (yang masih berpedoman kepada Resntra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota), dan perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berdiri efektifnya pada tahun 2017 dimana pada periode sebelumnya belum berdiri sendiri, tergabungnya Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2007 s.d. 2016 dimana OPDnya adalah BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Bencana lainnya melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun terakhir terdiri dari :

1. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
2. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan wilayah terdekat atau tetangga yang membutuhkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.



4. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.
5. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
- Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci sebagai berikut :

Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.



WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota belum sesuai dengan harapan. Sampai data Tahun 2021 ini, jumlah Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 8 (Delapan), 1 Posko Utama dan 7 Posko Pembantu.

Disisi lain 1 posko juga melayani beberapa kecamatan tergantung pada lokasi terjadinya bencana kebakaran dan bencana lainnya. Selain itu pelayanan terhadap penanggulangan bencana kebakaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi juga pada daerah-daerah tetangga yang membutuhkan, dikarenakan penanggulangan terhadap bencana kebakaran tidak mengenal batas wilayah.

Dari jumlah posko dibandingkan dengan luas wilayah serta mengacu kepada Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentulah tidak berbanding lurus dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Hal lain yang menjadi catatan penting yang tidak boleh kita abaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menanggulangi bencana kebakaran tapi juga harus menjalankan Panca Darma Pemadam.

Cakupan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh, yaitu:



1. Pos Pembantu di Kecamatan Suliki
2. Pos Pembantu di Kecamatan Pangkalan
3. Pos Pembantu di Kecamatan Kapur IX
4. Pos Pembantu di Kecamatan Lareh Sago Halaban
5. Pos Pembantu Di Kecamatan Harau
6. Pos Pembantu Di Kecamatan Mungka
7. Pos Pembantu di Kecamatan Akabiluru
8. Pos Pembantu di Posko Utama (INDUK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.



Pemetaan masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengurangan Resiko Kebakaran	1. Upaya minitagasi sebagai salah satu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian.	1. Belum tersedianya dokumen teknis Kebakaran(kajian risiko Kebakaran, rencana penanggulangan kebakaran dan rencana kontijensi) 2. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan kebakaran di daerah dalam bentuk perda dan perkada
	2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi kebakaran	1. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko kebakaran 2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar Bahaya kebakaran 3. Seruan dan himbauan peringatan bahaya kebakaran kurang direspon 4. Belum optimalnya kelompok Balakar

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pengurangan resiko kebakaran dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kebakaran. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara



yang berada di daerah rawan kebakaran dan bencana lainnya dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban.

Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- Upaya mitigasi sebagai salah satu hal yang penting dalam penanggulangan resiko kebakaran dan bencana lainnya perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai.
- Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi Kebakaran dan bencana lainnya disebabkan oleh Kurangnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran serta koordinasi ekonomi dan sosio cultural/ kearifan local masyarakat.
- Masih perlunya penngkatan layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis yang menjadi dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko kebakaran dan bencana lainnya.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, Penanggulangan Bencana Kebakaran belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Dalam rancangan awal RKPD



tercantum program-program yang dijadikan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan membandingkan antara program dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan renja kerja. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Kebakaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pemadam Kebakaran yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan kebakaran terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang siap siaga bencana Kebakaran dan Bencana lainnya melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran harus menjadi prioritas untuk menunjang fungsi Panca Darma DAMKAR dan dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024.

Pada Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran melakukan beberapa perubahan dan penambahan Sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan Dana yang dimana bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran dan juga bencana lainnya.

Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 8.038.892.835,- memenuhi standar kebutuhan Dinas Pemadam



Kebakaran. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Pada tahun 2024 rencana kerja dari dinas pemadam kebakaran perlu dilaksanakan karena pertimbangan dari masyarakat terhadap pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat terkhususnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran serta berhadapan langsung kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kabupaten lima puluh kota, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan lebih jauh dari dinas pemadam kebakaran dan pihak terkait tentang penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Perbedaan pada perencanaan tahun 2024 dibandingkan pada perencanaan tahun sebelumnya adalah penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru tentang menunjangnya urusan dari dinas pemadam kebakaran serta mengarah pada visi misi dari kepala daerah dan program - program unggulan dari kepala daerah tentang tupoksi dari dinas pemadam kebakaran.



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
(from T.C 31 dalam lampiran permendagri 86 Tahun 2017)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota		DPK	Jumlah pelaksanaan urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten	100%	5.098.892.835	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota		DPK	Jumlah pelaksanaan urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten	100%	3.878.754.695	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.041.816.282	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	2.986.868.481	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.041.816.282		Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.941.603.481	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36 Laporan	25.000.000	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	Dokumen	0		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi	DPK	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	24 Dokumen	30.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
								Anggaran					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	bulan	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 bulan	521.731.425	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.736.250	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bln	0		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bln	33.580.000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0		Penyediaan peralatan rumah tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	38.913.585	
		Penyediaan bahan logistik kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		Penyediaan bahan logistik kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	117.927.810	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.625.400	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.750.000	
		Penyediaan bahan/material	DPK	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0		Penyediaan bahan/material	DPK	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	8.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		fasilitasi kunjungan tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0		fasilitasi kunjungan tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.600.000	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	62.750.000	
	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	bulan	0	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 bulan	159.556.914	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPK	Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung kantor	5 Unit	91.682.155	
		Pengadaan Mebel	DPK	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0							
		Pengadaan peralatan mesin lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit								
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67.874.759	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 bulan	57.076.553	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 bulan	340,112.000	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.350.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Reke Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.085.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	64.282.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8.991.553		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	263.480.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	168.431.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPK	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0							



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	144.581.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	23.850.000	
		pemeliharaan aset tetap lainnya	DPK	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	Unit								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		DPK	Persentase layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	2.94.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		DPK	Persentase layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	8.199.965.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		DPK	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1.440.000.000	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		DPK	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	6.830.580.500	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahun nya	Dokumen	0		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahun nya	2 Dokumen	35.974.500	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	1.440.000.00		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	6.401.700.400	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kkebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kkebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	47.625.000	
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran Yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran Yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.999.500	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	dokumen	0		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	4 dokumen	691.317.350	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Lokasi	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	13 Lokasi	408.683.000	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	org	0		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	25 org	21.162.875	
		Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang di,iliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	desa/kelurahan	0				Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang di,iliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	79 desa/kelurahan	0	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	0				Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1 Dokumen	0	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0				Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	149.955.000	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	0	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	42.960.000	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen	0		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 Dokumen	23.960.000	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	19.000.000	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	0	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	48.111.000	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	48.111.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	1.500.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	192.490.750	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	DPK	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	1.500.000.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	DPK	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	37.774.750	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Nagari	0		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	79 Nagari	77.665.000	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dokumen	0		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1 Dokumen	77.051.000	



No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	0	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	85.822.750	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	15 Laporan	49.564.000	
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	Laporan	0		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	6 Laporan	36.258.750	
						8.038.892.835						11.078.719.695	



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyusunan renja perangkat OPD, salah satu proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dalam kegiatan Musrembang tahun 2023 untuk penyusunan rencana 2024, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Pemadam Kebakaran. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat jorong/nagari hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidentil dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran.



Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Lima Puluh Kota

no	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, haruslah diselaraskan dan dikaitkan juga dengan kebijakan nasional maupun provinsi berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan. Dengan berpedoman kepada Tugas dan Fungsi arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan tersebut dijabarkan melalui RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana pada Agenda ke-enam Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan ini Kabupaten Lima Puluh kota menempatkan persoalan kebencanaan ini kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misi Ke Lima Yaitu Meningkatkan Pembangunan Insfratraktur Secara Terpadu Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran▪ Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ada▪ Melatih tenaga aparatur pemadam kebakaran▪ Merekrut tenaga sukarela pemadam kebakaran



Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Indikator Kinerja Sasaran

1. Penyuluhan dan bimbingan teknis kepada Masyarakat.
2. Presentase jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal proteksi kebakaran.
3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK.)
4. Terbangunnya pos pemadam kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran.
5. Presentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan.

Program Utama :

- a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
- b. Penanggulangan Kebakaran.
- c. Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran

3.3 Program dan Kegiatan

Tahapan perumusan rencana program/kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).



Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui Tahapan Verifikasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk dioperasionisasikan pada tahun 2023 yang terdistribusikan pada 2 program dan 10 kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) kegiatan administrasi keuangan
 - 2) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - 3) Kegiatan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah
 - 4) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 5) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - 1) Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - 2) Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - 3) Kegiatan investigasi kejadian kebakaran
 - 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
 - 5) Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
MUTU PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN (SPM).

1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran dan langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen



kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan sesegera mungkin dapat ditanggulangi dalam waktu yang tidak lama dengan tetap berpedoman kepada Standar Operasional yang telah ada.

2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran Penyelamatan Dan Evakuasi.

Olah data informasi oleh petugas operator: merespon laporan kejadian kebakaran pada buku catatan kejadian darurat **Pastikan Informasi A1** (tidak diragukan lagi) dengan rincian sebagai berikut:

- Nama pelapor,
- No. telepon pelapor,
- Alamat tempat kejadian,
- Jenis yang terbakar,
- Bahan yang terbakar.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



		Penyediaan peralatan rumah tangga
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan bahan/material
		fasilitasi kunjungan tamu
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		Pengadaan mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran, tentulah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota tentulah akan menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Eskalasi permasalahan kebakaran dan kebencanaan lainnya yang cukup sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dari itu diperlukan prioritas dan arah penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka tahun 2024 kita coba untuk memfokuskan program sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses operasional kebakaran dan pasca kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan baik akibat bencana kebakaran maupun akibat bencana lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan terkait dengan upaya-upaya pencegahan kebakaran.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada petugas teknis lapangan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kemampuan teknis (technical ability) di bidangnya sesuai dengan kualifikasi masing-masing.



- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada petugas teknis lapangan bidang kebencanaan dan penyelamatan untuk meningkatkan kemampuan teknis (technical ability) di bidangnya sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
 - e. Meningkatkan jumlah armada tempur (brandweer dan unit supply) beserta personel (petugas teknis lapangan) baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Meningkatkan ketahanan lingkungan bersama masyarakat
- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
 - b. Optimalisasi implementasi peraturan-peraturan yang terkait dengan kebakaran dan kebencanaan lainnya.
 - c. Membentuk struktur dan keanggotaan relawan BALAKAR di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
 - d. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada relawan BALAKAR secara rutin dan periodic
 - e. Melakukan kegiatan bakti sosial sesuai dengan Panca Darma Kebakaran seperti melakukan donor darah, kebersihan lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengurangan kebakaran dan non kebakaran
- a. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kantor Dinas Pemadam (Markas Damkar) di Sarilamak sebagai ibu kota Kabupaten pada tahun 2024.
 - b. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK), dengan penambahan posko pembantu Damkar di Kecamatan Suliki.



Tabel 4.1

Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan IKU Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (tahun 2020)	Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (tahun 2026)	Ket.
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	A	IKU OPD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,98	89,97	95,96	IKU OPD
3	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	75,00 (B)	IKU OPD
4	Indeks inovasi daerah	197	700	1.000	1,700	IKU OPD
5	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	IKU OPD
6	Indeks layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	100	100	IKU OPD
7	Persentase Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46	50	52	80	IKU OPD
8	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (operasi non kebakaran)	46	53	53	81	IKU OPD



Tabel 4 .2

Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2021)	Target		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Ket
			Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Persentase pencegahan, penyelamatan, pemadaman dan evakuasi korban kebakaran	46%	52%	58%	76%	
2	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran	46%	53%	60%	81%	
3	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%	52%	58%	76%	
4	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	39%	46%	53%	81%	
5	Penanganan kebakaran waktu tanggap (respon time)	15	15	15	15	
6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi	7	7	8	11	
7	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	113	113	113	313	
8	Jumlah aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud permendagri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	56	56	70	113	
9	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	50	50	52	70	
10	Pos damkar yang dilengkapi sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan /desa	7	8	8	11	



11	Jumlah dan jenis sarana prasana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	113	113	138	313	
12	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	113	113	138	313	
13	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	90	100	100	100	
14	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240	240	240	350	
15	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	120	120	130	135	

Adapun tujuan dari Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah dapat membantu dinas pemadam kebakaran meunjang Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik dan Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakarandan non kebakaran.

Dalam pelaksanaan dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran kedepan dalam membantu Program Kepala Daerah pada 13 Kecamatan dinas damkar hendaknya harus memiliki Posko pembantu pada tiap tiap kecamatan agar masyarakat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Pada kondisi tahun 2022 dinas Pemadam kebakaran hanya memiliki 7 Posko dan Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran 132 serta relawan kebakaran dibawah binaan dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 240 orang, Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten 120 Kali.

Pada tahun 2024 Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan



dana sebesar Rp. 8.038.892.835,- (Delapan Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terbagi dalam 2 (Dua) program sebagai berikut:

Tabel 4.3

No	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.098.892.835	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.041.816.282	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.076.553	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.940.000.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.440.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	0	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.500.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	
	Total	Rp. 8.038.892.835	

Harapan lain juga kita berharap dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dapat juga diperoleh melalui pihak ketiga atau donatur.

Sehingga kita berharap kiranya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui hadirnya Pemerintah ditengah-tengah masyarakat.



Sedangkan rencana program, kegiatan dan pagu indikatif badan penanggulangan kebakaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2024 serta perkiraan maju tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%			5.098.892.835	APBD			6.468.094.560
1	5	1	2,02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	DPK		5.041.816.282	APBD			6.468.094.560
1	5	1	2,02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta THL dan honorarium	DPK	40 Orang/bulan	5.041.816.282	APBD		40 Orang/bulan	3.800.000.000
1	5	1	2,02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Kuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan dan Dokumen Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	DPK	36 Laporan	0	APBD		36 Laporan	25.000.000
1	5	1	2,02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	24 Dokumen	0	APBD		24 Dokumen	31.000.000
1	5	1	2,06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	DPK		0	APBD			537.664.060
1	5	1	2,06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPK	12 Paket	0	APBD		12 Paket	35.736.250
1	5	1	2,06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	DPK	5 Paket	0	APBD		5 Paket	34.000.000
1	5	1	2,06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPK	12 Paket	0	APBD		12 Paket	39.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	2,06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPK	24 Paket	0	APBD		24 Paket	119.927.810
1	5	1	2,06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPK	12 Paket	0			12 Paket	60.000.000
1	5	1	2,06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPK	12 Dokumen	0	APBD		12 Dokumen	95.000.000
1	5	1	2,06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPK	10 Paket	0	APBD		10 Paket	46.000.000
1	5	1	2,06	0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DPK	12 Laporan	0	APBD		12 Laporan	33.000.000
1	5	1	2,06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	DPK	24 Laporan	0	APBD		24 Laporan	75.000.000
1	5	1	2,07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	DPK		0	APBD			967.315.500
1	5	1	2,07	0001		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan	DPK	Unit	0	APBD		1 Unit	900.000.000
1	5	1	2,07	0005		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	DPK	Unit	0	APBD		5 Unit	29.000.000
1	5	1	2,07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPK	5 Unit	0	APBD		5 Unit	29.000.000
1	5	1	2,07	0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DPK	5 Unit	0	APBD		5 Unit	9.315.500
1	5	1	2,08			Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	DPK		57.076.553	APBD			768.115.000
1	5	1	2,08	0001		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	12 Laporan	0	APBD		12 Laporan	12.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	2,08	0002		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPK	48 Laporan	48.085.000	APBD		48 Laporan	466.115.000
1	5	1	2,08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPK	60 Laporan	8.991.553	APBD		60 Laporan	290.000.000
1	5	1	2,09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan			0				339.000.000
1	5	1	2,09	0001		Penyediaan pajak, biaya pemeliharaan, dan oajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPK	Unit	0	DPK		2 Unit	30.000.000
1	5	1	2,09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPK	11 Unit	0	APBD		11 Unit	219.000.000
1	5	1	2,09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPK	44 Unit	0	APBD		44 Unit	30.000.000
1	5	1	2,09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPK	10 Unit	0	APBD		10 Unit	30.000.000
1	5	4				Proram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	DPK		2.940.000.000				12.581.269.000
1	5	4	2,01			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun Kebakaran Dalam daerah	100%	DPK		1.440.000.000	APBD			11.636.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kabupaten/Kota								
1	5	4	2,01	0001	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	DPK	2 Dokumen	0	APBD			2 Dokumen	200.000.000
1	5	4	2,01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	120 Laporan	1.440.000.000	APBD			120 Laporan	6.800.000.000
1	5	4	2,01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kkebakaran dan Non Kebakaran	DPK	2 Dokumen	0	APBD			2 Dokumen	73.000.000
1	5	4	2,01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penanggan Kebakaran Yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	1 Dokumen	0	APBD			1 Dokumen	62.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	4	2,01	0005		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	DPK	4 dokumen	0	APBD		4 dokumen	950.000.000
1	5	4	2,01	0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	DPK	14 unit	0	APBD		14 unit	2.500.000.000
1	5	4	2,01	0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	DPK	25 org	0	APBD		25 org	400.000.000
1	5	4	2,01	0008		Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya		79 desa/kelurahan	0	APBD		79 desa/kelurahan	230.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	4	2,01	0018		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran		1 Dokumen	0			1 Dokumen	255.000.000
1	5	4	2,01	0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		50 Keluarga	0			50 Keluarga	166.000.000
1	5	4	2,02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	DPK		0	APBD			130.975.000
1	5	4	2,02	0001		Pendataan Sarana Prasarana Proeteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	DPK	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	68.975.000
1	5	4	2,02	0002		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	DPK	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	62.000.000
1	5	4	2,03			Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	DPK		0	APBD			75.000.000
1	5	4	2,03	0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	DPK	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	75.000.000



Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	4	2,04			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%	DPK		1.500.000.000	APBD			337.162.000
1	5	4	2,04	0001		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	DPK	1000 Orang	1.500.000.000	APBD		1000 Orang	337.162.000
1	5	4	2,04	0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	DPK	79 Nagari	0	APBD		79 Nagari	125.932.000
1	5	4	2,04	003		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Saprasi Damkar	DPK	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	76.020.000
1	5	4	2,05			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	DPK		0	APBD			402.132.000
1	5	4	2,05	0001		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa,Memabahayakan,dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	15 Laporan	0	APBD		15 Laporan	75.500.000
1	5	4	2,05	0004		Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	DPK	6 Laporan	0	APBD		6 Laporan	326.632.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pada Rancangan awal renja 2024 ini Dinas Pemadam Kebakaran mengusulkan 2 Program 10 Kegiatan 42 sub kegiatan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 5.098.892.835,- dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp. 2.940.000.000,- dengan perencanaan awal renja ini akan dapat meminimalisir keperluan kebutuhan yang dibutuhkan pada dinas pemadam kebakaran pada tahun 2024.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

9. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-9
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-12
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-13
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-14
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-31
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-39
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-48
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-61
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-67
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-69
	3.3 Program dan Kegiatan.....	III-72
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023.....	I-6
Tabel II.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-15
Tabel II.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-34
Tabel II.3	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-40
Tabel II.4	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal	II-44
Tabel II.5	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-45
Tabel II.6	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-49
Tabel II.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-62
Tabel III.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	III-72
Tabel IV. 1	: Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	IV-76
Tabel IV.2	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	IV-77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/335/BUD-LK/XII/2022 tentang Pembentukan struktur organisasi tim penyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 dan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam formasi jabatan *ex-officio*. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

II. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/27/SE/Bapelitbang-LK/II/2023 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (renja pd) tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan

merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta rencana kerja perangkat daerah dan kementerian terkait masing-masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan dimulai sejak bulan Desember 2022. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2023, direncanakan selesai minggu keempat bulan Desember 2022. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

III. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah diadakan Rabu tanggal 22 Februari 2023 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum perangkat daerah Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Hasil Musrenbang RKPD 2024 di Kecamatan.

IV. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Rancangan Renja ini

kemudian disampaikan kepada Kepala Bapelitbang paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2023 untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bapelitbang.

V. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2023 di sampaikan ke Kepala Bapelitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh tim. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Kepala Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi

keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A.	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Dinas Sosial																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
4	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil forum Dinas Sosial dan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
C.	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
1	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Dinas Sosial sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D.	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Renja berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
E.	Penetapan Renja																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Dinas Sosial selaras dengan peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja setelah diverifikasi																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan draf perkada Renja menjadi Perkada Renja OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota																																

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 (T-C.29)														
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022														
Kabupaten Lima Puluh Kota														
SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota														
Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Urusan Sosial									
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12 Dokumen	2	1	1	100%	2	5	42%
06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasai Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72 Dokumen	12	10	12	120%	12	36	50%

06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516 OH	61	61	61	100%	54	176	34%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72 Dokumen	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	50%
06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%

06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	0%	95%	95%	95%
06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420 Stel	70	70	-	0%	0	70	17%
06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 OH	0	15	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listik yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%
06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72 Bulan	12	12	0	0%	12	24	33%

06	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598 Porsi	12	545	545	100%	1093	1.650	29%
06	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.532 Porsi dan 870	115	842	842	100%	614	1.571	29%
06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0	-		0%	0	-	0%
06	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2	1	3	0	0%	3	3	33%
06	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran	2	3	0	0%	3	3	50%
06	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas	2	8	-	0%	2	2	3%
06	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1	-	-	0%	0	-	0%

06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	12	12	0	0%	12	24	33%
06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	0	-	-	0%	12	12	17%
06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1	-	-	0%	1	2	33%
06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%

06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6 Paket	1	1	0	0%	1	2	33%
06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	0	0	0	0%	0	-	0%
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81 Orang PSM	81	81	-	0%	81	81	100%
06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13 Orang TKSK	13	13	13	100%	13	13	100%
06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk	135	75	75	100%	68	278	57%
06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS , Sosialisasi dan Musda LKKS	92	92	92	100%	92	92	100%

06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	6 Sosialisasi, 60 Orang Bantuan	11	11	-	0%	-	11	17%
06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	6 orang	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia	2.195	1.972	338	17%	18.888	21.421	176%
06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596 Orang	0	30	-	0%	75	75	13%
06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528 Orang	90	55	0	0%	75	165	31%

06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	360 Kasus ABH/ Anak Terlantar	0	60	60	100%	50	110	31%
06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	273 Orang, 1 Rumah Singgah	45	87	10	11%	23	78	28%
06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	0	-	-	0%	18	18	4%
06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480 Orang	0	30	20	67%	32	52	11%
06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169 Orang	16	32	15	47%	15	46	27%

06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.02	02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	03		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	04		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	06		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140 orang	20	15	-	0%	10	30	21%
06	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	10		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	0	212.391	-	0%	212.391	212.391	100%

06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	27	0	0%	0	-	0%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	108 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	13	100%	13	13	100%
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	24994	0	0%	24.994	24.994	100%

06	05	2.02	03	06	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16.898 KPM	0	16898	16898	100%	16.898	16.898	100%
06	05	2.02	04	06	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE	0	50	13	26%	100	113	31%
06	06			06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01		06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.01	01	06	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	858 Paket 1 Gudang Logistik	1	150	126	84%	173	300	35%
06	06	2.01	02	06	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900 Paket	0	150	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	03	06	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%
06	06	2.01	04	06	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlantar dalam perjalanan	72 orang	6	18	6	33%	10	22	31%
06	06	2.01	05	06	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi	82	30	30	100%	25	82	99%

06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	6 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana	0	1	0	0%	0	0	0%
06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150 orang	25	25	0	0%	25	50	33%
06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	6 Rehab, 6 Kali Peringatan	2	2	1	50%	2	5	42%
06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	1	0	0	0%	0	1	100%
06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2022 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub Kegiatan yang direncanakan target di renja sebanyak 7 sub kegiatan yang terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan ini di karenakan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mencukupi. Untuk 3 Sub kegiatan tersebut target terealisasi semuanya 100 %.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub kegiatan yang ditargetkan dalam renja sebanyak 6 Sub Kegiatan terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan dan yang 3 sub kegiatan ini dari target yang di tetapkan terealisasi semuanya 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 8 sub kegiatan terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan. 3 Sub Kegiatan lagi tidak terakomodir karena kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Dari 5 sub kegiatan yang terealisasi dari target yang di tetapkan semuanya terealisasi sesuai target 100%.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 95 % terealisasi 95 %.yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 95 % terealisasi sebanyak 95 %.

- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan jumlah Pemilihan TKSK Berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK sebanyak 13 orang. Target renja tahun 2022 13 TKSK dan terealisasi sebanyak 13 TKSK (100%)
- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana PMKS (RTLH) dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH dengan target sesuai dengan realisasi (100%).
- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan jumlah Karang Taruna yang Mengikuti Bimtek sebanyak 80 orang dan Sosialisasi penguatan kelembagaan LKKS sub kegiatan terealisasi 100 % sesuai dengan target.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 10 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2022 tapi yang terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari 5 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %.

- ❖ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data BDT serta Pendataan PPKS/PSKS untuk sebanyak 13 Kecamatan, dengan target 13 kecamatan terealisasi sebanyak 13 kecamatan (100%)
- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH) 17.130 Orang KPM, terealisasi 100%.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target target 95 % terealisasi 95 %. Sub kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial dan Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (orang Terlantar dalam Perjalanan), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan keluaran kegiatan Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dari target yang direncanakan terealisasi 100%.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 95% terealisasi sebanyak 95 %. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga

Keamanan Makam Pahlawan) yang Dibayarkan sebanyak 12 bulan. Target terealisasi 100%.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2022 program dan kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dalam renja terdapat target dari 2 sub kegiatan ini karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi jadi sub kegiatan ini tidak terealisasi.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak jadi terealisasi karena tidak cukupnya kemampuan keuangan daerah untuk pemenuhan kegiatan ini.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan ini Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi sebanyak 81 orang, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan ini.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan pada kegiatan ini tidak ada yang dapat direalisasikan sesuai target karena keuangan daerah tidak mencukupi untuk pembiayaan kegiatan ini

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako 25.287 KPM, kegiatan monitoring ini tidak dapat terlaksana karena kemampuan keuangan daerah terbatas.
- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan keluaran kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang (bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak kekerasan (KTK) dengan target di renja 50 orang yang akan mendapatkan pelatihan dan bantuan sosial ternyata teralisasi hanya monitoring penerima bantuan sebanyak 13 kecamatan.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana tidak dapat terealisasi karena ketidakmampuan keuangan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh OPD dan terkait dengan Tupoksi OPD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table II.2 berikut ini :

Tabel II.2 (T-C.30)													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota													
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		3	4		5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			25	25	25	25	25	25	25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			30	20	25	30	30	20	25	30	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			263	275	300	263	263	275	300	263	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	√			0	0	5	5	0	0	18	5	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√			126	173	180	162	126	173	180	162	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		85,2	86,8	88,2	89,6	86,8	86,8	88,2	89,6	
7	Persentase PMKS yang tertangani		√		93,5	94,5	95,2	96,2	94,5	94,5	95,2	96,2	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		93,3	93,6	93,8	94	93,6	93,6	93,8	94	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		3	4		5	6	7	8	10	11	12	13	14
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		98	98	98	98	98	98	98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		98	98	98	98	98	98	98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		63	64	65	66	64	64	65	66	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		√		100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	72	74	76	78	74	74	76	78	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			√	95	95	95	95	95	95	95	95	
16	Nilai AKIP			√	65	65	65	65	65	65	65	65	
17	Nilai IRB			√	16,5	16,75	17	17,25	16,75	16,75	17	17,25	
18	Nilai IKM			√	85	85	85	85	85	85	85	85	

Analisa Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota (table 2.II T-C 30):

Indikator dari nomor 1 sampai 5 adalah indikator pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator SPM terdiri dari :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 25 orang disabilitas dan teralisasi sebanyak 25 orang, jadi pencapaian 100%.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 30 orang anak terlantar dan teralisasi sebanyak 30 orang, jadi pencapaian 100%.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 263 orang lanjut usia dan teralisasi sebanyak 263 orang, jadi pencapaian 100%.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Pada indikator ini target nya 0 dan realisasinya 0. Karena indikator ini tidak ada data dukung nya.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Target 126 orang terealisasi ebanyak 126 orang, pencapaian 100 %.

Indikator dari nomor 6 sampai 13 adalah indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator IKD terdiri dari :

6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
7. Persentase PMKS yang tertangani.
8. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

10. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
11. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.

Indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Indikator dari nomor 14 sampai 18 adalah indikator Kinerja Utama Kepala OPD yaitu Dinas Sosial yang mempunyai 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

14. Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan target 72 % terealisasi 74 % realisasi melebihi target yang direncanakan. Analisa terhadap Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seberapa banyak pelayanan kepada PPKS pada tahun n bagi jumlah PPKS pada tahun n. Data naik turun ini berpengaruh kepada anggaran tiap tahun yang dikelola oleh Dinas Sosial. Semakin banyak anggaran semakin banyak PPKS yang terlayani.
15. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 95 % dan realisasi 95 %. Target terealisasi 100%. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Target untuk peran aktif PSKS dalam Penyelenggaraan PSKS adalah tetap karena disini di nilai seberapa banyak PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial apada tahun n di bagi dengan jumlah keseluruhan PSKS yang ada pada tahun n.

16. Nilai AKIP, target 65 % terealisasi 65 % pencapaian target 100%.
17. Nilai IRB, target 16, 5 terealisasi 16,75 %. Realisasi melebihi target yang direncanakan.
18. Nilai IKM, dengan target 85 terealisasi 85 %.

.Indikator yang di nilai pada Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yang ke 3 yaitu Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM Dinas Sosial . Pada pencapaian target ini berdasarkan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang di nilai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi, Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ” Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.4

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

	PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS	<p>dalam penanggulangan masalah sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS 	<p>dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS
ANCAMAN (<i>Threats</i>)	<u>STRATEGI S + T</u>	<u>STRATEGI W + T</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berawas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<p>Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan kesejahteraan PPKS

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial

- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

3. Startegi Kekuatan – Ancaman (S – T) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W – T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up todate* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 16.334.407.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif OPD untuk RKPD tahun 2024 adalah Rp. 8.278.634.914,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belah Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel II.6. berikut:

Tabel II.6 (T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

01	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	6.826.407.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	3.311.163.814	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	86.600.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	95%	9.029.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.734.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	11.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA yang di susun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB, SPIP dan Laporan Kinerja	12 Dokumen	19.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	4.375.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi Kinerja dan monitoring Kegiatan APBD	81 OH	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.920.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	95%	4.862.980.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.923.187.814	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	12 bulan	4.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	2.919.256.814	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di Verifikasi	12 dokumen	42.780.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.993.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 bulan	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan pronogsis anggaran	1 Dokumen	4.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.938.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terbit Administrasi Milik Daerah	95%	7.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100%	1.933.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan RKBM dan RKPBM	2 Dokumen	3.900.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	3.900.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.933.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	44.996.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	70 Stel	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 OH	9.996.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	440.309.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	99.750.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	15.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Bulan	-	
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	42.500.000	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.940.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41.809.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.060.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	8.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	872 Porsi	28.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	737 Porsi dan 135 OH	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	33.250.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	95%	573.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	19.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2)	1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	415.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 2 (dua)	3 Unit	-	
Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	Lemari arsip, kursi tamu, kursi rapat, meja, rak buku/koran	40.000.000	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lemari Arsip	3 Unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 Unit AC, 2 Unit Kipas Angin, 2 Unit Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Unit Televisi	118.450.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	348.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	57.792.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.042.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.750.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengurus Barang Pengguna yang dibayarkan	12 Bulan	270.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	95%	462.271.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	200.472.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	35.271.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin, berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	192.802.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	7.670.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 Paket	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	2.421.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	-	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	95%	2.421.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	95%	-	

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	81 orang PSM	450.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	13 orang TKSK	175.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RTLH) pengadaan Bangunan Warbinsos, Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Misikn dan UEP KUBE	25 RTLH, 1 kali sosialisasi, 1 unit warbinsos, 50 KPM dan 5 klp	550.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna mengikuti sosialisasi dan lomba karang taruna dan jumlah PPKS kelembagaan masyarakat yang diberdayakan	80 karang taruna, 11 LKS, 1 LKKS, sosialisasi dan musda LKKS	1.071.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun	175.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sertifikasi yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	-	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	75.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	-	

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	75.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1 orang	75.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	4.654.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	4.702.223.700	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	3.884.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	1.900.078.800	
Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial serta UEP bagi Lansia	2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	2.400.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Bayi terlantar	100 Orang	210.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	85 Orang	280.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	84.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Tersedianya Rumah Idaman/UJLS/Rumah Hantara/Rumah Singgah	50 Orang dan 1 Unit Rumah Singgah	300.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	255.000.000	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25 Orang	150.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	175.000.000	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi anak terlantar dan putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan bimbingan lanjut untuk anak terlantar (putus sekolah)	80 Orang	200.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1395 Orang	1.470.078.800	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	5 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	30 Orang	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	770.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	2.802.144.900	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024

Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	15 Orang	30.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	10 Orang	30.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	25 Orang	250.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	859.480.200	Kegiatan PMK 212
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10 Orang	30.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	183 Orang	814.646.000	Kegiatan PMK 212
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI, JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi.	Jamkesda 18.500, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	180.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	21.239	1.128.018.700	Kegiatan PMK 212
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis.	9 Panti 25 orang	70.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	1.765.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	-	
Pemeliharaan Anak Terlantar		Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	155.000.000	Pemeliharaan Anak Terlantar		Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar			
Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	17 orang	40.000.000	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	0	-	
Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	20 orang	60.000.000	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	0	-	
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	25 orang	55.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0	-	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	1.610.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	-	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	425.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	160.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	375.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	650.000.000	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	478.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	265.247.400	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	95%	278.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	95%	265.247.400	
	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket	100.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	173 Orang	193.997.400	Kegiatan Pendukung PMK 212 Bidang Kesehatan
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	150 Paket	100.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	173 Orang	71.250.000	Kegiatan Pendukung PMK 212 Bidang Kesehatan
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024 karena keterbatasan anggaran
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 10 orang terlantar dalam perjalanan	15.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan selter pengungsi	82 Orang Tagana	13.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	95%	200.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	95%	-	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	25 orang	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan	95%	190.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan	95%	-	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	95%	190.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	95%	-	
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehap dan 1 Kali Peringatan	120.000.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	-	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 Bulan	20.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	-	
		Total		16.334.407.000			Total		8.278.634.914	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2024, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 disajikan pada tabel II.7 berikut :

Tabel II.7 (T-C.32.)					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
MUSRENBANG					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dan Alat Bantu cacat)	17 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia, UEP Lansia, UEP Anak Terlantar dan sandang.)	375 orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	25 orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin dan KUBE)	6 Orang dan 1 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

POKOK PIKIRAN DPRD					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dan Alat Bantu cacat)	13 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia, UEP Lansia, UEP Anak Terlantar dan sandang.)	722 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	253 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin dan KUBE)	184 Orang dan 53 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

Pada tabel II.7 usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 yaitu pada forum Musrenbang Kecamatan adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang Disabilitas dan pemberian Alat Bantu cacat bagi penyandang disabilitas dengan target yang direncanakan sebanyak 17 orang dengan rincian untuk UEP Disabilitas sebanyak 5 orang dan Alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 12 orang. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator pada sub kegiatan ini adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan permakanaan bagi Lanjut Usia , Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi lanjut usia, Bantuan Usaha Ekonomi bagi Anak Terlantar dan bantuan sandang, dengan target sebanyak 375 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Indikator sub kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu bantuan sosial usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) sebanyak 25 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluaran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 6 orang dan bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama(KUBE) sebanyak 1 Kelompok.

Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 usulan yang layak adalah pada adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang Disabilitas dan pemberian Alat Bantu cacat bagi penyandang disabilitas dengan target yang direncanakan sebanyak 13 orang dengan rincian untuk UEP Disabilitas sebanyak 10 orang dan Alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 3 orang. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan permakanan Lanjut Usia , Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi lanjut usia, Bantuan Usaha Ekonomi bagi Anak Terlantar dan bantuan sandang.) dengan target sebanyak 722 orang. Dengan rincian bantuan permakanan lansia 684 orang, UEP lansia 9 orang, UEP anak terlantar 25 orang dan bantuan sandang 4 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Sub kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu bantuan sosial usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) sebanyak 253 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluaran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian

Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 184 orang dan bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama(KUBE) sebanyak 53 Kelompok.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

a. Pernyataan Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

- c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

d. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

e. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
- Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.

2. Sasaran

- Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
- Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) Pekerja Sosial Profesional (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (4) Keluarga Pioner (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (6) Penyuluh Sosial (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (9) Karang Taruna (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) (12) Dunia Usaha

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

			listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	PROGRAM	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat 3. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
B.	PROGRAM	:	PENANGANAN BENCANA
3.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang
--	--------------	---	--

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 2 Program 3 Kegiatan 8 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Bencana. Program pendukung PUG adalah Program Rehabilitasi Sosial.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 4.1, Tabel 4.2. Uraian Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan, Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2024 Tabel 4.1 dan Renjana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabl 4.2.

Tabel 4.1

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

NO	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)	Tahun 2024		Tahun 2025 Total Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintah an Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	3.311.163.814	4.837.242.740	7	3.311.163.814	4.837.242.740	
2	Urusan Pemerintah an Bidang Sosial	3	4.967.471.100	6.648.824.570	10	4.967.471.100	6.648.824.570	

Tabel 4.2

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANAK PERIODIK KENDARAAN OPD	REALISASI CAPAIAN SEMUA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET SEMUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KEMERIAHAN KEMERIAHAN KEMERIAHAN						ALOKASI SASARAN	PEMBAYARAN NILAI TENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAU INDIKATIF (%)	LOKASI	INDUKSI (JAWA)	PESERTA			TARGET	PAU INDIKATIF (%)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						8.275.000.000,00							11.886.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN NABU YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH						8.275.000.000,00							11.886.000.000,00	
	1.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.275.000.000,00							11.886.000.000,00	
1	1.00.01	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembinaan Pelaksanaan Program Urusan Pemerintah Daerah	-			80%	3.011.162.000,00						-	4.817.262.000,00	
	1.00.01.1.01	Pembinaan Pengembangan dan Kualitas Pelayanan Daerah	Pembinaan Organisasi Pemerintahan dan Pelayanan Daerah	-			80%	3.011.162.000,00			Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Daerah	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	4.817.262.000,00	DINAS SOSIAL
	1.00.01.1.01.0001	Pembinaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah				1 Dokumen	1.754.000,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Kecamatan, Setelah dan Setelah dan	DINAS DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Daerah	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.754.000,00	DINAS SOSIAL
	1.00.01.1.01.0002	Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEWASTAN / SUB KEWASTAN	INDIKATOR PROGRAM / KEWASTAN / SUB KEWASTAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAMBAH 2023	PROGRES CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAMBAH 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN RENCANA TAMBAH 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RPA-DKPD dan Laporan Kerja Koordinasi Penyelenggara Dokumen RPA-DKPD				3 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER (UMUM-DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan aspek per kembangan daerah yang berisi akutabel dan berkualitas Pengembangan dan Kecamatan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.329.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.2023 Koordinasi dan Penyelenggara Dokumen Peraturan RPA-DKPD																
			Jumlah Dokumen Perbaikan RPA-DKPD dan Laporan Kerja Koordinasi Penyelenggara Dokumen Perbaikan RPA-DKPD				3 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER (UMUM-DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan aspek per kembangan daerah yang berisi akutabel dan berkualitas Pengembangan dan Kecamatan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.329.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.2024 Koordinasi dan Penyelenggara RPA-DKPD																
			Jumlah Dokumen RPA-DKPD dan Laporan Kerja Koordinasi Penyelenggara Dokumen RPA-DKPD				3 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER (UMUM-DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan aspek per kembangan daerah yang berisi akutabel dan berkualitas Pengembangan dan Kecamatan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.340.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.2025 Koordinasi dan Penyelenggara Perbaikan RPA-DKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEKUTATAN / SUB KEKUTATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEKUTATAN / SUB KEKUTATAN	TARJET ANAK PUSKES KINERJA OPD	REALISASI CAPAIAN KUALA / OPD TAHUN 2023	PELAKSANA CAPAIAN TARJET BUKLA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN						KOLIMPOK SABAGAN	PENGHASILAN BUKLA KEMAH TAHUN 2023		PESANGKUT DAKWAH PENGANGGUNG JAWAB
							TARJET 2024	PAGU NEMATIF (Rp)	LOKASI	SUBSIDI JANG	PRIORITY			TARJET	PAGU NEMATIF (Rp)	
											NASIONAL	SABAGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.08.01.2.02	Aktivitas Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan pelayanan per dan layanan AGN (sop) pelayanan Layanan OPD	-			85 %	1.000.000.000,00			Meningkatkan 1. Kualitas Pelayanan dan Tim Informasi Pelayanan Publik	Meningkatkan 1. Kualitas Pelayanan dan Tim Informasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	850.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.08.01.2.02.001 Peningkatan Sop dan Tim Kerja AGN																
			Jumlah Orang yang Menerima Sop dan Tim Kerja AGN				87 Orang/kelompok	1.000.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Kabupaten Sembilan Mawar	DINAS TRANSKOR UMUM-DINAS ALOKASI UMUM	Meningkatkan 1. Kualitas Pelayanan dan Tim Informasi Pelayanan Publik	Meningkatkan 1. Kualitas Pelayanan dan Tim Informasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota		850.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.08.01.2.02.002 Peningkatan Peningkatan Sop dan Tim Kerja AGN																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Sop dan Tim Kerja AGN				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Kabupaten Sembilan Mawar	DINAS TRANSKOR UMUM-DINAS ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan 1. Kualitas Pelayanan dan Tim Informasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	DINAS SOSIAL
1.08.01.2.02.003 Peningkatan Peningkatan Sop dan Tim Kerja AGN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEJATAN / SUB KEJATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEJATAN / SUB KEJATAN	TARJAH AKHIR PERIODIK RESTRUKTURISASI DPS	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI DPS TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN TARJAH AKHIR DPS TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKAWANAN PENCAPAIAN						KELUMPUK SASARAN	PELAKSANAAN KINERJA DAN KEBANGKAWANAN PENCAPAIAN		PELAKSANAAN KINERJA DAN KEBANGKAWANAN PENCAPAIAN	
							TARJAH 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	KEMERDEKAAN	PROMOTIF			TARJAH 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH			NASIONAL		DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.01.01.2.01	Administrasi Pengelolaan Peningkat Kesejaht	Peningkat Administrasi Pengelolaan Peningkat Kesejaht	-	-	-	-	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	Peningkat an kualitas terdapat an ter				

NO	KODE	URAIAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERSEKUE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PENGALAMAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDANG PENGANTARAN						KELOMPOK SASARAN	PENGALAMAN BALIK KENDANG TAHUN 2023		PESAWAT DARI POMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU BERSIKAP (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGANTARAN			TARGET	PAGU BERSIKAP (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Daring Dinas dan Pengantar yang Dikirim				10 Paket	20.000.000,00	- Pak. Lima Paket Rata Semua Kecamatan Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengikuti 1 Daring Pembinaan dan Dan To mendasi Regulasi Paket	Mengikuti 1 Daring Pembinaan dan Dan To mendasi Regulasi Paket	Kabupaten Lima Paket Rata		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Baku dan Restoran Pengantar yang															
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Restoran Pengantar yang Dikirim				10 Dokumen	5.000.000,00	- Pak. Lima Paket Rata Semua Kecamatan Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mengikuti 1 Daring Pembinaan dan Dan To mendasi Regulasi Paket	Kabupaten Lima Paket Rata		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.000	Fasilitas Katering Tani															
			Jumlah Laporan Fasilitas Katering Tani				10 Laporan	10.000.000,00	- Pak. Lima Paket Rata Semua Kecamatan Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengikuti 1 Daring Pembinaan dan Dan To mendasi Regulasi Paket	Mengikuti 1 Daring Pembinaan dan Dan To mendasi Regulasi Paket	Kabupaten Lima Paket Rata		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.000	Peningkatan Kapasitas Katering dan Restoran Katering															

NO	KODE	URUSAN/INSAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET ANNE PERIODE KEMENTERIA (PD)	REALISASI CAPAIAN PERIODE TAHUN 2022	REKORDAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMBIAYAN						KELOMPOK SASARAN	REKORDAN MAJU REKORDA TAHUN 2022		PERANGKAT DASAR PEMERINTAH JAWA
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PERKURSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sipil Masyarakat dan Masyarakat (LPSM)				100 persen	10.250.000,00	-Kas. Lima Puluh Kota, Dinas, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Desa Paksi Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengunjungi 1 Desa Paksi Desa, Kecamatan Paksi dan 1 Desa Paksi Desa, Kecamatan Paksi	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan masyarakat yang terdistribusi merata ke seluruh Desa Paksi Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.270.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah-Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerataan Pengelolaan Barang Milik Daerah-Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	-			95%	16.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan masyarakat yang terdistribusi merata ke seluruh Desa Paksi Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	16.170.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Paket Paket yang Dikeluarkan				8 (8)	0,00	-Kas. Lima Puluh Kota, Dinas, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Desa Paksi Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan masyarakat yang terdistribusi merata ke seluruh Desa Paksi Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota		16.220.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN/DEKAS URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET ANAK PERIODIK RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RUMAH OPD TAHUN 2023	PELAKSANA CAPAIAN TARGET RUMAH OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN BILU RENCANA TAHUN 2024		PESANGKAT DAKWAH PESANGKAT JAWAB
							TARGET 2024	PAUJ INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAUJ INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Posidhan dan Masa Lintas yang Dikelola				10 Unit	18.000.000,00	- Rut. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI-UMUM	Memperkuat 1. Struktur Pelayanan dan Tata kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal dan berkeadilan Pelayanan Publik dengan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.00	Perencanaan Jasa Persewaan Unsur Pemeliharaan Darat	Perencanaan Persewaan Jasa Persewaan Unsur Pemeliharaan Darat	-			40 %	37.782.000,00			Memperkuat 1. Struktur Pelayanan dan Tata kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal dan berkeadilan Pelayanan Publik dengan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	37.782.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.00.0001	Persewaan Jasa Darat Melayani														
			Jumlah Laporan Persewaan Jasa Darat Melayani				10 Laporan	1.042.000,00	- Rut. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI-UMUM	Memperkuat 1. Struktur Pelayanan dan Tata kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal dan berkeadilan Pelayanan Publik dengan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.042.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.00.0002	Persewaan Jasa Pemeliharaan, Sumbat, Dipek, Widen, Lantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODA RENSTRA 2023	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PEMBAYARAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PEMBAYARAN/ALOKASI TAHUN 2024		PERANGKAT SARAN PENUNJANG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan dan dipantau Pajal dan Pemasangannya				21 Unit	162.602.000,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Field Office	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat dan meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih akurat dan berkualitas dengan menggunakan teknologi	Kecamatan Lima Puluh Kota		321.602.100,00	DINAS SOSIAL
1.08.01.2.06.0000 Pembinaan Fasilitas dan Mesin Laundry																
			Jumlah Fasilitas dan Mesin Laundry yang Disiapkan				24 Unit	7.473.000,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Field Office	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat dan meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih akurat dan berkualitas dengan menggunakan teknologi	Kecamatan Lima Puluh Kota		16.812.000,00	DINAS SOSIAL
1.08.01.2.06.0000 Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disiapkan/Rehabilitasi				2 Unit	8,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Field Office	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih akurat dan berkualitas dengan menggunakan teknologi	Kecamatan Lima Puluh Kota		19.900.400,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.01	PROGRAM PEMERINTAHAN SOSIAL	Pembinaan PKKS yang di Disiapkan	-			55%	8,88						-	2.117.345.188,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEBANTUAN / SUB KEBANTUAN	INDIKATOR PROGRAM / KEBANTUAN / SUB KEBANTUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA DPS	REALISASI CAPAIAN RENCANA DPS TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENCANA DPS TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PEMERINTAH						KELOMPOK SASARAN	PEMBAYARAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PACU BOKAL (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PACU BOKAL (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.00	Pengembangan Pemasaran Sumber Penghasilan Sosial Daerah Kabupaten Kota	Pemenuhan Pengembangan Pemasaran Sumber Keagamaan Sosial	-			45 %	3.00			-	Meningkatkan kualitas data pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berisi, akurat dan berkualitas Penghasilan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	2.117.201.146,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001 Pemenuhan Pemasaran Pemasaran Pemasaran Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota																
			Jumlah Orang Mendapat Penghasilan Upadaya Pemasaran Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota				3 Orang	3.00	-Rasi Lima Puluh Kota Serta Kecamatan Serta Pali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas data pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berisi, akurat dan berkualitas Penghasilan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		279.559.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002 Pemenuhan Pemasaran Pemasaran Pemasaran Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota																
			Jumlah Tenaga Keagamaan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota yang Mendapat Pemasaran Kecamatan Kabupaten Kota				3 Orang	3.00	-Rasi Lima Puluh Kota Serta Kecamatan Serta Pali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas sumber data Masyarakat yang berisi, lengkap, akurat dan berkualitas Penghasilan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		107.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003 Pemenuhan Pemasaran Pemasaran Pemasaran Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	INDIKATOR PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	TARGET ANALIS PERIODIK REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRAS OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARJETA REKSTRAS OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAKU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kawenthan Kabupaten Kota				0 Keluarga	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbelah, terpencil, terasing dan terdapat saling Pengkendala dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.435.744.490,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004 Pergerakan Kemajuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan Masyarakat Kawenthan Kabupaten Kota																
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kawenthan Kabupaten Kota				0 Lembaga	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbelah, terpencil, terasing dan terdapat saling Pengkendala dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		182.133.880,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005 Pergerakan Kemajuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
			Jumlah Tertitik yang dari Hasil Penguatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kawenthan Kabupaten Kota				0 Tertitik	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbelah, terpencil, terasing dan terdapat saling Pengkendala dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		127.132.680,00	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	-			85 %	4.752.223.790,00						-	2.930.714.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET JUMLAH PERKELOMPOK REKORSA GPD	REALISASI CAPAIAN REKORSA GPD TAHUN 2023	PROGRAM CAPAIAN TARGET REKORSA GPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARA PEMERINTAH						KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN WAKU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT SARANA PENDANGLUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KURBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pembinaan Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Tindakan Anak Terlantar Lulus Uji Terampil, serta Sasaran yang Peningkat B Luar Panti Sosial	Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Tindakan Anak Terlantar, Lulus Uji Terampil, serta Sasaran yang Peningkat B Luar Panti Sosial	-			100%	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tindakan anak terlantar yang sehat, berprestasi dan berdaya saling pengertian dan berprestasi tindakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.01.04.2.01.001 - Peningkatan Pemukiman																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Kualitas Pemukiman Sosial dengan Tindakan Di Rumah Peningkatan Kabupaten Kota				2 Orang	500	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DINAS TRADISI UMUM-DINAS ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tindakan anak terlantar yang sehat, berprestasi dan berdaya saling pengertian dan berprestasi tindakan	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.01.04.2.01.002 - Peningkatan Saling																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Tindakan yang Terlantar dalam 1 Tahun Kecamatan Kabupaten Kota				2 Orang	500	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DINAS TRADISI UMUM-DINAS ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tindakan anak terlantar yang sehat, berprestasi dan berdaya saling pengertian dan berprestasi tindakan	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.01.04.2.01.003 - Peningkatan Aktif Berisi																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN PERIODE REKAPITULASI OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN REKAPITULASI OPD TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN INDIKATOR DAN KEGIATAN POKOK						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENGANGKAT DATA PENYANGKUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	JENJUR DATA	PESERTA			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Domestik Air Jernih Peraga Sekolah melalui Kemitraan Kabupaten Kota				5 Orang	5.00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua RW Desa	DANA TRANSFER LUMBU-DAWA ALONAS 100000	---	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya tanggap Pengembanguan Masyarakat Madyan	Kabupaten Lima Puluh Kota		70.000.000.00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pemukiman Keluarga																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemukiman Keluarga Peningkatan Kabupaten Kota				5 Orang	5.00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua RW Desa	DANA TRANSFER LUMBU-DAWA ALONAS 100000	---	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya tanggap Pengembanguan Masyarakat Madyan	Kabupaten Lima Puluh Kota		70.000.000.00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.01.0005 Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Sosial																
			Jumlah Penderita Berdampingan PPK, Mental, Sosial dan Sosial Kependidikan Kabupaten Kota				70 Orang	250.000.000.00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua RW Desa	DANA TRANSFER LUMBU-DAWA ALONAS 100000	---	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya tanggap Pengembanguan Masyarakat Madyan	Kabupaten Lima Puluh Kota		112.200.000.00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.01.0006 Peningkatan Pelayanan Sosial kepada Keluarga Peningkatan Kualitas dan Kesehatan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Penyandang																

NO	KODE	URUSAN/SEKANG REKASAM/ PROGRAM/ KEJARAN/ SUB KEJARAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEJARAN/ SUB KEJARAN	TARGET AKHIR PERIODA REKASAM OPD	REALISASI CAPAIAN REKASAM OPD TAHUN 2022	PROGRAM CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERANGKAPAN PENCAPAIAN						KELOMPOK KEJARAN	PRASARANA RENCANA TAHUN 2023		PEMBANGKIT DAERAH PEMBANGKIT JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Pokok Keluarga Desa/ Kelurahan Keluarga Pengembangan Desa/ Kelurahan Terdapat Aspek Tersebut Lengkap/ Tidak Lengkap Dibandingkan Penguatan dan Masyarakat Penguatan dan Kebudayaan Kota				30 Orang	179.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan dan Kualitas Masyarakat yang sehat, berprestasi dan berkeadilan Pengembangan Masyarakat Kebudayaan	Kabupaten Lima Puluh Kota			34.400.000,00	DINAS SOSIAL	
1.36.34.2.01.1009 Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kota				1500 Orang	1.470.070.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan dan Kualitas Masyarakat yang sehat, berprestasi dan berkeadilan Pengembangan Masyarakat Kebudayaan	Kabupaten Lima Puluh Kota			30.400.000,00	DINAS SOSIAL
1.36.34.2.01.1012 Pembinaan Layanan Masyarakat																	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Kesehatan Kecamatan Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan dan Kualitas Masyarakat yang sehat, berprestasi dan berkeadilan Pengembangan Masyarakat Kebudayaan	Kabupaten Lima Puluh Kota			30.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	WISMA / BIDANG LEMBAGA / PROGRAM / KEJATAN / SUB KEJATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEJATAN / SUB KEJATAN	TARGET AKHIR PERIODIK REKREASI DPS	REALISASI CAPAIAN REMA / OPS TAHUN 2023	PRASARANA CAPAIAN TARGET KENJA OPS TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PENERANGAN						KELUARAN SARAF	PRASARANA MAJU RENCANA TAHUN 2024		PESANGKAT DAERAH PENERANGAN MAJU
							TARGET 2024	PAUJ BUKUATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PESANGKAT			TARGET	PAUJ BUKUATIF (Rp)	
											MASUKAN	DAFTAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) Lampa Bulan Korban HIV/AIDS dan NAPCA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) Lampa Bulan Korban HIV/AIDS dan NAPCA di Luar Panti Sosial	-			85 %	3.000.144.000,00			Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber	Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber yang berprestasi dari berbagai sumber	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.000.144.000,00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.02.0001		Pembinaan Beribadah Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Beribadah Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Beribadah Kabupaten Lima				4 Orang	85.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Berdasarkan Sensus Baku	DANA TRANSKORPORASI ALOKASI LUNAS	Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber	Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber yang berprestasi dari berbagai sumber	Kabupaten Lima Puluh Kota		85.480.000,00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.02.0002		Pembinaan Beribadah Sosial secara Terpadu Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) Lampa Bulan Korban HIV/AIDS dan NAPCA														
			Jumlah Peserta dalam Pembinaan Beribadah Sosial secara Terpadu Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) Lampa Bulan Korban HIV/AIDS dan NAPCA Kabupaten Kabupaten Lima				188 Orang	814.040.000,00		DANA TRANSKORPORASI ALOKASI LUNAS	Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber	Meningkatkan jumlah Dana Manusia yang berprestasi dari berbagai sumber	Kabupaten Lima Puluh Kota		814.040.000,00	DINAS SOSIAL
1.05.04.2.02.0003		Pembinaan Akut ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEKAWATAN / SUB KEKAWATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEKAWATAN / SUB KEKAWATAN	TARGET ANALIS PERSEK REKAWATAN OPD	REALISASI CAPAIAN REKAWATAN OPD TAHUN 2023	PROGRAM CAPAIAN TARGET REKAWATAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN BERKASUS PONDAMAM						KELOMPOK KAWATAN	PROGRAM BAKU REKAWATAN TAHUN 2023		PERINGKAT DAERAH PENANALISAN JAWAB	
							TARGET 2023	PROG INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUBJEK DATA	PRIORITY			TARGET	PROG INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Pendidikan Dasar Kabupaten Kota				21201 Orang	1.128.019.700,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Sembu Kawatan, Sembu ke Desa	DANA TRANSFER LURUS DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berkeadilan dan berdaya Sang	Meningkatkan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berkeadilan dan berdaya Sang Pemerintah dan Masyarakat Berkasus	Kabupaten Lima Puluh Kota		180.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeriksaan Pemeriksa Perencanaan dan Jaminan Sosial	-			85%	0,00						-	1.065.201.818,50		
	1.06.05.1.01	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pemeriksaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-			85%	0,00					Meningkatkan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berkeadilan dan berdaya Sang Pemerintah dan Masyarakat Berkasus	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.065.201.818,50	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota															
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota yang Ditata				0 Orang	0,00	-Kab. Lima Puluh Kota, Sembu Kawatan, Sembu ke Desa	DANA TRANSFER LURUS DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berkeadilan dan berdaya Sang Pemerintah dan Masyarakat Berkasus	Kabupaten Lima Puluh Kota		425.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.05.1.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGANTAN / SUB KEGANTAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGANTAN / SUB KEGANTAN	TARGET ANNUAL PERIODIC RENTAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAS OPD TAHUN 2023	PROGRAM CAPAIAN TARGET RENTAS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROGRAM MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAFTAR PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAJID INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PROG INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengiriman Paket Paket Kabupaten Kota				2 Keluarga	0,35	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Serta Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Berikutnya an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing. Penguatan Masyarakat Rantau	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.554.250,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.01.0003			Fasilitas Bantuan Sosial Masyarakat Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Adversitas/Kelurahan Kota				2 Keluarga	0,35	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Serta Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Berikutnya an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing. Penguatan Masyarakat Rantau	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.374.810,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.01.0004			Fasilitas Bantuan/Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota				2 Orang	0,35	- Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Serta Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Berikutnya an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing. Penguatan Masyarakat Rantau	Kabupaten Lima Puluh Kota		426.371.510,00	DINAS SOSIAL
1.06.06		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Persentase Kebutuhan Dasar yang Tertanggul	-			100 %	165.347.400,00						-	165.371.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEKATAN / SUB KEKATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEKATAN / SUB KEKATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN REKOR OPS TAHUN 2023	PELAKSANA CAPAIAN TARGET REKOR OPS TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGENDARAAN						KELOMPOK SARAFAN	PEMBAYARAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAN/ATAU PENYANGKUT JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.08.00.2.01		Perkembangan Sosial Kultural Berbasis Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Perkembangan Perkembangan Sosial Kultural Berbasis Alam dan Sosial Kabupaten Kota	-			85 %	385.347.400,00			Mentoring in Lingkungan Hidup. Mem- perkuat Keterampilan Berbasis Dak Pembelajaran Alam	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang etnis, terpencil luas, terampil dan berdaya saling Penguatan ngan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	385.347.280,00	DINAS SOSIAL
1.08.00.2.01.001		Perkembangan Masyarakat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Jeri - Hutan Alam Tanggap Darurat (Pengungsian) Kecamatan Kabupaten Kota				173 Orang	180.907.400,00	- Kasi: Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua RW/Desa	DANA TRANSKUPRE- SIFASI DANA ALOKASI UMUM	Mentoring in Lingkungan Hidup. Mem- perkuat Keterampilan Berbasis Dak Pembelajaran Alam	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang etnis, terpencil luas, terampil dan berdaya saling Penguatan ngan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota		180.907.400,00	DINAS SOSIAL
1.08.00.2.01.002		Perkembangan Lahan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Paksi dan Keterampilan Lahan yang Tersebar pada (Rasa Tanggap Darurat) (Pengungsian) dan Paksi dan/atau Kecamatan Kabupaten Kota				173 Orang	171.280.900,00	- Kasi: Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua RW/Desa	DANA TRANSKUPRE- SIFASI DANA ALOKASI UMUM	Mentoring in Lingkungan Hidup. Mem- perkuat Keterampilan Berbasis Dak Pembelajaran Alam	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang etnis, terpencil luas, terampil dan berdaya saling Penguatan ngan Masyarakat Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota		181.581.280,00	DINAS SOSIAL
1.08.00.2.01.003		Perkembangan Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus														

NO	KODE	URUSAN/ISUANSI/URUSAN/PROGRAM/KEGANTAN/SUB-KEGANTAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGANTAN/SUB-KEGANTAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PROGRAM CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMERCAAN PENERIMA						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK/ANALISA/RENCANA TAHUN 2023		PENANGKAT GAGAH PENANGKANG JAWAB
							TARGET 2023	PILIH INDIKATOR (PIL)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES			TARGET	PILIH INDIKATOR (PIL)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Kecamatan KabupatenKota				0 Orang	0.00	-Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab sebagai Warga Masyarakat Mandiri	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.100.000.00	DINAS SOSIAL
1.36.09.2.01.0000 Pelayanan Dukungan Poliklinik																
			Jumlah Kunjungan Berencana yang Berhasil dan Layak Dukungan Poliklinik Kecamatan KabupatenKota				0 Orang	0.00	-Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab sebagai Warga Masyarakat Mandiri	Kabupaten Lima Puluh Kota		17.000.000.00	DINAS SOSIAL
	1.36.09.2.02	Peningkatan Peningkatan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan KabupatenKota	Peningkatan Peningkatan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan KabupatenKota	-			0.00	0.00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab sebagai Warga Masyarakat Mandiri	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	136.027.285.00	DINAS SOSIAL
1.36.09.2.02.0000 Koordinasi, Sosialisasi dan Peningkatan Kemampuan Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / LURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGKA PERSEN PERIODE RENSTRA (OP)	REKAPITULASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKTIKUM CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PENGENDARA						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKUM KAPAIAN RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DASAR / PENUNJANG JANGKA
							TARGET 2023	PAU/REKAPITULASI (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAU/REKAPITULASI (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Sosialisasi dan Pelaksanaan Ramping Tiga Sempurna Kawaserta Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- K/L Lima Puluh Kota, Sempurna Kawaserta, Sempurna Kawaserta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALYKAD UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya saing Penggerak ngan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		17.244.875,00	DINAS SOSIAL
1.00.01.2.00.0002 Kawaserta, Sosialisasi dan Pelaksanaan Ramping Tiga Sempurna Kawaserta																
			Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Sosialisasi dan Pelaksanaan Ramping Tiga Sempurna Kawaserta Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- K/L Lima Puluh Kota, Sempurna Kawaserta, Sempurna Kawaserta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALYKAD UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya saing Penggerak ngan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.582.510,00	DINAS SOSIAL
3	1.00.07	PROGRAM PENGELUARAN TANAMAN BAKAR PAHLAWAN	Pemilihan Mutu Pohon yang Tertinggi dengan Baik	-			20%	0,00						-	36.210.000,00	
	1.00.07.2.01	Pendidikan Taman Noken Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Pendidikan Peningkatan Taman Noken Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	-			20%	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri dan berdaya saing Penggerak ngan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	24.210.000,00	DINAS SOSIAL
1.00.07.2.01.0001 Rehabilitasi Taman dan Peningkatan Taman Noken Pahlawan Nasional Kabupaten Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab: Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saring Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		34.210.000,00	DINAS SOSIAL
			JUMLAH					8.278.634.914,00							11.486.067.310,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

10. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIK TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	9
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	14
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU.....	 16
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS DUKCAPIL.....	16
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS DUKCAPIL....	45
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DUKCAPIL.....	57
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	60
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	76
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	 77
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	77
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS DUKCAPIL.....	79
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	80
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	 101

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	4
TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Lima Puluh Kota	18
TABEL 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	46
TABEL 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	62
TABEL 2.5	Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	76
TABEL 3.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86
TABEL 3.3.2	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84
TABEL 3.3.3	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Kabupaten Lima Puluh Kota	87

TABEL 4.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023	103
------------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Renstra OPD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan program dan kegiatan pada Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026.

Adapun tahapan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- I. Persiapan penyusunan;
- II. Penyusunan rancangan awal;
- III. Penyusunan rancangan;
- IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan rancangan akhir;
- VI. Penetapan.

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, direncanakan selesai minggu pertama bulan Juli 2023. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja DPMDN Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																														
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																			
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																			
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																			
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																			
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																			
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi																																			

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Dinas Kependudukan dan																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Pencatatan Sipil.																																

III. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

2024 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu keempat bulan Juli 2023.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun berdasarkan kesepakatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. yang dihadiri oleh 40 Perangkat Daerah.

V. Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan Renja PD merupakan tahap akhir dalam penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Seperti halnya RKPD 2024, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-2 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2021-2026. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pereencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
38. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 37);
39. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Inovasi Jembatan Pelayanan Online Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan**, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, analisis kinerja pelayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu penting penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, yang memuat rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi di atas, pada Bab ini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023
(Tahun Berjalan) Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100,00	100 %	50 %	50%
		01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	90 %	100%	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50
01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	50
01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50
01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	50
01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	84 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Dokumen	42 Dokumen	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	50 %	50 %
01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 31 orang (14 bulan), Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (12 bulan)	84 bulan	14 bulan	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	14 bulan 1 tahun	50
01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50
01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	50
01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	50 %
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	26 %	26 %
		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas yang dibutuhkan	518 stel	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	4 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	6 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	130 orang	13 orang	-	-	-	-	13 Orang	10
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	50%	50%
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	7 paket	9 paket	75
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 unit	5 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	15 paket	50
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor		-	2 paket	2 paket	100,00	2 paket	2 paket	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	-	-		3 paket	5 Jenis 3 paket	50
						Jumlah Penggandaan yang disediakan	5000 lembar	5000 lembar	-	-	-	-	5000 lembar	50
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	7200 Eksemplar	1200 Eksemplar	-	-	-	1200 Eksemplar	1200 Eksemplar	17
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	600 Porsi 222 Porsi 1.200 Porsi	100 Porsi 37 Porsi 300 Porsi	1 paket	1 paket	100	12 laporan	100 Porsi 37 Porsi 300 Porsi 1 paket 12 laporan	50
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	120 lapotran	33 laporan	36 laporan	36 laporan	100	20 laporan	89 laporan	74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	17%	17%
01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional	8 unit	0	0	0	0	0	0	0
01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebeleur kantor	4	0 0	0	0	0,00	0	0	0
01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor	18 unit	3 unit	-	-	-	-	3 unit	17
01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	67%	67%
01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku dan Materai yang dibayarkan	Cek (6 buku), materai 10.000 (1.200 lembar)	Cek (1 buku), materai 10.000 (200 lembar)	Cek (3 buku), materai 10.000 (100 lembar)	Cek (3 buku), materai 10.000 (100 lembar)	100	3 laporan	Cek (4 buku), materai 10.000 (300 lembar) 3 laporan	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 laporan	24 Bulan 12 laporan	33
	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 laporan	24 Bulan 12 laporan	33
	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	50 %	50 %
	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 bulan	19 Unit	19 Unit	100	18 Unit	56 Unit	50 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	12 bulan	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100	18 Unit	56 Unit	50 %
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laiinya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 tahun	1		1	100	1	3	50
		01	2.09	09	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	6 paket	3 paket	-	-	-	-	3 paket	50
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PEMDUDUK	- Persentase Penerbitan Dokumen KK - Persentase Penerbitan Dokumen KTP-el - Persentase Penerbitan Dokumen KIA - Persentase Penerbitan Dokumen	98 %	80 %	92 %	100 %	109 %	90 %	90 %	92 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						SKPWNI								
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen KK - Persentase Penerbitan Dokumen KTP-el - Persentase Penerbitan Dokumen KIA - Persentase Penerbitan Dokumen SKPWNI	98 %	80 %	92 %	100 %	109 %	90 %	90 %	92 %
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Penggantian Dokumen yang Hilang dan Rusak	90 %							
						2. Jumlah Laporan Mutasi Penduduk	96		85 %	86 %	101 %	86 %	86 %	95
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk	1. Jumlah KK yang diterbitkan	96 %	95 %		98.11 %	103.27	95 %	97.18 %	101.23 %
						2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	96 %	95 %		98.11 %	103.27	95 %	97.18 %	101.23 %
						3. Jumlah Penerbitan KIA	65%	40%		30%	75 %	50 %	40 %	61.15 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2	12	02	2.02			4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	22.600	3.300	3.500	3.018	86 %	3.700	10.018	44
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen KK, SKPWNI yang diterbitkan								
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Ke irtas A4 80 gr untuk Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain KTP-el dan KIA	96 %	-	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	98 %							
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah KK yang diterbitkan	96 %							
						2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	96 %							
						3. Jumlah Penerbitan KIA	65%							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	22.600	2745		1890	57.73	3.500	8135	36
	12	03			Program Pencatatan Sipil	- Persentase Penerbitan Akta Kelahiran - Persentase Penerbitan Akta Perkawinan - Persentase Penerbitan Akta Kematian - Persentase Penetapan Itsbat Nikah	96	90		84,40	90	93,77	91.50	95.31
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	96	90	91	100	110	92	94	98
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran	45.000 dokumen	7.500 dokumen	7.500 dokumen	10.352 dokumen	138 %	7.500	25.352	57 %
						Jumlah Penerbitan akta kematian	1.630 dokumen	175 dokumen	200 dokumen	1.727 dokumen	863,5 %	250 dokumen	2.152 dokumen	132 %
						Jumlah Penerbitan akta perkawinan dan perceraian	48 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	11 dokumen	125 %	8 dokumen	27 dokumen	56 %
2	12	03	2.02	2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	- Persentase Penetapan Itsbat Nikah - Persentase Penerbitan Akta Kematian	1.700 Pasutri			200 pasutri	100 %	250 Pasutri	716	42,12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah peserta itsbat nikah yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran yang semula statusnya anak seorang ibu) yang berubah akibat terbitnya buku nikah (itsbat nikah)	1.700 Pasutri	200 Pasutri	-	-	-	-	200 pasutri	12 %
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase target nasional Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2. Jumlah peserta sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	95 %	95 %	-	-	-	-	95 %	100
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Jumlah penerbitan Akta Kematian	1.630 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
					Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan langsung ke jorong, Nagari, Kecamatan (sistem jemput bola)	675	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	2. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	48	-	-	-	-	-	-	-
						3. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	1.630 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Rasio Buku Agregat Kependudukan - Persentase Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	90	90	90	100	111	90	93	103
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	- Rasio Buku Agregat Kependudukan - Persentase Perjanjian Kerjasama dengan OPD/lembaga pengguna	90	90	90	100	111	90	93	103
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1. Terlaksananya pengelolaan database kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						2. Tersedianya buku data agregat per semester	90 buku agregat	15 buku agregat	15 buku agregat	15 buku agregat	100	2 buku agregat	32 buku agregat	35 %
						3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	100 %	-	1 paket	1 paket	100	-	1 paket	
						4. Tersedianya laporan Kependudukan	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	-	12 laporan	17 %
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Lembaga/OPD Pengguna	110 PKS	15 PKS	13 PKS	13 PKS	100	13 PKS	41 PKS	37 %
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-Persentase fasilitasi jaringan SIAK di nagari dan kecamatan - Persentase Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan - Persentase sosialisasi	98	90		99,55	101	92	97,18	99,16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						tentang aplikasi SIAK ke operator dan perangkat nagari serta sosialisasi dokumen kependudukan kepada masyarakat								
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Terfasilitasinya sistem, jaringan dan peralatan melalui SIAK	98	90		99,55	111	90	96,38	98,35
						2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	98	90		99,55	111	90	96,38	98,35
						3. Tersedianya sarana dan prasarana PIAK	98	90		99,55	111	90	96,38	98,35
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD/Lembaga Pengguna	107	13		13	100	13	39	35,45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang database kependudukan	474	79		79	100	79	158	33,33
						2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	474	79		79	100	79	158	33,33
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi dan pemeliharaan jaringan SIAK di nagari dan kecamatan	90 %	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah pembinaan dan pengawasan di kecamatan	90 %	-	-	-	-	-	-	-
						2. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Propinsi	90 %	-	-	-	-	-	-	-
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	- Persentase Buku Profil Kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	- Persentase Buku Profil Kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	6 buku Profil	1 buku profil	1 buku profil	1 buku	100	8 dokumen	3 buku profil 8 dokumen	50 %

Payakumbuh, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota

Ir. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2 003

2.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan OPD utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Untuk tahun 2022 tidak ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil, semua Sub Kegiatan bisa memenuhi target yang di rencanakan.

2.1.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.716.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.618.800,- atau 99,09 % dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.712.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.711.900,- atau (99,99 %) dengan

realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.712.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.712.800,- atau (100%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.866.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.657.700,- atau (98,76%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.319.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.173.500,- atau (99,10%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.558.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.400.100,- atau (99,23%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun (LKjIP, EKPPD, LKPJ, LPPD, RKT, Reksi, PK dan Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja

yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD) dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.861.669.681,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.733.823.082,- atau (95,53%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dan jumlah non ASN yang mendapatkan iuran jaminan/asuransi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.497.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.348.800,- atau (95,76%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
3. Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.375.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.359.400,- atau (99,86%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tanggapan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.447.700,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.394.450,- atau (99,57%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.611.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.582.000,- atau (99,37%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.412.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.092.900,- atau (93,51%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
3. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.698.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.695.700 atau (99,95%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 8.737.000,- atau (99,85%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah

Jumlah tamu yang dilayani dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.144.000,- atau (99,99 %) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.630.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.560.000,- atau (95,71%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah buku cek dan materai yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.920.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.034.186,- atau (95,93%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan dan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.415.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.395.000,- atau (99,99%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan

ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.666.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.119.880,- atau (90,02%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan roda dua yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya, Jumlah kendaraan roda empat yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya dan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.130.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.501.000,- atau (88,12%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala komputer/ laptop (9 unit), AC, printer (6 unit), running text, mesin antrian dengan capaian kinerja berupa Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan

2. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 289.963.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.898.200,- atau (99,98%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah KK yang diterbitkan,

Jumlah KTP-el yang diterbitkan dan Jumlah Penerbitan KIA dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.283.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 193.268.112,- atau (99,99%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran, Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

1. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.870.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 378.060.650,- atau (98,49%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengelolaan database kependudukan, tersedianya buku data agregat, terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat dengan capaian kinerja berupa Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.459.600,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 98.228.000,- atau (9976%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan

1.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan OPD utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Untuk tahun 2022 semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melebihi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan antara lain adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini diperlukan sebagai syarat dalam pengurusan dokumen lainnya seperti BPJS, Perbankan dan lain-lain.
2. Mudahnya pengurusan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil karena adanya aplikasi SMARTDUKCAPIL yang merupakan aplikasi untuk pelayanan Online dalam membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Dinas Dukcapil.

3. Adanya pelayanan langsung ke Nagari – Nagari dan Sekolah-Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh berupa pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el bagi wajib KTP Pemula.
4. Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan nagari.
5. Melakukan pelayanan langsung untuk penduduk disabilitas, lanjut usia dan penduduk sakit.
6. Bekerjasama dengan Klinik Bersalin, Kader Posyandu di nagari untuk mengumpulkan bahan penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, Akte Kelahiran dan KIA).
7. Adanya Inovasi – inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, implikasi yang timbul adalah tewujudnya administrasi kependudukan yang tertata, akuntabel dan professional melalui pelayanan prima.

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Perlunya pengadaan peralatan perekaman untuk pelayanan keliling jemput bola
2. Meningkatkan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (leaflet, banner dan iklan di media elektronik lainnya)
3. Memberikan Reward dan insentif kepada Nagari dan operator yang tingkat pencapaian pelayanan administrasi kependudukan baik.

4. Telah adanya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 pada akhir tahun 2021

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), standar pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyelenggarakan pemerintahan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 telah menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Termanfaatkannya Data Kependudukan, dengan menitik beratkan kepada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ada dalam RPJMD.

Adapun capaian Indikator Kinerja pelayanan yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2023, serta proyeksi capaian kinerja pelayanan tahun 2023 dan 2024 dapat terlihat dalam **table 2.2.1 sebagai berikut** :

Tabel 2.2.1**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan**

Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	IKU Kepala Daerah	IKD	Iku Kepala Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)		(14)
1.	1. Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk		V	V		98.55 %	98.60 %	98.65 %	97,48 %	98.55 %	98.60 %	98.65 %	Melebihi target karena adanya program jemput bola perekaman KTP-el ke Nagari-nagari sampai Jorong
	2. Persentase anak berakta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		V	V		95 %	95 %	95 %	95%	95 %	95 %	95 %	Target Tidak Tercapai karena tingginya target nasional dan kurangnya kesadaran masyarakat
	3. Ketersediaan		V	V		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	

NO	Indikator	IKU Kepala Daerah	IKD	Iku Kepala Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	database kependuduk an skala provinsi										%		
	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		V	V		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		V	V		98.55 %	98.60 %	98.65 %	97,48 %	97,48%	98.60 %	98.65 %	Melebihi target karena adanya program jemput bola perekaman KTP-el ke Nagari- nagari sampai Jorong
	6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		V	V		43.2 %	43.3 %	43.4 %	46.08 %	95%	43.3 %	43.4 %	Melebihi Target karena adanya Program Jemput Bola dan Adanya PKS

NO	Indikator	IKU Kepala Daerah	IKD	Iku Kepala Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	7. Perekaman KTP Elektronik		V	V		98.85 %	99 %	99.20 %	97,48 %	98.85 %	99 %	99.20 %	
	8. Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA		V	V		35 %	40 %	45 %	44,59 %	35 %	40 %	45 %	Melebihi Target karena adanya kerjasama dengan pihak sekolah, klinik bersalin dan kader-kader posyandu untuk penerbitan KIA
	9. Kepemilikan akta kelahiran		V	V	7500	7500	7500	7500	10.352	7500	7500	7500	Melebihi Target karena adanya Program Jemput Bola dan Adanya PKS
2.	10. Nilai AKIP	V		V	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	11. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	V		V	53.33 (CC)	58.75 (CC)	64.17 (CC)	69,58 (B)		58.75 (CC)	64.17 CC)	69,58 (B)	

NO	Indikator	IKU Kepala Daerah	IKD	Iku Kepala Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	V		V	87.98	89.97	91.97	93,96	98,34	89.97	91.97	93,96	

Berdasarkan table 2.2.1. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh sebagai berikut :

1. Indikator 1 : Persentase penduduk ber- KTP persatuan penduduk

Sesuai dengan target nasional sebesar 97,5%, dari target yang direncanakan terealisasi 98,55%, tidak mencapai target ini disebabkan karena tingginya target nasional yang ditetapkan serta kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan KTP-el.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tahun 2022 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Adanya beberapa inovasi seperti : “**Kadang Dia Tamu**“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun. Dimana Dinas Kependudukan melakukan kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah dan nagari-nagari yang penduduknya berulang tahun yang ke 17 tahun.
- Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

2. Indikator 2 : Persentase anak berakta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja sebesar 95% Akta Kelahiran, terealisasi sebanyak 95%, tercapainya target karena :

1. Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan.

2. Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
 3. Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
 4. Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
 5. Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
 6. Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.
3. Indikator 3 : Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
- Target dan Realisasi ketersediaan database kependudukan skala provinsi sama-sama 100% karena dengan penerapan sistim SIAK maka akan tersedia database kependudukan skala Nasional, Provinsi dan Kab/Kota
4. Indikator 4 : Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- Target dan Realisasi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sama-sama 100% karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan personalisasi/pencetakan di daerah untuk KTP Elektronik berbasis NIK sejak tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
5. Indikator 5 : Cakupan penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Proyeksi target kinerja direncanakan sebanyak 98,55% KTP-el terealisasi sebanyak 97,5% yang diterbitkan, Tidak mencapai target karena tingginya target nasional yang ditetapkan serta kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan KTP-el.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tahun 2022 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
- Adanya Inovasi “ Solmed” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan di kantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil
- Adanya Inovasi “Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan secara online di nagari.
- Adanya Inovasi “Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

Faktor-faktor yang yang menghambat Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- 2) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil

6. Indikator 6 : Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran melebihi target dimana targetnya 43.20 % sedangkan Realisasi nya 95 %, sehingga capaian nya 220%, melebihi target ini terjadi karena :

1. Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota
2. Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda, puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya
3. Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (<http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id>)
4. Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah.
5. Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
6. Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
7. Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

7. Indikator 7 : Perekaman KTP Elektronik

1. Sesuai dengan target nasional sebesar 98,55%, dari target yang direncanakan terealisasi 97,5%, tidak mencapai target disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el, dan di tahun 2021 masyarakat telah banyak melakukan perekaman KTP-el.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu telah dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke Nagari sampai Jorong serta door to door bagi penyandang

cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.

8. Indikator 8 : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA.

Persentase Kepemilikan KIA yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 35 % KIA (anak yang berusia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari) yang telah diterbitkan tercapai target yaitu sebanyak 44,59 % hal ini melebihi dari target yang ditetapkan karena :

1. Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak
2. Adanya program jemput bola ke sekolah-sekolah SD dan SMP untuk penerbitan KIA untuk anak.
3. Adanya Inovasi terkait kepemilikan KIA seperti: **“Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari, baik pelayanan di kantor / sekolah dasar / tk / paud dilingkungan Kab. Lima Puluh Kota

Faktor-faktor yang menghambat Kepemilikan KIA adalah:

- 1) Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA).

9. Indikator 9 : Kepemilikan akta kelahiran.

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran melebihi target dimana targetnya 7.500 sedangkan Realisasi nya 10.352 sehingga capaian nya 138,03 %, melebihi target ini terjadi karena :

1. Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota
2. Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda,

puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya

3. Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (<http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id>)
4. Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah
5. Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

10. Indikator 10 : Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari B (2021) menjadi BB (2022) artinya nilai AKIP meningkat dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Adanya Beberapa Inovasi dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Program layanan Jemput Bola ke nagari-nagari dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Indikator 11 : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat. Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2021 36,30, Indeks IRB di Tahun 2022 belum keluar hasil evaluasinya dari Inspektorat.

- b. Indikator 12 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), proyeksi di tahun 2022 targetnya sebesar 87,98, realisasinya di tahun 2022 sebesar 98,34, Nilai IKM ini perhitungannya berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil tidak lebih dari 1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DUKCAPIL

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sangat baik, dimana terlaksananya pelayanan dalam bidang kependudukan kepada masyarakat, untuk Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk sebesar 97,48%, persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 Tahun) sebesar 95%, persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 97,48%, persentase cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 95%, Persentase Perekaman KTP-el sebesar 97,48%, Persentase capaian cakupan penerbitan KTP-el sebesar 97,48%, persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA sebesar 44,59%, persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 10.352 dokumen, Nilai AKIP BB, dan dan persentase capaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 98,34.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. Masih kurangnya kemampuan teknis dan SDM terutama dalam teknologi informasi;
3. Belum cukupnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Belum tersedianya gedung kantor yang representative,

khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

5. Rendahnya anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, Seperti SPM Dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi Kepala Daerah yaitu “ Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil “

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

MATRIKS SWOT

<div style="text-align: center;"> <p>EFAS</p> <p>IFAS</p> </div>	<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya undang-undang No.24 th 2013 ttg perubahan atas UU No. 23 th 2006 ttg adm. Kependudukan - Kerjasama dengan perangkat nagari yang berjalan baik - Dukungan dari instansi berwenang lainnya - Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Perkembangan teknologi dan informasi 	<p><u>Tantangan (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dokumen kependudukan
<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kewenangan sesuai dengan 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendayagunakan peraturan 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan

<p>Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan - Adanya komitmen Pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional - Tersedianya anggaran APBD - Adanya sarana dan prasarana yang memadai 	<p>perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional - Meningkatkan sistem teknologi informasi 	<p>profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional
<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. - Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan - Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. - Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Catatan : *IFAS* = *Internal Strategic Factors Analysis Summary*

EFAS = *External Strategic Factors Analysis Summary*

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAM) merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Penerapan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu program dan strategi Pemerintah secara nasional untuk penertiban administrasi kependudukan.
3. Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya pengurusan akta pencatatan sipil yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar kedua lembaga tersebut dapat berkoordinasi dengan baik.

1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu diatur kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang,

sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Maka dari hasil analisa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 agar terwujud efesiensi dan optimalisasi dalam anggaran belanja daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan dilakukan pengurangan anggarannya untuk belanja daerah di tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap pagu indikatif hasil analisa kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada ***Tabel 2.4. di bawah ini :***

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		3	5	6						8
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				10.298.446.353	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				4.210.887.742	
x	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disduk capil	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah		8.820.826.353	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disduk capil	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah		4.209.331.682	
x	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		434.748.063	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	0	0	
x	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disduk capil	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2	68.431.771	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disduk capil	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	
x	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Disduk capil	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	155.483.296	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Disduk capil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0 dokumen	0	

								Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
x	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disduk capil	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran RKA yang disusun	2	28.449.488	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disduk capil	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dokumen	0	
x	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Disduk capil	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	29.099.510	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Disduk capil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0	
x	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disduk capil	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran DPA yang disusun	2	21.918.851	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disduk capil	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	0	
x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disduk capil	Jumlah dokumen LKjIP, LKPPD yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD	14	55.982.648	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disduk capil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	0	
x	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Disduk capil	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	13	75.382.500	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Disduk capil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	

x	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase tertib administrasi keuangan		5.362.426.012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	2.648.407.882	
x	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disduk capil	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 31 orang (14 bulan), Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (12 bulan)		5.362.426.012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disduk capil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 35 orang/bulan	2.648.407.882	
x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disduk capil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	14	5.309.195.387	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disduk capil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	0	
x	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Disduk capil	Tanggapan pemeriksaan	1	22.813.125	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 laporan	0	
x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disduk capil	Jumlah laporan keuangan semesteran	1	15.208.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disduk capil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 laporan	0	
x	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		11.265.121	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90%	0	

x	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disduk capil	Tertatanya dan terpeliharanya barang milik daerah	1	11.265.121	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disduk capil	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	
x	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		123.019.755	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		0	
x	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disduk capil	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	92	46.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disduk capil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
x	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disduk capil	Terkirimnya peserta diklat administrasi kependudukan (Admin, Bidang Capil, Bidang Dafduk, Bidang PIAK, Bidang Pemanfaatan Data)	3	26.317.750	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disduk capil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	
x	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disduk capil	Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	130	24.516.505	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disduk capil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	- 0	
x	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disduk capil	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan	1,00	26.185.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disduk capil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	- 0	
x	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disduk capil	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		1.828.912.546	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disduk capil	Jumlah peningkatan Administrasi Umum		981.853.100	
x	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disduk capil	1. Pengadaan blanko KIA 2. Pengadaan ribbon, fargo film dan cleaning	20.000 150, 50, 10 1	1.468.056.664	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disduk capil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.702.000,00	

			kit 3. Pengadaan alat rekam KTP								
x	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disduk capil	Laptop perencanaan (1 unit)	Laptop perencanaan (1 unit)	30.417.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disduk capil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	110.018.400,00	
x						Penyediaan bahan logistik kantor	Disduk capil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 paket	0	
x	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disduk capil	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	9.725.387	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Jumlah barang cetakan yang disediakan	12 Paket	2.908.700	
x	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disduk capil	Koran (1200 Eksemplar)	1200	7.117.695	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	
x	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disduk capil	Makan siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack / minum (300 porsi)	Makan 100, Sarapan 37, Snack 300	9.110.041	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disduk capil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.625.000,00	
x	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disduk capil	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi, Fasilitasi konsumsi rapat	20	304.485.259	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disduk capil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	57.843.000	
x	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disduk capil	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai			Pengadaan Barang Milik Daerah	Disduk capil	Persentase ketersediaan barang milik		0	

	Pemerintah Daerah		dengan perencanaan		384.014.728	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		daerah sesuai dengan perencanaan			
x	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Disduk capil	Kendaraan dinas roda 4, Kendaraan dinas roda 2	3	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Disduk capil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
x	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disduk capil	Komputer, Laptop perencanaan	3	309.014.728	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disduk capil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
x	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disduk capil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	380.810.924	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disduk capil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		191.680.000	
x	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disduk capil	Buku cek , materai 10.000	Cek (1 buku), materai 10.000 (200 lembar)	1.992.346	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	700.000	
x	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disduk capil	Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	12	103.754.093	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.980.000,00	
x	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disduk capil	Pembayaran jasa kantor (THL 4 orang, PTT 2 orang, tenaga kebersihan 2 orang, tenaga supir 1 orang)	12	275.064.485	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.000.000,00	
x	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Disduk capil	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	90%	295.629.203	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Disduk capil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang		137.481.000,00	

	Daerah					Urusan Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintah Daerah			
x	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disduk capil	Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5 unit) & roda 2 (15 unit), BBM / oli, pajak	12	233.531.877	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disduk capil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	131.301.000	
x	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disduk capil	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala komputer/ laptop (9 unit), AC, printer (6 unit), running text, mesin antrian	1	14.950.201	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disduk capil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.180.000	
x	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disduk capil	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1	47.147.125	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disduk capil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0,00	
x	Program Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	94%	741.950.000	Program Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	94%	580.602.100	
x	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		370.975.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		337.654.900	
x	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	1. Jumlah Penggantian Dokumen yang Hilang dan Rusak	90	185.487.500	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1750 dokumen	312.988.000	

			2. Jumlah Laporan Mutasi Penduduk	90							
x	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	1. Jumlah KK yang diterbitkan	96	185.487.500	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0 Orang	0,00	
			2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	98							
			3. Jumlah Penerbitan KIA	60							
			4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	3900							
x	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		185.487.500	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0	
x	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Disduk capil	1. Pengadaan Kertas A4 80 gr untuk Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain KTP-el dan KIA,,	96	185.487.500	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 dokumen	0	
x	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		185.487.500	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	0	
x	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	Disduk capil	1. Jumlah KK yang diterbitkan	99	185.487.500	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Disduk capil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	0 dokumen	0	
			2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	98							
			3. Jumlah Penerbitan KIA	60							

	Penduduk		4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	3900		Pendaftaran Penduduk		Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
			2. Jumlah dokumen penduduk non permanen	96							
x	Program Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	93%	274.780.000	Program Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	93%	487.015.700	
x					283.027.500	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		139.583.000	
x						Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disduk capil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2550 dokumen	139.583.000	
x	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		274.780.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		45.996.700	
x	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disduk capil	Jumlah peserta itsbat nikah yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran yang semula statusnya anak seorang ibu) yang berubah akibat terbitnya buku nikah (itsbat nikah)	300 pasutri	64.000.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	6 Laporan	45.996.700	

x	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Disduk capil	Persentase target nasional Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95	65.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	
x	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Disduk capil	Kualitas/ jumlah Pelayanan langsung ke jorong, Nagari, Kecamatan (sistem jemput bola)	125,00	67.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0 laporan	0	
x	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Disduk capil	1. Persentase target nasional Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun. 2. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	7500 8 325	78.780.000						
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disduk capil			200.000.000	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	0 Laporan	0	
						Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipi	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000	

x	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95%	409.650.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95%	269.707.500	
x	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	95 %	139.650.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		269.707.500	
x	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disduk capil	1. Terlaksananya pengelolaan database kependudukan 2. Tersedianya buku data agregat per semester 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat 4. Tersedianya laporan keuangan	100 15 100 2	81.650.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	50 dokumen	269.707.500	
x	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Lembaga/OPD Pengguna	19 kerjasama	58.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0 dokumen	0	

x	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		215.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	
x	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	1. Terasilitasinya sistem, jaringan dan peralatan melalui SIAK	90 %	72.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	
			2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	90 %							
			3. Tersedianya sarana dan prasarana PIAK	90 %							
x	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disduk capil	Tersedianya Pemanfaatan Data Kependudukan olen instansi/Lembaga Pengguna	19 kerjasama	62.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 dokumen	0	
x	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	1. Meningkatnya pemahaman terkait PIAK	79 nagari	81.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	
			2. Terbangunnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan	79 nagari							
			3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	79 nagari							

x	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		55.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	
x	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	1. Terkontrolnya sistem, jaringan dan peralatan perekaman	90	55.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk capil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0	
			2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	90							
x	Program Pengelolan Profil Kependudukan	Disduk capil	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	51.240.000	Program Pengelolan Profil Kependudukan	Disduk capil	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	88.390.500,0	
x	Penyusunan Profil Kependudukan	Disduk capil	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan		51.240.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Disduk capil	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	88.390.500,0	

x	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disduk capil	Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	1	51.240.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disduk capil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	8 dokumen	88.390.500,00	
	JUMLAH				10.298.446.353					4.210.887.742	

Payakumbuh, Maret 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2 003**

4.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Tabel 2.5.

**Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	N I H I L				
2					
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah **“Tertib Administrasi Kependudukan”** . Hal ini didasari dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Berpedoman kepada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “semua anak indonesia tercatat kelahirannya”
5. Integrasi Data Kependudukan
6. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2024 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata
3. Memangkas Program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat, RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas database kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran pencatatan penduduk dan pencatatan sipil
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
6. Meningkatkan penataan dokumen kependudukan
7. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

3.2.2. Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas database kependudukan yang lengkap dan benar dan akurat serta akuntabel
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan data berbasis SIAK
3. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang transparan dan terukur
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
5. Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan validitas data base
6. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penetapan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri No.050-5889 Tahun 2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO .	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

		<p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6 Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan</p> <p>2 Pengadaan Mebel</p> <p>3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
		<p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>	<p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p>

		Daerah	Lainnya 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--------	---

Tabel 3.3.2

**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pendaftaran Penduduk	1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2	Program Pencatatan Sipil	3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1. Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 2 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan dafduk 1 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting 1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan

		3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<p>Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam</p> <p>2 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>3 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</p> <p>1 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</p>
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p> <p>2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p>1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</p> <p>2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1 Pembinaan dan Pengawasan</p>

4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<p>3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1. Penyusunan Profil Kependudukan</p>	<p>terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</p>
---	---	---	---

Selanjutnya analisa dan identifikasi permasalahan terhadap capaian kinerja dijelaskan pada ***Tabel 3.3.3 berikut ini :***

Tabel 3.3.3
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian kinerja tahun 2020)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara aan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Tidak mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas - Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dlaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. - Adanya beberapa inovasi seperti : “Kadang Dia Tamu” (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan Inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun. Dimana Dinas Kependudukan melakukan

				<p>kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah dan nagari-nagari yang penduduknya berulang tahun yang ke 17 tahun.</p> <p>- Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.</p> <p>-</p>
2	Persentase anak berakta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan	Melampaui target	<p>- Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran</p> <p>- Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong</p>	<p>- Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan.</p> <p>- Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong</p> <p>- Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola</p> <p>- Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan</p> <p>- Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit</p> <p>- Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.</p>
3	Ketersediaan database kependuduka	Mencapai target	- Sering terganggunya jaringan SIAK	Target dan Realisasi ketersediaan database kependudukan skala provinsi sama-sama 100% karena

	n skala provinsi		dengan server Pemerintah Pusat	dengan penerapan sistim SIAK maka akan tersedia database kependudukan skala Nasional, Provinsi dan Kab/Kota
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Mencapai target	-	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK)
5	Cakupan penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP	Belum tercapai target	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas - Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan - 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong. - Adanya Inovasi “ Solmed” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil - Adanya Inovasi “Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen

				<p>kependudukan secara online di nagari.</p> <p>- Adanya Inovasi “Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.</p>
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Melebihi Target	<p>- Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran</p> <p>- Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong</p>	<p>- Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota</p> <p>- Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi 7 antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda, puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya</p> <p>- Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id)</p> <p>- Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan</p>

				<p>suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan - Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong - Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran
7	Perekaman KTP Elektronik	Tidak mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas - Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke Nagari sampai Jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong. - Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	Melebihi Target	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA - Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA 	<ul style="list-style-type: none"> - Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak - Adanya program jemput bola ke sekolah-sekolah SD dan SMP untuk penerbitan KIA utuk anak. - Adanya Inovasi terkait kepemilikan KIA seperti: "Aksi Kiat" (Akte Siap Kartu Identitas

			(Printer KIA).	Anak Dapat) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Indentitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari, baik pelayanan dikantor / sekolah dasar
9	Kepemilikan akta kelahiran	Melebihi Target	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran - Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota - Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda, puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya - Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id) - Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah - Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

				-
10	Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melebihi target	-Sebagian target kinerja dalam perencanaan anggaran tidak terukur dengan baik	- Telah sinkronnya dokumen perencanaan dengan anggaran - Telah memiliki dokumen Renstra, IKU dan PK
11	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Belum ada penilaian	-	-
12	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melebihi target	- Belum dapat terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat secara digital karena tidak tersedianya sarana dan prasarana	- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil tidak lebih dari 1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari

Berdasarkan tabel 3.3.3 diatas, dapat dilihat identifikasi permasalahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk
Permasalahan Permasalahan :

- Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi

penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Adanya beberapa inovasi seperti : “**Kadang Dia Tamu**“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan Inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun. Dimana Dinas Kependudukan melakukan kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah dan nagari-nagari yang penduduknya berulang tahun yang ke 17 tahun.
- Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

2. Persentase anak berakta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran
- Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong.

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan.
- Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
- Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit

3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi.

Permasalahan :

- Sering terganggunya jaringan SIAK dengan server Pemerintah Pusat.

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Target dan Realisasi ketersediaan database kependudukan skala provinsi sama-sama 100% karena dengan penerapan sistim SIAK maka akan tersedia database kependudukan skala Nasional, Provinsi dan Kab/Kota

4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Permasalahan :

- Sering terganggunya jaringan SIAK dengan server Pemerintah Pusat.

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK) Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun

5. Cakupan penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP)

Permasalahan :

- Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
- Adanya Inovasi “ Solmed” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana

satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil

- Adanya Inovasi “Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan secara online di nagari.
- Adanya Inovasi “Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.

6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran
- Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota
- Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi 7antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda, puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya
- Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (<http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id>)
- Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah.

- Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran

7. Perekaman KTP Elektronik

Permasalahan :

- Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke Nagari sampai Jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
- Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA

Permasalahan :

- Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA).

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak
- Adanya program jemput bola ke sekolah-sekolah SD dan SMP untuk penerbitan KIA untuk anak.
- Adanya Inovasi terkait kepemilikan KIA seperti: **“Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari

yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari,
baik pelayanan dikantor / sekolah dasar

9. Kepemilikan akta kelahiran

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran
- Tidak terlaksananya sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Adanya pelayanan jemput bola ke nagari-nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota
- Melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan dlm hal ini adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi antara lain, Rumah bersalin Annisa, rumah bersalin Sukma Bunda, puskesmas-puskesmas di Kab. Lima puluh Kota, dinas sosial dan sebagainya
- Pelayanan secara digital (online) dimana sekarang ini sudah bisa diakses melalui aplikasi web (<http://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id>)
- Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yg tidak memiliki surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yg ortunya tidak memiliki buku nikah
- Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

10. Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan :

- Sebagian target kinerja dalam perencanaan anggaran tidak terukur dengan baik

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Telah sinkronnya dokumen perencanaan dengan anggaran
- Telah memiliki dokumen Renstra, IKU dan PK

11. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Permasalahan :

Belum ada penilaian dari inspektorat

12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Permasalahan :

- Belum dapat terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat secara digital karena tidak tersedianya sarana dan prasarana

Faktor-faktor penentu keberhasilan :

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil tidak lebih dari 1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri No.050-5889 Tahun 2021.

Program dan kegiatan tersebut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Penataan Pendaftaran Penduduk
- 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 1) Penyusunan Profil Kependudukan

TABEL 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan,
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket .
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4.210.887.742	11.197.379.962	12	4.558.168.722	11.197.379.962	
	TOTAL	5	4.210.887.742	11.197.379.962	12	4.210.887.742	11.197.379.962	

Rencana kebutuhan anggaran untuk tahun 2024 pada Disdukcapil terdapat 1 urusan dengan 5 program dan 12 kegiatan dengan total pagu tahun 2024 Rp. 4.210.887.742,- dan proyeksi kenaikan 62.4% untuk tahun 2025 sebesar Rp. 11.197.379.962,-

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.210.887.742,00							11.197.379.962,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.209.331.682,00							11.061.979.962,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.209.331.682,00							11.061.979.962,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-				3.152.665.982,00						-	7.965.836.707,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-				0,00			-	-	-	-	119.193.532,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.230.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Bulan 35 orang/bu Orang/bulan	2.648.407.882,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.997.643.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	242.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		77.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	-				175.097.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.152.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1.702.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	110.018.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		850.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	2.908.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	57.843.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		260.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	595.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				191.680.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	431.099.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3 Laporan	700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	82.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	108.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.099.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-				137.481.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	347.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	131.301.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		225.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	6.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			94 %	312.988.000,00						-	1.015.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				312.988.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	665.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1750 Dokumen	312.988.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	-			93 %	385.579.700,00						-	808.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	139.583.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				2550 Dokumen	139.583.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	-				45.996.700,00			-	-	-	-	268.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam</i>				6 Laporan	45.996.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-			95 %	269.707.500,00						-	1.061.745.425,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	-				269.707.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	312.749.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>				50 Dokumen	269.707.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		92.749.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	418.995.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.995.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	-			100 %	88.390.500,00						-	211.397.830,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	-				88.390.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	211.397.830,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				8 Dokumen	88.390.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		211.397.830,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	NON URUSAN						1.556.060,00							135.400.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.556.060,00							135.400.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-				1.556.060,00						-	135.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	23.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas</i>	-				0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	102.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		102.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	-				1.556.060,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.556.060,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							4.210.887.742,00							11.197.379.962,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**11. RENCANA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPPPA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKBPPPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKBPPPA	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA	
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2022
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.3	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
Tabel 3.1	: Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap Perangkat Daerah
Tabel 3.2	: Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tabel 3.3	: Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.4	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tahun 2024 harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Desember 2022, dan akan selesai pada bulan Juli 2023.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 berpedoman pada Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2023 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2024, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2022. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra

Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Rentra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Pedoman untuk penyusunan Rancangan Awal ini adalah Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Tahap penyusunan Rancangan Renja sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																												
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																												
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
2	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																												
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																												

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD DPPKBPPPA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	renja DPPKBPPPA																																
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																																

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2023.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Forum Perangkat Daerah Dinas PPKBPPPA dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPPKBPPPA, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi target RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja DPPKBPPPA merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);

5. Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 119);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini adalah :

1. Merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, analisis kinerja pelayan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA

Dalam Bab ini dimuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBPPPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun-tahun sebelumnya. .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+ 9)	11 = (10/4)
2	08	02	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	96,00 %	95,05%	95,80%	94,91%	99,22%	95,85%	95,32%	99,29%
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90,10 %	80,05%	80,75%	100%	100%	80,80%		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	71%		53%	100%		64%		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	80%		75%	100%		75%		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%		100%	100%		100%		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,00329		0,0036	0,006		0,0029		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%		100%	100%		100%		

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	08	03	2.03	Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%		100%		
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	80%					50%		
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan gender dan hak anak	80%					50%		
2	08	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	80%					0		

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	08	04	2.03	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KG dan hak anak								
2	08	05		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	80%					0		
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	100%		100%	100%		100%		
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Jumlah media informasi	3 media		3 BUAH	3 BUAH		3 media		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	08	06			Kabupaten/Kota PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA		Nindya	Pratama		Nindya		
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%		80%	100%		80%		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	100%		85%	100%		85%		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%		100%	100%		100%		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Persentase penurunan kekerasan	0,017%		0,067	65%		0,067%		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	08	07	2.02		Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terhadap anak								
2	08	07	2.03		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%		100%	100%		100%		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%		100%		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,95		1,25	1,09		1,20		
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%					100%		
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	80%		60%	90%		60%		
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase CPR (Contraceptive	75,00%		73,5	67,42		74,30%		

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	03	2.01	(KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prevalence Rate) Persentase promosi KBPK terhadap keluarga dan kampung KB	65%		60%	53%		62,30%		
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,97%		37,71			37,71%		
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	28,20%		73,5%	67,15%		26,70%		
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	65%		50%	47%		55%		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	1404				Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)	2,16		2,24	2,45		2,22		
2	1404	2.01			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	85%		75%	65%		77%		
2	1404	2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

1.1.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan selama tahu 2022, antara lain :

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) direncanakan target pencapaiannya 100%, namun hanya terealisasi sebesar 38,74%, hal ini disebabkan kegiatan pembekalan/pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada pada setiap nagari baru terlaksana pada bulan Juli dan Agustus 2022, sehingga pencairan dana pulsa baru bisa dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022 demikian juga dana kegiatan honorarium TPK optimal dicairkan pada bulan Agustus 2022

1.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.999.900 atau 100%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

239.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 238.296.500 atau 99,71%.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.329.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.008.000 atau 96,72%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.278.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.538.000 atau 21,07%

III. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.950.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.949.400 atau 100%

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.850.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.806.000 atau 99,09%
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.245.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.243.800 atau 99,91%

V. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.374.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.206.600 atau 99,39%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.763.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 25.932.500 atau 34,69%
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.817.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.145.900 atau 98,27%

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.210.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.179.000 atau 99,26%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.761.784.021 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.709.662.116 atau 98,11%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.862.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.819.261 atau 99,98%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.122.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 255.951.309 atau 99,16%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.355.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.149.916 atau 99,81%

II. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.955.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.745.742 atau 98,29%

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 869.654.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 743.925.434 atau 85,54%
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.821.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 855.740.369 atau 97,60%
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 578.298.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 462.018.400 atau 79,89%
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp467.763.800 atau 99,99%.

1.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2022 tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhubungan dengan dasar pembentukan Dinas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	IKD	IKU PD	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	√		8,19%	8,59%	9,01%	6,9%		9,01%		
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	√		8,57%	8,57%	8,57%	5,71%		8,57%		
3.	Rasio KDRT	√		0,004	0,004	0,003	0,0036		0,003		
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	√		42000	45000	99750	83161		99750		
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	√		100%	100%	100%	100%		100%		

6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	√		100%	100%	100%	100%		100%		
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	√		100%	100%	100%	100%		100%		
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√		100%	100%	100%	100%		100%		
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√		100%	100%	100%	100%		100%		
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√		100%	100%	100%	100%		100%		
11.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	√		0,0036	0,0029	0,0029	0,005		0,0029		

12.	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender)pada belanja langsung APBD)	√		5,06%	5,06%	6,1%	2,8%		6,1%		
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I	√		3,9%	3,7%	3,6%	4,71		3,6%		
14.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	√		1,25	1,20	1,1	1,27		1,1		
15.	Total Fertility Rate (TFR)	√		2,24	2,22	2,20	2,48		2,20		
16.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	√		50%	55%	60%	45%		60%		
17.	Ratio Akseptor KB	√		1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 1,4		1 : 5		
18.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagiperempuan menikah usia 15 - 49	√		73,5%	74,3%	74,6%	73,66%		74,6%		
19.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun(ASFR 15-19)	√		23	23	22	21		22		

20.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	√		0,7%	0,6%	0,6%	0,63%		0,6%		
21.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	√		10,1%	9,1%	8,63%	13,93		8,63%		
22.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	√		26,3%	26,7%	27,1%	24,7%		27,1%		
23.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	√		75%	77%	80%	78,2%		80%		
24.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	√		75%	77%	80%	70,5%		80%		
25.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	√		80%	82%	83%	80,9%		83%		
26.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	√		2	5	6	13		6		
27.	Cakupan PKB/PLKB yang digunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	√		76%	76%	78%	75%		78%		

28.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	√		65%	65%	70%	65,2%		70%		
29.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	√		1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1		1 : 1,2		
30.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	√		100%	100%	100%	100%		100%		
31.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	√		100%	100%	100%	100%		100%		
32.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	√		100%	100%	100%	100%		100%		
33.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	√		60%	65%	65%	65,8%		65%		
34.	Cakupan keluarga yang mempunyai balitan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	√		60%	65%	65%	65,2%		65%		

35.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	√		73,5%	74,3%	74,6%	73,66%		74,6%		
36.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		√	95,80%	95,85%	95,90%	95,05%		95,95%	96,00%	
37.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√	0,0036	0,0029	0,0029			0,0029	0,0029	
38.	Rasio kekerasan terhadap anak		√	0,0036	0,0029	0,0029			0,0029	0,0029	
39.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		√	1,25	1,20	1,1			0,95	0,95	
40.	Nilai AKIP		√	68	69	69			70	70	
41.	Nilai IRB		√	16	16	17			17	18	
42.	Nilai IKM		√	85	85	85			85	85	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan KB secara mandiri;
2. Masih kurangnya jumlah akseptor KB dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis / murah kepada pasangan usia subur;
3. Masih kurangnya sosialisasi pengembangan program KB bagi keluarga miskin;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera
5. Masih lemahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
6. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan

- b. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
- c. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
- d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat bahwa ada pengurangan jumlah kegiatan. Pengurangan kegiatan dilakukan karena kegiatan tersebut belum menjadi prioritas perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Lima Puluh Kota

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	1.282.049.470	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,90%	132.149.500	
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,95%								
		Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota			Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	242.372.370	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota			Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,85%	2.493.600	
			Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG Jumlah advokasi dan koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah	15 Kali	79.540.670			Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	993.600

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					kebijakan yang disusun										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	6 kali	20.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	43 Dokumen	1.000.000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	43 Perangkat Daerah 5 kali	64.559.550								
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	5,56%	78.272.150			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan	43 Perangkat Daerah	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Kabupaten	2 kali						Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase organisasi perempuan yang berartispasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	64,0%	910.075.100		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		1.000.000	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan organisasi perempuan	3 kegiatan	910.075.100			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.000.000	
					Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan	9 keg									
					Jumlah peringatan besar	2 kegiatan									
					Jumlah rapat koordinasi	20 kali									
					Jumlah sosialisasi	3 kali									
					Jumlah seminar	10 kali									
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		advokasi										
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	129.602.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	128.655.900	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	33.310.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 orang	36.021.900		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap	13 Kecamatan 4 Kali	129.602.000			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12 Dokumen	59.324.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan dan kelompok perempuan Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas perempuan				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	641.971.110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	125.400.000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rasio KDRT	0,0029	369.224.130		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rasio KDRT	0.0029	72. 532.500	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235.010.600			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPPA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	29.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					sosialisasi TPPO										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi ke K3N dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO	20 kali 45 kali 45 kali	134.213.530			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	42.932.500	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota			Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100,0%	-		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota			Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	31.268.000	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DPPKBPPPA	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	15 layanan			

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
			Kabupaten / Kota		korban kekerasan					Kewenangan		Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	272.746.980		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	57,091,000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi permpuan korban kekerasan										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan		272.746.980			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	30 orang	57,091,000	Menduku ng IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi PUSPAGA						Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan										
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	20.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	202.390.000	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak	50%	20.000.000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak	50%	202.390.900	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					anak							anak			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan	4 kali	20.000.000								
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak										
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	202.390.000		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujukan KG										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dan hak anak										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapsitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga										
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG dan perlindungan anak										
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase Informasi Layak Anak	100%	387.444.750	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase Informasi Layak Anak	100%	102,687,700	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media informasi	3 buah	387.444.750								
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	165.141.900								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	222.302.850								
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	792.573.650	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	78.000.000	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	238.492.100		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase Kecamatan Layak Anak	90,0%	78.000.000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159.429.600			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	25 Organisasi	78.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
												Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi jumlah rapat koordinasi Jumlah singkronisasi rapat gugus tugas KLA	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	79.062.500								
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85,0%	554.081.550								
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	jumlah kegiatan ajang kreatifitas jumlah kegiatan forum anak opearsional layanan puspaga Peningkatan SDM PUSPAGA	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252.844.130								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	DPPKBPPA	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190.605.800								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Daerah Kabupaten/Kota		daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak propinsi										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media sahabat anak komunikasi informasi melalui banner, leaflet, booklet, baliho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak		110.631.620								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					(PISA)PISA										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak										
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	477.051.610	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	602.599.500	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	153.919.990		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0.050 %	185.367.500	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	JUmlah Keputusan 1 Dokumen Jumlah MOU JUmlah PERBUP Jumlah Sosialisasi	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138.919.990								
			Koordinasi dan Sinkronisasi	DPPKBPPA	Jumlah bulan	12 bulan	15.000.000			Advokasi dan pendampingan	DPPKBPPPA	Jumlah SDM yang	150 orang	185.367.500	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		pendampingan					Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program /Kegiatan Pencegahan KTA		memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	152.576.500			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10.000.000								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	142.576.500			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 orang	315.572.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	170.555.120		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	101.660.000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapsitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kali	10.000.000			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	DPPKBPPPA	Jumlah SDM penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 orang	101.660.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi Dunia Usaha 2 Kali Advokasi Media 2 Kali Jumlah Workshop 2 Dokumen MOU Dunia Usaha 2 Dokumen MOU Media	3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	160.555.120								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.595.040.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	3,351,940,223	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	25.404.610		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%	23,092,500	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.362.960		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.114.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.167.430		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3,753,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1,056,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.150.930		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1,981,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
												Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.192.950			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,998,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	5 dokumen	11.014.630			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5,190,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	2.364.780								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	95%	3.709.328.993		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	95%	2,743,308,723	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					perangkat daerah							perangkat daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.702.743.953			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.736.782.723	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	6.585.040			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,526,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Anggaran										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	90.750.000								
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	125 Stel	68.750.000								
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPA	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 paket	22.000.000								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	258.935.930		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	184,863,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.750.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	33.106.480			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25,389,800	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.839.450			Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,482,200	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	3.088.800								
			Fasilitasi Kunjungan	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan	350 porsi	9.625.000			Fasilitasi Kunjungan		Jumlah Laporan Fasilitasi	1 laporan	5,425,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Tamu		makan dan minum tamu					Tamu		Kunjungan Tamu			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD	700 porsi 600 OH	183.526.200			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	128,966,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	768.043.100			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	63,350,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKBPPA											
			Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Dinas atau	DPPKBPPA	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	574.278.100								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan mobiler	1 Paket	109.285.000			Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	29.350.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	84.480.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.000000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	363.407.770			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	164,580,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.884.100			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.319.670			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,950,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	303.204.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	131,880,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kantor		jasa pelayanan umum kantor					Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	379.170.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	172,746,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	293.227.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 unit	148.671.000	
			Pemeliharaan Mebel	DPPKBPPA	Jumah bulan pemeliharaan mebel										
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	17.743.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	8,990,000	
			Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	68.200.000			Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	15,085,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,2	339.528.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.2 .	272,821,600	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	204.528.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	97,378,000	
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluargamelalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi Jumlah penyerasian kebijakan daerah terhadap KKBPK	1 dok 1 kegiatan	49.555.000								
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	1 Dokumen	97,378,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan										
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masy tentang kependudukan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan										
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Nonformal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal										
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal										
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dan Informal										
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal										
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan										
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan										
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	1 kali	109.373.000								
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK										
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		135.000.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	60 %	175,443,600	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Perumusan Parameter Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perumusan kependudukan										
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen data kependudukan										
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga										
			Pemetaan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Pemetaan Kependudukan										
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan										
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)		Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)										
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	DPPKBPPA	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk										
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Data Keluarga										
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 dok	10.000.000			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	30 Dokumen	50.032.000	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dok	125.000.000								
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	79 Dokumen	125,411,600	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK										
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30%	8.450.860.097	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB				Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	2,989,928,480	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	62,30%	4.267.282.857		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	63 %	1,309,972,780	
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder	13 kali	75.685.280			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	4.375.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK	13 Kecamatan	737.151.250			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	13 Dokumen	25,000,000	
			Penyediaan dan Distribusi	DPPKBPPA	Jumlah pembuatan	13 paket	55.000.000								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Sarana KIE Program KKBPK		pamflet, lembar balik KKBPK										
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah promosi KKBPK di radio	4 kali	55.000.000			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	316 Dokumen	70,640,000	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK										
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	DPPKBPPA	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	4 kali	200.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan	105 Laporan	202.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK	1 Kegiatan	2.737.002.180			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Laporan	967,157,780	
			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan	14 kali	407.444.147			Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	246 Laporan	40,000,000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	1.342.355.960			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	483,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB										
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ	12 bulan	1.342.355.960			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	716 Orang	483,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	12 kali						Pedesaan (IMP)			
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	1.497.483.780		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjanggg	26.7 %	676,835,700	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon	37 Faskes	84.283.080			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37 Laporan	89.410.100	
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan bidan klinik dan PKB	2 kali	83.485.500								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	1.021.465.200			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11079 Orang 13 Kecamatan	534,834,200	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	DPPKBPPA	Jumlah fasilitasi kesehatan yang mendapat distribusi	37 Faskes	100.000.000								
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	37 paket	20.000.000								
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DPPKBPPA	Jumlah pembinaan bagi peserta KB	5 kali	14.250.000								
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan	13 kali	100.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga	13 Laporan	52.591.400	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		reproduksi di faskes					Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan										
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi										
			Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak KB	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Promosi dan KB Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan										
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pria										
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	1.343.737.500		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	519,920,000	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB	28 kali	98.857.500								

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBPK di Kampung KB	28 kali	1.244.880.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 Kampung	519,920,000	
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2.567.635.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Total Fertlity Rate (TFR)	2,20	1,933,800,000	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77%	2.559.814.900			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77 %	1,966,068,000	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)										
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	DPPKBPPA	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)										
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah orientasi/pelatiha n teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,P IK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	127.352.500								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	13 Kecamatan	1.739.330.400			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK	39366 Orang	1.787.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
					dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)						S)				
										Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DPPKBPPA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1975 Keluarga	12.000.000	
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPPA	Jumlah kader pengelola dan pelaksana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional kegiatan	39366 orang	1.549.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)										
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutusiaan dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	693.132.000			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	156 laporan	12.000.000	
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Tercapainya IPK												
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	DPPKBPPA	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK										
			Advokasi dan Promosi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK										
			Sosialisasi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi IPK										
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK										
										Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DPPKBPPPA	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	760 unit	360.000.000	
			Pelaksanaan Peningkatan Peran dan Serta		Persentase organisasi	100%	7.821.000								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
		Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga										
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		7.821.000								
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	DPPKBPPA	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		program ketahanan dan kesejahteraan keluarga										
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
							20.554.154.990							9.632.268.423	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan Permendagri terbaru.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pada 2024 tidak tedapat usulan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKPPPA dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2024 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	Program Pelindungan Khusus Anak				
I.I	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota				
I.I.I	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Program / Kegiatan Pencegahan KTA	DPPKBPPA			Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional ;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik;

- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa ; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan renja ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Telaahan terhadap Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021 - 2026

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH ”**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 1. Pemahaman tentang kontrasepsi MKJP masih rendah, sedangkan pemahaman kontrasepsi suntik masih sangat tinggi
 2. Pencapaian CPR tinggi tetapi tidak diiringi dengan penurunan TFR
 3. Jasa medis pemasangan IUD implant bagi peserta JKN belum berjalan dengan semestinya.
 4. Belum semua sekolah mendukung kegiatan PIK remaja.
 5. Masih lemahnya pencatatan dan pelaporan ditingkat kecamatan dalam hal ketepatan waktu dan akurasi serta analisis data
 6. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan;
 7. Banyaknya kasus² kesehatan reproduksi di masyarakat,
 8. Pengetahuan kader BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 9. Pemahaman masyarakat tentang kelompok BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 10. Jumlah kader IMP (PPKBN/PPKBJ) masih kurang, terutama di daerah padat penduduk
 11. Standar Anggaran Biaya untuk biaya operasional PPKBN/PPKBJ masih rendah
 12. Operasional kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak ada
 13. Pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga masih kurang
 14. Kurangnya sarana BKB Kit dan Kartu Kembang Anak

II. Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Perempuan kurang memiliki kesempatan dan peran dalam pengambilan keputusan, sehingga manfaat yang diperoleh perempuan belum bisa disetarakan dengan kaum laki-laki, yang mengakibatkan fenomena kesenjangan gender di Kabupaten Lima Puluh kota
2. Upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsive gender, masih rendah
3. Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang
4. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan menuju keadilan dan kesetaraan gender.
5. Semua SDM yang terlibat kegiatan PUG belum dilatih pelatihan pementasan tupoksi pokja PUG, focal point, pelatihan PPRG maupun penyusunan GAP dan GBS.
6. Terbatasnya alokasi dana yang ada di kabupaten untuk pelaksanaan program dan kegiatan PUG.
7. Semakin menipisnya perilaku masyarakat yang mencerminkan adat dan budaya Minangkabau terutama puti bungsu (remaja putri) dan rang mudo
8. Kemiskinan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT
9. Belum maksimalnya penataan administrasi organisasi perempuan
10. Rendahnya wawasan organisasi perempuan untuk

mengangkat kualitas hidup perempuan.

11. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak
12. Belum tersedianya shelter (rumah aman) bagi korban tindak kekerasan

Berdasarkan permasalahan pada kedua urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

B. Sasaran :

C. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

D. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan
Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	
			1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	

		Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			4. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	

		Kabupaten/Kota	
			8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		6. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
			9. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
			10. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		7. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			11. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

			Kewenangan Kabupaten/Kota
		8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			13. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			16. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		10. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	

		Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
			2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
			3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
			4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan	
			6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
			9. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			12. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
			13. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		3. Administrasi Umum	
			14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			18. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			19. Penyediaan Alat Tulis Kantor
			20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			22. Penyediaan Makanan dan Minuman
			23. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			25. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			26. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			27. Pengadaan Mebeleur
			28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			30. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			32. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
			33. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 1 Program, 4 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 3.6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
II.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			3. Pengelolaan operasional dan sarana di balai

			penyuluhan KKBPK
			4. Pengendalian Program KKBPK
		3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			6. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			8. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			9. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,

			Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			10. Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
			11. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 3 Program, 5 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.7

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPKBPPPA berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut :

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	11	1.140.540.400	5	11	2.800.000.000	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	46	8.491.728.023	4	46	9.452.600.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9.632.268.423,00							12.252.600.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.632.268.423,00							12.252.600.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.140.540.400,00							2.800.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan gender (IPG)	-			95,90 %	132.149.500,00						-	1.440.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	-			80,85 %	2.493.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	665.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	993.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Perangkat Daerah	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonom	-			75 %	128.655.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	33.310.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	36.021.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	59.324.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	-			100	125.400.500,00						-	570.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	-			0,0029 %	72.532.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	29.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Perangkat Daerah	42.932.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	-			100 %	31.268.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Layanan	31.268.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga layanan yang terlatih</i>	-			100 %	21.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				100 Orang	21.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	202.390.900,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	202.390.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	202.390.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>Persentase Informasi Layak Anak</i>	-			100 %	0,00						-	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah media informasi</i>	-			3 Buah	0,00			-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA)</i>	-			Utama	78.000.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kecamatan Layak Anak</i>	-			90 %	78.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>				25 Organisasi	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu</i>	-			100 %	602.599.500,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penurunan kekerasan terhadap anak</i>	-			0,050 %	185.367.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu</i>				0 Kegiatan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>				150 Orang	185.367.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	315.572.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				150 Orang	315.572.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	-			100 %	101.660.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				0 Kegiatan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				100 Orang	101.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	596.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	619.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	2.834.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			95 %	2.940.486.823,00			-	-	-	-	3.207.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.938.647.823,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.839.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 %	0,00			-	-	-	-	64.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	65.011.200,00			-	-	-	-	227.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	540.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.986.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.330.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			50 %	6.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	147.840.000,00			-	-	-	-	285.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	73.575.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	56.330.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Kegiatan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	-			60 %	189.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	189.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				13 Laporan	47.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	142.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		142.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	-			74,6 %	3.086.595.000,00						-	2.884.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	-			63 %	1.272.950.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.199.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Laporan	743.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				13 Laporan	169.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		169.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				13 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				13 Organisasi	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	-			37,97 %	251.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	239.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				719 Orang	239.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		239.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				13 Organisasi	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	-			27,1 %	1.054.545.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	946.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				37 Laporan	140.899.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				11079 Orang	830.845.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				37 Laporan	82.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	-			55 %	508.099.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	89.599.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				79 Kampung	418.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	-			2,2	1.933.800.000,00						-	2.072.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-				1.933.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	2.072.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				156 Laporan	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1975 Keluarga	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				760 Unit	360.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				39366 Orang	1.549.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				0 Kelompok	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	J U M L A H							9.632.268.423,00							12.252.600.000,00		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

12. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015, telah diwajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam rangka mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Resntra Daerah ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Secara hirarki penyusuna Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja pemerintah dan jadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD), Renja SKPD mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani anantara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam penjabaran tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Lima Puluh Kota. Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategis seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota di dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan public yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan timpenyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Pasal 126 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahunsebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan programprioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan programdan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikatorhasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk itu menyusun Rencana Kerja DPMPSTSP Tahun 2024 dengan memperhatikan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untukmewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program

dan kegiatannya dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bab II pasal 4 yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota ;
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DPMPTSP Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: 1.1 Latar Belakang, 1.2 Landasan Hukum, 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2023 berisi tentang : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD, 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DPMPTSP, berisi tentang : 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 3.2 Tujuandan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP, berisi rencana kerja Program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2024, Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024, RPJMD dan Renstra DPMPTSP, Rekapitulasi rencana pendanaan Perangkat daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan melaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan urusan Penanaman Modal. Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023.

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 realisasi belanja sebesar Rp. 4.082.899.653 ,- dengan persentase 97,70% dari pagu belanja Rp. 4.178.852.373-.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD dan capaian RENSTRA SKPD diuraikan dalam pokok pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						5			
2	1	8			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		7,484,137,044	4,732,198,130	7,530,578,010	4,082,899,653	54.22	5,243,600,084	14,058,697,867	95.29
2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	6,731,322,564	4,110,807,458	5,966,080,510	3,700,717,153	62.03	3,799,260,734	11,610,785,345	38.06
2	1	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	120,800,000	73,773,600	97,554,900	35,062,800	35.94	53,714,000	162,550,400	1.35
2	1	0	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000	26,779,300	30,000,000	9,274,400	30.91	17,243,100	53,296,800	1.52
2	1	0	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8,600,000	6,304,400	7,500,000	2,680,000	35.73	3,039,000	12,023,400	1.40

						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
2	1 8	0 1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,600,000	5,570,000	7,500,000	4,952,000	66.03	3,015,000	13,537,000	1.57
2	1 8	0 1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8,600,000	4,215,200	5,500,000	4,727,800	85.96	4,088,200	13,031,200	1.52
2	1 8	0 1	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	3,675,900	5,916,300	246,300	4.16	4,815,000	8,737,200	0.87
2	1 8	0 1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	8,505,600	11,376,000	4,773,900	41.96	8,500,000	21,779,500	1.45
2	1 8	0 1	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000	18,723,200	29,762,600	8,408,400	28.25	13,013,700	40,145,300	1.15
2	1 8	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	4,833,322,564	3,441,645,285	4,336,459,710	2,919,753,087	67.33	2,988,590,234	9,349,988,606	7.25
2	1 8	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjangASN	4,808,322,564	3,432,283,985	4,315,568,910	2,910,900,787	67.45	2,962,486,334	9,305,671,106	1.94

2	1 8	0 1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terealisasinya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP	10,000,000	3,490,300	7,747,000	4,444,400	57.37	10,451,000	18,385,700	1.84
2	1 8	0 1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8,000,000	2,718,800	7,284,600	2,510,200	34.46	7,805,400	13,034,400	1.63
2	1 8	0 1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,000,000	3,152,200	5,859,200	1,897,700.00	32.39	7,847,500	12,897,400	1.84
2	1 8	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	40,000,000	-	34,016,000	-	-	-	-	0.00
2	1 8	0 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	0	34,016,000	0	-	0	-	0.00
2	1 8	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tesedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	397,300,000	266,389,163	290,839,900	303,431,442	104.33	301,456,500	871,277,105	18.56
2	1 8	0 1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,000,000	6,782,000	9,246,000	3,060,000	33.10	7,270,000	17,112,000	1.71
2	1 8	0 1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	30,000,000	73,604,100	31,042,900	33,329,000	107.36	30,565,900	137,499,000	4.58

						Kantor yang Disediakan								
2	1 8	0 1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	10,000,000	4,750,000	-	-		20,000,000	24,750,000	2.48
2	1 8	0 1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	8,000,000	7,597,300	7,000,000	6,007,900	85.83	11,370,600	24,975,800	3.12
2	1 8	0 1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37,900,000	14,364,800	34,500,000	20,978,800	60.81	34,500,000	69,843,600	1.84
2	1 8	0 1	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,400,000	2,470,000	4,000,000	-	-	2,500,000	4,970,000	1.13
2	1 8	0 1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22,000,000	10,192,500	20,000,000	6,600,000	33.00	20,000,000	36,792,500	1.67
2	1 8	0 1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275,000,000	146,628,463	185,051,000	233,455,742	126.16	175,250,000	555,334,205	2.02
2	1 8	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550,000,000	0	509,951,000	0	-	0	0	0.00
2	1 8	0 1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	440,000,000	0	409,975,000	0	-	0	-	0.00
2	1 8	0 1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55,000,000	0	49,901,000	0	-	0	-	0.00
2	1 8	0 1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55,000,000	0	50,075,000	0	-	0	-	0.00
2	1 8	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	294,900,000	188,757,520	247,140,000	276,219,154	111.77	238,060,000	703,036,674	5.69

						Pemerintah Daerah								
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	2,695,000	5,520,000	500,000	9.06	2,420,000	5,615,000	0.94
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47,900,000	27,214,262	45,500,000	38,354,154	84.29	45,500,000	111,068,416	2.32
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	241,000,000	158,848,258	196,120,000	237,365,000	121.03	190,140,000	586,353,258	2.43
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	495,000,000	140,241,890	450,119,000	166,250,670	36.93	217,440,000	523,932,560	5.23
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	143,000,000	126,941,390	130,000,000	160,820,670	123.71	195,480,000	483,242,060	3.38
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22,000,000	13,300,500	20,000,000	5,430,000	27.15	21,960,000	40,690,500	1.85
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	330,000,000	-	300,119,000	0	-	0	-	0.00
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	277,740,000	58,709,200	329,440,300	0	-	291,895,850	350,605,050	8.88
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	102,500,000	24,483,400	239,142,400	-	-	212,204,250	236,687,650	4.36

2	1 8	0 2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	65,000,000	15,041,000	176,750,700	-	-	157,801,700	172,842,700	2.66
2	1 8	0 2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	37,500,000	9,442,400	62,391,700	-	-	54,402,550	63,844,950	1.70
2	1 8	0 2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi	175,240,000	34,225,800	90,297,900	-	-	79,691,600	113,917,400	4.51
2	1 8	0 2	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	150,000,000	0	0	0	-	0	-	0.00
2	1 8	0 2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	25,240,000	34,225,800	90,297,900	-	-	79,691,600	113,917,400	4.51
2	1 8	0 3			Program Promosi Penanaman Modal	Persesntase rencana investasi	70,170,000	60,919,524	323,552,100	0	-	245,955,000	306,874,524	11.88
2	1 8	0 3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal	70,170,000	60,919,524	323,552,100	0	-	245,955,000	306,874,524	11.88
2	1 8	0 3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	18,378,724	75,196,700	-	-	62,951,600	81,330,324	8.13

2	1	0	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	60,170,000	42,540,800	248,355,400	-	-	183,003,400	225,544,200	3.75
2	1	0			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	106,000,000	120,004,946	419,976,700	0	-	476,010,000	596,014,946	21.62
2	1	0	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	106,000,000	120,004,946	419,976,700	0	-	476,010,000	596,014,946	21.62
2	1	0	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28,000,000	19,417,724	68,933,000	-	-	66,763,000	86,180,724	3.08
2	1	0	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	29,000,000	84,128,622	149,137,100	-	-	172,543,100	256,671,722	8.85
2	1	0	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	20,000,000	0	60,525,100	-	-	62,159,100	62,159,100	3.11

						Perizinan dan Non Perizinan								
2	1 8	0 4	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	29,000,000	16,458,600	141,381,500	-	-	174,544,800	191,003,400	6.59
2	1 8	0 5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	221,020,000	361,185,602	426,808,000	382,182,500	89.54	370,207,700	1,113,575,802	13.81
2	1 8	0 5	2.01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	221,020,000	361,185,602	426,808,000	382,182,500	89.54	370,207,700	1,113,575,802	13.81
2	1 8	0 5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	44,714,000	42,174,154	73,660,400	-	-	63,900,000	106,074,154	2.37
2	1 8	0 5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	110,000,000	202,872,724	216,522,400	229,291,200	105.90	195,307,700	627,471,624	5.70
2	1 8	0 5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	66,306,000	116,138,724	136,625,200	152,891,300	111.91	111,000,000	380,030,024	5.73
2	1 8	0 6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	77,884,480	20,571,400	64,720,400	-	-	60,270,800	80,842,200	1.04

2	1 8	0 6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	77,884,480	20,571,400	64,720,400	0	-	60,270,800	80,842,200	1.04
2	1 8	0 6	2.01	01	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	77,884,480	20,571,400	64,720,400	-	-	60,270,800	80,842,200	1.04

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, alokasi dana Rp. 9,295,400 Realisasi keuangan Rp. 9,274,400 (99,77%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP ,Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP
- b. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**, alokasi dana Rp. 2.681.000 Realisasi keuangan Rp. 2.680.000 (99,96 %) dan Realisasi fisik (100 %), keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen RKA SKPD, Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen RKA SKPD
- c. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**, alokasi dana Rp. 4.982.000 Realisasi keuangan Rp. 4.952.000 (99.40 %) dan Realisasi fisik (100 %) , keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD Capaian Kinerja berupa Tersedia Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**, alokasi dana Rp. 4.741.800 Realisasi keuangan Rp. 4.727.800 (99,40 %) dan Realisasi fisik (100 %) , keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD, Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD
- e. **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**, alokasi dana Rp. 246.300 Realisasi keuangan Rp. 246.300 (100 %) dan Realisasi fisik (100 %) , keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- f. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, alokasi dana Rp. 4.806.900 Realisasi keuangan Rp. 4.773.900 (100 %) dan Realisasi fisik 99,31 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP, Capaian Kinerja berupa Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP
- g. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, alokasi dana Rp. 8.434.000 Realisasi keuangan Rp. 8.408.400 (99,70 %) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD,Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, alokasi dana Rp. 2.937.100.873 Realisasi keuangan Rp.2.910.900.787 (99,11%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya administrasi keuangan kantor
- b. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, alokasi dana Rp. 4.462.400 Realisasi keuangan Rp.4.444.400 (99,60%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP yang akuntabel
- c. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD**, alokasi dana Rp. 2.519.200 Realisasi keuangan Rp.2.510.200 (99,64%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Terealisasinya Laporan Keuangan Bulanan dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran DPMPTSP yang akuntabel

- d. **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**, alokasi dana Rp. 1.907.300 Realisasi keuangan Rp.1.897.700 (99,50%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran DPMPTSP yang akuntabel

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi dana Rp.3.060.000 keuangan Rp 3.060.000,- (100 %) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran dengan Capaian Kinerja berupa berfungsinya alat-alat listrik dan penerangan kantor.
- b. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, alokasi dana Rp. 33.331.200,- Realisasi keuangan Rp. 33.329.000,- (99,99%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap
- c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, alokasi dana Rp. 6.010.000,- Realisasi keuangan Rp. 6.007.900,- (99,97%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor
- d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** alokasi dana Rp. 21.279.000,- Realisasi keuangan Rp. 20.978.800,- (98,59%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Lancarnya Proses Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Cetak dan Penggandaan DPMPTSP

- e. **Fasilitasi Kunjungan Tamu** alokasi dana Rp. 6.625.000,- Realisasi keuangan Rp. 6.600.000,- (99,62%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat dan terlayannya tamu
- f. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** alokasi dana Rp. 233.472.000,- Realisasi keuangan Rp. 233.455.742,- (99,99%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam Maupun di Luar dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dana untuk Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** alokasi dana Rp. 500.000,- Realisasi keuangan Rp. 500.000 (100%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran kegiatan ini adalah Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos dengan Capaian Kinerja berupa adalah lancarnya administrasi perkantoran
- b. **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik** alokasi dana Rp. 59.100.000,- realisasi keuangan Rp. 38.354.154,- (64,90,%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Lancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik dengan Capaian Kinerja lancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik

- c. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** alokasi dana Rp. 248.193.000 realisasi keuangan Rp 237.365.000,- (95,64 %) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien dengan Capaian Kinerja berupa bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja, lancarnya Proses pengadaan alat tulis kantor, dan terciptanya suasana kantor yang bersih.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**, alokasi dana Rp.160.980.000,- Realisasi keuangan Rp. 160.820.670 (99,90%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas dan terpeliharanya peralatan gedung kantor.
- b. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** alokasi dana Rp.5.430.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.430.000 (100 %) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- c. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

- d. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. kegiatan ini adalah sub kegiatan ini yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Sub kegiatan ini yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah sub kegiatan ini yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .
- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 sub kegiatan ini yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- h. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

- i. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .
- j. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran .

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp.0,- Realisasi keuangan Rp 0(0%) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari kegiatan ini Laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya Sosialisasi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) Pelaku usaha dan adanya laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- b. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp.155.391.300,- Realisasi keuangan Rp. 152.891.300 (100%) dan Realisasi fisik 100% keluaran dari kegiatan ini Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan dokumen Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan Capaian Kinerja berupa jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal (129 perusahaan)

VI. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan, dengan capaian kinerja berupa Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan (15 Laporan).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Analisa juga menyajikan target realisasi capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2023. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tabel TC.3

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		IKD	3.073	3.226	3.388	3.557	7.848				
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		IKD	401.035.530.807	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	4.561.817.738.404				
3	Nilai realisasi investasi (PMDN)		IKD	380.165.883.910	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	4.558.005.879.329				
4	Nilai realisasi investasi (PMA)		IKD	2.294.974.419	2.409.723.140	2.530.209.292	2.656.719.761	3.811.859.075				
5	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat		IKD	84,9	85	85	85,2	84,8				
6	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanasman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		IKD	71	71	71	72	69,33				

Analisa Tabel 2.2 sebagai Berikut :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor dihitung dari banyak nya jumlah pengurusan NIB yang terjadi pada tahun itu dan diakumulasikan dengan tahun tahun sebelumnya (2018 sampai 2021). Pada tahun 2021 jumlah investor 5.623, tahun 2022 sebanyak 7.848 berarti terjadi peningkatan sebanyak 2.225 dengan persentase peningkatan sebanyak 39,53%

2. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Untuk menghitung nilai investasi mengacu pada total investasi yang diusulkan atau diajukan oleh investor dan itupun disetujui oleh Dinas Penanaman Modal atau Lembaga, dimana nilai investasi ini bersifat provisional, Nilai tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan proyek dan kemungkinan perubahan dalam skala atau rencana investasi . Tahun 2021 total nilai investasi sebesar Rp. 4.385.295.689.044 dan tahun 2022 Rp. 4.561.817.738.404 dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 4,02%. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan promosi dan sosialisasi serta bimbingan teknis penanaman modal yang dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus.

3. Nilai Realisasi Investasi PMDN

Nilai realisasi investasi tahun 2021 sebesar 4.528.673.116.843 dan tahun 2022 sebesar 5.173.426.051.626 dengan demikian terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 4,15%. Realisasi investasi dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh investor dan ditambah dengan jumlah nilai investasi yang dilaporkan oleh investor pada saat pengurusan Nomor Induk Berusaha.

4. Nilai realisasi investasi PMA

Pada tahun 2021 nilai realisasi PMA sebesar 9.059.016.004 dan tahun 2022 sebesar 3.811.859.075. Untuk menghitung persentase peningkatan kita perlu melakukan : hitung selisih nilai tahun 2022 dan tahun 2021, bagi nilai selisih nya dengan nilai tahun 2021, kalikan hasilnya dengan 100. Karena hasilnya negatif menunjukkan adanya penurunannilai PMA daripada peningkatan. Untuk menghitung persentase penurunan kita mengambil nilai Absolut dari

selisih tersebut. Selisih = $|-6.047.156.929| = 6.047.156.929$, maka persentase peningkatan

= (selisih/nilai PMA tahun 2021) x 100

= $(6.047.156.420 / 9.059.016.004) \times 100$

= 66,68%

Jadi persentase peningkatan PMA dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 66,68% (dengan asumsi nilai PMA tahun 2022 sebenarnya adalah 3.011.859.075)

5.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya.

Untuk tahun 2022, Bulan Januari sampai Juni nilai IKM sebesar 86,506, bulan Juli sampai Desember nilainya 83,121. Untuk menghitung total IKM maka dijumlahkan semester satu dan semester, dua dibagi dua. Maka total IKM 84,8. Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 85,07, dengan demikian terjadi penurunan nilai IKM sebesar 0,32% hal ini antara lain penyebabnya adalah sistem yang masih belum lancer, dimana kita masih memakai sistem dari pusat kadang kala terjadi Maintenance sehingga pelayanan terlambat.

6.Akuntabilitas Kinerja

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPTSP Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot%	Nilai %
1	Perencanaan kinerja	30	22,54
2	Pengukuran kinerja	25	14,38
3	Pelaporan kinerja	15	10,42
4	Evaluasi internal	10	5,50
5	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20	16,99

Dilihat dari tabel diatas maka capaian 5 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **69,33**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B .Ditahun 2020 nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 69,08. Dengan demikian persentase peningkatan sebesar 0.36%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3.073	3.226	3.388	3.557	7.848		475	500	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN, PMA) (Milyar)	401.035.530.807	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	4.561.817.738.404				
		Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Milyar)	380.165.883.910	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	4.558.005.879.329				
		Nilai Realisasi Investasi (PMA) (Milyar)	2.294.974.419	2.409.723.140	2.530.209.292	2.656.719.761	3.811.859.075				
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,9	85	85	85,2	84,8				
3.	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	71	71	71	72	69,33				

Analisa Indikator

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor dihitung dari banyak nya jumlah pengurusan NIB yang terjadi pada tahun itu dan diakumulasikan dengan tahun tahun sebelumnya.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Untuk menghitung nilai investasi mengacu pada total investasi yang diusulkan atau diajukan oleh investor dan itupun disetujui oleh Dinas Penanaman Modal atau Lembaga, dimana nilai investasi ini bersifat provisional, Nilai tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan proyek dan kemungkinan perubahan dalam skala atau rencana investasi .

3. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN

Realisasi investasi dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh investor dan ditambah dengan jumlah nilai investasi yang dilaporkan oleh PMDN pada saat pengurusan Nomor Induk Berusaha.

4. Jumlah nilai realisasi investasi PMA

Realisasi investasi dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh investor Asing dan ditambah dengan jumlah nilai investasi yang dilaporkan oleh investor tersebut pada saat pengurusan Nomor Induk Berusaha.

5. Skor indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya.

6. Nilai sasaran akuntabilitas Kinerja Pemerintah OPD

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot.

Analisa Sasaran :

1. Meningkatnya investasi

Ada 4 (empat) Indikator dari sasaran kinerja meningkatnya investasi :

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN, PMA (dalam hitungan Milyar).
Jumlah nilai investasi berskala nasional yaitu jumlah atau besaran modal usaha yang dilaporkan oleh investor saat pengurusan izin. Sumber data rencana investasi yaitu rekapitulasi Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, proyek , Non Izin Usaha Mikro Kecil
- Jumlah nilai realisasi (PMDN,PMA) dalam hitungan Milyar. Nilai realisasi investasi merupakan jumlah investasi yang dilaporkan oleh investor saat melaporkan ke LKPM

2. Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Indikator dari sasaran ini adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerjanya yaitu Nilai sasaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Organisasi Perangkat daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat setiap tahunnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pelayanan yang diberikan kepada investor baik dalam proses perizinan dan non perizinan maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.3.1

**Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No.	MasalahPokok	Masalah	AkarMasalah
1	2	3	4

1	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah	Belum optimalnya perencanaan investasi dan pengembangan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) - SOP Perizinan dan Non perizinan yang belum terintegrasi dengan OPD terkait - OPD teknis belum ditempatkan di DPMPTSP - Desain promosi yang belum dirumuskan secara optimal - Belum optimalnya koordinasi dengan BKPMRI maupun Propinsi - Sarana dan prasarana yang kurang memadai - Belum adanya kajian potensi produk unggulan daerah - Belum tegasnya sistem sanksi dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM
---	---	---	---

2	Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. Belum Representatifnya Sarana dan Prasarana Gedung/Ruang Pelayanan Perizinan DPM & PTSP 2. Belum Semua Penerbitan Izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Masih belum optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Belum terintegrasinya SOP perizinan dengan OPD terkait - Peraturan K / L yang sering berubah menuntut penyesuaian di Daerah.
---	-------------------------------------	--	---

Dari table diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayananperizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

2.3.2 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional/internasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran :

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 adalah:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Bila Visi dan Misi Bupati tercapai maka akan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta terwujudnya Lima Puluh Kota Madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Berangkat dari rencana pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 bertolak dari kondisi faktual terhadap dokumen dan manajemen Sumber Daya Manusia yang diamanatkan untuk menunjang percepatan dan kemudahan investasi maka perlu dilakukan secara menyeluruh tata kelola birokrasi pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Kesiapan sumber daya / potensi yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berpengaruh terhadap penguatan Perangkat Daerah. Bila permasalahan sebagai mana tersebut diatas tidak segera dilakukan pembenahan akan berdampak terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat Hasil diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama. Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahankelemahan organisasi. Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan ancaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPSTP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan sarana prasarana yang refresentatif dalam upaya pencapaian optimalisasi pelayanan
- b. Dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur dalam upaya percepatan pelayanan perizinan
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada semua bidang dalam peningkatan pelayanan penanaman modal
- d. Pemutakhiran instrumen , data dan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di DPMPTSP
- e. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pelayanan dan investasi
- b. Iklim usaha yang kondusif untuk memberikan peluang masuknya investasi
- c. Letak geografis yang strategis dan terbangunnya insfrastruktur transportasi yang baik
- d. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur daerah guna peningkatam pelayanan dan investasi
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

Tabel 2.3.3.1
SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W1	Keterbatasan anggaran
S2	Percepatan pelayanan perizinan	W2	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi antar bidang
S3	Motovasi, semanagat dan etos kerja aparatur	W3	Masih kurangnya tenaga
S4	Pemutakhiran data	W4	Perlunya dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prodesur

PELUANG (<i>Opportunities</i>)		ANCAMAN (<i>Threats</i>)	
O1	Dukungan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai	T1	Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
O2	Adanya Percepatan Pelayanan		
O3	Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan Kualitas ASN		

Tabel 2.3.3.2
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

<div style="text-align: center;">INTERNAL</div> <div style="text-align: center;">EKSTERNAL</div>	KEKUATAN (Strengths) <ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ pelayanan perizinan sudah memakai aplikasi OSS 	KELEMAHAN (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan anggaran ➤ kuantitas dan kompetensi personil yang belum memadai ➤ Sarana dan prasarana belum memadai ➤
	PELUANG (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai ➤ Adanya dukungan anggaran yang memadai ➤ Adanya Percepatan pelayanan ➤ Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan Kualitas ASN 	<div style="text-align: center;"><u>STRATEGIS+O</u></div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Fasilitas Pendukung Kinerja ➤ Memberikan kemudahan pelayanan perizinan ➤ Perlunya percepatan dalam proses penyederhanaan operasional prosedur ➤ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia <div style="text-align: center;"><u>STRATEGIW+O</u></div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya anggaran untuk peningkatan pelayanan perizinan ➤ Menambah Jumlah SDM sesuai klasifikasi yang dibutuhkan dan peningkatan kompetensi SDM

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Rancangan awal RKPD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.246.699.902,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 4.937.279.608- (Emat Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catt Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRMPENUNJANG URUSAN PEMERINTA HANDAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	4.376.496.608	PROGRMPENUNJANG URUSAN PEMERINTA HANDAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	4.376.496.608	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	85%	8.609.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	85%	8.609.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	5.024.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	5.024.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP TSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3.585.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP TSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3.585.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.924.577.808	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.924.577.808	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / bulan	42.917.809.608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / bulan	42.917.809.608	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.003.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.003.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	1.765.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	1.765.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	0 orang	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	0 orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	60 bulan	159.004.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	60 bulan	159.004.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.123.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.123.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	22.209.100	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	22.209.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	0	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	4.091.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	4.091.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	17.923.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	17.923.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.640.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.640.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	106.017.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	106.017.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	165.679.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	165.679.000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	280.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	280.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	58.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	58.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	106.599.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	106.599.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		1.118.627.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		1.118.627.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	20 Unit	116.649.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	20 Unit	116.649.000	

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	2.070.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	2.070.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangun lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	999.908.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangun lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	999.908.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	10 %	19.983.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	10 %	19.983.000	
	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	20 %	10.992.500	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	20 %	10.992.500	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	4 Dokumen	5.867.500	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	4 Dokumen	5.867.500	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	6 Dokumen	2.207.500	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	6 Dokumen	2.207.500	
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DPMPTSP	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	2 Dokumen	2.917.500	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DPMPTSP	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	2 Dokumen	2.917.500	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tesedianya Peta potensi Investasi	2 Dokumen	8.990.500	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tesedianya Peta potensi Investasi	2 Dokumen	8.990.500	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.917.500	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.917.500	
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	2 Daerah	4.145.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	2 Daerah	4.145.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1.928.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1.928.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase rencana investasi	60 %	12.900.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase rencana investasi	60 %	70.170.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman	20 %	12.900.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman	20 %	70.170.000	

	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		modal			Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		modal			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	11.400.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	11.400.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	1.500.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	20 %	20.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	20 %	20.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	20 %	20.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	20 %	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1100 Pelaku Usaha	20.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1100 Pelaku Usaha	20.000.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	0	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 kegiatan usah	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 kegiatan usah	0	

	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi investasi	20 %	500.800.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi investasi	20 %	500.800.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	20 %	500.800.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	20 %	500.800.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha	72.675.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha	72.675.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 pelaku usaha	257.425.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 pelaku usaha	257.425.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 kegiatan usaha	170.700.000	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 kegiatan usaha	170.700.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	10 %	7.100.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 laporan	7.100.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	19 laporan	7.100.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	19 laporan	7.100.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	19 laporan	7.100.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	19dokumen	7.100.000	

Semua Program yang tertera table diatas sudah ada di sipd-ri.kemendagri, namun ada kegiatan yang belum masuk ke sistem tetapi sudah ada pada Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM). Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 4 yaitu :

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catt
		NIHIL				

Untuk saat ini belum ada usulan Pokok Pikiran Legislatif yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja DPMTSP Tahun Anggaran 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020–2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2019-2024 yaitu: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**”. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 2(dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal; dan
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM&PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran
Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.	Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal yang prima dan	Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme	- Surat keputusan Bupati mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada

	responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal		<p>pelayanan perizinan satu pintu belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai 	<p>kepala DPMPTSP memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan. - Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	Penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	Sarana pendukung yang tersedia di DPMPTSP cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA /PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melakukan Promosi
6	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/kota belum optimal	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman Modal

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota diselaraskan dengan arah dan kebijakan BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa

misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat dan ketujuh. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Misi ketujuh Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga

harus didukung harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.2 (T.B.34) berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Baratterhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2 (T.B.34)
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.				
No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				

1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Rendahnya Realisasi Investasi Dibandingkan dengan Rencana investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti - Kondisi alam Sumatera Barat yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami - Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah - Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam melakukan pengendalian - Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Kemampuan teknis aparaturnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi - Dukungan dana anggaran yang masih minim - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang 	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua penerbitan izin sesuai dengan SOP dan Standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
---	---	---	---	--

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

“Mewujudkan lima Puluh Kota Madani,Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian,perkebunan,peternakan, perikanan dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumbo.Bank Tanah Nagari.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu,serta meningkatkan pemberdayaan Surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
5. Jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari.
6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga Nagari,pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi Nagari dan Lumbung Piti Nagari, sesuai dengan karakteristikdan potensi lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.

8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi,

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

RPJPD 2016-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia

4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2016-2021, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja DPMPTSP Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP tahun 2021-2026 yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan isu-isu strategis penanaman modal. Adapun misi tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 seperti tabel berikut.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

MISI	TUJUAN	SASARAN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan inovasi daerah

Selain merupakan penjabaran Renstra DPMPTSP, maka Renja DPMPTSP tahun 2024 juga akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RKPD) Tahun 2024. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPMPTSP.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan layanan mandiri, perbantuan dan prioritas dalam proses pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018;
2. Belum tersedianya SOP dan SP pelaksanaan perizinan elektronik ;
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
4. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan

terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;

Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran Investor dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Keterbatasan sumberdaya keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai.

Tabel TB.36

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas

DPMPSTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Bidang Urusan dan Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)		Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	7.848	(>)	Nihil	Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN, PMA) (Milyar)	4.561.817.738.404	(>)	Nihil	Jumlah nilai pelaku usaha (Investor) yang mengurus izin

3	Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Milyar)	4.558.005.879.329	(>)	Nihil	Laporan kegiatan Penanaman Modal Sosialisasi, Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan LKPM melalui sistem OSS RBA
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,8	(<)	Nihil	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69,33	(<)	Nihil	Kurangnya Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah

Dari tabel diatas terlihat bahwa skor Indeks Kepuasan masyarakat belum tercapai hal ini disebabkan karena kurang puasnya pelayanan yang didapat oleh pengurus izin sesuai dengan skor yang diberikannya. Rendahnya nya Indeks kepuasan ini disebabkan oleh karena kita memakai sistem yang terpusat yaitu nya Online Single Submission, kadang kala sistem maintenance sehingga proses perizinan terlambat.

Dalam peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan berkelanjutan sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif dan merupakan suatu hal mutlak yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dimana biaya pembuatannya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah).

Guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di sektor pariwisata atau pun di sektor pertanian perlu dilakukan Feasibility Study (FS) . Untuk satu FS membutuhkan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPPTSP

4.1 Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		KET
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3.226	3.388	IKU
		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	421.087.307/347	442.141.672.715	
		Nilai realisasi investasi (PMDN)	399.174.178.105	419.132.887.011	
		Nilai realisasi investasi (PMA)	2.409.723.140	2.530.209.292	IKU
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,9	85	IKU
3	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71	71	IKU

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu satu : Meningkatnya investasi dengan indikator Nilai Rencana Investasi, Berskala Nasional (PMDN, PMA) untuk tahun 2022 targetnya 401M, Nilai Realisasi Investasi (PMDN) targetnya 380M , (PMA) targetnya 2.2M dan jumlah investor (PMDN, PMA) targetnya 3.073. Dua : Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indicator indeks kepuasan masyarakat

dengan target tahun 2022 84,8 (B). Tiga : Meningkatnya Nilai AKIP targetnya tahun 2022 yaitu : 71

4.3 Pendanaan

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023, berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Uraian rekapitulasi Rencana Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari jumlah pendanaan terhadap rekap urusan, program dan kegiatan secara lengkap dapat dibaca pada table berikut :

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, dan Kegiatan tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6	4.937.279.608	12.676.900.000	13	4.937.279.608	12.676.900.000	
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	4.937.279.608	12.676.900.000	13	4.937.279.608	12.676.900.000	

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pelayanan penanaman modal. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2024 dapat dilihat pada :

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.937.279.808,00							12.676.900.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.937.279.808,00							12.676.900.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.937.279.808,00							12.676.900.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	4.376.408.808,00						-	11.608.200.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-			17 dokumen	8.800.000,00			-	-	-	-	144.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.024.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.585.000,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan daerah	-			12 bulan	2.924.577.608,00			-	-	-	-	5.776.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.917.809.608,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.744.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.003.000,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.765.000,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	150.004.000,00			-	-	-	-	439.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.123.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.209.100,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.091.600,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.923.300,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.840.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	106.017.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			--	0,00			-	-	-	-	612.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			12 bulan	165.679.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	260.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	58.800.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	106.599.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		293.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kependagwaan Daerah	-			12 bulan	1.118.827.000,00			-	-	-	-	4.211.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	118.849.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	2.070.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	999.908.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.999.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	-			10 %	19.983.000,00						-	438.230.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjad Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Kebijakan dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	-			20 %	10.902.500,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	5.867.500,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMCN) dengan UMKM di daerah				6 Dokumen	2.207.500,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				2 Dokumen	2.917.500,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta potensi Investasi	-			2 dokumen	8.990.500,00			-	-	-	-	288.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.917.500,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				2 Daerah	4.145.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.028.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	-			10 %	12.900.000,00						-	83.340.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-			20 %	12.900.000,00			-	-	-	-	83.340.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	11.400.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.340.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				3 Dokumen	1.500.000,00	- Kab. Limb Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pelayanan modal yang bertinovasi	-			20 %	20.000.000,00						-	116.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	-			20 %	20.000.000,00			-	-	-	-	116.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1100 Pelaku Usaha	20.000.000,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0 Pelaku Usaha	0,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko: Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				0 Kegiatan Usaha	0,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan investor	-			20 %	500.800.000,00						-	346.130.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	-			20 %	500.800.000,00			-	-	-	-	346.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merencanakan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merencanakan Kegiatan Usahanya				60 Kegiatan Usaha	72.675.000,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK	-	-	-		48.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	257.425.000,00	- Kab. Limapuluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK	-	-	-		118.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diakses dan Diverifikasi Data, Profit dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan / serta Dilakukan Evaluasi Penerimaan Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				150 Kegiatan Usaha	170.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	-			10 %	7.100.000,00						-	85.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaji Diuji dan Dimanfaatkan	-			10 Laporan	7.100.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilaji, Diuji dan Dimanfaatkan				10 Dokumen	7.100.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H						4.937.279.908,00						12.678.900.000,00		

Tabel 4.4
Rencana Target Kinerja Pelayanan Daerah Tahun 2024

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3.226	3.388	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN, PMA) (Milyar)	421.087.307.347	442.141.672.715	
		Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Milyar)	399.174.178.105	419.132.887.011	
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	2.409.723.140	2.530.209.292	
		Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85	85	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**13. RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sitematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	55
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ..	61
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	96
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	96
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	98
3.3 Program dan Kegiatan	103
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	108

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	14
--	----

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	22
---	----

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
--	----

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Utama Kepala Dinas Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	60
--	----

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	70
---	----

Tabel 2.6

Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 Usulan Program.....	89
---	----

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	101
--	-----

Tabel 3.2

Usulan Penunjang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	104
---	-----

Tabel 3.3

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104
---	-----

Tabel 3.4

Urusan Pilihan Perdagangan	105
----------------------------------	-----

Tabel 3.5

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota	105
--	-----

Tabel 4.1

Rumus Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024	109
--	-----

Tabel 4.2

Rencana Target Kinerja IKU Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	124
--	-----

Tabel 4.3

Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023.....	124
---	------------

Tabel 4.4

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Jumlah Program Kegiatan Tahun 2024.....	125
---	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2024 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2024 terbagi dalam tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja OPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sedang dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke terakhir dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 berdasarkan pada visi dan misi KDH terpilih untuk periode 2021-2026. Dimana dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tujuan, strategi, kebijakan, sasaran target kinerja, program dan kegiatan adalah bersumber dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mempedomani tujuan, strategi, kebijakan, sasaran target kinerja, program dan kegiatan pada Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD teknis yang strategis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman

dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Perbup sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Rancangan awal Renja PD dibahas dalam forum dan lintas OPD yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja PD yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja PD dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala OPD untuk memastikan program dan kegiatan OPD terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja PD selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Hasil Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub - bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam sub bab ini diuraikan :

- a. Penjelasan tentang bagaimana usulan program/kegiatan usulan kegiatan masyarakat diperoleh,
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud, yaitu yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM .

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun anggaran 2022 setelah terjadinya perubahan anggaran maka alokasi APBD yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.372.898.432,- .

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan pada tabel berikut adalah :

TABEL 2.1
REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	REALISASI		
				Fisik	Keuangan (Rp)	%
1	2		3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.104.777.336	99,27	3.858.746.347	94,01
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.932.100	100	29.877.900	99,82
	a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.110.000	100	22.085.300	99,89
	b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.822.100	100	7.792.600	99,62
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.942.598.038	100	2.902.490.687	98,84
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.927.762.138	100	2.887.655.887	98,63

	b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.835.900	100	14.834.800	99,99
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.262.800	100	290.823.532	94,34
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.541.000	100	5.034.000	90,85
	b.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.641.800	100	57.114.100	97,39
	c.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.400.000	100	23.990.900	100
	d.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	42.475.000	100	31.336.500	73,38
	e.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.205.000	100	173.939.032	97,61
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30.000.000	0	0	0
	a.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0	0
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		444.940.000	100	426.287.294	95,81

	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.020.000	100	1.824.000	90,30
	b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000	100	90.965.294	88,32
	c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.920.000	100	333.498.000	98,11
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.044.400	100	209.266.934	69,95
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.457.000	100	146.196.550	85,27
	b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.740.000	100	13.815.000	73,72
	c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.847.000	100	49.255.384	31,01
2		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.200.000	100	27.600.000	94,52
1		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.200.000	100	27.600.000	94,52

	a.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.200.000	100	27.600.000	94,52
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi		404.200.000	100	377.305.700	93,35
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		212.965.000	100	199.229.800	93,55
	a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	212.965.000	100	199.229.800	93,55
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		191.235.000	100	178.075.900	93,12
	a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	191.235.000	100	178.075.900	93,12
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		64.460.000	0	0	0
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah		64.460.000	0	0	0

	Kabupaten/Kota					
	a.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	64.460.000	0	0	0
5	Program Pengembangan UMKM		526.781.100	100	297.063.521	56,50
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		526.781.100	100	297.063.521	56,50
	a.	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	526.781.100	100	297.063.521	56,50
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		15.000.000	100	13.880.000	92,53
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		15.000.000	100	13.880.000	92,53
	a.	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	100	13.880.000	92,53

7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		909.428.000	100	589.853.199	64,86
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		909.428.000	100	589.853.199	64,86
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	909.428.000	100	589.853.199	64,86
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		25.000.000	100	24.485.000	97,86
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		25.000.000	100	24.485.000	97,86
	a.	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000	100	24.485.000	97,86
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		100.000.000	100	90.053.468	90,05
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100.000.000	100	75.486.268	90,05
	a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	78.777.800	100	99.423.872	95,82
	b.	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.222.200	100	14.567.200	68,84

10	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri		195.075.000	100	165.568.746	84,87
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		195.075.000	100	165.568.746	84,87
	a.	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45.059.000	100	23.684.750	52,56
	b.	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	150.016.000	100	141.883.996	94,58
	Jumlah		6.372.898.436	98,52	5.444.535.981	85,43

Sesuai Tabel realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program yang mencapai target ada 7 Program, yaitu Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Perizinan dan Pendaftaran Gudang, Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Hal ini bisa tercapai karena adanya dukungan anggaran yang cukup, dan adanya dukungan dari stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Program yang tidak mencapai target ada 3 (tiga) Program, yaitu program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program Pengembangan UKM,dan program peningkatan

sarana distribusi perdagangan hal ini disebabkan terjadinya tunda bayar kegiatan karena tidak tersedianya dana di kas daerah.

3. Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target .
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
 - b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
 - c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat apabila target telah tercapai dan terganggunya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang tercapai secara langsung berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :
- a. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pemegang program sampai dengan staf.
- b. Terjalinnya kerja sama yang baik antara lintas program dan lintas sektor

- c. Perlunya pembinaan secara kontiniu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten sampai ke tingkat unit.
- d. Pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan secara rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan di lapangan.
- e. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.2

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/4)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%	100%	100%		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dok	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	5 dokumen	10 dok	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 laporan		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	12 bulan	100%	100%	100%	100%		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	40 orang/bulan		
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian Dinas	100%	0	0	0	100%	100%		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	127 stel	0	0	0	100%	2 paket		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 buah dan 25 rol	20 buah/5 rol	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket		
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	2 paket		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	2 paket		
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	12 bulan	NA	0	0	100%	2 dokumen		
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	24 laporan		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah Digital	100%	NA	100%	100%	100%	100%		
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	NA	0	0	100%	0		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisas i (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	NA	3 paket	0	100%	5 unit		
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 paket	NA	5 paket	0	100%	2 unit		
2	17	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit	NA	16 unit	0	0%	16 unit		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi dinas	100%	NA	100%	100%	100%	100%		
2	17	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 lembar dan 100 buku	NA	900 lembar dan 60 buku	12 bulan	100%	12 laporan		
2	17	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan		
2	17	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kantor								
2	17	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	NA	12 bulan	12 bulan	100%	100%		
2	17	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	21 unit		
2	17	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	20 unit		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dipelihara								
2	17	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	NA	12 bulan	12 bulan	100%	2 unit		
2	17	02.			PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase USP yang sudah memiliki izin	0%		100%			0		
2	17	02.	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	0	NA	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	13 kecamatan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisas i (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/4)
					dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
2	17	02.	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0		
2	17	03.			PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang	65%		34%			10%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					KOPERASI	telah diawasi								
2	17	03.	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	80 koperasi	NA	50 Koperasi	0	0	60 koperasi		
2	17	03.	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	1 kegiatan		1 kegiatan	0	0	16 unit usaha		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kabupaten/Kota	Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 kegiatan						
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 koperasi	NA	0	0	100%	50 unit usaha		
2	17	05.			PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan anggota Koperasi yang mengikuti	65%		10%			10%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pelatihan								
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan tentang Perkoperasian	8 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	8 kegiatan		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	170 orang	NA	50 orang	50 orang	100%	140 orang		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	TerlatihnyaSDM UKM dari sisi pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	100 orang	NA	50 orang	100 UKM	100%	100 orang		
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan		
2	17	06			PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Skala Usahanya	100%		15%			10%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	15 koperasi	NA	15 koperasi	0	0	15 koperasi	-	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	0	0	58 orang		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kabupaten/Kota									
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	0	0	0	0	100%	160 keluarga		
2	17	07			PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang diberdayakan	35%		15%			20%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	07	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan dan Terfasilitasinya pelaku usaha Mikro	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	0	0	4 kegiatan		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan	35 UMKM	NA	35 UMKM	0	0	100 UMKM		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha kewenangan kabupaten/kota								
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	35 UMKM	NA	35 UMKM	0	0	50 Unit Usaha		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	35 UMKM	NA	35%	0	0	15 Unit Usaha		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 UMKM	NA	0	0	100%	650 Unit Usaha		
2	17	08			PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha yang dikembangkan	35%		15%			20%		
2	17	08	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	10 Kegiatan	NA	10 kegiatan	10 Kegiatan	100%	10 kegiatan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10 kegiatan	NA	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	140 Unit Usaha		
3	30				URUSAN PERDAGANGAN									
3	30	02			PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan yang dikeluarkan	55%		10%			10%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						izinnya								
3	30	02	2.02		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 Kecamatan	NA	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	13 Kecamatan		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	13 Kecamatan	NA	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	10 dokumen		
3	30	03			PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pasar nagari yang	66%	N	11%	11%	100%	11%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						direvitalisasi								
3	30	03	2.01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nigari yang direvitalisasi	6 unit	NA	3 unit	3 unit	100%	3 unit		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	NA	6 unit	3 unit	50%	3 unit		
3	30	04			STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%		15%			20%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	04	2.01		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	9 jenis sembako	NA	9 jenis sembako	9 jenis sembako	100%	9 jenis sembako		
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	9 jenis sembako	NA	9 jenis sembako	9 jenis sembako	100%	264 laporan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Rakyat								
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	4 kali	NA	0	0	100%	4 kali		
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi Minimal 90%	4 kali	NA	0	0	100%	12 laporan		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	05			PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	100%		20%			40%		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran dan Pembinaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	NA	0	0	100%	0		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	NA	0	0	100%	30 pelaku usaha		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	2 even	NA	2 even	0	0	5 pelaku usaha		
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang	1 kegiatan	NA	0	0	100%	4 pelaku usaha		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Lokal								
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	1 kegiatan	NA	0	0	100%	4 pelaku usaha		
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk ekspor	1 kegiatan	NA	0	0	100%	4 produk		
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	1 kegiatan	NA	0	0	100%	50 pelaku usaha		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	06			STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%		100%			100%		
3	30	06	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	13 Pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	13 pasar		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	13 pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	1000 unit		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Ditera Ulang								
3	30	05	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	13 pasar	NA	13 pasar	13 pasar	100%	500 orang		
3	30	07			PENGUNAAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%		100%			100%		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	4 Kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan		
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	40 UMKM		

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data dan system informasi system dan jaringan informasi perdagangan	2 event	NA	2 event	2 event	100%	12 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah Meningkatkan taraf Hidup masyarakat melalui revitalisasi perkenomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan Potensi Daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah system ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif Masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran strategis dalam Peningkatan Perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolak ukur keberhasilan yang visi misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026., Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berupaya untuk meningkatkan peran serta UMKM yang ada di Lima Puluh Kota dengan melaksanakan 13 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM).
7. Program Pengembangan UMKM.
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
11. Program Pengembangan Ekspor
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
13. Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Dalam mengimplementasikan program-program tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu mereview terlebih dahulu kekuatan dan kekurangan serta peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi pelaksanaan dari program-program tersebut.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Telah memiliki struktur organisasi yang telah berpayung hukum.
2. Memiliki jaringan koordinasi yang kuat baik dengan kabupaten/kota maupun dengan provinsi dan kementerian.
3. Memiliki dua kementerian (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM) yang memayungi tupoksi dinas.

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah staf yang berstatus PNS sangat sedikit.
2. Pejabat struktural yang belum benar-benar memahami tupoksi dari jabatannya.
3. Support alokasi anggaran yang masih kecil.

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

Sementara dari sisi ancaman yang akan mengganggu pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari hasil analisa SWOT diatas maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk Tahun 2024 berupaya untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kekurangan dan ancaman yang akan mengganggu jalannya pencapaian target kinerja yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah data dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Persentase koperasi aktif	60,28	63,26	66,20	69,12	60,83	60,73		69,12	72,02	
2	Jumlah koperasi aktif	129	136	143	150	132	133		150	157	
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	100	100		911.402,25	911.402,25	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1,94	2.94	3,94	4,94	6,45	11,41		4,94	5,94	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	27,9	28,3	28,6	29,25	9,97	3,88		29,35	29,40	
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	28	35	45	50	25,35	26		50	55	

Penjelasan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

1). Indikator Persentase Koperasi Aktif

Dari 219 Koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang tersebar di 13 Kecamatan, terdapat 133 koperasi yang aktif atau 60, 73%. Hal ini disebabkan oleh

karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2). Indikator Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah 219 koperasi, tersebar di 13 Kecamatan, dari 219 Koperasi yang aktif ada 133 Koperasi dan yang tidak aktif ada 86 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan koperasi yang aktif dan pertumbuhan koperasi baru. Hal ini karena adanya pembinaan terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap masyarakat dan koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3). Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah yang mempunyai modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan omset pertahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk usaha kecil adalah yang mempunyai modal Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan omset penjualan pertahunnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria tersebut dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hanya ada usaha dengan kategori mikro.

4). Indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Peningkatan koperasi yang berkualitas dapat dilihat dari koperasi yang meningkat asetnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan aset 25 Koperasi dari 219 Koperasi atau 11,41%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota

5). Indikator Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Persentase pencapaian realisasi dari meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,38%. Hal ini disebabkan karena terjadi pemangkasan anggaran pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal. Disamping itu terjadinya peralihan kewenangan dimana usaha kecil berada dibawah pembinaan Provinsi, sementara Kabupaten/ Kota hanya membina usaha mikro. Selain itu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah sudah termasuk kategori mikro atau kategori kecil

6). Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

Pada Tahun 2021 jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang sebanyak 1.200 UTTP dari 4.598 UTTP yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota atau 26%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk Tera dan Tera Ulang, yang diharapkan ada untuk 13 (tiga belas) Kecamatan, sementara anggaran yang tersedia hanya untuk 7 (tujuh) kecamatan, mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai.

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Utama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Lima Puluh Kota**

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	1,37%	2,29%		25%	30%	
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	1,77%	4,42%		25%	30%	
3	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	10%	20%	30%	40%	NA	11,41%		40%	50%	
4	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	10%	3,33%		44%	55%	
5	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	NA	11,66%		1%	2%	

Ada sebanyak 5 indikator kinerja utama kepala dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang ditetapkan pada urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- a. Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan, dari target 15% hanya tercapai 2,29%.

Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan pada Tahun 2022 adalah 191 UKM dari 8.315 UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya dana untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

b. Persentase pelaku usaha yang dikembangkan,

Jumlah pelaku usaha yang dikembangkan pada Tahun 2022 adalah 368 pelaku usaha dari 8.315 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana untuk pengembangan pelaku usaha

c. Persentase koperasi sehat,

Pada Tahun 2022 persentase koperasi sehat adalah 11,41% yaitu 25 Koperasi dari 219 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya dana untuk penilaian koperasi sehat, tetapi ditumpangkan pada kegiatan penilaian koperasi sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

d. Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi,

Pasar tradisional yang dapat direvitalisasi pada tahun 2022 adalah 2 pasar dari 60 pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 3,33% dari target 22%. Hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk pembangunan/revitalisasi pasar nagari.

e. Persentase pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur,

Pada Tahun 2022 persentase pasar tradisional yang tertib alat ukur adalah 11,66% dari target 1%. Dimana pada tahun 2022 telah dilaksanakan siding tera ulang di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD

Jumlah Pedagang, Koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja masih tertinggal. Keteringgalan tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan Pedagang, Koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai

sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor Internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Permasalahan yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan antara lain, ketidaktahuan prosedur perizinan, proses perizinan, proses bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha kecil dan menengah, usaha yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, sehingga usaha tersebut sulit untuk mendapatkan akses bantuan dari lembaga-lembaga keuangan. Ditambah dengan terjadinya pandemic covid 19 yang sudah berlangsung selama dua tahun belakangan mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran program dan kegiatan serta pelaksanaan protocol kesehatan yang tidak memperbolehkan terjadinya pengumpulan massa. Sehingga target yang sudah ditetapkan dalam renstra banyak yang tidak tercapai.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan terhadap pedagang, koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta berkoordinasi dengan Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat dengan cara virtual.

2. Mengikuti bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan Kementerian Perdagangan RI serta Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan UMKM yaitu :

- a. Kualitas Pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah,
- b. Penggunaan serta ketersediaan teknologi tepat guna yang digunakan untuk usaha produktif masih rendah,
- c. Permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM tidak mencukupi sehingga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan rendah,
- d. Ketersediaan informasi tentang pasar .

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi,
- b. Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber daya produktif,
- c. Masih kurangnya peminat terhadap koperasi,
- d. Banyaknya pesaing usaha yang sejenis.

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Perdagangan adalah :

- a. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha,
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar tradisional
- c. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal,
- d. Masih lemahnya system distribusi dan pengendalian harga,
- e. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar,
- f. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri.
- g. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran
- h. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya,
- i. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional pemeriksa, pengawas dan penyidik terakreditasi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa masalah yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah :

- a. Ketidakstabilan harga pasar atau inflasi,

- b. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi,
- c. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana pendukung perdagangan, dalam hal ini pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten,
- d. Promosi produk yang belum optimal.

2.3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”.

Visi ini dijabarkan dalam 5 misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke II berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni :

Misi ke- 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Faktor yang menjadi penghambat pelayanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah pada dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia.
- b. Adanya ketakutan masyarakat tentang transparansi skala usahanya dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak.
- c. Rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Belum terjaganya mutu dan harga barang.
- e. Daya promosi produk yang masih rendah.
- f. Pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian visi misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Tantangan dan peluang di Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai

sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menaggulangnya adalah dengan meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM Koperasi seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitas pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Dari berbagai permasalahan yang timbul, beberapa isu-isu strategis sebagai catatan penting yang direkomendasikan untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, harus proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM senantiasa berkoordinasi dengan Stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.
4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.
5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.
7. Peningkatan kualitas Pengelola Koperasi dan UMKM,
8. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna,
9. Peningkatan permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM,
10. Ketersediaan informasi Pasar,
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar tradisional,
12. Peningkatan system distribusi dan pengendalian harga,
13. Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar,

14. Peningkatan rasa cinta produk dalam negeri,
15. Peningkatan Pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya,
16. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Sesuai Analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini, dengan terjadinya penyesuaian pagu indikatif sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/1001/5/VI/Bapelitbang-LK/2023, jumlah program pada Rancangan Awal RKPD tidak sama dengan jumlah program setelah dilakukan analisis kebutuhan yaitu 5 (lima) program, namun besaran anggaran hasil analisis kebutuhan berkurang dari anggaran pada Rancangan Awal RKPD. Perbedaan anggaran yang dimaksud disebabkan oleh karena penyesuaian pagu indikatif RKPD/Renja Tahun 2024.

Dengan terjadinya Pementaan nomenklatur program dan kegiatan terdapat 1(satu) sub kegiatan yang berubah Program dan kegiatannya yaitu sub kegiatan Peningkatan

Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dari Program Pendidikan dan dan Latihan Perkoperasian, Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM), kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	5		6	12	13		20	21	22	23	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.374.882.977	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.645.321.405	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	64.746.200	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	32.896.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	0	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	31.850.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	3.032.160.915	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	3.293.280.541	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ Bulan	3.011.280.915	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	3.293.280.541	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.880.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian	100%	80,700,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas	100%	0	

			<i>Dinas</i>								
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	80.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 Bulan	441.177.696	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 bulan	75.880.864	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.889.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	104.783.496	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	15.881.864	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	86.063.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.003.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	78.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	9.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	150.842.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	39.996.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	100%	771.278.166	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	100%	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	451.493.166	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	52.225.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	0	

		Kota					Kota				
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	147.350.000	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	120.210.000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratif dinas		100.00%	636.820.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pelayanan administratif dinas	100%	213.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	141.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	103.000.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	1 laporan	488.520.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	12 laporan	108.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100.00%	348.000.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	63.160.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	143,550,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	58.410.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	47.500.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	4.750.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	156.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	0	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah Diawasi	10%	49.530.000	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Peningkatan Koperasi Yang Telah Diawasi	10%	0	

	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat	50Koperasi	49.530.000	Kegiatan : Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat	50 Koperasi	0	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 unit usaha	15.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 koperasi	0	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	60 unit usaha	34.530.000						
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat	10%	74.190.000	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat	10%	0	

	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	30 KSP/USP	74.190.000	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	50 Koperasi	0	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 unit usaha	39.190.000	Pelaksanaan PenilaianKesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Koperasi	0	
	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	15 unit usaha	35.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	60 unit usaha	0	
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi		Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	10%	527.032.300	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	10%	247.085.000	
	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 Kegiatan	258.961.300	Kegiatan : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 kegiatan	247.085.000	

	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	258.961.300	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 orang	247.085.000	
	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlatihnya SDM UKM dari segi Pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	100 Orang	268.071.000	Kegiatan : Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlatihnya SDM UKM dari segi Pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	120 UKM	0	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	150 orang	268.071.000	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	S Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	-	-	Ganti Program ke Program Pemberdayaan UKM
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Persentase Peningkatan Skala Usahanya	15%	155.385.000	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Persentase Peningkatan Skala Usahanya	15%	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	15 Koperasi	155.385.000	Kegiatan : Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	58 koperasi	0	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	125 unit usaha	87.095.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	125 unit usaha	0	
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	158 Keluarga	68.290.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	158 keluarga	0	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Mikro (UMKM)		Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	25%	1.320.079.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)		Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	25%		
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan</i>		Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha	<i>4 Kegiatan</i>	1.320.079.000	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan,		Terberdayakan dan terfasilitasinya pelaku usaha mikro	100 UMKM	264.085.000	

	Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		mikro			Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	518.079.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1 dokumen	81.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 unit usaha	385.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 unit usaha	0	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 unit usaha	385.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 unit usaha	0	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 unit usaha	32.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 unit usaha	0	

						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 orang	183.085.000	Sebelumnya Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Program Pengembangan UMKM		Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	25%	754.329.000	Program Pengembangan Umkm		Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	25%	0	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktu UKM	10 Kegiatan	754.329.000	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktu UKM	140 UMKM	0	
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	754.329.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 unit usaha	0	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnnya	10%	74.143.400	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnnya	10%	0	

	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 Kecamatan	74.143.400	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 Kecamatan	0	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	74.143.400	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	0	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	11%	742.940.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	11%	0	
	Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	3 Unit	712.930.000	Kegiatan : Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	3 unit	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	712.930.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	0	
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	20%	30.010.000	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	20%	0	

	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	30.010.000	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting	20%	99.697.300	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Presentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan barang Penting	20%	0	
	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</i>	<i>9 Jenis Sembako</i>	99.697.300	<i>Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</i>	9 bahan pokok	0	
	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	264 laporan	99.697.300	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	264 laporan	0	

	Program Pengembangan Ekspor		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	60%	247.554.000	Program Pengembangan Ekspor		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	60%	21.500.000	
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pameran dan pem binaan yang dilaksanakan</i>	<i>7 kegiatan</i>	247.554.000	<i>Keiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pameran danpem binaan yang dilaksanakan</i>	<i>7 kegiatan</i>	21.500.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 pelaku usaha	69.200.000	-	-	-	-	-	Sub kegiatan ini kewenangan Provinsi
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 pelaku usahat	107.994.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 pelaku usaha	0	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usahayang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 pelaku usaha	70.360.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usahayang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	21.500.000	

	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		Presentase Fasilitas Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan	100%	396.745.500	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		Presentase Fasilitas Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan	100%	22.260.000	
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan</i>		<i>Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur</i>	13 Pasar	396.745.500	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan		Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	13 Pasar	22.260.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulangr	600 unit	229.334.500	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600 unit	22.260.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	167.401.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	0	
	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase fasilitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	100%	154.536.000	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase fasilitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	100%	0	

	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	154.536.000	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	0	
	Sub Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraandengan Retail, Marketplace, Perhotelandan Jasa Akomodasi	6 UMKM	78.285.000	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraandengan Retail, Marketplace, Perhotelandan Jasa Akomodasi	6 UMKM	0	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	76.250.000	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Lima Puluh Kota				Sub kegiatan ini menjadi sub kegiatan Pameran Dagang Nasional
	JUMLAH				9.971.043.477	JUMLAH				4.200.251.405	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2024, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2024. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang* 2023, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2024.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2024 Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program unggulan pembangunan daerah untuk tahun 2024;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;

3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki program dan kegiatan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengajukan usulan sesuai dengan Kebutuhan dan prioritas Kecamatan dan DPRD. Hasil Musrenbang dapat diinput melalui SIPD yang telah tersedia untuk selanjutnya dapat di verifikasi oleh Dinas terkait. Setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan musrenbang sebanyak 49 usulan yang tersebar di seluruh kecamatan maka disetujui sebanyak 36 usulan. Sementara dari 52 usulan pokok-pokok pikiran DPRD Lima Puluh Kota disetujui hanya 31 usulan.

Seluruh usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD akan di akomodir dalam Anggaran Tahun 2024 dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.6

Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Bukik Limbuku Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	-	Musrenbang Kecamatan
2	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Koto Alam, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
3	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	-	Musrenbang Kecamatan
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan

5	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	-	Musrenbang Kecamatan
6	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Tanjung Balik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	200.000.000	Musrenbang Kecamatan
7		Nagari Tanjung Balik, Kab. Lima Puluh Kota		35.000.000	Musrenbang Kecamatan
8	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Lubuk Alai, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	Musrenbang Kecamatan
9	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Limbanang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
10		Nagari Koto Tangah, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Musrenbang Kecamatan
11	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Koto Tangah, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	30.000.000	Musrenbang Kecamatan
12		Nagari Tanjung Balik, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Tanjung Balik, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
14		Nagari Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Musrenbang Kecamatan
15	Pendidikan dan Latihan	Nagari Taram,	Jumlah unit usaha	50.000.000	Musrenbang

	Perkoperasian/Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Kab. Lima Puluh Kota	mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi		Kecamatan
16	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Tunga, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
17	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	50.000.000	Musrenbang Kecamatan
18		Nagari Baruah Gunung, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
19		Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
20		Nagari VII Koto Talago		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
21		Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
22	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
23		Nagari Piobang, Kab. Lima Puluh Kota		200.000.000	Musrenbang Kecamatan
24	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan	Nagari Gunung Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	50.000.000	Musrenbang Kecamatan
25		Nagari Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan

26	Usaha Mikro	Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
27		Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
28		Nagari Harau, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
29		Nagari Tungkar, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
30		Nagari Andaleh, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
31		Nagari Sungai Beringin, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Musrenbang Kecamatan
32		Nagari Talang Anau, Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000	Musrenbang Kecamatan
33	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Manggilang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	Musrenbang Kecamatan
34	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Andiang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	30.000.000	Musrenbang Kecamatan
35	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Sungai Balantiak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
36		Nagari Mungo, Kab. Lima Puluh Kota		200.000.000	Musrenbang Kecamatan

37	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	50.000.000	Reses
38		Mungka, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
39		Mungka, Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000	Reses
40		Nagari Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
41		Nagari Talang Anau, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
42		Nagari Koto Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
43	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	20.000.000	Reses
44		Nagari Situjuh Gadang, Kab. Lima Puluh Kota		35.000.000	Reses
45	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	35.000.000	Reses
46		Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota		35.000.000	Reses
47	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Reses
48		Nagari Suayan, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Reses
49	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Batu Payuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	20.000.000	Reses
50		Nagari Batu Payuang, Kab. Lima Puluh Kota		35.000.000	Reses

51	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Batu Payuang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	Reses
52	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Andaleh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	50.000.000	Reses
53		Nagari Labuah Gunung, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Reses
54		Nagari Batu Payuang, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
55		Nagari Labuah Gunung, Kab. Lima Puluh Kota		50.000.000	Reses
56	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Muara Paiti, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Reses
57	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	300.000.000	Reses
58	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Situjuh Banda Dalam, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Reses
59	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi	Nagari Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan,	50.000.000	Reses

	Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro		pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi		
60	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kecamatan Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Reses
61		Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Reses
62	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Nagari Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	3 paket	Reses
63	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	Reses
64		Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Reses
65		Nagari Smpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota		150.000.000	Reses
66	Pengembangan UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil/Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	30.000.000	Reses
67		Nagari Lubuah Alai, Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000	Reses

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKP tersebut mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Tema dari RKP 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas RKP 2024 yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Dalam mendukung arah kebijakan prioritas di Tahun 2024 telah ditetapkan beberapa target pembangunan, di antaranya :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem.
2. Penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta.

3. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Selain itu telah ditetapkan juga sasaran pembangunan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3% - 5,7%;
- 2) Tingkat Kemiskinan 6,5% - 7,5%.
- 3) Tingkat Pengangguran terbuka 5,0% - 5,7%.
- 4) Nilai Tukar Nelayan 107 – 110 poin.
- 5) Rasio Gini 0,374 – 0,377 poin
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99 – 74,02 poin.
- 7) Penurunan gas emisi rumah kaca 27,27%.
- 8) Nilai Tukar petani 105 -108 poin.

Sesuai dengan visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 “Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka ditetapkan misi Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Mewujudkan UMKM yang mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan visi dari Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut, maka tujuan Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi,
 - b. Melahirkan wirausaha baru (New Entrepreneur).
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC),

- b. UMKM Naik Kelas (Scaling Up).
- 3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM,
 - b. Nilai Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM.

Kemudian dari Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dengan visi “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kinerja Perdagangan Luar Negeri,
- 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri, dan
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa,
- 2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
- 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM);
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah (UMKM)

berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan (%).

2. Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%).
3. Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi sehat (%).
4. Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional dengan indikator Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi (%).
5. Meningkatnya pasar tradisional tertib ukur dengan indikator kinerja Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur (%).

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	SS 1 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	1.1 Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	SS 1 Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	2.1 Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
		SS 2 Mengkatnya kualitas koperasi	2.2 Persentase Koperasi Sehat	10%	20%	30%	40%	50%	60%

		SS 3	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	2.3	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	55%	66%
		SS 4	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib alat ukur	2.4	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	2%	2%

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2024 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah*.

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/1001/5/VI/Bapelitbang-LK/2023 tentang Penyampaian Pagu Indikatif untuk RKPD/Renja PD 2024 terdapat perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dari rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir RKPD. Pada Rancangan awal RKPD terdapat 13 (tiga belas) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 9.971.043.477,- sedangkan pada rancangan akhir RKPD terdapat 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan, 16 (enam belas) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 4.200.251.405.

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pilihan Perdagangan. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Urusan Penunjang Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

		4. Fasilitasi kunjungan tamu 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Tabel 3.3

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.	Program : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.4
Urusan Pilihan Perdagangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pameran Dagang Lokal
2.	Program : STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Berdasarkan pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 5 program dengan 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
I	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
I.1	Persentase Koperasi Aktif	kurang	1. Banyaknya koperasi yang tidak aktif 2. Kurangnya pertumbuhan koperasi baru	

I.2	Jumlah Koperasi Aktif	kurang	1.Banyaknya koperasi yang tidak aktif 2. Kurangnya pertumbuhan koperasi baru	
1.3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Melampaui	Dengan keluarnya PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 35 kriteria usaha mikro adalah mempunyai modal paling banyak Rp.1.000.000.000 dan omset paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Usaha kecil adalah yang mempunyai modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- dan omset pertahunnya lebih dari Rp.2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp.15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka yang ada hanya usaha dengan kategori mikro	Perubahan Kategori Usaha dengan keluarnya PP No.7 Tahun 2021
1.4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Melampaui	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi
1.5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wiraswasta	Belum tercapai	Belum tumbuhnya usaha mikro di tengah masyarakat, karena belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19	
II	PERDAGANGAN			
II.1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Belum tercapai	Belum terlaksananya Tera dan Tera Ulang di semua wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2022 ada beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan, dan ada beberapa indikator yang belum mencapai target.

Oleh karena itu, pada Renja 2024 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja, kesempatan mencapai ketertinggalan .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Permendagri No.90 Tahun 2019) pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2024 :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				4.156.491.405				8.666.028.985
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.645.321.405			100%	5.946.318.985
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh kota	5 dokumen	0	DAU		5 dokumen	154.647.437
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh	3 dokumen	0	DAU		5 dokumen	105.978.144

							kota						
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh kota	2 laporan	0	DAU		2 laporan	48.669.293
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	3.293.280.541	DAU		100%	3.019.917.195
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh kota	40 orang/bulan	3.293.280.541	DAU		40 orang/bulan	2.997.990.313
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh kota	1 laporan	0	DAU		1 laporan	21.928.882
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	0	DAU		100%	99.555.760

2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	0	DAU		2 paket	99.555.760
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	Kab. Lima Puluh kota	12 bulan	75.880.864	DAU		100%	515.286.564
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	1 paket	2.000.000	DAU		1 paket	40.443.975
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	15.881.864	DAU		2 paket	127.160.522
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	2 paket	9.003.000	DAU		2 paket	95.508.720
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh	1 dokumen	0	DAU		2 dokumen	17.752.500

						yang Disediakan	kota						
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	9.000.000	DAU		12 laporan	80.545.687
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh kota	24 laporan	39.996.000	DAU		24 laporan	153.875.160
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan rumah digital	Kab. Lima Puluh kota	100%	0	DAU		100%	944.758.755
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	1 unit	0	DAU		1 unit	0
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	3 unit	0	DAU		3 unit	115.960.950
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Lima Puluh	3 unit	0	DAU		3 unit	669.616.605

					Lainnya	Lainnya yang Disediakan	kota						
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	16 unit	0	DAU		16 unit	159.181.200
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	Kab. Lima Puluh kota	100%	213.000.000	DAU		100%	737.004.250
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh kota	1 laporan	2.000.000	DAU		1 laporan	70.706.250
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	1 laporan	103.000.000	DAU		1 laporan	200.448.000
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh kota	12 laporan	108.000.000	DAU		12 laporan	465.850.000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang	Kab. Lima	100%	63.160.000	DAU		100%	475.149.034

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dikelola dinas	Puluh kota						
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh kota	28 unit	58.410.000	DAU		28 unit	147.048.409
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh kota	20 unit	4.750.000	DAU		20 unit	125.600.625
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh kota	2 unit	0	DAU		2 unit	202.500.000
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi		10%	0			10%	15.000.000
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Lima Puluh kota	6 Unit Usaha	0	DAU		6 Unit Usaha	15.000.000

					Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat		10%	0	DAU		10%	75.010.000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah KSP/USP yang Sehat		60 KSP/USP	0	DAU		60 KSP/USP	75.010.000
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Lima Puluh kota	60 unit usaha	0	DAU		50 unit usaha	55.010.000
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Lima Puluh kota	15 unit usaha	0	DAU		50 unit usaha	20.000.000
2	17	05			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan		10%	247.085.000			10%	450.000.000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	Kab. Lima	8 kegiatan	247.085.000			8 kegiatan	450.000.000

					Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Puluh Kota						
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Lima Puluh kota	120 orang	247.085.000	DAU		55 orang	250.000.000
2	17	06			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan skala Usahanya		20%	0			20%	116.510.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Kab. Lima Puluh kota	15 Koperasi	0	DAU		15 Koperasi	116.510.000
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Lima Puluh kota	158 keluarga	0	DAU		158 keluarga	60.000.000

2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Lima Puluh kota	125 unit usaha	0	DAU		125 unit usaha	56.510.000
2	17	07			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan		20%	264.085.000			20%	1.513.190.000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro	Kab. Lima Puluh kota	4 kegiatan	264.085.000	DAU		4 kegiatan	1.513.190.000
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh	10 unit usaha	0	DAU		10 unit usaha	380.000.000

							kota						
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Lima Puluh kota	150 unit usaha	0	DAU		150 unit usaha	380.000.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh kota	150 unit usaha	0	DAU		150 unit usaha	35.000.000
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lima Puluh kota	1 dokumen	81.000.000	DAU		5 dokumen	518.190.000
2	17	08			Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan		20%	0			20%	750.000.000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	Kab. Lima Puluh kota	150 unit usaha	0	DAU		150 unit usaha	750.000.000
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Lima Puluh	150 unit usaha	0	DAU		150 unit usaha	750.000.000

							kota						
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				43.760.000				1.460.270.000
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izinnya		10%	0			10%	75.010.000
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	Kab. Lima Puluh kota	13 kecamatan	0	DAU		13 kecamatan	75.010.000
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Lima Puluh kota	3 dokumen	0	DAU		3 dokumen	75.010.000
3	30	03			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi		11%	0	DAU		11%	753.350.000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	Kab. Lima Puluh kota		0	DAU			721.850.000
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh	6 unit	0	DAU		6 unit	721.850.000,

							kota						
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	Kab. Lima Puluh kota	20%	0	DAU		20%	31.500.000
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Lima Puluh kota	1 dokumen	0	DAU		1 dokumen	31.500.000
3	30	04			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		20%	0			20%	100.730.000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Kab. Lima Puluh kota	9 jenis sembako	0	DAU		9 jenis sembako	100.730.000
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Lima Puluh kota	264 laporan	0	DAU		264 laporan	99.697.300

3	30	05			Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten		40%	21.500.000			60%	185.960.000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh kota	kegiatan	21.500.000	DAU		kegiatan	185.960.000
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Lima Puluh kota	4 pelaku usaha	0	DAU		2 pelaku usaha	35.000.000
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang lokal	Kab. Lima Puluh kota	10 pelaku usaha	21.500.000	DAU		5 pelaku usaha	25.000.000
3	30	06			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan		100%	22.260.000			100%	394.180.000

3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	Kab. Lima Puluh kota	13 pasar	22.260.000	DAU		13 pasar	394.180.000
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Lima Puluh kota	600 unit	22.260.000	DAU		13 unit	224.180.000
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Lima Puluh kota	60 orang	0	DAU		13 orang	170.000.000
3	30	07			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri		100%	0			100%	156.970.000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negerin yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh kota	4 kegiatan	0	DAU		4 kegiatan	156.970.000
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab. Lima Puluh	6 UMKM	78.285.000	DAU		6 UMKM	77.000.000

					Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	kota						
TOTAL									4.200.251.405				10.126.298.985

Berikut ini adalah rencana kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 :

Tabel 4.2

Rencana Target Kinerja IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	20%	25%	
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	20%	25%	
3	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	30%	40%	
4	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	33%	44%	
5	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	

Sedangkan rencana kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1.1		Persentase Koperasi aktif	66,20	69,12	

1.2		Jumlah Koperasi Aktif	143	150	
1.3		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	828.547,5	911.402,25	
1.4		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3,94	4,94	
1.5		Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	28,6	29,25	
2.	Perdagangan				
2.1		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	45	50	

Tabel 4.4

**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program,
Kegiatan Tahun 2024**

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	3.345.231.405	5.946.318.985	4	3.345.231.405	5.946.318.985
2	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	511.170.00	2.719.710.000	2	511.170.00	2.719.710.000
3	Urusan Perdagangan	2	43.760.000	1.460.270.000	2	43.760.000	1.460.270.000
	Total	5	4.200.251.405	10.126.298.985	8	4.200.251.405	10.126.298.985



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

14. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU.....	8 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Rentra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
3.1.1. Kementerian Perindustrian.....	58
3.1.2. Kementerian Tenaga Kerja.....	63
3.1.3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	64
3.1.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar	65
3.1.5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	69
3.2.1. Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026.....	69
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun 2024.....	74
3.3. Program dan Kegiatan	75
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	28
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	29
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja	31
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	38
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	73
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan pada Setiap OPD	75
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	76
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian	77
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi	77
Tabel 3.6	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2022).....	78
Tabel 3.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	80
Tabel 4.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2024.....	92
Tabel 4.2	Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	92
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 definisi umum Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil

Pembangunan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke lima dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini merupakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja yang dimulai dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Oleh karena itu, menindaklanjuti amanat pasal 138-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2024.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan APBD. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026 dengan memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang mendukung Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan serta subkegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta subkegiatan pada tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta subkegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu

Bab ini penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 3.3 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini penjelasan tentang Rencana kerja tahun 2024 dan rencana pendanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan untuk tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dengan berpedoman kepada APBD tahun 2023. Bab ini juga menjelaskan evaluasi Renstra 2021-2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Renstra disesuaikan dengan laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.1 :
(Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	3			Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	3	2,01		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	707 orang	NA	102 orang	102 orang	100%	96 orang	198 orang	28%
2	7	4			Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,01		Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,01	1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	30 orang	NA	5 orang	5 orang	100%	5 orang	10 orang	33%

2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	12000 orang	NA	2000 orang	1223 orang	61%	2000 orang	3223 orang	27%
2	7	4	2,01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 orang	NA	20 orang	-	-	-	-	-
2	7	4	2,03		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,03	3	Job fair/ bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	NA	100 orang	-	-	-	-	-
2	7	4	2,05		Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	-	33 orang	NA	3 orang	-	-	-	-	-
2	7	5			Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2,01		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2.01	1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	49 perusahaan	NA	9 perusahaan	22 perusahaan	244%	5 perusahaan	27 perusahaan	55%
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	49 perusahaan	NA	9 perusahaan	7 perusahaan	78%	5 perusahaan	12 perusahaan	24%

2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
2	7	5	2,02		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 perkara	NA	10 perkara	1 perkara	10%	9 perkara	10 perkara	17%
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	17%
3	31	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 laporan	NA	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	14 laporan	33%
3	31	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 laporan	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	33%

3	31	1	2,02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	31	1	2,02	4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	1	2,05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,05	5	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 laporan	NA	-	-	-	1 laporan	1 laporan	20%
3	31	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	20%
3	31	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	NA	60 orang	60 orang	100%	-	60 orang	20%
3	31	1	2,06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	33%
3	31	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	NA	-	-		1 paket	1 paket	33%

3	31	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	33%
3	31	1	2,07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 paket	NA	-	4 paket	-	-	4 paket	200%
3	31	1	2,08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	NA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	33%
3	31	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	NA	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	33%
3	31	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	33%
3	31	1	2,09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90 unit roda 2, 12 roda 4	NA	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	100%	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	30 unit roda 2, 4 unit roda 4	33%

3	31	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	NA	16 unit	16 unit	100%	12 unit	28 unit	29%
3	31	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	33%
3	31	2			Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	2	2,01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	NA	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	138 Merek/Halal, 340 IKM	NA	26 Merek/Halal, 40 IKM	29 Merek/halal, 50 IKM	112%, 125%	26 Merek/Halal, 60 IKM	55 Merek/halal, 110 IKM	40%. 32%
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	82 kelompok	NA	11 kelompok	11 kelompok	100%	15 kelompok	26 kelompok	32%
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 laporan, 380 IKM	NA	1 laporan, 20 IKM	1 laporan, 20 IKM	100%	1 laporan, 80 IKM	2 laporan, 100 IKM	33%, 26%
3	31	2	2,01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	3			Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	-	NA	-	-	-	-	-	-

3	31	3	2,01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	3	2,01	1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	850 unit izin	NA	100 unit izin	716 unit izin	716%	100 unit izin	816 unit izin	96%
3	31	3	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	NA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	33%
3	31	4			Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	4	2,01		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-

3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	17%
3	31	4	2,01	2	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	18 event, 180 IKM, 6 kali	NA	3 event, 30 IKM, 1 kali	3 event	100%	3 event, 30 IKM, 1 kali	6 event, 30 IKM, 1 kali	17%
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		-	-	-	-	-	-	-	-
3	32	4			Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	32	4	2,01		Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	32	4	2,01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	200%
3	32	4	2,01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	200%

Sesuai Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Industri

Terdapat 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 9 (sembilan) subkegiatan pada urusan Industri. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut merupakan pendukung indikator kinerja tercapainya persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2022, seluruh program, kegiatan dan subkegiatan terealisasi 100%. Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas adalah 100%. Namun secara pencapaian realisasi keuangan pada tahun 2022 ini juga terjadi keterlambatan pembayaran terhadap beberapa pekerjaan akibat tidak tersedianya dana pada kas daerah, sehingga pembayaran pekerjaan tersebut dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2023.

Walaupun Indikator kinerja telah tercapai masih terdapat pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan produk IKM yang berkualitas. Selain itu, dalam membina IKM untuk pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagkop dan UKM, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM masih kurang dilakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM oleh beberapa instansi, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung dalam pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Subkegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan outputnya adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten (RPIK). Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan fashion ready to wear, pelatihan gambir murni, dan pelatihan peningkatan mutu makanan berbahan jeruk pasca panen. Semua indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah bantuan peralatan mesin jahit, peralatan jeruk, mesin hidrolik gambir, mesin pencacah pupuk, mesin pengolahan kopi, mesin penggiling kedelai, dan peralatan pengolahan makanan. Semua indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi halal dan merek, pelatihan GMP dan pelatihan digitalisasi dan manajemen. Semua indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM. Indikator terealisasi 100%.

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha industri. Pada tahun 2022 terdapat izin industri yang difasilitasi penerbitannya yaitu sebanyak 436 unit dalam bentuk NIB. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator terealisasi 100%.

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Sukegiatan Diseminasi, publikasi data informasi dan Analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS, indikator keluaran subkegiatan adalah terfasilitasi kegiatan Dekranasda (pameran, Musda Dekranasda, Gebyar IKM, Festival industrial kreatif), terlaksananya sosialisasi akses permodalan bagi 45 orang/IKM, dan terlaksananya bimtek promosi dan pemasaran.

2. Urusan Tenaga Kerja

Terdapat 3 (tiga) program (tiga) 3 kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan pada urusan Tenaga Kerja. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut bertujuan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja, selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022, seluruh pencapaian indikator program, kegiatan dan subkegiatan terealisasi 100%.

Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan baik dari segi penyiapan pencari kerja/tenaga kerja terampil/berkompetensi, produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan antar kerja dan penempatan tenaga kerja, serta peningkatan perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Subkegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yaitu pelatihan kewirausahaan bagi 60 orang, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK sebanyak 233 orang. Indikator terealisasi 100%.

- Program Penempatan tenaga kerja, kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota. Indikator Subkegiatan Pelayanan antar kerja, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pelayanan antar kerja yaitu pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK1), rekomendasi paspor CPMI, dan penerbitan tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK). Pada tahun 2022 penerbitan AK1 berjumlah 1696 unit, rekomendasi paspor CPMI sebanyak 183 orang.
- Program Hubungan industrial, kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. Subkegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator keluaran subkegiatan adalah terselesaikannya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Pada tahun 2021 terjadi perselisihan hubungan industrial sebanyak 1 (satu) kasus, 0 (nol) kasus mogok kerja dan 0 (nol) kasus penutupan perusahaan. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi sebanyak 1 (satu) kasus dapat diselesaikan melalui mediasi dinas.

3. Urusan Transmigrasi

Terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi. Capaian indikator kinerja pada urusan transmigrasi adalah 100%.

- Program Pengembangan kawasan transmigrasi, kegiatan Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian. Subkegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, indikator keluaran subkegiatan adalah jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi. Subkegiatan Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, indikator keluaran subkegiatan adalah jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pelayanan urusan industri, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dasar

hukum pelaksanaan pelayanan antara lain : Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, Permenakertrans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, dan Permenaker nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.

Selanjutnya, pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Untuk mewujudkan pembangunan Industri yang maju adalah melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Perindustrian sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional; demokrasi ekonomi; kepastian berusaha; pemerataan persebaran; persaingan usaha yang sehat; dan keterkaitan Industri. Adapun tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Agar tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dapat tercapai sesuai yang diharapkan, tentu harus didukung dengan pembangunan sumber daya Industri yang meliputi pembangunan sumber daya manusia; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

Sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang, terutama industri kecil menengah (IKM). IKM tersebar di kawasan pemukiman penduduk, seperti industri kecil pengolahan makanan, industri kerajinan dan sandang, serta aneka industri lainnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2022 adalah sebanyak 109 IKM atau sampai tahun 2022 IKM berjumlah 7.464 unit. Dari 109 IKM yang tumbuh tersebut sebagian besar IKM adalah IKM pengolahan makanan ringan, seperti : keripik ubi, kue kering, rendang dan sebagian kecilnya adalah industri kerajinan dan bordir. Hal ini menunjukkan bahwa IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2022.



Grafik 2.1 : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Di sektor industri berdasarkan data pengurusan perizinan IUI dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan walaupun tidak besar. Namun apabila dilihat kenyataannya di lapangan masih banyak IKM yang belum memiliki perizinan karena

masih menganggap bahwa perizinan tidak begitu penting bagi perkembangan usahanya. Padahal sebaliknya, perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan, dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja selama tahun 2022 terdapat 1696 pencari kerja yang diterbitkan AK1. Dari data penempatan tenaga kerja yang terdaftar tahun 2022, hanya sebesar 213 orang pencari kerja yang ditempatkan baik penempatan di dalam negeri maupun penempatan ke luar negeri. Penempatan tenaga kerja relative kecil, hal ini sesuai dengan penjelasan diatas. Pelayanan lainnya di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian informasi bursa kerja *online*, pengawasan dan perlindungan perusahaan dan tenaga kerja.

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota)

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKD (IKD Dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0618	0,0667	0,0731	0,0807	0,0879	0,0649	0,0731	0,0807	-
2	-	-	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	10	10	12	0	10	10	-
3	-	-	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	10	10	7	0	10	10	-
4	-	-	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	400	400	500	550	67	213	500	550	-
5	-	-	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	5500	6000	6500	7000	-	4253	6500	7000	-
6	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	180	180	82	208	180	180	-
7	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	70	70	-	-	70	70	-
8	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	60	90	90	20	60	90	90	-
9	-	-	Angka partisipasi angkatan kerja	54,3	54,78	55,27	55,75	53,28	-	55,27	55,75	-
10	-	-	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,81	72,92	73,02	73,13	71,33	74,54	73,02	73,13	-
11	-	-	Tingkat pengangguran terbuka	2,82	2,73	2,57	2,44	2,25	3,72	2,57	2,44	-
12	-	-	Rasio penduduk yang bekerja	98,83	98,85	98,88	98,9	97,75	-	98,88	98,9	-
13	-	-	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	73,4	74,4	75,4	76,4	-	-	75,4	76,4	-
14	-	-	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	78,83	78,93	79,03	79,13	-	-	79,03	79,13	-

Dalam urusan industri indikator kinerja daerah yang ditetapkan adalah cakupan bina kelompok pengrajin dimana target dari tahun 2021-2024 yaitu 6,18%, 6,67%, 7,31% dan 8,07%. Dengan realisasi tahun 2021 sebesar 8,79% dan tahun 2022 sebesar%. Proyeksi dari tahun 2023-2024 sebesar 7,31% dan 8,07%. Terdapat 13 indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada urusan tenaga kerja baik dari angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) diharapkan tidak meningkat pada tahun 2021-2024, pada tahun 2022 tidak terjadi kasus-kasus tersebut. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek diharapkan dapat meningkat pada tahun 2021-2024, namun dalam realisasinya pada tahun 2022 jumlah pekerja yang terdaftar ditempatkan hanya sebesar 213 orang, realisasi pada tahun 2023 hingga bulan juni sebanyak orang. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat pelatihan diharapkan dapat dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2021-2024, namun pada realisasinya pada tahun 2022 hanya ada 60 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Realisasi angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022 hampir mendekati target yaitu sebesar 53,28% dan 71,33 % dengan target sebesar 54,3% dan 72,81%. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat menurun dari tahun 2021-2024, namun realisasi pengangguran terbuka masih hampir memenuhi target yaitu sebesar %. Rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, realisasinya pada tahun 2022 rasio penduduk yang bekerja hampir memenuhi target sebesar 97,75% sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum terealisasi. Pada halaman berikut ini disajikan Tabel 2.3 mengenai analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	36,18	52,14	68,09	2,21	12,56	52,14	68,09	-
2	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	6,46	6,62	6,75	6,88	-	6,47	6,75	6,88	-
		Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	5,50	7,42	10,02	5,63	6,48	7,42	10,02	-

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan penempatan tenaga kerja, target untuk lima tahun adalah 3.100 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Target tahun 2022 adalah sebesar 36,18% atau sekitar 1.121 orang, yang ditempatkan sangat kecil yaitu sebanyak 213 orang atau sebesar 19%. Salah satu penyebabnya adalah banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja. Program kegiatan untuk penempatan tenaga kerja tidak terlaksana, selain itu faktor dari luar yang sangat dominan adalah banyak perusahaan yang tidak menerima lowongan bahkan banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Baik itu lowongan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Selama tahun 2022 penempatan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri dan luar negeri terjadi penurunan, bahkan kondisi ini telah terjadi dari tahun 2020 sejak dimulainya pandemi covid 19. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain melalui penempatan diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri cukup banyak. Karena minat pencari kerja berwirausaha cukup baik. Pada tahun 2022 pencapaian indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%) yaitu sebesar%. Untuk indikator persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%) terealisasi pada tahun 2022 sebanyak % dimana sebanyak IKM dari 7355 IKM dan pada tahun 2023 hingga Juni 2023 terdapatIKM dari yang mengalami peningkatan produk berkualitas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 :
Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan IKM	1. Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM	1. Masih kurangnya jumlah IKM yang dilatih 2. Masih kurangnya jenis pelatihan teknis dan non teknis IKM 3. Masih kurangnya produk IKM yang memiliki merek dan label halal 1. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi IKM 2. Masih kurangnya jumlah fasilitasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas 3. Masih kurangnya keikutsertaan IKM dalam promosi/pameran 4. Kurangnya jumlah IKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan
2.	Belum Optimalnya penempatan tenaga kerja	1. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja 2. Masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja	1. Belum adanya RTKD 2. Belum optimalnya jumlah pencari kerja terlatih yang berkompetensi 1. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja 2. Belum optimalnya pelaksanaan job fair/bursa kerja 3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja
3.	Belum optimalnya pengembangan transmigrasi	1. Masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi	1. Belum optimalnya identifikasi potensi kawasan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM, masih kurangnya sarana dan prasarana IKM, masih kurangnya kualitas tenaga kerja, masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja dan masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2022 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD.

Penerapan aplikasi SIPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana.

2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui Whatsapp group.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan.

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi atau kemampuan. Peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari sektor industri, sektor tenaga kerja dan dari sektor transmigrasi.

1. Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada dibawah ini. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 8,21 % menurun menjadi 7,19 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, Mengadakan kegiatan temu bisnis dan peningkatan akses permodalan dengan mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

2. Dari sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tren yang menurun sampai tahun 2019 dan naik di tahun 2020. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 2,60 persen dan turun menjadi 2,30 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 3,03 persen di tahun 2020. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini lebih disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) dari tahun 2016-2019 selalu tumbuh walaupun melambat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi, dimana laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja minus 3,75%. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid- 19 yang melanda Indonesia dan dunia.

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 disajikan antara lain angka sangketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian Bersama, keselamatan dan perlindungan, kepersertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, tenaga kerja yang mendapat

kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan.

3. Dari sektor transmigrasi yaitu telah tersedianya kawasan/lokasi transmigrasi di Nagari Galugur, Nagari Muaro Peti, Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Nagari Tanjung Baliak Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Tantangan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM, meningkatnya produk yang masuk ke wilayah Lima Puluh Kota dengan kualitas dan harga kompetitif di banding produk lokal, pengembangan hilirisasi produk lokal masih kurang/rendah, sikap mandiri dan kesungguhan masyarakat dalam berusaha/berbisnis masih kurang/rendah. Tantangan dari sektor tenaga kerja yaitu SDM Angkatan kerja belum optimal dalam penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu dan keterampilan yang dimiliki, persaingan yang ketat pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Tantangan dari sektor transmigrasi yaitu kurangnya sarana dan fasilitas penunjang di daerah baru, seperti jalan/akses ke lokasi transmigrasi dari ibukota kabupaten/kecamatan tidak memadai, kendaraan sulit menempuh jalannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementerian/Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami trend melambat, dan pada tahun 2020 jatuh menjadi -1,16 %. Jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,66 % per tahun dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26% per tahun. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima

Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi
- Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha
- Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.

b. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional;
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas;
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

c. Belum terwujudnya daya saing produk industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri, produk kita masih rendah daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk

pangan, kerajinan anyaman mansiang, tas, sulaman, tenun dan bordir serta aneka industri lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

d. Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan

Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang dalam proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang dihasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide yang brilian untuk menjadikan dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya dengan meningkatkan kegiatan usaha industri yang berbasiskan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini.

e. Lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang terbatas, akses informasi lapangan kerja sulit, serta rendahnya kualitas angkatan kerja/rendahnya keterampilan/skill tenaga kerja. Faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan yaitu kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi globalisasi, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

f. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang berperan dalam urusan industri, tenaga kerja dan transmigrasi diharapkan dapat

meningkatkan kinerja sehingga diperlukan kerjasama semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil alasan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.5 (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut.

Tabel 2.5 :
(Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	20%	5.180.494.157	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	20 %	3.747.227.687	-
I.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20%	76.309.500	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20 %	29.051.000	-
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15.049.400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8.520.000	-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	10.059.800	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.138.800	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
4	Koordinasi dan	Kab.Lima	Jumlah Dokumen	1 dokumen		Koordinasi dan	Kab.Lima	Jumlah Dokumen	-	-	-

	penyusunan DPA-SKPD	Puluh Kota	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		13.443.900	penyusunan DPA-SKPD	Puluh Kota	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.125.900	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.115.200	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	13.966.000	-
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.376.500	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	6.565.000	-
I.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.122.781.557	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.702.247.687	-
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	3.088.448.357	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	2.687.247.087	-
2	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	7.039.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	5.000.300	-
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.062.300	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000	-

4	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.094.600	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.135.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-
6	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.001.700	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.300	-
I.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	140.004.100	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62.086.000	-
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	26.043.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	6.500.000	-
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	32.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	22.500.000	-
3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	10.543.100	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
4	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	8.226.000	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	4.954.000	-
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	53.392.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	20.092.000	-

6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	9.300.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	8.040.000	-
1.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	350.461.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	183.068.000	-
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.018.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.022.000	-
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.135.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	49.847.400	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	24.757.000	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	38.266.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21.619.000	-
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	5.875.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	45.015.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.000.000	-
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	185.304.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	101.670.000	-
1.5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	849.142.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109.000.000	-

1	Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	428.700.000	Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	40.000.000	-
2	Pengadaan mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	45.090.000	Pengadaan mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	20.000.000	-
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	50.300.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	49.000.000	-
4	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	325.052.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
I.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	418.020.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	500.120.000	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	7.000.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	50.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	50.800.000	-
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	359.520.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	442.320.000	-

I.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terpeliharayan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	223.776.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terpeliharayan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	161.655.000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	161.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	126.655.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	35.040.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	15.000.000	-
	Pemeliharaan/reha bilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	2 unit	26.936.000	Pemeliharaan/reha bilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 unit	20.000.000	-
II	Program : Perencanaan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	100%	150.000.000	Program : Perencanaan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	100%	175.000.000	-
II.1	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	100%	150.000.000	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	100%	175.000.000	-
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	175.000.000	-
III	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	40%	337.833.300	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	40%	696.000.000	-
III.1	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	40%	337.833.300	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	40%	661.000.000	-
1	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan kompetensi Pada Tahun n	105 orang	304.044.100	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	661.000.000	-

	kompetensi					klaster kompetensi					
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	33.789.200	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	-	-
III.2	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	-	-	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	20.000.000	-
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 Perusahaan	20.000.000	-
III.3	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	-	-	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	100%	15.000.000	-
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 dokumen	15.000.000	-
IV	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	100%	209.209.100	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	52,14%	700.000.900	-
IV.1	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	100%	50.248.800	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	52,14%	400.000.700	-
1	Penyediaan	Kab.Lima	Jumlah SDM	5 orang		Penyediaan	Kab.Lima	Jumlah SDM	-	-	-

	sumber daya pelayanan antar kerja	Puluh Kota	Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi		10.133.000	sumber daya pelayanan antar kerja	Puluh Kota	Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi			
2	Pelayanan antar kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 orang	25.039.000	Pelayanan antar kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 orang	50.000.000	-
3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	10.000.000	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	50.000.000	-
4	Perluasan kesempatan kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	70 orang	200.000.000	Perluasan kesempatan kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	70 orang	300.000.700	-
IV.2	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	100%	150.899.500	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	52,14%	300.000.100	-
1	Job fair/ bursa kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	150.899.500	Job fair/ bursa kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	300.000.100	-
IV.3	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	52,14%	8.060.800	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	52,14%	10.000.100	-
1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	8 Orang	8.060.800	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	8 orang	10.000.100	-
V	Program : Hubungan Industrial	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan	100%	69.100.000	Program : Hubungan Industrial	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan	100%	73.037.300	-

			hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota					industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota			
V.1	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Peraturan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	100%	24.000.000	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Peraturan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	100%	33.037.300	-
1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	6 perusahaan	8.500.000	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	-	-
2	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	6 perusahaan	8.500.000	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-
3	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	7.000.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 dokumen	33.037.300	-
V.2	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di	100%	45.100.000	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab.	100%	40.000.000	-

	Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota		Kab. 50 Kota			Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota		50 Kota			
1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 perkara	9.000.000	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 perkara	20.000.000	-
2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	9.000.000	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	-	-
3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	8.500.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	20.000.000	-
4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	10.100.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	-	-
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	8.500.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-

VI	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	100%	940.796.300	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	7,42%	2.583.073.100	-
VI.1	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan Industri Kab. 50 Kota	100%	940.796.300	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan Industri Kab. 50 Kota	100%	2.583.073.100	-
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-	-
2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	375.010.800	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	599.999.600	-
3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	65.765.400	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1.295.159.000	-
4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	450.001.900	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	638.001.100	-
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	50.018.200	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	49.913.400	-
VII	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	100%	34.550.000	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	100%	60.001.750	-

VII.1	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	-	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	60.001.750	-
1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	-	-	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	30.004.300	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	29.997.450	-

			Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota								
VIII	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	417.996.300	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	575.343.700	-
VIII.1	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	417.996.300	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	575.343.700	-
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	35.969.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	120.507.200	-
2	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	382.027.300	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	454.836.500	-
IX.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	70%	449.989.900	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	70%	134.974.400	-
IX.1	Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	449.989.900	Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	134.974.400	-

	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 kepala keluarga	45.115.600	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 kepala keluarga	74.980.400	-
	Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 pemukiman	404.874.300	Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 pemukiman	59.994.000	-
	JUMLAH				7.605.419.057	JUMLAH				8.754.658.837	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2024, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2024. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang* 2024, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2024.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2024. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program unggulan pembangunan daerah untuk tahun 2024;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;
3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.6
Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	-	-
I.1	Kegiatan: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	-	Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih	-	-
I.1.1	Subkegiatan:Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, tekhnisi sepeda motor dan calon anggota Polri	-	-
	Bantuan peralatan mesin pengering kerupuk untuk IKM makanan ringan	Nagari Situjuh Gadang Jrg Tanjuang Simantuang dan Tanjuang Bungo	-	-	-
	Pelatihan teknisi komputer bagi pencari kerja	Nagari Pandam Gadang	-	-	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari Andiang	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Sunga Beringin	-	1 Paket	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Gunuang Malintang	-	50 org	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Tanjuang Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Tanjuang Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan teknisi komputer bagi pencari kerja	Tanjuang Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Tanjung Pauh, Pangkalan Koto Baru	-	-	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari Lubuak Batingkok	-	-	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Koto Tangah Bukik Barisan	-	1 paket	-

	Pelatihan teknisi las listrik bagi pencari kerja	Labuah Gunuang, Lareh Sago Halaban	-	50 org	-
	Bimbingan teknis pemasaran online	Nagari VII Koto Talago, Guguak	-	-	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Baruah Gunung, Bukik Barisan	-	2 paket	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Koto Baru Simalanggang	-	18 org	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Koto Baru Simalanggang	-	1 paket	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, Mungka	-	16 org	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, Mungka	-	16 org	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Simpang Sugiran, Gugak	-	-	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Simalanggang	-	-	-
	Bimbingan teknis pemasaran online	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	-	16 org	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	-	16 org	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Solok Bio-bio , Harau	-	-	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Solok Bio-bio , Harau	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari VII Koto Talago, Guguak	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Anak nagari VII Koto Talago (DU.RKP No. 146), Guguak	-	-	-

Beberapa program/kegiatan/subkegiatan dari musrenbang yang tertampung dalam Renja 2024 yaitu pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja 1 paket, pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja sebanyak 50 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja 1 paket , pelatihan teknisi las listrik bagi pencari kerja sebanyak 50 orang, pelatihan produk furniture sebanyak 1 paket, pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja sebanyak 2 paket, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 18 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 1 paket, pelatihan pengolahan gambir murni/ katechin tinggi sebanyak 20 orang, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 16 orang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKP tersebut mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2024 yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Selain itu telah ditetapkan juga sasaran pembangunan pada tahun 2024, yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3% - 5,7%; 2) Tingkat kemiskinan 6,5 – 7,5 %; 3) Tingkat pengangguran terbuka 5,0% - 5,7%; 4) Nilai tukar nelayan 107 – 110 poin; 5) Rasio gini 0,374-0,377 poin; 6) Indeks pembangunan manusia (PIM) 73,99-74,02 poin; 7) Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 %; dan 8) Nilai tukar petani 105-108 poin.

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksi berkisar 5-3-5,7 % dengan proyeksi pertumbuhan di Kawasan barat Indonesia berkisar 5,0-5,4 % dan Kawasan timur 6,5-7,3 %.

3.1.1 Kementerian Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus

pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut :

1. Penguatan Struktur Industri, dilaksanakan melalui:

- Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu
- Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global
- Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi
- Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis

2. Penguasaan Teknologi

- Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
- Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi
- Pengembangan Industri Hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi
- Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi
- Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum;
- Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi;
- Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional;
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan;
- Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi dan Handal;
- Peningkatan Kualitas Kehumasan;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja; dan
- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu;
- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;

- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
 - Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;
 - Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
 - Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
 - Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri;
 - Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau;
 - Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri;
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar;
 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand;
 - Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - Sertifikasi Industri.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan Kompetensi ASN.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan,

Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran strategis pertama yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran strategis kedua yang akan dicapai adalah :

- a. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- b. Kemampuan Industri Dalam Negeri dengan indikator kinerja
- c. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri dengan indikator kinerja
- d. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- e. Meningkatnya Persebaran Industri dengan indikator kinerja

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

- a. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- c. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- d. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
- e. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
- f. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

- g. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

3.1.2 Kementerian Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

- 1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
- 2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
- 3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
- 4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
- 5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
- 7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
- 8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
- 9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Memasuki pembangunan tahun 2020-2024, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran;
- 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja telah menyusun Renstra Tahun 2020–2024 dengan program dan kegiatan, yakni :

- 1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.

2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.

3.1.3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satu dari 3 Kabupaten tujuan transmigrasi di Propinsi Sumatera Barat, dimana lokasi transmigrasi berada di Nagari Galugur.

- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder.

3.1.4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945

khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berada pada misi ke 4 yaitu *Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital*. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing yang berbasis digital.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan SIINas

Untuk mendukung visi, misi dan program gubernur tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dengan memfokuskan kepada peningkatan pasar produk dalam negeri, mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, peningkatan eksportir daerah dan negara tujuan ekspor, stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar serta peningkatan standar dan mutu produk potensial.

2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah

Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat dengan memfokuskan pada peningkatan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat serta peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah.

3. Meningkatkan kinerja organisasi.

Menekankan kepada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, peningkatan kualitas penatausahaan keuangan, dan peningkatan pengawasan internal organisasi.

3.1.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan data yang ada dan tercantum pada RPJMD, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.

Laju penurunan TPT Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir juga lebih baik daripada Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari grafik di atas. Walaupun TPT Sumatera Barat terus membaik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera

Barat hingga tahun 2020 masih relatif tinggi apabila dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. TPT Sumatera Barat sebesar 6,88% sebenarnya lebih baik dibandingkan TPT Indonesia sebesar 7,07% pada tahun 2020, namun Sumatera Barat berada pada peringkat 27 berdasarkan urutan per Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, TPT merupakan masalah pokok yang dialami Sumatera Barat.

2. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor perkabupaten

Setiap tahunnya, Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Salah satu indikatornya yakni terkait Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja. Pada tahun 2019 mempunyai indeks untuk produktivitas tenaga kerja atau berada pada peringkat berdasarkan urutan per Provinsi se-Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Sumatera Barat masih rendah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada tingkat Provinsi ini dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja dari berbagai sector per Kabupaten/Kota.

3. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja adalah karena rendahnya kemampuan angkatan kerja. Secara keseluruhan Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya kemampuan angkatan kerja, utamanya karena mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hal ini juga terjadi di Sumatera Barat, Pada tahun 2020 dari 1.062.118 orang yang bekerja, sebanyak 826.412 orang atau sebesar 77,81% merupakan tamatan SMA/SMK ke bawah dan hanya 22,19% yang menamatkan jenjang Pendidikan Diploma ke atas.

4. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship).

Rendahnya angka jiwa kewirausahaan terlihat dari porsi angkatan kerja bekerja yang berusaha sendiri lebih kecil angkatan kerja yang bekerja sebagai pegawai. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat pada tahun 2020, hanya 1.096.508 orang yang berusaha/berwirausaha atau sebesar 42,81% dari 2.561.524 orang penduduk angkatan kerja.

5. Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.

6. Kuota penempatan transmigran asal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas.

7. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya serapan tenaga kerja dengan indikator Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan
- b. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun.
- c. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator Indeks kemandirian kawasan transmigrasi.
- d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan sektor IKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan di sektor IKM ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri, dengan indikator :

- Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)
- Persentase produk IKM yang berkualitas (%)

2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kompleks, seperti besarnya jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah lembaga pelatihan kerja yang masih sangat kurang, dan masih kurangnya kesejahteraan para pekerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dengan indikator :

- Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatkan nilai SAKIP, dengan indikator :

- Hasil reviu Inspektorat

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu,

perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1 :
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1 Meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri	1.1 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,46	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14
			1.2 Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	3,65	5,50	7,42	10,02	13,32	16,68
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.1 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	36,18	52,14	68,09	84,05	100,00

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab 2, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kontribusi industri dan ketenagakerjaan dalam struktur perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas produk industri rumah tangga dan IKM
3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan *holding company* pada pasar industri pengolahan
4. Meningkatnya tenaga kerja yang siap pakai dan profesional pada bursa pencari kerja
5. Meningkatkan informasi peluang/kesempatan kerja bagi pencari kerja
6. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas industri
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
3. Meningkatnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing dipasar bebas
4. Meningkatnya produksi produk kreatif
5. Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi daerah
6. Meningkatnya kemampuan tenaga kerja mandiri bagi wira usaha baru
7. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026. Selain itu,

yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2024 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.*

Penelaahan faktor faktor yang menghambat ataupun mendorong kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dihasilkan urusan prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
2. Urusan Tenaga Kerja
3. Urusan Industri
4. Urusan Transmigrasi

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitasi kunjungan tamu 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan mebel 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor
5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

6.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
7.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel 3.3
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
5.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelayanan antar kerja

Tabel 3.4
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Nasional Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencanan pembangunan industri
3.	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	1. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Tabel 3.5
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 7 program dengan 13 kegiatan dan 28 subkegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut rencana kerja dan

pendanaan anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

Tabel 3.6
T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Melampaui	-	Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja meningkatkan kualitas IKM ... Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Sudah Tercapai	Mediasi Dinas sudah baik namun belum optimal	
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Sudah Tercapai	Mediasi Dinas sudah baik namun belum optimal	
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Belum Tercapai	Masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek			
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
9	Angka partisipasi angkatan kerja			
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja			
11	Tingkat pengangguran terbuka			
12	Rasio penduduk yang bekerja			
13	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas			
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja			-

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok pengrajin telah melampaui target hal ini dikarenakan adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja meningkatkan kualitas IKM di Lima Puluh Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun melebihi target dimana target yang ditetapkan adalah 10 kasus sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kasus, namun kedepannya diharapkan angka sengketa semakin berkurang. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2022 0 kasus namun masih diperlukan mediasi secara optimal dari dinas. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek, besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum mencapai target hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota.

Oleh karena itu, pada Renja 2024 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja. Kesempatan mencapai ketertinggalan indikator kinerja pada tahun 2024 ini. Berikut ini adalah Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 Rumusan⁴ dan prakiraan maju tahun 2025 berdasarkan nomenklatur baru.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 202.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	3.747.227.687	4.989.587.357	7	3.747.227.687	4.989.587.357
2	Urusan Tenaga Kerja	4	1.654.038.200	1.016.810.000	9	1.654.038.200	1.016.810.000
3	Urusan Industri	3	3.218.418.550	3.735.848.950	3	3.218.418.550	3.735.848.950
4	Urusan Transmigrasi	1	134.974.400	89.540.000	1	134.974.400	89.540.000
	Total	7	6.871.861.095	8.194.090.357	13	6.871.861.095	8.194.090.357

Rencana target kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2023	2024	
1	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industry	1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75	6,88	IKU KD/IKU OPD
		2. Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	7,42	10,02	IKU OPD
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	52,14	68,09	IKU OPD

Berdasarkan tabel diatas sasaran untuk meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri pada indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB memiliki target pada tahun 2022 sebesar 6,62% dan pada tahun 2023 memiliki target sebesar 6,75%, sedangkan pada indikator persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas memiliki target pada tahun 2022 sebesar 5,50% dan pada tahun 2023 sebesar 7,42%. Pada sasaran dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase peningkatan penempatan tenaga kerja memiliki target pada tahun 2022 sebesar 36,18% dan pada tahun 2023 memiliki target 52,14%. Rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Urusan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0731	0,0807	RPJMD 2021-2026
2	Urusan Tenaga Kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	RPJMD 2021-2026
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	RPJMD 2021-2026
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	550	RPJMD 2021-2026
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	6500	7000	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	90	90	RPJMD 2021-2026
		Angka partisipasi angkatan kerja	55,27	55,75	RPJMD 2021-2026
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,02	73,13	RPJMD 2021-2026
		Tingkat pengangguran terbuka	2,57	2,44	RPJMD 2021-2026
		Rasio penduduk yang bekerja	98,88	98,9	RPJMD 2021-2026
		Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	75,4	76,4	RPJMD 2021-2026
		Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	79,03	79,13	RPJMD 2021-2026

Terdapat 14 target kinerja pelayanan yang akan dicapai pada tahun 2022 dan 2023. Dalam urusan industri indikator cakupan bina kelompok pengrajin memiliki target pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,31% dan 8,07%. Dalam urusan tenaga kerja indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun diharapkan hanya ada 10 perkara pada tahun 2022 dan 2023. Indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2022-2023 sebanyak 10 kasus. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022-2023 sebesar 500 orang dan 550 orang. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2022-2023 sebanyak 6500 orang dan 7000 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2022-2023 sebanyak 180 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2022-2023 sebanyak 70 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2022-2023 sebanyak 90 orang. Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 55,27% dan 55,75%. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 73,02% dan 73,13%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022-2023 2,57% dan 2,44%. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2022-2023 sebesar 98,88% dan 98,9%. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022-2023 sebesar 75,4% dan 76,4%. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 79,03% dan 79,13%.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						6.871.861.095,00							8.194.090.357,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.510.512.600,00							1.397.600.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.510.512.600,00							1.397.600.000,00	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	-			60 %	40.000.000,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	-			0 %	40.000.000,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pemeritah daerah/aparatur, pencari kerja dan tenaga kerja	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pemeritah daerah/aparatur, pencari kerja dan tenaga kerja		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	-			60 %	2.460.512.600,00						-	724.100.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	-			100 %	2.460.512.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja	-	649.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				90 Orang	2.460.512.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				1 Lembaga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		274.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab 50 Kota	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Tenaga Kerja	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Tenaga Kerja		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja</i>	-			68.09 %	10.000.000,00						-	570.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota</i>	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja	-	270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>				5 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				500 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				70 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	-			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	-			100 %	0,00						-	103.500.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di Kab 50 Kota	-			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan	-	38.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				6 Perusahaan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan		11.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kab 50 Kota	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan dan tenaga kerja	-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				9 Perkara	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan dan tenaga kerja		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				9 Perkara	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan dan tenaga kerja		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan dan tenaga kerja		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.455.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		12.456.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	2.940.674.895,00			-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur	-	3.555.448.357,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.930.674.895,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		3.508.448.357,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	12.581.000,00			-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur	-	155.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				60 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		36.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	2.529.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	10.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-			100 %	99.503.800,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur	-	270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		43.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	29.924.000,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	14.924.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	90.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur	-	228.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		13.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur		160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	52.707.800,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur dan masyarakat	-	226.936.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	32.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	9.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur dan masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	10.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Aparatur dan masyarakat		46.936.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas</i>	-			10.02 %	70.000.100,00						-	1.379.890.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota</i>	-			100 %	70.000.100,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	IKM dan Pemerintah Daerah	-	1.379.890.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	IKM dan Pemerintah Daerah		325.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	IKM dan Pemerintah Daerah		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	44.573.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	IKM dan Pemerintah Daerah		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	15.426.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	IKM dan Pemerintah Daerah		54.890.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	-			100 %	50.000.000,00						-	408.510.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI di Kab 50 Kota	-			100 %	50.000.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Sektor Industri	-	408.510.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Sektor Industri		58.510.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Sektor Industri		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						1.000.001.000,00							110.000.000,00	
1.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian	-			80 %	1.000.001.000,00						-	110.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pengembangan wilayah transmigrasi	-			100 %	1.000.001.000,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	masyarakat transmigrasi	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				10 Kepala Keluarga	1.000.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	masyarakat transmigrasi		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	masyarakat transmigrasi		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H							6.871.861.095,00							8.194.090.357,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
BAB. II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	17
BAB. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	55
BAB. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kalender Penyusunan Renja.....	3
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	19
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah	39
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	41
5. Review Terhadap RKPD.....	53
6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	54
7. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	58
8. Program dan kegiatan disetiap OPD	60
9. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika....	61
10. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik.....	62
11. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Persandian	62
12. Identifikasi permasalahan.....	63
13. Rencana Program dan Kegiatan.....	64
14. Rencana Target Kinerja	64
15. Rencana Target Kinerja Pelayanan	65
16. Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan ;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.



Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

I. Persiapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika,
dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2022. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk detail penyusunannya.
2. Mengadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja pada akhir tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
3. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Renja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:



Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A.	Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Dinas Kominfo																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Racangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2024																																
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024																																
2	Penyempurnaan ranwal Rencana Kerja (Renja) berdasarkan hasil forum konsultasi publik.																																
3	Penyempurnaan Ranwal Rencana Kerja (Renja) berdasarkan hasil musrenbang RKPD																																
4.	Penyempurnaan Ranwal Rencana Kerja (Renja) berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah																																



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																												
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
C	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah																																	
1	Penyusunan Rancangan Renja																																	
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																	
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Dinas Kominfo sudah selaras dengan Ranwal RKPD																																	
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																	
D	Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)																																	
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																	
E	Penetapan Rencana Kerja (Renja)																																	
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																	
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																	



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada renja menjadi Perkada Renja OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																																

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



II. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 dan hasil evaluasi Renja tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rencana Kerja (Renja) yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Penyajian Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rencana Kerja (Renja).

Pada minggu pertama bulan Maret, Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi OPD dan Bapelitbang, maka Forum dilaksanakan selama 1 hari pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota di Ibu.



Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika.

VI. Penetapan

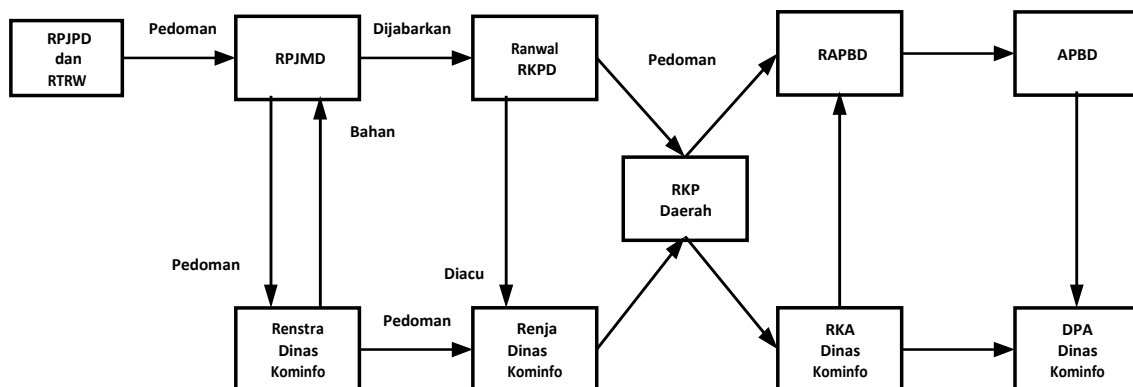
Dalam hal penetapan Renja, Dinas Komunikasi dan Informatika mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan **Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.**

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra



Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengacu pada penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung **Misi ke 4** Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya**.



Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya

Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi



pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tidak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887) ;
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP Daerah, RPJMD, serta tatacara perubahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 110) ;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 113);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Komunikasi Dan Informatika secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Komunikasi Dan Informatika.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.



Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

Berdasarkan 4 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/ kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 disajikan Tabel T-C.29. sebagai berikut:



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2022	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
		Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika								
		Sasaran :								
		1 Meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publik								
		2 Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government).								
		3 Meningkatkan pemanfaatan data Statistik dalam penyusunan perencanaan daerah.								
		4 Meningkatkan tingkat keamanan Informasi Pemerintah.								
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85	20%	22%	22%	100%	35	77	91%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	85	20%	22%	22%	100%	35	77	91%
02.16.03.	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	92%	83 %	85%	85%	100%	87%	87%	95%
02.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	74%	60%	63%	63%	100%	67%	67%	91%
02.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	77%	62%	65%	65%	100%	67%	67%	87%
2.20.02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	89%	78%	81%	81%	100%	83%	83%	93%
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	89%	78%	81%	81%	100%	83%	83%	93%
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	49.93%	25%	29.86%	29.86%	100%	35.83%	35.83%	72%
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah	Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian	49.93%	25%	29.86%	29.86%	100%	35.83%	35.83%	72%

[illegible]

Berdasarkan tabel T-C.29 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Tahun 2022 tidak ada Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, semua kegiatan dan program bisa memenuhi target yang di rencanakan.
- II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

III. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan,

A. Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

I Program penunjang urusan pemerintahan daerah

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp 3.364.634.968,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.306.219.708,- (98,26%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun dengan capaian Kinerja Tersedianya Pembayaranan Gaji ASN Dinas Komunikasi dan Informatika.

B Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.929.700,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.927.200,- (99,99%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor dan Tersedianya Makan Minum Rapat dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.
2. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.304.700,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.304.500,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya barang cetakan dan



penggandaan keperluan kantor, dengan capaian Kinerja berupa Lancarnya kegiatan Operasional kantor.

3. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.092.500,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.087.500,- (99,93%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat koordinasi dan tamu dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya rapat-rapat dan terlayannya tamu kantor.
4. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.847.600,00 Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.837.032 (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi/pihak guna peningkatan kinerja kelembagaan kominfo dengan capaian Kinerja berupa terciptanya sinergi antar berbagai instansi.

C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 712.500,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 703.000,- (98,67%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Surat Menyurat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.
2. Subkegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 106.970.810,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.540.692,- (97,73%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Penyediaan Pembayaran untuk Air, Listrik dan Telepon dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 79.918.390,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.184.100,- (97,83%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran THL Bulanan, PTT, Penjaga Kantor dan tersedianya alat kebersihan dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.



D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.167.638,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.297.223,- (98,86%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas kominfo.
2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.839.900,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.839.000 (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya servis/ perbaikan peralatan kerja dengan capaian Kinerja berupa berfungsinya dengan baik peralatan kerja.
3. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.000.036,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.703.110,- (97,72%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya dengan capaian Kinerja berupa Gedung kantor dan bangunan lainnya berfungsi dengan baik.

II Program Informasi dan Komunikasi Publik

A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 214.259.800,- Tahun dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 155.576.500,- (72,61%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah sebanyak 4 akun, Jumlah pelaksanaan sosialisas/bimtek jurnalistik bagi admin website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 1 kali, Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah di Lapangan selama 12 bulan, Jumlah Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran selama 12 bulan, Jumlah penyebarluasan informasi publik melalui media luar ruang (spanduk, baliho, billboard) sejumlah 700 m dengan capaian Kinerja berupa Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi



publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.114.556,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.615.160,- (96,52%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Tersedia Makan Minum Rapat PPID/SP4N LAPOR! Sebanyak 195 porsi, Tersedia operasional Pengaduan Layanan Publik (SP4N LAPOR) selama 12 bulan, Tersedia Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama 12 bulan, Tersedia sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebanyak 1 unit perangkat, capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Subkegiatan Layanan Hubungan Media dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.261.890.567,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.173.521.713,- (93%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Kegiatan Jumpa Pers sebanyak 4 kali, Jumlah Kegiatan Peliputan Kepala Daerah di Lapangan sebanyak 365 kali, Jumlah Penyebarluasan Informasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik sejumlah 1180 m, dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Subkegiatan Manajemen Komunikasi Krisis dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.935.000,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.525.000,- (58,04%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Mengelola komunikasi krisis selama 12 bulan, Mengevaluasi penanganan komunikasi krisis selama 12 bulan, Penyiapan penanganan krisis sebanyak 1 kali dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

III Program Aplikasi dan Informatika.

A Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.500.998,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.030.000,- (98,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Terkelolanya domain dan subdomain resmi, Jumlah Terkelolanya domain openSID/pemeliharaan sebanyak 27 domain desa/ nagari, Jumlah terkelolanya sub domain aplikasi e-government sebanyak 10 subdomain, Jumlah terkelolanya sub domain website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 42 subdomain, Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga Khusus IT, Terlaksananya pembayaran perpanjangan Domain Pemerintah Daerah sebanyak 1 domain dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.258.502.999,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.257.109.686,- (99,94%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Jaringan Intra Pemerintah yang terkoneksi pada: OPD, Kecamatan, UPTD, Puskesmas, Rumah Dinas Pimpinan sebanyak 50 titik, Tersedianya Colocation SPSE selama 1 tahun, Tersedianya Internet Pemda, G=250 Mbps, D=350Mbps selama 1 tahun., Tersedianya IP Transit selama 1 tahun dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

B Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.264.000,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.994.147,- (98,79%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Monev Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebanyak 1 kali monev, Terpenuhinya penilaian evaluasi SPBE tahun 2022 untuk 1 indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi



dana sebesar Rp. 73.149.808,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.926.795,- (96,96%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah pemeliharaan sarana prasarana perangkat pendukung infrastruktur Data Center yang memadai untuk 2 unit perangkat dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp. 115.744.700,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.292.900,- (79,74%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah sebanyak 12 dokumen, Tersedianya Lisensi sebanyak 2 lisensi dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.477.000,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.135.000,- (99,34%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah laporan pelaksanaan tugas Data dan Informasi Elektronik sebanyak 12 laporan, Pembahasan Perbup Data elektronik untuk 1 kebijakan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dana sebesar Rp. 80.174.209,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.299.000,- (98,91%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Telaksananya pembayaran honorarium Tenaga Khusus IT/Programmer untuk 2 orang, Terlaksananya pembanguna/pengembangan Aplikasi/web untuk 3 aplikasi dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.141.290,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.810.000,- (87,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah integrasi data pada apliikasi e-Gov untuk 2 integrasi data dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan

e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.023.000,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.761.344,- (99,83%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah pelaksanaan Bimtek/FGD Smart City untuk 4 kegiatan, Pembuatan Master Plan Kota Cerdas sebanyak 1 dokumen dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.196.856,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.076.978,- (99,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen database sebanyak 2 dokumen, Jumlah Sosialisasi / Bimbingan Teknis sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
 2. Subkegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.912.856,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.787.460,- (99,43%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah buku Metadata Statistik sektoral sebanyak 2 dokumen, Jumlah Sosialisasi / Bimbingan Teknis sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.163.000,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.945.000,- (98,65%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pembinaan terhadap nagari



statistik sebanyak 13 nagari, Jumlah Sosialisasi / Bimbingan Teknis sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.145.856,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.285.429,- (94,99%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Buku KDA, KCA, Inkesra dan Stada sebanyak 4 dokumen, Jumlah Sosialisasi / Bimbingan Teknis sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota

- C.** Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah sebagai berikut:

I Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- A.** Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.185.500,- Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.803.000 (99.07%), dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembahasan kebijakan keamanan informasi sebanyak 4 buah, Jumlah peserta sosialisasi / bimtek urusan persandian sebanyak 50 peserta, Jumlah pemantauan penerapan tanda tangan digital / aplikasi yang dilakukan selama 12 bulan dengan capaian Kinerja Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.

- D.** Sampai Tahun 2022 Program, kegiatan dan Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.

- E.** Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program kegiatan.

1. Faktor faktor penyebabnya tidak tercapainya target kinerja Program kegiatan Untuk Tahun 2022 tidak ada, Target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai semuanya.



2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/ kegiatan/ Subkegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

F. Implikasi yang Timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 berdampak positif bagi OPD bagi Dinas Komunikasi dan Informatika karena target target yang ditetapkan telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	IKU OPD	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2024	2025	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.		V		0	16	18	18	20	22	16	16	16	18	20	Klp
2	Indek keterbukaan Informasi Publik		V	V	44,84	78	79	80	81	82	76	44,84	87,47	80	82	Indeks
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota		V	V	2,68	3,00	3,18	3,40	3,50	3,60	3,17	2,68	3,29	3,40	3,50	Indeks
4	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		V		57	70	80	85	90	95	100	100	100	85	90	%
	STATISTIK															
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		V	V	34	50	55	65	75	80	100	100	100	65	75	%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		V		34	50	55	65	75	80	100	100	100	65	75	%
	PERSANDIAN															
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		V	V	23,98	29,85	35,83	41,88	47,47	23,98	0	0	35,91	41,88	47,47	%



Dari Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat bahwa :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan pada tahun 2022 tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 tetapi dalam capaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 16 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Indeks keterbukaan publik Tingkat capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan Surat Nomor 02/KI-PSB/I/2023 tanggal 4 Januari 2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 tercapai indeks 87,47 (Menuju Informatif) dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 ini. Untuk mencapai realisasi ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.

keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik.
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
3. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten.
4. Sikap Kejujuran, Komitmen dan demokratis.
5. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja yakni :



1. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian,
 2. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
 3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu tidak rutin di isi/ upload dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka.
 4. Kurang Koordinasi/ pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 5. Ruang untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih terlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan meminta informasi.
 6. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi Publik yang tidak ditemui/ didapatkan oleh tim baik itu di webside Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun data dukung yang dilampirkan dalam kuisisioner.
3. Tingkat capaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk tahun 2022 yakni 3.29 telah melebihi target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kementerian yakni berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke <http://spbe.go.id>, dokumen hasil resmi Indeks SPBE akan diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Untuk mencapai target yang ditetapkan harus memenuhi 4 (empat) domain yaitu :

1. Domain Kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terbagi menjadi :
 - Aspek 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.
2. Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
 - Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian.
 - Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta
 - Aspek 4. Penyelenggara SPBE yang terdiri dari 2 indikator
3. Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
 - Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian,
 - Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
 - Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan terdiri dari 10 indikator penilaian dan
 - Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian

Indikator tingkat kematangan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan sebagai berikut :

DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE

ASPEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE, **Bobot nilai 13 %**

- a. Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- b. Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah
- c. Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di
Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- d. Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- e. Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi
dan data yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan
penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Perpres 95 tahun
2018, Pasal 27
- g. Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- h. Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
Keamanan Informasi. Evidence kebijakan internal terkait
Manajemen Keamanan Informasi.
- i. Indikator 9 : Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK).

- j. Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 2. Perencanaan Strategis SPBE, bobot nilai 10%

- a. Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung: Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan secara formal
- b. Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung: Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Eviden: Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD
- d. Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Eviden: Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik

ASPEK 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi, bobot nilai 10%

- a. Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE. Eviden Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE; Terdapat notulensi/catatan / laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE
- b. Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Eviden terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data, Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya
- c. Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Eviden: Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal, untuk menunjukan adanya jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan
- d. Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence: Daftar API yang menggunakan service bus, dan/atau Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus. Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan API, Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middleware (API), dan data. Integrasi dapat berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya. Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain



Aspek 4: Penyelenggara SPBE

- a. Indikator 19 : Tingkat Kematangan **Tim Koordinasi SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence SK Tim Koordinasi, Rencana Program Kerja, Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi. Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat. Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Evidence SK **Forum Kolaborasi**, Rencana Program Kerja. Notulensi / catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Domain 3. MANAJEMEN SPBE, **bobot nilai** 16,50%

ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 12%:

- a. Indikator 21 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE (Salah satu data dukungnya: pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari **permenpanRB no 5/2020**)
- b. Indikator 22 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi (data dukung antara lain pergub/ perwal) atas manajemen keamanan informasi, umumnya disebut **dokumen “Manual SMKI”**
- c. Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data. Data dukung antara lain pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari **PERMENPPN 16/2020**



- d. Indikator 24 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK. Data dukung antara lain **pedoman manajemen aset TIK** formal yang ditetapkan
- e. Indikator 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia. Data dukung antara lain dokumentasi telah dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN
- f. Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan. contoh data dukung <https://simpan-spbe.bppt.go.id/> <https://spbe.semarangkota.go.id/>
- g. Indikator 27 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan. Data dukung: renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade & prosedur formal yang mencakup proses umum manajemen perubahan SPBE pada SEMUA unit kerja
- h. Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE. Data dukung antara lain Adanya **aplikasi Helpdesk TIK** yang digunakan

ASPEK 6. AUDIT TIK, bobot nilai **4,5%**

- a. Indikator 29 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE. Data dukung antara lain berupa pedoman audit infrastruktur
- b. Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE. Data dukung pedoman audit aplikasi
- c. Indikator 31 : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE. Data dukung : pedoman audit keamanan informasi

Domain 4: Layanan SPBE, bobot nilai **45,50%**. data dukung : Manual book, Screenshot berjenjang level 1 – 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi.



ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 27,5%

- a. Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
- b. Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
- c. Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
- d. Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
- e. Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
- f. Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
- g. Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik
- h. Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
- i. Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
- j. Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 18%

- a. Indikator 42 : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- b. Indikator 43 : Layanan Data Terbuka
- c. Indikator 44 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Indikator 45 : Layanan Publik sektor 1
- e. Indikator 46 : Layanan Publik sektor 2



f. Indikator 47 : Layanan Publik sektor 3

keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Kebijakan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan Inovasi Proses Bisnis,
2. Telah adanya Rencana Induk/ Master Plan e-Government Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, Pentahapan pengembangan dan rencana implementasi.
3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur SPBE
4. Telah adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan system penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
5. Adanya Infrastruktur SPBE (perangkat keras, pusat data, perangkat jaringan dan komunikasi data, bandwidth, disaster recovery centre).
6. Telah adanya Aplikasi, Website SPBE dan Integrasi system Aplikasi.
7. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.
8. Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/ Dokumenj Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), perbup perencanaan dan penganggaran.
9. Layanan Publik berbasis elektronik.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja yakni :



1. Adanya perubahan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara Nasional yang semula berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 (35 indikator), menjadi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 (47 Indikator).
2. Kurangnya Perhatian dan Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dalam memenuhi indikator penilaian khususnya untuk indikator baru.
3. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian, Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika tetap melaksanakan indikator ini dimana pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 Aplikasi Layanan Publik yakni:
 - a. Aplikasi Covid 19 (<https://covid19.limapuluhkotakab.go.id/>)
 - b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (<https://jdih.limapuluhkotakab.go.id/>)
 - c. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) (<https://ppid.limapuluhkotakab.go.id/>)
 - d. Opensid (<https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/>)
 - e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id/>)
 - f. Smartdukcapil. (<https://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id/>)
 - g. Sp4an Lapor (<https://limapuluhkotakab.lapor.go.id/>)

Dan kesemua Aplikasi Layanan Publik ini telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah telah berjumlah 43 (empat puluh



tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini telah disampaikan dalam Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah berjumlah 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. IKK Outcome Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa terlaksana disebabkan karena untuk mengukur ini perlu metode khusus yaitu Indeks KAMI yang belum pernah dilakukan, sehingga belum bisa ditentukan nilai dari indikator ini.



2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Utama yang sudah mencapai target yang ditetapkan dan juga dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo sebagaimana berikut:

2.3.1. Tingkat kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Indek keterbukaan publik Tingkat capaian Indek Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan Surat Nomor 02/KI-PSB/I/2023 tanggal 4 Januari 2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 tercapai index 87,47 (Menuju Informatif) dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 ini. Untuk mencapai realisasi ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.
- Tingkat capaian Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk tahun 2022 yakni 3.29 telah melebihi target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini.
- Indikator Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan persentase sebesar 100% telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022.
- Indikator Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dengan persentase sebesar 0 telah belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022, dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kota belum mengikuti penilaian index yang dilaksanakan oleh BSSN melalui KAMI dan di Propinsi Sumatera Barat hanya Pemerintah Propinsi yang telah mengikutinya.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, antara lain.

1. Terbatasnya orang ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, Statistik yang bergabung di Dinas Kominfo
2. Kurangnya peningkatan kompetensi.
3. Keterbatasan SDM Teknis



4. Keterbatasan sarana dan prasarana
5. Keterbatasan anggaran
6. Belum semua wilayah kabupaten tercover oleh jaringan intra pemerintah
7. Terbatasnya kewenangan dalam pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik
8. Belum terselenggaranya teknis pengamanan informasi secara optimal
9. Belum tersedianya data statistik yang terintegrasi
10. Masih belum sinergisitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya seperti: RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah:

VISI :

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BEI



Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah. Masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Madani.

Madani adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai nilai kemanusiaan serta maju dan modern dalam penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Beradat dan berbudaya

Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat luas.

3. Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah

Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, Lembaga, organisasi dan masyarakat secara Bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalaan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.



2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas Layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra 2021-2026

Ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan strategi dan kebijakan, beberapa masalah tersebut adalah:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK, Persandian dan Statistik.
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana Bidang TIK, Pesandian dan Statistik
3. Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi, aman terpadu, menyeluruh dan mudah di akses masyarakat.
4. Belum memiliki legalitas formal berupa Perda yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan TIK, Persandian dan Statistik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Terbatasnya biaya operasional perawatan Infrastruktur perangkat keras dan infrastruktur perangkat lunak
6. Terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Masih kurangnya ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah.
8. Rendahnya pemahaan persandian di daerah.
9. Belum tersedianya Media Center dan Videotron untuk penyampaian informasi ke masyarakat.
10. Masih rendahnya system keamanan informasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

a) Tantangan :

Dengan bergabungnya Bidang Infrastruktur TIK dan Bidang e-Government menjadi Bidang Aplikasi dan Informatika, dan Seksi Persandian menjadi Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik serta Bagian Layanan Hubungan Masyarakat (Humas) yang sebelumnya berada di salah satu Bagian Sekretariat Daerah sekarang dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika hal tersebut



merupakan tantangan – tantangan yang harus dihadapi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dengan sumber daya manusia dan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Sementara menurut tusinya Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika, Persandian dan Statistik di daerah, kurangnya jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tusinya diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia. Perkembangan teknologi komunikasi, persandian dan Data di Indonesia selalu berjalan dari masa kemasa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internetbased technology*).

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan informasi dan data sedang menuju pada era *smart city*, yang melibatkan sektor pemerintah (government) selaku fasilitator, sektor publik (citizen) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (business) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan data. Pelaksanaan teknologi informasi, komunikasi, persandian dan data didalam *Smart City* merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi, persandian dan data telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengamanan informasi dan data, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Berikut beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan Kapasitas Teknis juga menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tusi diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia



2. Belum tersedianya media center untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.
3. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik)
4. Kurang memadainya sarana media luar ruang, seperti rangka baliho, billboard, spanduk, dan videotron
5. Belum tersedianya mobil unit penyampaian informasi
6. Konten hoax yang beredar dimasyarakat
7. Belum tersedianya radio pemerintah daerah
8. Belum tersedianya studio mini Pemerintah Daerah
9. Penyesuaian aparatur guna pelaksanaan tusi.
10. Maraknya serangan cyber terhadap keamanan informasi.
11. Belum maksimalnya proses pengembangan warehouse data kabupaten
12. Kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas sangat berpengaruh dalam pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
13. Sudut pandang Aparatur Pemerintahan dalam mendukung pembangunan maupun pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
14. Belum semua penggunaan dan pemanfaatan TIK memiliki dukungan legalitas secara formal dalam hal ini berupa Perbup maupun Perda.
15. Terbatasnya anggaran dalam pengadaan maupun perawatan infrastruktur baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.
16. Kecenderungan perpindahan mekanisme aktifitas pekerjaan dari pola manual menjadi pola elektronik yang semakin hari semakin meningkat, sehingga akan menambah besar peluang pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan aksi-aksi kejahatan di dunia siber, maka secara otomatis akan mengakibatkan beban tugas dari Persandian untuk Pengamanannya juga akan semakin besar dan semakin strategis.
17. Rendahnya kesadaran ketepatan waktu penyerahan data dari produsen data
18. Belum optimalnya pemeriksaan data
19. Belum tersedianya Perbup tentang Satu Data Indonesia
20. Belum terintegrasinya data statistik dalam suatu system
21. Sulitnya mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah (baik softcopy maupun hardcopy) dalam menetapkan DIDP
22. Sulitnya berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan uji konsekwensi maupun pengklasifikasian Informasi Publik.



23. Rendahnya respon PPID Pembantu terkait tindak lanjut permohonan informasi publik.
24. Rendahnya respon OPD terkait dalam menanggapi pengelolaan pengaduan masyarakat.
25. Minimnya pengetahuan pelapor tentang tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat.
26. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan informasi dan tata cara pengaduan masyarakat.
27. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK.
28. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada setiap Bidang.
29. Belum optimalnya pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
30. Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi, aman terpadu, menyeluruh dan mudah di akses masyarakat
31. Belum memiliki legalitas formal (Perda, Perbup) yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, Komunikasi Publik, Humas dan Statistik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
32. Masih banyaknya Daerah Blankspot dan terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
33. Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah.
34. Belum optimalnya identifikasi dan pelaksanaan tugas – tugas persandian daerah.
35. Lambatnya Lima Puluh Kota Menuju Smart City.

b) Peluang :

Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri menjadi Dinas maka sesuai dengan tugasnya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Adanya peranan Media Cetak, Media Online, Media Luar Ruang, dan Media Penyiaran yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi.



2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi.
3. Komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan data
4. Pengembangan *warehouse* data Kabupaten
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang analis data.
6. Kerjasama di bidang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TIK dengan pihak penyedia
7. Pengembangan jaringan intra pemerintah ke seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota
8. Meningkatnya komputerisasi di seluruh tingkat pemerintahan seiring dengan pemakaian fasilitas-fasilitas Teknologi Informasi yang disediakan.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur seiring dengan peningkatan kinerja terkait pemanfaatan Teknologi Informasi.
10. Peningkatan kuantitas bimbingan-bimbingan teknis di Bidang Infrastruktur TIK termasuk Pusat Data Kabupaten baik dalam pengelolaan maupun keamanan.
11. Peningkatan kualifikasi Pusat Data sehingga akan memenuhi standar yang telah ditentukan
12. Meningkatkan tata kelola sistem keamanan Teknologi Informasi
13. Menjalin Kerjasama dengan pihak penyedia layanan informasi BUMN.
14. Daerah yang termasuk dalam Daftar Blank Spot Signal Telekomunikasi di usulkan / fasilitasi melalui operator telekomunikasi agar mau berinvestasi sehingga seluruh daerah menjadi berdering.
15. Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
16. Pelaksanaan E-Government
17. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi di seluruh kecamatan dan nagari.
18. Peningkatan kebutuhan keterbukaan informasi publik baik pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagai media.
19. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah
20. Sosialisasi dan Pelatihan persandian.
21. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara lain Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.



22. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarluaskan informasi.
23. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan public.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting dalam pelayanan perangkat daerah.

Dari hasil pengamatan dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat daerah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi.
3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
4. Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Menpan-RB
5. Keharusan pemanfaatan data melalui satu data Indonesia
6. Tuntutan aparatur akan data yang akurat dalam pelaksanaan kegiatan
7. Peningkatan ketersediaan data dan informasi melalui sumber daya teknologi informasi
8. Penyusunan regulasi terkait penggunaan data dalam kegiatan pemerintahan.
9. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi khususnya Infrastruktur TIK, Pusat Data dan Tata Kelola Sistem Keamanan untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.
10. Melengkapi semua legalitas formal yang dibutuhkan dalam pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik sehingga setiap kegiatan ada regulasinya
11. Masih terdapatnya titik-titik blank spot di beberapa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
12. Tingginya kebutuhan masyarakat umum akan adanya jaringan internet di daerah mereka
13. Peningkatan kualifikasi Pusat Data kabupaten sehingga mencapai standar yang seharusnya
14. Pengembangan jaringan intra sehingga mencapai seluruh wilayah pemerintahan
15. Peningkatan tata kelola sistem keamanan Teknologi Informasi
16. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus seiring dengan peningkatan pengamanan informasi dan sistem informasi itu sendiri



17. Pembangunan membutuhkan data sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan. Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat, namun sebaliknya akan bias jika didasarkan pada data yang tidak akurat. Sehingga tersedianya data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan menjadi hal yang penting bagi tepatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
18. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan informasi publik dan memanfaatkan saluran pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. Tingginya kebutuhan atas informasi publik dan kecenderungan masyarakat yang semakin kritis menuntut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat
19. Meningkatnya praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*e-Governmnet*) untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang prima dan manajemen pemerintahan.
20. Tuntutan yang cukup besar dari publik akan layanan akses internet yang memadai.
21. Masih terdapatnya daerah *blank spot* di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
22. Pengoptimalan sumber daya teknologi informasi untuk melancarkan arus komunikasi dan informasi bagi masyarakat.
23. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis Teknologi Informasi melalui keterbukaan informasi publik.
24. Peningkatan ketersediaan data dan informasi serta penyebarluasannya melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dibidang IT.
25. Pengembangan TIK guna mengintegrasikan data dan informasi antar OPD untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi serta meminimalkan kerusakan dan kejahatan didunia maya.
26. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi penataan dan penertiban menara telekomunikasi.

2.4 Review terhadap RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.



TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	1	7	8	9	10	11	12
2.16.01.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	45%	4,534,925,910	2.16.01.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	45%	4,534,925,910	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tahun	3,611,422,107	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tahun	3,611,422,107	
2.16.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	40 orang	3,611,422,107	2.16.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	40 orang	3,611,422,107	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	259,921,200	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	259,921,200	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 paket	1,531,000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 paket	1,531,000	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	25,718,700	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	25,718,700	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	10,789,500	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	10,789,500	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	6,050,000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	6,050,000	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	215,832,000	2.16.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	215,832,000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	500,657,603	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	500,657,603	
2.16.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	174,093,217	2.16.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	174,093,217	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	180,067,086	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	180,067,086	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	146,497,300	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	146,497,300	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	15 jenis peralatan	162,925,000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	15 jenis peralatan	162,925,000	

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	1	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.01.00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kabupaten Lima Puluh Kota.	100 orang Perangkat Daerah	39,221,976	2.21.02.2.01.00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kabupaten Lima Puluh Kota.	100 orang Perangkat Daerah	39,221,976	Termasuk IKK, IKD, Pendukung Misi ke-4 dan IKU Dinas
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pemahaman SKPD akan urusan Persandian	Kabupaten Lima Puluh Kota.	41.88%	16,625,000	2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pemahaman SKPD akan urusan Persandian	Kabupaten Lima Puluh Kota.	41.88%	16,625,000	
2.21.02.2.02.00 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	43 Perangkat Daerah	16,625,000	2.21.02.2.02.00 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	43 Perangkat Daerah	16,625,000	Termasuk IKK, IKD, Pendukung Misi ke-4 dan IKU Dinas
					5,287,547,428						9,155,473,035	

Tabel T-C.31

Dari table T-C.31 diatas dapat dijelaskan bahwa RKPD 2024 telah disusun berdasarkan pagu indikatif untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024. Dimana dalam pemenuhan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan pelaksanaan subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) yakni:

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	SubKegiatan	Pagu Dana
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	Layanan Hubungan Media	254.920.000,-
2.	Indek keterbukaan Informasi Publik	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Manajemen Komunikasi Krisis	77,825,500,-
3.	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. 3. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 6. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	221,841,850



No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	SubKegiatan	Pagu Dana
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. 2. Membangun Meta Data Statistik Sektoral. 3. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. 	90,070,000
6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 	
7.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	107,964,168



1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditegaskan kembali melalui Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”***

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.



Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber dayamanusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;



6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020—2024



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai penjabaran VISI dan MISI dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



“ Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Data dan Persandian”

Adapun Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
2. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)
3. Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah
4. Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Data dan Persandian	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	Nilai Indek 80,00
		Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan(e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Nilai Indek 3,40
		Tingkat Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Daerah	Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	65,00%
		Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	41,88 %



3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Permendagri No. 59 tahun 2010 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya”***.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 5 program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu:

1. Program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Statistik.
4. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Persandian.

Ringkasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.



Tabel 3.4
Program kegiatan dan Subkegiatan yang ada pada setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan peralatan rumah tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jml	1 Program	7 Kegiatan	25 Subkegiatan



Tabel 3.8
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. 2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah. 3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik. 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Pelayanan Informasi Publik 6. Layanan Hubungan Media 7. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. 8. Manajemen Komunikasi Krisis. 9. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. 10. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. 11. Penyediaan/Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
2.	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah. 3. Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik. 4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 6. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Jml	2 Program	3 Kegiatan	19 Subkegiatan

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi. 3. Membangun Meta Data Statistik Sektoral 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. 5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Jml	1 Program	1 Kegiatan	5 Subkegiatan

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Persandian

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik. 4. Penyediaan Layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
		2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jml	1 Program	2 Kegiatan	5 Subkegiatan



T-B.36

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota Analisa data capaian Kinerja Tahun 2021 atau 2022

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -faktor penentu keberhasilan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	<	Kurangnya Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
3	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
4	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
	STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
	PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	>		Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026, terutama pada target-target yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	45%	4,534,925,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	75%	6,291,418,145
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tahun	3,611,422,107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan penatausahaan keuangan guna penyajian laporan keuangan yang tepat waktu.	1 Tahun	4,764,373,853
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	40 orang	3,611,422,107			40 orang	4,764,373,853
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	259,921,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan administrasi Umum guna kelancaran operasional dinas.	12 bulan	485,797,151
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 paket	1,531,000			12 paket	7,304,395
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	25,718,700			12 Paket	106,327,626
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Paket	10,789,500			12 Paket	81,905,841
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	6,050,000			12 Laporan	7,393,705
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	215,832,000			12 Laporan	282,865,584
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	500,657,603	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan jasa penunjang guna kelancaran administrasi dan operasional Dinas.	12 bulan	779,556,969
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	174,093,217			12 Laporan	1,910,650

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	180,067,086			12 Laporan	301,267,857
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	146,497,300			12 Laporan	476,378,462
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	15 jenis peralatan	162,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang milik daerah agar dalam kondisi baik	15 jenis peralatan	261,690,172
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 unit	148,325,000			5 unit	230,665,893
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 unit	14,600,000			5 unit	31,024,279
2.16.02.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Piblik.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	55%	332,745,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendukung IKK, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Misi-4, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas	55%	825,000,000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	55%	332,745,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55%	825,000,000
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 dokumen	32,745,500			1 dokumen	300,000,000
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 layanan	300,000,000			1 layanan	525,000,000
02.16.03.	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Kabupaten Lima Puluh Kota.	89%	221,841,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendukung IKK, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Misi-4, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas	89%	5,157,060,138
02.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	70%	13,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	4,498,560,138

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.16.03.2.01.000 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 dokumen	100,000			1 dokumen	135,000,000
02.16.03.2.01.000 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	74 unit	13,500,000			74 unit	4,363,560,138
02.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	70%	208,241,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	658,500,000
02.16.03.2.02.000 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 dokumen	29,615,000			1 dokumen	135,000,000
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 Perangkat Daerah	44,635,832			1 Perangkat Daerah	203,500,000
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	2 unit	112,805,978			2 unit	170,000,000
02.16.03.2.02.000 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 Dokumen	21,185,040			1 Dokumen	150,000,000
2.20.02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah		85%	90,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendukung IKK, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Misi-4, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas	85%	483,030,000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	85%	90,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	483,030,000
2.20.02.2.01.000 1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	2 dokumen	11,560,000			2 dokumen	185,000,000
2.20.02.2.01.000 3	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik sektoral yang dihimpun	Kabupaten Lima Puluh Kota.	50 dokumen	11,750,000			50 dokumen	125,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	Jumlah data Statistik sektoral yang dihimpun.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 dokumen	66,760,000			1 dokumen	173,030,000
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan Persandian		41.88%	107,964,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendukung IKK, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Misi-4, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas	41.88%	814,625,000
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pemahaman SKPD akan urusan Persandian	Kabupaten Lima Puluh Kota.	41.88%	91,339,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.88%	758,000,000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota yang ditetapkan.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	2 dokumen	19,262,000			2 dokumen	66,000,000
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 Laporan	11,806,192			1 Laporan	52,000,000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota.	50 laporan	21,049,000			50 laporan	315,000,000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kabupaten Lima Puluh Kota.	100 orang Perangkat Daerah	39,221,976			100 orang Perangkat Daerah	325,000,000
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pemahaman SKPD akan urusan Persandian	Kabupaten Lima Puluh Kota.	41.88%	16,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.88%	56,625,000
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	43 Perangkat Daerah	16,625,000			43 Perangkat Daerah	56,625,000
				Jumlah	5,287,547,428				13,571,133,283

TABEL
RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN BERDASARKAN URUSAN, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Bidang Urusan	RKPD 2024 Program		Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)	RKPD 2024 Kegiatan		Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5,287,547,428			5,287,547,428		
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5,089,513,260	12,273,478,283	7	5,089,513,260	12,273,478,283	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	90,070,000	483,030,000	1	90,070,000	483,030,000	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	107,964,168	814,625,000	2	107,964,168	814,625,000	
	JUMLAH		5,287,547,428	13,571,133,283		5,287,547,428	13,571,133,283	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

16. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra 2016 -2022.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III : TUJUAN SASARAN	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	29
3.3. Program Dan Kegiatan	30

DAFTAR TABEL

TABEL T.C – 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Parpora dan Pencapaian Renstra Dinas Disparpora s/d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota
TABEL T.C – 30	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota
TABEL T.C – 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
TABEL T.C – 32	Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota
TABEL	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyiapkan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Fungsi RENJA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan

daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah . Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan Salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Rekening dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD) Tahun 2021-2026

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagai acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara operasional dan teknis untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024.

Untuk mengetahui tercapainya maksud dan tujuan penyusunan Renja ini dapat dilaksanakan melalui Analisis kebutuhan yang merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program tahun selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra 2021 -2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama tahun 2022 telah terpenuhi, yang pengukurannya telah berpedoman pada sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022, yang menetapkan 2 tujuan , 3 sasaran serta 4 indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai anggaran Belanja dengan Jumlah total sebesar Rp. 20.412.589.976,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.872.342.533,- dengan persentase keuangan (58,16%) .

Dengan persentase 58,16% dan persentase fisik 58,16% dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Disparpora tahun 2022 tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksana sesuai target. Kegiatan tersebut adalah Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pariwisata yang baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan Oktober sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang tidak bisa lagi dilaksanakan karena keterbatasan waktu . Solusinya adalah Program Kegiatan yang didanai dengan anggaran BKK tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata pemuda dan OLahraga tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota melalui 6 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang berada di bawah Sekretariat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%). ,
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan 2 Program , 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan target kinerja dengan 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana berikut :
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Berhasil mengirim 3 orang pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

berkompetisi dalam pemilihan pemuda pelopor Propinsi Sumbar pada Bidang Pangan juara 1 Tingkat Propinsi Sumbar dan mewakili Sumbar pada Pemilihan Pemuda pelopor Tingkat Nasional , kemudian bidang Sosial Budaya dan Agama juara 3 tingkat Sumbar. Kemudian setelah 32 tahun absen di nasional, pada tahun 2022 seorang siswa SMA Negeri 1 Harau atas nama Faiz Azizi menjadi wakil propinsi Sumatera Barat sebagai Paskibra Nasional di Istana Negara Jakarta. Disamping itu juga fasilitasi kegiatan KNPI melalui dana hibah.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan target kinerja baik yaitu lanjutan pembangunan sarana pendukung GOR Singa Harau, serta terlaksananya beberapa kompetisi olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengiriman utusan ke tingkat propinsi. Disamping itu juga fasilitasi kegiatan KONI melalui dana Hibah.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan capaian kinerja 100% telah melakukan fasilitasi kegiatan kwartir pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dana Hibah
5. Program Pemasaran Pariwisata melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan target kinerja telah mengikuti even promosi pariwisata berupa pameran dan pelaksanaan event-event promosi pariwisata dalam daerah.
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target kinerja pemeliharaan K3 Lembah Harau,
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target kinerja peningkatan SDM pelaku wisata melalui kegiatan Peningkatan SDM Kepariwisata melalui pelatihan Tata Kelola Destinasi, Tata Kelola Hme Stay, Pelatihan Pramuwisata dan Pelatihan Pemandu Wisata minat Khusus sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 302 orang pelaku wisata dan ekonomi kreatif dari nagari/kecamatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Parpora dan Pencapaian Renstra Dinas Disparpora s/d Tahun 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penan- ggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan	13 dokumen 17 laporan	100%	13 dokumen 17 laporan	13 dokumen 17 laporan	100 %	13 dokumen 17 laporan	13 dokumen 17 laporan	100%
2	19	01	2.01	01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Disparpora	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Disparpora	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Disparpora	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Disparpora	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	19	01	2.01	06	Koordinasi Penyusu- nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja Disparpora	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100 %	17 laporan	17 laporan	100%
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
						Disparpora								
2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya ADM keuangan dengan baik	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.02	01	Sub Keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP 39 ASN Disparpora	12 bulan	100 %	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKDP	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2	19	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan-bahan pemeriksaan	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%
2	19	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Adm kepegawaian dgn baik	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.02	02	Sub Keg	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas ASN	-	—	67 stel	67 stel	100	70 stel	100%
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adm Umum dg baik	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	01	Sub Keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK untuk adm kantor	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga utk kantor	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga utk kantor	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	04		Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
					Logistik Kantor	kebersihan kantor								
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan kebersihan kantor	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teredianya bahan bacaan untuk meningkatkan SDM ASN	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	08	Fasilitas Tunjangan Tamu	Tersedianya fkomsumsi untuk tamu yang berkunjung	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	Tersedianya komsumsi rapat & terlaksananya koordinasi	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.08		Kegiatan Penyedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.08	01	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos materai	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, air ,internet	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji bulanan Tenaga Kontrak	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Ba	Terlaksananya	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
					rang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan Kendaran dinas								
2	19	01	2.09	01	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya 21 unit Kendaraan Dinas roda 2 dan 6 Kendaraan Dinas roda 4	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Laptop, printer dll	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2	19	02	2.01		Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan ,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota ,Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penyadaran,Pemberdayaan ,dan Pengembangan Terhadap Pemuda Pelopor,Wirausaha Muda Pemula,								
2	19	02	2.01	01	Sub Keg Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terpilihnnya 3 orang pemuda pelopor yang berprestasi di propinsi dan nasional	3 orang	100%	3 orang	2 orang	66,6%	3 orang	3 orang	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2	19	02	2.01	02	Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah wirausahawan muda yang aktif	55 Orang	64 Orang	64 orang	73 orang	114%	100 orang	100 orang	100%
2	19	02	2.01	04	Pemulihan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi , Akses Pengembangan Diri ,Penggunaan dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan	Terlaksananya Penyuluhan narkoba bagi pemuda	30 orang	100%	30 orang	45 orang	150%	-	-	-
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan ,Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%			
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar bendera	Terbentuknya Paskibra kab/prop	-	-	29 orang	29 orang	100%	30 orang	30 orang	100 %
2	19	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota									
2	19	02	2.02	02	Sub Keg Peningkatan Kapasitas Pemuda dan organisasi	Terlaksananya JPI dan Peringatan Sumpah Pemuda	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 keg	2 keg	100 %

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
					Kepemudaan Kabupaten /Kota									
2	19	03			PROGRAM	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Persentase Pengembangan kapasitas daya saing keolah ragaan							
2	19	03	2.01		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarpras Olahraga	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
2	19	03	2.01	03	Sub Keg	Koordinasi,Sinkronisa si dan pelaksanaan Penye diaan sarpras Olahraga Kab	Tersedianya ssarpras OR yang layak	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
2	19	03	2.02		Kegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga kab/propinsi	-	-	5 kali	5 kali	100%	10 kali	100%
2	19	03	2.02	02	Sub Keg	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga			5 kali	5 kali	100%	10 kali	100%
2	19	03	2.03		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi Olahraga							
2	19	03	2.03	02	Sub Keg	Pemusatan Latihan Daerah,Illmu Pengetahuan dan Tekologi Keolahragaan (sport	Terlaksananya pelatihan wasit/juri cabor	-	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
										Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
	1				2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
						science)									
2	19	03	2.04		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terfasilitasinya pembinaan Cabor melalui Organisasi Olahraga								
2	19	03	2.04	02	Sub Keg	Pengembangan Organisasi Olahraga	Fasilitasi Organisasi OR	-	-	1 organisasi	1 organisasi	100%	1 organisasi	1 organisasi	40%
2	19	03	2.05		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan OR Tradisional						12 atlet	12 atlet	199%
2	19	03	2.05	01	Sub Keg	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlit OR Tradisional berprestasi	-	-	-	-		12 atlet	12 atlet	199%
2	19	04			PROGRAM	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan organisasi pramuka	-	-	20%	20%	100%	30%	30%	100%
2	19	04	2.01		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramungkaan	Meningkatnya aktifitas pramuka			20%	20%	100%	30%	30%	100%
2	19	04	2.01	05	Sub Keg	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramungkaan Tingkat Daerah	Terlaksananya kegiatan pramuka kabupaten			20%	20%	100%	30%	30%	100%
3	26	02			PROGRAM	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase tersedianya destinasi yang layak								
3	26	02	2.02		Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	-	-				1 lokasi	1 lokasi	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
3	26	02	2.02	04	Sub keg Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan sarpras pariwisata di kawasan strategis	-	-	-	-		1 lokasi	1 lokasi	100%
3	26	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi wisata	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%
3	26	02	2.03	04	Sub Keg Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan sarpras pariwisata di destinasi wisata	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi wisata	20%	80%	30%	30%	100%	40%	40%	100%
3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik ,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi wisata melalui even pariwisata	12 even	100%	13 event	13 event	100%	14 even	14 even	100%
3	26	03	2.01	01	Sub Keg Penguatan Promosi Melalui Media Cetak ,Elektronik ,dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya penyusunan profil pariwisata sbg media promosi	50 buku profil	100%	50 buku profil	50 buku profil	100%	-	-	-
3	26	03	2.01	02	Fasilitas Kegiatan	Terlaksananya even	12 even	100%	13 event	13 event	100%	14 even	14 even	100%

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
					Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	wisata dalam dan luar daerah								
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama promosi wisata daerah	-	-	1 kerjasama	1 kerja sama	100%	-	-	-
3	26	05			PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif								
3	26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Pelatihan								
3	26	05	2.01	02	Sub Keg Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya festival kuliner	-	-	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	13 kecamatan	13 kecamatan	100%
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat , Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa	Terlaksananya Pelatihan dasar Kepariwisataan untuk pelaku wisata dan ekonomi kreatif	80 orang	100%	190 orang	190 orang	100%	240 orang	240 orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota

Analisis kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama .yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Hasil Pengukuran Capaian Kineja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		Realisasi	%	Prediket
		Satuan	Target			
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	%	47,24	47,74	101,05	Melebihi target
	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yg Layak	%	15	15,36	102,4	Melebihi target
	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	%	12	12,50	104,17	Melebihi target
	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	%	33,78	33.78	100	Sangat Tinggi

Meningkatnya kreativitas pemuda dan presentasi olahraga	Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	%	10	10	100%	Sangat Tinggi
	Presentasi peningkatan atlet yang berprestasi	%	20	35	175%	Sangat Tinggi
Meningkatkannya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Presentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatkannya jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel. C.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan		33,73	101,62	47,24	47,74	Melebihi Target
2	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Layak		10	10	15	15,36	Melebihi Target
3	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas		10	12	12	12,50	Melebihi Target

4	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)		29,73	31,12	33,78	33,78	Tercapai
---	--	--	-------	-------	-------	-------	----------

- a. Indikator 1 “Tingkat Capaian Kunjungan Wisata” . Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2022 ini adalah sebesar 47,24% dari target jumlah kunjungan 943.391 orang, realisasi 954.782.- orang. Penetapan target sebesar 47,24% adalah berdasarkan prediksi masih adanya pandemi covid 19, sehingga akan tetap terjadi PPKM dan penutupan destinasi wisata , tetapi pertengahan tahun 2022 pandemi sudah selesai makanya kunjungan wisatawan bisa melebihi target yang telah ditetapkan . Sama dengan tahun 2021 , penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya tumbuh objek-objek wisata yang kekinian (instagramable) yang pangsa pasarnya adalah kaum milenial.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi , views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2021, yaitu 798.701 orang , maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 hanya 954.782 orang , atau mengalami peningkatan sebesar 19,54%. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 3 Program Bidang Pariwisata yaitu : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, Program Pemasaran

Wisata dan program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

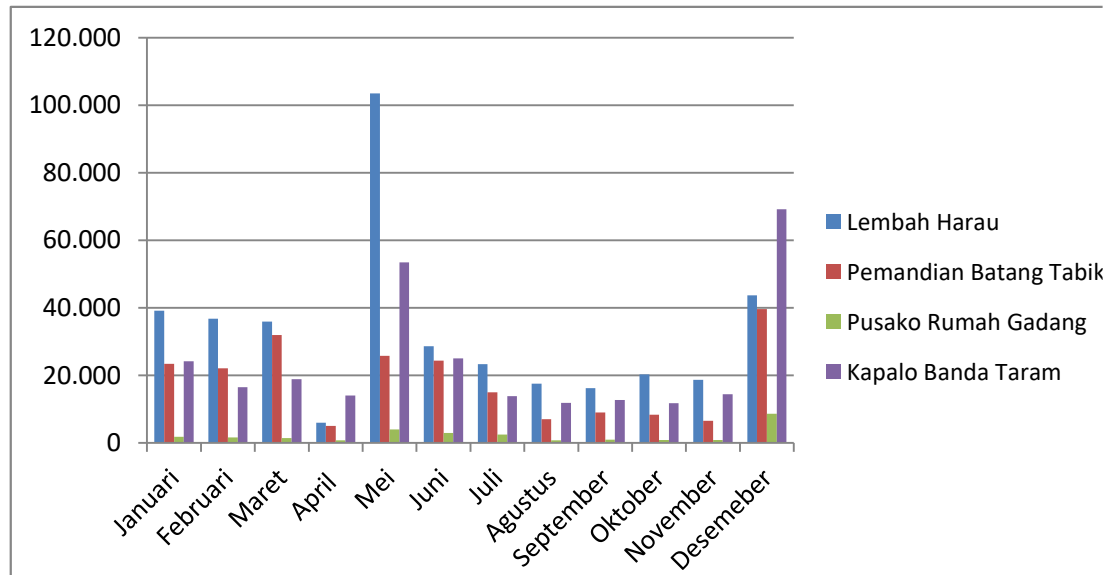
Pada Program Peningkatan Destinasi wisata dilaksanakan pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau, Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau dan pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau

Pada Program Pemasaran wisata yaitu melaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota, di samping itu juga pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang realisasinya adalah pelaksanaan 7 kali pelatihan kepariwisataan dengan jumlah peserta 302 orang pelaku wisata , aparatur pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

Dengan melaksanakan ketiga program secara maksimal maka pencapaian target indikator kinerja bisa mencapai 101 %

Grafik Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahu 2022



- b. Indikator 2 “Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Layak ”
- Target Indikator Kinerja terhadap persentase peningkatan destinasi wisata yang telah ditetapkan tahun 2022 adalah 10 % dari jumlah destinasi wisata yang telah ada pada tahun 2021 sebanyak 13 destinasi , berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan menjadi 15 destinasi atau 15,38%. Terjadinya peningkatan persentase destinasi wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram, dan lain-lain. Disamping itu masyarakat juga sudah mulai paham bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis , semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh. .dengan dasar inilah muncul kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar layak dikunjungi oleh wisatawan.
- c. Indikator 3 : “Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas” target indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah 12 % sementara realisasinya adalah 12,5%. Pemasaran pariwisata

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 dilaksanakan melalui Program Pemasaran Pariwisata yaitu penyelenggaraan berbagai event promosi wisata di dalam daerah dan ikut serta pada event promosi wisata luar daerah . Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Face Book, Instagram, Website Siparliko dan Twitter Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas meningkat 10% dimana pelaksanaan promosi hanya dilakukan melalui pelaksanaan even- even promosi wisata dalam daerah. Tetapi pada tahun 2022 promosi dan pemasaran wisata kabupaten Lima puluh Kota lebih banyak dilaksanakan melalui keikutsertaan pameran /even promosi di luar daerah sebanyak 18 kali, diantaranya pameran dan penampilan seni di Padang, Pekanbaru, di Jakarta , Jokjakarta , Batam dan Bandung. Dengan meningkatnya pemasaran wisata dengan sendirinya juga meningkatkan ekonomi masyarakat pelaku wisata dan ekonomi kreatif.

- d. Indikator 4 : “ Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)

Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 33,78% dengan realisasi 33,78% yang dihitung berdasarkan jumlah kelompok sadar wisata dan pemandu wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2021 Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten lima Puluh Kota adalah 29 kelompok dan realisasi tahun 2022 adalah 39 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2021 adalah sebanyak 19 orang dan pada tahun 2022 meningkat jadi 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui 7 kali pelatihan kepariwisataan yang

dilaksanakan oleh Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota melalui program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta sebanyak 302 orang pelaku wisata dan ekonomi kreatif . Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Tata Kelola Home Stay, Pelatihan Digitalisasi Destinasi wisata , pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata . Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima puluh kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata .

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tetap melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Industri pariwisata yang tetap bertahan dalam masa pandemi baik melalui monitoring ke lapangan maupun pelatihan peningkatan SDM pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Sasaran Kinerja 1, indikator nomor 4)

Usaha pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah home stay yang peningkatan jumlahnya sangat signifikan dari 65 menjadi 88 home stay dan penginapan yang pada umumnya berada di kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kreatifitas pemuda dan presentasi olahraga”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		Realisasi	Predik et
		Satuan	Target		
Meningkatnya kreatifitas pemuda dan presentasi olahraga	Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	%	10	10	Tinggi
	Presentase peningkatan atlet yang berprestasi	%	20	35	Sangat Tinggi

- a. Indikator 1 “Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan” target tahun 2022 adalah 10% dengan capaian kinerja 10%. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 2 Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan. . Pencapaian Indikator kinerja ini diukur dari jumlah orgaisasi pemuda yang aktif target 36 organisasi dan tercapai 41 organisasi. Disamping itu juga semakin banyaknya pemuda yang aktif berorganisasi dari tahun 2021 yang hanya 20.205 orang pada tahun 2022 meningkat menjadi 23.837 orang. Kemudian target prestasi pemuda pelopor di tingkat propinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 hanya 2 orang , pada tahun 2022 meningkat menjadi 6 orang yaitu sebanyak 3 orang pemuda pelopor menjadi juara II pada 3 bidang penilaian dan 3 orang sebagai Paskibra Propinsi Sumatera Barat, serta terpilihnya salah satu pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Paskibra Nasional.

Melalui pembinaan potensi pemuda yang dilaksanakan oleh Bidang Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 ini, diperoleh data bahwa di masing-masing nagari terdapat beberapa organisasi atau ikatan pemuda nagari yang aktif melakukan kegiatan keagamaan, kesenian dan olahraga. Diharapkan organisasi pemuda yang berada di bawah KNPI maupun di nagari bisa menjadi pelopor dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai calon pemimpin bangsa yang berilmu dan beriman.

Untuk melihat pencapaian indikator kinerja ini juga dihitung berdasarkan meningkatnya jumlah pemuda yang berwira usaha dari tahun sebelumnya yang hanya 55 orang/kelompok pada tahun 2021, pada tahun 2022 menjadi 96 orang/kelompok . Jumalh ini bertambah karena adanya pelatihan wira usaha yang rutin dilaksanakan dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya.

Untuk Kepramukaan, semakin banyaknya pemuda yang memilih pramuka sebagai ekstra kurikuler di sekolahnya . Kemudian aktifnya Kwarcab Pramuka Kabupaten Lima puluh Kota melaksanakan kegiatan pramuka sebagai wadah kreatifitas pemuda yang paling solid.

- b. Indikator 2 “Presentase peningkatan atlet yang berprestasi “ dalam mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata melaksanakan 1 program yaitu Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dengan target Kinerja 20 % pada tahun 2022 ini dan Realisasinya adalah 35 %. . Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah atlit yang berprestasi meraih medali pada kejuaraan dan even olahraga yang diikuti di tingkat Nasional. Pada Tahun 2021 jumlah Atlet yang berprestasi meraih medali di tingkat nasional adalah 43 atlet. Hal ini disebabkan tidak diizinkannya seluruh even dan kejuaraan olahraga pada masa pandemi covid, sehingga kejuaraan yang diikuti tidak banyak dan hanya melalui penjurian online. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah Atlit yang berprestasi meraih medali pada seluruh kejuaraandi tingkat nasional adalah 58 Atlet dalam . Jadi capaian indikator kinerja ini melebihi target yang hanya 20%.

Sasaran Strategis 3 ” Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		Realisasi	%	Predikset
		Satuan	Target			
Meningkatkannya kualitas dan kuan titas kinerja dan pelaya nan perang kat daerah	Presentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100%	Tinggi

Persentase pemenuhan terhadap Penunjang urusan pemerintah daerah titik beratna adalah pelayan internal kesekretariatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mencakup perencanaan dan pelaporan , pengelolaan administrasi barang milik daerah serta pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian . Dalam Hal ini Dinas Pariisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan . Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja 100%.

Dari pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama ditemukan beberapa masalah dan hambatan sebagai berikut :

1. Rendahnya jumlah dan rata-rata lamanya kunjungan wisatawan
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata
3. Belum memadainya fasilitas wisata dan fasilitas umum di objek wisata
4. Rendahnya kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan
5. Objek wisata unggulan berada dalam kawasan BKSDA
6. Belum maksimalnya promosi wisata domestic dan mancanegara
7. Belum maksimalnya pembinaan kepemudaan
8. Kurangnya SDM tenaga keolahragaan
9. Kurangnya event-event olahraga yang bersifat nasional dan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Terbatasnya sarana prasarana olahraga

Masalah dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut juga berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengemban Misi ke dua yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemapatan potensi daerah. Tujuan Misi Kepala Daerah ini adalah Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dan salah satu sasaraannya adalah meningkatkan daya saing pariwisata daerah . Sasaran Kepala Daerah ini langsung menjadi sasaran OPD Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Utamanya Persentase jumlah kunjungan wisatawan manca Negara dan domestic.

TABEL T-C.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATT ANALISIS
			2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2024 (9)	2021 (10)	2022 (11)	2024 (12)	2024 (13)	
1.	Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Kunjungan wisatawan	33,74%	40,49%	47,24%	53,98%	49,43%	38,9%	47,24%	53,98%	
2	Meningkatnya Kreatifitas Pemuda dan prestasi Olahraga	Persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	20%	22%	24%	26%	20,16%	22,16%	24,20%	26,50%	
		Persentase peningkatan atlet yang berpestasi	10%	15%	20%	25%	6 %	10%	15%	20%	
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase pemenuhan terhadap urusan pemerintah daerah kab/kota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis masalah, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 1 urusan, yakni urusan pilihan Pariwisata dan Urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.

Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang mendasar dan perlu pembenahan langsung yaitu Belum optimalnya upaya pengelolaan daya tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata , Belum optimalnya upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan , Belum optimalnya upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata, Belum optimalnya upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah , Belum berkembangnya destinasi wisata utama dan belum adanya pembukaan destinasi wisata baru .

2. Belum optimalnya peran & pengelolaan organisasi pemuda dan olahraga Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan, belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing kepramukaan

Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan

2. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata **(HAMBATAN)**
3. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan. **(PERMASALAHAN)**
4. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
Setelah membandingkan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD terjadi perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing OPD,
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Proses pembandingan ini dilakukan dengan tujuan efisiensi anggaran yang diutamakan untuk pencapaian IKU dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
4. Pada Rancangan Akhir RKPD terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan yang dipetakan sesuai dengan kepmendagri yang baru .

Pada rancangan akhir RKPD terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini, dimana terdapat beberapa tambahan kegiatan beserta sub kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung Program Unggulan Kepala Daerah 2021 – 2026 dan mencapai sasaran kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu sendiri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Meningkatnya kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peayanan perangkat daerah

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				2.235.550	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				2.235.550	
1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		708.149	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		708.149	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Disparpora	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	4.800.	Penyediaan jasa surat menyurat	Disparpora	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	4.800.	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disparpora	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.540	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disparpora	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.540	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disparpora	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	228.400	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disparpora	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	228.400	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disparpora	Terjaganya kebersihan kantor Bappeda	12 bulan	53.784	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disparpora	Terjaganya kebersihan kantor Bappeda	12 bulan	53.784	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Disparpora	Terpenuhinya ATK	12 bulan	27.871	Penyediaan alat tulis	Disparpora	Terpenuhinya ATK	12 bulan	27.871	

						kantor					
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disparpora	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	28.054	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disparpora	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	28.054	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disparpora	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	8.200	Penyediaan kompo nen instalasi listrik/ penerangan ba kantor	Disparpora	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	8.200	
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Disparpora	Tersedianya peralatan rumah tangga yang baik	12 bulan	10.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Disparpora	Tersedianya peralatan rumah tangga yang baik	12 bulan	10.000	
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disparpora	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	19.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disparpora	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	19.500	
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Disparpora	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	52.000	Penyediaan makanan dan minuman	Disparpora	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	52.000	
11.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disparpora	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	215.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disparpora	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	215.000	
1.2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran		1.431.401	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran		1.431.401	
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Disparpora	Tersedianya kendaraan dinas roda 4	2 unit	780.651	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Disparpora	Tersedianya kendaraan dinas roda 4	1 unit,	780.651	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Disparpora	Tersedianya laptop, printer ,AC,gorden	1 paket	84.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Disparpora	Tersedianya laptop, printer ,AC,gorden	1 paket	84.000	

3.	Pengadaan Moubiler	Disparpora	Tersedianya lemari arsip, kursi kerja, meja kerja	1 paket	60.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Disparpora	Tersedianya lemari arsip, kursi kerja, meja kerja, filling kabinet	1 paket	60.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disparpora	Terpeliharanya gedung kantor DisDisparpora	12 bulan	58.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disparpora	Terpeliharanya gedung kantor DisDisparpora	12 bulan	58.000	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disparpora	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	167.550	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disparpora	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	167.550	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Disparpora	Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	13.200	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disparpora	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	13.200	
7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Disparpora	Terlaksananya rehab gedung Kantor DisDisparpora	12 bulan	268.000	Rehabilitasi sedang/berat rmh gdng kantor	Disparpora	Terlaksananya rehab gedung Kantor DisDisparpora	1 paket	268.000	
1.3.	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		35.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur		35.000	
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disparpora	Tersedianya PDH dan Pakaian khusus hari tertentu pegawai DisDisparpora	1 paket	35.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disparpora	Tersedianya PDH dan Pakaian khusus hari tertentu pegawai DisDisparpora	1 paket	35.000	
1.4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disparpora	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur		20.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disparpora	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur		20.000	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Disparpora	Terlaksananya Peningkatan SDM melalui Diklat	10 orang	20.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Disparpora	Terlaksananya Peningkatan SDM melalui Diklat	10 orang	20.000	

						undangan					
1.5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Disparpora	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan		39.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		39.000	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disparpora	Terlaksananya system perencanaan dan pelaporan yg tepat waktu	10 dokumen	32.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disparpora	Terlaksananya system perencanaan dan pelaporan yg tepat waktu	10 dokumen	32.000	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Disparpora	Terlaksananya system pelaporan keuangan yg akurat dan tepat waktu	2 dokumen	7.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disparpora	Terlaksananya system perencanaan dan pelaporan yg tepat waktu	10 dokumen	7.000	
II.	URUSAN WAJIB				6.948.832	URUSAN WAJIB				6.948.832	
2.2	Kepemudaan dan Olahraga				6.948.932	Kepemudaan dan Olahraga				6.948.932	
2.2.1	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda				64.954	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda				64.954	
1	Pendataan potensi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya data kepemudaan yg akurat	80%	30.000	Pendataan potensi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya data kepemudaan yg akurat	80%	30.000	
2	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan karakter pemuda menjadi generasi qurani	60%	34.954	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan karakter pemuda menjadi generasi qurani	60%	34.954	
2.2.	Program		Terlaksananya		1.190.000	Program		Terlaksananya		1.190.000	

1	peningkatan peran serta kepemudaan		peningkatan peran serta pemuda dlm pembangunan			peningkatan peran serta kepemudaan		peningkatan peran serta pemuda dlm pembangunan			
1.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya jamboree pemuda , Terseleksi dan terkirimnya anggota BPAP, JPI dan pemuda pelopor, peringatan dan upacara sumpah pemuda, pembinaan organisasi pemuda	80%	335.000	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya jamboree pemuda , Terseleksi dan terkirimnya anggota BPAP, JPI dan pemuda pelopor, peringatan dan upacara sumpah pemuda, pembinaan organisasi pemuda	80%	335.000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	1 kali	215.000	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	1 kali	215.000	
3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan terhadap pemuda melalui monitoring dan evaluasi lapangan	1 keg	10.000	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan terhadap pemuda melalui monitoring dan evaluasi lapangan	1 keg	10.000	
4.	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya seleksi, latihan dan pengibaran bendera HUT RI oleh paskibra serta prosesi upacara peringatan HUT RI	1 keg	630.000	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya seleksi, latihan dan pengibaran bendera HUT RI oleh paskibra serta prosesi upacara peringatan HUT RI	1 keg	630.000	
2.2.	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Terlaksananya upaya penumbuhan kewirausahaan bagi pemuda		200.000	Program Pening. upaya penumbuhan kewirausahaan & kecakapan hidup pemuda		Terlaksananya upaya penumbuhan kewirausahaan bagi pemuda		200.000	

1.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan kelompok usaha pemuda produktif	1 kali	200.000	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan kelompok usaha pemuda produktif	1 kali	200.000	
2.2.3	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Terlaksananya Penyuluhan Narkoba untuk generasi muda		124.000	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Terlaksananya Penyuluhan Narkoba untuk generasi muda		124.000	
1.	Pemberian penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan Narkoba bagi generasi muda	100 orang	124.000	Pemberian penyuluhan ttg Bahaya Narkoba bagi pemuda	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan Narkoba bagi generasi muda	100 orang	124.000	
2.2.4	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga		Terlaksananya peningkatan SDM dlm pengembangan kebijakan manajemen olahraga		110.500	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga		Terlaksananya peningkatan SDM dlm pengembangan kebijakan manajemen olahraga		110.500	
1.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan dbagi wasit dan pelatih olahraga	30 orang	150.000	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelatihan dbagi wasit dan pelatih olahraga	1 kali	150.000	
2.2.5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Teklaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		3.138.206	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Teklaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		3.138.206	
1.	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan olahraga pelajar secara perorangan dan peregu	30 atlet	233.000	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan olahraga pelajar secara perorangan dan peregu	30 atlet	233.000	
2.	Pelaksanaan identifikasi dan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan	100 atlet	138,247	Pelaksanaan identifikasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan	100 atlet	138,247	

	pengembangan olahraga unggulan daerah		cabang olahraga unggulan daerah			dan pengembang an olahraga unggulan daerah		cabang olahraga unggulan daerah			
3.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembibitan dan pembinaan atlet berbakat	100 Atlet	238.260	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembibitan dan pembinaan atlet berbakat	100 Atlet	238.260	
4.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya senam missal SKPD, terkirimnya utusan Kab LK ke event OR rekreasi luar daerah	2 keg	64.203	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya senam missal SKPD, terkirimnya utusan Kab LK ke event OR rekreasi luar daerah	2 keg	64.203	
5.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kab. Lima Puluh Kota dan Sumbar	Terlaksananya O2SN SD,SMP, SMA, POPCADA, POPDAKejurda, SOINA LPI	12 keg	1.710.689	Penyelenggaran Kompetisi Olahraga	Kab. Lima Puluh Kota dan Sumbar	Terlaksananya O2SN SD,SMP, SMA, POPCADA, POPDAKejurda, SOINA LPI	12 keg	1.710.689	
6.	Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemberian bonus atlit, pelatih dan tehniisi olahraga berprestasi	1 keg	85.000	Pemberian Penghar gaan bagi insan olah raga yang berdikari dan berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemberian bonus atlit, pelatih dan tehniisi olahraga berprestasi	1 keg	85.000	
7.	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan olahraga di kalangan usia lanjut dan penyandang cacat	1 keg	60.000	Pengembang an Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan olahraga di kalangan usia lanjut dan penyandang cacat	1 keg	60.000	
7	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan olahraga	1 keg	100.797	Pengembang an Olahraga Rekreasi	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan	1 keg	100.797	
8	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya kejuaraan sepakbola antar klub Pekan	1 keg	850.000	Pembinaan olahraga yang berkembang	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya kejuaraan sepakbola antar klub Pekan	1 keg	850.000	
2.2.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan		908.045	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan		908.045	

			prasarana olahraga			Olahraga		sarana dan prasarana olahraga			
1.	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	GOR Singa Harau	Terlaksananya rehab sarpras GOR, pembangunan gudang, pengaspalan lap parker, lapangan basket, ruang ganti	1 paket	2.050.000	Peningkatan pembanguan Sarana dan Prasarana Olahraga	GOR Singa Harau	Terlaksananya rehab sarpras GOR, pembangunan gudang, pengaspalan lap parker, lapangan basket, ruang ganti	1 paket	2.050.000	
2.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga	GOR Singa Harau	Terlaksananya Pemeliharaan GOR Singa Harau secara rutin	12 bulan	359.772	Pemeliharaa n rutin/berkal a sarana prasarana olahraga	GOR Singa Harau	Terlaksananya Pemeliharaan GOR Singa Harau secara rutin	12 bulan	359.772	
III	URUSAN PILIHAN				9.641.549	URUSAN PILIHAN				9.641.549	
3.1	Kepariwisataan				9.641.549	Kepariwisat aan				9.641.549	
3.1.1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Terlaksananya Pemasaran pariwisata daerah		1.638.292	Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata		Terlaksananya Pemasaran pariwisata daerah		1.638.292	
1.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	Dalam kab dan Luar Kab	Terlaksananya partisipasi even pariwisata daerah, pemilihan uni uda, website Disparpora, Tour de Singkarak 2015	1 paket	1.638.292	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	Dalam kab dan Luar Kab	Terlaksananya partisipasi even pariwisata daerah, pemilihan uni uda, website Disparpora, Tour de Singkarak 2015	1 paket	1.638.292	
2	Pengembangan statistic kepariwisataan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyusunan profil pariwisata	1 keg	138.292	Pengembang an statistic kepariwisata an	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyusunan profil pariwisata	1 keg	138.292	
3.1.2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Terlaksananya Pengembangan Destinasi pariwisata daerah		7.719.174	Program Pengembang an Destinasi Pariwisata		Terlaksananya Pengembangan Destinasi pariwisata daerah		7.719.174	
1.	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Lembah Harau	Terlaksananya Pemeliharaan K3	12 bulan	840.000	Pengembang an Objek	Lembah Harau	Terlaksananya Pemeliharaan K3	12 bulan	840.000	

			Lembah Harau, Pemeliharaan satwa, pembuatan papan informasi			Wisata Unggulan		Lembah Harau, Pemeliharaan satwa, pembuatan papan informasi			
2.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Lembah Harau	Terlaksananya pengemb destinasi wisata aka barayun, sarasah bunta dll	1 paket	6.879.174	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Lembah Harau	Terlaksananya pengemb destinasi wisata aka barayun, sarasah bunta dll	1 paket	6.879.174	
3.1.3	Program Pengembangan Kemitraan		Terlaksananya Pengembangan Kemitraan dengan pelaku wisata		484.082	Program Pengembangan Kemitraan		Terlaksananya Pengembangan Kemitraan dengan pelaku wisata		484.082	
1	Fasilitasi pembentukan forum	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan pembentukan	1 keg	575.000	Fasilitasi pembentuka	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan pembentukan	1 keg	575.000	
2.	Pengembangan SDM dan Profesiisme	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Sadar	90 orang	94.000	Pengembangan SDM dan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pelatihan Sadar	90 orang	94.000	
3.	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemilihan rumah makan higienis, workshop pengusaha home stay, pertemuan rutin pelaku wisata	30 orang	390.082	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemilihan rumah makan higienis, workshop pengusaha home stay, pertemuan rutin pelaku wisata	30 orang	390.082	
					20.269.031					20.269.031	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat kegiatan pelatihan kepariwisataan dan kepemudaan yang sebelumnya juga sudah merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

TABEL : ASPIRASI MASYARAKAT URUSAN ARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK PENYUSUNAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2024

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Nagari Sungai Antuan, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
2	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Sungai Antuan, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
3	Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda	Nagari Sungai Antuan, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4	Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda	Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
5	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Nagari Sungai Antuan, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
6	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	-	kegiatan	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

7	Penyaluran Narkoba bagi Pemuda	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
8	Bantuan Peralatan Olah Raga	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
9	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	nagari ampalu, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
10	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan.	Muaro Paiti, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

11	Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
12	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Situjuah Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
13	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
14	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Jorong Hulu Aia Batu Badukuang , Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
15	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
16	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata di objek wisata yang potensial	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
17	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

18	Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
19	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
20	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Subaladuang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
21	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata di objek wisata yang potensial	Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
22	Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
23	Bantuan Peralatan Olah Raga	Pauh Sangik, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	20.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
24	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jorong XII Kampuang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

25	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
26	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Lubuakj Alai, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
27	Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda	Nagari Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
28	Bantuan Peralatan Olah Raga	Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
29	Bantuan Peralatan Olah Raga	Tanjung Pauh, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
30	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Banja Loweh Godang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
31	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Guntuang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
32	Penyluhan Narkoba bagi Pemuda	Nagari Lubuak batingkok, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,

33	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan.	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
34	Bantuan Peralatan Olah Raga	Tanjung Pauh, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
35	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata di objek wisata yang potensial	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
36	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Tanjung Pauh, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
37	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000 .000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
38	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan.	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
39	Bantuan Peralatan Olah Raga	Piobang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
40	Bantuan Peralatan Olah Raga	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
41	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata di objek wisata yang potensial	Gunuang Malintang, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
42	Bantuan Peralatan Olah Raga	Piobang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

43	Bantuan Peralatan Olah Raga	nagari jopang manganti, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
44	Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	nagari jopang manganti, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
45	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Nagari Koto Alam, Kab. Lima Puluh Kota	3	orang	9.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
46	Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda	taeh buik, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
47	Bantuan Peralatan Olah Raga	Lapangan Tigo Selo, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
48	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata di objek wisata yang potensial	Jorong (Harau, Hulu Aia, Landai), Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
49	Bantuan Peralatan Olah Raga	Talang Maur, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
50	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Gurun, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

51	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Nagari Gurun, Kab. Lima Puluh Kota	2	orang	8.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
52	Bantuan Peralatan Olah Raga	Kantor Wali Nagari Andaleh Jorong Kampuang Tengah, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
53	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Bukik Bulek, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
54	Bantuan Peralatan Olah Raga	Banja Loweh, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
55	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Nagari Galugua, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
56	Bantuan Papan Informasi Wisata	Jorong Air Babar, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	50.000.000.00	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
57	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	POKDARWIS AIA BABA WATERPARK Jorong Air Babar, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
58	Bantuan Peralatan K3 di Objek Wisata	Aia Baba Waterpark Jorong Air Babar, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

59	Bantuan Peralatan Olah Raga	SSB Talenta Jorong Alang Laweh, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
60	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong VIII Kampuang, Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
61	Bantuan Peralatan Olah Raga	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	1	Paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan
62	Bantuan Peralatan Olah Raga	suliki pasar, padang Ipweh , suliki baruah, Kab. Lima Puluh Kota	1	paket	15.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
63	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan.	taratak, suliki baruah dan suliki pasar, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
64	Bantuan Peralatan Olah Raga	Nagari Andiang, Kab. Lima Puluh Kota	2	paket	10.000.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
65	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata, (Pengusaha Destinasi, Pengusaha Home Stay, Rumah Makan dan Kuliner)	Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	5	orang	9.000.000.00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

TABEL : USULAN POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK PENYUSUNAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2024

No	Nama Sub Kegiatan yang Menampung Pokok Pikiran	Uraian Pokok Pikiran	Volume	Satuan	Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Kec. Luak
2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Kec. Lareh
3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan peningkatan SDM bidang pariwisata di objek wisata unggulan	3	orang	9.000.000	Kec. Luak
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda,Advokasi,Akses Pengembangan Diri,Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,Partisipasi Pemuda dalam Proses	Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	3	orang	9.000.000	Lima Puluh Kota
5	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan peningkatan SDM bidang pariwisata di objek wisata unggulan	3	orang	9.000.000	Kec. Lareh
6	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan pramuwisata/guide tingkat pemula dan menengah	3	orang	13.000.000	Kec. Luak
7	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan pramuwisata/guide tingkat pemula dan menengah	3	orang	13.000.000	Kec. Lareh
8	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Luak

9	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Batu Balang
10	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Kec.Gunuang Omeh
11	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bantuan Peralatan Olahraga	10	Club	50.000.000	Kec.Payakumbuh
12	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Koto Baru Simalanggang
13	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec.Payakumbuh
14	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Mungka
15	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Situjuah,Luak,Lareh
16	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bantuan Peralatan Olahraga	15	paket	50.000.000	Kec. Situjuah,Luak,Lareh
17	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Kec. Situjuah,Luak,Lareh
18	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Mungo Kec Luak
19	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari se Kec.Luak
20	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Nagari Galugua

21	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kabupaten Lima Puluh Kota
22	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan tata kelola pariwisata (pengusaha destinasi,pengusaha homestay,rumah makan dan kuliner)	3	orang	9.000.000	Kec.Harau
23	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Sei Kamuyang
24	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Batu Payuang
25	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Halaban
26	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Nagari Halaban
27	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan	3	orang	9.000.000	Kec.Kapur IX
28	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan	3	orang	9.000.000	Kec. Pangkalan
29	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec.Kapur IX
30	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Pangkalan
31	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Mungka

	Prasarana Olahraga Kab/Kota					
32	Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda	3	orang	9.000.000	Kec. Bukik Barisan
33	Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda	3	orang	9.000.000	Kec. Luak
34	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Luak
35	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	1	paket	15.000.000	Kec. Mungka
36	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Bantuan Peralatan Olahraga	2	paket	15.000.000	Nagari Taeh
37	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan kelompok sadar wisata di objek wisata yang potensial	3	orang	9.000.000	Nagari Talang Maur
38	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa)	Pelatihan peningkatan SDM Bidang Pariwisata di objek wisata unggulan	3	orang	9.000.000	Nagari Tanjuang Bungo Kec. Suliki

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Dialokasikan anggaran(per pekerjaan)

Dari Tabel Aspirasi Masyarakat dan Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditujukan untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bisa kami jelaskan bahwa usulan aspirasi masyarakat berjumlah 65 usulan dan Usulan Pokok Pikiran berjumlah 38 usulan. Usulan tersebut terdiri dari :

- Peningkatan SDM Pelaku wisata (pengelola objek wisata, pengelola home stay, Kelompok Sadar Wisata, Pramuwisata dan pengusaha kuliner)
- Peningkatan SDM Pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan serta penyuluhan Narkoba
- Bantuan peralatan K3 dan Papan Informasi wisata di destinasi wisata
- Bantuan Peralatan olahraga untuk klub dan nagari
- Pembangunan Fasilitas Umum di objek wisata
- Pembangunan/Rehab lapangan olahraga

Usulan – usulan tersebut kebanyakan diterima (LAYAK) karena sudah merupakan kegiatan rutin Dinas Disparpora setiap tahunnya. Dan ada juga usulan yang LAYAK diterima apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pembangunan Nasional tahun 2024 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2024 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2024 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2022.

Pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang pertamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan penguatan daya saing usaha. Sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut sejalan dengan agenda prioritas Propinsi Sumatera Barat nomor 6 yaitu mencetak 100 ribu milenial entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif dan prioritas nomor 8 yaitu membangun industri pariwisata bersama dengan pemerintah kabupaten/kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat nomor 8 (delapan) adalah Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang kewenangan urusan pariwisata berada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini mengacu dan mempedomani RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Dalam RPJMD 2021-2026 telah dirumuskan berbagai rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
4. Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mendukung pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu

"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kewenangan pada Misi Ke Dua yaitu :

“ Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional “

1. Melakukan pengembangan Destinasi unggulan dan destinasi lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemasaran Pariwisata yang berdaya guna yang berbasis Nagari dan masyarakat.
3. Meningkatkan SDM Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Disparpora Tahun 2024

Adapun Tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Dinas Disparpora:

a. Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang mengacu kepada visi, misi dan prioritas yang akan dicapai yaitu

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan dan merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi

3.3. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

suatu rencana . Selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk Tahun 2024 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 7 (tujuh) program dan dijabarkan menjadi (empat puluh delapan) kegiatan. Ada 1 program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur pada sekretariat, 2 program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan 3 program bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Penetapan program dan kegiatan Dinas Disparpora untuk Rencana Kerja tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Disparpora tahun 2021 - 2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Kemendagri No. 050-5889 tahun 2021 seperti yang dijelaskan pada tabel TC.33

Tabel T-B.36
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
I	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
I.1	Persentase Koperasi Aktif	kurang	1.Banyaknya koperasi yang tidak aktif 2. Kurangnya pertumbuhan koperasi baru	
I.2	Jumlah Koperasi Aktif	kurang	1.Banyaknya koperasi yang tidak aktif 2. Kurangnya pertumbuhan koperasi baru	
1.3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Melampaui	Dengan keluarnya PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 35 kriteria usaha mikro adalah mempunyai modal paling banyak Rp.1.000.000.000 dan omset paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Usaha kecil adalah yang mempunyai modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- dan omset pertahunnya lebih dari Rp.2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp.15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka yang ada hanya usaha dengan kategori mikro	Perubahan Kategori Usaha dengan keluarnya PP No.7 Tahun 2021
1.4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Melampaui	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi
1.5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wiraswasta	Belum tercapai	Belum tumbuhnya usaha mikro di tengah masyarakat, karena belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19	
II	PERDAGANGAN			
II.1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Belum tercapai	Belum terlaksananya Tera dan Tera Ulang di semua wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2024 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan . Hal ini akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

RENJA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menguraikan program bidang pariwisata , kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini tertuang dalam 6 program 18 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomo 50-5889 Tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.365.901.460.- (Tiga belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Tabel 4.1**Rencana Target Kinerja IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	20%	25%	
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	20%	25%	
3	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	30%	40%	
4	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	33%	44%	
5	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	

Tabel 4.2**Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1.1		Persentase Koperasi aktif	66,20	69,12	
1.2		Jumlah Koperasi Aktif	143	150	
1.3		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	828.547,5	911.402,25	
1.4		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3,94	4,94	
1.5		Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	28,6	29,25	
2.	Perdagangan				
2.1		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	45	50	

Tabel 4.3
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program,
Kegiatan Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	3.345.231.405	5.946.318.985	4	3.345.231.405	5.946.318.985
2	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	511.170.00	2.719.710.000	2	511.170.00	2.719.710.000
3	Urusan Perdagangan	2	43.760.000	1.460.270.000	2	43.760.000	1.460.270.000
	Total	5	4.200.251.405	10.126.298.985	8	4.200.251.405	10.126.298.985

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						13.365.901.460,00							32.361.695.299,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.125.865.560,00							21.044.297.859,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						11.125.865.560,00							21.044.297.859,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 % 20 %	3.883.104.909,00						-	7.897.705.011,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-			20 %	73.402.734,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	195.638.706,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.535.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		67.801.332,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.971.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		18.299.962,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.570.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.034.370,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.265.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.505.760,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.345.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.305.110,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	21.625.734,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.832.487,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	9.091.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.859.685,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.248.067.375,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	5.723.866.305,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.241.563.375,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.695.676.985,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.504.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		17.118.888,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA
	2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.312.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.758.432,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi Barang milik daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	24.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			20 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	205.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-			20 %	159.915.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	509.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.200.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		27.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.773.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.058.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.991.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	117.773.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		305.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			25 %	88.700.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	404.200.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	38.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		99.200.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	-			20 %	97.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	366.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		87.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	57.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			20 %	215.419.000,00			-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	459.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	174.889.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		265.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase meningkatnya penataan organisasi	-			20 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda	-			10 % 100 %	1.173.822.200,00						-	1.431.280.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda pelopor, wirausaha muda dan organisasi pemuda	-			20 %	1.013.822.200,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.242.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor														
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	65.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	208.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				33 Orang	200.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan														
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				60 Orang	195.013.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi														
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				30 Orang	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda														
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				30 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		112.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya aktifitas induk organisasi pemuda	-			20 %	160.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	189.280.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		189.280.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga	-			100 %	5.918.938.251,00						-	11.189.102.848,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga	-			20 %	3.050.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.644.733.296,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	3.050.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.644.733.296,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah cabor yang berprestasi	-			20 %	1.086.792.351,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	4.916.195.696,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	986.764.851,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.790.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan														
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				60 Orang	100.027.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		126.195.696,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah Atlit yang berprestasi	-			20 %	652.075.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	682.173.856,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				60 Orang	102.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		189.937.584,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	200.015.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		155.236.272,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang	249.999.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		112.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga														
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase peningkatan aktifnya Induk Organisasi Keolahragaan	-			20 %	600.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya prestasi olahraga	-			20 %	530.070.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	946.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	129.935.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		176.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	100.077.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		159.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	100.058.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		311.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase fasilitasi pengembangan Pramuka	-			100 %	150.000.200,00						-	526.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Aktifnya organisasi Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota	-			20 %	150.000.200,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	526.210.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				0 Organisasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		126.210.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	150.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.240.035.900,00							11.317.397.440,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.240.035.900,00							11.317.397.440,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	-			25 %	240.000.000,00						-	5.508.034.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Kab.Lima Puluh Kota	-			20 %	0,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.826.054.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		1.466.508.096,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		359.545.904,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	-			20 %	240.000.000,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.801.106.192,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	240.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		1.801.106.192,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	-			20 %	0,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.880.873.808,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		968.873.808,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		912.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase peningkatan promosi wisata yang berkualitas	-			20 % 17 %	0,00						-	4.217.063.440,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi wisata dalam dan luar negeri	-			20 %	0,00			-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	4.217.063.440,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		429.651.472,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		224.840.592,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Kegiatan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		2.977.922.736,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Promosi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		584.648.640,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	-			43.24 %	2.000.035.900,00						-	1.592.300.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	-			20 % 20 %	2.000.035.900,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.592.300.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		234.900.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				300 Orang	600.005.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		1.069.400.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				65 Orang	1.300.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		288.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	J U M L A H							13.365.901.460,00							32.361.695.299,00		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**17. RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD/N	II-1
 TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan	II-1
Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra DPMD/N	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan	II-19
Masyarakat dan Desa/Nagari	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-23
DPMD/N	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumateta	III-1
Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota	
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD/N	III-3
3.3. Program Dan Kegiatan	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja DPMDN Tahun 2024	I-4
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMDN	II-22
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-26
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD/N	III-5
Tabel 3.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	III-6
Tabel 3.3	Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat .	III-7
Tabel 3.4	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMD/N.....	III-7
Tabel 3.5	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas	III-8
Tabel 4.1.	Rencana Target Kinerja DPMD/N.....	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan..	IV-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir
- VI. Penetapan Renja PD..

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMDN), dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2024, direncanakan selesai minggu pertama bulan Juli 2023. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DPMDN mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja DPMDN Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																												
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																												
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																												
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																												
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																												
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																												
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																												
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																												
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada DPMDN untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																												

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																														
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
3	Verifikasi Renja PD oleh DPMDN untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																			
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																			
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																			
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																			
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																			
F	Penetapan Renja PD 2024																																			
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke DPMDN untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																			
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																			
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke DPMDN																																			
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh DPMDN kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya																																			

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	ditetapkan dengan Perkada																												
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi DPMDN																												

- III. **Penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2024** adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke DPMDN untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke DPMDN paling lambat minggu keempat bulan Juli 2023.
- IV. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.** Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan DPMDN. Namun berdasarkan kesepakatan DPMDN dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di DPMDN. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah DPMDN dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Aula DPMDN yang dihadiri oleh 40 Perangkat Daerah.
- V. **Perumusan rancangan akhir** merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

- VI. **Penetapan Renja PD** merupakan tahap akhir dalam penyusunan rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2024 disampaikan ke DPMDN untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke DPMDN untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

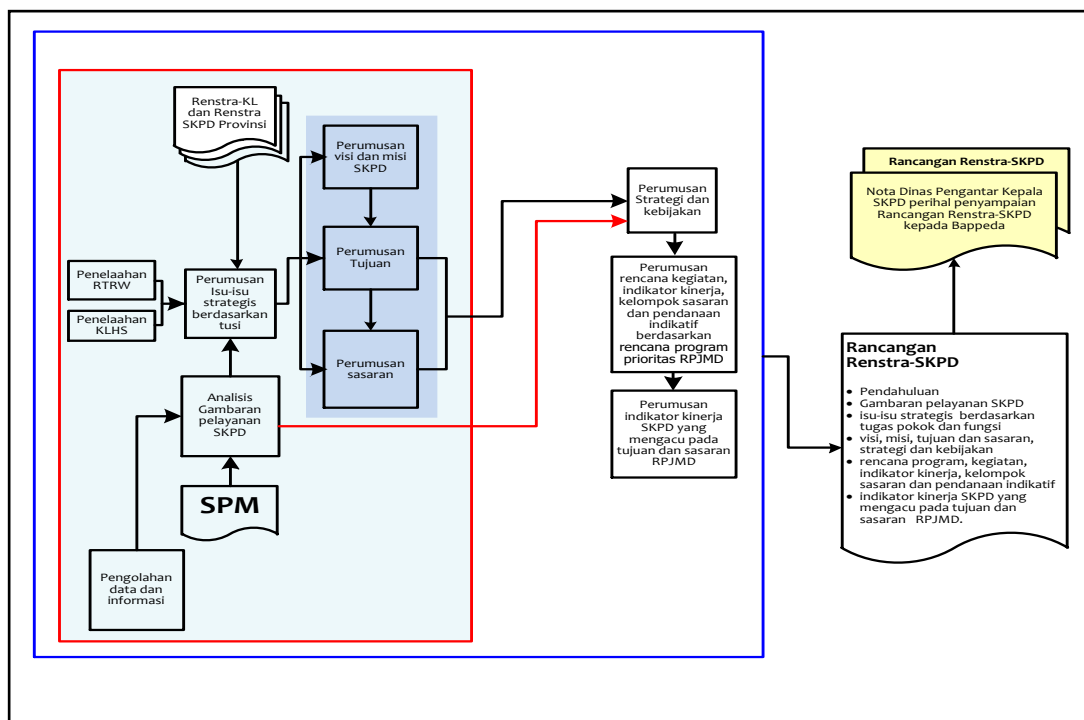
Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang RKPD oleh DPMDN, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Seperti halnya RKPD 2024, maka Renja DPMD/N Tahun 2024 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-2 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari periode tahun 2021-2026. Renja DPMD/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab

DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2024, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021-2022 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga

Tahun 2022, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja serta Pendanaan yang dibutuhkan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2022 dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Kondisi anggaran DPMD/N tahun 2022 diawal Rp. 6.177.168.811,- kemudian pada perubahan anggaran menjadi Rp. 6.726.633.048,-. Terdapat penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target perencanaan tersebut antara lain:

A. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sub kegiatan yang tidak mencapai target realisasi dilaksanakan pada Tahun 2022 yakni kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran Rp. 200.000.000,- tidak dapat direalisasikan, dikarenakan output sasaran kegiatan berupa Study Tiru Bamus Kecamatan Payakumbuh tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2022, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.560.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.476.800,- (96,46%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,47 %.
 - b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.547.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.540.000,- (99,90.%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
 - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.925.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.060.000,- (87,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 87,51 %.
 - d) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.016.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.131.000,- (82,36%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 85,73%.
 - e) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.653.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.598.000,- (98,49%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

- f) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.601.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.566.000,- (99,85%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,7 %.
 - g) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.935.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.620.000,- (96,83%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,83 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.454.488.648,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.427.003.054,- (98,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
 - b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.575.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.842.000,- (86,85%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 87,00 %.
 - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.703.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.413.800,- (95,66%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 91,00 %.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- a) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.090.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.675.000,- (95,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- b) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.652.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.637.400,- (99,82%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.491.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.491.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
- b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.560.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.560.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
- c) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.362.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.324.900,- (99,72%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
- d) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.656.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.625.000,- (99,53%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
- e) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.285.500,- (99,52%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
- f) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.794.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.607.600,- (99,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
- b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.490.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.298.220,- (95,13%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,18 %.

- c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.809.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.809.500,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,71%.
 - d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.440.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.040.000,- (96,28%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,15 %.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.886.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.148.172.217,- (98,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 97,99 %.
 - b) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.830.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.265.000,- (69,13%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 68,94 %.
 - c) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.168.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.160.000,- (99,98%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - a) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.464.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.334.500,- (99,57%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,58%.
 - b) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.495.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 164.475.700,- (99,38%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,10%.
 - c) Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.026.800,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 159.806.492,- (99,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,74%.

- d) Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.422.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.357.200,- (99,58%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,58 %.
- e) Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.060.640.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.054.858.500,- (99,45%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93,98 %.
- f) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.930.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.160.726.000,- (97,45%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,96%.
- g) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.217.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.223.922.600,- (96,43%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 97,89%.
- h) Subkegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.402.955.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.340.424.200,- (84,48%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 84,48%.

C. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Subkegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.034.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.774.000,- (98,47%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 98,47%.
 - b) Subkegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW, PKK,

Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.391.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.764.000,- (94,49%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 94,49%.

- c) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.682.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.211.090.500,- (99,25%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 98,92 %.
- d) Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.804.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.51.360.400,- (99,14%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 98,32%.
- e) Subkegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.765.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.285.000,- (96,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,52%.
- f) Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 726.417.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 683.172.712,- (94,05%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93,56%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2022 tidak terdapat program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan Tahun 2022 dapat dicapai **94,43%**. Tetapi ada beberapa

subkegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Subkegiatan yang tidak terlaksana yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu, terhadap pencapaian target dan realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,71%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 97,57%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra untuk tahun 2022 adalah sebesar 54.06%.**
2. **Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 88.88%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 86,71%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2022 adalah sebesar 24.78%.**
3. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 95.48%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 95,03%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 26.30%.**

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2022-2023 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan terhadap target Renstra rendah. Kebijakan refocussing anggaran pada tahun 2022, mempengaruhi tingkat capaian kinerja program/kegiatan. Dengan adanya perubahan Renja DPMD/N tahun 2022, target kinerja direvisi sebagai upaya untuk menghadapi kendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Sehingga diharapkan usulan program/kegiatan dan pagu anggaran urusan pemberdayaan masyarakat sesuai Renja tahun 2024 dapat diakomodir pada APBD tahun 2024 nantinya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan
Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	78.84	100%	100%	1
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	78%	80%	80%	100	85%	85%	1
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Doku men	0,11
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Doku men	0,16
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Doku men	0,16
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Doku men	0,16
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Doku men	0,16
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	29 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Doku men	0,17
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	73.59	4 Laporan	4 Lapor an	0,16
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	81.09	100%	100%	1
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	143 ASN	28 ASN	14 Bln	14 Bln	81.00	27 ASN	27 ASN	0,18
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	60 Bulan	-	-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	0,2
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	15000 Dokumen	-	-	-	0.00	3000 Dokumen	3000 Doku men	0,02
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	60 Bulan	-	-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	0,2
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	6 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	99.72	1 Dokumen	1 Doku men	0,16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	26 Dokumen	-	-	-	0.00	4 Dokumen	4 Dokumen	0,15
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60 Dokumen	-	-	-	97.99	12 Dokumen	12 Dokumen	0,2
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	0,16
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	-	-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	0,2
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	12.30	100%	100%	1
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	-	-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	0,11
2.13.01.2.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	5 Dokumen	-	-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	0,2
2.13.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	13 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12.30	2 Laporan	2 Laporan	0,15
2.13.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	60 Bulan	-	-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	0,2
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	0%	0%	0.00	100%	100%	1
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	5 Unit	-	-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	0,2
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	373 Stel	-	-	-	0.00	48 Stel	48 Stel	0,12
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	245 Dokumen	-	-	-	0.00	47 Dokumen	47 Dokumen	0,19
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	60 Bulan	-	-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	0,2
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP ASN	144 Dokumen	-	-	-	0.00	28 Dokumen	28 Dokumen	0,19
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	10 ASN	-	-	-	0.00	2 ASN	2 ASN	0,2
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 ASN	-	-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	0,2
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	0,2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	0,2
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	52.27	100%	100%	1
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	36 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	70.35	6 Jenis	6 Jenis	0,16
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0.00	5 Jenis	5 Jenis	0,16
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	18 Paket	-	-	-	0.00	3 Paket	3 Paket	0,16
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	36 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	76.67	6 Paket	6 Paket	0,16
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	48 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.24	8 Jenis	8 Jenis	0,16
		Jumlah penggandaan yang disediakan	17990 Lembar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		2990 Lembar	2990 Lembar	0,16
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1080 Eksemplar	-	-	-	0.00	180 Eksemplar	180 Eksemplar	0,16
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	72 Bulan	-	-	-	0.00	-	-	-
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	5650 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31.88	600 Orang	600 Orang	0,10
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	900 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	58.89	150 Laporan	150 Laporan	0,16
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	1800 Porsi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		300 Porsi	300 Porsi	0,16
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	6 Laporan	-	-	-	0.00	1 Laporan	1 Laporan	0,16
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	48 Bulan	-	-	-	0.00	-	-	-
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	100%	100%	100%	0.00	100%	100%	
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	6 Unit	-	-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	0,16
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	14 Unit	-	-	-	0.00	4 Unit	4 Unit	0,28
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah filling kabinet yang diadakan	93 Unit	-	-	-	0.00	2 Unit	2 Unit	0,02
		Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan		-	-	-	0.00	1 Set	1 Set	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
		Jumlah lemari arsip yang diadakan		78.84	-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	-
		Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan		100	-	-	0.00	13 Unit	13 Unit	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	57 Unit	100	-	-	0.00	14 Unit	14 Unit	0,25
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit	100	-	-	0.00	-	-	-
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasaran a gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	5 Unit	100	-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	0,2
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasaran a pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan	5 Paket	100	-	-	0.00	1 Paket	1 Paket	0,2
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	100%	100%	80.70	100%	100%	1
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	24 jenis	100	12 Bulan	12 Bulan	99.40	4 jenis	4 jenis	0,17
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	72 Rekening	73.59	12 Rekening	11 Rekening	90.00	12 Rekening	12 Reken ing	0,17
		Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	2160 Meter Kubik	81.09	360 Meter Kubik			360 Meter Kubik	360 Meter Kubik	0,17
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	72000 KWh	81.00	12000 KWh			12000 KWh	12000 KWh	0,02
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	155 Unit	0.00 0.00	31 Unit	31 Unit	50.73	31 Unit	31 Unit 21 Orang	0,2
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	105 Orang		21 Orang	21 Orang	91.53	21 Orang		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	0.00	100%	100%	66.94	100%	100%	1
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	114 Unit	99.72	-	-	0.00	19 Unit	19 Unit	0,17
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	84 Unit	0.00	-	-	0.00	14 Unit	14 Unit	0,17
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	30 Unit	97.99	-	-	0.00	5 Unit	5 Unit	0,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	0.00	75 kgt	75 kgt	64.64	-	-	-
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	625 Paket	0.00	-	-	0.00	125 Paket	125 Paket	0,2
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	30 Paket	12.30	10 Paket	10 Paket	14.04	6 Paket	6 Paket	0,2
		Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	115 Unit	0.00	-	-	0.00	23 Unit	23 Unit	0,2
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	0.00	-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	0,17
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51 Paket	12.30	-	-	0.00	10 Paket	10 Paket	0,2
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	60 Paket	0.00	1 Paket	1 Paket	100.00	10 Paket	10 Paket	0,17
				0.00						
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0.00			56.80			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	12,5%	0.00	2.5%	2.5%	62.63	2,5%	5%	0,40
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	12,5%	0.00	2.5%	2.5%	62.63	2,5%	5%	0,40
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12,5%	0.00	2,5%	2,5%	62.63	2,5%	5%	0,40
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	100%	0.00	0,2%	0,2%	49.77	54,43%	5%	0,40
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	158 Nagari	0.00	2 Nagari	2 Nagari	49.77	43 Nagari	45 Nagari	0,28
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar	79 Nagari	0.00	2 Nagari	2 Nagari	41.64	36 Nagari	38 Nagari	0,48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		nagari/desa dalam Kabupaten								
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	79 Nagari	0.00	0	0	0.00	7 Nagari	7 Nagari	0.09
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan	0.00	0 Kawasan Perdesaan	0 Kawasan Perdesaan	98.93	1 Kawasan Perdesaan	1 Kawasan	1
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		52.27	100%	100%	51.85	100%		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	68%	70.35	56%	56%	51.85	58%		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari	0.00	0	0	0.00	79 Wali Nagari	79 Wali Nagari	100
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	796 Aparatur	0.00	0	0	0.00	79 Wali Nagari+ 79 Bamu Nagari	79 Wali Nagari + 79 Bamu Nagari	100
		Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	95%	76.67	-	-	0.00	49%		
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	100%	10.24	75%	75%	7.52	80%		
		Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	100%		75%	75%		80%		
		Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	100%	0.00	85%	85%		86%		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi	100%	0.00	85%	85%	85.06	86%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
		SISKEUDES								
		Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	100%	31.88	80%	80%		86%		
		Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	100%	58.89	75%	75%		80%		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 nagari		79 Nagari	79 Nagari	36.96	79 Nagari		
		Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari	0.00	13 Nagari	13 Nagari		13 Nagari		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagari dan 13 Kec	0.00	79 Nagari dan 13 Kec	79 Nagari dan 13 Kec	62.17	79 Nagari dan 13 Kec		
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	1422 Dokumen	0.00	237 rancangan/ n/ dokumen	237 rancangan/ dokumen	94.66	237 rancangan/ dokumen		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%	0.00	80%	80%	53.68	82%		
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	12 BumDesa	0.00	0	0		4 BumDesa		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	79 Nagari	0.00	18 Nagari	18 Nagari	0.00	52 Nagari		
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari	0.00	-	-	0.00	79 Nagari		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/moni toring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	79 Nagari	0.00	26 Nagari	26 Nagari	100.00	39 Nagari		
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	79 Nagari	0.00	40 Nagari	40 Nagari		45 Nagari		
		Jumlah nagari dengan status swadaya	0	0.00	3 Nagari	3 Nagari		2 Nagari		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah nagari dengan status swasembada	31 Nagari	0.00	27 Nagari	27 Nagari		28 Nagari	28 Nagari	100
		Persentase nagari dengan status mandiri	14%	0.00	5%	5%		5%	5%	100
		Persentase nagari dengan status tertinggal	0%	0.00	2.5%	2.5%		2.5%	2.5%	100
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Mananajemen Pemerintahan Desa	1250 orang	80.70	0	0	0.00	250 orang	250 orang	100
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	10000%	99.40	85%	85%	89.28	85%	85%	100
2.13.04.2.01.14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	719 orang	90.00	0	0	0.00	79 orang	79 orang	100
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	79 nagari		2 nagari	2 nagari	28.94	2 nagari	2 nagari	100
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggara n Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawarata n Desa/Nagari (Bamus Nagari)	100%		25%	25%	79.90	50%	50%	100
		Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	100%	50.73	60%	60%	0.00	70%	70%	100
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	54	91.53	44	44	57.90	46	46	100
		Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	33	66.94	35	35		34	34	100
		Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3	0.00	3	3		3	3	100
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	48 Kegiatan	0.00	5	5		7 Kegiatan	7 Kegiat an	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(1 0/4)
		Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	18 Inovasi	0.00	3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	40.21	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	89.47	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	1
		Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	1
		Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)	1
		Jumlah Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kabupaten	11 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 6 tahun		1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		2 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	2 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	1
		Persentase Posyandu Aktif Mandiri	20 % Posyandu aktif mandiri		12 % Posyandu aktif	12 % Posyandu aktif		13 % Posyandu aktif	13 % Posyandu aktif	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					mandiri	mandiri		mandiri	aktif mandiri	
		Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Fasilitasi KKN 15 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi	1
		Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	1
		Jumlah Pokja Posyandu Aktif	5 Pokja Posyandu di Nagari		5 Pokja Posyandu di Nagari	5 Pokja Posyandu di Nagari		5 Pokja Posyandu di Nagari	5 Pokja Posyandu di Nagari	
		Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penggunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)	1 Regulasi (Perbud)	1
			Hibah LKAAM (6 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	1
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359 KPMD		20 KPMD	20 KPMD	47.95	40 KPMD	40 KPMD	0,11
		Persentase LPM Aktif	80%		58%	58%		60%	60%	1
		Jumlah kelompok BP-SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	141 KP SPAM		20 KSPAMS	20 KSPAMS		60 KPSPAM	80 KPSPAM	0,57
		Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kali Rakor		1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		2 Kali Rakor	2 Kali Rakor	1
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	40 Kelompok		0	0	0.00	26 Kelompok	26 Kelompok	1
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah PosyanteK Yang Terbentuk	79 PosyanteK		2 PosyanteK	2 PosyanteK	21.60	6 PosyanteK	6 PosyanteK	0,08
		Jumlah Gelar TTG yang diikuti	18 Gelar TTG		3 Gelar TTG	3 Gelar TTG		3 Gelar TTG	6 Gelar TTG	0,33
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring	79 Nagari		79 Nagari	79 Nagari	57.33	79 Nagari	79 Nagari	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kegiatan BBGRM								
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	6 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		1 Nagari	2 nagari	0,33
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	3 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		0	-	-
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	93 Kelompok		93 Kelompok	93 Kelompok	54.85	93 Kelompok	93 Kelom pok	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila di disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.
- Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026**

No	Indikator	SPM	IKU KD	IKD	IKU PD	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	Meningkatnya status Nagari disektor Ekonomi, social dan lingkungan		V	-	-	0,7562	0,772	0,787 8	0,80 36	0,814 9	0,762 7	-	0,787 8	0,803 6	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-		V		81%	82%	84%	85%	86%	80%	-	84%	85%	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	-		V		2.5%	1.25%	1.25 %	0	0	3%	-	1.25 %	0	
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	-		V		8%	9%	10%	12%		3%	-	10%	12%	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat				V	55%	60%	65%	70%	75%	44%	-	65%	70%	
	Ondeks Desa Membangun (IDM)				V	0,7562	0,772	0,787 8	0,80 36	0,814 9	0,762 7	-	0,787 8	0,803 6	
	Nilai AKIP				V	66	67	68	69	70	70,56	-	68	69	
	Nilai IRB				V	27	28	29	30	31	34,38	-	29	30	
	Nilai IKM				v	84	85	86	87	88	83	-	86	87	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
4. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
5. Terpenuhiya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaran tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.
3. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
4. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas DPMD/N ini akan berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan menghadapi isu strategis nasional. Isu strategis nasional yang terkait pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah upaya percepatan penanganan stunting. Sedangkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih periode tahun 2022-2026, terkait dengan misi satu (1) dan tiga (3). Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan**. Misi tiga (3) adalah **Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah**. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 adalah program-program yang dapat mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD/N. Serta program yang dapat mendorong

percepatan pencapaian target kinerja sesuai visi misi kepala daerah dan isu strategis nasional.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada DPMN hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Nagari.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi DPMD/N Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.
3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur DPMD/N.
2. Sarana dan Prasarana DPMD/N belum memadai.
3. Keterbatasan Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan.

4. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat.
5. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari.
6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna.
7. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.
8. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
9. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
10. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
11. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja DPMD/N terlihat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan. Hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.351.270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.821.915	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	208.107	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	33.012	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	75.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	17.802	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	15.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	15.361	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	15.210	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	13.075	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	14.812	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	0	
6	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	5 Dokumen	49.808	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	5 Dokumen	0	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	4 Laporan	24.161	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	4 Laporan	0	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	#####	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.687.587	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	28 ASN	3.863.943	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	28 ASN	2.682.491	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	12 Bulan	25.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	12 Bulan	0	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	3000 Dokumen	20.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	3000 Dokumen	0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	12 Bulan	12.645	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	12 Bulan	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	1 Dokumen	14.025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD/N	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	1 Dokumen	5.095	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD/N	Jumlah dokumen LHP yang tindak lanjuti	5 Dokumen	15.048	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD/N	Jumlah dokumen LHP yang tindak lanjuti	5 Dokumen	0	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	12 Dokumen	9.702	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	12 Dokumen	0	
		DPMD/N	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	-		DPMD/N	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	0	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD/N	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	15.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD/N	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	0	
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi barang milikdaerah	100%	45.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi barang milikdaerah	100%	0	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	1 Dokumen	6.500	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	1 Dokumen	0	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Laporan	17.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Laporan	0	

4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	12 Bulan	6.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	12 Bulan	0	
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	214.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD/N	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	1 Unit	9.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD/N	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	1 Unit	0	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD/N	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 Stel	27.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD/N	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 Stel	0	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	48 Dokumen	17.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	48 Dokumen	0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	12 Bulan	14.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	12 Bulan	0	
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD/N	Jumlah dokumen SKP ASN	28 Dokumen	12.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD/N	Jumlah dokumen SKP ASN	28 Dokumen	0	
6	Pemindahan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	2 ASN	10.000	Pemindahan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	2 ASN	0	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD/N	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 ASN	25.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD/N	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 ASN	0	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	55.440	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	0	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	42.660	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	0	
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	790.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	39.900	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah alat listrik yang disediakan	6 Jenis	75.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah alat listrik yang disediakan	6 Jenis	1.992	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	6.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	0	
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	17.500	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	0	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	6 Paket	30.000	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	6 Paket	4.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	35.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	0	

		DPMD/N	Jumlah penggandaan yang disediakan	3000 Lembar	-		DPMD/N	Jumlah penggandaan yang disediakan	3000 Lembar	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	180 Eksemplar	4.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	180 Eksemplar	0	
7	Penyediaan Bahan/Material	DPMD/N	Jumlah bahan material yang disediakan	10 unit	4.000	Penyediaan Bahan/Material	DPMD/N	Jumlah bahan material yang disediakan	10 unit	0	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah tamu yang dilayani	900 Orang	35.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah tamu yang dilayani	900 Orang	7.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	150 Laporan	550.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	150 Laporan	26.908	
			Jumlah makan minum rapat yang disediakan	300 Porsi	-			Jumlah makan minum rapat yang disediakan	300 Porsi	-	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	1 Laporan	16.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD/N	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	1 Laporan	0	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	12 Bulan	17.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD/N	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	12 Bulan	0	
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	1.299.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	0	0	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	1 Unit	460.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	0	0	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	4 Unit	350.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	0	0	
3	Pengadaan Mebel	DPMD/N	Jumlah filling kabinet yang diadakan	20 Unit	100.000	Pengadaan Mebel	DPMD/N	Jumlah filling kabinet yang diadakan	0	0	
		DPMD/N	Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan		-		DPMD/N	Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan	0	0	
		DPMD/N	Jumlah lemari arsip yang diadakan		-		DPMD/N	Jumlah lemari arsip yang diadakan	0	0	
		DPMD/N	Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan		-		DPMD/N	Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan	0	0	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	10 Unit	185.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	0	0	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	35.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	0	0	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana/prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	1 Unit	99.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana/prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	0	0	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	DPMD/N	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung	1 Paket	70.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	DPMD/N	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung	0	0	

	Bangunan Lainnya		kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan			Bangunan Lainnya		kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan			
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	345.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.040	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah benda pos yang disediakan	4 jenis	3.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah benda pos yang disediakan	4 jenis	600	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12 Rekening	65.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12 Rekening	24.440	
		DPMD/N	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	360 Meter Kubik	-		DPMD/N	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	360 Meter Kubik	-	
		DPMD/N	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12000 KWh	-		DPMD/N	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12000 KWh	-	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	31 Unit	27.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0	0	
4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMD/N	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	21 Orang	250.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMD/N	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	36 laporan	3.000	
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	474.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	33.375	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	94.617	
		DPMD/N	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	14 Unit	-		DPMD/N	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	14 Unit	-	
		DPMD/N	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 Unit	-		DPMD/N	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 Unit	-	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	8.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	31.185	
3	Pemeliharaan Mebel	DPMD/N	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	125 Paket	13.000	Pemeliharaan Mebel	DPMD/N	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	125 Paket	0	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	6 Paket	18.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	6 Paket	2.190	
		DPMD/N	Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	23 Unit	-		DPMD/N	Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	23 Unit	-	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	35.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	0	

	Bangunan Lainnya		yang dipelihara			Bangunan Lainnya		yang dipelihara			
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	170.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	0	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	70.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.335.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.194.602	
II	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	5%	300.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	5%	0	
2,1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	5%	300.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	5%	0	
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5%	300.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5%	0	
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	56,96%	545.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	56,96%	0	
3,1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	90 Nagari	545.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	90 Nagari	0	
1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	45 Nagari	200.000	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	45 Nagari	0	
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	45 Nagari	170.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	45 Nagari	0	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan	175.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan	0	

IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	3.825.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	99.825.	
4,1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	61%	3.825.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	61%	99.825	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	0	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	0	-	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	79 Seknag+79 Kasi Poem	190.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	65%	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	0	0	
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	85%	50.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	80%	50.000		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	90%	45.000		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	0	0	
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	90%	95.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	90%	50.000		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan	85%	185.000		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan	0	0	

			keuangan nagari yang terlaksana					keuangan nagari yang terlaksana			
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 Nagari	200.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari	185.000		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	0	0	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagari dan 13 Kec	170.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	0	0	
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	237 rancangan/ dokumen	80.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	0	0	
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	85%	160.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	4 BumDesa	80.000		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	0	0	
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	-	900.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	0	0	
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari	80.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	0	0	
11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	42 Nagari	120.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	42 Nagari	99.825	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	55 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	55 Nagari	-	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari dengan status swadaya	1 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari dengan status swadaya	1 Nagari	-	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari dengan status swasembada	29 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari dengan status swasembada	29 Nagari	-	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari dengan status mandiri	8%	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari dengan status mandiri	8%	-	

		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari dengan status tertinggal	1,25%	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari dengan status tertinggal	1,25%	-	
12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparaturn pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Mananjemen Pemerintahan Desa	250 orang	150.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah aparaturn pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Mananjemen Pemerintahan Desa	0	0	
13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	90%	10.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	0	0	
14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	160 orang	240.000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	0	0	
15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	20 nagari	485.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	0	0	
16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	75%	150.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	80%	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	0	0	
17	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	48	150.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	34	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	7 Kegiatan	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	0	0	

		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	3 Inovasi	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	0	0	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	60%	4.665.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	60%	1.000.160	
5,1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	60%	4.665.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	60%	1.000.160	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	1 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	180.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	0	0	
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	1.100.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 RDS/KPM (100%)	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten	2 X Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kab dalam 1	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten	0	0	

				tahun							
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	14 % Posyandu aktif mandiri	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Fasilitasi KKN 15 Perguruan Tinggi	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pokja Posyandu Aktif	5 Pokja Poyandu di Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pokja Posyandu Aktif	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penggunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi (Perbud)	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penggunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	-		Kab. Lima Puluh Kota		0	0	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	60 KPMD	1.100.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	60 KPMD	1.000.160	
		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase LPM Aktif	65%	-		Kab. Lima Puluh Kota	Persentase LPM Aktif	65%	-	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok BP-SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	90 KPSPAM	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok BP-SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	90 KPSPAM	-	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali Rakor	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali Rakor	-	
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	35 Kelompok	100.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	0	0	
5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	6 Posyantek	60.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	0	0	

		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 Gelar TTG	160.000	Kasi kop	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	0	0	
6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota			165.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota		0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	79 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	1 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	0	0	
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	1 Nagari	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	0	0	
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	93 Kelompok	1.800.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	0	0	
					16.686.270					4.016.517	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Tahun 2022-2026 dan Renstra DPMDN Tahun 2022-2026. Kemudian juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Renja DPMD/N Tahun 2024 juga mengakomodir Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2024 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat. Jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD/N, usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan selaras dengan isu-isu yang dikemukakan pada sub bagian 2.3 yang salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

Tabel 2.4 (Tabel T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2024 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow* program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas Program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4 program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas Kementerian Desa:

1. Prukades.

Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.

Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa.

3. BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.

4. Sorga Desa

Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 61 Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021-2026. Dalam penyusunannya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada RPJMD propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah propinsi dengan pembangunan nasional.
- b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 dan Kebijakan Propinsi dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2024. Sedangkan untuk telaahan Renstra, dilakukan terhadap Renstra DPMD/N tahun 2021-2026, terutama dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada periode Renstra yang sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2021 Tentang Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Misi ke-3 dan Misi ke-1.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2024

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari.
4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka DPMD/N menetapkan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa/Nagari.
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan/Nagari.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.
4. Meningkatkan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka memacu Pembangunan Sosial Ekonomi di Nagari.
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di Nagari.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DPMD/N TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya	INDEK ABS ABK	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	50%	55%	60%	65%	70%	74%
2.	Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Indek Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149
3.			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65.85	66	67	68	69	70
				Nila IRB	25.91	27	28	29	30	31
				Nilai IKM	82,81	84	85	86	87	88

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2024 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri No. 00578 Tahun 2020.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPMD/N yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah sub kegiatan yang akan mendorong meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya reformasi birokrasi di DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota. Rekapitulasi Program, Kegiatan

dan Sub kegiatan DPMD/N Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut.

Tabel 3.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				2	Penyediaan bahan logistik kantor
				3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk mencapai target kinerja DPMD/N sesuai dengan rumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N tahun 2021-2026, maka program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari 2 program yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program Administrasi Pemerintahan Desa merupakan salah satu Program Unggulan untuk mencapai visi dan Misi Kepala Daerah 2021-2026. Program-program lainnya adalah program pendukung pencapaian misi pertama dan ketiga Kepala Daerah tahun 2021-2026. Misi pertama dan ketiga secara berurutan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan dan Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 3.3**Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan Tabel diatas dapat direkapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2024 seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4**Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMD/N Tahun 2024**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	14
2 Program urusan pemberdayaan masyarakat	2	2
	7	16

Pada tahun 2022, indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat telah tercapai sesuai target. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja. Identifikasi permasalahan dan faktor penentu keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Kab. Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari • Sarana Prasarana Nagari yang baik
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari • Sarana Prasarana Nagari yang baik

Pada tahun 2022, indikator kinerja dapat dicapai sesuai target. Faktor-faktor penentu keberhasilan diantaranya adalah tingkat partisipasi Masyarakat yang cukup baik dalam Pembangunan Nagari dan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari yang baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja DPMD/N adalah :

1. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat.
2. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari.
3. Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna.

4. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.
5. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
6. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
7. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
8. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar dalam penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 untuk mencapai indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus sebagai program unggulan dalam mencapai indikator kinerja utama Kepala Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja DPMD/N Tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2024 dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023 yaitu sebanyak 3 Program dan 7 Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 pada Bab III Sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMDN berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2024 secara lengkap pada table 4.1 di halaman berikut:

Tabel : 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMDN	100%	2.916.532.510	DAU	Rutin OPD	100%	8.381.269.701
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	DPMDN	85%	33.012.500	DAU	Rutin OPD	85%	238.669.682
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMDN	1 Dokumen	17.802.500	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	86.250.000
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Dokumen	18.273.313
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMDN	1 Dokumen	15.210.000	-	Rutin OPD	1 Dokumen	17.664.963
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	-	0	0	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	14.382.786
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0	0	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	17.033.800
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMDN	5 Dokumen	0	DAU	Rutin OPD	5 Dokumen	57.279.194

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	0	DAU	Rutin OPD	4 Laporan	27.785.626
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	100%	2.687.587.430,00			100%	4.768.268.019
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMDN	29 Orang/bulan	2.682.491.630	DAU	Rutin OPD	30 ASN	4.636.731.569
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Dokumen	30.000.000
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	3000 Dokumen	25.000.000
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	12 Dokumen	13.908.950
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMDN	1 Laporan	5.095.800	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	15.427.500
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	0	-	Rutin OPD	6 Dokumen	18.057.600
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	13 Dokumen	11.642.400
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Dokumen	17.500.000
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		0%	-			100%	54.000.000
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Dokumen	20.000.000
2.13.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Laporan	7.000.000
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Laporan	

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							20.000.000
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Laporan	7.000.000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		0%	-			100%	282.632.000
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Unit	15.000.000
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	0	-	Rutin OPD	110 Paket	60.000.000
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	0	0	-	Rutin OPD	50 Dokumen	25.000.000
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Dokumen	16.000.000
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0	0	-	Rutin OPD	30 Dokumen	15.000.000
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Orang	10.000.000
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	0	-	Rutin OPD	5 Orang	35.000.000
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	0	-	Rutin OPD	5 Orang	55.440.000
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	0	-	Rutin OPD	5 Orang	51.192.000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100%	39.900.580			100%	821.000.000
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMDN	6 Paket	1.992.580	DAU	Rutin OPD	6 Paket	8.000.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	5 Paket	7.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	3 Paket	19.000.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMDN	6 Paket	4.000.000	DAU	Rutin OPD	6 Paket	45.000.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	8 Paket	45.000.000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	180 Dokumen	6.000.000
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	10 Paket	6.000.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMDN	35 Laporan	7.000.000	DAU	Rutin OPD	45 Laporan	45.000.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMDN	450 Laporan	26.908.000	DAU	Rutin OPD	450 Laporan	605.000.000
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Dokumen	17.000.000
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0	0	-	Rutin OPD	12 Dokumen	18.000.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan		0%	-			100%	1.339.200.000
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Unit	470.000.000
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Unit	360.000.000
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	20 Unit	115.000.000
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	10 Unit	190.000.000
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	2 Unit	35.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Unit	99.200.000
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Unit	70.000.000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	28.040.000			100%	374.500.000
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	DPMDN	4 Laporan	600.000	DAU	Rutin OPD	4 Laporan	4.500.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	DPMDN	36 Laporan	24.440.000	DAU	Rutin OPD	36 Laporan	67.000.000
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	-	0	0	-	Rutin OPD	1 Laporan	28.000.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	DPMDN	36 Laporan	3.000.000	DAU	Rutin OPD	36 Laporan	275.000.000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD		100%	127.992.000			100%	503.000.000
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-	0	94.617.000	-	Rutin OPD	19 Unit	165.000.000
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	DPMDN	5 Unit	31.185.000	DAU	Rutin OPD	5 Unit	10.000.000
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	-	0	0	-	Rutin OPD	125 Unit	14.000.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	DPMDN	30 Unit	2.190.000	DAU	Rutin OPD	30 Unit	19.000.000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	0	0	-	-	1 Unit	45.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	0	0	-	-	1 Unit	175.000.000
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	-	0	0	-	-	1 Unit	75.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.099.985.000				9.245.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	-	0%	-	DAU		10%	300.000.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	-	0%	-	DAU		10%	300.000.000
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	0	0	-	-	8 Nagari	300.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	-	-	-	-		88,66%	605.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	-	-	-	-		140 Nagari	605.000.000
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	0	0	-	-	70 Nagari	230.000.000,00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	0	0	-	-	70 Nagari	175.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	0	0	-	-	1 Kawasan Perdesaan	200.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	99.825.000	DAU		100%	3.270.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	63%	99.825.000	DAU	IKU OPD	66%	3.270.000.000
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	-	0	0	-	-	20 Dokumen	200.000.000
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	0	0	-	-	79 Dokumen	165.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	0	0	-	-	79 Dokumen	350.000.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	0	0	-	-	79 Orang	395.000.000
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	0	0	-	-	79 Laporan	180.000.000
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	0	0	-	-	1 Dokumen	100.000.000
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	0	0	-	-	68 Dokumen	230.000.000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	-	0	0	-	-	-	-
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	0	0	-	-	4 Laporan	80.000.000
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Dokumen	99.825.000	DAU	Prioritas OPD	79 Dokumen	225.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	0	0	-	-	1 Dokumen	150.000.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	0	0	-	-	79 Dokumen	105.000.000
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	0	0	-	-	160 orang	250.000.000
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-	0	0	-	-	21 Desa/Nagari	500.000.000
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	0	0	-	-	79 Laporan	175.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	0	0	-	-	1 Dokumen	165.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat		60%	1.000.160.000			65%	5.070.000.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya		60%	1.000.160.000			65%	5.070.000.000
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	0	0	-	-	1 Dokumen	250.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0	0	-	-	3 Dokumen (PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	1.200.000.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	1.000.160.000	DAU	Prioritas OPD	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	950.000.000
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	0	0	-	-	40 Dokumen	100.000.000
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	0	0	-	-	9 Laporan	220.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	0	0	-	-	1 Laporan	350.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	0	0	-	-	1 Dokumen	2.000.000.000
		Jumlah			4.016.517.510				17.626.269.701

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan
DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024

No.	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	2.821.915.510	8.381.269.701	5	2.821.915.510	8.381.269.701	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1.194.602.000	9.645.000.000	2	1.194.602.000	9.645.000.000	
	Total	3	4.016.517.510	18.026.269.701	7	4.016.517.510	18.026.269.701	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

18. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	65
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	65
3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	70
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	70

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	32
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	39
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	66
Tabel III.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	68
Tabel IV.1	Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD	70
Tabel IV.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	71
Tabel IV.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen Renja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena mencakup perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih tinggi seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Dinas Perhubungan guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh OPD yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja OPD adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di OPD.

Selanjutnya Renja Tahun 2024 nantinya sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan ;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perhubungan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2022 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Persentase penggunaan anggaran tahun 2022, dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.967.591.474 terealisasi sebesar Rp.15.171.139.593 atau 95.01%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 796.451.881 atau 4.99%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian realisasi Renstra sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2022 terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan. Hal ini disebabkan anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

A. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

B. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2022, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perasarana Jalan
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- G. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - ✓ Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung)
- H. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- I. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Koordinasi dan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- J. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- K. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

- L. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- M. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- N. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- O. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Fasilitasi Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- P. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Pada tahun 2022, kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
- A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik terealisasi pada masing-masing kegiatan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Berbagai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk penunjang pelaksanaan 2 Program, 17 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada tahun 2022, beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan mengutamakan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga yang terlaksana adalah 2 Program, 16 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak terlaksana diantaranya :
 - A. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - B. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
- a) Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada umumnya
 - b) Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada laporan target kinerja dan laporan realisasi keuangan perangkat daerah,
 - c) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - d) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a) Untuk keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan pengusulan anggaran ke pemerintah agar mendapatkan dana tambahan ke daftar anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
- b) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai,
- c) Kerjasama yang baik dari berbagai pihak internal maupun eksternal Perangkat Daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target dan sasaran sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara berbagai pihak,
- d) Dilakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target kegiatan pada tahun yang akan datang.
- e) Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan,

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2022, maka Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30	5	5	5	100%	5	15	50%
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	2	4	4	100%	4	10	45%
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242	1	49	49	100%	46	96	40%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	12	12	12	100%	12	36	50%
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1	100%	1	3	50%
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	80	0	0	0		16	16	20%
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	0	0	0		1	1	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	60	0	0	0		12	12	20%
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	0	0	0		12	12	20%
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0		0	0	0%
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	25	0	0	0		5	5	20%
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72	0	0	0		140	140	194%
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	6	6	100%	6	24	67%
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	12	17	17	100%	17	46	271%
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160	12	41	41	100%	41	94	59%
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	482.914	12	33.333	58.563	176%	80.200	138.775	29%
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6379	12	624	624	100%	1100	1.736	27%
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3174	12	1075	1075	100%	600	1.687	53%
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	12	24	24	100%	24	60	42%
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	0	0	0		0	0	0%
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	151	0	0	0		24	24	16%
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109	0	0	0		24	24	22%
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.917	12	465	465	100%	500	977	33%
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.379.032	12	51.000	51.000	100%	3.630.000	3.681.012	16%
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	12	3	3	100%	3	18	100%
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	12	0	0		18	30	28%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	12	10	10	100%	11	33	50%
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	1	1	100%	1	2	40%
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	0	0		2	2	29%
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,42	2,55	2,97	2,38	80%	2,82	2,82	117%
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	N/A	0,53	0,23	43%	0,52	0,52	104%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	0	0	0		1	1	50%
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	75%	55%	62%	101%	163%	65%	65%	87%
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	101.229	25	130	133	102%	0	158	0%
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.396	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	0	0		0	1	100%
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	30	0	2	2	100%	0	2	7%
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	0	0	0		10	10	20%
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	1	1	100%	1%	1	101%
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	5	5	100%	5	10	
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	95%	89%	99%	111%	93%	93%	98%
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	1	0	0		0	1	50%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	150	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52.932	4.150	2.730	2.730	100%	9200	16.080	30%
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.300	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	119	9	29	9	31%	9	27	23%
2	15	02	2	05	08	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	0	3	3	100%	3	6	40%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	0	0	0		3	3	20%
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0		5	5	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	100%	1	3	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.321	100	150	150	100%	207	457	35%
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	61	1	0	0		10	11	18%
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	0	0	0		6	6	18%
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	58	0	8	1	13%	12	13	22%
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	58	0	0	0		12	12	21%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	58	0	0	0		12	12	21%
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	38	0	0	0		6	6	16%
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	170	0	0	0		23	23	14%
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	70	0	4	1	25%	12	13	19%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75	0	15	15	100%	15	30	40%
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	0	0	0		3	3	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	230	0	0	0		37	37	16%
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	0	0	0		4	4	50%
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	4	2	2	100%	0	6	24%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.200	0	0	0		1200	1.200	17%
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2	15	02	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	0	1	1	100%	0	1	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel dalam Tabel II. 2

Adapun beberapa Indikator Capaian Kinerja masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan seperti pada indikator no.3,9,10,13,dan 18. Namun beberapa capaian kinerja indikator tidak tercapai antara lain disebabkan oleh faktor-faktor non teknis, seperti keterbatasan anggaran pembiayaan sesuai kebijakan daerah sehingga beberapa program kegiatan tidak terlaksana. Namun untuk perencanaan tahun 2024 dan prakiraan maju rencana tahun 2025 program kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas dan dianggarkan untuk dapat terlaksana. Selanjutnya penjelasan setiap indikator capaian kinerja secara ringkas dapat dilihat pada tabel catatan analisis.

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	-	0,53	0,52	0,51	0,51	0,23	0,52	0,51	0,51	Capaian Kinerja Tahun 2022, relatif masih rendah, dan tahun 2023 target diupayakan tercapai
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	-	-	2,97	2,82	2,68	2,55	2,38	2,82	2,68	2,55	Capaian Kinerja Tahun 2022, relatif sdh baik tahun 2023 target diupayakan tercapai 100 %
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-	79,57	79,58	79,59	79,6	69,65	79,58	79,59	79,6	Capaian Kinerja Thn 2022, 0 (nol) krna pandemi corona, tahun 2023 target diupayakan tercapai 100 %
4	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	-	-	1%	2%	3%	4%	12%	2%	3%	4%	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & jauh melampaui target, tahun 2023 target dapat tercapai 100 %
5	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	62%	65%	70%	72%	101%	65%	70%	72%	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & jauh melebihi target.
6	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	-	-	93	94	94,5	94,75	99,36	94	94,5	94,75	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & melebihi target.
7	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	-	-	60	62	64	66	40	62	64	66	Capaian Kinerja Thn 2022 belum tercapai, tahun 2023 target diupayakan tercapai 100 %
8	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	-	-	97,75	97,8	98	98,2	95,01	97,8	98	98,2	Capaian Kinerja Thn 2022 sudah baik, namun belum seuai target, tahun 2023 target dapat tercapai 100 %
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	85	86	87	N/A	85	86	87	Capaian Kinerja Thn 2022 tidak ada, tahun 2023 target diupayakan tercapai 100 %

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.00	N/A	4.300.000	4.400.000	4.500.000	Capaian Kinerja Thn 2022 tidak ada, tahun 2023 target diupayakan tercapai 100 %
11	Rasio ijin trayek	-	-	2,94	2,95	2,96	2,97	4,11	2,95	2,96	2,97	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & melebihi target.
12	Jumlah uji KIR angkutan umum	-	-	5976	6069	6162	6237	5003	6069	6162	6237	Capaian Kinerja Thn 2022, sudah baik namun perlu upaya mencapai & melebihi target.
13	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	-	-	4	4	4	4	0	4	4	4	Capaian Kinerja Thn 2022, 0 (nol) antara lain karena dihentikannya pungutan retribusi di terminal angkutan Barang imbo Data per 1 Sep 2022
14	Persentase layanan angkutan darat	-	-	0,000%	0,000%	0,010%	2%	N/A	0,000%	0,010%	2%	Capaian Kinerja Thn 2022, 0 (nol) karena anggaran yang belum tersedia.
15	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	89%	91%	93%	93%	99%	91%	93%	93%	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & melebihi target.
16	Pemasangan Rambu-rambu	-	-	60%	61%	62%	63%	100%	61%	62%	63%	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & melebihi target.
17	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	Capaian Kinerja Thn 2022, tercapai 100 %
18	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	-	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	N/A	4.300.000	4.400.000	4.500.000	Capaian Kinerja Thn 2022, 0 (nol) karena anggaran yang belum tersedia.
19	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	-	-	130.000	135.000	140.000	145.000	0	135.000	140.000	145.000	Capaian Kinerja Thn 2022, 0 (nol) karena anggaran yang belum tersedia.
20	Rasio Konektivitas Kota	-	-	46	47	48	49	80	47	48	49	Capaian Kinerja Thn 2022, sangat baik & melebihi target.

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	V/C Ratio di jalan Kota	-	-	0,53	0,52	0,51	0,51	0,23	0,52	0,51	0,51	Capaian Kinerja Tahun 2022, relatif masih rendah, dan tahun 2023 target diupayakan tercapai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah pada saat jam sibuk.
- b. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dengan Penyediaan perasarana dan perlengkapan jalan diantaranya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan rambu, Pengadaan Marka dan lainnya
- c. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Lalu Lintas dengan Sosialisasi tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan hal ini dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sehingga terwujudnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

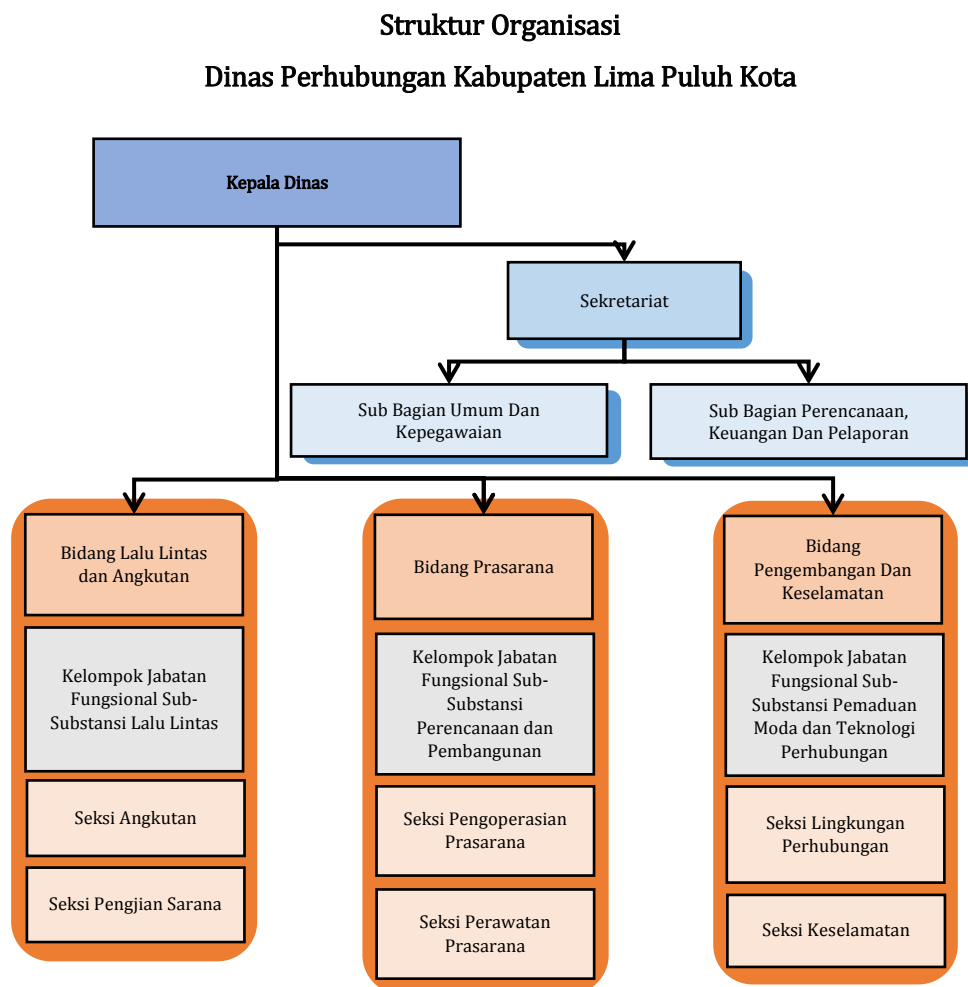
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d) Bidang Prasarana, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;

3. Seksi Perawatan Prasarana.
- e) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Keselamatan;
 2. Seksi Pemanduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
 3. Seksi Keselamatan.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk mengetahui Lebih jelas tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada struktur dibawah ini :



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Belum adanya Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak.
2. Belum adanya kendaraan khusus pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu Skylift

3. Kurangnya tingkat keselamatan sekolah dikawasan IKK Sarilamak sehingga diperlukannya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
4. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
5. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas
6. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
7. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan (IKK) Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
8. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
9. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
10. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas
11. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
12. Tidak meratanya beban kerja;
13. Lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
14. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;

Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu pada misi 5 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”, dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan transportasi yang belum optimal, terpadu dan terintegrasi
2. Pelaksanaan sistem dan mekanisme transportasi yang belum efektif dan efisien

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
 - b. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;

- c. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal
- 2. Peluang
 - a. Letak geografis yang strategis;
 - b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;
 - c. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - d. Adanya potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

Dalam menyikapi isu-isu penting, rekomendasi dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Merencanakan Pembangunan Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak
2. Merencanakan Zona Selamat Sekolah di kawasan IKK Sarilamak
3. Merencanakan Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan PJU (Skylift)
4. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
5. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
6. Membangun sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7. Melakukan pendataan dan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas dan parkir
9. Memiliki data yang *valid* dan *up to date*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Disebabkan karena Rancangan Awal RKPD kadang tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan OPD, dimana analisis kebutuhan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari pagu RKPD.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD belum mengakomodir seluruh kegiatan dari Hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena adanya masukan serta tambahan kegiatan yang harus diakomodir oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2024.
2. Adanya masukan serta saran pada kegiatan dan sub kegiatan menyebabkan adanya pengurangan dan penambahan sehingga berubahnya pagu anggaran yang dibutuhkan Dinas Perhubungan untuk menjalankan kegiatan tersebut pada tahun 2024.
3. Adanya Perubahan Nomenklatur Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat beberapa perubahan Sub Kegiatan.

Berikut adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang ditampilkan dalam Tabel II. 3

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				40.180.138.659	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12.919.376.741	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.352.968.659	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.087.459.091	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	328.575.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0%	0	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	66.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	42.350.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	34.848.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	71.390.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	24.200.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5 Laporan	55.357.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	33.880.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	5.040.068.078	Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3.704.033.511	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	46 orang/bulan	4.856.628.448	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	3.687.636.011	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	113.577.860	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.397.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	24.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	16 Laporan	22.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	22.671.770	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	218.163.000	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	0%	0	
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	42.688.800	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	53.845.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	35.937.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	03	06	Penatausaha n Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barng Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	85.692.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	98.691.472	Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	0%	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	23.119.470	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	1.890.383	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	937.145	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	12 Dokumen	1.237.951	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	-	
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	71.506.523	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.331.642.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya guna untuk meningkatkan disiplin aparatur	231 stel	685.392.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0 Paket	-	
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	2.250.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	-	
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	644.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	496.127.709	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	421.756.400	
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.114.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.050.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.259.700	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	110.587.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	83.065.600	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Disediakan					Disediakan			Perhubungan
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	12 Paket	76.715.210	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	12 Paket	62.087.100	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.355.469	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.825.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.250.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	185.430.080	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.044.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	567.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	28.500.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	170.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	194.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	203.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.431.267.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.519.240.000	
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	6.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	7.986.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.661.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	22.784.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.240.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Umum yang di sediakan (Laporan)	12 Laporan	416.433.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	847.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	840.932.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	413.929.180	
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya pajak dan Perizinannya (Unit)	11 Kendaraan	245.932.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	378.929.180	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Lapangan										
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	495.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.68	22.827.170.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.68	831.917.650	
							Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.51			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.51		
2	15	02	02	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	0	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	66.132.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.132.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	70%	14.102.666.516	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	70%	126.400.000	
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0%		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	-	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	500 Unit	11.559.026.516	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	-	
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1 Unit	40.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500 Unit	2.503.640.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	126.400.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	1.760.500.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	0%	0	
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Unit)	1 Unit	450.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan Pengembangan (Unit)	1 Unit	512.500.000	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan (unit)	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10 Unit	698.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	78.500.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	33.600.000	
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10 Dokumen	43.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	33.600.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	910.080.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	179.980.200	
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	19.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	6 Orang	243.480.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar (Unit)	0 Unit	0	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0 Unit	-	
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	9500 Dokumen	283.200.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	84.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	184.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9 Unit	54.400.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	76.980.200	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	05	08	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3 Laporan	80.000.000	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3 Laporan	23.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	42.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	4.534.691.484	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	261.950.800	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	1 Laporan	3.965.448.284	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provins	1 Laporan	220.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	12 Laporan	278.214.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	41.950.800	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	2 Laporan	291.029.200	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	285.073.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	30.268.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	61.450.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	114.438.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	30.268.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	109.185.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	581.808.000	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	53.587.500	
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2 Orang	80.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	12 Laporan	138.900.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	8 Laporan	175.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	82.500.000	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	53.587.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12 Laporan	105.408.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	-	
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0%	0	
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	1 Unit	30.000.000	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	94.656.000	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	56.317.500	
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	3 Dokumen	45.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.317.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	49.656.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.646.150	
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	0	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.646.150	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	278.195.000	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	0%	0	
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	200.000.000	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan dan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	78.195.000	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	171.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	8.035.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Laporan)	1 Laporan	150.000.000	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Laporan	8.035.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten /Kota (Laporan)	1 Laporan	21.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang.

Pada tahun 2024 dikarenakan keterbatasan Pagu Indikatif maka tidak adanya program maupun kegiatan dari pokok pikiran dan aspirasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dipergunakan sebagai pedoman pembangunan nasional di bidang perhubungan. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan nasional dalam naskah teknokratik antara lain “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, Program prioritas yang harus dicapai adalah Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Oleh karena itu maka disinkronkan dalam perencanaan-perencanaan yang diarahkan agar menjadi skala prioritas.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada pencapaian visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan visi :

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam
Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

Keterkaitan misi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Misi 4 yaitu **“Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”** dan Misi 5 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.**

Maka, berdasarkan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan adalah sesuai penjabaran Visi dan Misi dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan
- b. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator :
 - ✓ Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
 - ✓ Indeks Kelancaran Lalu Lintas
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ringkasan Tujuan dan Sasaran disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Jalan		1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026.

Renja Dinas Perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 2 program, 16 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan, dengan 2 Sub Kegiatan
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 Sub Kegiatan
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 Sub Kegiatan
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan program dan kegiatan urusan di bidang perhubungan. Pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 11 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
 - c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan 1 Sub Kegiatan
 - f. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan 3 Sub Kegiatan
 - d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota, dengan 2 Sub Kegiatan
 - e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan

- g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, dengan 1 Sub Kegiatan
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan
- g. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu) , dengan 1 Sub Kegiatan
- h. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan 1 Sub Kegiatan
- i. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 Sub Kegiatan

Tabel III. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dua sasaran strategis Dinas Perhubungan yang menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Indeks Kelancaran Lalu Lintas, 2) Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan, dan 3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Untuk mengetahui lebih jelas sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,51
		2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,68
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,59

Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Renstra Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Tahun 2024
1	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	3%
2	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	70%
3	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	94,5
4	Indeks Kelancaran Lalu Lintas (rasio)	0,51
5	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi (titik)	64
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,59
7	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	98,00
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
9	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	4.400.000
10	Rasio ijin trayek (rasio)	2,96
11	Jumlah uji KIR angkutan umum	6162
12	Jumlah Terminal Penumpang dan Terminal Barang (Terminal Bis)	4
13	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,01%
17	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	93%
15	Pemasangan Rambu-rambu (%)	62%
16	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0155
17	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.400.000
18	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (orang)	140.000
19	Rasio Konektivitas Kota	48
20	V/C Ratio di jalan Kota	0,51
21	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	2,68

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun mengenai uraian program dan kegiatan Dinas Pehubungan, target kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 :

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	12.087.459.091,00						-	18.430.458.775,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	361.433.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		73.205.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		46.585.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		38.332.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		78.529.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		26.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		60.893.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		37.268.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	3.704.033.511,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	5.544.074.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	3.687.636.011,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		5.342.291.293,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.397.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		124.935.646,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		26.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.289.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		24.938.947,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	239.979.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		46.957.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		59.229.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		39.530.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		94.261.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	108.560.619,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.431.417,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		2.079.421,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.030.860,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.361.746,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		78.657.175,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	646.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		2.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		644.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	421.756.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	545.740.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		4.525.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	17.259.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		13.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	83.065.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		121.646.745,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	62.087.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		84.386.731,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.091.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	49.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		109.807.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.044.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		203.973.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaa n</i>	-			100 %	28.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	789.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		149.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	7.519.240.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	9.274.394.690,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		6.655.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.661.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.784.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.062.730,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	847.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		458.076.960,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-			100 %	413.929.180,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	920.525.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	378.929.180,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		270.525.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	-			0,51 Indeks 2,68 Rasio	831.917.650,00						-	16.970.400.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-			100 %	66.132.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	66.132.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	126.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		1.228.640.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	1.645.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		595.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	-			100 %	33.600.000,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	78.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		43.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	-			95 %	179.980.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	958.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	19.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		243.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		301.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		208.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				9 Unit	76.980.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		57.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota	-			100 %	261.950.800,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	4.590.974.284,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	41.950.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		319.946.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		305.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	220.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		3.965.448.284,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	-			100 %	30.268.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	253.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	30.268.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		129.438.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		124.185.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	-			100 %	53.587.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	466.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	53.587.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		90.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		115.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/k ota 1 (satu)	-			100 %	56.317.500,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	104.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	56.317.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		59.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100	15.646.150,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.646.150,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	93.083.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		93.083.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	-			100 %	8.035.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	171.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	8.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	J U M L A H							12.919.376.741,00							35.400.858.775,00		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**19. RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	1
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah.....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat	63
BAB III	1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	1
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup.....	4
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	5
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	7
3.5 Program dan Kegiatan	8
BAB IV	1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	25
Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	64
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8
Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	10
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	12
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2023	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selanjutnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan. Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan pembangunan dan penelitian-pengembangan (Bapelitbang) serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, rencana perangkat daerah baik berupa Renstra PD maupun Renja PD disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 5) penetapan.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman untuk Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Lalu

Bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan dilengkapi capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini berisi: telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman; dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan/atau realisasi keuangan/fisik untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah 2023	
						Target Kinerja Renja Tahun 2021	Realisas i Kinerja Renja Tahun 2021	Realisas i Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2022	Tingka t Capai an Realis asi Target Renstr a (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)		34,5	21,70	28,00	19,00	67,86	29,30	70	202,90
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)		3	14	3	2	67	3	19	633
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)		3	0	3	2	67	3	5	167
2 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)		3	0	0	0	0	2	2	250

	Bencana atau Relokasi Kabupaten Program									
3 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	60	0	0	0	0	40	40	667
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (unit rumah)	45	0	0	0	0	55	55	122
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana untuk memenuhi SPM perumahan (Unit)	0		0	0	0	30	30	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	45	0	0	0	0	20	20	444.44
2 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45	0	0	0	0	20	20	444.44
3 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45	0	0	0	0	20	20	444.44
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25	0	0	0	0	0	0	0
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25	0	0	0	0	0	0	0

	Pengembangan Perumahan									
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	75,00		62,50	32,24	52	65	102.4	136.5
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1	-	-	-	0	1	1	100
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh (Nagari)	1	-	-	-	0	1	12	1.200
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	264	320	150	-	0	264	264	100
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	200	320	150	206	111	200	470	235
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun /bansos rumah bagi MBR (unit)	64			-	0	64	64	0
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	8	-	-	-	0	1	1	12.5
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha kewenangan daerah yang ditangani (%)	34,25	27,68	27,75	-	0	29.05	29.05	84.8

1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	375,00	-	-	-	0	275	275	73.33
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	375,00	-	-	-	0	275	275	73.33
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	45,00	-	-	-	0	25	25	55.6
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	53,6	27,68	25,60	15,74	61	31.2	39.74	74.14
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	53,6		25.60		0	31.2	39.68	74.02
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35	20	21	20	95	27	67	191
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35	0	21	20	95	27	47	134.28

1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1	0	1	0	0	1	1	100
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	0	0	0	0	0	0	0
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	90,00	100,00	75,00	75	100,00	94	144.6
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD (%)	65	50,00	100,00	9,00	9	85,00	144	222

2 11 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3	0	3	3	100	3	6	200
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	48	0	48	48	100	48	96	200
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	14	20	14	20	167	14	39	242.85
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100	12,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	48	38	38	38	100	40	78	162.5
2 11 01 2.02 01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor					0	25	25	
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	86	12	86	86	100	86	146	169.8
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	2,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 01 2.03 01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah (laporan)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	-	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.04 01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (kali)	2,00	-	-	-	0	-	0	0

	Retribusi Daerah									
2 11 01 2.04 01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah (dokumen)	1,00	-	-	-	0	-	0	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	3,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya (stel)	77,00	-	-	-	0	77	77	100
2.11.01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan (orang)	2,00	-	-	-	0	1	1	50
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	1,00	-	-	-	0	1	1	100
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat Listrik dan lampu (jenis)	10	8	8	8	100	10	26	180
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	15	15	4	27	15	19	126.66
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor (jenis)	48	46	46	46	100	48	94	195.8
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Cetakan, Penggandaan, penjilidan dan publikasi (jenis)	4	4	4	4	100	4	8	200
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	4.363	5.091	5.091	5.091	100	5091	9454	216.68
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan Rakor Luar Daerah (orang)	38	30	30	30	100	35	65	171.05
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1	1	75,00	7500	100,00	175	175

2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	4	1	1	0	0	2	2	50
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebe (unit)	5	15	15		0	15	30	600
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	12,00	100	100,00	100	100,00	200	200
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli dan pengiriman surat (buah)	4.620	4.833	4.833	4.833	100	4.620	9453	144.6
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	5	4	4	4	100	5	9	180
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	31	31	31	31	100	31	62	200
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	24	22	22	22	100	22	44	183.33
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100,00	100	100,00	100	100,00	200	200
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan Service, BBM, Suku Cadang dan Pajak kendaraan Dinas/Operasional (unit)	44	44	44	44	100	44	88	200
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja (unit)	50	50	50	50	100	50	100	200
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan rehabilitasi gedung DLHPP (unit)	1	1	1	1	100	1	2	200
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0

2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	100,00	25,00	21,00	19,00	90	50	69	69
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1	1	1		0	1	1	100
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	1	1	1	0	0	1	1	100
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun (dokumen)	1	1	2	0	0	1	1	100
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (dokumen)	0	0	0		0	0	0	0
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP (dokumen)	1	1	2	1	100	1	2	200
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (poin)	65,12	40,00	63,75	52,50	82	64.55	102.75	157.78
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,57		90,87	91,52	101	91.01	182.53	199.3
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	26	193	18	16	89	18	34	130.76
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik) Jumlah titik pantau kualitas udara (lokasi)	22	14	14	16	89	14	30	136.36

	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
		Jumlah titik pantau kualitas udara(titik)	4		4		0	4	4	100
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	1	150	0	-	0	1	1	100
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan Terakreditasi (parameter)	26	-	0		0	10	10	38.46
		personil pengelolaan lingkungan yang berkualifikasi (orang)	14		0		0	6	6	42.85
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup(Unit)	30	-	0	-	0	10	10	33
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	30	-	0	-	0	10	10	33
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Isolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2	-	-	-	0	-	0	0
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2	-	-	-	0	-	0	0
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	12	2	0	-	0	5	7	58

	Kabupaten/Kota									
		Jumlah Bibit untuk Konservasi di sumber Sumber Air	-	10.000		-	0	1.000	11000	
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)	6	1	2	-	0	4	4	66.7
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	5,15	3,00	4,87	-	0	5.07	5.07	98.446
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)					0	61,75	62	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	5,15	3,00	4,87	-	0	5.07	5.07	136.36
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati (dokumen)	-	-	-	-	0	1	1	0
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Pembangunan Taman Kehati (Ha)	-	-	-	-	0	-	0	0
		Operasi dan pemeliharaan taman kehati	15	-	-	-	0	0	0	0
3 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Rencana Tapak Kebun Raya (dokumen)	1	-	-	-	0	-	0	-
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	1464		0		0	0	0	0
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	7	-	2	-	0	3	3	42.8
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	6	-	1	-	0	2	2	33.33

	Hayati									
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	35,00	1,00	18	10	67	21	31	88.57
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70	1	10	10	100	30	40	57.14
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70	1	10	10	100	30	40	57.14
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	96,00	85,00	78,50	86,67	110	82	168.67	175.69
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	220	230	220	55	25	220	275	125
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	30	20	30	13	16	32	43	143.36

	Izin PPLH									
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (orang)	3		-		0	-	0	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	47	80	12	26	173	19	45	45.74
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi (%)	100	2,00	-	-	0	12	12	12
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	400	2	-	-	0	48	48	12
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA (peraturan)	1	-		-	0	1	1	100
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	100		17,00		0	33	33	33

	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)	28	5	27	1	4	28	29	103.57
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (sekolah)	25	1	25	15	60	25	40	160
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi (Kelompok)	6	1	2	1	33	3	4	66.6
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang melaksanakan program saka kalpataru	7		-	-	0	3	3	42.8
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	44,30	1,00	12,66		0	18.99	18.99	42.86
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	7	1	6	-	0	3	3	42.85
2 11 09 2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	6	-	5	-	0	2	2	33.33

	Lingkungan Hidup									
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100	5,00	100,00	100,00	100	100	200	200
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18	5	5	6	120	10	16	88.88
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18	5	5	6	120	10	16	88.88
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	14		-	-	0	2	2	14.28
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	45,00	20	30,27	61	35	65.27	93.24
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	45,00	20	30,27	61	35	65.27	93.24
		Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri			3		0	4	4	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	24.159	-	9.709	10	0	11.651	21.651	89.6

2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	30,26	12	14.86	20	135	17.94	37.94	125.38
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	24	2	3	5	167	4	9	37.5
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	1	1	5	10	91	1	11	1100
		Tersedianya fasilitas pendukung/ tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	20		20	46	920	20	66	330
2 11 11 2.01 07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA KAB/KOTA	Jumlah pengadaan mesin pencacah (Unit) jumlah pengadaan mesin pengayak kompos (Unit)				-	0	4	4	0
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah(Kelompok)	30	15	24	-	0	26	26	86.666
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	41	-	6		0	13	13	31.7
2 11 11 2.03 02	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target standar pelayanan pengelolaan sampah	jumlah laporan pengawasan pengelolaan persampahan (Laporan)				-	0	12	12	

Pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa indikator pada Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yang disebabkan terjadinya karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran belanja sehingga terjadi penundaan pembayaran belanja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pertama merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kewenangan Kedua adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan tersebut, ditetapkan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan. Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat diukur dari beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator pertama adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak Huni dan indikator kedua persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019, realisasi capaian dari indikator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%. Pada tahun 2020, Realisasi capaian indikator pertama adalah 30,30% dari target 21,77%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 14,79% dari target rencana 14,09%. Pada tahun 2021, Realisasi capaian indikator pertama adalah 32,24% dari target 31,44%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 15,74% dari target rencana 20,00%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan

dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat adalah warga negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain: 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha; 2) layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan 3) layanan pengelolaan persampahan.

Untuk mengukur kinerja layanan bidang lingkungan hidup, ditetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2019 adalah 66,93 dari target rencana 66,50. Pada tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah 69,13 dari target rencana 68,00. Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut adalah 70,51 dari target rencana 70,00.

Pada tahun 2019 capaian kinerja pada layanan pengelolaan sampah adalah 50,00% dengan artian separuh penduduk kawasan perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah menikmati layanan pengelolaan sampah. Secara nasional, layanan ini pada tahun rencana 2024 mempunyai target sebesar 70%.

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional(target 2024)		IKK (Target 2026)	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	SPM	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	100	100	Perhitungan capaian tahun 2022 dihitung pada akhir bulan desember tahun berjalan
2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	SPM	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	100	100	
3	Rasio Rumah Layak Huni	IKU Daerah	0.166	0.173	0.157	0.160	0.163	0.166	0.169	0	0.160	0.163	0.166	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU Daerah	72.27	73.09	71.05	71.46	71.86	72.27	72.68	70.51	71	71.86	72.27	
5	Persentase Penanganan rumah tidak layak huni	IKU PD	70	75	62.5	65	67.5	70	72.5	65	67	67.5	70	
6	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU /Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%)	IKU PD	42.40	53.60	25.60	31.20	36.80	42.40	48	15.24	16.50	36.80	42.40	
7	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKU PD	56.09	56.29	55.79	55.89	55.99	56.09	56.19	70.51	71	71.50	72	
8	Persentase Kawasan Kehati yang dikelola (%)	IKU PD	5.11	5.15	4.87	5.07	5.09	5.11	5.13	4.87	5.07	5.09	5.11	
				2024	2021	2022	2023	2024	2025					

9	Persentase peningkatan pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	IKU PD	27,00	35,0 0	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	10	20	24,00	27,00	
10	Persentase Penanganan Sampah (%)	IKU PD	60,00	70,0 0	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	12.25	13	50,00	60,00	
11	Persentase Pengurangan Sampah (%)	IKU PD	28,00	30,0 0	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	18.02	19	27,00	28,00	
12	Rasio permukiman layak huni	IKU PD	0,6985	0,70 08	0,6961	0,6963	0,6974	0,6985	0,6996	0	0.7	0,6974	0,6985	
13	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	RPJ MD	31.37	34.5 8	27.01	28.45	29.87	31.37	32.94	32.24	32.50	33	31.37	
14	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	RPJ MD	84,78	93,4 6	70,00	70,07	77,07	84,78	89,01	65	70	77,07	84,78	
15	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	RPJ MD	0.69	0.76	0.60	0.63	0.66	0.69	0.72	0.21	0.25	0.66	0.69	
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota (%)	RPK P PD	31.90	34.5 0	28.00	29.30	30.60	31.90	33.20	0	0	30.60	31.90	
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	RPK P PD	31.65	34.2 5	27.75	29.05	30.35	31.65	32.95	0	0	29.05	30.35	
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	IKU PD	264	264	150	264	264	264	264	206	146	264	264	
19	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	IKU	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	kabupaten/kota	PD												
21	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	IKU PD	89	96	78.5	82	85.5	89	92.5	24	30	40	45	
23	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	IKU PD	2	2	0	0	1	2	2	1	2	1	2	
24	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	IKU PD	47	100	0	12	29	47	71	0	2	2	2	
25	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	IKU PD	17	18	0	13	13	17	17	0	13	13	17	
26	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	IKU PD	9	19	0	3	6	9	14	0	2	6	9	
27	Penetapan hak MHA	IKU PD	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	
28	Persentase terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33	
29	Persentase terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33	
30	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	IKU PD	40	100	17	33	50	67	83	15	25	35	40	
31	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	IKU PD	31.65	44.3	12.66	18.99	25.32	31.65	37.97	0	0	1	1	
32	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.													
33	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	IKD	71	70	20	35	50	60	70	30.27	35	35	45	
34	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	IKD	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	
35	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	IKD	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	

Keterangan :

IKU = Indikator Kinerja Utama

IKK = Indikator Kinerja Kunci

IKD = Indikator Kinerja Utama Daerah

IKU PD = Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat cukup baik/sedang (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari Isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman.
- b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan.
- c. terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun.
- d. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir.

- e. belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- f. kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara umum isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini :

1. Kelembagaan

Beberapa kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah

2. Kekosongan Peraturan

Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah

daerah; dan 4) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

3. Sumber Daya Manusia

Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 32 (tiga puluh dua) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

4. Pendanaan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan bidang lingkungan hidup dan perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

5. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya separuh dari penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menikmati layanan ini

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya review atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut ini (tabel T-C.31):

Tabel T.C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	6.840.221.883	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	6.840.221.883	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	65	64.668.690	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	65	64.668.690	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	4	33.878.790	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	4	33.878.790	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	30.789.900,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	30.789.900,	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100	5.433.561.659	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100	5.433.561.659	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	5.355.711.659	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	5.355.711.659	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	86	77.850.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	86	77.850.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	62.201.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	62.201.700	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	62.201.700	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	62.201.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	568.111.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	568.111.140	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	13.527.360	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab · Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	13.527.360	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	61.597.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab · Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	61.597.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48	123.420.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab · Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48	123.420.500	
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	98.556.480	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Kab · Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	98.556.480	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4363	86.240.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab · Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4363	86.240.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	184.769.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	184.769.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	412.914.594	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	412.914.594	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	367.914.594	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	367.914.594	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	45.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan	100	87.726.037	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan	100	87.726.037	

	Daerah		Pemerintah Daerah				uh Kot a	Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4620	20.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4620	20.440.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	32.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	32.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	10.942.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	10.942.700	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Pulu h Kota	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	182.881.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab · Lima Pulu h Kota a	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	182.881.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	113.423.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab · Lima Pulu h Kota a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	113.423.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	32.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab · Lima Pulu h Kota a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	32.500.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	36.958.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab · Lima Pulu h Kota a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	1	36.958.000	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.489.699.620	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	31.9	1.193.100.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	31.9	1.193.100.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan perumahan (dokumen)	3	369.600.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan perumahan (dokumen)	3	369.600.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)	3	369.600.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)	3	369.600.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi	30	835.500.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi	30	835.500.000	

	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			Relokasi Program Kabupaten/Kota	Puluh Kota	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit)	25	323.500.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit)	25	323.500.000	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan Permen PUPR No 29/PRT/2018
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	10	500.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	10	500.000.000	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan Permen PUPR No 29/PRT/2018
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	70 %	3.326.850.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	70 %	3.326.850.000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumrn survay dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1 Dokumen	225.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumrn survay dan updating lokasi perumahan dan permukiman	1 Dokumen	225.000.000	

								kumuh (dokumen)			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	6	3.101.850.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	6	3.101.850.000	Dukungan terhadap pemetaan gerakan pemberdayaan PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2020
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	264	3.101.850.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	264	3.101.850.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	68	3.101.850.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab . Lima Puluh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	68	3.101.850.000	

							Kot a				
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lima Pulu h Kota	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.4	2.969.749.620	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.4	2.969.749.620	
	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian		2.969.749.620	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian		2.969.749.620	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	29	2.791.116.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	29	2.791.116.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	178.633.620	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	178.633.620	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			11.989.688.931	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			11.989.688.931	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	71 %	557.805.600	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	71 %	557.805.600	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1 Dokumen	62.805.600	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1 Dokumen	62.805.600	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah	1	62.850.600	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah	1	62.850.600	

			Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)				uh Kota	Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)			
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		495.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		495.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,95	3.016.865.647	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,95	3.016.865.647	

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	22	2.118.233.900	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	22	2.118.233.900	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	491.270.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	491.270.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	61.710.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	61.710.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu	2	1.565.253.900	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	2	1.565.253.900	

			yang Dilaksanakan (Dokumen)					Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)				
	Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana prasarana informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (unit)	20	537.948.630	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana prasarana informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (unit)	20	537.948.630		
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	15	208.548.630	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	15	208.548.630		
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	219.600.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	219.600.000		

	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan(Titik)	2	109.800.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan(Titik)	2	109.800.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	7	360.683.117	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	7	360.683.117	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	360.683.117	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	360.683.117	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	5.11	3.870.338.756	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	5.11	3.870.338.756	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas perkotaan	5.11	3.870.338.756	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas perkotaan	5.11	3.870.338.756	

							Kot a				
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1.595.394.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a	5	1.595.394.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Lima Puluh Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.1	1.722.550.776	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a (Ha)	1.1	1.722.550.776	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40	120.646.600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40	120.646.600	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	36.958.680	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	36.958.680	

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	27	62.332.060	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	27	62.332.060	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	27	62.332.060	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	27	62.332.060	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40	62.332.060	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40	62.332.060	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundangundangan lingkungan hidup		137.840.760	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundangundangan lingkungan hidup		137.840.760	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen izin lingkungan usaha/kegiatan yang layak lingkungan (dokumen)	220	137.840.760	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen izin lingkungan usaha/kegiatan yang layak lingkungan (dokumen)	220	137.840.760	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30	45.477.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30	45.477.000	

	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)	2	24.705.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)	2	24.705.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	67.658.760	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	67.658.760	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi	47%	31.950.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi	47%	31.950.000	

	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	188	31.950.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	188	31.950.000	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	31.950.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	31.950.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	67 %	232.009.700	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	67 %	232.009.700	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH	28	232.009.700	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka	28	232.009.700	

	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		(kelompok)			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota	PPLH (kelompok)			
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	98.838.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	98.838.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	92.134.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	92.134.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75	41.037.700	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75	41.037.700	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan	31.65	88.939.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan	31.65	88.939.000	

			dan pengelolaan lingkungan hidup				Kota	dan pengelolaan lingkungan hidup			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	5	88.939.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	5	88.939.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH)	4	88.939.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH)	4	88.939.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	49.959.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	49.959.000	

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	14	49.959.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	14	49.959.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12	16.470.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12	16.470.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5	33.489.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5	33.489.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah Persentase	60 % 28 %	4.336.437.108	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab . Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah Persentase	60 % 28 %	4.336.437.108	

			pengurangan sampah.				Pul uh Kot a	pengurangan sampah.			
	Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah	60 %	4.278.420.760	Pengelolaan Sampah	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Persentase penanganan sampah	60 %	4.278.420.760	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	117.421.960	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	117.421.960	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	465.181.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	465.181.000	

	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	21.02	1.660.750.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	21.02	1.660.750.000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	496.720.800	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab . Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	496.720.800	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1.538.347.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1.538.347.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengurangan sampah	28%	58.016.348	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengurangan sampah	28%	58.016.348	

	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	27	58.016.348	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	27	58.016.348	
					26.319.610.434					26.319.610.434	

Pada tabel T.c 31 terdapat penambahan rumusan sub kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2024 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melaksanakan penyelenggaraan gerakan PKK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang dikelola berdasarkan peraturan menteri terkait sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu sedangkan untuk sistem pendanaan Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengalokasikan anggaran untuk mendukung terlaksananya Program – program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan ketentuan : a. pada saat masa pasca bencana; b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/ atau c. Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

Permukiman mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Forum Konsultasi Publik tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1410 unit	Mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah dan Stunting.
			Jumlah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	819 Unit	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/ Kota untuk pengelolaan sampah kabupaten / kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	61 unit Tong sampah 120 L, 59 unit Bak sampah, 74 unit becak motor, Kontainer sampah 3 Unit	

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan yang terbanyak terdapat pada usulan Musrenbang RKPD untuk program pengembangan perumahan dengan indikator perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1085 Unit Rumah dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 713 Unit Rumah dan untuk program pengelolaan persampahan untuk

mendukung ketersediaan prasarana dan sarana persampahan dalam usulan Musrenbang RKPD pengadaan tong sampah 120 L sebanyak 56 Unit, Bak Sampah sebanyak 59 Unit, Becak motor sampah sebanyak 16 Unit dan Kontainer Sampah Sebanyak 3 Unit. Pada usulan melalui pokok pikiran DPRD untuk program pengembangan perumahan dengan indikator perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 325 unit rumah dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 106 Unit, sedangkan usulan untuk program pengelolaan sampah melalui pokok pikiran DPRD pengadaan Tong sampah 120 L sebanyak 5 Unit, becak sampah sebanyak 58 Unit.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi tersebut diatas selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat tentang tema RKP tahun 2023 adalah :

***“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang
Inklusif dan Berkelanjutan”***

Prioritas dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2023 ini antara lain :

1. Melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Melakukan penanggulangan pengangguran yang disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 maka perlu dilakukan pemabangunan rendah karbon dan transisi energy sebagai respon terhadap perubahan iklim;
7. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu kepada Visi Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lintas sektoral yang unggul ditingkat lokal dan regional untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
3. Meningkatkan potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secapa terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 10 agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
2. Peningkatan peran limbago adat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi.
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh.
5. Peningkatan mutu pendidikan.
6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan.
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Data kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintegrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualitas lingkungan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional tergambar dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini juga merupakan bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019 terlihat bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini

menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selanjutnya sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi - 116 - pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024).

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan

perumahan secara utuh dan seimbang. Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang dilaunching oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu 100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan pada Tahun 2020-2024 berupa Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai Visi dan Misi tersebut yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak bagi masyarakat.
4. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam rencana strategis dan rencana kerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya prasarana sarana dan utilitas umum perumahan.
4. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati.
6. Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3.
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.

3.5 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2021- 2026. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Pemilihan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan dari kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, kewenangan dan urusan bidang lingkungan hidup terbagi menjadi 11 (sebelas) sub urusan, sedangkan kewenangan dan urusan bidang perumahan rakyat terbagi menjadi 5 (lima) sub urusan. Selanjutnya ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah- Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD- Koordinasi dan Penyusunan laporan

		capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gaji dan tunjangan gaji ASN. - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD
	3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
	4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah - Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah
	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan - Fasilitas Kunjungan tamu. - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel
	8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

		- Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
JML	9 Kegiatan	27 Sub Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, diperlukan pemilihan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Pengembangan Perumahan	
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota. - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	- Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat
	3. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan rumah beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah
	4. Pendistribusian dan setah	- Penatausahaan serah terima rumah

	terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah	bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten
	5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan	- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
II.	Program Kawasan Permukiman	
	1. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
	2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan rumah tidak layak huni - Kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU
III.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	1. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha - Kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh
IV.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	
	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
V.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

	Perencanaan Prasarana, Sarana dan tilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
Jml	5 Program 10 Kegiatan	17 Sub Kegiatan

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten /Kota.	- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota.
	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	- Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJDP/RPJMD
II.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	1. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Air Udara dan Laut. - Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalia emisi gas rumah kaca ,Mitigasi Perubahan Iklim. - Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2. Penanggulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	- Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat. - Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan linkungan - Pengehentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
	3. Pemulihan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
III.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. - Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). - Pengembangan kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati. - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
IV.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau izin PPLH. - Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup - Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
VI.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
	1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan.

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. - Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
VIII.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
IX.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/ Kota - Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan
X.	Program Pengelolaan Persampahan	
	1. Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota - Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. - Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

	2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	- Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah.
JML	10 Program 14 Kegiatan	33 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan tersebut maka pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada bidang urusan Lingkungan Hidup memiliki 10 (sepuluh) program 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh Tiga) Sub Kegiatan. Untuk kewenangan pemerintahan pada bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terinci dalam 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adanya penambahan rumusan Sub Kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2023 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada bidang perumahan dan

kawasan permukiman pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah dan bidang lingkungan hidup pada sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah, kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	9	27
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	10	17
3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	14	33
Jumlah		16	33	77

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Penjabaran dari 2 (dua) kewenangan tersebut selanjutnya tertuang dalam 16 (enam belas) program, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dalam rencana kerja dan pendanaan dilengkapi dengan pilihan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. Dalam bagian ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas diharapkan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Aspek pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DLHPP Tahun Anggaran 2023 meliputi sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli daerah berupa Retribusi Daerah yang dalam hal ini adalah retribusi pengelolaan sampah dan retribusi pemakaian peralatan laboratorium, Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah berada pada angka Rp 200.000.000,-. Menurut porsinya, sumber pendanaan terbesar untuk pelaksanaan rencana kerja DLHPP 2023 berasal dari Dana Alokasi Umum/DAU sebesar Rp 27.004.935.321,- (82,17%). dan terakhir sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah/PAD sebesar 0,61%.

Aspek pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah DLHPP Tahun Anggaran 2023 menurut bidang urusan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) bidang urusan perumahan rakyat dan permukiman; 2) bidang urusan lingkungan hidup; dan 3) program penunjang urusan pemerintah daerah. Kerangka pendanaan bidang urusan Perumahan Rakyat dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 10,198,030,370 atau 33.89% dari rencana pendanaan keseluruhan Perangkat Daerah DLHPP. Selanjutnya kerangka pendanaan untuk bidang urusan lingkungan hidup sebesar Rp 14.738.735.000,- atau sebesar 48.98%. Terakhir kerangka pendanaan program penunjang urusan pemerintah daerah direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 5.151.659.047,- atau 17.12 % dari rencana pagu anggaran perangkat daerah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, rencana penganggaran Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 30.088.424.417,-.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	3.758.460.409	DAU		100	7.528.980.000
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	65	5.500.000	DAU		65	67.808.890
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU		48	33.940.000
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	5.500.000	DAU		14	33.868.890

2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota	100	3.577.028.803	DAU		100	6.389.160.000
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Lima Puluh Kota	37	3.497.368.803	DAU		44	5.853.240.000
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	20	79.660.000	DAU		86	535.920.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota		0	DAU		100	68.421.870
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PAKET)	Kab. Lima Puluh Kota	77	0	DAU		77	68.421.870
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	85.000.000	DAU		100	568.940.000

2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	10	1.500.000	DAU		10	14.880.096
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	15	1.500.000	DAU		15	67.757.580
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	48	15.000.000	DAU		48	123.420.000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	4	20.000.000	DAU		4	98.740.000
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.363	7.000.000	DAU		4.363	86.390.000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	35	40.000.000	DAU		35	185.130.000
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	0	DAU		100	461.645.480

Ranwal Renja DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2023

		Pemerintah Daerah							
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	3	0	DAU		3	406.105.480
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	10	0	DAU		5	55.540.000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	34.300.000	DAU		100	133.104.000
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.620	1.500.000	DAU		4.620	24.680.000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	5	30.800.000	DAU		5	61.710.000
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	50	1.000.000	DAU		31	35.750.000

2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	22	1.000.000	DAU		24	10.960.000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	56.631.606	DAU		100	266.705.740
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	44	53.145.803	DAU		44	124.765.740
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	50	0	DAU		50	104.910.000
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	1	3.485.803	DAU		1	37.030.000
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					500.000.000				9.073.220.000

1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam yang tertangani dan persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	30,30	500.000.000	DAU	SPM	32	1.312.410.000
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan permukiman (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	65.000.000	DAU		3	406.560.000
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Lima Puluh Kota	3	65.000.000	DAU		3	406.560.000
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	30	435.000.000	DAU		30	905.850.000

1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	25	0	DAU		10	355.850.000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Lima Puluh Kota	10	435.000.000	DAU		10	550.000.000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	Kab. Lima Puluh Kota	70	0	DAU	IKU	70	4.785.000.000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	247.500.000
2 04 03 2.02 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	Kab. Lima Puluh Kota	6	0	DAU		60	247.500.000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	Kab. Lima Puluh Kota	264	0	DAU		264	4.537.500.000

1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Lima Puluh Kota	264	0	DAK PKP		264	4.537.500.000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	Kab. Lima Puluh Kota	42.40	0	DAU		42	2.975.810.000
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	30	0	DAU		30	2.975.810.000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	29	0	DAU		30	2.796.850.000
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	178.960.000
LINGKUNGAN HIDUP					6.537.566.511				33.641.020.000

2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	71	0	DAU		71	666.460.000
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	123.420.000
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	123.420.000
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		1	0	DAU		1	543.040.000
1 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	271.520.000
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	271.520.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Indeks Kualitas Air	Kab. Lima Puluh Kota	64,95	2.927.774.031	DAK LH	IKU	65	3.370.611.719

	LINGKUNGAN HIDUP								
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pantau Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	22	2.313.768.031	DAU		22	2.280.930.290
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	491.270.000	DAU		18	491.270.000
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	1	437.162.826	DAU		1	67.881.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	1.385.335.205	DAU		18	1.721.779.290

2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	20	614.006.000	DAU		20	692.930.000
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	20	504.656.000	DAU		20	208.930.000
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		2	242.000.000
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	Kab. Lima Puluh Kota	2	109.350.000	DAU		2	242.000.000
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU		7	396.751.429

2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		5	396.751.429
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	0	DAU	PROGUL	5	6.244.871.662
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	0	DAU		5	6.244.871.662
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1100	0	DAU		1.210	1.894.805.854
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	40	0	DAU		5	134.911.260
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		4	40.654.548

2 11 04 2 01 09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	5	0	DAU			4.174.500.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	27	0	DAU		24	139.250.000
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	Kab. Lima Puluh Kota	27	0	DAU		50	139.250.000
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	40	0	DAU		50	139.250.000

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	85,5	0	DAU		89	492.290.000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	220	0	DAU		220	494.770.000
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	30	0	DAU		30	135.760.000
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		3	331.780.000

2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Lima Puluh Kota	26	0	DAU		33	27.230.000
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi		47	0	DAU		47	98.010.000
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (Kelompok)		188	0	DAU		188	98.010.000

2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	29.100.000	DAU		1	98.010.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	67	494.553.000	DAU		50	493.740.000
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	28	494.553.000	DAU		28	493.740.000
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Kab. Lima Puluh Kota	2	234.229.000	DAU		25	253.010.000

2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	92.649.000	DAU		5	191.300.000
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	75	167.675.000	DAU		5	49.430.000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	25,32	0	DAU		32	243.120.000
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		5	243.120.000

2 11 09 2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entititas)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		4	243.120.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Lima Puluh Kota	100	0	DAU		100	215.050.000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	0	DAU		14	215.050.000
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditang ani (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	12	0	DAU		14	126.500.000

2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	5	0	DAU		8	88.550.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	3.627.669.000	DAU		60	4.047.850.000
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	3.565.006.000	DAU		60	3.945.410.000
2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	9	118.348.000	DAU		1	546.392.880
2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	210.950.000	DAU		1	1.170.080.000

		untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
2.11.11.2.01.00 08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota	1	53.000.000	DAU		1	152.370.000
2.11.11.2.01.00 18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Lima Puluh Kota	1	174.444.000	DAU		1	512.799.100

2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Lima Puluh Kota	21.02	2.520.130.776	DAU		1	1.860.130.000
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	27	38.366.348	DAU		28	102.440.000
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	20	38.366.348	DAU		27	102.440.000
Total					10.796.026.564				33.346.479.017,



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

20. RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. LANDASAN HUKUM	2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
I.4. SISTEMATIKA	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	8
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ...	8
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	38
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	40
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	45
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	66
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	66
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	68
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
BAB V PENUTUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan	32
Tabel T-C. 29, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	34
Tabel T-C. 30, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	39
Tabel T-C. 31, Penghitungan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	39
Tabel T-B. 35, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian	42
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
Tabel T-C. 32, Usulan Pokok Pikiran dan Musrenbang dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	63
Tabel Hubungan Visi, Misi Tujuan Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas	69
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	69
Tabel T-B. 36, Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas	72
Tabel T-C. 33 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD	73
Tabel Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021	73
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD	73
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	74



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana



pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80



- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);



27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36)

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,



sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penelitian

- II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Distanhortbun, analisis kinerja pelayan Distanhortbun, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Distanhortbun dan sebagainya.
 - 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah
 - 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Distanhortbun dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024
 - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah
 - 3.3 Program dan kegiatan
- IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Memuat Program dan Kegiatan Dinas dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun.
- V. **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan



indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada Tahun **2022** Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 21.746.346.375,- dimana belanja langsung yang terdiri 5 Program dan 14 kegiatan.

Nilai capaian kinerja untuk 14 kegiatan tersebut berkisar dari yang terendah 86,26% sampai yang tertinggi 100% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 98,40%.

Melalui segi akuntabilitas keuangan dari Rp. 21.746.346.375,- anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 20.471.222.264,- (94,14%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, beberapa kegiatan dengan realisasi fisik dibawah 90 % antara lain :

- a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani** dengan realisasi fisik 89,75%. Keluaran dari kegiatan adalah Pembangunan/rehab jalan usaha tani dengan capaian kinerja berupa 3 unit di Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Pincuran Tujuh Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Sedangkan 3 unit lagi tidak dapat terlaksana karena kesalahan input nama kelompok tani yang seharusnya diinput di sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya dan hanya bisa di rubah pada saat perubahan anggaran.



Adapun nama kelompok tani yang tidak bisa terlaksana tersebut adalah kelompok tani bumi atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Kina Banda Raik Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan dan Jalan Simpang Kubang Suku-Pisang.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa** dengan realisasi fisik 86,26%. Adapun penyebab tidak tercapainya persentase keuangan dan fisik 100% adalah karena waktu kegiatan banyak berada pada akhir tahun. Solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang di distribusikan lebih ke awal tahun, hingga waktu pelaksanaan lebih lapang.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.755.000,- dan realisasi keuangan Rp. 11.755.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Rencana Kerja Distanhortbun, 1 Dokumen Rencana Kerja Perubahan Distanhortbun, dan 1 Dokumen Rencana Strategis Distanhortbun.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.421.400,- dan realisasi keuangan Rp. 10.311.400,- atau 98.94% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA dinas tahun anggaran 2022.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.396.200,- dan



realisasi keuangan Rp. 11.286.200,- atau 99,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA perubahan tahun anggaran 2022.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.889.500,- dan realisasi keuangan Rp. 5.848.500,- atau 99,30% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA dinas tahun anggaran 2022.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.448.500,- dan realisasi keuangan Rp. 6.426.500,- atau 99,66% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA perubahan tahun anggaran 2022.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.132.000,- dan realisasi keuangan Rp. 23.848.000,- atau 98,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKjIP), 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ), dan 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas.
7. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.160.700,- dan realisasi keuangan Rp. 197.427.449,- atau 99,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen database dan 1 tahun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas.
8. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.347.488.567,- dan realisasi keuangan Rp. 10.321.342.023,- atau 99,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun.
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.032.600,-



dan realisasi keuangan Rp. 16.026.600,- atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Laporan keuangan dinas.

10. Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.962.600,- dan realisasi keuangan Rp. 3.962.600,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen tanggapan pemeriksaan.
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.711.000,- dan realisasi keuangan Rp. 5.702.000,- atau 99,84% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 12 dokumen laporan keuangan bulanan.
12. Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.000,- dan realisasi keuangan Rp. 475.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 2 dokumen laporan prognosis.
13. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.170.200,- dan realisasi keuangan Rp. 1.170.200,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan barang milik daerah.
14. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.084.800,- dan realisasi keuangan Rp. 7.074.800,- atau 99,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah penatausahaan barang milik daerah selama 1 tahun.
15. Sub Kegiatan Pelaporan pengelolaan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.728.800,- dan realisasi keuangan Rp. 1.228.800,- atau 2,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai



75,37% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah.

16. Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.740.000,- dan realisasi keuangan Rp. 21.730.000,- atau 99,95% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah termonitor dan terevaluasinya kinerja pegawai Distanhortbun baik yang di kantor dan BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
17. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.800.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor.
18. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.804.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.804.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor / kebutuhan kantor.
19. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 100.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya ATK untuk dinas dan BPP.
20. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.329.300,- dan realisasi keuangan Rp. 53.325.800,- atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
21. Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.990.000,- dan realisasi keuangan Rp. 15.627.000,-



- atau 97,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlayannya tamu pada Distanhortbun.
22. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.096.000,- dan realisasi keuangan Rp. 227.088.753,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik ke dalam daerah maupun keluar daerah.
23. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 7.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya benda pos / materai untuk kebutuhan kantor.
24. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 97.411.794,- atau 86,97% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik untuk kantor Distanhortbun dan BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
25. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 318.900.000,- atau 99,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pelayanan umum kantor berupa petugas administrasi, petugas kebersihan kantor dan BPP, tenaga sopir serta petugas keamanan.
26. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.344.000- dan realisasi keuangan Rp. 217.353.096,- atau 99,55% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 bagi



perorangan dan kendaraan dinas jabatan berupa pajak, suku cadang dan service.

27. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- dan realisasi keuangan Rp. 23.820.000,- atau 95,47% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
28. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.838.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.742.000,- atau 8,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Distanhortbun dan kantor BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
29. Sub kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 574.115.100,- dan realisasi keuangan Rp. 410.224.090,- atau 71,45% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
 - a. Rapat monitoring dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Tim Verval, Tim Entri RDKK, Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Perwakilan Pengecer dan Tim Pembina Kabupaten.
 - b. Rapat koordinasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Tim Verval, Tim KP3 dan Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Rapat koordinasi pengembangan pupuk organik dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2022 dihadiri oleh Koordinator dan Ketua Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan UPPO di Kabupaten Lima Puluh Kota.



- d. Rapat sosialisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan tanggal 29 Maret 2022 yang dihadiri Tim Pembina Kabupaten, Tim Entri RDKK, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - e. Pengadaan pupuk NPK (15:15:15) mendukung Progul 26 Ha berupa pupuk NPK Ponska diberikan kepada 26 Kelompok tani yang tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - f. Bantuan Saprodi Pengembangan Jagung untuk Keltan Karya Bakti Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru berupa Pupuk NPK Ponska 525 kg.
 - g. Pengadaan Kapur Pertanian untuk mendukung Pengembangan Jagung Kec. Pangkalan Koto Baru sebanyak 63.300 Kg diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - h. Pengadaan Pupuk Organik Pengembangan Jagung 62 Ha sebanyak 77.500 kg diberikan kepada 4 Kelompok Tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - i. Pengadaan Pupuk Organik untuk Pengembangan Jagung 40 Ha di Kecamatan Guguak dan Gunuang Omeh sebanyak 45.000 Kg untuk 3 Kelompok Tani
 - j. Pengadaan Pupuk Organik dalam rangka pemeliharaan jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suliki sebanyak 72.000 Kg untuk 9 Kelompok Tani
30. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.387.145.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.277.387.300,- atau 95,40% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pengadaan
- a. Hand Traktor Rotari 1 Unit di serahkan kepada kelompok tani Tunas Muda Nagari Mungo Kecamatan Luak,



- b. Hand Traktor Tipe Kecil 7 Unit diserahkan kepada 7 kelompok tani
 - c. Hand Traktor Type Menengah 5 Unit diserahkan kepada 5 kelompok tani
 - d. APPO 1 Paket berupa Alat Pencacah (COPPER) 1 Unit dan 1 Unit Mesin Penjahit Karung diserahkan kepada kelompok tani Sakato Nagari Mungo Kecamatan Luak,
 - e. Bentor 2 Unit diserahkan kepada 2 kelompok tani
 - f. Cultivator 11 Unit dimana 5 unit pendanaannya melalui dana DBHCHT diserahkan kepada 5 kelompok tani dan 6 unit cultivator dari dana DAU diserahkan kepada 6 kelompok tani
 - g. Mesin Potong Rumput 26 Unit diserahkan kepada 6 kelompok tani
 - h. Corn Sheller 3 diserahkan kepada 3 kelompok tani
 - i. Hand Sprayer 2 Unit dan Alat Tanam Jagung 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunuang Kec. Pangkaan Koto Baru,
 - j. Solar Dryer Portable 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Ngatau Jaya Nagari Pangkalan kec. Pangkalan Koto Baru,
 - k. pH Meter 100 Unit diserahkan kepada 100 Kelompok tani
 - l. Colour Sorter 1 unit diserahkan kepada kelompok tani Hampanan Nagari Limbanang Kec. Suliki,
 - m. RMU 1 Unit diserahkan kepada kelompok tani Lumbuang Padi Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX,
 - n. Sedangkan Pengadaan Alsintan Brigade adalah 1 unit Combine Harvester Multiguna, 1 unit Alat Penyanggul Gulmadan 1 unit Alat Tanam Jagung.
31. Sub kegiatan Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.080.000,- dan realisasi keuangan Rp. 61.936.500,- atau 99,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :



- a. Terlaksananya perbanyakan Benih Sumber BS, BD dan BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec. Akabiluru sejumlah 1.020 kg
 - b. Terlaksananya pengadaan benih jagung Pioneer (P32) sebanyak 85 kg dan pupuk NPK (Phonska Plus) sebanyak 875 kg untuk kelompok tani Boncah Pulau Topuang Nagari Mungka Kec. Mungka.
32. Sub kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp515.003.500,- dan realisasi keuangan Rp. 91.505.250,- atau 17,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Terlaksananya perbanyakan Benih Sumber BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec. Akabiluru sejumlah 1.040
 - b. Terlaksananya pengadaan benih jagung Hibrida varietas Pioneer (P32) dalam mendukung Program Unggulan di 13 Kecamatan sebanyak 702 kg masing- masing kelompok tani mendapatkan 27 kg
 - c. Terlaksananya pengadaan benih jagung Varietas Nassa 29 sebanyak 1.500 kg untuk 6 kelompok tani dalam mendukung pengembangan jagung
 - d. Terlaksananya pengadaan benih padi Inbrida untuk 50 kelompok tani sebanyak 10.525 kg mendukung peningkatan pemakaian benih unggul berlabel. Benih padi terdiri dari 2 varietas yakni varietas Junjuang dan Banang Pulau
 - e. Terlaksananya pengadaan bibit Aren (Enau) sebanyak 2.000 batang untuk kelompok tani Maju Bersama Nagari Batu Balang Kec. Harau.
 - f. Terlaksananya pengadaan bibit durian dengan 4 varietas yaitu Varietas Matahari, Bawor, Kani dan Musangking sebanyak 641 batang di 3 kelompok tani yaitu : kelompok tani Putra Siboka



- Nagari Andiang Kecamatan Suliki 242 batang, kelompok tani berkah nagari koto tengah kecamatan bukit barisan sebanyak 200 batang dan kelompok tani lembah permata Nagari Andiang kecamatan suliki sebanyak 200 batang.
- g. Terlaksananya pengadaan saprodipengembangan jagung berupa benih jagung Pioneer P32 sebanyak 30 kg dan untuk kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan.
33. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.626.000,- dan realisasi keuangan Rp. 157.577.361,- atau 99,97 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola dimana sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 20.448,22 yang terdiri dari LP2B seluas 19.125,45 Ha dan LCP2B seluas 1.322,77 Ha.
34. Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunandengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.890.000,- dan realisasi keuangan Rp. 325.890.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen masterplan dan action plan pengembangan kawasan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dimana sebaran lahan potensi pengembangan kawasan jagung di 13 (tiga belas) kecamatan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi lapangan dengan kondisi “**sangat sesuai**” yaitu S1 dapat bersumber dari pemanfaatan lahan



sawah (pengaturan pola tanam) dengan potensi pengembangan seluas 11.901 Ha dan pembukaan lahan baru selain lahan sawah dengan potensi seluas 35.597 Ha.

35. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.850.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.849.999.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 5 unit Irigasi Tanah Dangkal, 3 unit Irigasi Tanah Dalam dan 3 unit Irigasi Tersier sehingga total sub kegiatan ini adalah 11 unit. Irigasi Tanah dalam Tersebar di Kecamatan Lareh sago Halaban sebanyak 3 (tiga) unit di keltan Cimpago – Bukik Sikumpa, keltan Harapan Bersama – Koto Tinggi kec. Gunuang Omeh dan keltan Pemuda Milenial- Muaro Paiti kec. Kapur IX. Dan untuk irigasi tanah dangkal sebanyak 5 (lima) unit tersebar di keltan Tunas Muda – Durian tinggi kec. Kapur IX, keltan Tampang Saiyo – Sialang kec. Kapur IX dan keltan Sumber nagari Koto Lamo. Di kec. Harau di keltan Hasta Karya – nagari Solok Bio-bio, keltan Venus di nagari Baruah Gunuang kec. Bukik Barisan. Untuk irigasi tersier terbangun 3 (tiga) unit yang tersebar di kec. Lareh Sago Halaban di keltan Calang – Sitanang, keltan Kampung Panjang Saiyo, nagari Durian Tinggi kec. Kapur IX dan keltan Satu Hati nagari Sarilamak kec. Harau.
36. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.49.999.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit embung yang berlokasi di keltan Guguak Sakato Nagari Tanjung Gadang kec. Lareh Sago Halaban.
37. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.574.090.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.979.640.215,- atau 76,91 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini



adalah 25 unit (4 unit jalan usaha tani dan 21 unit jalan produksi). Sebaran lokasi pembangunan Jalan Usaha Tani 1 (satu) unit di kelompok tani Oriza Sativa nagari Sungai Antuan Kec. Mungka, 1 (satu) Unit di keltan Subarang Bawah nagari Batu Balang kec. Harau, 1 (satu Unit di keltan Anjalai nagari Mungo kec. Luak dan 1 (satu) unit di keltan Salendang Suto nagari Sitanang kec. Lareh Sago Halaban. Sementara untuk Jalan Produksi tersebar di beberapa lokasi seperti di 2 (dua) unit di kecamatan Gunuang Omeh (keltan Tunas Muda dan keltan Tarusan Dareh nagari Koto Tinggi), 3 (tiga) unit di kec. Bukik Barisan (keltan Kambang Payuang nagari Sungai Naning, keltan Bungo Padi nagari Banja Loweh dan keltan Sinar Harapan nagari Maek). Di kecamatan Mungka 1 (satu) unit jalan produksi di keltan Setia Mungka nagari Mungka dan kecamatan Guguak, KWT Jaya Bersama di nagari VII Koto Talago. Jalan produksi di kecamatan Lareh Sago Halaban ada 3 (tiga) unit yang tersebar di nagari Batu Payuang (keltan Maju Jaya), nagari Balai Panjang (keltan Saiyo Sakato dan di Nagari Bukik Sikumpa (keltan Cimpago). Untuk kecamatan Harau, jalan produksi dibangun di nagari Sarilamak di keltan Sanipan Saiyo. Untuk kecamatan Pangkalan, ada 2 (dua) unit jalan produksi di Nagari Pangkalan yaitu di keltan Ngalau Jaya dan keltan Simpati Jaya. Dan di kecamatan Kapur IX, jalan produksi dibangun sebanyak 6 (enam) unit yang tersebar di nagari Koto Lamo (keltan Belas Kasihan), nagari Lubuak Alai (keltan Koto Sepakat), nagari Koto Lamo (keltan Sungai Gemuruh), nagari Durian Tinggi (keltan Koto Saiyo) dan di nagari Muaro Paiti (keltan Pemuda Milenial dan KWT .Usaha Bunda).

38. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dan realisasi keuangan Rp180.000.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit bangunan RMU di kelompok Lumbuang Padi nagari Durian Tinggi kec Kapur IX.



39. Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.149.565,- dan realisasi keuangan Rp. 393.142.300,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Gerakan Pengendalian OPT/Penerapan PHT Tanaman Jagung di 13 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Rancak Basamo Nagari Mungka Kec. Mungka, Kelompok Tani Tapak Jaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari, Kelompok Tani KWT Puti Saiyo Nagari Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari, Kelompok Tani Amanah Nagari Andiang Kec. Suliki, Kelompok Tani Semoga Jaya Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kelompok Tani Padang Selereng Nagari Sungai Naniang, Kelompok Tani Murah Hati Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Lereng Indah Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Hamparan Sungai Beringin Nagari Sariek Laweh Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Cimpago Raya Nagari Suayan Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Sakato Nagari Mungo Kec. Luak, Kelompok Tani KWT Usaha Bersama Nagari Sei. Kamuyang Kec. Luak, dan Kelompok Tani Hasta Karya Nagari Solok Bio-bio Kec. Harau dan Penerapan Pengendalian OPT Tanaman Tembakau di 10 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Pambola Ruyuang Sakato Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan, kelompok tani Batang Puniak Nagari Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari, kelompok tani Ingin Maju Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, kelompok tani Bukik Cawan Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari, kelompok tani Saiyo Nagari Kubang Kec. Guguak , kelompok tani Puncak Kumbuah Nagari Sei. Naniang Kec. Bukik Barisan, Kelompok Tani Gunuang Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan, Kelompok Tani Tani Subur Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari, Kelompok Tani Ngalau Indah Nagari Pandam Gadang Kec.



Gunuang Omeh dan Kelompok Tani Fajar Harapan Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh.

40. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.084.000 dan realiasi keuangan Rp. 128.084.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. keluaran dari kegiatan ini adalah Penerapan Dampak Perubahan Iklim 13 Lokasi dan Penyusunan Pola Tanam di 13 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Serumpun Kulik Manih Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Bundo Saiyo Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Lereng Sago Sepakat Nagari Situjau Batua Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak, Kelompok Tani Sopan Panjang Nagari Sariék Laweh Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Hijau daun Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Andeski Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani KWT Sakinah Nagari Koto Tengah Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Pelita Harapan Nagari Sungai Naniang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Harapan Baru Nagari Banja Loweh Kec. Bukit Barisan dan Kelompok Tani Angin Berhembus Nagari Kubang Kec. Guguak.
41. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.990.500,- dan realisasi keuangan Rp. 20.990.500,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gambir 1 Dokumen dan Temu Usaha Pengembangan Jagung 2 Kali di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.



42. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh di Kecamatan dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 867.752.932,- dan realisasi keuangan Rp. 767.518.639,- atau 88,45 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,08 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Pelatihan Penyuluh Swadaya (IPDMIP) dilaksanakan pada tanggal 6-10 Juni 2022 di ruangan Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan jumlah peserta 40 orang.
 - b. Penyediaan Tenaga Pendukung untuk Kegiatan IPDMIP. Sebanyak 12 orang Staf Lapangan Pendamping Penyuluh terbagi di semua Nagari Daerah Irigasi (DI) IPDMIP. Staf Lapangan IPDMIP bertugas mendampingi pelaksanaan Sekolah lapang (SL) dan menyiapkan segala kebutuhan untuk SL. Staf Lapangan mendapatkan Honorarium dan BOP setiap bulannya.
 - c. Pertemuan Bulanan Review Penyuluhan (IPDMIP) yang berjumlah 10 kali pertemuan dengan rincian pertemuan :
 - 1) Pertemuan 1 tanggal 8 Februari 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 2) Pertemuan ke 2 pada tanggal 25 Februari 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 3) Pertemuan ke 3 pada tanggal 10 Maret 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 4) Pertemuan ke 4 pada tanggal 1 April 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 5) Pertemuan ke 5 pada tanggal 24 Mei 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.



- 6) Pertemuan ke 6 pada tanggal 14 Juni 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 7) Pertemuan ke 7 pada tanggal 8 Juli 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 8) Pertemuan ke 8 pada tanggal 8 Agustus 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 9) Pertemuan ke 9 pada tanggal 23 September 2022 di ruang Pertemuan Rumah Makan Kapalo Banda.
 - 10) Pertemuan ke 10 pada tanggal 3 Oktober 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
- d. Rantai Nilai (IPDMIP) 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Workshop Validasi dilaksanakan 2 angkatan :
 - Angkatan I diadakan pada tanggal 11-12 Agustus 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Angkatan II diadakan pada tanggal 15-16 Agustus 2022 di Ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 2) Fasilitasi Rantai Nilai dilakukan 4 kali :
 - Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - Pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Pertemuan 4 dilaksanakan Temu Bisnis pada tanggal 1 November 2022 ke Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Padang.
 - 3) Workshop Kajian Rantai Nilai dilaksanakan 2 kali pertemuan yang di adakan pada tanggal 10 November dan



tanggal 11 November 2022 di Hotel Sago Bungsu Tanjung Pati.

- e. Pendampingan Rantai Nilai di 2 Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Lareh Sago Halaban pada 7 September 2022, 14 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 4 November 2022 dan 14 November 2022.
 - 2) Kecamatan Luak pada 7 September 2022, 14 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 4 November 2022 dan 14 November 2022.
- f. Sekolah Bisnis dilaksanakan 2 Angkatan pada tanggal 23, 24, 25, 28, dan 29 November 2022 di Hotel Sago Bungsu Tanjung Pati.

43. Sub kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.741.900,- dan realisasi keuangan Rp. 633.714.979,- atau 86,72 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani (IPDMIP) dilakukan sebanyak 2 unit yakni 1 unit di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi pada 2 daerah irigasi dan 1 unit di daerah Irigasi Kewenangan kabupaten pada 8 daerah Irigasi.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan :

- 1) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Tabik dilaksanakan di KWT. Taruko Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- 2) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Lampasi dilaksanakan di Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 20 Juli 2022.



- 3) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Titi Ampera dilaksanakan di Kelompok Tani Palito Hati Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru pada tanggal 1 Agustus 2022.
 - 4) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Mungo dilaksanakan di Kelompok Tani Hamparan Pulau Nagari Taram Kecamatan Harau pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - 5) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Sanipan dilaksanakan di Kelompok Tani Kulin Jaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - 6) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Tanjung Betaut dilaksanakan di Kelompok Tani Toluak Saiyo Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak pada tanggal 26 Juli 2022.
 - 7) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Liki dilaksanakan di Kelompok Tani Jaya Bersama Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki pada tanggal 26 Juli 2022.
 - 8) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Lurah Buluh Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
 - 9) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Coran Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
 - 10) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Banda Baliak Sariak Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- b. Konstratani (DAK-Non Fisik)
- Kegiatan Konstratani dilaksanakan pada 13 Kecamatan. Adapun rincian kegiatan Konstratani sebagai berikut :
- 1) Paket data internet pada 13 Kecamatan
 - 2) Pelatihan petani tematik pada 13 Kecamatan
- c. Kunjungan Antar Desa per Kecamatan (IPDMIP) sebanyak 2 unit. 1 unit di wilayah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dan 1



unit di Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten. Kunjungan Lintas Desa dilaksanakan pada 7 Kecamatan.

- 1) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Mungka ke Daerah Irigasi Titi Ampera pada Kelompok Tani Mitra Mandiri Nagari Batu Hampar.
 - 2) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Situjuh Limo Nagari ke Daerah Irigasi Nagari Sitanang
 - 3) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Kapur IX ke Daerah Irigasi Batang Mungo pada Kelompok Tani Hampan Pulau Nagari Taram
 - 4) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Pangkalan ke Daerah Irigasi Batang Lampasi pada Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Piobang
 - 5) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Gunuang Omeh ke Daerah Irigasi Batang Liki pada Kelompok Tani Jaya Sepakat Nagari Sungai Rimbang
 - 6) Kunjungan Lintas Desa dari kecamatan Bukik Barisan ke daerah Irigasi Tanjuang Betaut Nagari Guguak VIII Koto
 - 7) Kunjungan Lintas Desa dari kecamatan Lareh Sago Halaban ke Daerah Irigasi Batang Tabik pada Kelompok Tani Pantai Cermin Nagari Mungo
- d. Penghargaan untuk Penyuluh (IPDMIP) : Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Kecamatan IPDMIP.
- Adapun yang menerima penghargaan petani berprestasi sebagai berikut :
- 1) Elfa Susanti Nagari Batu Ampa
 - 2) Zul Ariesman Nagari Koto Tengah Batu Hampa
 - 3) Yesi Rizanti Nagari Sungai Rimbang
 - 4) Hendra Nagari Piobang
 - 5) Novida Nagari Sungai Beringin
 - 6) Rena Helena Nagari Sarilamak
 - 7) Fitra Andalia Nagari Taram



- 8) Darmawira Nagari Nagari Balai Panjang
 - 9) Ratna Defita Nagari Sitanang
 - 10) Deti Yasni Nagari Ampalu
 - 11) Lidia Rahma Fitri nagari Sungai Kamuyang
 - 12) Meli Susanti Nagari Mungo
- e. Penghargaan untuk Penyuluh (IPDMIP) : Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Kecamatan IPDMIP.
- Adapun yang menerima penghargaan penyuluh berprestasi sebagai berikut :
- 1) Prima Gustia, SP : Penyuluh Pertanian Nagari Piobang
 - 2) Meinina Roza, S.Pt : Penyuluh Pertanian Nagari Sungai Rimbang
 - 3) Yulia Fitri, S.ST : Penyuluh Pertanian Nagari Batu Hampa
 - 4) Hidayati, A.Md : Penyuluh Pertanian Nagari Mungo
 - 5) Buchi Afriyogi : Penyuluh Pertanian Nagari Guguak VIII Koto
 - 6) Yanti Yulianti : Penyuluh Pertanian Nagari Sitanang
44. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.662.052.268,- dan realisasi keuangan Rp. 540.093.456,- atau 32,50% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 34, 85 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Demonstrasi Alsintan (IPDMIP) dilaksanakan sebanyak 2 kali di Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh di 2 lokasi di bagi untuk Kewenangan Provinsi dan Kabupaten.
 - b. Demonstrasi Equipment (IPDMIP) : Diberikan berupa Alat Mesin Pertanian Chopper (Alat Pencacah Multifungsi) sebanyak 20 Unit di Lokai 7 Kecamatan Daerah Pelaksana Kegiatan IPDMIP. Masing Daerah Irigasi (DI) mendapatkan 2 Unit Chopper.
 - c. Pembangunan Tenaga Pendukung dan Rehabilitasi BPP Kecamatan (DAK) : sebanyak 2 Unit untuk BPP Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tetapi tidak



dapat direalisasikan karena Tidak bisa dilaksanakan pekerjaan karena telah berakhirnya batas waktu input aplikasi OMSPAM pada tanggal 21 Juli 2022, sehingga hanya bisa direalisasikan kegiatan yang telah di setujui APIP saja yakni pembelian 2 Unit Ampli dan 2 Unit Infocus.

45. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.295.974.400,- dan realisasi keuangan Rp. 3.133.929.900,- atau 94,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Bimbingan Teknis untuk Sekolah Lapang Bawang Merah untuk 1 Kelompok Tani Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Bantuan yang di berikan berupa Bibit Bawang Merah, Kapur Dolomit, Mulsa Plastik, Pupuk Kompos, Pupuk NPK dan Baju Kaos Lapangan. Pertemuan dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan jumlah peserta 20 orang/pertemuan.
- b. Sekolah Lapang IPDMIP:

Sekolah lapangan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya dan pengelolaan usaha tani;
 - 2) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya secara produktif;
 - 3) Meningkatkan kepercayaan diri petani dalam mengadopsi praktek-praktek;
 - 4) Membangun kemandirian petani dalam pengelolaan proses pembelajaran diri, oleh, dan untuk petani.
- a) Sekolah Lapang dibagi 2 musim. Sekolah Lapang IPDMIP terdiri dari SL Padi, SL Penangkar dan SL Jagung. Musim I dilaksanakan pada bulan April s/d Juli 2022 pada 10 Daerah Irigasi terdiri dari 48 kelompok tani sedangkan Musim II dilaksanakan pada bulan Agustus



s/d November 2022 pada 10 Daerah Irigasi terdiri dari 35 kelompok tani melaksanakan SL Padi.

- b) Hasil/Outcome
 - Produktivitas padi di daerah irigasi lokasi proyek meningkat,;
 - Intensitas tanam di daerah irigasi lokasi proyek meningkat,
- c) Peserta
 - Peserta sekolah lapangan adalah penerima manfaat prioritas dari proyek (rumah tangga miskin, petani kecil, kaum perempuan, dan petani muda) yang ada di sekitar Daerah irigasi di kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Setiap siklus SL dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan setiap pertemuan dilaksanakan selama setengah hari dimulai jam 08.30 s/d selesai WIB
 - SL dilaksanakan di lahan usahatani petani penerima manfaat proyek
- d) Metode
 - Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi para petani dalam pengelolaan usahatannya
 - Penetapan materi pembelajaran SL secara partisipatif antara pemandu dan petani penerima manfaat proyek, mencakup materi-materi yang relevan dalam satu siklus budidaya padi, mulai dari persiapan tanam sampai pasca panen, baik aspek teknis, pembiayaan, pengelolaan air, dan pasca panen
 - Penetapan jadwal untuk 12 kali pertemuan pembelajaran SL
 - Pelaksanaan pertemuan pembelajaran SL sebanyak 12 kali untuk setiap siklus SL
 - Penyusunan laporan pelaksanaan SL



- c. Sekolah Lapang Program Unggulan Jagung sebanyak 26 Kelompok. Bantuan yang di berikan berupa Benih Jagung Phioneer 32, Kapur Dolomit, Urea, Pupuk Kompos dan Pupuk NPK. Pertemuan dilaksanakan 5 kali pertemuan/Kelompok dengan jumlah peserta 20 orang/pertemuan.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan Total Belanja APBD sebesar Rp. **20.248.130.331,-** terurai dalam 6 program dan 16 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB dalam harga berlaku	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3% per tahun	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1. Pengembangan prasarana pertanian 2. Pembangunan prasarana pertanian
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
		Perizinan usaha pertanian	1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
		Penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	55%	48%	50%	0	0	50%	100%	100%
	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	PENGAWASAN PEMANFAATAN PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN	13 kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	13 Kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Pemanfaatan Alsintan	13 Kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN,	PENGLOLAAN SDG	7 komoditi	6 Komoditi	7 Komoditi	5 komoditi	71	9 Komoditi	128%	128%



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

	TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN KOTA									
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun	1 varietas	2 Komoditi	1 Komoditi	1 komoditi	100	4 Komoditi	400%	400%
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan benih tanhortbun	7 komoditi	6 Komoditi	6 Komoditi	4 komoditi	66	6 Komoditi	100%	100%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	72%	68%	70%	0	0	100%	100%	100%
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIA	MASTERPLAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengawalan pelaksanaan Perda LP2B	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan, dan komoditas perkebunan	1 dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	52 unit	37 Unit	29 Unit	38 unit	130	41 Unit	141%	141%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani	13 unit	2 Unit	5 unit	11 unit	220	6 Unit	120%	120%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	6 unit	4 Unit	5 Unit	1 unit	20	6 Unit	120%	120%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	25 unit	3 Unit	7 Unit	25 unit	350	19 Unit	271%	271%



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit pertanian	4 unit	4 Unit	4 Unit	0	0	6 Unit	150%	150%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh	1 unit	0	3 Unit	0	0	2 Unit	66,66%	66,66%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	3 unit	24 Unit	5 Unit	1 unit	20	2 Unit	40%	40%
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE FASILITASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100%
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	FASILITASI PENGENDALIAN OPT DAN PENGENDALIAN/PENANGGULANGAN BENCANA	6 komoditi	2 Komoditi	50 Lokasi	36	72	50 Lokasi	100%	100%
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT	23 lokasi	3 Lokasi	24 Lokasi	23 lokasi	96	24 Lokasi	100%	100%
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penerapan Dampak Perubahan Iklim (PDPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	26 lokasi	0	26 Lokasi	13 lokasi	50	26 Lokasi	100%	100%
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Cadangan benih padi untuk bencana alam	2000 Kg	600 Kg	2000 Kg	0	0	2005 Kg	100%	100%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	100%	0%	100%	1,7%	1.7	100%	100%	100%
	PENERBITAN IZIN USAHA	JUMLAH PENYUSUNAN, PENILAIAN,	56 dokumen	0	56	1	1.7	36 Dokumen	64%	64%



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

	PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMBINAAN IZIN USAHA PERTANIAN			Dokumen	dokumen				
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	3 dokumen	0	3 Dokumen	0	0	3 Dokumen	100%	100%
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	2 dokumen	0	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	100%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Gambir	51 dokumen	0	51 Dokumen	1 dokumen	1.7	31 Dokumen	60%	60%
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TANI	6 %	3%	4%	5,1%	127	100%	100%	100%
	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TANI	26 kelompok tani	48	72Kelompok Tani	91 kelompok tani	126	26 Kelompok Tani	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas BPP	2 BPP	1 Unit	2 Unit	0 unit	0	2 Unit	100%	100%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang terfasilitasi	96 kelompok tani	11 Kelompok	160 Kelompok	110 kelompok tani	68	360 Kelompok	225 %	225%
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas BPP	2 BPP (6 unit)	4 Unit	322 Unit	20 unit	6,2	85 Unit	26%	26%
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	80 keltan	0	120 Keltan	110 kelompok tani	92	30 Keltan	25 %	25 %



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66); Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu orang Sekretaris dan empat (4) orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Tanaman Pangan, b). Bidang Sarana, Prasarana, Perizinan dan Penyuluhan, c). Bidang Tanaman Perkebunan, d). Bidang Tanaman Hortikultura. Masing-masing Bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	4,58	4,78	4,98	5,18	4,32	4,43	4,51	5,18	

Tabel. Penghitungan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Komoditi	2020	2021	2022	Peningkatan tahun 2021	Peningkatan tahun 2022
Padi	267.971,50	232.018,75	228.015,60	-13.42	-1.73
Jagung	45.511,78	37.906,26	50.277,78	-16.71	32.64
Jeruk	58.193,00	38.368,00	31.323,39	-34.07	-18.36
Cabe Besar	19.819,00	8.322,00	10.498,28	-58.01	26.15
Gambir	7.827,00	7.845,89	7.776,42	0.24	-0.89
Kopi	422,29	380,87	418,76	-9.81	9.95
Rata-Rata				-21.96	7.96

Peningkatan produksi jagung pada tahun 2022 diakibatkan oleh pelaksanaan Program Unggulan Daerah *Pengembangan jagung 20.000 Ha*. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran 1,3 M untuk program pengembangan jagung yang berupa penyusunan action plan, pelatihan, bantuan sarana produksi, temu usaha dan lain lain. Akibat dari masivnya pengembangan jagung, mengakibatkan produksi komoditi lain terdampak, seperti padi yang menurun produksinya ditahun 2022. Menurunnya produksi jeruk dikarenakan adanya serangan OPT jeruk ditahun 2022.



II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH / DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

II.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan visi: **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu **Madani** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparasi, toleransi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, beradat, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari dalam pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 5 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Pengembangan masyarakat madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan pembangunan insfrastruktur daerah

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Mendukung pelaksanaan misi II, yaitu “Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional” melalui agenda prioritas pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota turut berperan dalam mensukseskan pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah antara lain adalah kebijakan anggaran yang membatasi luasan kegiatan, Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugasnya, jumlah aparatur (ASN) yang mengalami stagnansi kaderisasi karena tidak adanya penerimaan pegawai baru, sementara aparatur yang memasuki masa purna bakti kian bertambah, dan permasalahan lainnya yang harus disikapi dengan bijak demi tercapainya Visi Daerah.



Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan pergeseran anggaran dan penyesuaian arah bentuk kegiatan di tahun 2023. Kondisi Keuangan daerah yang minim mengakibatkan alokasi anggaran untuk mendukung program unggulan daerah tidak terpenuhi, diperkirakan untuk tahun 2024 tidak jauh berbeda.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dipetakan dalam table berikut :

Tabel. T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produksi dan Produktivitas Pertanian di Kabupten Lima Puluh Kota masih belum maksimal	a. Ketersediaan Sarana Pertanian (Pupuk, Pestisida, Alsintan) yang belum memadai bagi Kebutuhan Petani di Kabupaten Lima Puluh Kota	<ul style="list-style-type: none">- Distribusi pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan petani- Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian oleh petani di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah- Pemakaian Benih berlabel/ bermutu masih belum merata- Potensi varietas local bermutu belum dikelola maksimal
		b. Penyediaan Prasarana Pertanian masih belum memadai	<ul style="list-style-type: none">- Belum ada nya cetak biru Pengembangan pertanian- Prasarana Irigasi pertanian masih belum mencukupi- Prasarana Jalan Pertanian masih Belum memadai bagi transportasi saprodi dan hasil pertanian- Prasarana Pertanian lainnya seperti BPP Kecamatan, UPTD Benih, perlu dipelihara dan dikembangkan,
		c. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang rawan bencana alam dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none">- Serangan OPT yang tidak mampu dikendalikan petani secara mandiri- Rendahnya Kemampuan berusaha Kembali bagi petani dalam kondisi pasca bencana alam



			<ul style="list-style-type: none">- Pemahaman petani dalam pemakaian Pestisida dan pertanian ramah lingkungan masih rendah- Penerapan usaha tani adaptif iklim masih rendah
		d. Pembinaan dan pengawalan perizinan usaha pertanian masih rendah	<ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian belum ada- Pelaksanaan Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian masih belum maksimal
		e. SDM dan Sarana Penyuluhan dan Petani perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan penilaian bagi penyuluh masih belum maksimal- Pelatihan dan Pembinaan kelompok tani masih perlu ditingkatkan- Sarana dan Prasarana Penyuluhan perlu dipelihara dan ditingkatkan

II.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Dampak dari Penerapan Kemendagri nomor 050-5889 ini mengharuskan dilakukan penyesuaian indikator yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kepmendagri tersebut. Hal ini mempengaruhi terhadap bentuk dan strategi pelaksanaan sub kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, namun diupayakan semaksimal mungkin tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap pencapaian visi dan misi Daerah.

II.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan jumlah aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan baik di Kantor maupun dilapangan. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya penerimaan pegawai baru dengan jumlah ASN yang memasuki masa purna bakti maupun mutasi. Fasilitas sarana dan prasarana kantor juga perlu ditingkatkan, mengingat kita sudah



berada di era teknologi 4.0 yang sangat bergantung pada teknologi informasi dan jaringan, sementara kemampuan daerah menjadi pembatas dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana perkantoran.

Program Unggulan Daerah berupa Pengembangan Lahan jagung seluas 20.000 Ha merupakan tantangan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Saat ini tercatat sekitar 3000-an hektar lahan jagung dikabupaten Lima Puluh Kota, yang berarti ada tantangan untuk membuka lahan jagung 6 kali lipat dari lahan jagung yang sudah ada dalam 5 tahun ini.

Pengembangan Lahan Jagung 20.000 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu Penyiapan penyediaan lahan jagung 20.000 Ha, Peningkatan produksi jagung, dan Fasilitasi Kerja Sama antara Investor dan Pemilik Lahan. Karena kondisi keuangan daerah akhir akhir ini mengakibatkan tahap Penyiapan penyediaan lahan jagung belum terlaksana maksimal. Kedepannya, fasilitasi Kerja Sama antara Investor dan Pemilik Lahan menjadi tantangan dan peluang dalam mencapai Pengembangan Lahan Jagung 20.000 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota.

II.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dari gambaran permasalahan, kendala, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dapat diformulasikan bahwa dalam Pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan meletakkan peningkatan produksi bagi 6 komoditi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas, yaitu padi, jagung, cabe, jeruk, kopi dan gambir. Peningkatan produksi bagi 6 komoditi ini akan dicapai melalui rangkaian program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis dinas,



disamping itu melalui zonasi komoditi diharapkan dapat dikembangkan komoditi sesuai dengan kebutuhan/kecocokan lingkungan bagi tanaman untuk memproduksi secara maksimal.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Penyusunan Renja ini, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan terus dilakukan seiring dengan masukan, informasi dan rekomendasi dari hasil pembahasan TAPD, dewan dan Petunjuk dari Pusat mengenai pengelolaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, dan sebagainya.

Rancangan awal RKPD disusun dengan mepedomani analisis kebutuhan, namun tidak dapat dipungkiri harus dilakukan banyak penyesuaian terhadap realita dan tuntutan yang berkembang.

Catatan yang perlu disikapi terhadap rancangan awal RKPD yaitu:

- a. Program Unggulan daerah, berupa pengembangan 20.000 Ha lahan jagung. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam program pengembangan jagung 20.000 Ha ini. Pada tahun 2022 diperoleh fasiltasi pendanaan untuk penyusunan Masterplan pengembangan jagung dan pelaksanaan Sekolah Lapang Jagung di 13 Kecamatan dengan Total anggaran Rp. 1.300.000.000,-. namun pada tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk program unggulan daerah, demikian juga untuk tahun 2024.
- b. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian indikator, bentuk kegiatan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, dan rancangan awal RKPD.



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

**Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25.354.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.844.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14.609.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.777.500	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.281.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.647.700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.773.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.481.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	9.974.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.781.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	77.946.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	21.260.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	204.041.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	74.547.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang	16.015.903.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang	11.992.784.739	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.381.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.813.300	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.490.100	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1.760.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	19.999.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.340.400	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.967.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.114.400	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.498.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.641.400	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.998.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.980.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	4.493.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	730.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	18.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen	0.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15 dokumen	22.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	0.00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 dokumen	30.650.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 dokumen	21.595.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	5 Orang	950.000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	11.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	23.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	9.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	23.124.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.300.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.024.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.040.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.149.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.812.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	23.975.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	380.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	196.280.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	80.100.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	132.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	165.710.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	155.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantior	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	612.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantior	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	327.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	172 Unit	378.496.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	172 Unit	222.750.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	19.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	48.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	60.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	67.545.997	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	2.999.999.500	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	811.187.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	16.000.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	8.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	212.975.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	8.000.000	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	8.166.735.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0.00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Pengembangan Prasarana Pertanian					Pengembangan Prasarana Pertanian					
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Lima Puluh Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	187.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Lima Puluh Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	26.000.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	0.00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian										
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 Unit	5.367.600.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	830.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25 Unit	2.700.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	425.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	620.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	920.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	315.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	8.000.000	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13 Ha	128.084.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13 Ha	8.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	147.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	0 Laporan	0.00	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0.00	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	20.000.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0.00	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	26 Laporan	45.000.0000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	26 Laporan	8.000.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	1.522.530.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Unit	149.500.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	53 Unit	1.211.960.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0.00	



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	13 Unit	700.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	0.00	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	29 Unit	1.760.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	119 Unit	5.527.844.900	



II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Masyarakat mengajukan usulan melalui musrenbang yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Nagari, Kecamatan hingga kabupaten. Hasil musrenbang kabupaten selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan skala prioritas dan aturan yang berlaku melalui SIPD. Secara umum usulan dari Nagari banyak yang gugur karena usulan tidak jelas, baik bentuk bantuan yang diminta, jumlah bantuan maupun usulan pelaksana/ penerimaan bantuan.

TC-32

**Usulan Pokir dan Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Alfian (Pokir)
2		Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2 Unit	H. Yos Sariadi, S.Ag (Pokir)
3		Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Hj. Zuhatri (Pokir)
4		Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Gusti Randa (Pokir)
5		Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Arsi Medes (Pokir)
6		Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Drs. Epi Suardi (Pokir)
7		Nagari Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Eko Susmadi, A.Md (Murenbang)
8		Nagari Taeh Baruah, Kab.	Pelatihan Pengembangan	1 Unit	Indra Mulyadi, S.Pd



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
		Lima Puluh Kota	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		(Musrenbang)
9		Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Felliadi (Musrenbang)
10		Nagari Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo (Musrenbang)
11		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Andi Altoni (Musrenbang)
12		Nagari Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Penyul Hasni (Musrenbang)
13		Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Yon Hendri, S.S (Musrenbang)
14		Jorong Balai Gadang Ateh	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Muhammad Suhardi, S.Pi (Musrenbang)
15		Nagari Sungai Beringin, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Lukman Hakim, S.Sos (Musrenbang)
16		Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Nusda Anandes (Musrenbang)
17		Nagari Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan	1 Unit	Dasril Sofyadi (Musrenbang)



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
18			Palawija		
		Jorong Bawah, Nagari Sungai Balantiak, Kab. Lima Puluh Kota	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	200 meter	Drs. H. Dedi Henidal, MM (Musrenbang)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan Budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6. Penataan Ruang dan Lingkungan HidupInfrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
11. Pendidikan
12. Kesehatan
13. Ketahanan pangan
14. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
15. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian



c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-environtment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia, mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian diarahkan agar dapat memprioritaskan :

- 1. Peningkatan Produksi** pertanian, melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian.
- 2. Peningkatan Produktivitas**, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani yang dilakukannya.
- 3. Peningkatan Mutu**, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian.
- 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani**, adalah tingkatan kondisi di mana petani sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usaha taninya



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura , dan perkebunan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran disajikan dalam tabel berikut:



***Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota***

Tabel. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas

Visi	Misi	Tujuan	sasaran	Sasaran Dinas
MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH	Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	meningkatnya produksi dan produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Misi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

No	Tujuan/	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi dan Produktivitas Pertanian	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2,2%	2,2%	6,8%	5,7%	4,8%	4,3%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00



III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Usulan Program dan Kegiatan disusun berdasarkan target IKU yang ingin dicapai dengan berpedoman pada renstra yang telah ada. Berdasarkan IKU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi untuk Komoditi padi, jagung, jeruk, cabe, dan gambir.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai *“pendukung”* bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima puluh Kota.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, dan sumber daya genetik (benih).

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, jalan pertanian dan infrastruktur pertanian.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha bertani

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan kelas kelompok tani

Untuk mewujudkan pengembangan jagung 20.000 ha di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan program unggulan daerah, dimana pada tahun 2024 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan program diatas. pada tahun 2023 karena kondisi daerah, tidak ada pendanaan khusus untuk program unggulan daerah, namun pada tahun 2024 melalui Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/ Kota, dengan jumlah total 119 unit Sekolah Lapang dengan 50 unit Sekolah Lapang berupa SL GAP Jagung.

Melalui SL GAP Jagung diarahkan kelompok tani untuk membuka lahan jagung seluas 1 Ha untuk Labor Lapang, dan 2 Hektar bukaan baru sebagai tindak lanjut pelaksanaan SL GAP Jagung ini.



T-B.36

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
	Pertanian	2022		
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Belum Tercapai (<)	Target belum tercapai, dikarenakan penurunan produksi dan luas panen yang disebabkan karena masivnya penanaman jagung yang merupakan program unggulan daerah	Strategi pengembangan jagung diarahkan kelahan bukan sawah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TC-33 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31	30,14	

Tabel. Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket
			2023	2024	
1	Pertanian				
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	4,98	5,18	

Tabel.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2.2%	2.2%	6.8%	5.7%	-7.3	-21,96	7,96	6.8%	
	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,86	68,13	68,35	72,00	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN												68.824.038.489,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												68.824.038.489,00	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												68.824.038.489,00	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												22.984.068.796,00	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												374.829.028,00	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	85 %	12.844.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.622.225,00	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	8.777.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.339.890,00	
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	9.647.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.045.399,00	
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	3.481.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.262.464,00	
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	3.781.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.472.700,00	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	85 %	21.260.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	81.843.300,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	85 %	74.547.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	214.243.050,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.009.813.239,00					20.201.836.818,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	170 Orang/bulan	100 %	11.992.784.739,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	20.154.691.818,00
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	11.813.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.170.000,00
3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.760.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.775.000,00
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	2.340.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.000.000,00
3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	1.114.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.200.000,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.621.400,00					21.525.000,00
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	1.641.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.725.000,00
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.800.000,00
3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								730.000,00					4.500.000,00
3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	730.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	4.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
					Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											87.990.000,00	
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	18.900.000,00
3	27	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	23.940.000,00
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	165 Dokumen	100 %	21.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 Dokumen	32.182.500,00
3	27	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	997.500,00
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	11.970.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								319.432.400,00				683.412.450,00
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.748.500,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	10.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.280.200,00
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	72.040.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.226.250,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	24.812.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.957.500,00
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	230 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	25.200.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	196.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	399.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00				296.100.000,00
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	84.000.000,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	73.500.000,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	138.600.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								487.700.000,00				832.345.500,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.750.000,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Laporan	100 %	155.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	173.995.500,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	39 Laporan	100 %	327.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	642.600.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								338.395.997,00				481.530.000,00
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	172 Unit	100 %	222.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	397.425.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	39 Unit	100 %	48.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20.580.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Unit	100 %	67.545.997,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63.525.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								827.187.000,00			27.708.695.983,00		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								819.187.000,00			19.300.000.000,00		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
						Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Laporan	13 Kecamatan	811.187.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.150.000.000,00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Laporan	13 Kecamatan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	16.150.000.000,00	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								8.000.000,00			8.408.695.983,00		
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
						Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengelolaan SDG	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	3 Dokumen	7 Komoditi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	8.185.072.233,00	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
						Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Pengelolaan SDG	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	7 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	223.623.750,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								26.000.000,00			11.950.600.000,00		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								26.000.000,00			605.700.000,00		
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota													
						Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	1 dokumen	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola	1 Dokumen	205.700.000,00	
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian													
						Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Dokumen	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	400.000.000,00	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								0,00			11.344.900.000,00		
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
						Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	830.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pertanian -Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	2.800.000.000,00	
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	425.000.000,00	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	630.000.000,00	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1.170.000.000,00	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	5.489.900.000,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							16.000.000,00				551.500.000,00		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							16.000.000,00				551.500.000,00		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
					Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Fasilitasi Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	14 Ha	6 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	315.000.000,00	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
					Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Fasilitasi Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	13 Ha	6 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	13 Ha	84.500.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
					Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Fasilitasi Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	0 Laporan	6 Komoditi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0 Laporan	152.000.000,00		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							8.000.000,00			174.959.210,00			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							8.000.000,00			174.959.210,00			
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian													
					Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	56 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	100.000.000,00		
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian													
					Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	56 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	25.169.210,00		
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian													
					Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Laporan	56 dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	26 Laporan	49.790.000,00		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							5.677.344.900,00			5.454.214.500,00			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							5.677.344.900,00			5.454.214.500,00			
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
					Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	13 Unit	26 Kelompok Tani	149.500.000,00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Unit	1.598.656.500,00		
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
					Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	0 Unit	26 Kelompok Tani	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	1.272.558.000,00		
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
					Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	0 Unit	26 Kelompok Tani	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	735.000.000,00		
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
					Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	119 Unit	26 Kelompok Tani	5.527.844.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	119 Unit	1.848.000.000,00		
TOTAL												19.872.159.236,00				68.824.038.489,00		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

21. RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	5
		1.3 Maksud dan Tujuan	6
		1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	40
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	44
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	63
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	78
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISNAK KESWAN	99
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	99
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	101
		3.3 Program, Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	101
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	108

DAFTAR TABEL

1.	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	15
2.	Tabel T-C.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42
3.	Tabel T-C.30 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas	43
4.	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
5.	Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Disnakkeswan Berdasarkan Sasaran RPJMD	51
6.	Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	65
7.	Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	81
8.	T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	107
9.	Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	109
10.	Rencana Kinerja IKU Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	122
11.	Rencana Kinerja IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	122

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Perbup sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Rancangan awal Renja PD dibahas dalam forum dan lintas OPD yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja PD yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja PD dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala OPD untuk memastikan program dan kegiatan OPD terakomodir didalam rancangan akhir RKPD yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja PD selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja PD sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dan Renja PD dalam rangka penyusunan Renstra PD dan Renja PD, PD melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman kepada Renstra PD, hasil evaluasi renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan berpedoman pada Renstra PD bertujuan untuk menjami kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan Renstra PD yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 67)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menjabarkan visi, misi OPD serta tujuan, sasaran, target kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasan dan evaluasi.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memperhatikan tabel T-C.29 yakni tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2022, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan target renja tahun 2022 dan hasil/keluarannya dapat terlaksana secara keseluruhan. Pada tahun 2022 realisasi keuangan sebesar 95,10% dan realisasi fisik 100%, dengan uraian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 98,25% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 89,17% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 88,38% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi keuangan sebesar 96,60% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Program Perizinan Usaha Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Program Penyuluhan Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%

Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Adapun realisasi keuangan hanya dapat sebesar 95,10% disebabkan karena :

- Adanya sisa kontrak yang tidak dapat dialihkan ke rekening belanja lain
- Adanya beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan di Tahun 2022.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.

Untuk realisasi fisik semua kegiatan dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan dengan persentase capaian 100%. Program yang telah memenuhi target sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Hasil/keluaran yang direncanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target yang ditetapkan.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti, hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
 - Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
 - Adanya sumber daya aparatur, saran dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat apabila target telah tercapai dan terganggunya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang tercapai secara langsung berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :
- Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sub Koordinator, Pemegang program sampai dengan staf.
 - Terjalinnnya kerja sama yang baik antara lintas program dan lintas sektor

- Perlunya pembinaan secara kontiniu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten sampai ke tingkat unit.
- Pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan secara rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan di lapangan.
- Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan capaian kinerja s.d tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s.d tahun 2022 (n-2).

Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	2 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2 7	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2 7	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
3	2 7	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD								
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan SPA-SKP	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	24 Laporan	24 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Realisasi Kinerja SKPD								
3	2	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	74 orang	74 orang	100%	100 Orang/Bulan	100 Orang/Bulan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	56 Dokumen	56 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Laporan	2 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
3	2	0	2.0	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
3	2	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%				100%	100%	100%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3 orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
3	2	0	2.0		Administrasi	Tersedianya	100%	100%				100%	100%	100%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	1	5		Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Stel	N/A	-	-	100%	100 Paket	100 Paket	60%
3	2	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Kegiatan	N/A	-	-	100%	4 Orang	4 Orang	60%
3	2	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	3 orang	-	-	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60%
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	10 Paket	10 Paket	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Paket	2 Paket	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan Yang disediakan	12 Bulan	365 Eksemplar	12 Bulan	12 Bulan	100%	240 Dokumen	240 Dokumen	60%
3	2	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1890 Porsi	124 Porsi	1890 Porsi	1890 Porsi	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	120 OH dan 2461 Porsi	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	1 Unit	-	-	100%	1 Unit	1 Unit	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						disediakan								
3	2	1	2,0	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	10 Unit	N/A	-	-		1 Unit	1 Unit	60%
3	2	1	2,0	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	N/A	-	-		1 Unit	1 Unit	60%
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	250 Lembar	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	13 Laporan	13 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%				100%	100%	100%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah								
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	12 Bulan	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	100%	78 Unit	78 Unit	60%
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap Barang Milik Daerah	12 Bulan	N/A	-	-		1 Unit	1 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1612 M2	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	60%
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	6%	2%				4%	4%	4%
3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6%	2%				20%	20%	20%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	12 Kelompok	1 Laporan	1 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kali, 2 unit	3 Unit	1 Kali 2 unit 1 Unit	1 Kali 2 unit 1 Unit	100%	25 Laporan	25 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dalam Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	6%	2%				8%	8%	8%
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5.000 Dosis	- Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan IB seperti : Frozen Semen (6.317), N2 Cair (5.000 ltr), Plastik Sheet (35 pak), Plastik Glove	5000 Dosis	5000 Dosis	100%	36.050 Laporan	36.050 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(20 pak), tissue gulung (123 gulung), termos lapangan (4 buah), tutup container (2 bh), alkohol 70% (25 ltr) - Tersedianya Kontainer Bibit (2bh) dan Container Depo (1 bh) untuk Penyimpanan Bibit dan N2 Cair						
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	28 sampel	28 sampel 3 kelompok (60 orang)	14 Kelompok 30 sampel	14 Kelompok 30 sampel	100%	50 Laporan	50 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer	Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0	0	Pemeriksaan Mutu,	Jumlah Pemeriksaan	1 kegiatan	N/A	34 toko	-		12 Laporan	12 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	2	4	1	Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			2 kali					
3	2 7	0 2	2.0 4	0 2	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat yang ditindak	1 kegiatan	N/A	30 toko	-		2 Kasus	2 Kasus	60%
3	2 7	0 2	2.0 5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya penggunaan saranapeternakan	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2 7	0 2	2.0 5	0 2	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya pengujian sample frozen semen dan sample Ph semen	2 kegiatan	- Terlaksananya pemeriksaan sampel Frozen Semen (38 dosis) - Tersedianya perlengkapan untuk petugas IB antara lain : Wearpack (43 stel) dan sepatu bot (43	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								pasang) - Tersedianya perlengkapan untuk petugas IB antara lain : tas (43 buah) - Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka analisa performance (33 OH)						
3	2	0	2.0	0	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang teersedia	1 Kali, 50000 Stek	N/A	1 Kali 50.000 Stek	1 Kali 50.000 Stek	100%	22.650 Kg	22.650 Kg	60%
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 orang	- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka Pengendalian peredaran bibit ternak, Pengawasan penyediaan bibit ternak,	20 Orang	20 Orang	100%	151 Laporan	151 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengawasan dan pembinaan ke kelompok penerima bantuan : 172 OH - Tersedianya jasa tenaga PHL petugas IB (120 OB) - Tersedianya jasa PHL tenaga administarsi (12 OB)						
3	2	0	2.0		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Adanya hibah Kelompok	6%	N/A				8%	8%	8%
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5 kelompok	- Terlaksananya pembelian ternak sapi untuk UPT	5 Kelompok	5 Kelompok	100%	155 Ekor	155 Ekor	60%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembibitan dan Pakan Ternak (5 ekor) - Tersedianya pakan hijauan (50.400 kg) dan konsentrat (9.080 kg) untuk ternak sapi percontohan di UPT Pembibitan dan Pakan Ternak - Terlaksananya sosialisasi Good Farming Practice (GFP) ternak ruminansia (1 kali) - Tersedianya belanja jasa petugas kebersihan						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								untuk UPT Pembibitan dan Pakan Ternak (1 orang) - - Tersedianya bahan-bahan bangunan dan konstruksi untuk perbaikan kandang sapi seperti : kayu (60 batang), semen (4 sak), pasir/kerikil (2 truk), batu bata (100 buah) dan paku (5 kg)						
3	2	2	2,0	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	5 kelompok	N/A	15000 Stek	15000 Stek		100 Ton	100 Ton	60%
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan	6%	N/A				4%	4%	4%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan Prasarana dan Pengawasan Perizinan								
3	2	0	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	6%	N/A				4%	4%	4%
3	2	0	2.0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	4 Kelompok	N/A				3 Unit	3 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya jalan usaha tani	2 Kelompok	N/A				2 Unit	2 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya	1 Unit	2 unit	1 Unit	1 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	60%
3	2	0	2.0		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Penetapan Lahan Pengembalaan Umum yang bisa dikembangkan	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0	0	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan	Luas Lahan Pengembalaan Umum	1 Kali	N/A	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Umum	ynag Diidentifikasi dan ditetapkan								
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0	0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20 sampel	30 orang 13 Kecamatan 12 sampel 25 sampel 20 ekor 100 sampel 2200 dosis	24000 Ekor 20 Sampel 500 orang 1 tahun 5 PHM 1 Tahun	24000 Ekor 20 Sampel 500 orang 1 tahun 5 PHM 1 Tahun	100%	2 Laporan	2 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah	12 bulan	34 kali 5 Farm 13 Kecamatan 115 ekor	35 Kali 13 Kecamatan 600 ternak	35 Kali 13 Kecamatan 600 ternak	100%	2 Laporan	2 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kabupaten dalam satu daerah kabupaten		ternak 20 kali 5 Farm 150 ekor 115 ekor ternak 1 orang 1 tahun	12 Bulan 1000 ekor 1000 ekor ternak 300 ternak 1 orang	12 Bulan 1000 ekor 1000 ekor ternak 300 ternak 1 orang				
3	2	0	2.0	0	Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	15 ekor	130 ekor 2 kali 15 ekor 13 Kecamatan	15 Ekor 300 Ekor	15 Ekor 300 Ekor	100%	5 Laporan	5 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di	6%	2%				2%	2%	2%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
3	2	0	2.0	0	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	6 TPH	3 Komoditi 5 Penyakit	6 TPH 1 orang	6 TPH 1 orang	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	3 komoditi	2 hari Raya 1 kali 5 Farm	5 Farm 3 Komoditi 13 kali	5 Farm 3 Komoditi 13 kali	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 komoditi	6 TPH	3 Komoditi	3 Komoditi	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	6%	N/A				2%	2%	2%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	750 ternak	N/A	750 Ekor 13 Kecamatan	750 Ekor 13 Kecamatan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1500 pelayanan	N/A	1500 Pelayanan 1 tahun	1500 Pelayanan 1 tahun	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0	2.0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0	0	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 kali	13 kecamatan 4 pelaku usaha 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kecamatan 1 unit	1 kali 1 kali 13 Kecamatan 4 Pelaku Usaha 2 Kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 13 Kecamatan 4 Pelaku Usaha 2 Kali 1 kali 1 kali	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan	6%	N/A				4%	4%	4%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Perizinan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumahy Potong Hewan Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	6%	N/A				4%	4%	4%
3	2	0	2.0	0	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumahy Potong Hewan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	50 Rekomendasi	50 rekomendasi 2 sosalisasi/bimt ek (80 orang) 8 Buah	50 Pelaku Usaha 1388 Ekor 100 Orang 50 Rekomend asi 600 Kandang 50 Pelaku Usaha 1001 Lembar	50 Pelaku Usaha 1388 Ekor 100 Orang 50 Rekomend asi 600 Kandang 50 Pelaku Usaha 1001 Lembar	100%	600 Dokumen	600 Dokumen	60%
3	2	6	2,0	0	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Jumlah izin usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan yang	-	N/A	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100%	100 Laporan	100 Laporan	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pakan	diawasi								
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitasi Pemeliharaan Hewan	Jumlah izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi	-	N/A	100 Pelaku Usaha 250 Lembar	100 Pelaku Usaha 250 Lembar	100%	100 Laporan	100 Laporan	60%
3	2	6	2,0	3	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengembangan Usaha Pola Kemitraan/Kerjasama Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	N/A				4%	4%	4%
3	2	6	2,0	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengembangan Usaha Pola Kemitraan/kerjasama Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan komitmen Penerbitan Izin Usaha pengecer obat hewan	-	N/A	50 Orang 20 Pelaku Usaha	50 Orang 20 Pelaku Usaha	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN	Persentase	6%	N/A				2%	2%	2%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	7			PERTANIAN	peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian								
3	2	0	2.0		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	6%	N/A				2%	2%	2%
3	2	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	13 Kecamatan	N/A	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	46 Unit	46 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	16 orang	19 Orang 19 Orang 19 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	253 Unit	253 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	50 kelompok	50 Kelompok 13 Kelompok 20 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	100%	34 Unit	34 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	1 buku	4 Komoditi ternak 1 Buku 1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	39 Unit	39 Unit	60%
3	2	0	2.0	0	Pembentukan dan	Jumlah Sekolah Lapang	13	N/A	13	-		13 Unit	13 Unit	60%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	7	1	5	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Tani yang terbentuk dan Beroperasi	kecamatan		Kecamatan					



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkududukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Penetapan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel T-C.30 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 terus meningkat setiap

tahunnya dapat dilihat pada table T-C.2 dan tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibawah ini. Hal ini disebabkan karena target populasi dan produksi ternak pada akhir periode renstra 2021-2026 juga meningkat.



**TABEL T-C.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n +1) 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			28,47	29,31	30,14	30,97	25,43	-	30,14	30,97	

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATT ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan sarana peternakan	4%	6%	8%	10%	2%	-	8%	10%	
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	4%	6%	8%	10%	2%	-	8%	10%	
3	Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	4%	6%	8%	10%	2%	-	8%	10%	
4	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Persentase Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	4%	6%	8%	10%	2%	-	8%	10%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	-	B	B	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada tahun 2022 Indonesia mengalami suatu pandemi yang menyerang dunia peternakan yang disebut dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dimana penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan kerbau.

Selain PMK ada beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan, yaitu ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat.

Koordinasi dan sinergitas dengan kementerian dan dinas pemerintah provinsi yang menangani peternakan tercermin dalam dukungan peningkatan pertumbuhan komoditas peternakan sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah Program SIKOMANDAN yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Tahun 2020. Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat sendiri, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah dengan capaian realisasi pelaksanaan program tersebut melebihi target yang diberikan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik dengan 1 urusan, yakni urusan pilihan pertanian dengan 4 bidang yakni Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengolah hasil, Bidang Prasarana dan sarana serta Bidang Penyuluhan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel **T-B.35** diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan dan peningkatan daya saing produk peternakan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel T-B 35**.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya potensi daerah di bidang peternakan	Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan penggunaan lahan di bidang peternakan
3.		Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan
4.		Cuaca dan musim yang ekstrim mengakibatkan fluktuasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular	Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan
5.		Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewan yang ASUH	Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak

6.		Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas
7.		Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan Rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah	Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
8.		Ketersediaan potensi SDA, SDM dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak	Melaksanakan Bimtek
9.		Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu lintas ternak	Rendahnya pelayanan kesehatan ternak
10.		Mutu bibit yang masih rendah karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan	Regulasi
11.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan lahan peternakan dan alih fungsi lahan
12.		Tingginya alih fungsi lahan	
13.	Meningkatnya daya saing produk	Keterbatasan bahan baku yang berkualitas	Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku

			Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDM maupun administrasi kelompok
14	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	Pendistribusian ternak ke peternak / kelompok ternak	Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan Hibah tersebut sebagai bantuan lepas

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :
 - a. Masih tingginya pemotongan sapi /kerbau betina produktif
 - b. Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh kelompok/swasta maupun aparatur dinas
 - c. Belum optimalnya penyebaran sapi pada masyarakat
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan IB(Inseminasi buatan)
 - e. Belum optimalnya pengawasan mutu bibit dan pakan yang beredar.
2. Permasalahan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Belum tersedianya pos lalu lintas ternak di daerah perbatasan dengan provinsi tetangga.
 - b. Belum tersedianya rumah potong hewan yang representatif
 - c. Masih tingginya kasus rabies dan penyakit menular
 - d. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak sapi.
 - e. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan ke

masyarakat.

- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam mendukung pemberantasan rabies dan penyakit menular ternak.
 - g. Belum optimalnya pengelolaan produk olahan hasil peternakan
 - h. Belum tersedianya los daging higienis
3. Permasalahan bidang Prasaranan dan sarana
- a. Masih rendahnya pengetahuan peternak dalam pengolahan pakan alternatif dengan sumber limbah pertanian.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan modal bantuan sosial oleh kelompok penerima.
 - c. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kasi lahan dan irigasi dalam pemetaan lahan karena belum tersedianya rekening anggaran pendukung.
 - d. Belum tersedianya los daging higienis
4. Permasalahan pada urusan Penyuluhan
- a. Belum tersedianya buku pintar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga peneliti untuk penerapan temuan teknologi
 - c. Belum optimalnya sinergitas kelembagaan dalam pemberdayaan peternak.

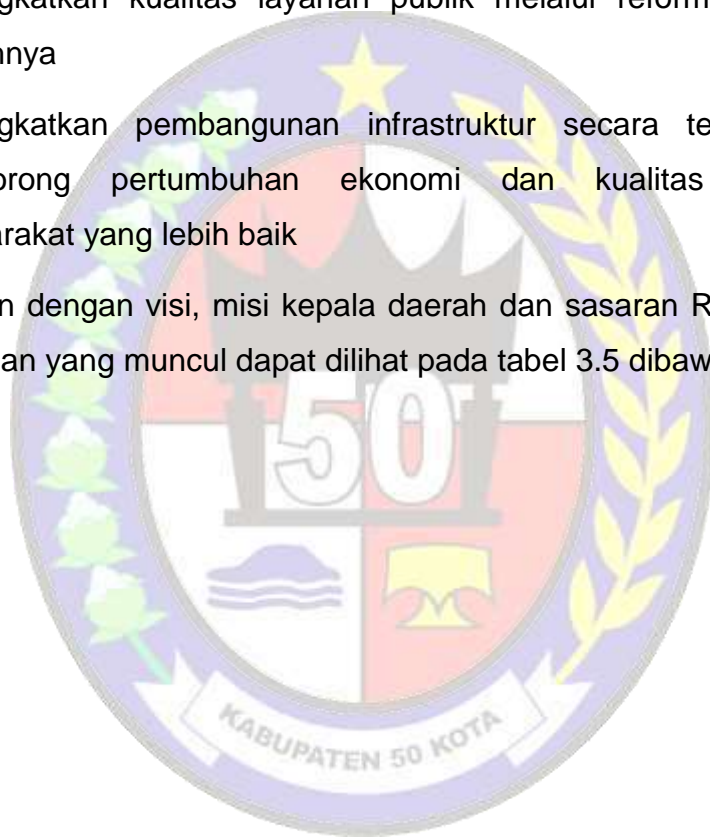
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah *“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”*

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :



Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak

		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk peternakan	Rendahnya SDM peternak	SDM Peternak untuk memanfaatkan teknologi yang ada
		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelompok ternak	Peningkatan kapasitas penyuluh, peternak dan kelembagaan

Selain adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota juga ada beberapa faktor penghambat sesuai dengan table 3.5 diatas.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap Capaian Nasional

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, dapat berdampak pada tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021 – 2026 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan baik itu

sementara daya aparatur, sarana maupun prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama integritas dengan Kementrian Pertanian melalui Program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian angka populasi dan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Inseminasi Buatan dan pelayanan kesehatan hewan kepada Masyarakat .
3. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, kelompok tani ternak serta peternak dalam lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menjalankan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan ternak sebagai batu loncatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal meningkatkan populasi dan produksi ternak.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tantangan dan hambatan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Penanganan dampak pandemi PMK
 - b. Persaingan dan liberalisasi pasar
 - c. Ketergantungan pakan impor
 - d. Pengaruh iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan dan kesehatan hewan
 - e. Adanya ancaman penyakit hewan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali
 - f. Penurunan angkatan kerja sektor peternakan
 - g. Alih fungsi lahan peternakan

2. Peluang

- a. Pasar Produk Peternakan
- b. Adanya kesadaran global (food safety, biosecurity, kesejahteraan hewan dan kualitas lingkungan)
- c. Perkembangan teknologi yang canggih
- d. Meningkatkan jumlah investor bidang peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Dari berbagai permasalahan yang timbul, beberapa isu-isu strategis sebagai catatan penting yang direkomendasikan untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.
4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.

5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.
7. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
8. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
9. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan.
10. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
11. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

Sehubungan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas dan fungsi (sesuai dengan program dan kegiatan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengannya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Program/Kegiatan	Misi pada RPJM	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	

<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD <p>C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD c. Pembinaan, Pengawasan, dan 	<p>lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional</p>	
--	--	--

<p>Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya</p> <p>d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>e. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pengadaan Mebel</p> <p>c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 		
<p>II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian <p>B. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak <p>C. Kegiatan Pengawasan Obat di Tingkat Pengencer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan 	Sda	

<p>Keamanan Peredaran Obat Hewan</p> <p>b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan</p> <p>D. Kegiatan Pengedaran dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak</p> <p>b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak</p> <p>c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</p> <p>E. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> <p>b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> <p>c. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p>		
<p>III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>A. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <p>a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p> <p>b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p> <p>c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</p>	Sda	

<p>B. Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 		
<p>IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <p>B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM 	<p>Sda</p>	

<ul style="list-style-type: none"> c. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya C. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner D. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 		
<p>V. Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan B. Kegiatan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 	Sda	

Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan		
VI. Program Penyuluhan Pertanian A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota e. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 	<p>Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis</p> <p>pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan</p> <p>serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi</p> <p>Kerakyatan,Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri,</p> <p>serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumbo.Bank Tanah Nagari,Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.</p>	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Sesuai Analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini, dimana Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD sama dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil analisis kebutuhan.

Jumlah program pada Rancangan Awal RKPD sama dengan jumlah program setelah dilakukan analisis kebutuhan yaitu 6 (enam) program, namun besaran anggaran hasil analisis kebutuhan kurang dari anggaran pada Rancangan Awal RKPD. Perbedaan anggaran yang dimaksud disebabkan oleh adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator tingkat kinerja Daerah dan

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :



TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
I	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kab. Lima Puluh Kota		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.495.014.910	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lima Puluh Kota		100%	8.251.822.142	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.087.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			13.515.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.280.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.982.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4.065.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan SPA-SKP	1 Dokumen	4.049.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.305.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.735.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.515.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.670.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.466.223.210	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.505.531.292	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/bulan	11.450.309.010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	7.505.531.292	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	2.485.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	1.449.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	3.850.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.190.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	2.190.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.210.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.835.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	1 Laporan	1.980.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	0 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Puluh Kota	Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD				Puluh Kota	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.210.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.680.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.505.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Paket	96.949.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	55.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	8.935.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	26.414.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 Orang	6.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				702.177.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah				274.922.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	209.151.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	128.090.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	61.556.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.803.700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	30.657.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.171.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan Yang disediakan	12 Dokumen	2.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	275 Laporan	8.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.505.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	389.923.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.352.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.015.959.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Kendaraan Dinas atau lapangan yang disediakan	1 Unit	433.009.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	142.950.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab.	Jumlah Aset Tetap	11 Paket	440.000.000	Pengadaan Aset Tetap	Kab.	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	0 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lima Puluh Kota	Lainnya yang disediakan			Lainnya	Lima Puluh Kota	yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				196.686.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.192.750	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.850.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	80.756.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.692.750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	112.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				963.722.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				366.661.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	89 Unit	554.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	303.561.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	11 Unit	22.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	387.322.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.000.000	
				4%							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.939.423.900	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				158.627.300	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				420.751.100	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				0	
	Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	16.452.700	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	404.298.400	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	0	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				953.716.200	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				36.190.000	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	408 Laporan	910.473.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	36 Laporan	15.680.000	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	43.243.200	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	15 Laporan	20.510.000	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer				35.112.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer				0	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang beredar	12 Laporan	26.334.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 Laporan	0	
	Penindakan atas	Kab.	Jumlah Penyimpangan	12 Laporan	8.778.000	Penindakan atas	Kab.	Jumlah Penyimpangan	0 Kasus	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Lima Puluh Kota	Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan			Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Lima Puluh Kota	Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak			
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota				158.156.600	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota				122.437.300	
	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1 Dokumen	16.357.000	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	15 Ton	141.799.600	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	36 Laporan	14.320.000	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	0	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20 Laporan	108.117.300	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				1.371.688.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3146 Ekor	1.362.910.000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton	0	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,25 Ton	8.778.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor	0	
						Pengadaan Benih Ternak	Kab.	Jumlah benih ternak yang	0 Dosis	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Lima Puluh Kota	sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				7.593.649.250	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				42.880.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				7.174.850.650	Pembangunan Prasarana Pertanian				12.880.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani	3 Unit	660.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah jalan usaha tani yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	330.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	12.880.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara	6 Unit	6.184.850.650	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0	
									8%		
	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum				418.798.600	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum				30.000.000	
	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang di identifikasi dan ditetapkan	20 Ha	220.000.000	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	1 Ha	30.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lahan Pengembalaan Umum	20 Ha	198.798.600	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	0 Ha	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.070.705.400	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.110.458.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.340.447.400	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				141.790.300	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	917.825.500	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0 Laporan	-	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/ Kota dan 1 Daerah Kabupaten/ Kota	13 Laporan	211.310.900	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis		Jumlah kader zoonosis	79 Orang	16.254.800	
	Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	13 Laporan	211.311.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	13 Wilayah	13.386.500	
						Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	30 Kasus	32.030.000	
						Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	0 Dokumen	-	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	80.119.000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				606.272.300	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				25.239.000	
	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk	1 Laporan	267.765.100	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	Kab. Lima Puluh	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	12 laporan	10.239.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota	Hewan			dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kota	pengeluaran HPM			
	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	185.810.300	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	0 Laporan	0	
	Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	152.696.900	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	10 Laporan	15.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.591.307.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				903.450.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 laporan	45.390.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	1.545.917.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	903.450.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				532.678.700	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				39.978.700	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	520.996.700	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota					Kota				
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	11.682.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12 Unit Usaha	39.978.700	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				241.395.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				43.950.000	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lima Puluh Kota			215.646.200	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				43.950.000	
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 laporan	105.721.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0 Dokumen	0	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang di awasi	1 laporan	99.391.600	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	0 Laporan	0	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	1 Laporan	10.533.600	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	20 Laporan	43.950.000	
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor)				25.748.800	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor)				0	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	12 Laporan	25.748.800	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	0 Laporan	0	
	PROGRAM PENYULUHAN					PROGRAM PENYULUHAN	Kab.	Jumlah Izin Usaha Pengecer	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERTANIAN				937.335.600	PERTANIAN	Lima Puluh Kota	Obat Hewan yang memenuhi komitmen		2.218.864.700	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				937.335.600	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			unit	2.218.864.700	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	13 Unit	226.448.100	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	250 unit	306.710.500	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 unit	164.939.500	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	0	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	3 unit	71.160.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	60 Unit	2.218.864.700	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang terbentuk dan beroperasi	13 unit	168.077.500	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	0	
					30.277.524.060					11.826.602.142	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terdiri dari Usulan Musrenbang dan Reses Dewan yang di sesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kamus usulan Tahun 2023.

Program yang mendukung isu-isu strategis pada tahun 2023 dapat diurai sebagai berikut :

Program	Isu-Isu Strategis	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.3. Dalam rangka meningkatkan kinerja,	

	<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan Stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya. 5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan. 6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. 	
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. 	
III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana 	

	teknologi peternakan tepat guna.	
IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah. 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
V. Program Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.	

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki program dan kegiatan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengajukan usulan sesuai dengan Kebutuhan dan prioritas Kecamatan dan DPRD. Hasil Musrenbang dapat diinput melalui SIPD yang telah tersedia untuk selanjutnya dapat di verifikasi oleh Dinas terkait. Setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan musrenbang sebanyak 71 usulan yang tersebar di seluruh kecamatan maka yang dapat disetujui seluruhnya. Sementara dari 50 usulan pokok-pokok pikiran DPRD Lima Puluh Kota yang dapat disetujui hanya 39 usulan. Usulan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Seluruh usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disetujui akan di akomodir dalam Anggaran Tahun 2024 dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Usulan Aspirasi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Eko Susmadi, A.Md	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau) 2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian Nagari Durian Tinggi dikarenakan belum memiliki Pos Penyuluhan Pertanian	Bintungan Sakti, Kab. Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	Usulan disetujui	Layak, diteruskan ke tahapan selanjutnya	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
2	ENDI REFLI, S.S	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Bantuan Mesin Penghancur Kompos untuk Posyantek Satu Harapan Nagari Pilubang. Ini sangat diperlukan mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Nagari Pilubang adalah petani dan bergerak di bidang pertanian yang selalu membutuhkan pupuk untuk lahan pertanian. Dengan adanya pupuk kompos bisa membantu masyarakat mendapatkan pupuk dengan harga yang relatif murah. Perkiraan biaya 35.000.000,-	Nagari Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Pilubang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3	INDRA MULYADI, S.Pd	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Belum tersedianya mesin pengolahan pupuk kompos. Pengadaan mesin pengelola pupuk kompos/organik. Perkiraan volume 6 Unit. Perkiraan biaya 30.000.000	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Taeh Baruah	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
4	Felliadi	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	sulitnya mendapatkan benih/bibit sapi, sedangkan masyarakat sangat berminat untuk beternak sapi	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang,Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota	Mungka	Simpang Kapuak	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
5	Felliadi	Sosialisasi pengolahan/ pembuatan pakan untuk kelompok tani ternak (untuk 1 kali	pakan ternak yang harganya semakin mahal	Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai	Mungka	Simpang Kapuak	Usulan disetujui	-	Layak, usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kegiatan	-	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		kegiatan x 20 Orang)		Tampuk Pinang,Koto Tinggi dan Kubang Balambak, Kab. Lima Puluh Kota										
6	MALKISRAN	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan benih/bibit ternak sapi untuk 15 Kelompok Tani di Nagari Simpang Sugiran (KT Buah Naga Sejahtera, Talao Indah, Bundo Kreatif, Rawang Munggu, Bendang Saiyo, Usaha Bersama, Luak Polam Membangun, Padang Saiyo, Ngarai Subur, Supinang Membangun, Puncak Loweh, Cari Basamo, Karya Payobadar, Payuang Pusako, Berkah) dengan perkiraan dana Rp.255.000.000,- sebanyak 15 ekor sapi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengembangkan usaha kelompok tani di Nagari Simpang Sugiran	Nagari Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	Simpang Sugiran	Usulan disetujui	LAYAK. Agar kelompok tani/peternak penerima pekerjaan mengajukan proposal ke Disnakeswan.	Layak, usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	-	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
7	INDRA MULYADI, S.Pd	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau) 2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Pasifnya kepengurusan petani. Pemberdayaan petani. Perkiraan volume 1 Kegiatan. Perkiraan biaya 15.000.000	Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Taeh Baruah	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
8	ENDI REFLI, S.S	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk masyarakat kurang mampu, tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Perkiraan biaya 170.000.000,-/ 10 ekor.	Nagari Pilubang, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Pilubang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
9	APRIONAL,S.Pd.I	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Masih bnyaknya Kelompok Tani yang belum mendapatkan bantuan ternak sapi dan juga untuk mensejahterakan anggota kelompok tani	baruah gunuang(5 kelompok tani), Kab. Lima Puluh Kota	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
10	APRIONAL,S.Pd.I	Sosialisasi pengolahan/ pembuatan pakan untuk kelompok tani ternak (untuk 1 kali kegiatan x 20 Orang)	masih banyaknya kelompok tani yang belum mengetahui cara pembuatan/pengolahan pakan	baruah gunuang (kelompok peternak, 50 orang), Kab. Lima Puluh Kota	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kegiatan	-	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
11	H.YULIZAR, S.Pd	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	bantuan Bibit Ternak sapi di Nagari koto Tangah sebanyak 1 Paket dengan anggaran Rp. 100.000.000	Nagari Koto Tangah, Kab. Lima Puluh Kota	Bukik Barisan	Koto Tangah	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat kelompok perikanan penerima pekerjaan dituliskan. Kelompok perikanan penerima mengajukan proposal ke Dinas Perikanan. Seluruh	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
								kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan						
12	Yefriandi	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /Induk Kelompok	Pengadaan bibit/benih kambing betina untuk kelompok tani sebanyak 20 ekor	Tanjung Bungo, Kab. Lima Puluh Kota	Suliki	Tanjung Bungo	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat kelompok tani/peternak penerima dituliskan. Kelompok tani/peternak mengajukan proposal ke Disnakkewan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang.	layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	-	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
13	NANANG ANWAR	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan Hibah Ternak Sapi (7 Paket)	Nagari Taram, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Taram	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkewan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
14	NANANG ANWAR	Bantuan Motor Roda Tiga (Beton)	Pengadaan Motor Roda Tiga untuk Kelompok Tani (3 Unit)	Nagari Taram, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Taram	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkewan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
15	ANDI ALTONI	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Jawarandu) /Induk Kelompok	Belum pernah ada pengadaan Pengadaan bibit/benih Kambing untuk Kelompok	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan serta volume pekerjaan dituliskan. Kelompok mengajukan proposal ke Disnakkewan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan.	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
16	ANDI ALTONI	Pengadaan benih/bibit ternak Kerbau Jantan ke kelompok	Belum ada Pengadaan benih/bibit ternak Kerbau Jantan ke kelompok	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkewan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	120.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
17	ANDI ALTONI	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/kerbau) 2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Masih minimnya pengetahuan kelompok tani sehingga membutuhkan sekolah lapang kelompok tani	Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
18	Yon Elvi, S.Ag	Pengadaan	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB)	Kelompok	Harau	Lubuk	Usulan	LAYAK. Agar nama dan	Layak, usulkan	Dilanjutkan ke	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	ke 15 kelompok sebanyak 100 ekor masing-masing kelompok	Peternak Masing-Masing Jorong, Kab. Lima Puluh Kota		Batingkok	disetujui	alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	kelompok	tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah				Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
19	Penyul Hasni	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi :1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau)2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Sehubungan mayoritas masyarakat Nagari Sungai Naniang berprofesi sebagai Petani dan Peternak maka dibutuhkan pelaksanaan sekolah lapangan untuk kelompok Tani ternak guna menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat dalam tata cara beternak yang baik	Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	Bukik Barisan	Sungai Naniang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
20	H. ZAMHAR	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	masih kurangnya kesadaran warga akan keuntungan memiliki ternak.	Kenagarian Tanjung Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
21	H. ZAMHAR	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau) 2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	masih krangnya kesadaran dan pengetahuan warga tentang beternak	Kenagarian Tanjung Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
22	Yon Hendri, S.S	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /induk Kelompok	Pengadaan Ternak Kambing	Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	VII Koto Talago	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
23	Yon Hendri, S.S	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (PE Grade A) ke Kelompok	Pengadaan Ternak Kambing	Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	VII Koto Talago	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
24	Yon Hendri, S.S	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan Ternak Sapi	Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	VII Koto Talago	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakkeswan.	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
								Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan						
25	Yon Hendri, S.S	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam	Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	VII Koto Talago	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
26	DEVI SURYA	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Belum adanya bibit unggul untuk ternak sapi di nagari Pandam Gadang Volume : 6 paketPembayaan : Rp 50.000.000	Pandam Gadang , Kab. Lima Puluh Kota	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat kelompok peternak penerima pekerjaan dituliskan beserta volume pekerjaan. Kelompok peternak penerima mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
27	Yon Hendri, S.S	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok	Pengadaan benih/bibit Ternak Itik Petelur	Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	VII Koto Talago	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
28	HERI NELSON	Bantuan Mesin Chopper Pengolah pakan	Dibutuhkan Mesin Chopper Pengolah Pakan untuk 1 Kelompok Tani	Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	Kubang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
29	HERI NELSON	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Dibutuhkan Motor Roda Tiga (Betor) Sarana Peternakan untuk 1 Kelompok Tani	Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Guguak	Kubang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Ekor	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
30	DALPEN APERTA	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan bantuan benih dan ternak sapi	Tanjung Pauh, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
31	ASRA ARAFAT, S.Si	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani	Sekolah Lapngan merupakan sarana pembelajaran bagi pelaku usaha tani baik tanaman maupun peternakan. Maka untuk	agari Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota	Akabiluru	Batuhampar	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau) 2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	itu sangat di butuhkan bagi masyarakat.					kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan		Renja Perangkat Daerah				Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
32	REZKI YUANDA PUTRA	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /induk Kelompok	Pengadaan bibit/benih kambing untuk Kelompok Tani, 3 kelompok, @Rp. 20.000.000,-	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar dituliskan volume pekerjaan. Kelompok mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
33	Darmisata	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi :1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau)2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Masyarakat,Masih Kurang ny Pemahaman Masyarakat dalam agribisnis, Volume 1 unit Anggaran Biaya Rp.150.000.000	Nagari Piobang, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Piobang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan dituliskan dan merupakan kelompok aktif serta terdaftar di Disnakeswan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
34	YONDRIVEL, SH	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Perlunya Bantuan Ternak Sapi untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Yang Kurang Mampu/ Mensejahterakan Anggota Kelompok	Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
35	Jasril	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok	masyarakat tidak memiliki usaha yang bisa menghasilkan diwaktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yang ada hanya usaha yang menunggu masa panen untuk bisa di uangkan, mereka banyak yang bertani sehingga cocok diberikan bantuan bibit ternak itik	nagari jopang manganti, Kab. Lima Puluh Kota	Mungka	Jopang Manganti	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
36	YONDRIVEL, SH	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Perlunya Mesin Chopper Penghancur Kompos dalam Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Simalanggang, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
37	ISRAL	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi : 1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau) 2. Agribisnis Ternak	Sekolah lapang Ternak Ayam dan Sapi	Jorong Subaladuang, Kab. Lima Puluh Kota	Luak	Sungai Kamuyang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)												
38	ISRAL	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	Pengadaan Bibit Ayam	Jorong XII Kampung, Kab. Lima Puluh Kota	Luak	Sungai Kamuyang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
39	ISRAL	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan Bibit Sapi	Jorong Madang Kadok, Kab. Lima Puluh Kota	Luak	Sungai Kamuyang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
40	Yon Elvi, S.Ag	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan Ternak sapi untuk 15 Kelompok Peternak yang ada di Nagari Lubuak Batingkok	Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Lubuak Batingkok	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
41	Hendra M. Dt. Bogah	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	di Nagari Koto Tengah Simalanggang, terdapat beberapa anggota Kelompok Pertanian yang memelihara Sapi, namun Sapi tersebut dapat dikatakan bukan merupakan sapi unggul karena dilihat dari badannya yang tidak berisi dan ada yang mati diserang penyakit, Hal ini dikarenakan sapi-sapi tersebut tidak berasal dari benih/bibit sapi unggul. Volume : 30 ekor Rp 510.000.000,-	Jorong Tambun Ijuk, Jorong Kapalo Koto, Jorong Batu Nan Limo, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
42	Hendra M. Dt. Bogah	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	Dengan adanya bantuan Benih/bibit Ayam (KUB) ini pada kelompok tan diharapkan kelompok pertanian dapat mengembangkannya sehingga dapat menunjang perekonomian mereka. Volume : 3000 Rp 300.000.000,-	Jorong Tambun Ijuk, Jorong Kapalo Koto, Jorong Batu Nan Limo, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
43	Hendra M. Dt. Bogah	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok	dengan adanya bantuan Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok diharapkan dapat memelihara dan mengembangkannya itik etelur ini sehingga nantinya kelompok yang banyak berada di taraf ekonomi rendah untuk menunjang perekonomiannya dengan beternak itik petelur. Volume : 3000 Rp 300.000.000,-	Jorong Batu Nan Limo, Jorong Tambun Ijuk, Jorong Kapalo Koto, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
44	Hendra M. Dt. Bogah	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Pedaging ke kelompok	dengan pengadaan benih/bibit Itik Pedaging ke Kelompok dapat membantu anggota kelompok yang memelihara dan mengembang Bibit/benih Itik Petelur itu dapat meningkatkan perekonomian mereka terutama yang berekonomi rendah.	Jorong Tambun Ijuk, Jorong Kapalo Koto, Jorong Batu Nan Limo, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Volume : 3000 Rp 300.000.000,-					verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan						
45	ZARUL KASMI	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Pengadaan mesin kompos volume : 3 unit Penerima Manfaat : pertanian dan perkebunan Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Perkiraan biaya : Rp 105.000.000,- Kondisi : petani kesulitan mendapatkan pupuk sehingga adanya mesin ini dianggap akan menanggulangi kebutuhan pupuk masyarakat.	Koto Bangun, Kab. Lima Puluh Kota	Kapur IX	Koto Bangun	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
46	Hendra M. Dt. Bogah	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (Boer) ke Kelompok	Tidak adanya bibit kambing Jantan (Boer) ke Kelompok. Volume : 10 Ekor Rp 25.000.000,-	Jorong Batu Nan Limo, Jorong Kapalo Koto, Jorong Tambun Ijuk, Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
47	ZARUL KASMI	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan ternak kambing, sapi, dan kerbauVolume : 19 kelompokPenerima Manfaat : petani/perkebunanWaktu pelaksanaan : 1 tahunPerkiraan biaya : Rp 80.000.000,-Kondisi : Dengan masih kurangnya masyarakat yang membudidayakan ternak ini, diharapkan nanti ada peningkatan dalam produksi ternak	Koto bangun, Kab. Lima Puluh Kota	Kapur IX	Koto Bangun	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
48	Yusrizal Dt. Pado	Sosialisasi skala usaha peternakan dalam penerapan Good Farming Practice untuk ternak besar	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Volume 50 orang Pagu Anggaran Rp. 5.250.000,-	Nagari Tungkar, Kab. Lima Puluh Kota	Situjuh Limu Nagari	Tungka	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kegiatan	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
49	Yusrizal Dt. Pado	Sosialisasi pengolahan/ pembuatan pakan untuk kelompok tani ternak (untuk 1 kali kegiatan x 20 Orang)	Pelatihan Pembuatan Pakan ternak Volume 2 kegiatan Pagu Anggaran Rp. 18.540.000.000,-	Nagari Tungkar, Kab. Lima Puluh Kota	Situjuh Limu Nagari	Tungka	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kali	4.925.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
50	YONEFRI	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (PE Grade A) ke Kelompok	Peternakan Kambing Komunal	Banja Loweh, Kab. Lima Puluh Kota	Bukik Barisan	Banja Loweh	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
51	AIDIL FITRI, B.S.Ag	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Boer) /Induk Kelompok	Meningkatkan mutu perekonomian masyarakat	Jorong Galugua, Kab. Lima Puluh Kota	Kapur IX	Galugua	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
52	M. FAKHRURAZI, SH	Bantuan Mesin Chopper Pengolah pakan	Sebagai penunjang bagi kelompok swadaya masyarakat untuk pengolahan Moggot BSF	Kelompok Budidaya Maggot BSF Kabun, Kab. Lima Puluh Kota	Lareh Sago Halaban	Halaban	Usulan disetujui	Musrenbang Kecamatan LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
53	Andri Helmiadi	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	kurangnya kemampuan anggota kelompok Bukik Jambu untuk membeli Benih/ Bibit Ayam Buras	Jorong Sungai Rambai Nagari Solok Bio-Bio, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Solok Bio Bio	Usulan disetujui	LAYAK. Nama poktan sudah ada namun alamat poktan dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
54	M. FAKHRURAZI, SH	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok	Berkurangnya pendapatan masyarakat dikarenakan covid-19 membuat banyak masyarakat yg mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup	Kelompok Lereng Indah Jorong Lambuk, Kab. Lima Puluh Kota	Lareh Sago Halaban	Halaban	Usulan disetujui	layak	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
55	Andri Helmiadi	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Boer) /Induk Kelompok	Kesanggupan Pendanaan Kelompok Elok Basamo Kurang Untuk Mmnebeli Bibit Kambing Betina Tidak Mencukupi	Jorong Padang Laweh Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Solok Bio Bio	Usulan disetujui	LAYAK. Agar dituliskan volume pekerjaan/usulan. Kelompok tani penerima/pengusul mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
56	Andri Helmiadi	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (Jawarandu) ke Kelompok	Kas Kelompok Ngalau Anyie Saiyo Tidak Mencukupi Untuk Membeli Pejantan yang berkualitas	Jorong Solok Dalam Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Solok Bio Bio	Usulan disetujui	LAYAK. Agar dituliskan volume pekerjaan/usulan. Kelompok tani penerima/pengusul mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan.	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
57	Andri Helmiadi	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Keterbatasan Keuangan Kelompok Tani/ Peternakan Ingin Maju Jorong Bio-Bio Untuk Membeli Ternak Sapi sedangkan Potensi untuk peternakan sangat besar	Jorong Bio-Bio Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Solok Bio Bio	Usulan disetujui	LAYAK. Agar dituliskan volume pekerjaan/usulan. Kelompok tani penerima/pengusul mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan.	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
58	Andri Helmiadi	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Untuk mengangkut hasil Hasil Pertanian dan Perkebunan di Kelompok Tani Elok Basamo Jorong Padang Laweh sangat kesulitan disebabkan karena Jarak antar sawah dan jalan cukup jauh	Jorong Padang Laweh Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Harau	Solok Bio Bio	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
59	M. FAKHRURAZI, SH	Sosialisasi / Bimtek pemotongan hewan qurban yang baik dan benar	Agar tidak ada lagi kesalahan dalam melakukan Pemotongan Hewan Kurban	Mesjid Batu Nan Banyak Jorong Lambuk, Kab. Lima Puluh Kota	Lareh Sago Halaban	Halaban	Usulan disetujui	Musrenbang Kecamatan LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kegiatan	11.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
60	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan benih/bibit ternak Ayam (KUB) ke kelompok	Belum tersedia	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
61	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Pedaging ke kelompok	Belum tersedia	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
62	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur ke kelompok	Belum Optimal	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
63	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan benih/bibit ternak Kerbau Jantan ke kelompok	Belum tersedia	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	120.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
64	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Belum tersedia	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang, dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
65	Drs.H.Noviardi,Apt	Sosialisasi pengolahan/ pembuatan pakan untuk kelompok tani ternak (untuk 1 kali kegiatan x 20 Orang)	Belum Optimal	Jorong Pasar Manggilang, Jorong sebrang Pasar Manggilang, Jorong Mudik Pasar Manggilang,	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Kali	4.925.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				dan Jorong Lubuk Jantan., Kab. Lima Puluh Kota				verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan						
66	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Boer) /Induk Kelompok	Belum adanya bantuan	Jorong pasar, sebrang, mudik pasar dan jorong lubuk jantan, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
67	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Jawarandu) /Induk Kelompok	Belum adanya Bantuan.	Jorong pasar, sebrang, mudik pasar dan jorong lubuk jantan, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
68	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (Boer) ke Kelompok	Belum adanya bantuan	Jorong pasar, sebrang, mudik pasar dan jorong lubuk jantan, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
69	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan bibit/benih Kambing Jantan (Jawarandu) ke Kelompok	Belum adanya Bantuan	Jorong pasar, sebrang, mudik pasar dan jorong lubuk jantan, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
70	Drs.H.Noviardi,Apt	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /Induk Kelompok	Belum adanya Bantuan	Jorong pasar, sebrang pasar, mudik pasar dan jorong lubuk jantan, Kab. Lima Puluh Kota	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Usulan disetujui	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi saat verifikasi usulan Musrenbang Kecamatan	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
71	Insanul Rijal	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Pengadan alat pencach pupuk kompos sebanyak 3 paket untuk nagari yan ada di kecamatan gunuang omeh dengan anggaran 600 juta	Kecamatan Gunuang Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Usulan disetujui	Dilanjutkan ke tahap selanjutnya,	Layak, usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Usulan Pokir DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	H. Yos Sariadi, S.Ag	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur	Perlu pembinaan UMKM bidang peternakan, dibutuhkan Bantuan ternak itik bagi kelompok tani	Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan, Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2	Akmal Rustam	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor) sarana Peternakan	Bantuan Becak Motor (BENTOR)	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima serta volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan usulkan kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3	Akmal Rustam	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur	Bantuan Bibit Itik Petelur	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	Ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4	HENDRI	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	bantuan ternak untuk kelompok-kelompok tani di kec payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
5	Zukron, B.Ac	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Kompos	Masih banyaknya Kelompok tani pengolah kompos belum memiliki alat pencacah, dibutuhkan - Pengadaan JAVATECH Mesin pencacah Kompos	Kecamatan Luak, Situjuh Limu Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat kelompok serta volume pekerjaan dituliskan. Mengajukan proposal Ke Disnakeswan. Kelompok merupakan kelompok aktif dan terdaftar di SIMLUHTAN. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	unit	38.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
6	Alfian	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Bantuan Bentor (Becak Motor),Kelompok Tani Tunas Jaya	jorong air putih , nagari sarilamak kec. harau , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
7	Alfian	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Sarilamak , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk program dan kegiatan usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
8	Deni Asra, S.Si	Pengadaan bibit/bibit ternak sapi	Pengadaan Bibit Sapi/Kambing Kelompok Tani Makmur Bersama	Nagari Balai Panjang Kec Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
9	Deni Asra, S.Si	Pengadaan bibit/benih Kambing (Jawarandu) ke Kelompok	Pengadaan Bibit Kambing Kelompok Tani Salingka Bukik	Nagari Balai Panjang Kec Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	Ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
10	Sastri Andiko S.H Dt. Putih	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan benih/ Bibit Ternak Sapi	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
11	Sastri Andiko S.H Dt. Putih	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan benih/ Bibit Ternak Sapi	Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
12	Sastri Andiko S.H Dt. Putih	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan benih/ Bibit Ternak Sapi	Nagari Sei Kemunyang, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi	Layak untuk Program dan KegiatanUsulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
							dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi						Kabupaten/Kota Lain
13	Sastri Andiko S.H Dt. Putihah	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Boer) /induk Kelompok	Bantuan Benih/ Benih Kambing Ke Kelompok	Nagari Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	15.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
14	Sastri Andiko S.H Dt. Putihah	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (Jawarandu) /induk Kelompok	Bantuan Benih/ Benih Kambing Ke Kelompok	Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	7	ekor	16.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
15	Sastri Andiko S.H Dt. Putihah	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /induk Kelompok	Bantuan Benih/ Benih Kambing Ke Kelompok	Nagari Sei Kemunyang, Kec. Luak , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
16	Sastri Andiko S.H Dt. Putihah	Pengadaan bibit/bibit ternak Kerbau Jantan	Bantuan Benih/ Bibit Ternak Kerbau Jantan	Nagari Sei Kemunyang, Kec. Luak , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	10	ekor	270.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
17	Syamsuwirman, A.Md	Pengadaan bibit/bibit ternak sapi	Pengadaan Benih/ Bibit Sapi Kelompok Maju Bersama	Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak, Kelompok untuk di daftarkan di SIMLUHTAN	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
18	Zukron, B.Ac	Pengadaan bibit/bibit ternak sapi	Masih banyaknya Kelompok masyarakat butuh bibit sapi unggul	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago	Usulan disetujui	Layak diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			untuk peningkatan ekonomi	Halaban, Kab. Lima Puluh Kota			dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi						Kabupaten/Kota Lain
19	Zukron, B.Ac	Pengadaan bibit/benih Kambing betina (PE Grade A) /induk Kelompok	Masih banyaknya Kelompok masyarakat butuh bibit kambing unggul untuk peningkatan ekonomi	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	8	ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
20	Zukron, B.Ac	Pengadaan bibit/benih Ternak Ayam (KUB) ke Kelompok	Masih banyaknya Kelompok masyarakat butuh bibit Ayam unggul untuk peningkatan ekonomi	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	500	ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
21	Zukron, B.Ac	Pengadaan bibit/benih ternak Itik Petelur	Masih banyaknya Kelompok masyarakat butuh bibit itik petelur unggul untuk peningkatan ekonomi	Kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
22	Asrul	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor) Kelompok Tani TANJUNG ARU	Nag. Labuah Gunuang , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
23	Asrul	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor) Kelompok Tani SAIYO	Nag. Labuah Gunuang , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
24	Syamsul Mikar	Pengadaan bibit/benih ternak sapi	Pengadaan Sapi Untuk Kelompok Tani Boyang Bersaudara Nagari Lubuak Alai	Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak, Kelompok untuk di daftarkan di SIMLUHTAN	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
25	Riko Febrianto, S.H	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan Bantuan Sapi Kelompok Tani Koto Tongah Saiyo Nagari Situjuah Ladang Laweh	Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	data agar dilengkapi LAYAK. Agar alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
26	Riko Febrianto, S.H	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pengadaan Bibit Sapi Untuk Kelompok Tani Ika Puncak Sago	Jorong Subaladuang Nagari Sungai Kumuyang Kecamatan Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Layak diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
27	Bisron Hadi, S.PdI	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi :1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau)2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Pelatihan kelompok tani se kecamatan Bukik Barisan untuk meningkatkan wawasan petani	Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Dapat diikuti oleh 20 orang anggota kelompok. Agar nama dan alamat poktan dituliskan dan merupakan kelompok aktif serta terdaftar di Disnakeswan	Layak untuk Program dan KegiatanUsulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
28	Zukron, B.Ac	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur	Masih Banyak Kelompok Peternakan yang belum dapat bantuan unggas	Kelompok Tani Taruko Indah, jorong Kayu bajajar Nagari Mungo kecamatan luak, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
29	Zukron, B.Ac	Pengadaan benih/bibit ternak Itik Petelur	Masih Banyak Kelompok Peternakan yang belum dapat bantuan unggas	Kelompok Dewi Sri Mungo, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	100	ekor	10.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
30	Zukron, B.Ac	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Masih Banyak Kelompok Peternakan yang	Kelompok Tani Subur, jorong Kubang	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ketahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat	4	ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			belum dapat bantuan sapi	Bungkuak Nagari situjuah Batua, Kab. Lima Puluh Kota			pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi		Daerah				Daerah Kabupaten/Kota Lain
31	H. Ermizal Jalinus, SE	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan ternak	Kelompok tani Nagari Taeh Baruah, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar nama dan alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak untuk Program dan Kegiatan Usulkan nama kelompok	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
32	Hemmy Setiawan	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Pendistribusian Ternak Sapi a/n Kelompok ternak Kharisma Nusantara	Jrg Taratak Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	usulan dapat diteruskan ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak dengan nama kelompok Kharisma Indonesia Terpadu	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
33	Hemmy Setiawan	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	"Pendistribusian Ternak Sapi a/n kelompok ternak Angin Berembus"	Jrg Taratak Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
34	Hemmy Setiawan	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	"Pendistribusian Ternak Sapi a/n kelompok ternak Serumpun"	"Jrg Ambacang Kunyik Nagari Pauh Sangik", Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
35	Deni Asra, S.Si	Pelaksanaan sekolah lapang untuk kelompok tani dengan materi :1. Agribisnis ternak besar (sapi/Kerbau)2. Agribisnis Ternak Kecil (Kambing) 3. Agribisnis Unggas (Ayam,Itik dan Puyuh)	Pelatihan Kelompok Tani	Jorong Kampuang Tangah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Dapat diikuti oleh 20 orang anggota kelompok. Agar nama dan alamat poktan dituliskan dan merupakan kelompok aktif serta terdaftar di Disnakeswan	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Paket	16.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
36	Virmadona, S.Sos	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Bantuan Becak Motor KWT USAHA SUBUR PADANG AMBACANG BATU BALANG HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	PADANG AMBACANG BATU BALANG HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
37	Deni Asra, S.Si	Bantuan Motor Roda Tiga (Betor)	Bantuan Becak Motor KWT USAHA SUBUR PADANG AMBACANG BATU BALANG HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	PADANG AMBACANG BATU BALANG HARAU , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	1	Unit	36.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
38	Irmantedi	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	Bantuan Ternak Kelompok Saiyo Sepakat	Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX , Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar alamat poktan penerima dan volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
39	Hj. Zuhatri	Pengadaan benih/bibit ternak sapi	bantuan indukan sapi untuk kelompok ternak berkah purwajaya jorong purwajaya nagari sarilamak kecamatan harau	jorong purwajaya nagari sarilamak kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Usulan disetujui	Usulan Dapat diproses ke tahap berikutnya	LAYAK. Agar volume pekerjaan dilengkapi dan mengajukan proposal ke Disnakeswan. Seluruh kekurangan data agar dilengkapi	Layak	Dilanjutkan ke tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	4	Ekor	70.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Catatan :

Seluruh usulan Aspirasi dan Pokir DPRD yang layak akan ditampung pada DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketersediaan anggaran, sesuai pagu indikatif yang telah ditetapkan semua usulan akan ditampung pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi:

1. Pembangunan Budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
11. Pendidikan
12. Kesehatan
13. Ketahanan pangan
14. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
15. Prioritas lainnya:
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia, mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- b. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- c. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian bidang peternakan diarahkan agar dapat memprioritaskan:

1. **Peningkatan Produksi pertanian**, melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian bidang peternakan, dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. **Peningkatan Produktivitas**, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani/peternakan bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani/ternak yang dilakukannya.
3. **Peningkatan Mutu**, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian bidang peternakan.

4. **Peningkatan Kesejahteraan Petani**, adalah tingkatan kondisi di mana petani/peternak sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usahanya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka mensukseskan Misi Daerah "Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah" maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam tujuan dinas yaitu Revitalisasi Pertanian Menuju Agroindustri.

3.3. Program Dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Usulan program dan kegiatan disusun berdasarkan target IKU yang ingin dicapai berpedoman pada renstra yang telah ada. Berdasarkan IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh

Kota, program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan populasi dan produksi ternak dengan target peningkatan populasi ternak sapi menjadi 100.000 ekor dan populasi ternak kambing menjadi 1 juta ekor. Semua Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan merupakan Program dan Kegiatan yang mendukung program unggulan Kepala Daerah mulai dari hulu (pemeliharaan dan pengadaan ternak) sampai hilir (pemasaran), setelah pagu indikatif ditetapkan maka Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Program dan Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Ket
<p><i>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 	

<ul style="list-style-type: none"> g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD <ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitas Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 	
--	--

<p>Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
<p>II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian</p> <p>a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</p> <p>b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</p> <p>2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</p> <p>b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak</p> <p>3. Kegiatan Pengawasan Obat di Tingkat Pengencer</p> <p>a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan</p> <p>b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan</p> <p>4. Kegiatan Pengedaran dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak</p> <p>b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak</p> <p>c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</p> <p>5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> <p>b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> <p>c. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p>	
<p>III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2. Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum b. Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum 	
<p>IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis c. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan d. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan e. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis f. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) b. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM c. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner 4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 	
<p>V. Program Perizinan Usaha Pertanian</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <ol style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan 2. Kegiatan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan 	
<p>VI. Program Penyuluhan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota e. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 	

- c. Penjelasan ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD
- Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini disebabkan karena :
1. Terbitnya draft permendagri tentang nomenklatur Sub Kegiatan Tahun 2023.
 2. Adanya penyesuaian pagu indikatif terkait anggaran tahun 2024.

T-B.36

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data Capaian Kinerja Tahun 2022)**

No	Bidang Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
I	Pertanian			
1	Persentase Peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas	Sesuai		1. Bibit Ternak yang berkualitas 2. Manajemen Pemeliharaan Ternak 3. Pakan Ternak yang Berkualitas
2	Persentase penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis (Penyakit Hewan yang Menular ke Manusia)	Sesuai		1. Bibit Ternak yang berkualitas 2. Manajemen Pemeliharaan Ternak 3. Pakan Ternak yang Berkualitas
3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Ternak yang berkembang	Sesuai		Peningkatan pengetahuan peternak dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.



Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kinerja OPD tahun 2024 sesuai IKU Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota :

RENCANA KINERJA IKU KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target	Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan	Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB	29,31	30,14	

**RENCANA KINERJA IKU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target	Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Populasi dan Produktifitas peternakan	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	6%	8%	
		Persentase pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6%	8%	
		Persentase peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	6%	8%	
		Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Persentase Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	6%	8%	
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	73 (BB)	73 (BB)	

Dinas Peternakan mendukung Misi Kepala Daerah point II (Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat melalui Revitalisasi Perekonomian dan Reformasi Kelembagaan berbasis masyarakat dengan Pemanfaatan Potensi Daerah) dengan Sasaran Strategis Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan dengan Indikator Kinerja Utamanya Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						11.826.602.142,00							34.179.987.921,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.826.602.142,00							34.179.987.921,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.826.602.142,00							34.179.987.921,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	8.251.822.142,00						-	15.956.340.818,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	13.515.000,00			-	-	-	-	49.595.843,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		9.108.275,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		4.380.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.470.950,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.454.615,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.736.303,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	13.515.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.708.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.737.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	7.505.531.292,00			-	-	-	-	12.612.857.686,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	7.505.531.292,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.595.339.911,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.815.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.734.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.311.100,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.594.175,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.235.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.413.950,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.413.950,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik Daerah	-			%	0,00			-	-	-	-	9.038.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.020.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.178.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.331.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.851.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.657.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			%	0,00			-	-	-	-	116.587.009,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.550.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.814.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.962.634,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.260.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	274.922.100,00			-	-	-	-	772.405.920,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	128.090.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.072.425,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	65.803.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.712.205,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	19.171.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.722.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.904.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.505.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.075.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.352.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		428.919.590,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0 %	0,00			-	-	-	-	1.117.610.450,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		476.310.450,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		484.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	91.192.750,00			-	-	-	-	217.067.950,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.235.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	54.692.750,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.832.150,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	36.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.000.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	366.661.000,00			-	-	-	-	1.061.177.260,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				47 Unit	303.561.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		610.929.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	21.100.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	42.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		426.048.260,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas</i>	-			8 %	158.627.300,00						-	4.007.767.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Peternakan	-			0 %	0,00			-	-	-	-	462.826.210,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		18.097.970,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		444.728.240,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase populasi dan produksi ternak yang berkualitas	-			8 %	36.190.000,00			-	-	-	-	1.146.110.790,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				36 Laporan	15.680.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.098.543.270,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				15 Laporan	20.510.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.567.520,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer	-			0 %	0,00			-	-	-	-	38.623.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.967.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak				0 Kasus	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.655.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terkendali dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota</i>	-			8 %	122.437.300,00			-	-	-	-	426.133.020,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														
			<i>Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.024.160,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>				36 Laporan	14.320.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		94.636.096,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia</i>				20 Laporan	108.117.300,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		313.472.764,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Meningkatnya Persentase Populasi dan Produksi Ternak yang Berkualitas</i>	-			0 %	0,00			-	-	-	-	1.934.074.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			<i>Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>				0 Ton	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.665.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				0 Ekor	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.924.408.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			<i>Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				0 Dosis	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas</i>	-			8 %	42.880.000,00						-	8.353.014.175,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pembangunan sarana pertanian/Pertanian	-			8 %	12.880.000,00			-	-	-	-	7.892.335.715,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		363.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	12.880.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.803.335.715,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		726.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase pelaksanaan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum	-			8 %	30.000.000,00			-	-	-	-	460.678.460,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum														
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				1 Ha	30.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		242.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum														
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				0 Ha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		218.678.460,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	-			8 %	1.110.458.000,00						-	4.489.241.038,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Tersedianya bahan pangan dan olahan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	-			8 %	141.790.300,00			-	-	-	-	1.474.492.690,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		232.442.210,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis				79 Orang	16.254.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.009.608.270,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				13 Wilayah	13.386.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				30 Kasus	32.030.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		232.442.210,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	80.119.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan dan Deteksi Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Peredaran Hewan dan bahan pangan asal hewan	-			8 %	25.239.000,00			-	-	-	-	666.899.970,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				12 laporan	10.239.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		204.391.385,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		167.966.755,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			<i>Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</i>				10 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		294.541.830,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD</i>	-			8 %	903.450.000,00			-	-	-	-	1.761.901.570,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.311.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				12 Laporan	903.450.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		1.711.589.770,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Hasil Peternakan bagi Pelaku Usaha</i>	-			8 %	39.978.700,00			-	-	-	-	585.946.808,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.850.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				12 Unit Usaha	39.978.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		573.096.608,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	-			8 %	43.950.000,00						-	265.534.500,00	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-			8 %	43.950.000,00			-	-	-	-	237.210.820,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		116.293.100,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.330.760,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan														
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi				20 Laporan	43.950.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.586.960,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor)	-			0 %	0,00			-	-	-	-	28.323.680,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.323.680,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	-			8 %	2.218.864.700,00						-	1.108.090.170,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Petrnakan	-			8 %	2.218.864.700,00			-	-	-	-	1.108.090.170,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.962.280,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		363.589.270,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.576.795,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				60 Unit	2.218.864.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		188.369.775,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.592.050,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	J U M L A H							11.826.602.142,00							34.179.987.921,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

22. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan	45
3.3. Program dan Kegiatan	45
IV. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sedangkan menurut Undang Undang 25 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan Tahun ke-3 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 s.d. 2026. Dengan mempedomani Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2021 s.d. 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 s.d. 2026. Rencana kerja Dinas

Perikanan disinkronkan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja ditindak lanjuti dengan penyusunan Pra RKA Tahun 2024. Program dan kegiatan yang disusun disinkronkan dengan program Prioritas yang ada dalam RPJMD Tahun 2021 s.d. 2026 dengan memuat hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta pokok pokok pikiran DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan untuk Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021) Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021 Nomor 1); dan

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Dinas Perikanan yang mengacu kepada program Prioritas yang ada pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021 s.d 2026, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 s.d 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota serta pokok pikiran DPRD.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perikanan
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perikanan ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efektif , efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perikanan

5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra OPD, dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RKA OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang –Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran OPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

II. BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

Berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan, analisis kinerja pelayan Dinas Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Perikanan dan sebagainya.

III. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

IV. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 meliputi beberapa hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel TC. 29

Tabel TC 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : PERIKANAN

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	
3	25	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85 %	80 %	100 %	100 %	100	0 %	180 %	
3	25	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	0 Dok	4 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	4 Dok	400.00%
3	25	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	9 Dok	3 Dok	3 Dok	100	0 Dok	12 Dok	133.33%
3	25	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	0 Dok	8 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	275 %	275.00%
3	25	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	60 Orang	60 Orang	100	41 Orang/Bulan	101 Orang	841.67%
3	25	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	100.00%
3	25	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	48 Dok	48 Dok	100	0 Dok	60 Dok	500.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Bulan	12 Bulan	10 Dok	10 Dok	100	0 Dok	10 Dok	83.33%
3	25	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	14 Dok	14 Dok	Dok	0 Dok	0	0 Dok	14 Dok	100.00%
3	25	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0 Dok	2 Dok	200.00%
3	25	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	1500.00%
3	25	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 unit	1 Unit	Unit	0 Unit	0	Unit	0 Unit	0.00%
3	25	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 stel	Stel	Stel	0 Stel	0	Stel	0 Stel	0.00%
3	25	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 kali	1 Kali	100 Orang	100 Orang	100	0 Orang	100 Orang	10000.00%
3	25	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 Kali	Kali	0 Kali	0	Kali	0 Kali	0.00%
3	25	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	100	100 %	200 %	1666.67%
3	25	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%
3	25	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	200 Unit	200 Unit	100	1 Paket	200 Unit	1666.67%
3	25	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0 Bulan	0.00%
3	25	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%
3	25	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	16.67%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300.00%
3	25	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	0 Bulan	0	12 Laporan	12 Bulan	100.00%
3	25	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Dok	12 Dok	100	12 Laporan	12 Dok	100.00%
3	25	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20 %	18 %	100 %	100 %	100	100 %	218 %	1090.00%
3	25	XX	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Unit	Unit	0 Unit	0	Unit	0 Unit	0.00%
3	25	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	8.33%
3	25	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85 %	80 %	100 %	100 %	100	100 %	280 %	329.41%
3	25	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4000 Surat	4000 Surat	100	12 Laporan	4000 Surat	33333.33%
3	25	XX	20	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-1 Rekening -2160 m3 -10.200 kwh	-2 Rekening -1620 m3 -7650 kwh	100	12 Laporan	-2 Rekening -1620 m3 -7650 kwh	100.00%
3	25	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	38 Orang	38 Orang	100	0 Orang	38 Orang	316.67%
3	25	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	300.00%
3	25	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	60 Unit	60 Unit	100	47 Unit	107 Unit	891.67%
3	25	XX	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	8.33%
3	25	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	10 Unit	10 Unit	100	55 Unit	65 Unit	541.67%
3	25	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	8.33%
3	25	XX	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5% %/Tahun	5 %/tahun	5 %/tahun	16.511 %/tahun	330	5 %/tahun	5 %/tahun	10000.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3900 Ton/Tahun	3412 ton/tahun	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	100	Paket 0 Paket Paket Paket	-1 Paket -2 Paket -2 Paket -1 Paket	100.00%
3	25	XX	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3900 Ton/Tahun	3412 ton/tahun	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	100	Paket 0 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Paket	-5 Paket -1 Kegiatan -1 Kegiatan -6 Paket	100.00%
3	25	XX	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		81 %	80 %	%	0 %	0	%	80 %	98.77%
3	25	XX	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	81 %	80 %	%	0 %	0	50 orang	80 %	98.77%
3	25	XX	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	83 %	79 Kelompok	Kelompok	0 Kelompok	0	Kelompok	79 Kelompok	95.18%
3	25	XX	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 Ton/Tahun	3 %/tahun	3 %/tahun	-20.37 %/tahun	-679	3 %/tahun	3 %/tahun	100.00%
3	25	XX	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 buah	buah	buah	0 buah	0	buah	0 buah	0.00%
3	25	XX	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 buah	buah	buah	0 buah		buah	0 buah	0.00%
3	25	XX	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		81 %	77 ;	3 %/tahun	3 %/tahun	100	3 %/tahun	3 %/tahun	3.70%
3	25	XX	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	559 Kelompok	539 Kelompok	Kelompok	0 Kelompok	0	75 Kelompok	75 Kelompok	13.42%
3	25	XX	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	559 Kelompok	539 Kelompok	-550 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	-550 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	100	-100 Kelompok -144 Kelompok	-794 Kelompok -1 Paket -1 Paket -12 Bulan -1 Paket -12 Bulan -12 Bulan	103.00%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	81 %	77 %	9 Paket	9 Paket	100	0 Paket	9 Paket	11.11%
3	25	XX	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	559 Kelompok	539 Kelompok	90 Kelompok	90 Kelompok	100	35 Kelompok	664 Kelompok	118.78%
3	25	XX	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 buah	5 Buah	Buah	0 Buah	0	Buah	0 Buah	0.00%
3	25	XX	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 buah	5 Buah	Buah	0 Buah	0	Buah	0 Buah	0.00%
3	25	XX	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 buah	0 0	0	0 0		0	0 0	0.00%
3	25	XX	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	45843 ton/tahun	35898.73 ton/tahun	78	ton/tahun	35898.73 ton/tahun	76.03%
3	25	XX	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	469 Juta ekor benih	450 juta ekor benih	juta ekor benih	0 juta ekor benih	0	juta ekor benih	0 juta ekor benih	0.00%
3	25	XX	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	6 Paket	6 Paket	100	0 Paket	6 Paket	0.01%
3	25	XX	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	10 Paket	10 Paket	100	0 Paket	10 Paket	0.02%
3	25	XX	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 %	20 %	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	6.67%
3	25	XX	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	47218 Ton/Tahun	44508 ton/tahun	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	0.03%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha	5 Ha	20 Ha	20 Ha	100	0 Ekor	20 Ha	100.00%
3	25	XX	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Ha	5 Ha	Ha	0 Ha	0	0 Ha	0 Ha	0.00%
3	25	XX	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	%/tahun	%/tahun	0 %/tahun	0	%/tahun	0 %/tahun	0.00%
3	25	XX	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	17 Kelompok	Kelompok	Kelompok	0 Kelompok		Kelompok	0 Kelompok	0.00%
3	25	XX	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	40 dan 5 Kg/Kapita/Tahun dan %/Tahun	39 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	104	40 Kg/Kapita/Tahun	79.9 Kg/Kapita/Tahun	#VALUE!
3	25	XX	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		375 Ton/Tahun	355 ton/tahun	38.50 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	104	40 Kg/Kapita/Tahun	80 Kg/Kapita/Tahun	21.31%
3	25	XX	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	375 Ton/Tahun	355 ton/tahun	39.00 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	102	5 Dokumen	45 Kg/Kapita/Tahun	11.97%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021/ (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2023/ (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/ d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
										Target Renja OPD Tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 / Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Realisasi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
3	25	XX	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		375 ton/tahun	355 ton/tahun	355 ton/tahun	344.681 ton/tahun	97	ton/tahun	344.681 ton/tahun	91.91%
3	25	XX	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	375 ton/tahun	355 ton/tahun	365 ton/tahun	344.681 ton/tahun	94	ton/tahun	700 ton/tahun	186.54%
3	25	XX	06	2.03		Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Penglahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		40 kg/kapita/tahun	39 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.9 Kg/Kapita/Tahun	102	Kg/Kapita/Tahun	79 Kg/Kapita/Tahun	197.85%
3	25	XX	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40 kg/kapita/ tahun	39 Kg/Kapita/ Tahun	Kg/ Kapita/ Tahun	0 Kg/ Kapita/ Tahun	0	Kg/ Kapita/ Tahun	0 Kg/ Kapita/ Tahun	0.00%
3	25	XX	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	40 kg/kapita/ tahun	39 Kg/Kapita/ Tahun	38.5 Kg/ Kapita/ Tahun	39.9 Kg/ Kapita/ Tahun	104	0 Kg/ Kapita/ Tahun	79 Kg/ Kapita/ Tahun	197.85%

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya perbedaan indikator kinerja dari Tahun 2021. Hal ini didasarkan oleh adanya penetapan indikator Sub Kegiatan yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang ditetapkan pada Bulan Desember Tahun 2021.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, seluruh indikator sub kegiatan sudah mencapai target dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Program Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja yakni persentase peningkatan produksi tangkap juga sudah mencapai target. Dari target 5% dengan realisasi 16.511% atau dengan tingkat realisasi mencapai 330%. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dengan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan bantuan perahu, mesin perahu dan alat tangkap untuk kelompok nelayan (KUB). Selain itu Dinas Perikanan juga melakukan pengembangan Lubuk Larangan, dan melakukan Restocking di Perairan Umum.

Pada Program Perikanan Budidaya, terdapat satu indikator kegiatan yang tidak mencapai target yakni kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan dengan target 45.843 ton/tahun dan realisasi 35.898,73 ton/tahun (78%). Selain itu, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kerja yakni persentase peningkatan produksi budidaya juga belum mencapai target. Dari target yang ditetapkan 3%, realisasi anjlok hingga angka minus yakni -20,37% dikarenakan terjadinya penurunan produksi budidaya yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.

Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan,

indikator kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan indikator Tingkat Konsumsi makan ikan sudah mencapai target yakni 38,5 kg/kapita/tahun dengan realisasi 39,9 kg/kapita/tahun (102%). Hal ini didukung oleh adanya kegiatan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat radio, Promosi lewat Baliho, Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) mulai dari tingkat Nagari dan lomba-lomba masak serba ikan. Sementara itu untuk kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan indikator jumlah produksi pengolahan perikanan belum mencapai target yakni 355 ton/tahun dengan realisasi 344,681 ton/tahun (94%). Ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Untuk meningkatkan promosi produk hasil olahan ikan, Dinas Perikanan sudah berupaya memberikan bantuan berupa pembangunan kios mini untuk pemasaran ikan dan produk hasil perikanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan, dengan Tabel TC-30 sebagai berikut :

Tabel TC.30
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			3.72	3.78	3.83	3.89	3.66	3.67	3.78	3.83	3.89	
			Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	-1.7	16.51	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	1.29	-20.4	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	
			Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	0	0	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38.5	39	39.5	40	3.26	1.68	39	39.5	40	

Tabel TC.30
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			3.72	3.78	3.83	3.89	3.66	3.67	3.78	3.83	3.89	
			Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	-1.7	16.51	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	1.29	-20.4	3%/Tahun	3%/Tahun	3%/Tahun	
			Persentase Peningkatan Pengawasan	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	0	0	5 %/Tahun	5 %/Tahun	5 %/Tahun	
			Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38.5	39	39.5	40	3.26	1.68	39	39.5	40	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

a) Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilaksanakan Dinas Perikanan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan PD :

1. Memanfaatkan sosial media seperti *Whatsapp group* sebagai media penghubung Dinas Perikanan dengan Kelompok Perikanan. Dalam wadah ini, kelompok perikanan dapat menerima informasi tentang kegiatan Dinas serta dapat pula melaporkan atau membuat pengaduan yang berkaitan dengan masalah perikanan di lapangan.
2. Memanfaatkan website serta platform Instagram atau Facebook dalam hal promosi produk perikanan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya tarik bagi penjual dan pembeli yang akan berdampak pada kesejahteraan kelompok perikanan.
3. Membuat leaflet, poster dan banner yang berisikan informasi penting tentang perikanan dan kegiatan Dinas Perikanan.

b) Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan 6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air 7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan 8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB 9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan 10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif	1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis 2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis 3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan 4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan 5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi 6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai
		3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan	1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) 2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan 3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan 4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan 5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan 6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan 7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
2. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat konsumsi ikan
4. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
5. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidaya
6. Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
7. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
8. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
9. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
10. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
11. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah
12. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
13. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
14. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan

Faktor Pendorong

1. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI
2. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
3. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)

4. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
 5. Pembentukan Forum FORIKAN
 6. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
 7. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
 9. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
 10. Bantuan *excavator* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perluasan lahan perikanan
- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan yang terjadi di Dinas perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dapat berpengaruh terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang mana Dinas perikanan sendiri menjalankan Misi ke 2 Kepala Daerah yakni : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku.

Sebagai contoh, salah satu permasalahan Dinas Perikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul. Hal ini akan berdampak pada jumlah produksi perikanan yang rendah. Sementara itu, produksi budidaya adalah salah satu elemen yang menjadi dasar perhitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada perhitungan kontribusi perikanan terhadap PDRB. Semakin tinggi

produksi perikanan, maka semakin tinggi pula angka kontribusi perikanan terhadap PDRB.

d) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai target Capaian IKU OPD, Dinas Perikanan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

1) Tantangan

- a. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI
- b. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat konsumsi ikan
- d. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
- e. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidayaSebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
- f. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
- g. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
- h. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
- i. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
- j. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah

- k. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
- l. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
- m. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan

2) Peluang

- a. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI
 - b. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
 - c. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
 - d. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
 - e. Pembentukan Forum FORIKAN
 - f. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
 - g. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
 - h. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
 - i. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
 - j. Bantuan *excavator* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perluasan lahan perikanan
- e) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih

- ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
 4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
 5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
 7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
 8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan
 9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari Masyarakat, stake holder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan Renja OPD. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif

untuk tahun yang direncanakan.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perikanan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme Musrenbang Nagari dan Kecamatan yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Perikanan dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Untuk melihat rincian rancangan awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel TC.31 berikut

Tabel TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPД tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perikanan

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	5,655,786,558	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100 %	3,581,014,366	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		85%	145,533,201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	21,218,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9,942,755	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9,631,911	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8,949,752	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	9,053,721	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	63,672,035	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	23,065,027	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		100 %	3,401,845,447	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 bulan	3,260,766,466	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,344,944,076	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	3,260,766,466	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	7,585,435	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	6,792,943	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	12,181,254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 bulan	9,904,562	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Dok	9,123,740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	11,313,438	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		20%	215,468,790	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		-	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 stel	79,567,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Kali	119,351,250	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	16,550,040	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 Bulan	62,484,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan		12 Bulan	93,452,900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	1,271,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	23,342,700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 paket	2,000,100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	11,280,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	7,810,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 paket	3,840,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	7,810,600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 paket	5,985,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	7,810,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 paket	45,734,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan		20 %	520,853,550	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan		0	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	449,242,800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	71,610,750	Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		85 %	684,306,310	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		85 %	62,400,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4,774,050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	47,103,960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	49,460,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	632,428,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	10,940,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		100%	625,294,460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit 47 Unit	164,395,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	417,930,946	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	162,445,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perikanan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 bulan	53,045,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perikanan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	39,698,878	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	1,950,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	114,619,636	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5 %/ tahun	1,129,380,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	-	250,000,000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		4.100 ton/ Tahun	1,042,406,888	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	4.100 ton/ Tahun	195,589,527	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	-	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4.100 ton/ Tahun	530,331,368	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4.100 ton/ Tahun	316,485,993	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	-	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		83%	86,973,112	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		83%	250,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	83%	25,809,045	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	81 Orang	250,000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	85 Kelompok	61,164,068	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 %/ tahun	4,437,350,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	3 %/ tahun	1,155,622,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		5 buah	31,827,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 buah	31,827,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan		83 %	1,248,661,536	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan		83%	1,155,622,500	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	562 Kelompok	167,534,262	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	574 Kelompok	665,000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	562 Kelompok	135,945,168	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-	-	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	83%	391,207,936	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	562 Kelompok	553,974,170	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	574 Kelompok	490,622,500	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		5 buah	89,925,925	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 buah	59,675,625	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 buah	30,250,300	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan		48.635 ton/tahun	3,066,935,539	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan		-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	470 juta ekor benih	473,447,344	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.635 ton/tahun	642,045,600	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.635 ton/tahun	279,069,817	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	20 %	128,658,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-	-	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	48.635 ton/tahun	36,622,268	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha	1,405,290,400	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	-	-	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Ha	101,802,110	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan	5 % / tahun	82,050,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan	-	-	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		19 kelompok	82,050,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	19 kelompok	36,922,500	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	19 kelompok	45,127,500	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	-	-	-
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	732,260,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	-	-	-
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		385 Ton/tahun	172,016,441	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		-	-	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	385Ton/tahun	172,016,441	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-	-	-
									-	-	-
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		385 Ton/tahun	79,879,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan		-	-	-
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	385 Ton/tahun	79,879,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	-	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	480,364,559	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan		-	-	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	218,025,559	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40,5 Kg/ Kapita/ Tahun	262,339,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-	-	
					12,036,826,559					4,986,636,866	

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yaitu untuk bidang pendidikan, maka seluruh kegiatan yang dijalankan PD harus menunjang bidang pendidikan. Dinas Perikanan dalam bidang pendidikan dapat memberikan pembinaan, sosialisasi atau bimbingan teknis tentang kegiatan produksi perikanan kepada masyarakat khususnya kelompok perikanan.

Untuk indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada yang berbeda antara rancangan awal RKP dnegan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD penetapan indikator Sub Kegiatan sudah didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada

pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten serta dari Reses DPRD. Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 melalui aplikasi SIPD, aparatur Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun 2024 yang berasal dari hasil Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Begitupun usulan kegiatan tahun 2024 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD. Usulan-usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan melalui hasil verifikasi oleh bidang terkait. Adapun kategori usulan yang diterima adalah usulan yang berasal dari kelompok perikanan yang sudah terdaftar, kelompok perikanan yang tidak/belum menerima bantuan selama 2 tahun berturut-turut, dan usulan harus sesuai dengan Rencana Kerja yang sudah disusun oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2024.

Usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang ditujukan ke Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel TC.32 berikut :

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
2	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan Nagari Koto Lamo	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih	1000 m2	
3	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Nagari Muaro Paiti	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
4	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Nagari Sialang	Kec. Kapur IX	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
5	Bantuan perahu dan sarana alat tangkap berupa Perahu Fiber Mesin Tempel Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	Jumlah perahu dan sarana alat tangkap berupa Perahu Fiber Mesin Tempel	4 Unit	
6	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI Jorong Taratak Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
7	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN GURAMI	1000 m2	
8	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Jopang Manganti Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	2000 m2	
9	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan garing Jopang Manganti Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Pakan dan Benih Ikan Garing	1000 m2	
10	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Koto Bangun	Kec. Kapur IX	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Koto Bangun	1000 m2	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
11	Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum Daratan Pokmaswas Lubuk Larangan - Benih Ikan Baung Nagari Taeh Bukik	Kec. Payakumbuh	Jumlah Pakan dan Benih ikan Baung	1000 m2	
12	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	1000 Ekor	
13	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	1000 Ekor	
14	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Andaleh	Kec. Luak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	100 kg	
15	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN LELE Nagari Bukik Sikumpa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN LELE	100 kg	
16	Rehab Kolam Pokdakan Nagari Bukik Sikumpa	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah kolam yang direhab	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
17	Rehab Kolam Pokdakan Nagari Balai Panjang	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah kolam yang direhab	1 Paket	
18	Pembangunan Sumur Bor Nagari Andaleh	Kec. Luak	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	1 Paket	
19	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Kubang	Kec. Guguak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	1 Paket	
20	Bantuan sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI Nagari Simpang Sugiaran	Kec. Guguak	Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (pembesaran) - Ikan GURAMI	1 Paket	
21	Bantuan prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA Nagari Durian Tinggi	Kec. Kapur IX	Jumlah prasarana budidaya ikan air tawar (pembenihan) - IKAN NILA	5000 Bibit	
22	Bimtek Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB) Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Bimtek Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB)	35 Orang	
23	Temu Usaha Kemitraan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Jumlah Temu Usaha Kemitraan	40 Orang	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
24	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Mungka	Kec. Mungka	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Mungka	40 Orang	
25	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Solok Bio-bio	Kec. Harau	Jumlah Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan	40 Orang	
26	Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan Nagari Lareh Sago Halaban	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah Bimtek Pemupukan Modal Usaha Perikanan	2 Paket	
27	Revitalisasi Kolam Rakyat (sarana kolam, benih dan pakan) Nagari Taeh Baruah	Kec. Payakumb uh	Jumlah Revitalisasi Kolam Rakyat (sarana kolam, benih dan pakan)	1 Paket	
28	Jalan Produksi Perikanan Nagari Tanjuang Balik	Kec. Pangkalan Koto Baru	Panjang Jalan Produksi Perikanan	1 Km	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatannelayan.
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsimasyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhanbahanbakuindustri,peningkatankualitasmutuprodukdanilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansiterkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan danperikanan.

Dari investigasi Arah dan kebijakan KKP, ditemui berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini khususnya di Provinsi Sumater Barat. Hal tersebut tertuang didalam sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan Provinsi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan.
2. Keterbatasan armada dan alat tangkap
3. Kurangnya enterpreneurship khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain
4. Terbatasnya sarana pengawasan Sumber Daya Ikan
5. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya,
6. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.

Adapun yang menjadi fokus kegiatan Dinas Perikanan ditinjau dari permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
3. Peningkatan jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran target kinerja Renstra adalah :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	1) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Ikan konsumsi dari Budidaya
		Produksi benih ikan (ekor)
		Produksi ikan hias (ekor)
		Produksi Produk Unggulan Daerah/ Ikan Gurami Sago (ekor)
		Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)
		Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya (%)
	2) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi tangkap (ton)
		Cakupan Bina Kelompok Perikanan tangkap (%)
	3) Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
		Produksi hasil olahan perikanan (ton)

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan menjalankan MISI 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Program Unggulan Pembangunan Daerah dan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah. Dinas Perikanan menjalankan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan. Sementara itu untuk program prioritas, penentuannya didasarkan oleh permasalahan yang terjadi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

T-B.36
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian Kinerja tahun 2021 atau 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	-5
	Bidang urusan Kelautan dan Perikanan			
	1. Persentase Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	Melampaui (>)		Kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tinggi mengenai pentingnya makan ikan dan tujuan dari mengkonsumsi ikan Gencar melakukan kegiatan mempromosikan makan ikan melalui gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (gemarikan)
	2. Persentase Produksi Tangkap	Belum Tercapai(<)	Kurangnya hasil tangkapan karena kegiatan penangkapan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berpusat di waduk sementara saat terjadi kemarau panjang menyebabkan turunnya debit dan permukaan air sehingga ikan yang ada di waduk beruaya ke perairan lain dan menurunkan tingkat densitas ikan dalam waduk. Sarana dan prasaran penangkapan yang dimiliki oleh nelayan penangkapan masih belum memadai sehingga kegiatan penangkapan ikan belum dapat dilakukan secara optimal.	Meningkatkan serta mengupgrade sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap menjadi lebih memadai melalui pemberian bantuan.
	3. Persentase Peningkatan Cakupan Bina Kelompok	Belum Tercapai(<)	Kemampuan penyuluh masih kurang optimal dalam pembinaan kelompok	Perlunya penambahan tenaga penyuluh yang memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
			Kurangnya tenaga penyuluh untuk pembinaan kelompok di Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatkan strategi dalam mengelola pembinaan kelompok perikanan bekerjasama dengan Pemangku Adat dan Tokoh Nagari setempat
			Kelompok banyak yang kurang aktif	Melalui Perbub Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan dapat dilakukan renovasi ulang kelompok dengan cara melakukan pembaharuan, pembinaan serta evaluasi kelompok di masing-masing nagari setiap tahun.
	4. Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	Belum Tercapai(<)	Terjadinya lockdown saat pandemi covid-19 menyebabkan banyak kolam yang tidak termanfaatkan oleh pembudidaya sehingga produksi menurun	Memanfaatkan kolam-kolam yang terbengkalai dan meningkatkan kerjasama BBI dan pembudidaya ikan dengan memberikan bantuan benih Meningkatkan sosialisasi kepada kelompok pembudidaya ikan tentang kerjasama dengan pemasok pakan ikan
	5. Persentase Peningkatan Produktifitas Perikanan	Belum Tercapai(<)	Menurunnya input dari kegiatan pembudidayaan saat lockdown karena pandemi covid-19	Memaksimalkan pemanfaatan lahan budidaya yang terbengkalai serta memperluas lahan usaha budidaya ikan dengan sistem mina padi melalui kerja sama pembudidaya dengan BBI sebagai pemasok benih

Dari tabel T-B.36 dapat dilihat bahwa bidang urusan Kelautan dan Perikanan indikator kinerja yang melampaui interpretasi hanyalah persentase peningkatan konsumsi makan ikan, indikator persentase produksi tangkap belum tercapai disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana tangkap yang dimiliki oleh nelayan, persentase peningkatan cakupan bina kelompok belum tercapai disebabkan karena kurangnya tenaga penyuluh yang kompeten dibidangnya, persentase peningkatan produksi budidaya dan persentase peningkatan produktifitas perikanan juga belum tercapai disebabkan karena masih banyaknya kolam-kolam yang terbengkalai yang belum dimanfaatkan dan belum maksimalnya pemanfaatan lahan-lahan budidaya lainnya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi

Dinas Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan pagu indikatif Renja 2024 sebesar Rp. 4,986,636,866. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan 3 Program . Adapun rincian rencana kerja setiap program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Terdiri dari 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan)
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan)
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan)

Anggaran 2 Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya seluruhnya berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yaitu untuk bidang pendidikan dengan pagu sebesar RP. 1.405.622.636.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Tahun 2024 serta prakiraan maju untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel TC.33 berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.581.014.366,00						-	6.096.155.236,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	177.820.540,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.854.540,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.474.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.084.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.228.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.359.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.882.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.937.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	-			100 %	3.260.766.466,00			-	-	-	-	3.514.632.050,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.260.766.466,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.445.292.398,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.516.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.522.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.282.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.426.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.397.452,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.194.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	221.932.854,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.954.525,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.931.788,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.046.541,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran</i>	-			12 Bulan	93.452.900,00			-	-	Administrasi Perkantoran	-	101.159.218,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	1.271.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		8.591.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	23.342.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		6.861.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	2.000.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	11.280.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		61.190.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	3.840.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		8.044.918,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	5.985.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		16.471.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	45.734.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Perkantoran		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	567.926.173,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		494.167.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.759.073,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	62.400.000,00			-	-	Administrasi kantor	-	749.106.251,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		4.917.272,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	49.460.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		48.517.079,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10.940.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi kantor		695.671.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			55 Unit 47 Unit	164.395.000,00			-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor	-	763.578.150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	162.445.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		524.334.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		54.636.350,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1.950.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		40.806.100,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas, Alat berat dan Gedung Kantor		143.801.300,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	250.000.000,00						-	1.519.624.174,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.007.563.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.341.719,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		516.241.309,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		325.980.572,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Sumber Daya Ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	-			12 Dokumen 11 Paket	250.000.000,00			-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama	-	512.060.574,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				81 Orang	250.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		32.380.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				0 Kelompok	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		76.736.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0 Unit Usaha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan /Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama		402.944.174,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	1.155.622.500,00						-	1.483.274.867,00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	33.052.059,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				0 Rekomendasi	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.052.059,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				0 Ha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				0 Unit Usaha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							4.986.636.866,00							9.099.054.277,00	

Rencana Kerja Dinas Perikanan 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Untuk target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,78	3,83	IKU KD/ IKU OPD

Perhitungan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan data berupa Produksi Budidaya, Tangkap dan Benih. Jika Produksi Perikanan tersebut tinggi maka tinggi pula kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Secara umum ada 4 indikator target Indikator Kinerja pada Dinas Perikanan. Penyusunan rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah urusan penunjang urusan pemerintahan mengacu kepada Renstra Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Adapun Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran	Satuan	Target	
			2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%	5	5
2	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%	3	3
3	Persentase Peningkatan Pengawasan	%	5	5
4	Tingkat Konsumsi Makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Kg/kapita/Tahun dan %	40,5 dan 5	41 dan 5

Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024
1	Produksi perikanan	Ton	48.635
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	39.5
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	83
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	4.100
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	52.735



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

23. RENCANA KERJA DINAS PANGAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan...	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
 BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	43
3.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan	43
3.1.2 Uraian garis besar	43
3.1.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Renja dan Renstra sampai Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pangan.....	23
Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	27
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	40
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Program Prioritas.....	46
Tabel 4.2 Rencana Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Tahun 2021 s/d 2026.....	70
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Dinas Pangan Tahun 2021 s/d 2026	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pangan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan produk yang baik, yaitu :

1. **Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta menyiapkan pengumpulan data dan informasi.

2. **Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah Perumusan rancangan renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaan terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, penelaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian dokumen awal rancangan Renja Perangkat Daerah, penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah dan penyesuaian dokumen rancangan renja Perangkat Daerah sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Pangan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan pangan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa terkait urusan pangan merupakan urusan wajib tanpa diikuiti dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 4 (empat) sub urusan, yaitu (a) Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, (b) Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, (c) Sub urusan penanganan kerawanan pangan dan, (d) Sub urusan keamanan pangan.

Terkait keempat sub urusan dibidang pangan dimaksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/Kota yang dijelaskan dalam Undang-undang di maksud. Kesembilan wewenang tersebut adalah :

- (a) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
- (b) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- (c) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.

- (d) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (e) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (f) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- (g) Penanganan kerawanan pangan Kabupaten/ Kota.
- (h) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten/ Kota.
- (i) Pelaksanaan pengawasan pangan segar.

Untuk itu menyusun Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 dengan memperhatikan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya dapat mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bab II pasal 4 yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun kedepan;
2. Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

b. Tujuan

Tujuan pembuatan Rencana Kerja Dinas Pangan adalah :

1. Untuk mempermudah aparaturnya Dinas Pangan melaksanakan Program dan kegiatan tahun 2024.
2. Mendukung visi dan misi Kepala Daerah terkait dengan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja Tahun 2022. Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2022 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2022 dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 berikut kami uraikan persentase dan realisasi keuangan Program dan Kegiatan.

Tabel T-C.29
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 Dokumen	8 Dokumen	160%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%

2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	100%
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	204Dokumen	-	204 Dokumen	204 Dokumen	100%	204 Dokumen	408 Dokumen	150%
2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan OPD	24 Dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	72 Dokumen	300%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
2	09	01	2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	3 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	09	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	12 Laporan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Laporan	-	-
2	09	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Bagi ASN	40 Paket	-	40 Stel	-	0%	40 Paket	-	0%
					Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	-	-	-	-	40 Orang	40 Orang	100%
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	-	-	-	-	75 Orang	-	0%
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	-	-	-	-	40 Orang	-	0%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	1 Paket	24 Bulan	12 bulan	-	0%	1 Paket	-	0%

2	09	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	1 Paket	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Paket	-	0%
						Pengadaan peralatan kebersihan kantor								
						Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan Perbaikiakan peralatan Kantor								
						Tersedianya perlengkapan gedung dinas :					0%			
						Komputer		1 Unit	3 Unit	-				
						Laptop		1 Unit	3 Unit	-				
						Printer Brother		1 Unit	5 Unit	-				
						Printer		5 Unit	5 Unit	-				
						TV LED		-	2 Set	-				
						Infocus		2 Unit	1 Unit	-				
						CCTV		-	3 Unit	-				
						Kursi Tamu		-	1 Set	-				
						Genset		-	1 Unit	-				
						AC		-	3 Unit	-				
						Hardisk Eksternal		-	3 Unit	-				
2	09	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	1 Paket	-	0%
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko kwitansi, map Dinas Pangan, foto copy, biaya penjilidan, DPA dan RKA	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum : 1. Tamu Dinas 2. Rapat Dinas	5 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dapat terikuti rapat koordinasi dan konsultasi dinas Dalam Propinsi dan luar propinsi selama 1 tahun	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.07		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	- -	3 Unit	-	0%	6 Unit	-	0%
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	4 Unit	-	0%	5 Unit	-	0%
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	09	01	2.08	01	Tersedianya benda pos materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	1 Laporan	-	0%
2	09	01	2.08	02	Tersedianya jasa pemakaian air, listrik, telepon dan speedy	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	1 Laporan	-	0%
2	09	01	2.08	04	Belanja jasa tenaga administrasi, operator komputer, tenaga pelayanan umum, tenaga keamanan, Sopir dan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	1 Laporan	-	0%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	9 Unit	14 Unit	2 Unit	14,29%	8 Unit	19 Unit	237,5%
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	-	-	-	-	40 Unit	-	0%
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Unit	-	0%
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	0%
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%

					Kedaulatan dan Kemandirian Pangan									
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	1 Unit	3 Unit	300%	3 Unit	4 Unit	133%
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	8 Unit	160%
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0 Laporan	-	4 Ton Gabah	-	0%	0 Laporan	-	0%
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	0 Dokumen	-	3 unit	-	0%	0 Dokumen	-	0%
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	13 Kecamatan	1 Buku	1 Buku	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
2	09	03	2.01	02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	-	1 Kali		0%	6 Laporan	-	0%
						Terlaksananya lomba cipta menu luncheon B2SA dan pengolahan pangan lokal Tk.Provinsi Sumbar		-	1 kali		0%			

						Terlaksananya pembinaan pelaku/kelompok usaha pengolahan pangan lokal		-	1 Kali	10 Nagari	0%			
						Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Pangan Lokal		-	13 Kecamatan		0%			
						Bimtek Pengolahan Pangan Lokal		-	1 Kali	1 Kali	0%			
						Terlaksananya pengadaan media informasi pangan lokal		-	1 Kali		0%			
						Terlaksananya pengadaan outlet pangan lokal penunjang pariwisata		-	1 Unit		0%			
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	-	1 Paket	-	0%	0 Laporan	-	0%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0 Dokumen	-	-	-	-	0 Laporan	-	0%
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	6 Unit	-	-	-	-	0 Dokumen	-	0%
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	6 Unit	-	79 Nagari	-	0%	6 Unit	-	0%
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	30 Keluarga	-	-	-	-	30 Keluarga	-	0%
2	09	03	2.01		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	166 Ton		80,4 Ton	0 Ton	0 Ton	80,4 Ton	80,4 Ton	80,4 Ton
2	09	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-	0%
2	09	03	2.01	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah	21,4 Ton	28.436 Kg, 1 Unit	21,4 Ton	0 Ton	0%	21,4 Ton	121,548 Ton	565,42%
2	09	03	2.01	04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	162 Ton	-	80,4 Ton	0 Ton	0%	162 Ton	121,548 Ton	74,69%
2	09	04	2.01		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5

					Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kecukupan Gizi (AKG)								
2	09	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Buku	-	82	33 Nagari	100%	5 Buku	-	0%
2	09	04	2.01	02	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	0 Laporan							
					Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari		6 Kali	-		2 Kali Pertemuan				
					Terlaksananya pendampingan kelompok KRPL, pertemuan kelompok sekolah lapang dan pembinaan		19 Nagari		1 Kali	2 Kali Pelatihan				
					Terlaksananya penyaluran bantuan rumah pembibitan, sarana dan benih, bibit		19 Kelompok		2 Kali	9 Kali Pembinaan				
					Tersedianya promosi		6 Rim		1 Rim	-				
2	09	04	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0 Laporan	-	3 Nagari	-	0%	0 Laporan	-	0%
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
2	09	04	2.01	01	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 Laporan	13 Kecamatan	1 Buku	1 Buku	100%	0 Dokumen	-	0%
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

					Kabupaten/Kota									
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	7 Kali	-	0%	0 Laporan	-	0%
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	150 Balita	-	0%	0 Dokumen	-	0%
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 Dokumen	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	0 Dokumen	-	0%
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	3 Pelaku Usaha	-	0%	0 Dokumen	-	0%
					Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	50 Sampel	74 Sampel	150%	0 Dokumen	-	0%
					Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	4 Paket	1 Paket	25%	0 Dokumen	-	0%

Dari tabel diatas terlihat rata-rata seluruh Program dan Kegiatan memenuhi target dari yang ditetapkan dari awal.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Target Kinerja

Adapun kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut :

NO	Sub Kegiatan	Persentase (%)	Ket
1	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
6	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
8	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
9	Pengadaan Mebel	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
10	Tersedianya benda pos materai	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
11	Tersedianya jasa pemakaian air, listrik, telepon dan speedy	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
12	Belanja jasa tenaga administrasi, operator	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya

	komputer, tenaga pelayanan umum, tenaga keamanan, Sopir dan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN		perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
16	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
17	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
189	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
19	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
20	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
21	Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
22	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
24	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah

25	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
26	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
27	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
28	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
29	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
30	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
31	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
32	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
33	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	74,69%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
34	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah
35	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0%	Karena anggaran tidak tersedia dan adanya perubahan Nomenklatur sehingga target berubah

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Sub-sub kegiatan memenuhi target sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Persentase (%)	Ket
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
3	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100	
4	Penyusunan Pelapooan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100	

2.1.3. Sub Kegiatan yang melebihi target :

No	Sub Kegiatan	Persentase (%)	Ket
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300%	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	150%	
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300%	
8	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	300%	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	237,5%	

	Dinas Operasional atau Lapangan		
10	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	133%	
11	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	160%	
12	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	300%	
13	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	565,42%	

Lain dari itu ada juga sub-sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu :

No	Sub Kegiatan	Ket
1.	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Disebabkan oleh adanya pemutakhiran dari Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 ke Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sehingga indikatornya berubah
2.	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program /Kegiatan

- Faktor-faktor tidak tercapainya suatu kegiatan yaitu:
 - Anggaran
 - Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan
 - Sarana dan Prasarana
- Faktor-faktor tercapainya suatu kegiatan yaitu terkait masalah anggaran, Sarana dan Prasarana

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang ditimbulkan yaitu :

- Sulitnya untuk mengevaluasi Renstra karena target yang telah ditetapkan tidak tercapai
- Perencanaan harus di revisi

- Tidak tercapainya visi dan misi OPD yang berkaitan dengan RPJMD

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Kebijakan yang harus dilakukan yaitu :

- Terkait Perencanaan
Melakukan evaluasi Program atau Kegiatan yang prioritas untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah Yang tertuang dalam RPJMD pada tahun berjalan
- Terkait Pendanaan
Adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan yang prioritas sehingga target-target yang telah ditetapkan dari awal bisa tercapai dan mendukung visi dan misi kepala Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK 2022	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Ketersediaan Pangan		80,55	35,14	41,14	53,14	74,15	91.51%	91.51%	91.51%	91.51%
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita			6.337 kkal/kap/hari	6.426 kkal/kap/hari	6.515 kkal/kap/hari	6.604 kkal/kap/hari	6.159 kkal/kap/hari	6159 kkal/kap/hari	6.428 kkal/kap/hr	6.428 kkal/kap/hr
3	Jumlah penyediaan cadangan pangan daerah			48,539 ton	68,539 ton	88,539 ton	108.539 Ton	0. Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan			9	7	5	3	7	5	3	3
5	Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan			17	18	19	0	14	17	17	17
6	Jumlah Nagari Mandiri Pangan			7	8	9	0	4	4	15	15
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi			81,82	81,88	81,94	82,00	92,22	92,22	92,22	92,22
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			78	80	82	84	73	73	73	73

Uraian Dari tabel 2.2 sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja Persentase Ketersediaan Pangan berdasarkan IKK pada tahun 2022 persentase 80,55 % yang digunakan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota jika terjadi kelangkaan atau kerawanan pangan.
2. Jumlah Ketersediaan energi /kap/hari dan Jumlah ketersediaan protein per kap/hari belum melebihi target dari sebelumnya.
3. Jumlah penyediaan cadangan pangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah setiap tahunnya

Dinas Pangan menggarkan sebanyak \pm 20 Ton /Tahun. Jumlah Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada saat ini sebanyak \pm 121.751,41 Ton.

4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pada tahun 2022 intervensi terhadap daerah/nagari rentan rawan pangan sebanyak 7 Nagari..

5. Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan

Target awal indikator pada tahun 2022 nagari yang memiliki sarana lumbung pangan sebanyak 17 Nagari. Indikator ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan dari awal disebabkan oleh dukungan anggaran yang kurang, untuk tahun selanjutnya dianggarkan kembali sehingga di persentasikan menjadi 100% setiap tahunnya.

6. Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Sampai tahun 2022 jumlah nagari Mandiri Pangan sebanyak 17 Nagari. Untuk indikator ini sudah memenuhi target sampai tahun akhir tahun Renstra 2026.

7. Skor Pola Pangan Harapan

Pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dari target sampai akhir tahun RPJMD 2021-2026 yaitu 82,06% untuk tahun 2022 skor PPH 92,2 sehingga indikator ini sudah melebihi dari target.

8. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2022 realisasi pencapaian uji laboratorium dan uji lapangan 73%, indikator ini belum mencapai target yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sehingga anggaran untuk pengambilan sampel dan uji lapangan tidak bisa dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan

2.3.1 Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

- a. Salah satu kegiatan strategis yang dilakukan Badan Pangan Nasional yaitu penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan, kerawanan pangan, bencana alam/sosial serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
- b. Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut. Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- c. Pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan.

- d. Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan “Warung Pangan Mandiri” (Paman). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok.
- e. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutricional balance), cita rasa (porlability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan daya beli (affeadebility). Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi. Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas

ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.

- f. Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait. Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Isu strategis yang menjadi masalah pokok dalam pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

T-B.35

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Aspek Konsumsi 1. Belum optimalnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan segar	1. Belum Optimalnya Diversifikasi konsumsi pangan 2. Belum Optimalnya Pengujian dan Pengawasan keamanan pangan segar	1. Masih kurangnya jumlah Kelompok Wanita Pelaksana P2L yang dibina 2. Masih kurangnya jumlah buku pola konsumsi pangan 3. Masih kurangnya jumlah kelompok pelaku usaha pangan lokal yang dibina 4. Masih kurangnya jumlah pelatihan pangan local 5. Masih kurangnya jumlah lomba pangan local 6. Masih kurangnya jumlah sampel pangan segar uji lapangan 7. Masih kurangnya jumlah sampel pangan segar uji laboatorium 8. Masih kurangnya jumlah Rapid Test Kit 9. Masih kurangnya Jumlah Pelaku Usaha Rice Milling untuk Register Berat 10. Masih kurangnya Jumlah Pelaku Usaha PSAT Untuk Sertifikasi PSAT

	2. Belum Optimalnya Distribusi, Kemandirian dan Kedaulatan pangan	3. Belum Optimalnya Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat	11. Masih kurangnya Jumlah Lumbung Pangan 12. Masih kurangnya Jumlah cadangan Pangan 13. Masih kurangnya Jumlah Nagari Mandiri Pangan 14. Masih kurangnya Jumlah GPM (Gebyar Pangan Murah) 15. Masih kurangnya Jumlah LDPM 16. Masih kurangnya Jumlah TTIC 17. Masih kurangnya Jumlah Informasi Harga 18. Masih kurangnya Jumlah Peta FSVA 19. Masih kurangnya Jumlah Peta FSVA 20. Masih kurangnya Jumlah Laporan SKPG (Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi) 21. Masih rendahnya Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
		4. Belum Optimalnya Penanganan Nagari Rawan Pangan	

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs

Berdasarkan Isu Strategis dan Identifikasi Permasalahan tersebut di atas diharapkan ke depan tercipta suatu kondisi yaitu :

1. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat untuk berinovasi, berkreasi dan berteknologi dengan sehat
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi keluarga.

3. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya mengkonsumsi dan membudidayakan sumber pangan alternatif sebagai pengganti beras.
4. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
6. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan olahan yang sesuai standar mutu kesehatan.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan strategis sepanjang waktu.
8. Masyarakat semakin pintar memanfaatkan teknologi pangan lokal secara maksimal dan berkesinambungan.
9. Adanya Regulasi dari Pemerintah yang mengatur harga maximum dari suatu produk pangan
10. Pemberdayaan kelompok pengelola pangan ditengah masyarakat

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.4.1 Tantangan

Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- c. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS
- d. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- e. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- f. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.

- g. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- h. Fluktuasi harga pangan.
- i. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.3.4.2 Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik
- d. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- e. Potensi diversifikasi bahan pangan.
- f. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan.
- g. Adanya koordinasi dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet.
- h. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
- i. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- j. Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- k. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan
- l. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- m. Adanya kebijakan pemerintah bahwa masalah ketahanan pangan merupakan urusan prioritas utama.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan adalah :

- Ketersediaan Pangan Utama
- Ketersediaan energi dan protein per kapita
- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- Pencapaian Skor PPH
- Penguatan cadangan pangan
- Penanganan Daerah Rawan Pangan
- Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
- Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
- Kelembagaan Ketahanan Pangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahap 2024

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catt Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Pangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.087.922.504	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Pangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.118.295.064	Belanja Rutin Opd
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	100.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd

			SKPD					SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Belanja Rutin Opd
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	1.774.244.064	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	1.774.244.064	Belanja rutin opd
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	1.774.244.064	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	1.774.244.064	Belanja rutin opd
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	204 Dokumen	6.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0Dokumen	0	Belanja rutin opd

			ASN					ASN			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	8.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Belanja rutin opd
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	0	Belanja rutin opd
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Belanja rutin opd
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Belanja rutin opd
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	103.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		Belanja rutin opd
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pangan	Tersedianya Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	40 Stell	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pangan	Tersedianya Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	0 Stell	0	Belanja rutin opd
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	83.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Belanja rutin opd
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Dinas Pangan	Persentase tertib administrasi umum perangkat	100%	616.500.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	25.705.000	Belanja rutin opd

	Daerah		Daerah					Disediakan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Belanja rutin opd
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	200.000.000	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	39.000.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Belanja rutin opd
	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Paket	60.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Paket	25.705.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.835.000	Belanja rutin opd
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.725.000	Belanja rutin opd
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	275.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	113.940.000	Belanja rutin opd
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	490.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0	Belanja rutin opd
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	460.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0Unit	0	Belanja rutin opd
	Pengadaan Mebel	Dinas Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket Meja Kerja, 1 Paket kursi kerja	30.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Belanja rutin opd

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	346.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.800.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.190.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.890.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	Belanja rutin opd
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	405.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pangan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	107.046.000	Belanja rutin opd
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	107.046.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dins Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dins Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Belanja rutin opd
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dins Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	155.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dins Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Belanja rutin opd

	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	16,6%	700.000.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	16,6%	12.350.000	Belanja rutin opd
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam menstabilisasi pasokan dan harga pangan	16,6%	700.000.000	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam menstabilisasi pasokan dan harga pangan	16,6%	12.350.000	IKU OPD
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	500.000.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit	0	IKU OPD
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	150.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	3.315.000	IKU OPD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	9.035.000	IKU OPD
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	0	IKU OPD
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	17,00%	1.225.937.340	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	17,00%	1.225.937.340	IKU OPD
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam	100%	571.109.600	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam	100%	571.109.600	IKU OPD

	kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		menstabilisasi pasokan dan harga pangan			daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		menstabilisasi pasokan dan harga pangan			
	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Buku	7.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	650.000	IKU OPD
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	0	IKU OPD
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	209.109.600	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0	IKU OPD
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1.530.000	IKU OPD
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	55.000.000	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	0	IKU OPD
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 KK	250.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 KK	0	IKU OPD
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terkelolanya cadangan pangan pemerintah kabupaten	123,2 Ton	336.000.000	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terkelolanya cadangan pangan pemerintah kabupaten	123,2 Ton	5.975.000	IKU OPD
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	21,4 ton	321.000.000	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	0	0	IKU OPD

	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Biaya Pemeliharaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	123,2 ton	15.000.000	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Biaya Pemeliharaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	123,2 ton	5.975.000	IKU OPD
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kabupaten Lima Puluh Kota	'Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG	92,5	318.827.740	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kabupaten Lima Puluh Kota	'Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG	92,5	40.000.000	IKU OPD
	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	81,94%	51248824	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	81,94%	10.000.000	IKU OPD
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	'Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	230984402	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kabupaten Lima Puluh Kota	'Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 laporan	0	IKU OPD
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	3 Nagari	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	36594514	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	3 Nagari	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	30.000.000	IKU OPD
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam meujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	50,00%	235.000.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam meujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	50,00%	21.590.000	IKU OPD
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan	1 Buku	40.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan	1 Buku	12.811.600	IKU OPD

	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		12.811.600	IKU OPD
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	70 %	195.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	70 %	8.778.400	IKU OPD
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	45.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	IKU OPD
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.778.400	IKU OPD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	90 %	570.000.000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	90 %	570.000.000	IKU OPD
	Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terwujudnya Keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten	100 %	570.000.000	Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terwujudnya Keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten	100 %	570.000.000	IKU OPD
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	65.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	13.040.000	IKU OPD
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0Dokumen	0	IKU OPD

	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.960.000	IKU OPD
	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	280.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	IKU OPD
	Total				6.818.859.844					2.220.390.064	

Pada review awal Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun Anggaran 2024 setelah di mutakhirkan dari Kepmendagari 050-5889 Tahun 2021 ke Kepmendagari Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 maka ada beberapa sub kegiatan dimunculkan. Temuan-temuan yang terdapat pada rancangan akhir dari rancangan awal rencana kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dimutakhirkan :

- Sub kegiatan baru banyak yang dimunculkan terutama di Program Bidang
- Indikator sub kegiatan berubah
- Anggaran yang kurang memadai pada sub kegiatan untuk mencapai target IKU dan IKD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catt
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Luak	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 Unit	Pokir
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Lareh Sago Halaban	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 Unit	Pokir
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jr. Koto Tangah Nag. Koto Alam Kec. Pangkalan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	Aspirasi

Pada tabel ini menjelaskan bahwa adanya masukan dari pemangku kepentingan sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan proses mekanisme yang Panjang yaitu melalui Musrenbang tingkat Nagari, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga usulan tersebut di

inputkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disingkat dengan SIPD.

Pada prinsipnya perencanaan itu terdiri dari Bottom up planning dan top down up planning. Hal ini untuk dapat dipadukan menjadi suatu program dan kegiatan yang akan diaplikasikan dalam masyarakat. Untuk saat ini ada 2 usulan Pokok Pikiran Legislatif dan 1 Aspirasi masyarakat yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun Anggaran 2024 yang terlihat pada table T-C.32.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Keterjangkauan pangan yang lancar dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan; dan d) Keamanan Pangan yang terjamin dan berkualitas oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 dan RPJMN tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020-2024 point ketiga terkait dengan ketahanan pangan adalah Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan strategi :

1. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
2. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
3. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
4. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
5. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
 - c. Persentase nagari kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
 - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
 - e. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi Jual Beli komoditas pangan di nagari.
 - f. Tersedianya data harga pangan perbulan
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
 - c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat

3.3 Program Dan Kegiatan

3.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan yaitu :

- a. Masih kurangnya Lumbung Pangan masyarakat di Nagari dalam rangka mengantisipasi terjadinya rawan pangan di suatu wilayah.
- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pola Konsumsi B2SA.
- c. Masih adanya balita yang stunting di setiap Kecamatan.
- d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi keluarga di tingkat rumah tangga melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L).
- e. Masih adanya kecamatan yang rawan pangan.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan keamanan pangan untuk di konsumsi.

3.1.2 Uraian garis besar

Secara garis besar pembangunan ketahanan pangan sangat dibutuhkan di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Program dan Kegiatan yang di usulkan pada Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 sebagai salah satu OPD pendukung untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam penyusunan program dan kegiatan untuk tahun 2024 yang direncanakan yang telah dimutakhirkan dari Kepmendari Nomor 050-5889 Tahun 2021 ke Kepmendagri terbaru maka untuk tahun 2024 direncanakan sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
- **Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
- **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga**
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- **Kegiatan Pelaksanaan target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**
 - Penyusunan dan penetapan target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

d. Program Penanganan Daerah Rawan Pangan

- **Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
- **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**
 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota

3.1.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Pangan sudah menyesuaikan pagu anggaran dengan KUA-PPAS tahun 2024 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/1001//VI/Bapelitbang-LK/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan jumlah

pagu dana sebesar Rp. 2.595.396.315,-. Untuk tahap ini Rencana Kerja Dinas Pangan sudah di input dalam sistem SIPD-RI.Kemendagri.go.id.

Untuk saat ini anggaran Dinas Pangan Tahun 2024 menjadi Rp. 2.220.396.315,- yang disebabkan karena anggaran untuk DAK Non Fisik Rp. 375.000.000 kegiatan tersebut terletak pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Tabel T-B.36
Identifikasi Permasalahan Program Prioritas

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah	Melampaui (>)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran
2.	Persentase peningkatan distribusi pangan	Belum Tercapai (<)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan anggaran • Terbatasnya sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran • Sarana dan Prasarana yang memadai
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Melampaui (>)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran
4.	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Belum Tercapai (<)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan anggaran • Terbatasnya sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran • Sarana dan Prasarana yang memadai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

TABEL 4.2
RENCANA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN
TAHUN 2021 s/d 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari
		63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	39.554 ton	48,539 ton	68,539 ton	88,539 ton	108,539 ton	166,539 ton	166,539 ton
3	Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
		13,9%	11,4 %	8,9%	6,3%	3,8%	0%	0%
4	Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	14	17	18	19	20	21	21
5	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	6	7	8	9	10	11	11
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.	81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	82,06
7	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium.	85 %	87 %	89 %	91 %	93%	95 %	95%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari 2400 Kkal/kap/hari dan Ketersediaan Protein 63 gr/kap/hari. Untuk Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah sampai akhir RPJMD 2021-2026

sebanyak 166,539 Ton dan untuk persentase kecamatan kategori rawan berdasarkan peta komposit indikator SKPG di akhir RPJMD target nya 0%. Sampai Tahun 2021 jumlah nagari yang memiliki memiliki sarana lumbung pangan sebanyak 18 Nagari berdasarkan target dari IKU sampai akhir RPJMD 21 Nagari. Jumlah Nagari Mandiri Pangan yang dibina Dinas Pangan sampai tahun 2021 sebanyak 25 Nagari dan target sedangkan target dari akhir RPJMD di 2021 dan 2026 menambah sebanyak 6 Nagari sedangkan pencapaian skor PPH diakhir RPJMD 82,06. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium sampai akhir RPJMD 95% yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. .

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS PANGAN
TAHUN 2021 s/d 2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana	KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III	PANGAN											
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor		81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	82,06	Dinas Pangan	
	Penguatan Cadangan Pangan	%		455,94	555,94	655,94	755,94	855,94	1.005,94	1.005,94	Dinas Pangan	
	Penanganan daerah rawan pangan	jumlah		11	9	7	5	3	0	0	Dinas Pangan	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana	KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	353,53	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06	430,06	Dinas Pangan	
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kg/ka/thn	6.159	6.248	6.337	6.426	6.515	6.604	6.693	6.693	Dinas Pangan	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	84,09	70	78	80	82	84	86	86	Dinas Pangan	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	18,37	24,3	35,14	41,14	53,14	74,15	100	100	Dinas Pangan	PMDN 18/2020

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PANGAN -
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN						2.220.390.064,00							6.365.392.033,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.220.390.064,00							6.365.392.033,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.220.390.064,00							6.365.392.033,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			20 % 100 %	2.118.295.064,00						-	4.121.750.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan	-	80.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		10.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		10.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	1.774.244.064,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan	-	2.041.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.774.244.064,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		2.000.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		7.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		9.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		9.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		10.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		6.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-	-	105.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		85.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	208.205.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan	-	577.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	39.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		75.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		55.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.705.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		80.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.835.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		37.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.725.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		14.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	113.940.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		300.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-	-	495.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		460.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan <i>jasa penunjang</i>	-			100 %	28.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan	-	373.750.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.910.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		4.250.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.890.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		44.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	OPD Dinas Pangan		175.000.000,00	DINAS PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	-			1,3 %	12.350.000,00						-	175.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	-			16,6 %	12.350.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	-	175.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				3 Unit	3.315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	9.035.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	-			92,47 %	48.155.000,00						-	1.305.642.033,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			16 %	2.180.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	613.931.520,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		250.931.520,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1.530.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		55.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	650.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		8.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</i>	-			123,2 Ton	5.975.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	341.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				0 Ton	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		321.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i>				123,2 Ton	5.975.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		20.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	-			92,5 Skor	40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	350.710.513,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				81,49 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		56.373.706,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		254.082.842,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		40.253.965,00	DINAS PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat</i>	-			6,33 %	21.590.000,00						-	242.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan</i>	-			1 Buku	12.811.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	45.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	12.811.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		45.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah</i>	-			70 %	8.778.400,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	197.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				1 Laporan	8.778.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		47.000.000,00	DINAS PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman</i>	-			95 %	20.000.000,00						-	521.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	521.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.960.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		156.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		290.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	13.040.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		75.000.000,00	DINAS PANGAN
	J U M L A H							2.220.390.064,00							6.365.392.033,00	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**24. RENCANA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	74
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	75
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	94

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	3
Tabel II-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Tabel II-2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota	42
Tabel II-3	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022	46
Tabel II-4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	52
Tabel II-5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	77
Tabel III-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	86
Tabel III-2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota (Analisa data capaian kinerja tahun 2021 atau 2022)	88
Tabel III-3	Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD	90
Tabel III-4	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Perpustakaan	93
Tabel III-5	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Kearsipan	92
Tabel IV-1	Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD	94
Tabel IV-2	Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024	95
Tabel IV-3	Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024	96
Tabel IV-4	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Renstra OPD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan program dan kegiatan pada Renja PD Tahun 2024 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan berpedoman pada pasal 16 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017. Adapun tahapan proses penyusunan Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- I. Persiapan penyusunan;
- II. Penyusunan rancangan awal;
- III. Penyusunan rancangan;
- IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan rancangan akhir;
- VI. Penetapan.

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2022. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk detail penyusunannya.
2. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja pada akhir tahun 2022 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
3. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Renja dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 tentang Pedoman

Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

Tabel I.1 Kalender Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

[illegible]

4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dimulai pada Minggu Pertama bulan Desember 2023, disempurnakan kembali berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah tanggal 23 Februari 2023.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimulai minggu kedua Februari 2023 dan disampaikan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 13 Maret 2023 untuk diverifikasi dan disempurnakan kembali berdasarkan hasil verifikasi tersebut sehingga dirumuskan menjadi **Rancangan Akhir** Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki hubungan dan keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra OPD, Renja PD Provinsi dan Renja K/L serta RAPBD. Adapun hubungan tersebut sebagai berikut :

- Renja PD disusun dengan mempedomani RKPD, Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Renja PD disusun dengan mengacu kepada Renja PD dan RPJMD Provinsi serta mengacu pula kepada Renja K/L dan RPJM Nasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu prioritas nomor 4 (empat) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui penguatan budaya literasi, inovasi dan Kreativitas dan prioritas nomor 7 (tujuh) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas.
- Renja PD yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 pada unit organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi penyusunan RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
36. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 239 Tahun 2012;
37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 53);

38. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 56);
39. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
40. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 71).
41. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan**, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, analisis kinerja pelayan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, yang memuat rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi di atas, pada Bab ini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) disajikan pada Tabel II-1.

Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00 %	100,00
01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00 %	117,64
01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	24 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	100,00	4 Doku men	12 Doku men	50,00
01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	150 ASN	25 ASN	29 ASN	29 ASN	100,00	29 ASN	83 ASN	50,00
						Jumlah pejabat penanggungjawab an pengelola keuangan	108 Peja bat	18 Peja bat	2 Peja bat	2 Peja bat	100,00	2 Peja bat	22 Peja bat	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	72 Doku men	12 Doku men	12 Doku men	12 Doku men	100,00	12 Doku men	36 Doku men	50,00
		01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	24 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	100,00	4 Doku men	12 Doku men	50,00
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50,00
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	JumlahLaporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD yang disiapkan	78 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	100,00	13 Doku men	39 Doku men	50,00
		01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	50.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	100,00
		01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	6 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100,00	1 Doku men	3 Doku men	100,00
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	100 %	100 %	100,00
		01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	2 unit	2 unit	22,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas (Kuning Khaki)	175 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0,00	0 stel	0 stel	0,00
		Jumlah kokarde pakaian dinas	110 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0,00	0 buah	0 buah	0,00
		Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (hitam Putih)	60 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0,00	0 stel	0 stel	100,00
		Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (Pakaian Daerah)	195 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0,00	0 stel	0 stel	0,00
		Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI	90 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0,00	0 stel	0 stel	0,00
		Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Olah Raga	175 stel	0 stel	45 stel	0 stel	0,00	0 stel	0 stel	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	18 doku men	3 doku men	3 doku men	3 doku men	0,00	3 doku men	9 doku men	50,00
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	58 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0,00	10 Kali	10 Kali	17,24
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	36 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0,00	6 Kali	6 Kali	16,67
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	319 buah	24 buah	5 buah	5 buah	100,00	10 buah	10 buah	12,22

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	82 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	30 unit	30 unit	36,58
		01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	114 set/ buah/ lusin	0 set/ buah/ lusin	0 set/ buah / lusin	0 set/ buah / lusin	0,00	30 set/ buah/ lusin	30 set/ buah/ lusin	26,32
						Jumlah Pengisian Racun Api	72 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabun g	0,00	12 tabun g	12 tabu ng	16,67
						Jumlah pengisian tabung gas	72 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabung	0,00	12 tabung	12 tabu ng	16,67
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bula n	100,00	12 bulan	36 bula n	50,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	348.606 lembar / buah/ buku/ meter	36.073 lembar / buah/ buku/ meter	19.713 lembar / buah/ buku/ meter	19.713 lembar / buah / buku / meter	100,00	50.124 lembar/ buah/ buku/ meter	105.910 lembar/ buah/ buku/ meter	30,38
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	60 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0,00	0 bulan	0 bulan	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	10.300 porsi makan / minum	600 porsi makan / minum	500 porsi makan / minum	500 porsi maka n/ minu m	100,00	2000 porsi makan/ minum	3100 porsi makan / minu m	30,09
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman rapat	10.600 porsi makan / minum	700 porsi makan/ minum	1400 porsi makan / minum	1400 porsi makan / minum	100,00	2000 porsi makan/ minum	4100 porsi makan / minum	38,67
					Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335 kali	40 kali	15 kali	15 kali	100,00	60 kali	90 kali	34,33	
		01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	00,00	12 bulan	12 bula n	20,00
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100	100,00
		01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional	18 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebeleur kantor	439 unit/ paket	0 unit/ paket	266 unit/ paket	266 unit/ paket	100,00	0 unit/ paket	0 unit/ paket	60,59
		01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor	30 unit	1 unit	16 unit	16 unit	20,00	6 unit	23 unit	76,67
		01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen DED	2 doku men	0 doku men	0 doku men	0 doku men	0,00	0 doku men	0 doku men	00,00
						Jumlah pembangunan gedung kantor/ bangunan lainnya	4 unit	1 unit	0 unit	0 unit	100,00	0 unit	0 unit	25,00
		01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0,00	0 buah	0 buah	0,00
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100	100,00
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	5300 lembar	125 lembar	70 lembar	70 lemb ar	41,67	1000 lembar	1195 lembar	22,55
						Jumlah kali pengiriman	104 kali	4 kali	0 kali	0 kali	0,00	20 kali	24 kali	23,08

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	50,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bula n	50,00
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100	100,00
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	31 Unit	7 Unit	3 Unit	3 Unit	87,50	20 Unit	30 Unit	96,77
		01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	6 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165 unit	7 unit	2 unit	2 unit	100,00	30 unit	39 unit	23,64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01	2.09	09	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4 unit	1 unit	0 unit	0 unit	00,00	0 unit	1 unit	25,00
		01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
223					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
223	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	46,40 %	7,49 %	7,49 %	7,49 %	0,00	7,49 %	7,49 %	16,14
223	02	2.01			<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten</i>	156 perpustakaan	26 perpustakaan	13 perpustakaan	13 perpustakaan	100,00	26 perpustakaan	65 perpustakaan	41,67
						<i>Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah</i>	16.362 judul / eksemplar 38.316	14122 judul/ eksemplar 23345	14.704 judul/ eksemplar 23.513	14.704 judul/ eksemplar 23.513	100,00 / 100,00	13842 judul/ eksemplar 25416	13842 judul/ eksemplar 25416	105,86 / 102,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Pustakawan/ pengelola perpustakaan yang bersertifikat	9 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100,00	3 orang	4 orang	44,44
223022.0102	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	64 perpustakaan	42 perpustakaan	13 perpustakaan	13 perpustakaan	100,00	64 perpustakaan	64 perpustakaan	100,00
223022.0103	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi Bahan pustaka khas perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten	25 / 500 judul /eksemplar	0 judul/eksemplar	0 judul/eksemplar	0 judul/eksemplar	0,00	5 / 100 judul/eksemplar	5 / 100 judul/eksemplar	20,00
223022.0104	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpustakaan	26 perpustakaan	13 perpustakaan	13 perpustakaan	100,00	26 perpustakaan	26 perpustakaan	100,00
		Jumlah event perlombaan perpustakaan sekolah	3 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0,00	2 kali	2 kali	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
223 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan/ pustakawan yang dilatih	270 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	60 orang	60 orang	22,22
223 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka model	18 sekolah	0 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	100,00	3 sekolah	6 sekolah	33,33
223 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan daerah	3195 / 16176 judul / eksemplar	286 / 976 judul/ eksemplar	0/ 0 judul/ eksemplar	0 / 0 judul / eksemplar	0,00	560 / 2500 judul / eksemplar	560/ 2500 judul / eksemplar	100,00
223 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2586 pengunjung	2349 pengunjung	2436 pengunjung	4828 pengunjung	198,19	2510 pengunjung	2510 pengunjung	100,00
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	13,25 %	0 %	9,28 %	48,48 %	522,41	10,25 %	48,48 %	100,00
223 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah kunjungan pustaka keliling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	330 x kunjungan	43 x kunjungan	44 x kunjungan	44 x kunjungan	100,00	60 x kunjungan	147 x kunjungan	44,55

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						Jumlah event perlombaan budaya baca dan literasi	19 Kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	100,00	3 Kali	4 Kali	21,05
						Jumlah publikasi dan sosialisasi budaya baca dan literasi	19 Kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	100,00	3 Kali	4 Kali	21,05
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka yang mendapat bantuan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum	12 perpu sta kaan	2 perpu sta kaan	0 perpu sta kaan	0 perp usta kaan	0,00	0 perpu sta kaan	2 perp usta kaan	33,33
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	360 orang	40 orang	155 orang	155 oran g	100,00	60 orang	195 oran g	54,17
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/ Kota	4 kegiat an	0 kegiat an	0 kegiat an	0 kegia tan	0,00	1 kegiat an	1 kegia tan	25,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
										Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	23	03	2.01			<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	100,00	<i>100 %</i>	100	100,00
2	23	03	2.01	01		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dirawat, dilestarikan dan didaftarkan	12 naskah	2 naskah	2 naskah	2 naskah	100,00	2 naskah	6 naskah	50,00
2	23	03	2.01	02		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah dokumen naskah kuno yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan daerah	10 naskah	0 naskah	0 naskah	0 naskah	0,00	2 naskah	2 naskah	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
224 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	100 %	32,79 %	39,34 %	32,79 %	83,35	53,28 %	86,07 %	86,07
224 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	44 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	150,00	8 Unit	16 Unit	36,37
224 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah unit penataan arsip/dokumen daerah	44 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	150,00	8 Unit	16 Unit	36,37
224 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peraturan penyusutan arsip	27 Perat uran	9 Perat uran	1 Perat uran	1 Perat uran	100,00	4 Perat uran	14 Perat uran	51,85
224 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD/ Nagari yang dilakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan	61 OPD/ Nagar i	0 OPD/ Nagar i	0 OPD/ Nagari	0 OPD/ Nagar i	0	43 OPD/ Nagar i	43 OPD/ Nagar i	70,49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	27 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	4 unit	6 unit	22,22
24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah unit arsip yang diakuisisi	27 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	4 unit	6 unit	22,22
		Jumlah pengguna akses arsip statis per tahun	6 Peng guna	0 Peng guna	0 Peng guna	0 Peng guna	0,00	0 Pengg una	0 Pengg una	0,00
24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penerapan e-Arsip Terintegrasi	1 Insta nsi	1 Insta nsi	1 Insta nsi	1 Instan si	100,00	1 Instan si	1 Instan si	100,00
24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	1 kali	100,00
		Jumlah arsip yang masuk dalam JIKN	74 arsip	0 arsip	0 arsip	2 arsip	0,00	0 arsip	0 arsip	2,70

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
224 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi dimonitoring dan diawasi	40 unit	28 unit	32 unit	32 unit	100,00	40 unit	40 unit	100,00
		Jumlah event perlombaan kearsipan	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0,00	1 kali	1 kali	100,00
224 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
224 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	19 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100,00	3 unit	8 unit	42,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
224032.0101	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip usul musnah	19 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100,00	3 unit	8 unit	42,11
224032.0102	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip musnah	19 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100,00	3 unit	8 unit	42,11
224032.02	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip</i>	40 Instansi	6 instansi	6 instansi	6 instansi	0,00	6 Instansi	18 instansi	45,00
224032.0201	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,00
224032.0202	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan penyelamatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
224032.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	3 unit	50,00
224032.0301	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang digabungkan	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	3 unit	50,00
224032.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	22 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0,00	4 kegiatan	10 kegiatan	45,45
224032.0501	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	3 kegiatan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2023/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Kinerja Renja Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022/ (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
224032.0502	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	16 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	200,00	3 kegiatan	7 kegiatan	43,75
22404	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00	100 %	100 %	100,00
224042.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	0 SOP	0 SOP	0 SOP	0,00	1 SOP	1 SOP	20,00
224042.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	0 SOP	0 SOP	0 SOP	0,00	1 SOP	1 SOP	20,00

Tidak semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam tabel II-1 di atas memiliki anggaran dan termuat dalam DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh disebabkan oleh kebijakan keuangan Negara. Sub kegiatan yang tidak memiliki dana namun dalam pelaksanaan memerlukan anggaran targetnya dinolkan sehingga tidak ada program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan tidak ada pula yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sedangkan program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan termuat dalam DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

**I. PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 29 ASN dan Jumlah pejabat penanggungjawaban pengelola keuangan sebanyak 2 Pejabat tercapai realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 5 buah tercapai realisasi sebesar 100%.
- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah bulan kegiatan Jasa Kebersihan Kantor sebanyak 12 bulan tercapai realisasi sebesar 100%.

- 2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan dengan Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah cetak blanko kwitansi sebanyak 20 buku, cetak kendali surat masuk dan keluar sebanyak 6 rim, cetak spanduk 12 meter, fotocopy 19.620 lembar dan jilid sebanyak 43 buah tercapai realisasi sebesar 100%.
- 2.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah porsi Penyediaan Makanan Tamu sebanyak 250 porsi dan Jumlah porsi Penyediaan Minuman sebanyak 250 porsi tercapai realisasi sebesar 100%.
- 2.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 15 kali, Jumlah porsi penyediaan makanan rapat sebanyak 350 porsi dan jumlah porsi penyediaan minuman rapat sebanyak 350 porsi tercapai realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 3.1. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya sebanyak 266 unit tercapai realisasi sebesar 100%.
- 3.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 16 unit tercapai realisasi sebesar 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Materai 10.000 sebanyak 70 lembar tercapai realisasi sebesar 100%.

- 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 bulan tercapai realisasi sebesar 100%.
- 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan Penyediaan Honor Pengurus Barang dan Non PNS Lainnya sebanyak 12 bulan tercapai realisasi sebesar 100%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 3 unit tercapai realisasi sebesar 100%.
- 5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit tercapai realisasi sebesar 100%.

II. PROGRAM : PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan yang dikembangkan sebanyak 13 perpustakaan tercapai realisasi sebesar 100%.
- 1.2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebanyak 13 perpustakaan tercapai realisasi sebesar 100%.

- 1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi perpustakaan berbasis bahan pustaka elektronik sebanyak 2 kali dengan tercapai realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kunjungan pustaka keliling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus serta masyarakat sebanyak 44 kali kunjungan tercapai realisasi sebesar 100%.
- 2.2. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan nagari yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebanyak 4 nagari tercapai realisasi sebesar 100%.

III. PROGRAM: PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah naskah kuno yang ditelusuri sebanyak 2 naskah tercapai realisasi sebesar 100%.

IV. PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit penataan arsip/dokumen sebanyak 2 unit tercapai realisasi sebesar 100%.

- 1.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah peraturan penyusutan arsip sebanyak 1 draft Peraturan tercapai realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit arsip yang diakuisisi sebanyak 1 unit tercapai realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

- 3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN sebanyak 1 kali tercapai realisasi sebesar 100%.
- 3.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi, dimonitoring dan diawasi sebanyak 32 tercapai realisasi sebesar 100%.

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

- 1.1. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit arsip usul musnah sebanyak 1 unit tercapai realisasi sebesar 100%.
- 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun dengan keluaran dari sub kegiatan ini

adalah Jumlah unit arsip musnah sebanyak 1 unit tercapai realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah unit/kegiatan penyelamatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana sebanyak 1 Kegiatan tercapai realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 3.1. Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan penelusuran dan pencairan dokumen/arsip statis yang dinyatakan hilang sebanyak 1 kegiatan tercapai realisasi sebesar 100%.

4. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

- 4.1 Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang sebanyak 1 kegiatan tercapai realisasi sebesar 100%.
- 4.2 Sub Kegiatan Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang dengan keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang sebanyak 1 kegiatan tercapai realisasi sebesar 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), standar pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Oleh karena OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bukan merupakan OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja kunci (IKK), namun memiliki indikator kinerja daerah (IKD), yang dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II-2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
XVII	PERPUSTAKAAN											
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	IKD	2.436	2.473	2.510	2.548	4.828	4.828	5.120	5.548	Melebihi dari target yang ditetapkan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	IKD	25.416	28.316	31.416	34.716	23.513	25.513	26.416	27.716	Tidak adanya belanja modal pengadaan buku pada tahun 2022
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	IKD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,06	1,00	1,00	1,00	Rasio perpustakaan persatuan penduduk lebih rendah dari target yang ditetapkan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	-	IKD	0,80	0,81	0,82	0,83	1,25	0,81	0,82	0,83	Melebihi dari target yang ditetapkan
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	IKD	13.842	14.407	15.012	15.657	14.704	15.204	15.657	16.012	Melebihi dari target yang ditetapkan
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	IKD	1	3	6	8	1	7	9	9	100% (Realisasi sama dengan target yang ditetapkan) tahun 2022 dan melebihi target tahun 2023
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	IKD	9,28	10,25	11,00	12,25	48,48	48,48	48,48	48,48	Pada tahun 2022 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah 48,48. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 9,28 maka capaiannya adalah sebesar 522,41 %. Sangat Tingginya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												<p>Masyarakat ini disebabkan oleh berubahnya parameter pengukuran Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat dari 3 parameter menjadi 5 parameter dan adanya strategi kebijakan dalam peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat.</p> <p>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur 5 parameter yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Frekuensi membaca per minggu (kali), 2.Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam), 3.Banyaknya bahan bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul), 4.Frekuensi Akses Internet, dan 5.Durasi Akses Internet <p>Oleh sebab itu untuk realisasi dan proyeksi tahun 2023, 2024 dan 2025 diperkirakan sama dengan realisasi tahun 2022</p>
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	IKD	3	3,5	4	4,5	56,74	56,74	56,74	56,74	<p>Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah 56,74. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 3, maka capaiannya adalah sebesar 1891,33%. Sangat tingginya capaian ini disebabkan terdapat perbedaan formula perhitungan</p>

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												<p>sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat saat menetapkan target dengan formula perhitungan realisasinya.</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), yaitu :</p> <p>1.UPLM = Pemerataan layanan perpustakaan 2.UPLM 2 = Ketercukupan koleksi 3.UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan 4.UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan 5.UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP 6.UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan 7.UPLM 7 = Anggota Perpustakaan</p> <p>Oleh sebab itu untuk realisasi dan proyeksi tahun 2023, 2024 dan 2025 diperkirakan sama dengan realisasi tahun 2022</p>
XVIII	KEARSIPAN	-										
1	Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku	-	IKD	29,54	34,54	39,54	45,54	34,43	35,24	35,24	40,16	<p>Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena tidak tersedianya anggaran yang memadai</p>

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	IKD	60	60	60	60	50	5	60	60	Sama dengan target yang ditetapkan
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	IKD	55,00	60,00	64,00	70,00	52,94	52,94	52,94	60,00	Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN masih bernilai nol. Kita masih dalam proses untuk memperoleh akses SIKN dari ANRI
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	IKD	40,00	55,00	59,00	64,00	27,22	18,33	18,33	55,00	Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK dan Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK belum terlaksana sehingga nilainya masih nol.

Adapun capaian target kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel II-3 berikut:

Tabel II-3
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan public	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	83,39
			Nilai AKIP	64,37 (B)	Dalam proses penilaian inspektorat
			Nilai IRB	53,33 (CC)	Dalam proses penilaian inspektorat
2	Membangun budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	9,28	48,48
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3	56,74
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	55,00	52,94
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk	40,00	27,22

			Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat		
--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat lebih rendah dari target yang ditetapkan, disebabkan oleh factor eksternal dan factor internal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap *stakeholders*;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Adapun permasalahan dan hambatan secara umum yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan perpustakaan dan kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perpustakaan

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia di perpustakaan daerah terutama tenaga fungsional pustakawan;
- b. Masih rendahnya kompetensi pengelola perpustakaan di sekolah/nagari;
- c. Kriteria sarana dan prasarana pendukung gedung perpustakaan daerah belum sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Lembaga Perpustakaan Nasional;
- d. Penambahan koleksi buku pertahun belum dapat mencapai jumlah yang ditetapkan standar nasional yaitu 0,025 perkapita pertahun (minimal 7.420 judul pertahun);

2. Kearsipan

- a. Belum adanya gedung untuk Depo Arsip dan kantor arsip sesuai standar yang tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip in aktif dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depo Arsip.
- b. Masih rendahnya kesadaran penyelenggaraan arsip yang baik di lingkungan pemerintahan daerah karena belum memahami arti penting dan peran strategis arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan semua aspek kehidupan masyarakat.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan berupa fungsional Arsiparis dan atau fungsional umum pengelola arsip, baik di Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) maupun di seluruh Unit Pengelola Kearsipan (seluruh OPD, Nagari, RSUD, BUMD dll); dan
- d. Masih terbatasnya sarana kerja untuk pengelolaan arsip.

Permasalahan dan hambatan di atas disadari dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional. Terhadap visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari pencapaian dan misi ke-4 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”. Sedangkan terhadap keberhasilan capaian program nasional/internasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu instansi pendukung tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs yaitu tujuan ke-4 “menjamin kualitas pendidikan (*Quality Education/pendidikan yang bermutu dan berkualitas*) yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua”.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke depannya antara lain :

1. Pemenuhan NSPK yang ditetapkan oleh Lembaga Perpustakaan Nasional RI terhadap penambahan koleksi perpustakaan yaitu sekurang-kurangnya 0,025 perkapita jumlah penduduk di wilayah kabupaten yang bersangkutan (minimal 7.420 judul pertahun).
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah perpustakaan khusus, perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Masih rendahnya apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) dan dokumen arsip yang memiliki nilai sangat berharga.
4. Masih rendahnya animo masyarakat untuk mengunjungi arsip daerah.
5. Harapan adanya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial guna peningkatan sumberdaya manusia dan perekonomian masyarakat.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis dan berbasis inklusif sosial;
2. Lahirnya Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan sebagai dasar hukum untuk bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan penataan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
3. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan kearsipan berupa e-SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dari Lembaga ANRI dan *inlistlite* dari Lembaga Pusnas.
4. Pemanfaatan web OPD sebagai sarana publikasi dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara online yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Berdasarkan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang di atas selanjutnya diformulasi isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
2. Peningkatan budaya literasi berbasis inklusi sosial.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
4. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Penelusuran naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) serta pengumpulan dokumen arsip yang memiliki nilai sangat berharga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Semuanya tertuang dalam Tabel II-4 di bawah ini.

Tabel II-4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.346.073.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.815.773.802	Kegiatan Rutin OPD
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	<i>85%</i>	<i>220.200.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>21.295.000</i>	<i>Kegiatan Rutin OPD</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.705.000	Kegiatan Rutin OPD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	24.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.423.000	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
								Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	26.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	23.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.043.000	Kegiatan Rutin OPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	1 Dokumen	28.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Dokumen	7.124.000	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	3.301.293.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	2.449.261.425	Kegiatan Rutin OPD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Honorarium Pertanggungjawab an Pengelola Keuangan	25 ASN 18 Pejabat	3.217.693.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	2.441.794.125	Kegiatan Rutin OPD
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	37.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6.102.300	Kegiatan Rutin OPD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	4 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir SKPD yang disusun	1 Dokumen	17.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.365.000	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disiapkan	13 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disiapkan	13 Laporan	0	Kegiatan Rutin OPD
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	1 Dokumen	2.800.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	25.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	0	Kegiatan Rutin OPD
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kegiatan Rutin OPD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1 Dokumen	7.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	291.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4.743.000	Kegiatan Rutin OPD
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Finger Print	2 unit	15.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	0	Kegiatan Rutin OPD
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Harian	65 stel	78.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
			Jumlah Stel Pengadaan Pakaian olahraga	65 buah							Kegiatan Rutin OPD
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	3 Dokumen	28.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	4.743.000	Kegiatan Rutin OPD
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	10 Kali	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	6 Kali	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	Kegiatan Rutin OPD
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	484.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	54.704.377	Kegiatan Rutin OPD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 buah	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kegiatan Rutin OPD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 unit	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kegiatan Rutin OPD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 buah, 6 lusin	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
			Jumlah Pengisian Racun Api	12 tabung							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Jumlah pengisian tabung gas	12 tabung							
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	12 bulan	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.332.900	Kegiatan Rutin OPD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	50.000 Lembar, 60 Buah, 60 buku, 30 meter	52.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.524.000	Kegiatan Rutin OPD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah porsi Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	1000 porsi makan, 1000 porsi minum	27.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.500.000	Kegiatan Rutin OPD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 porsi makan, 1000 porsi minum, 60 kali	240.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.487.777	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.859.700	Kegiatan Rutin OPD
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	1.700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaa	0	0	Kegiatan Rutin OPD
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional	4 unit	360.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
2	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Mebeleur kantor	0 buah	-	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor	5 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
4	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DED	0 Dokumen	600.000.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Jumlah pembangunan gedung kantor/ bangunan lainnya	2 unit							
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 buah	640.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Kegiatan Rutin OPD
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	712.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	257.350.000	Kegiatan Rutin OPD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Materai 10000 dan biaya pengiriman	1000 lembar, 20 kali	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	Kegiatan Rutin OPD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.850.000	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	12 Bulan	550.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Kegiatan Rutin OPD
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	611.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	28.420.000	Kegiatan Rutin OPD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	489.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.740.000	Kegiatan Rutin OPD
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	0 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	-	Kegiatan Rutin OPD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 unit	32.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2.680.000	Kegiatan Rutin OPD
4	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	90.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	0	0	Kegiatan Rutin OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	0 unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	0 unit	-	Kegiatan Rutin OPD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.030.710.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.396.473.491	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	7,49%	800.450.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	7,49%	1.396.473.491	Prioritas Pembang unan Daerah
A	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten	26 perpustakaan	421.415.500	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten	26 perpustakaa n	446.969.100	Prioritas Pembang unan Daerah
			Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	15012 judul/31416 exemplar				Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	15012 judul/25500 exemplar		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			<i>Jumlah Pustakawan/ pengel ola perpustakaan yang bersertifikat</i>	<i>6 orang</i>				<i>Jumlah Pustakawan/ peng elola perpustakaan yang bersertifikat</i>	<i>8 orang</i>		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	64 perpustakaan	30.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	64 perpustakaa n	21.150.800	Prioritas Pembang unan Daerah
2	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah koleksi Bahan pustaka khas perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten	5 judul/ 100 exsamplar	40.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	30 exsamplar	40.000.000	Prioritas Pembang unan Daerah
3	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpustakaan	80.000.000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	26 perpustakaa n	197.048.250	Prioritas Pembang unan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
								Perpustakaan			
			Jumlah event perlombaan perpustakaan sekolah	2 kali							
4	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dilatih	60 orang	100.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 orang	50.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pustaka model	3 sekolah	60.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	40 Layanan	48.372.500	Prioritas Pembangunan Daerah
6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penambahan judul koleksi buku	600 judul	111.415.500	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan	808 Eksemplar	90.038.800	Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
								Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penambahan eksamplar koleksi buku	3000 eksemplar			Kab. Lima Puluh Kota				
B	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2510 pengunjung	379.034.500	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5120 pengunjung	949.863.141	Prioritas Pembang unan Daerah
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	11,00%				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,48%		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kunjungan pustaka keliling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	60 x kunjungan	179.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	60 Lokus	263.480.891	Prioritas Pembang unan Daerah
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah event perlombaan budaya baca dan literasi	4 Kali			Kab. Lima Puluh Kota				
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah publikasi dan sosialisasi budaya baca dan literasi	4 Kali			Kab. Lima Puluh Kota				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pustaka yang mendapat bantuan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum	2 Perpustakaan	54.808.500	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	570.840.000	Prioritas Pembangunan Daerah
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	60 orang	65.226.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	75.542.250	Prioritas Pembangunan Daerah
4	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	80.000.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	50 Orang	40.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100%	230.260.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100%	108.880.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
A	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan</i>	<i>100%</i>	<i>230.260.000</i>	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan</i>	<i>100%</i>	<i>108.880.100</i>	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah naskah kuno yang dirawat, dilestarikan dan didaftarkan	2 naskah	120.260.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 orang	65.408.500	Prioritas Pembangunan Daerah
2	Pengembangan, pengolahan dan pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen naskah kuno yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan daerah	2 naskah	110.000.000	Pengembangan, pengolahan dan pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30 Eksemplar	43.471.600	Prioritas Pembangunan Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				653.260.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				107.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	78,69%	352.050.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	36,07%	107.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
A	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata</i>	<i>8 unit</i>	<i>152.050.000</i>	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata</i>	<i>1 unit</i>	<i>107.000.000</i>	<i>Prioritas Pembangunan Daerah</i>
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah unit penataan arsip/dokumen daerah	8 unit	48.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	550 Berkas	107.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah peraturan penyusutan arsip	5 peraturan	50.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	315 Berkas	0	Prioritas Pembangunan Daerah
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah OPD/ Nagari yang dilakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan	43 OPD	54.050.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Laporan	0	Prioritas Pembangunan Daerah
B	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola</i>	<i>5 unit</i>	<i>21.000.000</i>	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Lima Puluh Kota</i>	<i>Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola</i>	<i>0 unit</i>	<i>0</i>	<i>Prioritas Pembangunan Daerah</i>

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit arsip yang diakuisisi	5 unit	21.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip	0	Prioritas Pembang unan Daerah
			Jumlah pengguna akses arsip statis per tahun	0 pengguna							
C	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Penerapan e- Arsip Terintegrasi</i>	<i>1 instansi</i>	<i>179.000.000</i>	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Penerapan e- Arsip Terintegrasi</i>	<i>1 instansi</i>	<i>0</i>	<i>Prioritas Pembang unan Daerah</i>
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	1 kali	100.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	0	Prioritas Pembang unan Daerah
			Jumlah arsip yang masuk dalam JIKN	15 arsip							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi dimonitoring dan diawasi	40 unit	79.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Prioritas Pembangunan Daerah
			Jumlah event perlombaan kearsipan	1 kali							Prioritas Pembangunan Daerah
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	278.180.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	0	
A	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	3 unit	36.000.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	2 unit	0	Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit arsip usul musnah	3 unit	22.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip	0	Prioritas Pembangunan Daerah
2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit Arsip musnah	3 unit	14.000.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	0	Prioritas Pembangunan Daerah
B	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	6 instansi	126.180.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	0 Instansi	0	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	1 Kegiatan	80.000.000	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0	Prioritas Pembangunan Daerah
2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan penyelamatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 Kegiatan	46.180.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0	Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
C	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	1 unit	12.000.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	1 unit	13.838.000	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang digabungkan	1 unit	12.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Daftar	0	Prioritas Pembangunan Daerah
D	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	4 kegiatan	104.000.000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	0 kegiatan	0	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang	1 kegiatan	50.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan	0 arsip	0	Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
								Ditetapkan			
2	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	3 kegiatan	54.000.000	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 Arsip	0	Prioritas Pembangunan Daerah
VI	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	100%	23.030.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	0%	0	Prioritas Pembangunan Daerah
A	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan</i>	<i>1 SOP</i>	<i>23.030.000</i>	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan</i>	<i>0 SOP</i>	<i>0</i>	<i>Prioritas Pembangunan Daerah</i>
1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SOP penggunaan arsip yang dikeluarkan	1 SOP	23.030.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 SOP	0	Prioritas Pembangunan Daerah
					9.030.043.000					4.428.127.393	

Proses review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra OPD dengan memperhatikan urgensi dan kebutuhan yang berkembang secara rasional. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan terdapat pada beberapa target sub kegiatan dan jumlah pagu anggaran. Hal ini terjadi karena mempertimbangkan hasil evaluasi perencanaan RKPD tahun 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan perencanaan dengan membuka saluran informasi ke berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang di dalam tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelaahan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Berdasarkan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan maka **tidak** terdapat program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan/*stakeholders*, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun asosiasi-asosiasi serta DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel II-5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					
2					
3					

N I H I L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Kementerian/Lembaga

Kementerian/lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan adalah Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Pusnas RI) sedangkan di bidang kearsipan adalah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Oleh karena terdapat 2 (dua) lembaga yang berbeda, maka untuk telaahan terhadap kebijakan nasional selanjutnya akan dibagi ke dalam 2 (dua) urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

1. Urusan perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 tersebut, visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional sebagai berikut :

a) Visi :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

b) Misi :

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

c) Tujuan :

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.

d) Sasaran Strategis :

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator :

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

e) Arah Kebijakan dan Strategi

1) Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:

- (a) Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
- (b) Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta public figure;
- (c) Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
- (d) Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.

- 2) Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:
 - (a) Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;
 - (b) Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
 - 3) Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
 - (a) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
 - (b) Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
 - (c) Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
 - (d) Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- f) Program dan Target Kinerja

Perpustakaan Nasional memiliki dua program yaitu program teknis yaitu program substansi di bidang perpustakaan dan program generik yaitu program dukungan dalam pencapaian substansi bidang perpustakaan. Adapun program teknis disebut dengan program perpustakaan dan literasi dan program generik disebut dengan program dukungan manajemen.

1) Program Perpustakaan dan Literasi

Program ini merupakan program teknis yang menjadi tanggungjawab Perpustakaan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan sasaran program dan indikator serta target, sebagai berikut :

Sasaran Program 1 : Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi.

Indikator :

- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:16 tahun 2020 menjadi 1:12 tahun 2024.
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:20.000 tahun 2020 menjadi 1:16.000 tahun 2024.
- Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar, dengan target 19,48% tahun 2020 menjadi 23,36% tahun 2024.
- Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, dengan target 1,00% tahun 2020 menjadi 2,00% tahun 2024.

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara.

Indikator :

- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dengan target 75,5 tahun 2020 menjadi 85,0 tahun 2024.
- Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS, dengan target 0,5% tahun 2020 menjadi 2,5% tahun 2024.
- Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional, dengan target 5% setiap tahunnya.
- Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno, dengan target 18,43% tahun 2020 menjadi 22,57% tahun 2024.

Sedangkan kegiatan utama dalam mendukung Program Perpustakaan dan Literasi, sebagai berikut :

- Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara;
- Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan;

- Pembinaan Pustakawan;
- Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan;
- Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- Pengelolaan Data dan Informasi;
- Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan;
- Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus;
- Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
- Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi;
- Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
- Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

2) Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik yang merupakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional, dengan sasaran program, dan indikator serta target, sebagai berikut :

Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional yang baik dan handal.

Indikator :

- Indeks Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI dengan target 75 tahun 2020 menjadi 95 tahun 2024.
- Indeks SPBE, dengan target 3,06 tahun 2020 menjadi 3,62 Tahun 2024.
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional dengan target opini WTP tahun 2020 dan juga WTP tahun 2024.
- Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 3,7 tahun 2020 menjadi 4,1 tahun 2024.

Sedangkan kegiatan utama dalam mendukung program dukungan manajemen Perpustakaan Nasional, sebagai berikut :

- Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional;
- Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional;
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional;
- Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional;
- Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
- Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

2. *Urusan kearsipan*

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, visi, misi dan tujuan ANRI sebagai berikut :

a) Visi :

“Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b) Misi :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

c) Tujuan :

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh.

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan.

d) Sasaran strategis ANRI sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan

Indikatornya : Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan yang mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara nasional

Indikatornya : Indeks Ketersediaan Arsip yang mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.

3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima
Indikatornya : Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan yang mengukur tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.
Indikatornya : Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

e) Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis

- 1) Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan meliputi:
 - Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan melalui strategi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.
 - Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan melalui strategi: 1.) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan; 2.) Pembinaan Kearsipan pada lingkup pusat; dan 3.) Pembinaan Kearsipan pada lingkup daerah.
 - Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan melalui strategi: 1.) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. 2.) Pelayanan Jasa Kearsipan.
 - Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan melalui strategi: Pengawasan dan akreditasi kearsipan.
- 2) Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional meliputi :

- Peningkatan ketersediaan arsip melalui strategi: a. Akuisisi Arsip Nasional; b. Pengolahan Arsip Nasional; c. Preservasi Arsip Nasional; dan d. Pengelolaan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di Daerah.
- 3) Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima meliputi :
- Peningkatan pelayanan informasi kearsipan melalui strategi:
 - a. Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Autentik; b. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; c. Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan; dan d. Penguatan strategi dan sistem pelayanan.
- 4) Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI meliputi :
- Penguatan tata kelola ANRI yang efektif dan efisien melalui strategi:
 - a. Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; b. Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan TU Pimpinan; c. Pelayanan Umum; dan d. Pengawasan Internal.
- f) Program dan Kegiatan:
- 1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
- Sasaran program :
- (a) Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan.
- kegiatan:
- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.
- (b) Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan
- kegiatan:
- (1) Pembinaan Kearsipan lingkup pusat dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Pusat;

- (2) Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah timur dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan kearsipan unit kearsipan/lembaga kearsipan instansi daerah wilayah timur;
 - (3) Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah barat dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan kearsipan unit kearsipan/lembaga kearsipan instansi daerah wilayah barat;
 - (4) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya SDM Kearsipan yang mendapat Sertifikasi dan Penilaian Kinerja.
- (c) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan
- Kegiatan:
- (1) Pelayanan Jasa Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Jasa Kearsipan;
 - (2) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- (d) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan
- Kegiatan :
- Pengawasan dan akreditasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan instansi yang diawasi dan meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi.
- (e) Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional
- Kegiatan:
- (1) Akuisisi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya khazanah arsip nasional;
 - (2) Pengolahan arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip statis nasional yang diolah;

- (3) Preservasi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya jumlah arsip terjaga dan arsip statis nasional yang dipreservasi;
- (4) Pengelolaan arsip tsunami dan arsip statis di daerah dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya pelayanan arsip tsunami dan arsip statis di daerah.
- (f) Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan.
Kegiatan:
 - (1) Pelayanan dan pemanfaatan arsip dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengguna Layanan Arsip secara Nasional;
 - (2) Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa;
 - (3) Pengelolaan data dan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan data dan informasi kearsipan.

2) Program Dukungan Manajemen

Sasaran program: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI

Kegiatan:

- (a) Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian, dan hukum;
- (b) Pelayanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan;
- (c) Pelayanan umum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan umum;
- (d) Pengawasan internal dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya pengawasan internal.

b. Pemerintah Provinsi

Untuk berhasilnya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan agar dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu:

- Visi :
“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”
- Misi :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mendukung misi 2 (dua) dan 7 (tujuh) misi Gubernur yaitu Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ASB-SBK dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II sebelumnya yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026, tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel III-1 berikut ini :

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2024 (PERSANDINGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan public	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,97	91,97
			Nilai AKIP	69,68 (BB)	69,68 (BB)
			Nilai IRB	64,17 (CC)	64,17 (CC)
2	Membangun budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	11,00	48,48
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4	56,74
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggung jawaban Nasional	64	52,94
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	59	18,33

Berdasarkan tabel III-1 di atas, target kinerja tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 memiliki target sandingan sesuai dengan hasil evaluasi indikator kinerja tahun sebelumnya. Identifikasi permasalahan dan factor-faktor penentu keberhasilan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel III-2 di bawah ini.

Tabel III-2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian kinerja tahun 2021 atau 2022)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XVII	PERPUSTAKAAN			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	>	-	Telah tersedianya gedung yang representative sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<	Tidak adanya belanja modal pengadaan buku tahun 2022	-
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	<	Jumlah penduduk bertambah tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah perpustakaan	
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	>		Meningkatnya jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan umum daerah
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	>	-	Adanya pemustaka yang menyerahkan bukunya ke perpustakaan umum daerah
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	>	-	Berubahnya parameter pengukuran Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat dari 3 parameter menjadi 5 parameter dan adanya strategi kebijakan dalam peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	>	-	terdapat perbedaan formula perhitungan sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat saat menetapkan target dengan formula perhitungan realisasinya.

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XVIII	KEARSIPAN			
1	Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku	<	Tidak tersedianya anggaran yang memadai	-
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	-	-
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN masih bernilai nol. Kita masih dalam proses untuk memperoleh akses SIKN dari ANRI	-
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK dan Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK belum terlaksana sehingga nilainya masih nol.	-

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II maka dihasilkanlah 4 program meliputi 12 Kegiatan dengan 42 sub kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 7 kegiatan dengan 26 sub kegiatan;
2. Program pembinaan perpustakaan, meliputi 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
4. Program Pengelolaan Kearsipan, meliputi 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan;

Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perpustakaan;
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan kearsipan.

Adapun ringkasan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel III-3
Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

			9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 19. Fasilitasi Kunjungan Tamu 20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
JLH	1 Program	7 Kegiatan	26 Sub Kegiatan	DAU

Tabel III-4
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Perpustakaan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota 6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DAU
		2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 10. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

2	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	3. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	11. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 12. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
JLH	2 Program	3 Kegiatan	12 Sub Kegiatan	DAU

Tabel III-5
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Kearsipan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	DAU
		2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	4. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	
JLH	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan	DAU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 maka program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan data yang ditetapkan di dalam Perkada tersebut. Disamping itu Renja PD Tahun 2024 ini juga mempedomani hasil evaluasi Renja PD tahun lalu (2022), dan prakiraan Renja PD tahun berjalan (2023) terutama pada target-target yang belum tercapai dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi tahun mendatang.

Tabel IV.1
Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		Ket.
			2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97	91,97	IKU OPD
2	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,48	48,48	IKU OPD
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,74	56,74	IKU OPD
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	52,94	52,94	IKU OPD
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	18,33	18,33	IKU OPD

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tahun 2023 dan 2024 target untuk Indikator Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat tidak mengalami kenaikan dan didasarkan pada realisasi LKjIP Tahun 2022 sebagai baseline datanya, sedangkan untuk target indikator IKU lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penentuan target ini berdasarkan evaluasi capaian target tahun sebelumnya dan menggunakan proyeksi target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk rencana target kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.2
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target		Ket.
		Tahun 2023	Tahun 2024	
XVI	PERPUSTAKAAN			
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.828	5.120	
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25.513	26.416	
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,00	1,00	
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0.81	0.82	
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15.204	15.657	
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	7	9	
7.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,48	48,48	
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,74	56,74	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target		Ket.
		Tahun 2023	Tahun 2024	
XVII	KEARSIPAN			
1.	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	35,24	35,24	
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	60	
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	52,94	52,94	
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	18,33	18,33	

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sama dengan target tahun 2024. Asumsi-asumsi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan melihat kemampuan/ kapasitas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dan proses penentuan kebutuhan OPD maka ditetapkan Hasil Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV-3
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan,
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket.
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
1.	Program dan kegiatan pada setiap OPD	1	2.815.773.802	7.476.320.000	7	2.815.773.802	7.476.320.000	
2.	Nama urusan sesuai OPD masing-masing							
2.1	Urusan Perpustakaan	2	1.505.353.591	1.320.744.500	3	1.505.353.591	1.320.744.500	
2.2	Urusan Kearsipan	1	107.000.000	851.340.000	2	107.000.000	851.340.000	
Total		4	4.428.127.393	9.648.404.500	12	4.428.127.394	9.648.404.500	

Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV-3 berikut serta pada lampiran Renja PD ini.

Tabel IV-4
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah		100%	2.815.773.802	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	7.476.320.000
		01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100%	21.295.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	247.500.000
		01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	4 Dokumen	7.705.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	4 Dokumen	98.000.000
		01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	3.423.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	28.000.000
		01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	30.000.000
		01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	3.043.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	27.500.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	32.000.000
		01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan	7.124.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Laporan	32.000.000
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	100%	2.449.261.425	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	3.663.220.000
		01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	448 Orang/ Bulan	2.441.794.125	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	448 Orang/ Bulan	3.567.660.000
		01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	12 dokumen	6.102.300	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 dokumen	42.800.000
		01	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	4 dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	4 dokumen	16.480.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan	1.365.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Laporan	19.200.000
		01	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	6.800.000
		01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	13 Laporan	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	13 Laporan	6.880.000
		01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	3.400.000
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100%	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	33.200.000
		01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	21.600.000
		01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Laporan	11.600.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100%	4.743.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	332.000.000
		01	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	2 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 unit	28.000.000
		01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Paket	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 Paket	102.000.000
		01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	3 Dokumen	4.743.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	3 Dokumen	32.000.000
		01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lima Puluh Kota	5 Orang	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	5 Orang	50.000.000
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	15 Orang	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	15 Orang	120.000.000
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100%	54.704.377	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	596.500.000
		01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Paket	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Paket	24.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Paket	98.000.000
		01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Paket	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 Paket	40.000.000
		01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	2 Paket	10.332.900	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 Paket	80.000.000
		01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	5.524.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Paket	52.000.000
		01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Dokumen	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	15.000.000
		01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	3.500.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Laporan	27.500.000
		01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	29.487.777	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Laporan	240.000.000
		01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	5.859.700	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 Dokumen	20.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kab. Lima Puluh Kota	0%	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	1.250.000.000
		01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	4 unit	360.000.000
		01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	10 unit	80.000.000
		01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	5 unit	120.000.000
		01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 Unit	600.000.000
		01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	5 unit	90.000.000
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100%	257.350.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	822.000.000
		01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	500.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Laporan	12.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	76.850.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Laporan	150.000.000
		01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Laporan	180.000.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	12 Laporan	660.000.000
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Lima Puluh Kota	100%	28.420.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	100%	531.900.000
		01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota	7 Unit	25.740.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	14 Unit	174.900.000
		01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 unit	12.000.000
		01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota	9 unit	2.680.000	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	35 unit	35.000.000
		01	2.09	9	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	2 unit	300.000.000
		01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Kegiatan Rutin OPD	1 unit	10.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.505.353.591				1.320.744.500
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina		7,49%	1.396.473.491	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	7,49%	1.089.034.500
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	26 perpustakaan	446.610.350	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	26 perpustakaan	679.000.000
						Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah		15012 judul/ 25500 exemplar				15.657 judul/ 34.716 eksemplar	
						Jumlah Pustakawan/ pengelola perpustakaan yang bersertifikat		8 orang				8 orang	
2	23	02	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Lima Puluh Kota	64 perpustakaan	21.150.800	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	64 perpustakaan	42.000.000
2	23	02	2.02	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Kab. Lima Puluh Kota	30 exsamplar	40.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	100 exsamplar	57.000.000
2	23	02	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Lima Puluh Kota	26 perpustakaan	197.048.250	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	26 perpustakaan	100.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23	02	2.01	6	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	60 orang	50.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	60 orang	100.000.000
2	23	02	2.02	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kab. Lima Puluh Kota	40 Layanan	48.372.500	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	40 Layanan	60.000.000
2	23	02	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Lima Puluh Kota	808 eksemplar	90.038.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	3200 eksemplar	320.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kab. Lima Puluh Kota	5120 pengunjung	949.863.141	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	2548 pengunjung	410.034.500
						Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		48,48%				48,48%	
2	23	02	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Lima Puluh Kota	60 Lokus	263.480.891	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	100 Lokus	200.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23	02	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	2 Perpustakaan	570.840.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	2 Perpustakaan	54.808.500
2	23	02	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Lima Puluh Kota	5 Perpustakaan	75.542.250	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	5 Perpustakaan	65.226.000
2	23	02	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	40.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	50 Orang	90.000.000
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan		100%	108.880.100			100%	231.710.000
2	23	03	2.01		<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan</i>	Kab. Lima Puluh Kota	100%	108.880.100	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	100%	231.710.000
2	23	03	2.01	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Lima Puluh Kota	3 Orang	65.408.500	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	3 Orang	121.710.000
2	23	03	2.01	2	Pengembangan, pengolahan dan pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Lima Puluh Kota	30 Eksemplar	43.471.600	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	30 Eksemplar	110.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				107.000.000				851.340.000
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku		36,07%	107.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	90,16%	458.340.000
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	107.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	8 unit	244.340.000
2	24	02	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Lima Puluh Kota	550 Berkas	107.000.000	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	4750 Berkas	120.000.000
2	24	02	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Lima Puluh Kota	315 Berkas	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	315 Berkas	68.000.000
2	24	02	2.02	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	15 Laporan	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	50 Laporan	56.340.000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	Kab. Lima Puluh Kota	0 unit	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	5 unit	35.000.000
2	24	02	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Lima Puluh Kota	0 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	10 Arsip	35.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Penerapan e- Arsip Terintegrasi	Kab. Lima Puluh Kota	1 instansi	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	1 instansi	179.000.000
2	24	02	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Kab. Lima Puluh Kota	5 Pengguna	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	5 Pengguna	100.000.000
2	24	02	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	0 Laporan	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	52 Laporan	79.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip		100%	0			100%	368.000.000
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	Kab. Lima Puluh Kota	2 unit	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	3 unit	58.000.000
2	24	03	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	420 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	315 Arsip	30.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	03	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Berkas	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	26 Berkas	28.000.000
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	Kab. Lima Puluh Kota	0 instansi	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	6 instansi	170.000.000
		03	2.02	1	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	0 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	200 Arsip	84.000.000
2	24	03	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	0 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	15 Arsip	86.000.000
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	1 unit	20.000.000
2	24	03	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 Daftar	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	1 Daftar	20.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	0 kegiatan	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	4 kegiatan	120.000.000
2	24	03	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota	0 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	3 Arsip	60.000.000
2	24	03	2.05	2	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Kab. Lima Puluh Kota	0 Arsip	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	2 Arsip	60.000.000
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten		0%	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	100%	25.000.000
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	Kab. Lima Puluh Kota	0 SOP	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	1 SOP	25.000.000
2	24	04	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota	0 SOP	0	APBDKAB	Prioritas Pembangunan Daerah	1 SOP	25.000.000
Total									4.428.127.393				9.648.404.500



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

25. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-8
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapelitbang	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbang	II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang	II-17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-46
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Bapelitbang .	III-4
3.3. Program dan Kegiatan	III-6
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kalender Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2024.....	I-3
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapelitbang dan Pencapaian Renstra Bapelitbang s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	II-13
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..... Kabupaten Lima Puluh Kota	II-21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	II-46
Tabel 3.1.	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-2
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang Pada Tahun 2021-2026	III-5
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan Yang Ada Pada Setiap OPD	III-8
Tabel 3.4.	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan	III-9
Tabel 3.5.	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-12
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapelitbang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-1
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-8
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2024, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Bapelitbang sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.



I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bapelitbang oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Bapelitbang tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bapelitbang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.



Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																														
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																			
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																			
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																			
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																			
1	Pelaksanaan Forum PD Bapelitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Bapelitbang																																			
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																			
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																			
F	Penetapan Renja PD 2024																																			
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																			
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																			



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																																



III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bapelitbang berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Bapelitbang tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Bapelitbang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Aula Lantai I Bapelitbang yang dihadiri oleh 42 Perangkat Daerah dan 5 *stakeholders* terkait yaitu, BPS Kab. Lima Puluh Kota, Anggota Satgas Stunting BKKBN, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Forum Kabupaten Sehat Kab. Lima Puluh Kota dan DC PAMSIMAS.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir Renja Bapelitbang dibahas kembali oleh Ketua bersama dengan seluruh Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Bapelitbang guna memastikan bahwa program dan kegiatan serta sub kegiatan telah terakomodir dalam Rancangan Akhir Renja. Rancangan Akhir Renja yang



telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Bapelitbang.

VI. Penetapan Renja PD

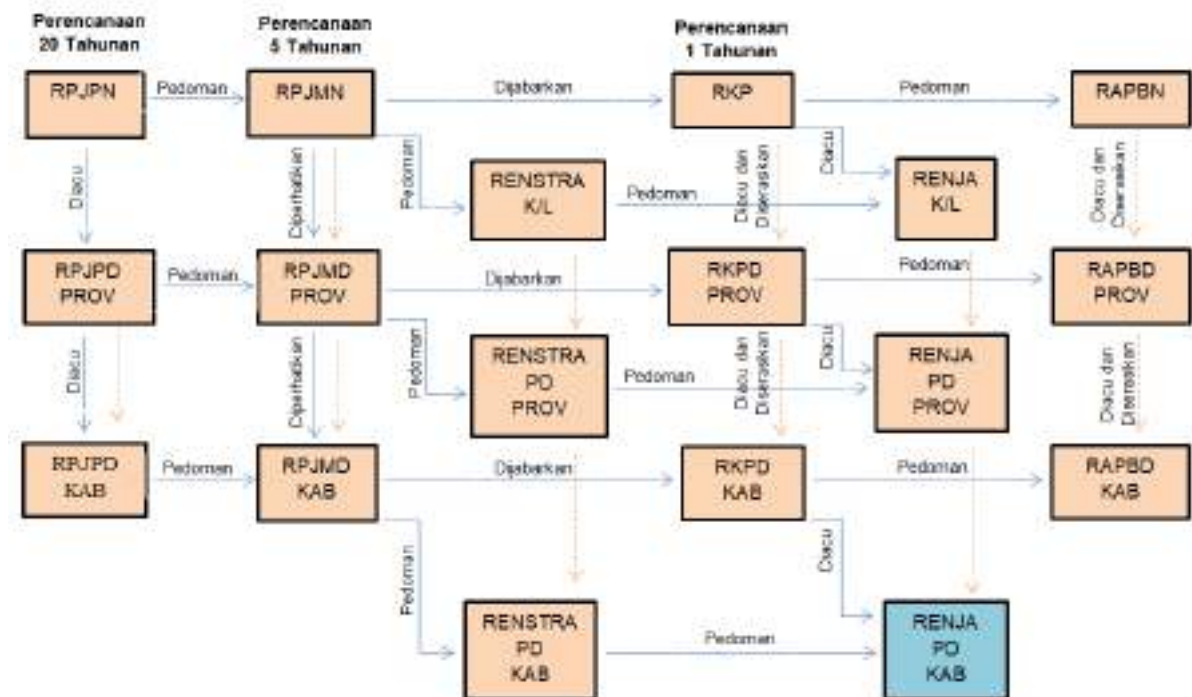
Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

Renja Bapelitbang Tahun 2024 mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Bapelitbang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Bapelitbang juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Bapelitbang tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Bapelitbang, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan



Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bapelitbang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Bapelitbang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bapelitbang untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Bapelitbang ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Bapelitbang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan bidang-bidang di Bapelitbang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapelitbang pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan Tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.



II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapelitbang, analisis kinerja pelayanan Bapelitbang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Bapelitbang

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bapelitbang dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbang



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapelitbang

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun 2022 dan realisasi Renstra Bapelitbang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bapelitbang dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bapelitbang. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapelitbang dan Pencapaian Renstra Bapelitbang sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapelitbang dan
Pencapaian Renstra Bapelitbang Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	79.17%	79.17%	100%	93.06%	46.53%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	50%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	66.67%	33.33%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	50%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100 %	50 %	40 %	100%	83.33%	41.67%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	Daerah	pemerintahan daerah								
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	94.44%	47.22%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	85	98,25	73	81	110,96%	75	75	88,24
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85	94,74	73	81	110,96%	75	75	88,24
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi	85	100	73	81	110,96%	75	75	88,24



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	kelengkapan dan kualitas dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dokumen Perencanaan)								
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan serapan anggaran)	85	70	73	81	110,96%	75	75	88,24



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	85	70	73	81	110,96%	75	75	88,24
5.01.03.2.01	Kegiatan Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85	70	73	83,18	113,95%	75	75	88,24
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85	70	73	75,40	103,29%	75	75	88,24
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan	85	70	73	84.44	115,67%	75	75	88,24



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		Kewilayahan								
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah	105	55	65	66	101,54%	75	75	71,43%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	95 Buku/Profil	50%	15 Buku/Profil	0 Buku/Profil	0%	20 Buku/Profil	20 Buku/Profil	21,05%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan	30%	0%	30%	30%	100%	0%	0%	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		pada perangkat daerah								
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30%	0%	30%	0%	0%	30%	30%	30%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah & terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi di daerah	1700	510	700	791	113%	1000	1000	58,82%



Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bapelitbang selama tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 79.17%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 79.17%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun tidak terealisasi atau realisasi 0%.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi hanya sebesar 50%.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 83.33%, sehingga tingkat realisasi sebesar 83.33%.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 15 Buku/Profil, namun tidak terealisasi atau realisasi 0%, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 30%, namun tidak terealisasi atau realisasi 0%, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran

II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 7. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 30%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 30%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
- III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bapelitbang selama tahun anggaran 2022, antara lain:
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi



pencapaian indeksnya adalah sebesar 84,53 sehingga tingkat realisasinya sebesar 115,79%. Adapun kegiatan program ini yang melebihi target capaian antara lain:

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 81 sehingga tingkat realisasinya sebesar 110,96%
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 81 sehingga tingkat realisasinya sebesar 110,96%
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaiannya indeksnya sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 81 sehingga tingkat realisasinya sebesar 110,96%.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 81 sehingga tingkat realisasinya sebesar 110,96%.. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain :
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 83,18 sehingga tingkat realisasinya sebesar 113,95%.
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 75,40 sehingga tingkat realisasinya sebesar 103,29%.



- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 73, realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 84,44 sehingga tingkat realisasinya sebesar 115,67%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, direncanakan target pencapaiannya inovasi daerah sebanyak 65 inovasi, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 66, sehingga tingkat realisasi tercapai sebesar 101,54%. Adapun kegiatan pada program ini yang melebihi targetnya adalah :
- a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, direncanakan target pencapaian indeks inovasi daerah sebesar 700, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 791, sehingga tingkat realisasi sebesar 113%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbang

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila diisuesuaikan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapelitbang.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam IKD dan IKU, baik Kepala Daerah maupun IKU PD disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD (BAPE LITBA NG)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan Ekonomi		√			2,99	4,28	4,62	4,72	4,04		4,62	4,72	
2	Angka kemiskinan		√			6,90	6,77	6,65	6,52	6,59		6,65	6,52	
3	Jumlah Penduduk Miskin		√			26,95	26,71	26,44	26,16	26,00		26,44	26,16	
4	PDRB per kapita (ADHK)		√			30,49	31,32	32,14	32,97	30,62		32,14	32,97	
5	PDRB per kapita (ADHB)		√			44,19	46,02	47,85	49,68	46,09		47,85	49,68	
6	Pengeluaran per kapita		√			9.760	9.931	10.140	10.364	10.035		10.140	10.364	
7	Indeks Gini		√			0,237	0,234	0,230	0,225	0,208		0,230	0,225	
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		√			93,1	93,23	93,35	93,48	93,41		93,35	93,48	
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		√			70,23	70,61	70,98	71,36	70,28		70,98	71,36	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD (BAPE LITBA NG)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
10	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		√			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	
11	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		√			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	
12	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		√			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	
13	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		√			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
14	Persentase implementasi rencana kelitbangan		√			20	20	20	20			20	20	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD (BAPE LITBA NG)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		√			100	100	100	100			100	100	
16	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		√			25,58	27,91	30,23	32,56			30,23	32,56	
17	Persentase kebijakan inovasi yang Diterapkan di daerah.		√			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
18	Indeks Inovasi Daerah			√		700 (Inovatif)	1000 (Inovatif)	1200 (Terinovatif)	1500 (Terinovatif)	791 (Inovatif)		1200 (Terinovatif)	1500 (Terinovatif)	
19	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)				√	B	B	B	BB	BB		B	BB	
20	Indeks Kualitas Perencanaan				√	73	75	78	80	81		78	80	
21	Jumlah Inovasi Daerah				√	65	75	85	95	66		85	95	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU KD	IKU PD (BAPE LITBA NG)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				√	87,98	89,97	91,97	93,96	88,46		91,97	93,96	
23	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				√	100	100	100	100	80%		100	100	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapelitbang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapelitbang terhadap *stakeholdersnya*
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapelitbang
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbang
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Kinerja pelayanan Bapelitbang pada tahun 2022 sudah cukup optimal.

Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD RI.

Penerapan aplikasi SIPD RI untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Bapelitbang dalam peningkatan pelayanan pada stakeholders. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana.

2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui *Whatsapp group*.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang di Bapelitbang. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan.

